PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK

TGX



Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 3 Tahun 2025 Tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

2025-2029

KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjtnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

(2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan sistematika penjabaran yang terdiri dari:
   a. BAB I berisi tentang pendahuluan;
   b. BAB II berisi tentang gambaran umum Daerah;
   c. BAB III berisi tentang Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
   d. BAB IV berisi tentang program PD dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. BAB V berisi tentang Penutup.

(2) Sistematika penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKPD.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; dan/atau
   b. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi:
      1. bencana alam;
      2. goncangan politik;
      3. krisis ekonomi;
      4. konflik sosial budaya; dan/atau
      5. gangguan keamanan,

(2) RPJMD tidak dapat diubah apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dalam pelaksanaan RPJMD dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Seluruh ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam RPJMD dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD.

(2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut akan dimuat/dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5), dinyatakan berakhir periodesasinya; dan

b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 13) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 161-3/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223199203 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program Perangkat Daerah disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

RPJMD yang telah disusun selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain itu

RPJMD juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 143

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I**	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	6
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	11
	1.5 Sistematika Penulisan	I	12
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**	**II**	**1**
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	51
	2.1.3 Aspek Daya Saing	II	81
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	115
	2.1.5 Standar Pelayanan Minimal	II	184
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II	193
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	194
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	236
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	241
	2.2.4 Alternatif Pendanaan	II	265
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	II	268
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	268
	2.3.2 Isu Strategis	II	286
	2.3.3 Telaah Isu Strategis Regional	II	298
	2.3.4 Isu Strategis Kabupaten Trenggalek	II	308
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**III**	**1**
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi	III	1
	3.1.2 Misi	III	6
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III	14
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah	III	27
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	28
	3.2.2 Program Prioritas Daerah	III	57
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	**IV**	**1**
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV	304
	4.2.1 Penetapan Indikator Kinerja	IV	304
BAB V	**PENUTUP**	**V**	**1**
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V	2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	7
Gambar II.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Trenggalek	II	2
Gambar II.2	Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek	II	4
Gambar II.3	Peta Geologi Kabupaten Trenggalek	II	6
Gambar II.4	Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek	II	8
Gambar II.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek	II	9
Gambar II.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Trenggalek	II	11
Gambar II.7	Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II	17
Gambar II.8	Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2029	II	17
Gambar II.9	Peta Status Daya Dukung Pangan Tahun 2023	II	22
Gambar II.10	Peta Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Tahun 2029	II	23
Gambar II.11	Peta Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek	II	25
Gambar II.12	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Trenggalek	II	31
Gambar II.13	Jaringan Jalan Penghubung antar Kecamatan	II	44
Gambar II.14	Peta Kebutuhan Trayek Angkutan	II	45
Gambar II.15	Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah	II	86
Gambar II.16	Metodologi Pengukuran Indeks Kota Hijau (IKH) Kabupaten Trenggalek	II	101
Gambar II.17	Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek	II	102
Gambar II.18	Kerangka Indeks Daya Saing Daerah	II	126
Gambar II.19	Kerangka Indeks Daya Saing Daerah Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Trenggalek	II	269
Gambar II.20	Isu Global	II	287
Gambar II.21	Isu Strategis Nasional	II	290
Gambar III.1	Roadmap Pembangunan Kabupaten Trenggalek	III	2
Gambar III.2	Visi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029	III	3
Gambar III.3	Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Visi RPJMN dan Provinsi Jawa Timur	III	6
Gambar III.4	Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029	III	8
Gambar III.5	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Tujuan Negara dan SDG’s	III	11
Gambar III.6	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Misi RPJMN dan Provinsi Jawa Timur	III	13
Gambar III.7	Konsep Pembangunan Kabupaten Trenggalek 2025-2030	III	28
Gambar III.8	Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Trenggalek	III	29
Gambar III.9	Komponen Pembangunan Kabupaten Trenggalek	III	30
Gambar III.10	Icon Program Kabupaten Trenggalek	III	58
Gambar III.11	Konsep Kresna dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek	III	66
Gambar III.12	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Proyek Strategis Kabupaten Trenggalek	III	76
Gambar III.13	Pelaksanaan Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Trenggalek	III	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Luas Masing-Masing Penggunaan Lahan (ha)	II	10
Grafik II.2	Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Padi di Kabupaten Trenggalek	II	18
Grafik II.3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	33
Grafik II.4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	35
Grafik II.5	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	II	36
Grafik II.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	41
Grafik II.7	Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	50
Grafik II.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II	56
Grafik II.9	Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Trenggalek terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II	57
Grafik II.10	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	59
Grafik II.11	Perbandingan PDB Perkapita Nasional dengan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur dan PDRB Kabupaten Trenggalek (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	II	60
Grafik II.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	61
Grafik II.13	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	62
Grafik II.14	Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	63
Grafik II.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II	64
Grafik II.16	Pencapaian Strata Desa Siaga Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	71
Grafik II.17	Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	72
Grafik II.18	Persentase Tenaga Kerja (Penerima Upah) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	75
Grafik II.19	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	81
Grafik II.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	85
Grafik II.21	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II	88
Grafik II.22	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	89
Grafik II.23	Realisasi Investasi (Triliun Rp) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	92
Grafik II.24	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	97
Grafik II.25	Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	98
Grafik II.26	Tingkat Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	103
Grafik II.27	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	104
Grafik II.28	Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	106
Grafik II.29	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	107
Grafik II.30	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	108

Grafik II.31	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	109
Grafik II.32	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II	111
Grafik II.33	Incremental Capital Output Rasio (ICOR) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	112
Grafik II.34	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Trenggalek 2020-2024 (% PDRB)	II	113
Grafik II.35	Tingkat Kesempatan Kerja Kab. Trenggalek Tahun 2020 – 2024	II	115
Grafik II.36	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2024	II	116
Grafik II.37	Persentase Penyelesaian Konflik (%) Tahun 2020-2024	II	117
Grafik II.38	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	118
Grafik II.39	Hasil Penilaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	119
Grafik II.40	Realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2022 - 2024	II	121
Grafik II.41	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	122
Grafik II.42	Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	123
Grafik II.43	Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	125
Grafik II.44	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	131
Grafik II.45	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	131
Grafik II.46	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024	II	133
Grafik II.47	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	135
Grafik II.48	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	137
Grafik II.49	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	II	140
Grafik II.50	Angka Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023	II	141
Grafik II.51	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	142
Grafik II.52	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	143
Grafik II.53	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024	II	144
Grafik II.54	Penurunan Emisi GRK kumulatif (tonCO2eq) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	147
Grafik II.55	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	150
Grafik II.56	Persentase Ketersediaan Prasarana Perlengkapan Jalan	II	152
Grafik II.57	Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	153
Grafik II.58	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	154
Grafik II.59	Realisasi Investasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	II	155
Grafik II.60	Nilai Hasil Penilaian Aspek Keamanan SPBE/ Pemerintahan Digital oleh Kementerian PAN RB	II	158
Grafik II.61	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	161
Grafik II.62	Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	163

Grafik II.63	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	165
Grafik II.64	Jumlah Wisatawan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	166
Grafik II.65	Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	168
Grafik II.66	NTPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	170
Grafik II.67	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	173
Grafik II.68	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	175
Grafik II.69	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	176
Grafik II.70	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	177
Grafik II.71	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	II	178
Grafik II.72	Indeks Integritas (Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	183
Grafik II.73	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	197
Grafik II.74	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	197
Grafik II.75	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	199
Grafik II.76	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (%)	II	200
Grafik II.77	Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	201
Grafik II.78	Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	201
Grafik II.79	Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (%)	II	202
Grafik II.80	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	203
Grafik II.81	Perkembangan Belanja Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	208
Grafik II.82	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	208
Grafik II.83	Perkembangan Kontribusi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	209
Grafik II.84	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	212
Grafik II.85	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	217
Grafik II.86	Target Komposisi PAD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030	II	247
Grafik II.87	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	II	247
Grafik II.88	Target Belanja Operasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)	II	251
Grafik II.89	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030	II	252
Grafik II.90	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)	II	253
Grafik II.91	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	272
Grafik II.92	PDRB Perkapita (Ribu) Atas Dasar Harga Berlaku daerah sekitar Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	275
Grafik II.93	Perbandingan IPM (LF 2020) Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Terdekat Tahun 2024	II	277

Grafik II.94 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024 II 279

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Trenggalek Menurut Kecamatan Tahun 2024	II	3
Tabel II.2	Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek	II	4
Tabel II.3	Realisasi Investasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	II	5
Tabel II.4	Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	7
Tabel II.5	Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	9
Tabel II.6	Kategori Daya Dukung Lahan Terbangun	II	14
Tabel II.7	Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II	15
Tabel II.8	Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2029	II	16
Tabel II.9	Daya Dukung Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024	II	18
Tabel II.10	Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	19
Tabel II.11	Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	II	20
Tabel II.12	Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek	II	24
Tabel II.13	Potensi Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek	II	26
Tabel II.14	Potensi Kebutuhan Air Kabupaten Trenggalek	II	27
Tabel II.15	Proyeksi Status Daya Dukung Air	II	28
Tabel II.16	Koefisien Lindung	II	31
Tabel II.17	Koefisien Lindung Kabupaten Trenggalek	II	31
Tabel II.18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	37
Tabel II.19	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024	II	39
Tabel II.20	Kejadian Bencana Alam Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	42
Tabel II.21	Trayek Angkutan	II	45
Tabel II.22	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	46
Tabel II.23	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	46
Tabel II.24	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	47
Tabel II.25	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	48
Tabel II.26	Rasio Ketergantungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	49
Tabel II.27	Proyeksi Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	II	51
Tabel II.28	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	52
Tabel II.29	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	54
Tabel II.30	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Trenggalek (miliar rupiah), 2020–2024	II	55
Tabel II.31	Indikator Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	57
Tabel II.32	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	64

Tabel II.33	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2024	II	66
Tabel II.34	Indikator AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	70
Tabel II.35	Jumlah Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	74
Tabel II.36	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	76
Tabel II.37	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	77
Tabel II.38	Capaian Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	80
Tabel II.39	Angka Ketergantungan (Persen) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	82
Tabel II.40	Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (%)	II	84
Tabel II.41	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	87
Tabel II.42	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II	87
Tabel II.43	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	89
Tabel II.44	Klasifikasi Skor Indeks Ekonomi Hijau	II	90
Tabel II.45	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	91
Tabel II.46	Realisasi Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	93
Tabel II.47	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2024	II	94
Tabel II.48	Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2025	II	96
Tabel II.49	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	II	99
Tabel II.50	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	105
Tabel II.51	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II	110
Tabel II.52	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II	112
Tabel II.53	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kabupaten Trenggalek 2020-2024	II	114
Tabel II.54	Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	123
Tabel II.55	Indikator Trantibum, Kebakaran dan Aksi HAM di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	124
Tabel II.56	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2024	II	127
Tabel II.57	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	128
Tabel II.58	Skor Literasi dan Numerasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	129
Tabel II.59	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Trenggalek	II	135
Tabel II.60	Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	136
Tabel II.61	Capaian Indikator Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	138
Tabel II.62	Capaian Indikator Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	139

Tabel II.63	Tabel Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan di Kabupaten Trenggalek	II	144
Tabel II.64	Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	II	146
Tabel II.65	Emisi CO2 (ton CO2) Kabupaten Trenggalek	II	147
Tabel II.66	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	148
Tabel II.67	Jumlah Desa berdasarkan Kategori Desa Tahun 2020-2024 di Kabupaten Trenggalek	II	148
Tabel II.68	Jumlah BUMDes berdasarkan Kategori BUMDes Tahun 2020-2024 di Kabupaten Trenggalek	II	149
Tabel II.69	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	156
Tabel II.70	Persentase Budaya yang Dikembangkan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	158
Tabel II.71	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	160
Tabel II.72	Daftar Arsiparis Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	162
Tabel II.73	Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	163
Tabel II.74	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Agregat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	164
Tabel II.75	Nilai Tukar Petani di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	167
Tabel II.76	Nilai Tukar Petani Agregat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	168
Tabel II.77	NTPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	169
Tabel II.78	NTPT Agregat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	II	170
Tabel II.79	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 – 2024	II	172
Tabel II.80	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	173
Tabel II.81	Data Penempatan Transmigran Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	173
Tabel II.82	Persentase Transmigran yang Tidak Meninggalkan Daerah Penempatan	II	173
Tabel II.83	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	180
Tabel II.84	Indeks Sistem Merit Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	180
Tabel II.85	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Tahun 2020-2024	II	181
Tabel II.86	Kajian Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	182
Tabel II.87	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024	II	185
Tabel II.88	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024	II	186
Tabel II.89	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024	II	188
Tabel II.90	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024	II	189
Tabel II.91	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024	II	190
Tabel II.92	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024	II	191
Tabel II.93	Skala Interval Otonomi Fiskal	II	195
Tabel II.94	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Trenggalek, Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	195

Tabel II.95	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	205
Tabel II.96	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	209
Tabel II.97	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	210
Tabel II.98	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	214
Tabel II.99	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (rupiah)	II	218
Tabel II.100	Neraca Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	225
Tabel II.101	asio Lancar Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	232
Tabel II.102	Rasio Hutang Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	233
Tabel II.103	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	234
Tabel II.104	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	235
Tabel II.105	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	236
Tabel II.106	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	237
Tabel II.107	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	239
Tabel II.108	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	240
Tabel II.109	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	241
Tabel II.110	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)	II	248
Tabel II.111	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)	II	255
Tabel II.112	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)	II	260
Tabel II.113	Proyeksi APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)	II	261
Tabel II.114	Permasalahan Perurusan Kabupaten Trenggalek	II	280
Tabel II.115	Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Trenggalek	II	295
Tabel II.116	Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 dengan Isu RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025-2045	II	300
Tabel II.117	Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu Strategis RPJMD 2025-2029	II	302
Tabel II.118	Teknik Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Trenggalek	II	312
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029	III	14
Tabel III.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	III	17
Tabel III.3	Strategi dan Penahapan Pembangunan Kabupaten Trenggalek	III	32
Tabel III.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	III	34
Tabel III.5	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	III	77
Tabel III.6	Program Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Tabel III.1 RTRW Kabupaten Trenggalek	III	103
Tabel III.7	Sinkronisasi Arahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur terhadap Proyek Strategis Kabupaten Trenggalek	III	107
Tabel IV.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030	IV	2

Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030	IV	305
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030	IV	307

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Trenggalek yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah dengan keunikan dan potensi yang sangat beragam di berbagai sektor. Secara geografis, Trenggalek diberkahi sumber daya alam yang beragam, mulai dari potensi pariwisata, potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor pertanian, komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, ketela pohon. Tanaman Hortikultura adalah durian, manggis, alpukat, cabai, jahe dan bawang merah, serta tanaman perkebunan meliputi kopi, kakao, kelapa, cengkeh, tembakau dan nilam. Sedangkan sektor peternakan merupakan pendukung dengan populasi ternak seperti sapi, kambing, dan unggas. Adapun untuk sektor perikanan tangkap komoditas unggulan yaitu ikan tuna, tongkol dan cakalang sedangkan sektor perikanan budidaya komoditas unggulan ikan lele, patin dan gurami.

Selain itu, industri kecil dan menengah juga memainkan peran penting, dengan produk-produk khas seperti kerajinan bambu, kayu, batik, dan makanan olahan seperti keripik tempe yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan internasional. Kemudian pada sektor pariwisata di Kabupaten Trenggalek menawarkan daya tarik luar biasa, baik daya tarik wisata alam, budaya maupun buatan. Daya tarik wisata alam yang menonjol antara lain Pantai Pasir Putih Karanggongso, Pantai Prigi dan Gua Lowo. Daya tarik wisata budaya antara lain festival jaranan, Upacara Adat Ngetung Batih, Labuh Laut Larung Sembonyo dan Kuliner Ayam Lodho. Adapun daya tarik wisata buatan antara lain wisata olah raga, PHD Nusantara dan Agrowisata Dilem Wilis. Dengan perpaduan antara keunggulan alam, potensi ekonomi, dan budaya lokal, Kabupaten Trenggalek memiliki peluang besar untuk terus maju dan berkembang sebagai wilayah yang makmur dan sejahtera.

Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki, yang harus diawali dengan perencanaan pembangunan daerah yang matang dan komprehensif. Perencanaan pembangunan daerah menjadi fondasi utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi ekonomi dan sosial budaya yang ada. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Perencanaan yang terintegrasi dan partisipatif memungkinkan terciptanya sinergi antar sektor pembangunan, menghindari tumpang tindih program, dan memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang optimal akan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan.

Dengan dilantiknya Bapak Mochamad Nur Arifin sebagai Bupati dan Bapak Syah M. Nata Negara sebagai Wakil Bupati, yang diselenggarakan 20 Februari tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Trenggalek periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Trenggalek periode 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap ke 1 (pertama), yang mana RPJMD ini merupakan tahap awal dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 memegang peranan vital dalam mencapai pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, di mana dokumen ini akan menjadi landasan strategis selama lima tahun ke depan untuk mengarahkan kebijakan dan program pembangunan. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta memuat strategi, kebijakan, dan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan potensi daerah, dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan adanya RPJMD yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis data, diharapkan pembangunan di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu *Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas, Holistik-Tematik, Integratif, Spasial.* Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan. Pendekatan teknokratik digunakan untuk memastikan bahwa

program pembangunan berbasis data dan analisis yang kuat. Pendekatan partisipatif dan politis memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu wadah utama dalam pelibatan ini adalah forum Musrenbang, yang akan mengakomodasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga memastikan bahwa prioritas pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan sektor terkait. Pelaksanaan Musrenbang menjadi momen penting dalam tahap penyusunan, di mana masyarakat, akademisi, dan sektor swasta diberikan ruang untuk memberikan masukan terkait prioritas pembangunan dan program yang akan dijalankan. Dengan demikian, keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tahap akan memastikan bahwa RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi yang mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman komprehensif yang tidak hanya mengatur arah pembangunan daerah, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dokumen ini diharapkan mampu menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program-program yang realistis dan terukur, dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek. RPJMD ini harus mampu mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan secara sinergis, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

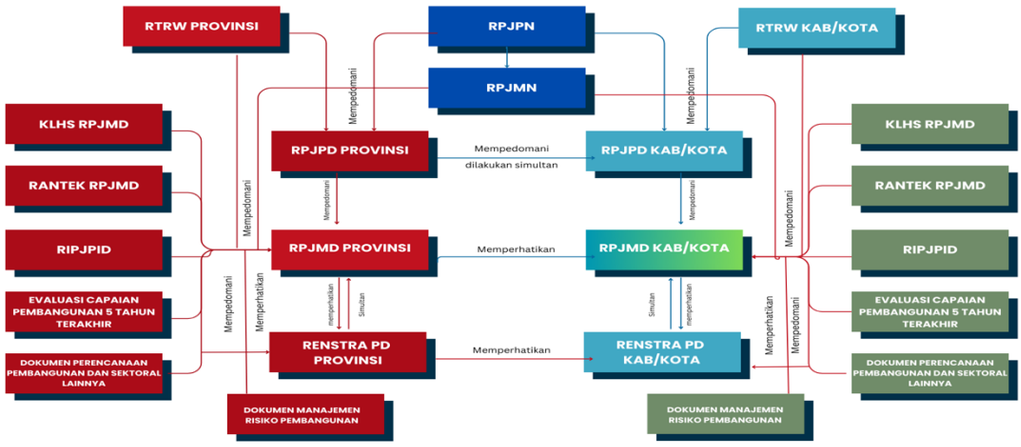
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032; dan
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan

program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Inmendagri No 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan keterkaitan antar dokumen perencanaan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sangat erat karena keduanya berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. RPJMD Kabupaten Trenggalek merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah terpilih. Sementara itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) adalah rencana strategis lima tahunan dari pemerintah pusat yang mengarahkan pembangunan nasional dan regional dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang lebih besar. Dalam konteks ini, RPJMD Trenggalek harus mengakomodasi dan mengintegrasikan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN, sehingga mendukung pencapaian tujuan nasional.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dengan provinsi. Keselarasan ini tidak hanya berupa dokumen formal, tetapi juga diwujudkan dalam mekanisme koordinasi yang spesifik, seperti sinkronisasi program melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

di tingkat provinsi dan kabupaten, serta pembentukan tim teknis gabungan untuk memetakan prioritas pembangunan. Praktik ini memungkinkan Kabupaten Trenggalek memastikan bahwa kebijakan dan program lokalnya mendukung agenda strategis Jawa Timur.

Secara praktis, keselarasan ini diwujudkan melalui identifikasi program prioritas Kabupaten Trenggalek yang sejalan dengan sasaran provinsi. Contoh konkret dapat dilihat dalam pembangunan infrastruktur regional, seperti jalan penghubung antar-kabupaten untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah selatan Jawa Timur. Dalam konteks Trenggalek, pembangunan jalan lintas selatan (JLS) akan meningkatkan konektivitas daerah pedesaan dengan kawasan industri atau wisata di kabupaten tetangga. Selain itu, program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) provinsi, seperti pelatihan vokasional berbasis teknologi dan digitalisasi usaha mikro, dapat diadopsi di Trenggalek untuk mendukung sektor agribisnis dan pariwisata lokal.

Sinergi ini memastikan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dalam setiap program. Contohnya, pengembangan pariwisata berkelanjutan di Trenggalek selaras dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup provinsi, sekaligus mengoptimalkan potensi wisata daerah untuk mendukung ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan indikator makro provinsi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Trenggalek.

Integrasi ini memperkuat distribusi pembangunan yang merata di seluruh Jawa Timur, memastikan bahwa daerah seperti Trenggalek tidak tertinggal dalam pembangunan ekonomi maupun sosial. Di sisi lain, kontribusi Trenggalek terhadap tujuan pembangunan provinsi tetap diimbangi dengan prioritas kesejahteraan masyarakat lokal, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan potensi kearifan lokal.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Hubungan antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Trenggalek sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dirancang untuk menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan yang selaras dengan visi jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga menjadi tahapan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berjangka panjang, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Trenggalek memprioritaskan program-program strategis yang mendukung visi jangka panjang RPJPD, seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pencapaian tujuan

jangka panjang, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Keselarasan antara RPJMD dan RPJPD dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik tahunan maupun lima tahunan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD tetap berada dalam jalur yang mendukung arah pembangunan jangka panjang. Dengan adanya sistem evaluasi ini, setiap kebijakan dan program dapat disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang, sehingga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Trenggalek dapat terjaga dan visi jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD dapat tercapai secara efektif.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Trenggalek

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Trenggalek mencerminkan integrasi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan penataan ruang wilayah yang bersifat jangka panjang. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfokus pada program-program prioritas selama lima tahun, sementara RTRW adalah dokumen perencanaan tata ruang yang menjadi dasar pengelolaan ruang wilayah selama 20 tahun. Sinergi antara kedua dokumen ini diperlukan agar kebijakan pembangunan dalam RPJMD sejalan dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, sehingga pembangunan yang dilakukan bersifat terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kapasitas serta potensi ruang wilayah.

Dalam konteks Kabupaten Trenggalek, dokumen RTRW memberikan kerangka spasial untuk pengembangan wilayah, mencakup peruntukan kawasan permukiman, industri, pertanian, kehutanan, konservasi, hingga pariwisata. Sehubungan dengan proses revisi RTRW Kabupaten Trenggalek yang saat ini sedang berlangsung, maka kebijakan, strategi dan program yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 harus sinkron dengan kebijakan, strategi dan program dalam perda RTRW berlaku dan rancangan kebijakan, strategi dan program dalam revisi RTRW. RPJMD 2025-2029 merupakan periode terakhir RTRW berlaku. Sesuai dengan matrik indikasi program utama pembangunan pada RTRW berlaku di periode terakhir memberikan fokus arahan pada:

1. Pemeliharaan jaringan jalan;
2. Pengembangan TPST;
3. Pengembangan IPLT;
4. Monev pelaksanaan rencana induk drainase;
5. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan air minum perpipaan;
6. Pemeliharaan jalur evakuai bencana;
7. Pengembangan RTH perkotaan;
8. Monev revitalisasi pertanian;
9. Pengembangan lahan abadi pertanian;
10. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa;
11. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
12. Pengembangan kawasan pesisir.

Sementara itu pada revisi RTRW, indikasi program penataan ruang-nya sebagaian besar beririsan/sama/masih relevan dengan indikasi program RTRW berlaku. Adapun beberapa indikasi program pada revisi RTRW di periode pertama yang memberikan fokus arahan strategis antara lain:

1. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan industri kemaritiman;
2. Pengembangan dan pemaduan rute trayek angkutan bus serta angkutan perdesaan;
3. Pengembangan sistem jaringan drainase kawasan rawan banjir;
4. Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
5. Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi.

Dengan demikian pada prinsipnya RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen operasional pembangunan, perlu merujuk pada RTRW untuk memastikan bahwa program pembangunan seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan sektor ekonomi, dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan zonasi, daya dukung lingkungan, dan fungsi ruang yang telah dirancang. Keselarasan ini juga bertujuan untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang antarwilayah. Dengan sinergi yang baik antara RPJMD dan RTRW, Kabupaten Trenggalek dapat mencapai pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.

e. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek.

f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-RPJMD memiliki keterkaitan yang sangat erat. KLHS-RPJMD berfungsi sebagai instrumen penting yang memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 20 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan RPJMD, KLHS wajib diintegrasikan ke dalam RPJMD untuk memberikan panduan yang holistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Melalui KLHS, potensi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan dalam RPJMD dapat diidentifikasi secara dini. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah mitigasi yang efektif dan strategi pengelolaan risiko lingkungan yang terukur. KLHS juga memberikan rekomendasi yang berbasis data ilmiah guna memastikan bahwa pembangunan daerah tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, integrasi KLHS ke dalam RPJMD menjadi upaya strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Trenggalek.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode lima tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kabupaten Trenggalek. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RIPJPID harus selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakomodir dokumen rencana sektoral pembangunan. Sehingga rekomendasi/masukan kebijakan pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan/perencanaan sektoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai

panduan dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan selaras dengan visi serta misi kepala daerah terpilih, sekaligus memastikan sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

b. Tujuan

1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Trenggalek Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Trenggalek Tahun 2025-2045;
4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
8) Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama 5 (lima) tahun;
9) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur; dan
10) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Trenggalek secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memberikan arahan transisi untuk memastikan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Di dalamnya juga tercantum panduan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 agar sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah dilaksanakan di berbagai lini kehidupan masyarakat dimana secara umum mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya percepatan pembangunan tersebut masih diperlukan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk memandu dan mengelola pertumbuhan serta perkembangan suatu daerah dalam berbagai aspek. Esensi dari perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai aspek penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi. Dalam konteks ini, perencanaan memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang dirumuskan saat ini merupakan dokumen yang dibuat dengan pendekatan yang lebih terfokus pada data dan analisis kuantitatif serta fenomena dan potret hasil pelaksanaan pembangunan selama ini. Dokumen ini akan merumuskan kebijakan dalam bentuk rekomendasi kepada pasangan calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek pada pembangunan periode 2025-2029. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan akan tersusun strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Trenggalek.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki signifikansi strategis, terutama dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi pembangunan daerah. Penguraian aspek geografi akan memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik wilayah Kabupaten Trenggalek, termasuk luas dan batas wilayah, letak geografis, topografi, dan klimatologi. Selain itu, analisis ini akan mencakup berbagai potensi pengembangan wilayah yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Trenggalek akan memaparkan ukuran, struktur, serta distribusi/persebaran penduduk, baik dalam konteks *series* maupun kewilayahan. Analisis demografi ini sangat penting mengingat penduduk adalah pelaksana utama pembangunan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara demografi dan aspek-aspek lain perlu diperhatikan dengan seksama untuk memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

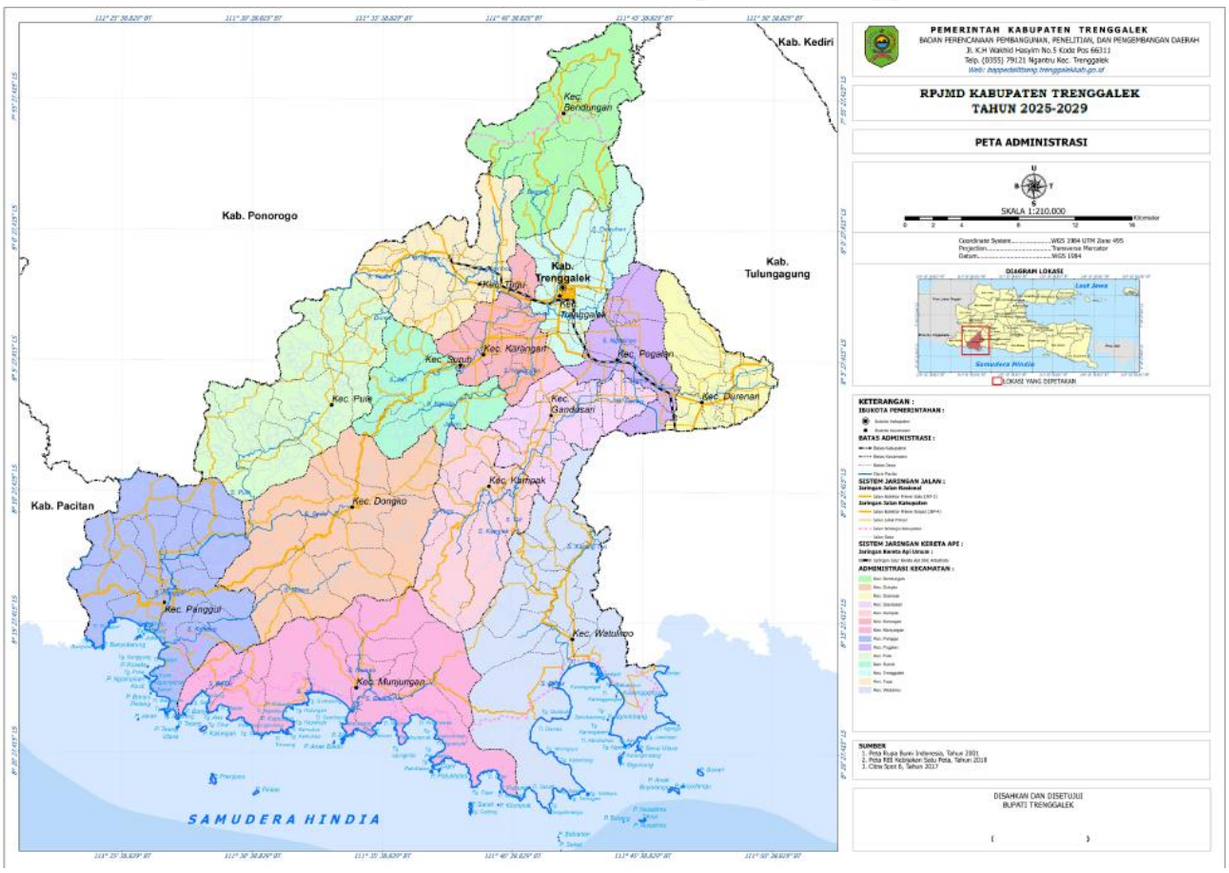
a. Letak Astronomis dan Kondisi Geografi

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24- 112°11' Bujur Timur dan 7°53'-8°34' Lintang Selatan. Kabupaten Trenggalek berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten tetangga. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia;
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo;

Gambar II.1

Peta Batas Administrasi Kabupaten Trenggalek



Sumber: Bappedalitbang Kab.Trenggalek, 2025

Secara administratif, Kabupaten Trenggalek memiliki 14 Kecamatan serta 5 Kelurahan dan 152 Desa dengan 540 dusun/lingkungan dan 1.260 rukun warga. Dengan luas wilayah mencapai 1.261,40 km^2 atau sekitar 2,63 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang seluas 47.963 km^2. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Trenggalek Menurut Kecamatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (km^2)	Persentase (%)
1.	Panggul	17	66	155	521	131,56	10,43
2.	Munjungan	11	44	66	356	154,80	12,27
3.	Watulimo	12	36	79	336	154,44	12,24
4.	Kampak	7	23	76	251	79,00	6,26
5.	Dongko	10	39	115	459	141,20	11,19
6.	Pule	10	34	93	379	118,12	9,36
7.	Karangan	12	32	71	296	50,92	4,04
8.	Suruh	7	27	41	189	50,72	4,02
9.	Gandusari	11	49	125	328	54,96	4,36
10.	Durenan	14	47	81	313	57,16	4,53
11.	Pogalan	10	36	121	319	41,80	3,31
12.	Trenggalek	13	33	74	244	61,16	4,85
13.	Tugu	15	45	99	324	74,72	5,92
14.	Bendungan	8	29	64	202	90,84	7,2
Kabupaten Trenggalek		**157**	**540**	**1.260**	**4.517**	**1.261,40**	**100**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

b. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi Gunung/Pegunungan/bukit/Perbukitan, dimana lebih dari 40% seluas ±28.378,11 ha, 25 – 40% seluas 32.076,13 ha, dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0–2 % adalah ± 24.529,76 ha. Dari 14 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang mayoritas berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan yang sebagian besar terletak di bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan 9 Kecamatan lainnya mayoritas berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

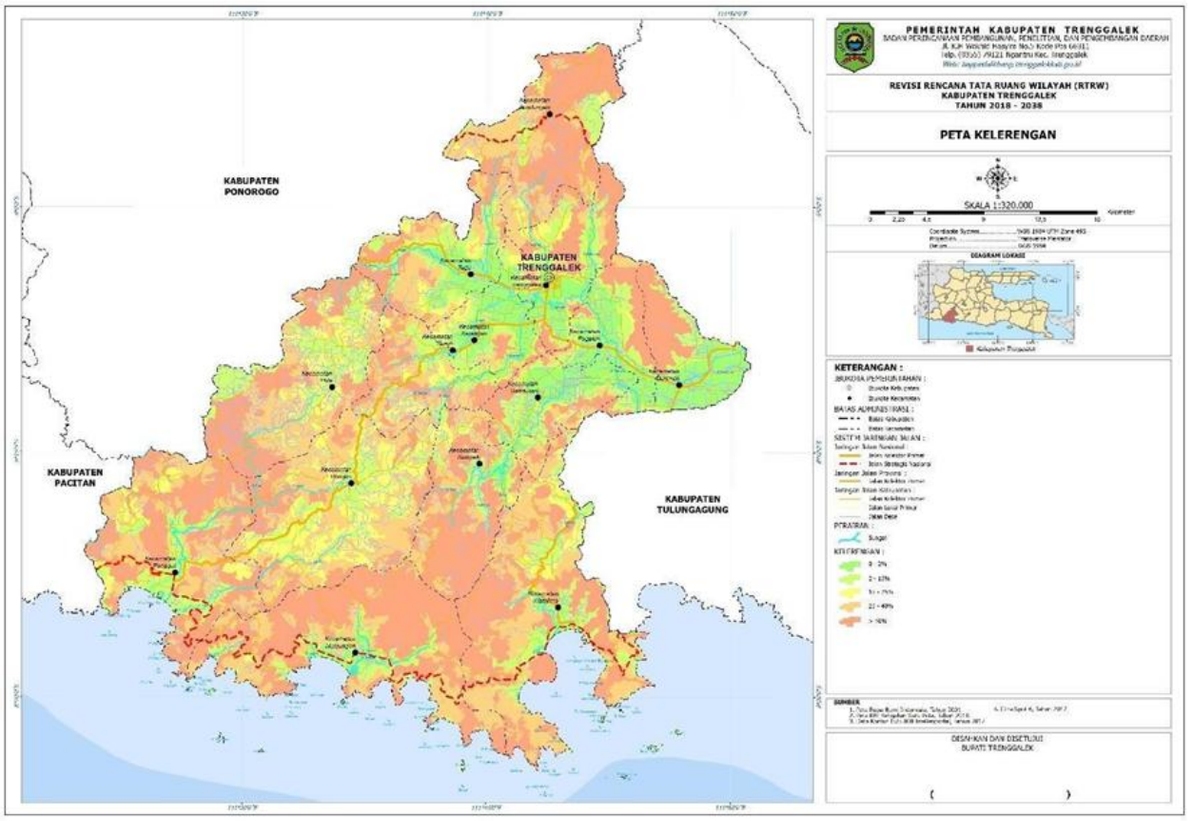
Dua kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar bila dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Munjungan dengan luas 15.480 Ha (12,27%) dan Kecamatan Watulimo dengan luas 15.444 Ha (12,24%) yang merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan kecamatan dengan ukuran luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pogalan dengan luas 4.180 Ha (3,31%). Selengkapnya mengenai tingkat kelerengan pada Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek

No	Tingkat Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0 - 2 %	Datar	24.529,76	19,68
2	2 - 15 %	Datar	17.761,62	14,25
3	15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	21.926,23	17,59
4	25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	32.076,13	25,73
5	>40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	28.378,11	22,76

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2019

Gambar II.2
Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2019

Kecamatan dengan ketinggian wilayah yang cukup rendah adalah Kecamatan Panggul ketinggian hanya mencapai 7 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan kecamatan dengan ketinggian wilayah yang tertinggi adalah Kecamatan Pule dengan ketinggian 706 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Tabel II.3
Ketinggian Wilayah (mdpl) di Kabupaten Trenggalek
Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi WIlayah (mdpl)
1.	Panggul	7
2.	Munjungan	10
3.	Watulimo	13
4.	Kampak	122
5.	Dongko	527
6.	Pule	706
7.	Karangan	124
8.	Suruh	137
9.	Gandusari	107
10.	Durenan	94
11.	Pogalan	99
12.	Trenggalek	110
13.	Tugu	122
14.	Bendungan	692

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

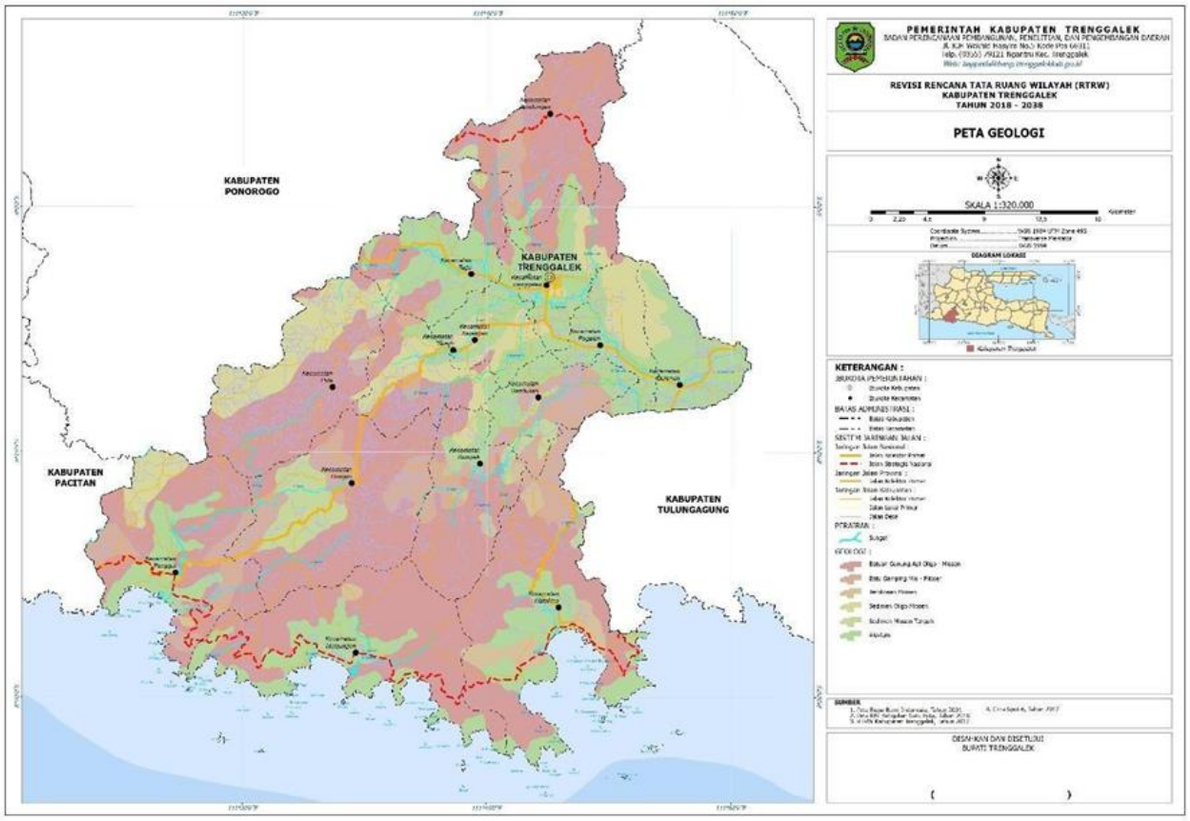
c. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain:

- *Miosenne sedimentary* : di semua kecamatan
- *Miosenne limostone* : Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan
- *Andesit* : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan dan Karangan
- Liat dan Pasir *(alluvium)* : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan
- *Undifferentioned vulcanic* : di Kecamatan Bendungan

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara. Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat kabupaten. Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Gambar II.3
Peta Geologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

d. Hidrologi

Secara hidrologis Kabupaten Trenggalek terdiri 28 sungai dengan panjang antara 2,00 km hingga 41,50 km dengan debit air antara 0,042 M3/detik (Kali Kedungmoro) sampai dengan 5,778 M3/detik (Kali Gedangan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung dan dam.

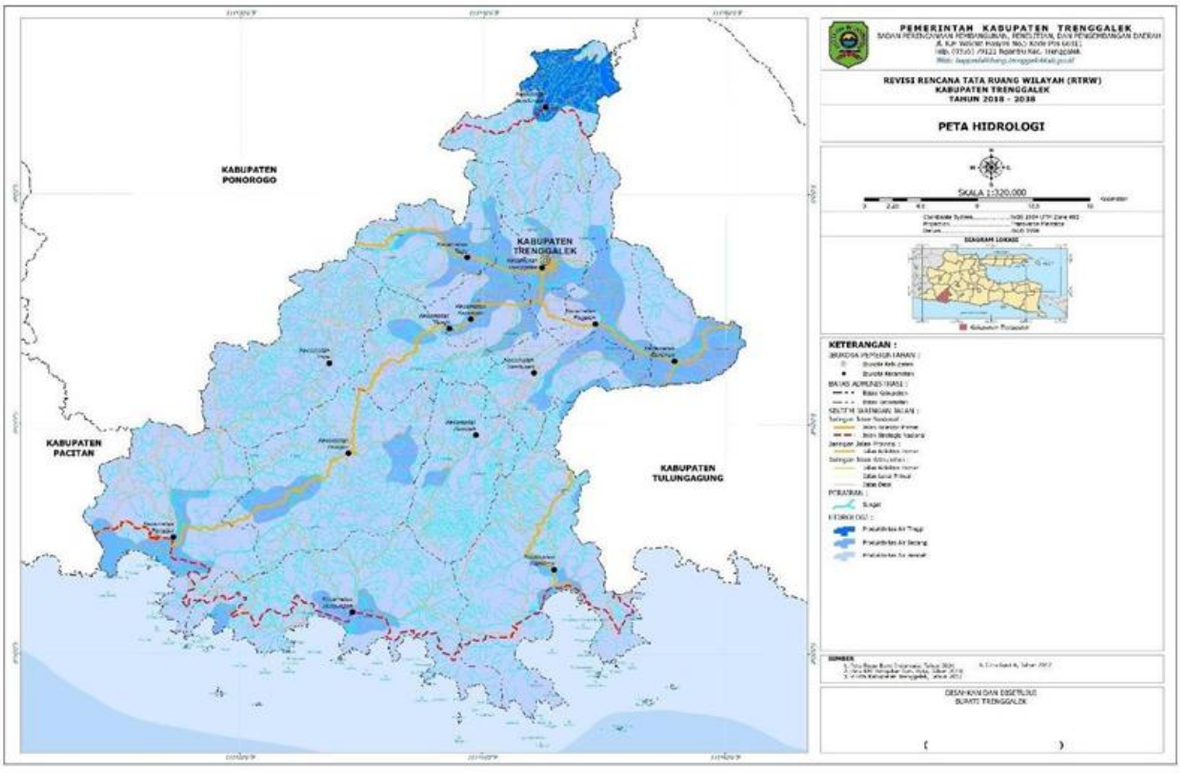
Jumlah mata air yang tersebar di Kabupaten Trenggalek mencapai 66 buah. Namun sebagian besar mata air tersebut sangat tergantung terhadap curah hujan sepanjang tahun. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Pada umumnya Kabupaten Trenggalek memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS yang arah alirannya menuju ke Kali Brantas dan DAS yang arah alirannya bermuara ke Samudera Hindia.

Tabel II.4
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar Base (m)	Kedalaman (m)
Bagong	22,50	42,40	40,00	4,00
Sukun	11,00	10,00	8,00	4,00
Prambon	13,50	28,00	21,00	3,50
Kedungmoro	8,50	19,00	15,00	3,50
Klumutan	4,00	12,00	7,00	4,20
Jolok	2,25	11,00	9,00	3,75
Ngasinan	41,50	32,00	20,00	6,80
Klitik	7,25	9,50	7,50	2,40
Munjungan	5,50	30,00	20,00	4,00
Anjok	2,00	17,00	14,05	2,05
Darungan	4,50	8,00	8,00	4,00
Ngepeh	8,00	15,00	12,00	2,80
Duren	7,50	24,00	22,00	4,00
Mlinjon	19,00	34,00	28,00	3,00
Jati	15,00	30,00	24,00	3,40
Tawing	27,00	36,50	30,00	4,70
Gedangan	36,50	27,00	19,00	4,00
Konang	17,00	40,00	30,00	4,00
Ngulung	6,00	18,00	16,00	3,50
Bungur	2,00	45,00	40,00	3,50
Craken	5,00	15,00	11,00	3,30
Tumpak Nongko	14,00	-	-	-
Songo	4,00	25	20	2
Karanggandu	3,50	40	30	3
Bubuk	2,00	16,00	15,00	3,50
Ngemplak	10,50	25	15	3
Sowan	5,50	20	15	2
Dongko	13,50	17,00	15,00	3,60

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Gambar II.4
Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

e. Klimatologi

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti Kabupaten-Kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Namun saat ini terjadi perubahan anomali cuaca, siklus hujan menjadi tidak menentu.

Beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek masih menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, seperti kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim penghujan. Berdasarkan peta sebaran kejadian hingga Oktober 2024, tercatat peningkatan jumlah desa terdampak kekeringan hingga mencapai 61 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Untuk mengurangi risiko tersebut, pembangunan infrastruktur pengendali air menjadi langkah strategis yang terus diupayakan. Kehadiran Bendungan Tugu diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir di wilayah Trenggalek, dan ke depannya upaya mitigasi bencana akan diperkuat melalui pembangunan Bendungan Bagong yang kini masih dalam tahap konstruksi serta Bendungan Kampak yang masih dalam tahap perencanaan.

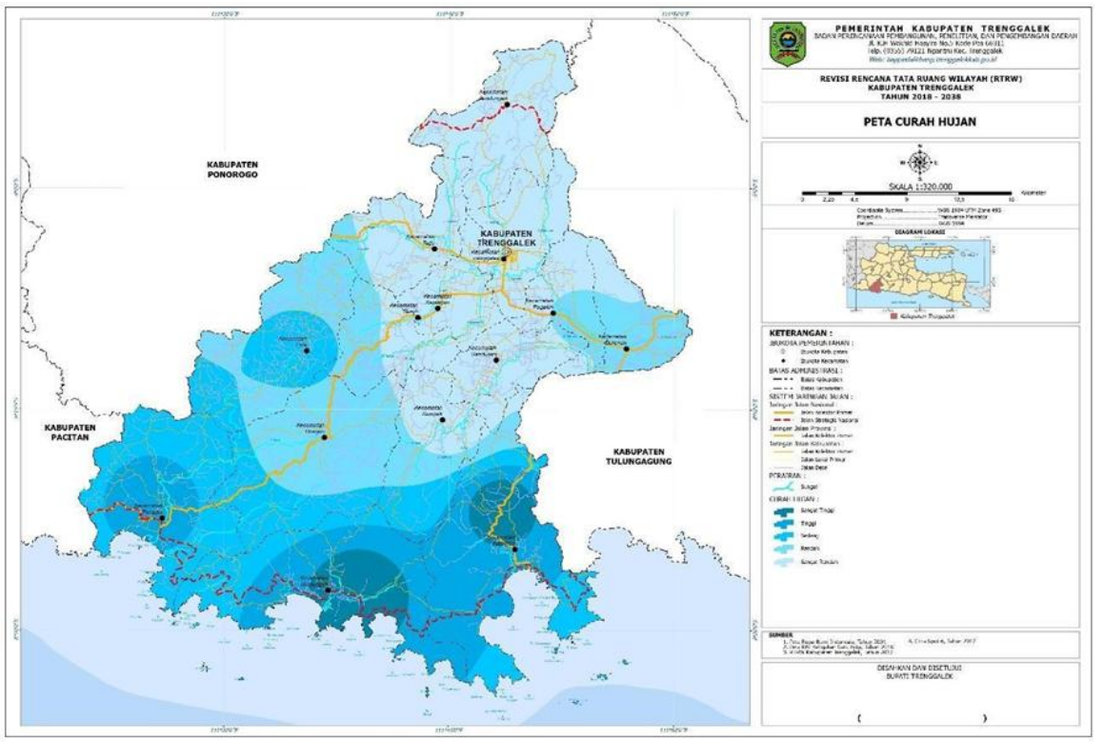
Tabel II.5
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Bulan	Suhu (℃)	Kelembaban (%)	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)	Kecepatan Angin (Knot)	Tekanan udara (mbar)
Januari	22,60	81,1	414,3	23	5,18	2,50	998,88
Februari	22,00	83,9	489,9	21	5,77	2,07	999,5
Maret	23,00	81,7	212,5	16	5,83	2,71	998,09
April	23,40	78,7	142,7	15	6,94	2,50	997,27
Mei	23,20	71	0	-	8,59	3,92	997,92
Juni	21,4	69,1	7,3	5	7,02	3,85	999,06
Juli	20,6	67,7	5,9	24	6,39	4,30	999,55
Agustus	20,4	63,9	0	31	7,82	5,41	1000,73
September	23,6	64,7	12,9	29	7,11	4,72	999,75
Oktober	23,8	64	88,7	30	7,53	4,82	999,58
November	23,6	78,1	284,2	30	5,73	2,05	999,21
Desember	23	85	843,4	31	3,37	1,65	998,16

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2025

Kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Trenggalek cukup stabil selama 2024. Penyinaran matahari di tahun 2024 cukup intens terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Di sisi lain, pada bulan Desember, lama penyinaran matahari sangat rendah, hanya sebesar 3,37 jam. Pada tahun 2024 jumlah curah hujan sebesar 2.501,8 mm dengan jumlah rata rata per bulan sebesar 208,48 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 255 hari.

Gambar II.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek

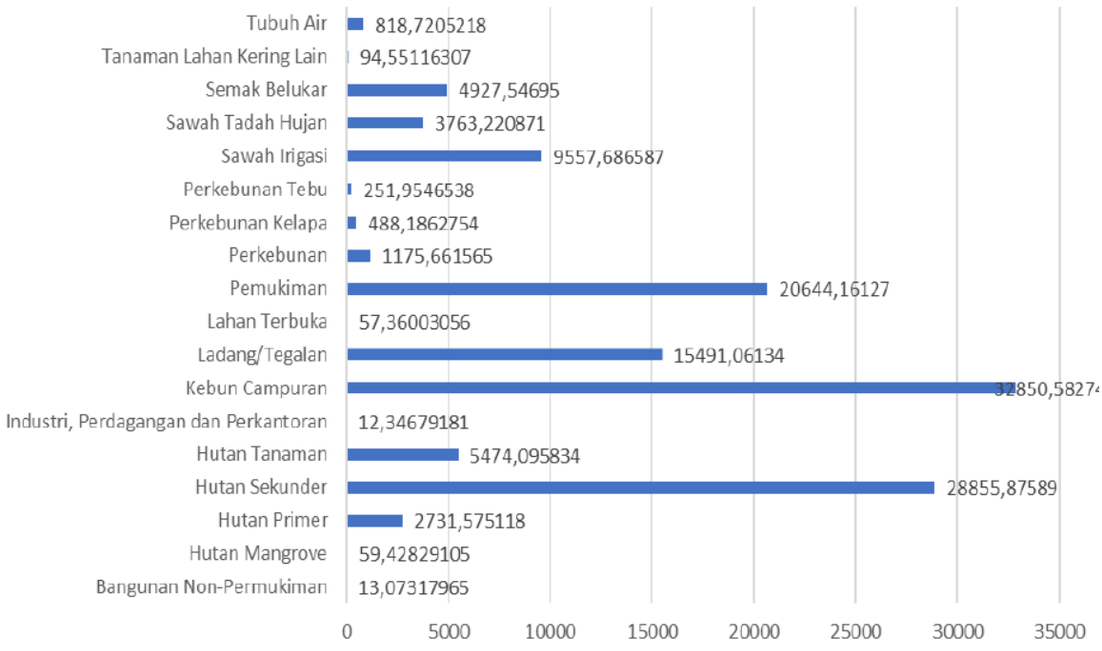


Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2019

f. Penggunaan Lahan

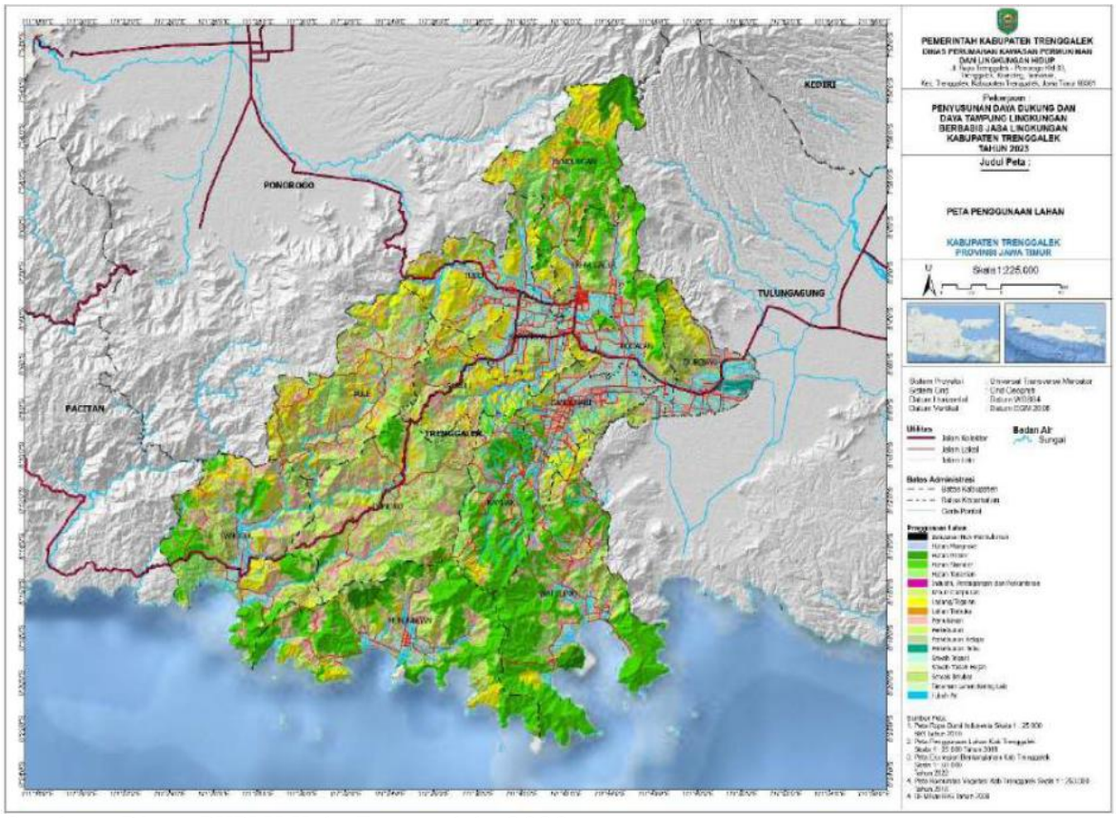
Penggunaan lahan yang paling luas pemanfaatannya di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah kebun campuran dengan luasan 32.850,58 ha. Penggunaan lahan jenis ini difungsikan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman tahunan dengan kebutuhan pengairan yang terbatas. Hal itu dapat dilihat dari proporsi PDRB Kabupaten sendiri masih didominasi oleh aktivitas pertanian yang membutuhkan lahan untuk budidaya tanaman. Pemanfaatan lahan perkebunan memiliki keunggulan serta kekurangan jika tidak ada kebijakan pengaturan tata guna lahan. Perkebunan mampu menjadi alat ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada lahan untuk pertanian serta dapat menjadi penyerap emisi karbon yang efektif jika ditanami dengan tanaman bervegetasi dengan kerapatan tinggi. Hutan sekunder menduduki peringkat kedua sebagai tutupan lahan terluas dengan total luas sebesar 28.855,87 ha. Dikarenakan hampir sebagian besar kondisi topografi lahan di Kabupaten Trenggalek adalah perbukitan dengan lereng yang memiliki kecuraman tinggi, maka masih banyak terdapat hutan sekunder yang diselingi oleh beberapa hutan produksi milik masyarakat. Fungsi lahan hutan sekunder memiliki banyak jasa ekosistem dimana salah satunya adalah pengaturan iklim, bencana, dan pemurnian air.

Grafik II.1
Luas Masing-Masing Penggunaan Lahan (ha)



Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

Gambar II.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Trenggalek



Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

g. Peran Strategis Daerah terhadap Wilayah Sekitar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Kabupaten Trenggalek merupakan kawasan strategis Agropolitan Wilis (Lawu-Wilis), sistem Minapolitan Trenggalek-Tulungagung, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan ekosistem mangrove, kawasan pemanfaatan umum zona pariwisata, kawasan pemanfaatan umum zona perikanan, kawasan konservasi maritim, serta pusat kegiatan wilayah (PKW) di perkotaan Trenggalek.

Pengembangan potensi daerah berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar melalui keterkaitan produksi, perdagangan, dan inspirasi pengembangan usaha lokal. Ketika suatu daerah berhasil mengembangkan produk unggulan dan menembus pasar yang lebih luas, efek positifnya tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas rantai pasok, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung di daerah tetangga.

Kabupaten Trenggalek telah memberikan kontribusi nyata bagi wilayah sekitarnya melalui pengembangan produk lokal berbasis kerajinan bambu yang kini telah menembus pasar internasional. Produk seperti sedotan, botol minum, alat makan, dan mebel bambu dari Trenggalek tidak hanya meningkatkan permintaan bahan baku dari wilayah sekitar, tetapi juga mendorong daerah lain untuk mengembangkan potensi kerajinannya sendiri. Selain itu, langkah Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendorong digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta penguatan manajemen usaha turut menciptakan efek multiplikasi ekonomi bagi wilayah sekitar. Nilai ekspor

Trenggalek yang mencapai lebih dari Rp102 miliar pada tahun 2023, terutama dari komoditas seperti minyak atsiri, filet dory, ester, terpentin, dan plywood, telah memperkuat jaringan usaha antar wilayah. Ini mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja, suplai bahan baku, serta peluang kemitraan usaha lintas daerah, memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Trenggalek juga berperan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, terutama sebagai kawasan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata. Kondisi geografis Trenggalek yang berbukit-bukit sangat mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan, khususnya dengan keberadaan embung yang berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi. Selain sektor pertanian, Trenggalek juga memiliki potensi pariwisata yang cukup kuat dengan garis pantai yang membentang di tiga kecamatan serta objek wisata alam seperti Gua Lowo yang menjadi daya tarik wisata unggulan. Potensi perikanan juga berkembang dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Prigi), mendukung aktivitas ekonomi kelautan dan perikanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan sekitarnya. Keberadaan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melintasi Trenggalek semakin memperkuat peran daerah ini sebagai koridor penting dalam konektivitas dan distribusi barang serta jasa antarwilayah di bagian selatan Pulau Jawa. Dengan demikian, Trenggalek tidak hanya menjadi pusat pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui sektor unggulan yang dimilikinya.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Trenggalek memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan menjadi penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan ubi kayu yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Selain itu, sektor perkebunan juga cukup berkembang dengan tanaman unggulan seperti cengkeh, kopi, dan kelapa yang tersebar di wilayah dataran tinggi. Potensi ini diperkuat dengan ketersediaan lahan pertanian yang luas dan kondisi agroklimat yang mendukung. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek dalam Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Trenggalek atas dasar harga berlaku tahun 2024.

Selain pertanian dan perkebunan, Trenggalek juga memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Letak geografis Trenggalek yang memiliki garis pantai sepanjang 96 kilometer di pesisir selatan Pulau Jawa memberikan peluang besar dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya laut. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi menjadi salah satu pusat aktivitas perikanan laut yang strategis di Jawa Timur. Produksi perikanan tangkap laut dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Sedangkan produksi perikanan darat berkembang di beberapa kecamatan dengan dukungan sumber daya air yang cukup.

Dari sisi potensi pengembangan wilayah, prioritas diarahkan pada kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi di tingkat kabupaten. Penetapan kawasan strategis ini didasarkan pada peran vitalnya dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah. Secara umum, kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian sosial budaya, dan/atau kelestarian lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten Trenggalek terdiri dari sudut kepentingan:

a. Pertumbuhan ekonomi; dan
b. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:

1) Kawasan strategis agropolitan, berupa kawasan budidaya komoditas pertanian unggulan kabupaten meliputi, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Pule, dan Kecamatan Bendungan.
2) Kawasan strategis minapolitan, berupa kawasan budidaya perikanan meliputi:
   a. budidaya perikanan air tawar berada di Kecamatan Bendungan, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Panggul;
   b. kawasan perikanan budidaya air payau dan infrastruktur penunjang kawasan perikanan berada di Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Panggul.
3) Kawasan Kawasan Strategis Pariwisata di Kabupaten Trenggalek meliputi:
   a. Kawasan strategis pariwisata Pelang dan sekitarnya;
   b. Kawasan strategis pariwisata Blado dan sekitarnya;
   c. Kawasan strategis pariwisata Prigi dan sekitarnya;
   d. Kawasan strategis pariwisata Bukit Banyon dan sekitarnya;
   e. Kawasan strategis pariwisata Bendungan Tugu dan sekitarnya; dan
   f. Kawasan strategis pariwisata Lereng Wilis dan sekitarnya.
4) Kawasan strategis sekitar bendungan, berupa kawasan pengembangan intensif sekitar bendungan meliputi kawasan sekitar Bendungan Tugu dan kawasan sekitar Bendungan Bagong. Kedua Bendungan ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres No. 56 Tahun 2018.

Sedangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kawasan strategis perlindungan satwa laut berupa airberupa kawasan konservasi penyu di pesisir Pantai Kili-kili di Kecamatan Panggul.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan menyebabkan konsep daya dukung dan daya tampung penting untuk menjadi bagian dari

sistem perencanaan agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya tampung yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk dapat menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang masuk ke dalam siklus ekosistem lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Widodo, dkk. (2015) bahwa daya dukung lingkungan adalah perbandingan antara supply (ketersediaan) dan demand (kebutuhan). Selain itu, didukung dengan pernyataan Muta'ali (2012) bahwa dalam pengembangan wilayah, pendekatan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk.

Analisis daya dukung dan daya tampung dapat terdiri dari daya dukung lahan terbangun, daya dukung pangan, daya dukung air, dan daya dukung fungsi lindung. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu gambaran dalam ambang batas penggunaan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan penduduk dan mendukung pembangunan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan isu strategis dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan skenario pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

a. Daya Dukung Lahan Terbangun

1) Daya Dukung Lahan Eksisting

Daya dukung lahan terbangun dipengaruhi oleh koefisien luas lahan terbangun maksimal untuk perkotaan yaitu 70% luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan hampir seluruh wilayah memiliki status daya dukung wilayah lahan terbangun di Kabupaten Trenggalek bernilai sebesar 4,31 yang artinya berkategorikan baik. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kondisi permukiman di Kabupaten Trenggalek berupa pola permukiman tersebar secara kluster di area perbukitan dan linier mengikuti perkembangan jalan pada kawasan di lahan yang datar. Upaya untuk menjaga kualitas daya dukung lahan terbangun diperlukan beberapa terobosan dalam mengatur perkembangan lahan terbangun salah satunya adalah optimalisasi pembangunan bangunan vertikal untuk meminimalisir alih fungsi lahan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.6
Kategori Daya Dukung Lahan Terbangun

Nilai DDLB	Keterangan
<1	Daya Dukung Lahan Permukiman Terlampaui atau Buruk
1-3	Daya Dukung Lahan Permukiman Bersyarat atau Sedang
>3	Daya Dukung Lahan Permukiman Baik

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Tabel II.7
Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

Kecamatan	Luas Kecamatan (ha)	Luas Lahan Terbangun (ha)	DDLB	Keterangan
Bendungan	10.509,13	483,99	15,2	SURPLUS
Dongko	14.422,60	2.946,67	3,43	SURPLUS
Durenan	4.922,51	1.117,04	3,08	SURPLUS
Gandusari	5.414,08	1.479,07	2,56	SURPLUS
Kampak	7.867,36	1.128,61	4,88	SURPLUS
Karangan	4.631,35	995,54	3,26	SURPLUS
Munjungan	14.774,86	1.451,49	7,13	SURPLUS
Panggul	13.322,39	2.564,05	3,64	SURPLUS
Pogalan	4.869,07	1.159,36	2,94	SURPLUS
Pule	11.742,32	2.164,31	3,8	SURPLUS
Suruh	5.684,06	942,1	4,22	SURPLUS
Trenggalek	6.231,19	1.056,09	4,13	SURPLUS
Tugu	7.162,75	1.131,96	4,43	SURPLUS
Watulimo	15.713,00	2.049,09	5,37	SURPLUS
TOTAL	**124.962**	**20.669,60**	**4,31**	**SURPLUS**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

2) Daya Dukung Lahan proyeksi Tahun 2029

Proyeksi daya dukung lahan permukiman dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah upaya dalam memastikan bahwa lahan yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan permukiman bagi penduduk yang terus berkembang. Proyeksi ini melibatkan analisis data historis dan tren pertumbuhan penduduk, serta evaluasi ketersediaan dan kualitas lahan yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang hidup yang berkelanjutan, layak huni, dan seimbang dengan lingkungan.

Proyeksi daya dukung lahan permukiman dimulai dengan pengumpulan dan analisis data historis mengenai pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, dan perkembangan permukiman selama periode sebelumnya. Data ini memberikan gambaran mengenai pola pertumbuhan penduduk, kepadatan permukiman, serta distribusi dan kualitas lahan yang ada. Proyeksi daya dukung lahan permukiman adalah langkah strategis dalam memastikan ketersediaan lahan permukiman yang memadai dan berkelanjutan. Dengan analisis data historis, evaluasi ketersediaan lahan, proyeksi kebutuhan, dan penerapan strategi pengelolaan yang tepat, Kabupaten Trenggalek dapat menciptakan permukiman yang layak huni, seimbang dengan lingkungan, dan mampu mendukung pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang.

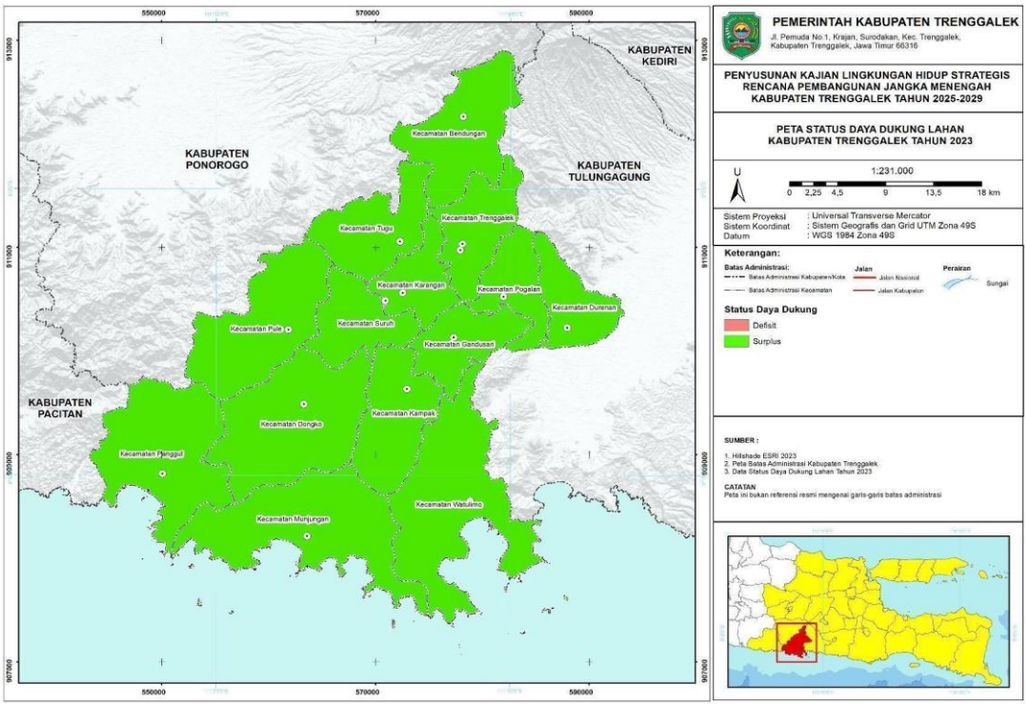
Tabel II.8
Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2029

Kecamatan	Luas yang Layak untuk Permukiman (m^2)	Jumlah Penduduk (2029)	Koefisien Luas Kebutuhan ruang (m^2/kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
Bendungan	3.941,70	30.363	130	12,33	SURPLUS
Dongko	6.067,08	71.400	130	3,11	SURPLUS
Durenan	3.058,60	52.911	130	2,75	SURPLUS
Gandusari	3.214,19	55.122	130	2,34	SURPLUS
Kampak	1.789,93	39.365	130	3,5	SURPLUS
Karangan	2.590,81	52.920	130	2,44	SURPLUS
Munjungan	2.376,24	56.236	130	3,25	SURPLUS
Panggul	3.304,48	84.217	130	3,02	SURPLUS
Pogalan	2.747,75	54.358	130	2,56	SURPLUS
Pule	5.096,43	59.837	130	3,56	SURPLUS
Suruh	2.413,22	27.051	130	4,12	SURPLUS
Trenggalek	2.181,29	68.235	130	2,46	SURPLUS
Tugu	3.174,14	52.209	130	4,11	SURPLUS
Watulimo	4.434,74	77.677	130	4,39	SURPLUS
TOTAL	**46.390,61**	**787.188**	**130**	**4,09**	**SURPLUS**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

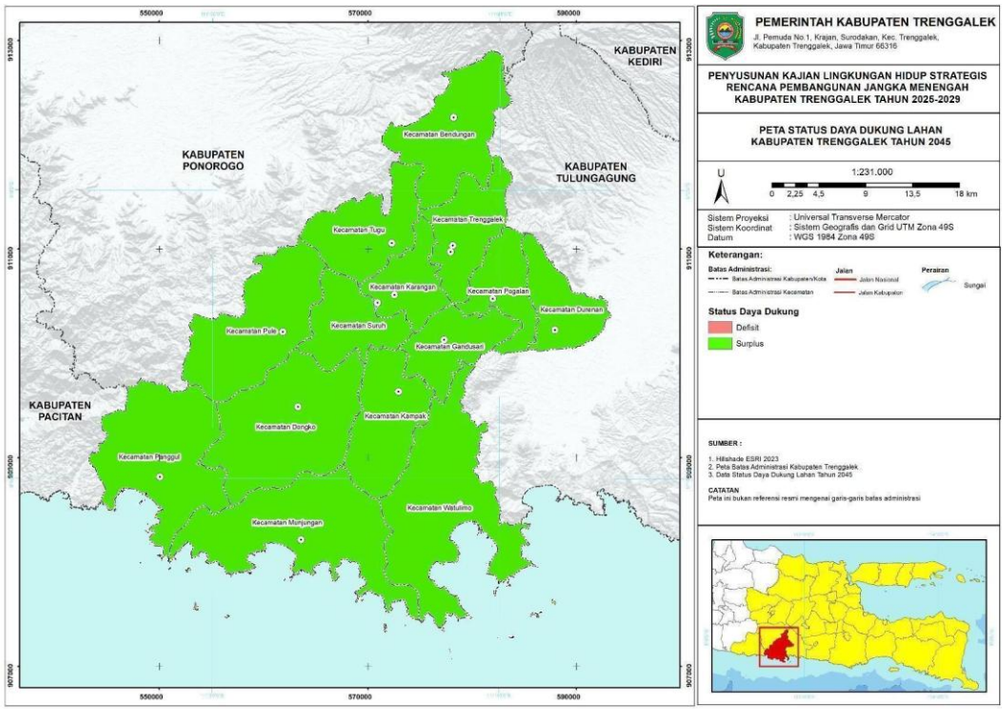
Dari hasil perhitungan tabel proyeksi daya dukung lahan permukiman Kabupaten Trenggalek tahun 2029 di atas menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki nilai skor 4,09. Angka skor tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa kapasitas wilayah tersebut untuk menampung penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk yang ada saat ini sehingga wilayah tersebut memiliki potensi dalam pengembangan permukiman di masa depan. Dari 14 kecamatan, keseluruhan berada pada status surplus yang artinya kecamatan tersebut masih dapat dikembangkan sebagai permukiman dan lahan terbangun lainnya.

Gambar II.7
Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Gambar II.8
Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2029



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan adalah perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di suatu daerah (Widodo dkk, 2015). Analisis daya dukung pangan sangat penting karena pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan atau kebutuhan terhadap tanaman pangan juga meningkat, sedangkan luas lahan pertanian terus mengalami

penurunan. Analisis daya dukung pangan berguna dalam mempersiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di masa kini dan di masa yang akan datang.

Salah satu konsep daya dukung pertanian yaitu berkaitan dengan swasembada pangan yang dikemukakan oleh Odum, Howard, dan Issard. Swasembada pangan adalah usaha memenuhi kebutuhan pangan dengan membudidayakan tanaman pangan secara mandiri (Karsin, 2004). Daya dukung pangan beras dinilai dari komponen kebutuhan dan ketersediaan beras. Daya dukung pangan beras berbanding lurus dengan luas lahan pertanian dan berbanding terbalik dengan jumlah kebutuhan pangan penduduk. Daya dukung pangan juga dapat diidentifikasikan dengan pendekatan spasial dengan menggunakan data kemampuan ekosistem menyediakan jasa penyediaan bahan pangan dan data tabular terkait jumlah penduduk, produksi padi, dan pola konsumsi beras setiap rumah tangga.

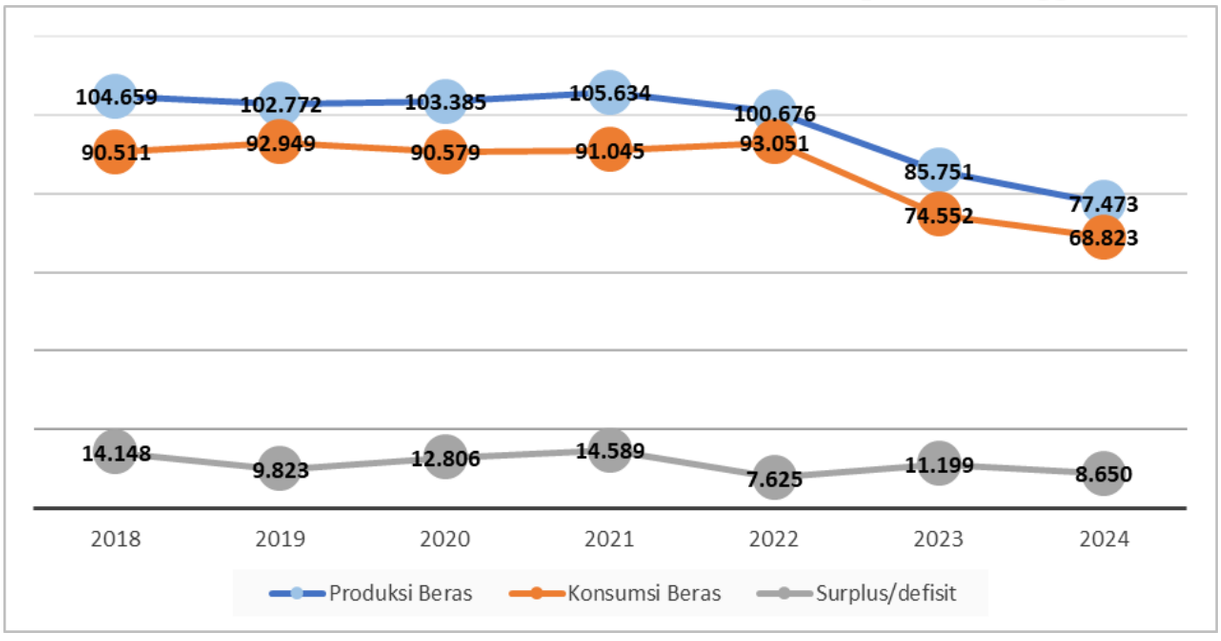
Tabel II.9
Daya Dukung Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (ton)	166.815	163.807	164.784	168.368	160.466	153.127	138.345
Konversi GKG Beras	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	56%	56%
Produksi Beras	104.659	102.772	103.385	105.634	100.676	85.751	77.473

Konsumsi Lokal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	730.579	750.251	731.125	734.888	751.079	756.109	753.810
Tingkat Konsumsi Beras/Tahun	0,12389	0,12389	0,12389	0,12389	0,12389	0,09859	0,09130
Konsumsi beras (ton)	90.511	92.949	90.579	91.045	93.051	74.552	68.823
Surplus/defisit beras	14.148	9.823	12.806	14.589	7.625	11.199	8.650
Nilai DDP	**1,16**	**1,11**	**1,14**	**1,16**	**1,08**	**1,18**	**1,14**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Grafik II.2
Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Padi di Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, antara tahun 2018 hingga tahun 2024 Kabupaten Trenggalek mengalami surplus beras. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah konsumsi beras oleh masyarakat masih dapat terpenuhi selama 6 tahun tersebut. Namun jika melihat grafik di atas, jumlah surplus dan produksi beras mengalami tren fluktuatif. Adapun, grafik konsumsi beras di Kabupaten Trenggalek selama periode yang sama menunjukkan tren penurunan.

Angka daya dukung pangan/beras di Trenggalek masih memenuhi walaupun begitu isu pangan tetap perlu diprioritaskan. Kebutuhan pangan akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian semakin masif di Trenggalek sehingga luasannya berkurang. Belum adanya pengendalian alih fungsi lahan pertanian akan mengurangi ketersediaan beras. Hal tersebut akan menurunkan tingkat daya dukung pangan di Kabupaten Trenggalek pada masa yang akan datang.

Tabel II.10
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No.	Keterangan	Rata-Rata Produksi Padi (ton)	Rata-Rata Produksi Beras (ton)	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (jiwa)	Konsumsi Beras (ton)	Daya Dukung Pangan (beras)	Evaluasi
1.	Bendungan	6.756	3.783,36	28.446	2.597	1,46	Surplus
2.	Dongko	8.465	4.740,40	67.927	6.202	0,76	Defisit
3.	Durenan	10.371	5.807,76	52.039	4.751	1,22	Surplus
4.	Gandusari	12.708	7.116,48	54.086	4.938	1,44	Surplus
5.	Kampak	5.225	2.926,00	38.325	3.499	0,84	Defisit
6.	Karangan	12.038	6.741,28	50.612	4.621	1,46	Surplus
7.	Munjungan	16.597	9.294,32	54.441	4.970	1,87	Surplus
8.	Panggul	17.397	9.742,32	81.264	7.419	1,31	Surplus
9.	Pogalan	8.168	4.574,08	53.608	4.894	0,93	Defisit
10.	Pule	6.971	3.903,76	57.585	5.258	0,74	Defisit
11.	Suruh	2.704	1.514,24	26.795	2.446	0,62	Defisit
12.	Trenggalek	12.362	6.922,72	66.862	6.105	1,13	Surplus
13.	Tugu	14.328	8.023,68	49.433	4.513	1,78	Surplus
14.	Watulimo	4.255	2.382,80	72.387	2.446	0,36	Defisit
Kabupaten Trenggalek		**138.345**	**77.473**	**753.810**	**68.823**	**1,14**	**Surplus**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2025

Pada tahun 2024 daya dukung pangan di Kecamatan Dongko, Kampak, Pogalan, Pule, Suruh dan Watulimo nilainya kurang dari 1 (defisit) karena pada enam kecamatan tersebut konsumsi berasnya lebih besar dari pada produksinya. Produksi beras tahun 2024 di enam kecamatan tersebut rendah karena luas baku sawahnya rendah, yakni di Kecamatan Dongko 700 ha, Kecamatan Kampak 273 ha Kecamatan Pule 848 ha, Kecamatan Suruh 320 ha dan Kecamatan Watulimo 404 ha sedangkan di Kecamatan Pogalan diakibatkan karena terjadi gagal panen. Luas lahan di lima kecamatan tersebut dibawah seribu hektar sedangkan pada kecamatan Pogalan sebesar 1.180 Ha.

Status daya dukung pangan ditentukan dengan dinamika jumlah penduduk pada suatu wilayah. Dalam memperkirakan status pangan, perhitungan proyeksi penduduk diperlukan untuk menentukan potensi kebutuhan pangan di masa yang akan datang. Berdasarkan data RPJPD Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk tahun 2029 sejumlah 785.297 jiwa atau meningkat 4,1% dibandingkan tahun awal 2023. Berikut ini adalah proyeksi kebutuhan pangan antara awal tahun dan akhir tahun perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel II.11
Proyeksi Status Daya Dukung Pangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

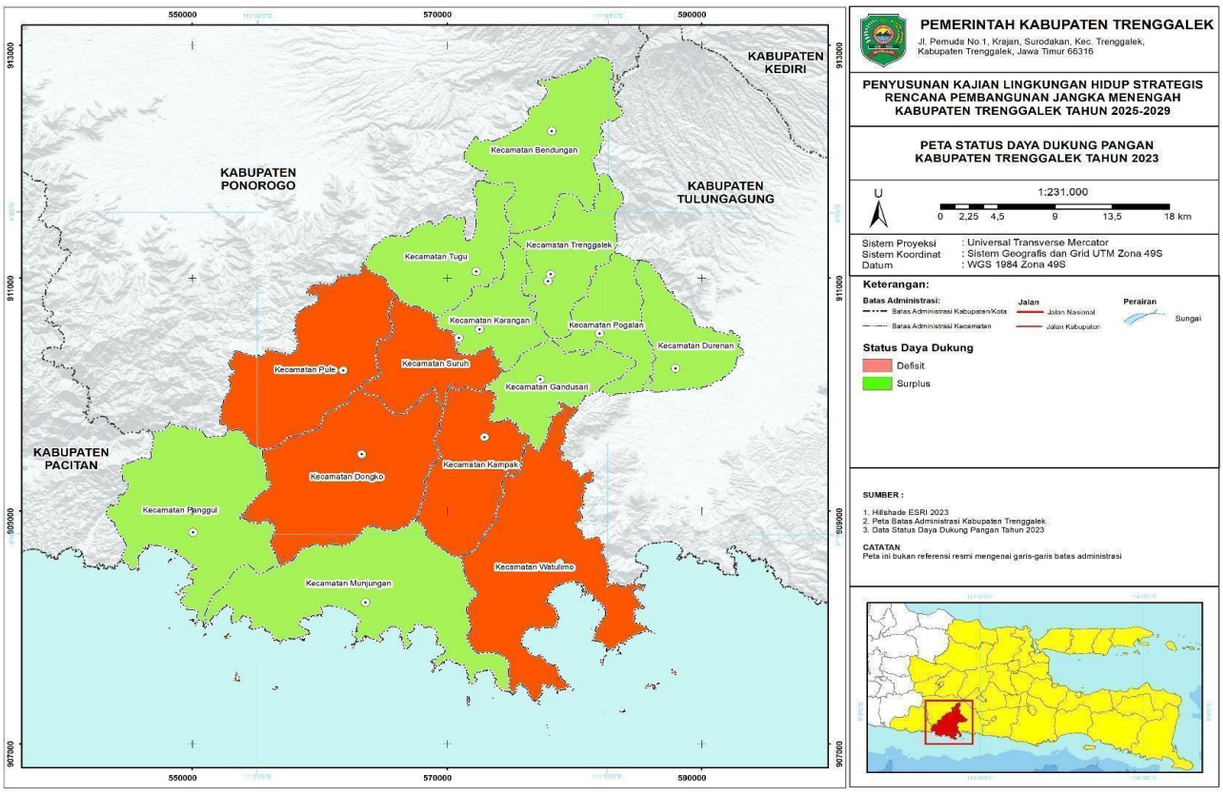
Tahun Proyeksi	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Konsumsi Beras	Rata-rata Produksi Beras	Daya Dukung Pangan	Status Daya Dukung Pangan
2025	Bendungan	29.190	124,89	3.645,59	4.713,56	1,29	Surplus
	Dongko	67.473	124,89	8.426,66	5.619,96	0,66	Defisit
	Durenan	50.370	124,89	6.290,72	9.676,99	1,48	Surplus
	Gandusari	51.389	124,89	6.417,92	9.678,02	1,41	Surplus
	Kampak	52.503	124,89	6.557,05	3.291,08	0,69	Defisit
	Karangan	58.274	124,89	7.277,89	10.194,35	1,59	Surplus
	Munjungan	54.694	124,89	6.830,74	7.998,90	1,15	Surplus
	Panggul	38.110	124,89	4.759,56	11.247,46	1,11	Surplus
	Pogalan	54.841	124,89	6.849,12	7.160,17	1,05	Surplus
	Pule	26.650	124,89	3.328,30	5.598,38	0,77	Defisit
	Suruh	67.863	124,89	8.475,42	2.433,33	0,73	Defisit
	Trenggalek	81.237	124,89	10.145,69	8.907,34	1,06	Surplus
	Tugu	55.636	124,89	6.948,32	8.429,56	1,34	Surplus
	Watulimo	73.999	124,89	9.241,70	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**762.228**	**124,89**	**95.194,66**	**98.400,04**	**1,03**	**Surplus**
2026	Bendungan	29.196	124,89	3.646,34	4.713,56	1,29	Surplus
	Dongko	69.671	124,89	8.701,17	5.619,96	0,65	Defisit
	Durenan	52.984	124,89	6.617,18	9.676,99	1,46	Surplus
	Gandusari	55.265	124,89	6.902,04	9.678,02	1,40	Surplus
	Kampak	39.152	124,89	4.889,64	3.291,08	0,67	Defisit
	Karangan	51.831	124,89	6.473,23	10.194,35	1,57	Surplus
	Munjungan	55.606	124,89	6.944,64	7.998,90	1,15	Surplus
	Panggul	83.044	124,89	10.371,36	11.247,46	1,08	Surplus
	Pogalan	54.827	124,89	6.847,35	7.160,17	1,05	Surplus
	Pule	58.943	124,89	7.361,36	5.598,38	0,76	Defisit
	Suruh	27.301	124,89	3.409,56	2.433,33	0,71	Defisit
	Trenggalek	68.350	124,89	8.536,24	8.907,34	1,04	Surplus

Tahun Proyeksi	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Konsumsi Beras	Rata-rata Produksi Beras	Daya Dukung Pangan	Status Daya Dukung Pangan
	Tugu	50.779	124,89	6.341,74	8.429,56	1,33	Surplus
	Watulimo	74.296	124,89	9.278,89	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**771.245**	**124,89**	**96.320,75**	**98.400,04**	**1,02**	**Surplus**
2027	Bendungan	29.373	124,89	3.668,36	4.713,56	1,28	Surplus
	Dongko	70.091	124,89	8.753,70	5.619,96	0,64	Defisit
	Durenan	53.304	124,89	6.657,13	9.676,99	1,45	Surplus
	Gandusari	55.599	124,89	6.943,70	9.678,02	1,39	Surplus
	Kampak	39.388	124,89	4.919,16	3.291,08	0,67	Defisit
	Karangan	52.144	124,89	6.512,31	10.194,35	1,57	Surplus
	Munjungan	55.942	124,89	6.986,56	7.998,90	1,14	Surplus
	Panggul	83.545	124,89	10.433,98	11.247,46	1,08	Surplus
	Pogalan	55.158	124,89	6.888,69	7.160,17	1,04	Surplus
	Pule	59.299	124,89	7.405,80	5.598,38	0,76	Defisit
	Suruh	27.465	124,89	3.430,14	2.433,33	0,71	Defisit
	Trenggalek	68.763	124,89	8.587,77	8.907,34	1,04	Surplus
	Tugu	51.085	124,89	6.380,03	8.429,56	1,32	Surplus
	Watulimo	74.745	124,89	9.334,90	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**775.901**	**124,89**	**96.902,23**	**98.400,04**	**1,02**	**Surplus**
2028	Bendungan	29.550	124,89	3.690,50	4.713,56	1,28	Surplus
	Dongko	70.514	124,89	8.806,55	5.619,96	0,64	Defisit
	Durenan	53.626	124,89	6.697,32	9.676,99	1,44	Surplus
	Gandusari	55.934	124,89	6.985,62	9.678,02	1,39	Surplus
	Kampak	39.626	124,89	4.948,86	3.291,08	0,67	Defisit
	Karangan	52.459	124,89	6.551,62	10.194,35	1,56	Surplus
	Munjungan	56.279	124,89	7.028,74	7.998,90	1,14	Surplus
	Panggul	84.050	124,89	10.496,96	11.247,46	1,07	Surplus
	Pogalan	55.491	124,89	6.930,28	7.160,17	1,03	Surplus
	Pule	59.657	124,89	7.450,50	5.598,38	0,75	Defisit
	Suruh	27.631	124,89	3.450,85	2.433,33	0,71	Defisit
	Trenggalek	69.178	124,89	8.639,61	8.907,34	1,03	Surplus
	Tugu	51.394	124,89	6.418,54	8.429,56	1,31	Surplus
	Watulimo	75.196	124,89	9.391,25	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**780.585**	**124,89**	**97.487,21**	**98.400,04**	**1,01**	**Surplus**
2029	Bendungan	29.728	124,89	3.712,78	4.713,56	1,27	Surplus
	Dongko	70.940	124,89	8.859,71	5.619,96	0,63	Defisit
	Durenan	53.949	124,89	6.737,75	9.676,99	1,44	Surplus
	Gandusari	56.272	124,89	7.027,79	9.678,02	1,38	Surplus
	Kampak	39.865	124,89	4.978,73	3.291,08	0,66	Defisit
	Karangan	52.776	124,89	6.591,18	10.194,35	1,55	Surplus
	Munjungan	56.619	124,89	7.071,17	7.998,90	1,13	Surplus
	Panggul	84.557	124,89	10.560,33	11.247,46	1,07	Surplus
	Pogalan	55.826	124,89	6.972,11	7.160,17	1,03	Surplus
	Pule	60.017	124,89	7.495,48	5.598,38	0,75	Defisit
	Suruh	27.798	124,89	3.471,68	2.433,33	0,70	Defisit
	Trenggalek	69.595	124,89	8.691,77	8.907,34	1,02	Surplus
	Tugu	51.704	124,89	6.457,29	8.429,56	1,31	Surplus
	Watulimo	75.650	124,89	9.447,95	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**785.297**	**124,89**	**98.075,73**	**98.400,04**	**1,00**	**Surplus**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024 (Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029)

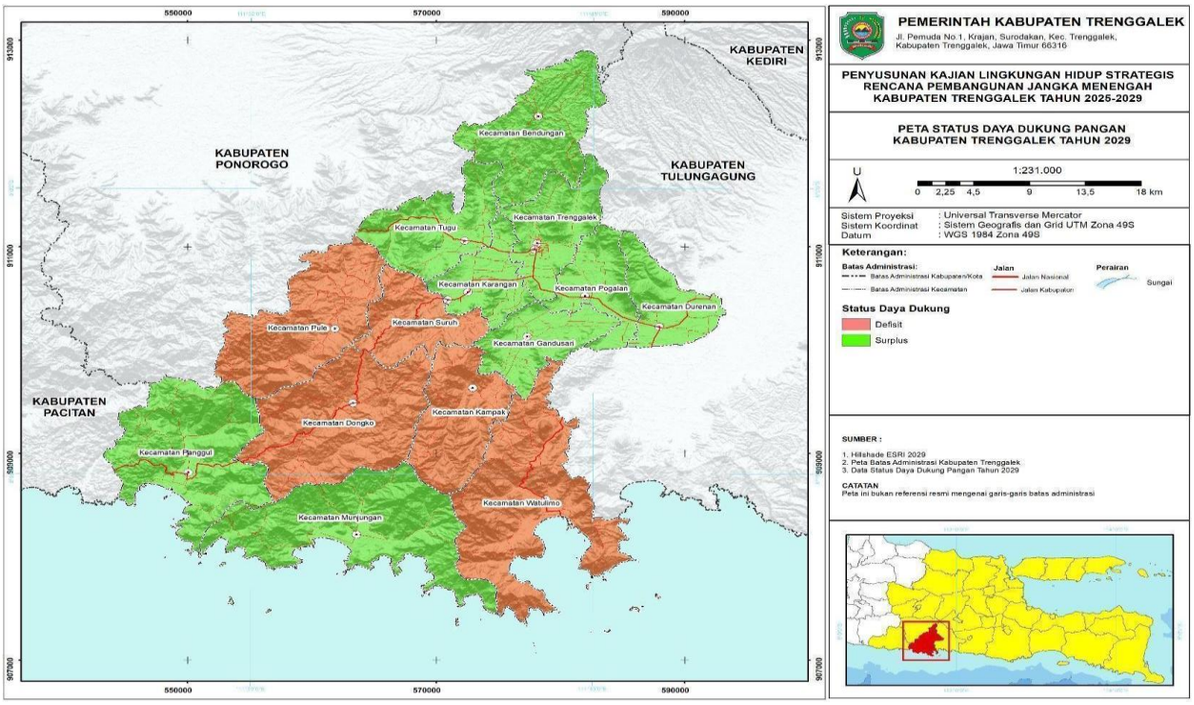
Berdasarkan hasil analisis kondisi status daya dukung pangan pada tahun 2029 sebagai tahun akhir perencanaan dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan angka konsumsi beras sebesar 2.881,07 ton. Hal ini memberikan konsekuensi pada pengurangan nilai daya dukung pangan sebanyak “0,09” poin yang mengurangi nilai daya dukung dengan angka 1,00 poin. Sedangkan tidak ada perubahan status daya dukung pangan pada masing-masing kecamatan kecuali pada Kecamatan Pogalan. Masih terdapat 5 kecamatan yang berada pada status daya dukung pangan “defisit” diantaranya (Kecamatan Dongko, Kecamatan Kampak, Kecamatan Pule, Kecamatan Suruh, dan Kecamatan Watulimo).

Gambar II.9
Peta Status Daya Dukung Pangan Tahun 2023



Sumber: *Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023*

Gambar II.10
Peta Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Tahun 2029



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

c. Daya Dukung Air

Air adalah komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kelestarian air perlu untuk dijaga karena air sangat peka sebagai media interpretasi kualitas lingkungan. Daya dukung air yaitu kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat berupa ketersediaan air bersih. Daya dukung air dapat dihitung dengan menggunakan sistem grid atau membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Daya dukung tersebut air tersebut dinilai surplus ketika ketersediaan air mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Sementara itu, kondisi daya dukung air defisit menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan pada suatu wilayah. Setiap jenis penggunaan lahan memiliki koefisien limpasan yang berbeda. Selain itu, kondisi ketersediaan air di daerah juga berbeda karena perbedaan nilai curah hujan. Sementara itu, kebutuhan air (DA) didasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak.

1) Ketersediaan Air

Perhitungan ketersediaan air menggunakan rumus koefisien limpasan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Tingkat limpasan dicerminkan dari penggunaan lahan. Setiap penggunaan lahan. Setiap penggunaan lahan mempunyai tingkat menyerap air masing-masing. Data lain yang menjadi indikator adalah curah hujan rerata di Trenggalek. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil perhitungan ketersediaan air di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.12
Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek

Penggunaan Lahan	Luasan (A)	Koefisien (CI)	A x CI
Bangunan Non-Permukiman	13,18	0,7	9,22
Hutan Lahan Rendah Primer	959,2	0,1	95,93
Hutan Lahan Rendah Sekunder	11.548,15	0,1	1.154,81
Hutan Lahan Tinggi Primer	660,60	0,1	66,06
Hutan Lahan Tinggi Sekunder	18.415,28	0,1	1.841,53
Hutan Mangrove Sekunder	59,92	0,1	5,99
Hutan Rakyat	873,82	0,1	87,38
Hutan Tanaman	4.647,26	0,1	464,73
Industri, Perdagangan dan Perkantoran	12,43	0,7	8,70
Kebun Campuran	33.113,26	0,2	6.622,65
Ladang/Tegalan Hortikultura	1.516,80	0,1	151,68
Ladang/Tegalan Palawija	13.414,88	0,1	1.341,49
Lahan Terbuka	57,85	0,1	5,78
Perkebunan Kelapa	492,35	0,2	98,47
Perkebunan Lain	1.184,95	0,2	236,99
Perkebunan Tebu	253,66	0,2	50,73
Permukiman Desa	20.541,73	0,7	14.379,21
Permukiman Kota	262,38	0,7	183,67
Sawah Padi Terus Menerus	9.628,96	0,2	1.925,79
Sawah Padi/Bera	3.792,27	0,2	758,45
Semak	43,09	0,07	3,02
Semak Belukar	4.695,33	0,07	328,67
Tanaman Lahan Kering Lain	95,31	0,2	19,06
Tubuh Air	825,10	0,1	82,51
Total	126.407,85	Total	29.922,54
Koefisien limpasan tertimbang			**0,24**
Rata-rata curah hujan			**2.616,5**
Koefisien resapan			**0,76**
Ketersediaan air tanah			**2.542.853.785,33**
Ketersediaan Air permukaan			**782.923.208,69**
Ketersediaan air total (m3/tahun)			**3.325.776.994,01**

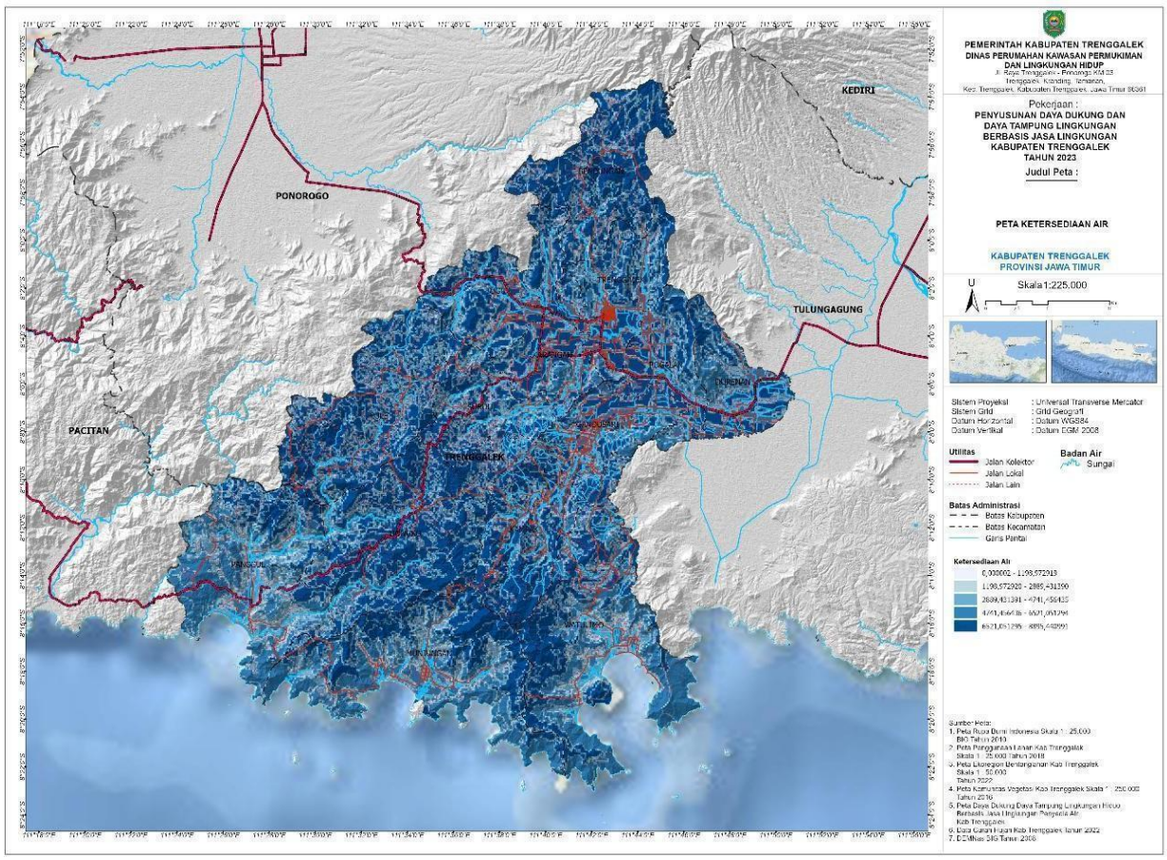
Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Nilai koefisien bergantung pada kemampuan lahan untuk menyerap air. Hutan mempunyai nilai rendah karena menyerap air lebih banyak dibandingkan perumahan. Koefisien limpasan penggunaan lahan pada tahun 2023 mencapai 0,24 yang artinya bahwa air hujan tidak masuk ke dalam tanah tetapi menjadi air yang mengalir di permukaan sebesar 24% dari total ketersediaan air. Air permukaan tersebut dianggap tidak dapat menjadi sumber air karena langsung masuk ke sistem sungai. Masih banyak penggunaan lahan berupa perkebunan, sawah, hutan di Kabupaten Trenggalek dapat menyerap air secara maksimal.

Curah hujan rerata tahunan di Kabupaten Trenggalek mencapai 2.616,5 mm/tahun. Nilai tersebut dihitung dengan menjumlah curah hujan rata-rata

dibagi dengan jumlah stasiun iklim di Kabupaten Trenggalek. Ketersediaan air di Kabupaten Trenggalek mencapai 782.923.208,69 m3/tahun, yang mana akan dibandingkan dengan data kebutuhan untuk mengetahui tingkat daya dukung air. Dapat dilihat peta persebaran ketersediaan air dengan volume tinggi berada pada bagian dataran tinggi dan kerapatan vegetasi tinggi. Sedangkan pada kawasan permukiman dan dataran rendah secara graudal memiliki ketersediaan air rendah dikarenakan tingginya tingkat konsumsi air untuk kebutuhunan domestik dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.11
Peta Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

Tabel II.13
Potensi Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek

No.	Keterangan	CI Embung	CI Hortikultura	CI Hutan	CI Perkebunan	CI Permukiman dan Tempat Kegiatan	CI Sawah	CI Semak Belukar	CI Sungai	CI Total	Koefisien Limpasan	Ketersediaan Air Limpasan
1.	Bendungan	0,00	258,85	513,19	94,62	365,54	263,86	20,21	2,17	1.518,44	0,16	39.730.111
2.	Dongko	0,07	106,64	80,14	1.866,78	1.115,96	484,07	47,77	6,81	2.516,58	0,18	65.846.316
3.	Durenan	0,00	97,57	3,98	62,03	883,79	952,85	66,07	2,29	2.068,57	0,42	54.124.154
4.	Gandusari	0,04	35,59	37,02	284,70	931,91	897,16	37,34	4,58	2.228,34	0,42	58.304.504
5.	Kampak	0,00	0,00	494,29	337,75	571,88	174,98	0,00	6,57	1.585,47	0,20	41.483.715
6.	Karangan	0,00	79,21	23,31	91,51	666,29	1.077,59	36,13	5,11	1.979,15	0,44	51.784.518
7.	Munjungan	0,00	128,16	672,60	587,32	672,36	699,34	116,64	7,81	2.403,33	0,16	62.883.129
8.	Panggul	0,04	361,91	74,26	891,36	1.049,51	840,15	100,73	10,91	2.734,22	0,21	71.540.866
9.	Pogalan	0,00	19,45	91,52	193,02	875,54	902,78	6,64	4,91	2.093,85	0,44	54.785.701
10.	Pule	0,00	326,16	14,42	917,74	1.198,67	571,34	64,59	4,22	2.403,11	0,21	62.877.373
11.	Suruh	0,05	160,42	13,72	404,88	512,55	199,51	56,79	4,49	1.665,33	0,30	43.573.359
12.	Trenggalek	0,00	54,19	138,37	259,30	745,12	784,02	49,36	6,35	2.036,71	0,33	53.290.628
13.	Tugu	0,00	182,55	79,70	171,35	764,18	897,58	86,05	8,79	2.190,20	0,31	57.306.520
14.	Watulimo	0,06	0,00	1.198,62	372,38	1.030,93	256,05	0,17	3,92	2.499,23	0,16	65.392.353
	Kabupaten Trenggalek	0,26	1.810,69	3.435,14	6.534,75	11.384,24	9.001,27	688,49	78,93	29.922,54	0,24	782.923.249

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

2) Kebutuhan Air

Perhitungan kebutuhan air dilakukan untuk mengetahui seberapa besar air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan meliputi kebutuhan air domestik, non domestik, pertanian, dan peternakan. Jumlah kebutuhan air domestik, pertanian, dan peternakan. Jumlah kebutuhan air domestik suatu wilayah diketahui melalui perkalian rata-rata atau asumsi penggunaan air setiap orang dengan jumlah penduduk wilayah kajian. Tabel menunjukkan potensi kebutuhan air di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.14
Potensi Kebutuhan Air Kabupaten Trenggalek

Komponen	Jumlah	Standar Kebutuhan Air (liter/orang/hari)	Kebutuhan Air (m^3/tahun)
Penduduk	757.444	90	24.882.035,40
Kegiatan Non Domestik		30% dari kebutuhan penduduk	7.464.610,62
Komponen	**Jumlah**	**Standar Kebutuhan Air (liter/ekor/hari)**	**Kebutuhan Air (m^3/tahun)**
Ternak Besar	52.681	40	769.142,6
Ternak Kecil	478.076	5	872.488,7
Unggas	2.280.861	0,6	499.508,56
Komponen	**Jumlah**	**Standar Kebutuhan Air (liter/ha/hari)**	**Kebutuhan Air (m^3/tahun)**
Pertanian	63.639,59	19.958,4	463.602.703,5
Total			**498.294.603,72**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Jumlah potensi kebutuhan air Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah sebesar 498.070.675,7 m3 /tahun. Sumbangan terbesar adalah kebutuhan untuk penduduk dengan kategori perkotaan kecil membutuhkan 90 liter/hari. Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan wilayah dengan penduduk 500.000-1.000.000 berdasarkan SNI 6.728:4 tahun 2015. Kebutuhan non domestik seperti infrastruktur diasumsikan 30% dari kebutuhan penduduk.

Hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan daya dukung di Kabupaten Trenggalek artinya ada ketersediaan air masih melebihi kebutuhan yang sangat besar. Hal itu terlihat dengan nilai Daya Dukung Air bernilai 1,57 sehingga mampu menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan konsumsi domestik. Jika ditelaah menjadi setiap kecamatan, terdapat 2 kecamatan dengan status “defisit” diantaranya adalah Kecamatan Dongko dan Kecamatan Pule. Hal itu dikarenakan potensi air ketersediaan air lebih besar dengan estimasi kebutuhan air yang digunakan dalam kecamatan tersebut. Pertanian menjadi sektor dengan kebutuhan air mencakup 90% dari total kebutuhan air masing-masing kecamatan. Sedangkan proyeksi status daya dukung pangan selama periode tahun 2025-2029 tidak menunjukkan perubahan status daya dukung air.

Tabel II.15
Proyeksi Status Daya Dukung Air

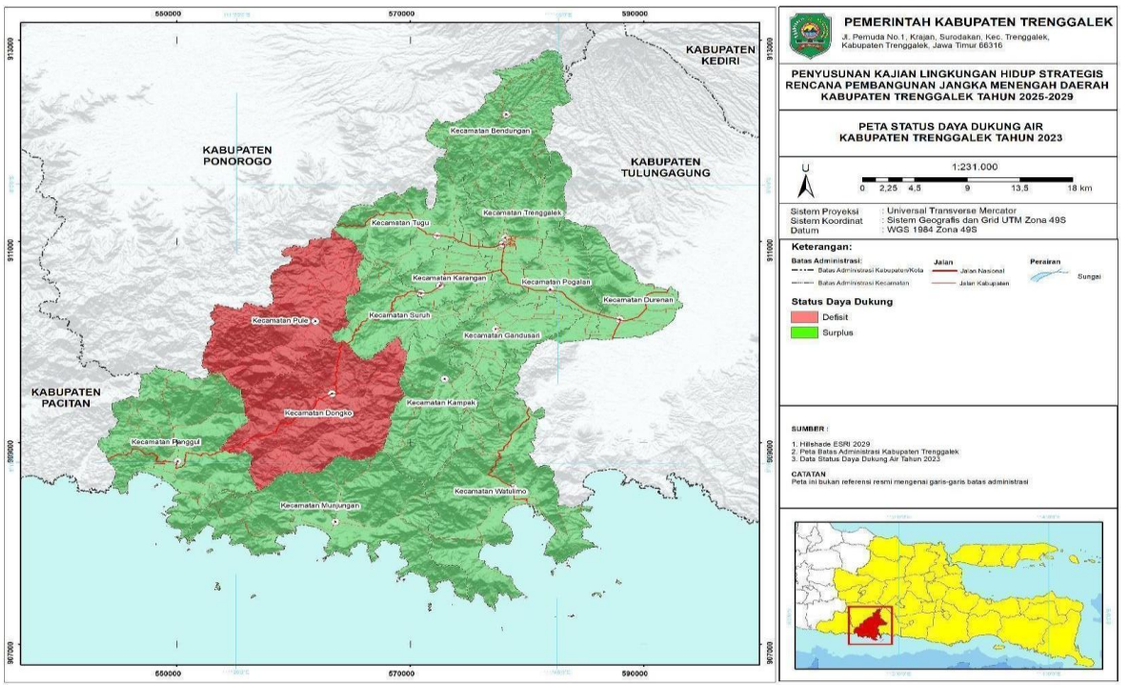
Kecamatan	Populasi	Kebutuhan Penduduk (m3/tahun)	Kegiatan Non-Domestik (m3/tahun)	Ternak Besar (ekor)	Kebutuhan Ternak Besar (m3/tahun)	Ternak Kecil (ekor)	Kebutuh an Ternak Kecil (m3/tahu n)	Unggas (ekor)	Kebutuh an Unggas (m3/tahu n)	Pertanian (ha)	Kebutuhan Pertanian (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air per Tahun (m3/tahun)	Ketersedia an Air	DDA	Status
Tahun 2025															
Bendungan	29.190	958.904	287.671,18	45.557	665.137,64	24.370	44.475,50	73.590	16.116,30	3.438,58	25.049.429	27.021.734	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	67.863	2.229.303	668.791,02	13.952	203.695,10	62.036	113.215,3	90.781	19.881,07	11.091,8	80.802.167	84.037.052	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	52.503	1.724.712	517.413,48	8.150	118.988,61	10.718	19.560,57	371.396	81.335,81	2.647,11	19.283.687	21.745.697	54.124.154	2,49	Surplus
Gandusari	54.841	1.801.534	540.460,11	11.044	161.246,38	10.849	19.798,70	231.527	50.704,30	3.061,05	22299.191	24.872.934	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	38.110	1.251.914	375.574,11	7.220	105.416,77	44.849	81.848,81	209.511	45.882,82	1.938,72	14.123.225	15.983.861	41.483.715	2,60	Surplus
Karangan	51.389	1.688.115	506.434,43	17.162	250.564,95	20.602	37.598,10	91.939	20.134,62	2.789,03	20.317.536	22.820.383	51.784.518	2,27	Surplus
Munjungan	55.636	1.827.628	548.288,30	4.554	66.493,20	42.603	77.750,05	120.019	26.284,11	5.217,22	38.006.477	40.552.920	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	81.237	2.668.634	800.590,34	23.137	337.797,80	70.635	128.908,5	90.331	19.782,41	9.276,12	67.574.820	71.530.533	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	54.694	1.796.698	539.009,51	12.158	177.506,15	6.287	11.473,95	171.446	37.546,58	2.449,25	17.842.367	20.404.601	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	58.274	1.914.313	574.293,89	19.363	282.702,59	79.462	145.018,7	224.893	49.251,59	8.666,46	63.133.598	66.099.178	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	26.650	875.447	262.634,00	8.523	124.437,91	29.439	53.725,72	79.038	17.309,30	3.913,57	28.509.640	29.843.194	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	67473	2.216.476	664.942,91	7.305	106.650,57	12.480	22.776,15	115.581	25.312,19	2.958,47	21.551.945	24.588.103	53.290.628	2,17	Surplus
Tugu	50.370	1.654.658	496.397,27	15.861	231.573,19	21.342	38.948,28	260.613	57.074,30	3.964,46	28.880.357	31.359.007	57.306.520	1,83	Surplus
Watulimo	73.999	2.430.857	729.257,09	4.228	61.734,24	21.002	38.329,20	72.947	15.975,38	2.227,68	16.228.247	19.504.399	65.392.353	3,35	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**762.228**	**25.039.192**	**7.511.758**	**198.215**	**2.893.945**	**456.673**	**833.428**	**2.203.610**	**482.591,0**	**63.640**	**463.602.684**	**500.363.597**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2026															
Bendungan	29.196	959.088	287.726,6	45.832	669.152,98	24.766	45.198	74.035	16.214	3.438,58	25.049.429	27.026.809	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	69.671	2.288.692	686.607,7	14.036	204.924,78	63.043	115.054	91.329	20.001	11.091,8	80.802.167	84.117.447	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	52.984	1.740.524	522.157,3	8.199	119.706,92	10.892	19.878	373.638	81.827	2.647,11	19.283.687	21.767.781	54.124.154	2,49	Surplus
Gandusari	55.265	1.815.455	544.636,6	11.111	162.219,80	11.025	20.120	232.924	51.010	3.061,05	22299.191	24.892.633	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.152	1.286.143	385.843,0	7.264	106.053,15	45.577	83.178	210.775	46.160	1.938,72	14.123.225	16.030.602	41.483.715	2,59	Surplus
Karangan	51.831	1.702.648	510.794,5	17.266	252.077,57	20.936	38.209	92.494	20.256	2.789,03	20.317.536	22.841.521	51.784.518	2,27	Surplus
Munjungan	55.606	1.826.657	547.997,1	4.582	66.894,61	43.295	79.013	120.743	26.443	5.217,22	38.006.477	40.553.482	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	83.044	2.727.995	818.398,6	23.277	339.837,04	71.782	131.003	90.876	19.902	9.276,12	67.574.820	71.611.955	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	54.827	1.801.067	540.320,1	12.231	178.577,73	6.389	11.660	172.481	37.773	2.449,25	17.842.367	20.411.765	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	58.943	1.936.278	580.883,3	19.480	284.409,23	80.753	147.374	226.251	49.549	8.666,46	63.133.598	66.132.091	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	27.301	896.838	269.051,4	8.575	125.189,12	29.917	54.598	79.515	17.414	3.913,57	28.509.640	29.872.731	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	68.350	2.245.298	673.589,3	7.349	107.294,40	12.683	23.146	116.279	25.465	2.958,47	21.551.945	24.626.737	53.290.628	2,16	Surplus

Kecamatan	Populasi	Kebutuhan Penduduk (m3/tahun)	Kegiatan Non-Domestik (m3/tahun)	Ternak Besar (ekor)	Kebutuhan Ternak Besar (m3/tahun)	Ternak Kecil (ekor)	Kebutuh an Ternak Kecil (m3/tahu n)	Unggas (ekor)	Kebutuh an Unggas (m3/tahu n)	Pertanian (ha)	Kebutuhan Pertanian (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air per Tahun (m3/tahun)	Ketersedia an Air	DDA	Status
Tugu	50.779	1.668.090	500.427,0	15.957	232.971,16	21.688	39.581	262.187	57.419	3.964,46	28.880.357	31.378.845	57.306.520	1,83	Surplus
Watulimo	74.296	2.440.624	732.187,1	4.254	62.106,93	21.343	38.952	73.387	16.072	2.227,68	16.228.247	19.518.188	65.392.353	3,35	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**771.245**	**25.335.398**	**7.600.619**	**199.412**	**2.911.415**	**464.091**	**846.966**	**2.216.914**	**485.504,1**	**63.640**	**463.602.684**	**500.782.587**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2027															
Bendungan	29.373	964.903	289.470,9	46.109	673.193	25.168	45.932	74.482	16.311	3.438,58	25.049.429	27.039.239	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	70.091	2.302.489	690.746,8	14.121	206.162	64.068	116.923	91.881	20.122	11.091,8	80.802.167	84.138.610	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	53.304	1.751.036	525.310,9	8.249	120.430	11.069	20.201	375.894	82.321	2.647,11	19.283.687	21.782.986	54.124.154	2,48	Surplus
Gandusari	55.599	1.826.427	547.928,1	11.178	163.199	11.204	20.447	234.330	51.318	3.061,05	22299.191	24.908.511	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.388	1.293.896	388.168,7	7.308	106.693	46.318	84.529	212.048	46.438	1.938,72	14.123.225	16.042.951	41.483.715	2,59	Surplus
Karangan	52.144	1.712.930	513.879,1	17.370	253.599	21.276	38.829	93.052	20.378	2.789,03	20.317.536	22.857.153	51.784.518	2,27	Surplus
Munjungan	55.942	1.837.695	551.308,4	4.609	67.298	43.998	80.296	121.472	26.602	5.217,22	38.006.477	40.569.677	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	83.545	2.744.453	82.3336	23.417	341.889	72.948	133.131	91.425	20.022	9.276,12	67.574.820	71.637.650	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	55.158	1.811.940	543.582,1	12.305	179.656	6.493	11.850	173.522	38.001	2.449,25	17.842.367	20.427.396	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	59.299	1.947.972	584.391,6	19.598	286.126	82.065	149.768	227.617	49.848	8.666,46	63.133.598	66.151.704	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	27.465	902.225	270.667,6	8.626	125.945	30.403	55.485	79.995	17.519	3.913,57	28.509.640	29.881.482	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	68.763	2.258.865	677.659,4	7.393	107.942	12.889	23.522	116.980	25.619	2.958,47	21.551.945	24.645.552	53.290.628	2,16	Surplus
Tugu	51.085	1.678.142	503.442,7	16.053	234.378	22.040	40.224	263.769	57.765	3.964,46	28.880.357	31.394.309	57.306.520	1,83	Surplus
Watulimo	74.745	2.455.373	736.612	4.280	62.482	21.690	39.585	73.830	16.169	2.227,68	16.228.247	19.538.467	65.392.353	3,35	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**775.901**	**25.488.348**	**7.646.504**	**200.616**	**2.928.991**	**471.629**	**860.724**	**2.230.297**	**488.435**	**63.640**	**463.602.684**	**501.015.686**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2028															
Bendungan	29.550	970.718	291.215,3	46.387	677.257	25.577	46.678	74.931	16410	3.438,58	25.049.429	27.051.706	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	70.514	2.316.385	694.915,5	14.206	207.406	65.108	118.823	92.435	20243	11.091,8	80.802.167	84.159.940	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	53.626	1.761.614	528.484,2	8.298	121.157	11.249	20.529	378.163	82818	2.647,11	19.283.687	21.798.289	54.124.154	2,48	Surplus
Gandusari	55.934	1.837.432	551.229,6	11.246	164.184	11.386	20.779	235.745	51628	3.061,05	22299.191	24.924.444	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.626	1.301.714	390.514,2	7.352	107.337	47.070	85.903	213.328	46719	1.938,72	14.123.225	16.055.412	41.483.715	2,58	Surplus
Karangan	52.459	1.723.278	516.983,4	17.475	255.130	21.622	39.460	93.614	20501	2.789,03	20.317.536	22.872.890	51.784.518	2,26	Surplus
Munjungan	56.279	1.848.765	554.629,5	4.637	67.705	44.713	81.601	122.206	26763	5.217,22	38.006.477	40.585.940	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	84.050	2.761.043	828.312,8	23.558	343.953	74.133	135.293	91.976	20143	9.276,12	67.574.820	71.663.564	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	55.491	1.822.879	546.863,8	12.379	180.740	6.598	12.042	174.569	38231	2.449,25	17.842.367	20.443.123	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	59.657	1.959.732	587.919,7	19.716	287.853	83.398	152.201	228.991	50149	8.666,46	63.133.598	66.171.454	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	27.631	907.678	272.303,5	8.678	126.705	30.897	56.387	80.478	17625	3.913,57	28.509.640	29.890.338	43.573.359	1,46	Surplus

Kecamatan	Populasi	Kebutuhan Penduduk (m3/tahun)	Kegiatan Non-Domestik (m3/tahun)	Ternak Besar (ekor)	Kebutuhan Ternak Besar (m3/tahun)	Ternak Kecil (ekor)	Kebutuh an Ternak Kecil (m3/tahu n)	Unggas (ekor)	Kebutuh an Unggas (m3/tahu n)	Pertanian (ha)	Kebutuhan Pertanian (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air per Tahun (m3/tahun)	Ketersedia an Air	DDA	Status
Trenggalek	69.178	2.272.497	681.749,2	7.438	108.594	13.098	23.904	117.687	25773	2.958,47	21.551.945	24.664.463	53.290.628	2,16	Surplus
Tugu	51.394	1.688.293	506.487,9	16.150	235.792	22.399	40.877	265.362	58114	3.964,46	28.880.357	31.409.922	57.306.520	1,82	Surplus
Watulimo	75.196	2.470.189	741.056,6	4.305	62.859	22.042	40.228	74.276	16266	2.227,68	16.228.247	19.558.845	65.392.353	3,34	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**780.585**	**25.642.217**	**7.692.665**	**201.827**	**2.946.673**	**479.290**	**874.705**	**2.243.761**	**491383,6**	**63.640**	**463.602.684**	**501.250.328**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2029															
Bendungan	29.728	976.564	292.969,4	46.667	681.345	25.993	47.436	75.384	16.509	3.438,58	25.049.429	27.064.254	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	70.940	2.330.379	699.113,7	14.292	208.659	66.166	120.753	92.993	20.366	11.091,8	80.802.167	84.181.436	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	53.949	1.772.225	531.667,4	8.348	121.888	11.432	20.863	380.446	83.318	2.647,11	19.283.687	21.813.648	54.124.154	2,48	Surplus
Gandusari	56.272	1.848.535	554.560,6	11.313	165.175	11.571	21.117	237.168	51.940	3.061,05	22299.191	24.940.519	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.865	1.309.565	392.869,6	7.396	107.985	47.834	87.298	214.616	47.001	1.938,72	14.123.225	16.067.944	41.483.715	2,58	Surplus
Karangan	52.776	1.733.692	520.107,5	17.580	256.670	21.973	40.101	94.179	20.625	2.789,03	20.317.536	22.888.732	51.784.518	2,26	Surplus
Munjungan	56.619	1.859.934	557.980,2	4.665	68.113	45.439	82.926	122943	26.925	5.217,22	38.006.477	40.602.356	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	84.557	2.777.697	833.309,2	23.701	346.029	75.337	137.491	92.532	20.264	9.276,12	67.574.820	71.689.611	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	55.826	1.833.884	550.165,2	12.454	181.831	6.706	12.238	175.623	38.461	2.449,25	17.842.367	20.458.947	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	60.017	1.971.558	591.467,5	19.835	289.591	84.753	154.673	230.373	50.452	8.666,46	63.133.598	66.191.340	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	27.798	913.164	273.949,3	8.731	127.470	31.399	57.303	80.964	17.731	3.913,57	28.509.640	29.899.257	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	69.595	2.286.196	685.858,7	7.483	109.249	13.311	24.292	118.397	25.929	2.958,47	21.551.945	24.683.470	53.290.628	2,16	Surplus
Tugu	51.704	1.698.476	509.542,9	16.248	237.216	22.762	41.541	266.964	58.465	3.964,46	28.880.357	31.425.599	57.306.520	1,82	Surplus
Watulimo	75.650	2.485.103	745.530,8	4.331	63.239	22.401	40.881	74.724	16.365	2.227,68	16.228.247	19.579.364	65.392.353	3,34	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**785.297**	**25.797.006**	**7.739.092**	**203.045**	**2.964.462**	**487.076**	**888.913**	**2.257.306**	**494.350,1**	**63.640**	**463.602.684**	**501.486.508**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**

***Sumber**: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024*

Gambar II.12
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

d. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung diketahui dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung. Koefisien lindung untuk guna lahan, dan luas wilayah. Nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 hingga 1. Nilai daya dukung fungsi lindung yang mendekati angka 1 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut semakin baik. Sementara itu, wilayah dengan nilai daya dukung fungsi lindung mendekati 0 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut tergolong rendah atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya

Tabel II.16
Koefisien Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 – 1,00

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Tabel II.17
Koefisien Lindung Kabupaten Trenggalek

Penggunaan Lahan	Luasan (A)	Koefisien (CI)	A x CI
Bangunan Non-Permukiman	13,07	0,18	2,35
Hutan Mangrove	59,43	1	59,43
Hutan Primer	2.731,58	1	2731,58
Hutan Sekunder	28.855,88	0,68	19622,00
Hutan Tanaman	5.474,10	0,68	3722,39

Penggunaan Lahan	Luasan (A)	Koefisien (CI)	A x CI
Industri, Perdagangan dan Perkantoran	12,35	0,18	2,22
Kebun Campuran	32.850,58	0,42	13797,24
Ladang/Tegalan	15.491,06	0,21	3253,12
Lahan Terbuka	57,36	0,01	0,57
Pemukiman	20.644,16	0,18	3715,95
Perkebunan	1.915,80	0,42	804,64
Sawah Irigasi	9.557,69	0,46	4396,54
Sawah Tadah Hujan	3.763,22	0,46	1731,08
Semak Belukar	4.927,55	0,28	1379,71
Tanaman Lahan Kering Lain	94,55	0,37	34,98
Tubuh Air	818,72	0,98	802,35
Total	**124.407,85**	**0,44**	**56.056,15**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Berdasarkan tabel di atas kondisi daya dukung fungsi lindung Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 0,44. Kabupaten Trenggalek memiliki daya dukung fungsi lindung pada tingkat sedang. Fungsi lindung Kabupaten Trenggalek didukung dengan adanya lahan hutan produksi dan beberapa hutan lindung yang cukup besar di kawasan perbukitan dan pegunungan. Sedangkan pada kawasan dataran rendah, penggunaan lahan didominasi oleh budidaya pertanian dan lahan terbangun.

Daya dukung fungsi lindung diketahui dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung. Koefisien lindung untuk guna lahan, dan luas wilayah. Nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 hingga 1. Nilai daya dukung fungsi lindung yang mendekati angka 1 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut semakin baik. Sementara itu, wilayah dengan nilai daya dukung fungsi lindung mendekati 0 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut tergolong rendah atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

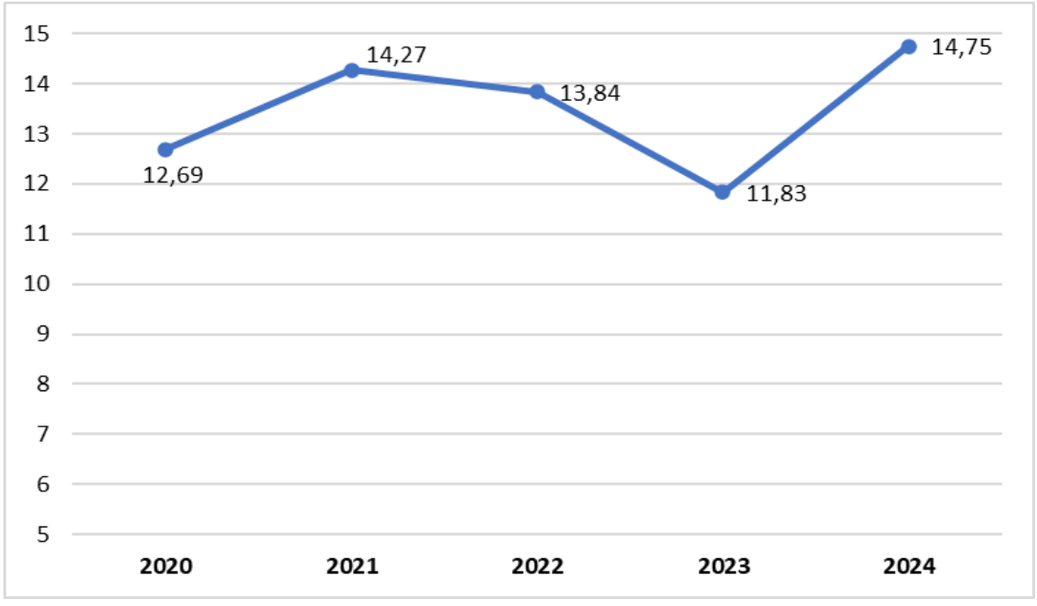
Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan memegang peran krusial dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan energi yang andal, akses terhadap air bersih, dan terpenuhinya kebutuhan pangan adalah fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas wilayah. Ketiganya saling memengaruhi—gangguan pada satu aspek dapat berdampak langsung terhadap aspek lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan terpadu dan berkelanjutan atas sumber daya energi, air, dan pangan menjadi strategi kunci dalam mewujudkan kemandirian daerah dan ketahanan nasional di masa depan.

a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Trenggalek selama periode 2020 hingga 2024 mengalami perubahan dengan angka berturut-turut sebesar 12,69% pada 2020, meningkat menjadi 14,27% di 2021 dan 13,84% pada 2022, lalu menurun menjadi 11,83% pada 2023, dan kembali

meningkat menjadi 14,75% pada 2024. Kenaikan selama dua tahun awal dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan daya beli masyarakat dan mengganggu distribusi pangan. Penurunan pada tahun 2023 mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi serta peningkatan efektivitas intervensi program ketahanan pangan, termasuk penguatan akses dan distribusi pangan yang lebih merata. Meski demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menjamin kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, terutama di wilayah rentan, sehingga perlu terus didorong kebijakan yang mendukung produksi lokal, diversifikasi pangan, dan pemberdayaan masyarakat dan keterjangkauan pangan.

Grafik II.3
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

b. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi listrik per kapita, kebutuhan total energi di Kabupaten Trenggalek diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2023, berdasarkan perencanaan jangka panjang, maka dibutuhkan listrik per kapita mencapai 367,17 kwh/kapita, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 391,47 kwh/kapita. Peningkatan jumlah penduduk secara konsisten ini turut mendorong kenaikan konsumsi listrik secara keseluruhan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas publik, maupun aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup, meningkatnya tingkat elektrifikasi, serta peran aktif pemerintah daerah dan penyedia listrik dalam memperluas akses dan keandalan infrastruktur kelistrikan.

Hal ini menuntut perencanaan yang lebih proaktif dalam penyediaan dan pengelolaan energi, khususnya dalam memperkuat kapasitas jaringan

distribusi listrik serta memastikan ketersediaan pasokan yang andal dan merata. Dalam konteks ini, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang, mengingat potensi alamiah Trenggalek yang mendukung pengembangan energi bersih dan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan prinsip efisiensi energi menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan konsumsi dan kelestarian sumber daya. Pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan peralatan listrik hemat energi, penerapan smart grid, serta kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan energi secara bijak. Dengan pendekatan ini, Trenggalek tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik warganya yang terus bertambah, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan energi secara jangka panjang.

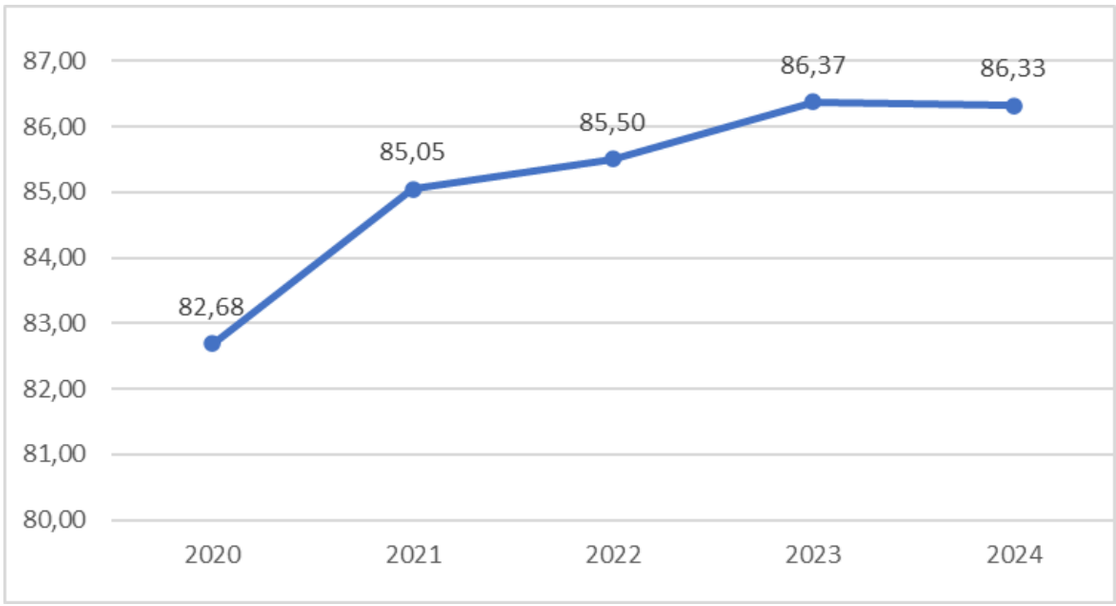
c. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan merupakan jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air minum baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan perkotaan dilayani oleh PDAM sedangkan pedesaan berasal dari sumber air, sumur dangkal, sumur bor, maupun berasal dari penampungan air hujan. Untuk mengetahui capaian akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum digunakan formula jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan dibandingkan dengan total rumah tangga.

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Trenggalek melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan mengalami perubahan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan akses tercatat 82,68%, tahun 2021 sebesar 85,05%, tahun 2022 sebesar 85,50%, tahun 2023 meningkat menjadi 86,37%, dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 86,33%.

Upaya peningkatan akses air minum sudah menunjukkan tren yang positif. Beberapa faktor pendukung pencapaian tersebut diantaranya adalah berjalannya program DAK air minum, Pamsimas, hibah air minum, dan peningkatan jumlah pelanggan PDAM. Namun demikian terdapat beberapa faktor tantangan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan akses air minum kedepan diantaranya adalah pertumbuhan jumlah rumah tangga yang tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur, keterbatasan sumber air baku di wilayah tertentu, serta kerusakan fasilitas SPAM yang belum tertangani secara optimal. Untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan akses air minum, diperlukan langkah-langkah strategis seperti rehabilitasi jaringan perpipaan, pengembangan sumber air baku alternatif, dan penguatan kelembagaan pengelola SPAM yang adaptif terhadap tantangan geografis dan perubahan iklim.

Grafik II.4
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2025

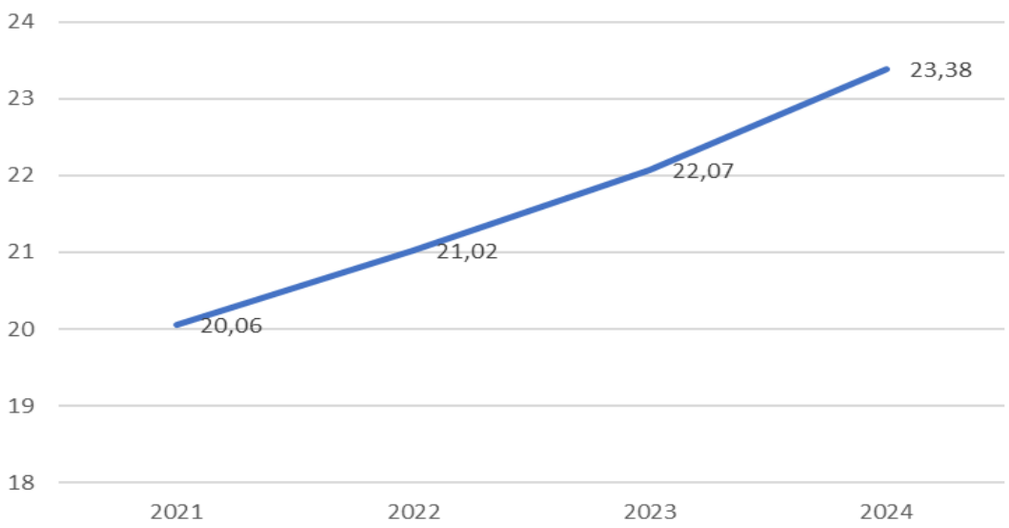
e. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan beban ekonomi rumah tangga, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target 6.1 yaitu “menjamin akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua”. Formula perhitungannya adalah jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap layanan sambungan rumah oleh PDAM dibagi dengan jumlah rumah tangga perkotaan seluruhnya.

Pelayanan air siap minum berbasis perpipaan di wilayah perkotaan mencerminkan kemajuan infrastruktur dasar dan tata kelola penyediaan air minum yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Sistem perpipaan dinilai sebagai metode distribusi air yang paling efektif dalam menjangkau populasi secara luas, terutama pada kawasan padat penduduk. Namun demikian, pengembangan sistem ini memerlukan dukungan pendanaan, perencanaan teknis yang matang, dan manajemen kelembagaan yang kuat. Hingga tahun 2024, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Trenggalek sebesar 23,38%. Perhitungan ini berdasarkan jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses sambungan rumah oleh PDAM

dibandingkan dengan total jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Trenggalek. Pada tahun tersebut jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Trenggalek sebesar 18.509 sambungan rumah (SR) dengan jumlah penduduk perkotaan sebesar 288.156 jiwa. Adapun perkembangan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II.5
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan



Sumber: PDAM Kab. Trenggalek, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu indikator pengukur keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara, air dan lahan. IKLH dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai awal sebesar 65,60 pada tahun 2020 dan mencapai 75,27 pada tahun 2024. Analisis terhadap komponen penyusunnya menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) secara konsisten mencatat skor tertinggi dibandingkan dua komponen lainnya, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kualitas udara terus meningkat signifikan dari skor 80,18 pada tahun 2020 menjadi 94,84 pada tahun 2024, menjadikannya penyumbang terbesar terhadap capaian IKLH.

Sementara itu, IKA menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dari 55,00 pada tahun 2020, sempat naik ke 67,30 pada 2022, lalu turun menjadi 49,48

pada 2023, sebelum kembali naik ke 55,50 pada 2024. Di sisi lain, IKL juga menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, dari 62,62 pada tahun 2020 menjadi 73,05 pada 2024. Indeks kualitas lahan pada tahun 2024 menurun sebesar 0,75 yang disebabkan oleh meningkatnya degradasi lahan di beberapa lokasi yang diindikasikan dengan terjadinya longsor. Selain itu Kabupaten Trenggalek juga masih memiliki lahan kritis. Tercatat, pada tahun 2024 luas lahan kritis di Kabupaten Trenggalek sebesar 17.853 ha. Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 juga disebabkan adanya penurunan pada Indeks Kualitas Air yang menurun hingga mencapai 49,48 pada saat pengambilan sampel. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat hal serupa pernah terjadi pada tahun 2021.

Peningkatan IKLH secara umum ini, merupakan capaian positif yang tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendorong peran serta masyarakat melalui program-program seperti Adipura Desa, Desa Berseri, Program Kampung Iklim (Proklim), serta Sekolah Adiwiyata yang aktif mengedukasi dan menggerakkan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan seperti Program Kali Bersih, aksi bersih pantai, donasi pohon, dan gerakan penanaman pohon juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas udara, air, dan lahan. Sinergi dari berbagai program tersebut memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,60	67,83	74,27	69,83	75,27
	- Indeks Kualitas Air	55,00	51,56	67,30	49,48	55,5
	- Indeks Kualitas Udara	80,18	82,66	83,97	86,59	94,84
	- Indeks Kualitas Lahan	62,62	68,32	68,32	73,78	73,05

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025

b. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak luas terhadap kesehatan, kebersihan lingkungan, serta estetika wilayah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Pengolahan sampah dilakukan pada material dan *energy recovery* seperti pengolahan sampah organik, anorganik low value, dan residu menjadi: 1) produk seperti kompos, pakan, perkakas rumah, material konstruksi; dan 2) energi dan/atau bahan bakar lainnya seperti PLTSa, pirolisis, insenerasi, gasifikasi, dan Refuse Derived Fuel (RDF). Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan seperti: TPS 3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), PLTSa, RDF plant atau fasilitas

pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah, swasta, dan/atau lembaga non pemerintah berbadan hukum (koperasi, KSM, dan lainnya).

Di Kabupaten Trenggalek, timbulan sampah pada tahun 2024 tercatat sebesar 302,44 ton per hari berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 756.109 jiwa, dengan asumsi rata-rata timbulan sampah per jiwa sebesar 0,0004 ton/hari. Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga seperti dari kawasan komersial, industri, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, sebagian besar belum terolah secara optimal. Pengolahan yang diterapkan meliputi pemilahan, daur ulang, pengomposan, pemanfaatan kembali atau teknologi lainnya melalui fasilitas seperti TPS3R, Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah, dan lainnya

Dari total timbulan sampah tersebut, hanya sekitar 37,46 ton per hari yang berhasil diolah melalui berbagai sarana pengolahan yang tersedia. Pengolahan ini berasal dari Komposting Skala kecil atau RT/RW di 40 desa peserta Lomba Adipura Desa (7,60 ton/hari), Bank Sampah (1,85 ton/hari), Pengepul / Lapak sampah (21,35 ton/hari), TPS3R (3,96 ton/hari) dan pemanfaatan ulang sampah/reuse (2,95 ton/hari). Bila dihitung berdasarkan total timbulan sampah yang dihasilkan maka persentase timbulan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan hanya mencapai 12,39%. Angka ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan telah diimplementasikan dan berfungsi secara efektif di Kabupaten Trenggalek.

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan pengumpulan sampah merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif. Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) baik dengan metode pengumpulan tercampur maupun terpilah sesuai jenis sampah, dengan syarat: 1) dari pintu ke pintu (door to door); atau 2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan. Layanan pengolahan sampah di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu pengumpulan langsung dari pintu ke pintu dengan frekuensi minimal dua kali seminggu dan pengumpulan melalui tempat pengumpulan komunal yang berjarak tidak lebih dari 200 meter dari rumah tangga. Pentingnya layanan ini terletak pada upaya mencegah praktik pembuangan sampah sembarangan serta mendukung pemilahan sampah sejak dari sumber, dengan pemisahan ke dalam fraksi basah, daur ulang, dan residu. Kabupaten Trenggalek saat ini memiliki 99 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan 7 TPS3R yang berperan dalam mendukung pengumpulan dan pengolahan sampah. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 102 ton per hari. Dengan perhitungan asumsi satu kepala keluarga terdiri dari empat jiwa, maka diperoleh proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 34,84% pada tahun 2023 dan 35,03% pada tahun 2024. Persentase ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam memperluas cakupan

layanan pengumpulan sampah yang terstruktur, terutama untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal.

d. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Lingkungan hidup yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan tersedianya akses sanitasi yang aman bagi masyarakat. Sanitasi yang memenuhi standar aman tidak hanya berkontribusi pada kesehatan individu dan keluarga, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah penyebaran penyakit menular. Akses sanitasi yang memadai merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga upaya peningkatan kualitas sanitasi rumah tangga menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup di daerah.

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Formula perhitungan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Di Kabupaten Trenggalek, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2023-2024 cenderung tetap sebesar 0,19%. Peningkatan yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses sanitasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur yang belum merata, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung praktik sanitasi sehat, maupun keterbatasan layanan dasar yang tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan intervensi yang lebih efektif dan terintegrasi, guna mendorong peningkatan akses sanitasi yang aman dan berkelanjutan demi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.19
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman (berdasarkan cakupan layanan IPALD komunal)	540	540
Jumlah Rumah Tangga	280.350	283.435
Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	0,19	0,19

Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2025

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2024, terlihat tren penurunan risiko bencana secara konsisten. Pada tahun 2020, IRB tercatat sebesar 151,25 dan terus menurun menjadi 130,29 pada 2021, 122,72 pada 2022, 116,44 pada 2023, hingga mencapai 109,65 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam upaya pengurangan risiko bencana, meskipun begitu tingkat risiko di Trenggalek masih tergolong sedang sehingga tetap memerlukan perhatian. Perhitungan IRB tersebut berdasarkan pada Hazard and Vulnerability (H&V) tahun 2011 sebagai dasar perhitungan.

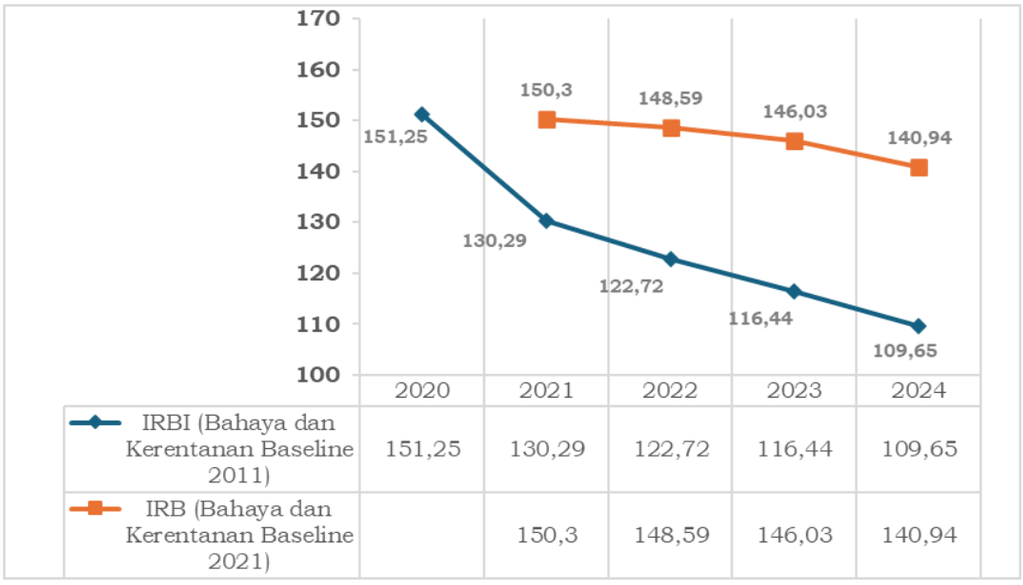
Pada tahun 2021, BNPB melakukan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menghasilkan Hazard and Vulnerability (H&V) yang baru sebagai dasar perhitungan dan penetapan target IRB mulai tahun 2025. Berdasarkan H & V 2021, IRB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 150,3; tahun 2022 sebesar 148,59; turun menjadi 146,03 pada tahun 2023, dan menjadi 140,94 pada tahun 2024. IRB tahun 2021-2024 inilah yang dijadikan baseline data masa lalu untuk menetapkan target IRB di tahun 2025-2030.

Upaya penguatan kapasitas penanggulangan bencana telah menjadi prioritas utama, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan secara rutin, serta pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lebih memadai. Selain itu, penyusunan dokumen kebencanaan seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon) terus dioptimalkan. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat, didukung dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan.

Koordinasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan semakin diperkuat melalui penetapan status tanggap darurat, pembentukan pos komando, serta kolaborasi dalam fase pra, saat, dan pasca bencana. Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan penguatan kolaborasi pentahelix menjadi kunci dalam memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap kejadian bencana. Optimalisasi data kebencanaan, sistem peringatan dini (EWS), serta percepatan dan keakuratan pelaporan juga terus ditingkatkan melalui pemutakhiran data dan dokumen perencanaan kebencanaan.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tetap menjadi fokus utama, di antaranya melalui sosialisasi dan simulasi kebencanaan, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta pelibatan aktif Tim Reaksi Cepat multi-sektor dan relawan penanggulangan bencana di wilayah. Dengan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan penurunan IRB Kabupaten Trenggalek dapat terus berlanjut dan risiko bencana dapat ditekan secara berkelanjutan.

Grafik II.6
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BNPB, 2024

Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, terutama bencana tanah longsor dan banjir. Tingkat kerawanan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek fisik dan alam seperti kondisi geologi, hidrologi, klimatologi, topografi yang bergelombang hingga pegunungan, serta tutupan lahan yang semakin berkurang. Selain faktor alam, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti alih fungsi lahan, pembukaan hutan tanpa konservasi, serta pengelolaan tata ruang yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, turut memperbesar risiko bencana.

Bencana tanah longsor umumnya terjadi pada musim penghujan dan seringkali menimbulkan kerugian material hingga korban jiwa. Beberapa kecamatan yang tergolong dalam kategori rawan tinggi terhadap longsor antara lain Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Gandusari, dan Bendungan. Daerah-daerah ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap pergerakan tanah akibat kondisi geologis dan curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi seperti rehabilitasi lingkungan, penguatan vegetasi di lahan kritis, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tanah longsor.

Selain tanah longsor, banjir juga menjadi bencana yang kerap melanda wilayah Trenggalek, terutama saat musim hujan. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas banjir meningkat dan menimbulkan kerugian cukup besar, termasuk kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Luasan kawasan rawan banjir di Trenggalek dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kawasan rawan tinggi seluas ±4.217 ha yang tersebar di sembilan kecamatan, kawasan rawan menengah seluas ±43.591 ha di hampir seluruh kecamatan, dan kawasan rawan rendah seluas ±77.455 ha yang tersebar di semua wilayah. Identifikasi ini penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan mitigasi banjir yang berbasis pada pengelolaan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, posisi geografis Kabupaten Trenggalek yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menjadikannya wilayah yang berpotensi terdampak tsunami. Potensi ini muncul akibat aktivitas gempa tektonik di zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berisiko terdampak tsunami antara lain Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul, dengan total luasan lebih dari 5.500 hektar. Dalam menghadapi potensi ini, dibutuhkan perencanaan mitigasi bencana seperti penyediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir.

Tabel II.20
Kejadian Bencana Alam Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No.	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Angin Kencang	Gempa Bumi	Kekeringan	Tanah Gerak	Kebakaran Hutan / Lahan
1.	Trenggalek	-	13	17	-	8	-	16
2.	Tugu	10	1	3	-	10	-	1
3.	Bendungan	48	-	12	-	4	-	-
4.	Gandusari	-	1	6	-	5	-	1
5.	Panggul	37	13	7	-	15	2	2
6.	Suruh	3	-	4	-	3	2	-
7.	Karangan	1	5	6	-	5	-	10
8.	Munjungan	29	10	3	-	1	-	-
9.	Watulimo	7	1	10	-	3	-	-
10.	Kampak	4	2	6	-	1	-	-
11.	Pule	12	-	2	-	3	-	-
12.	Dongko	14	-	4	-	5	-	-
13.	Pogalan	-	6	1	-	7	1	4
14.	Durenan	-	-	1	-	2	-	3
	Total	165	52	82	269	72	5	37

Sumber: BPBD Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan data kejadian bencana alam Kabupaten Trenggalek tahun 2023, tercatat bahwa gempa bumi merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan total 239 kejadian yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, menjadikannya jenis bencana paling dominan di wilayah ini. Disusul oleh kekeringan sebanyak 59 kejadian, kebakaran lahan dan hutan sebanyak 43 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 79 kejadian. Beberapa kecamatan yang mencatat kejadian gempa tertinggi adalah Pule (88 kejadian), Dongko (22 kejadian), dan Trenggalek (4 kejadian). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Trenggalek sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang kemungkinan besar berkaitan dengan posisinya yang dekat dengan zona subduksi lempeng.

Selain gempa bumi, tanah longsor juga menjadi bencana yang cukup signifikan, terutama terjadi di Kecamatan Panggul (22 kejadian), Dongko (16 kejadian), dan Watulimo (8 kejadian). Bencana banjir tercatat sebanyak 5 kejadian, sedangkan bencana angin kencang terjadi sebanyak 19 kali, dengan sebaran terbatas. Meskipun jumlah kejadian banjir dan angin kencang lebih sedikit dibandingkan gempa dan longsor, dampaknya tetap perlu diwaspadai karena dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat.

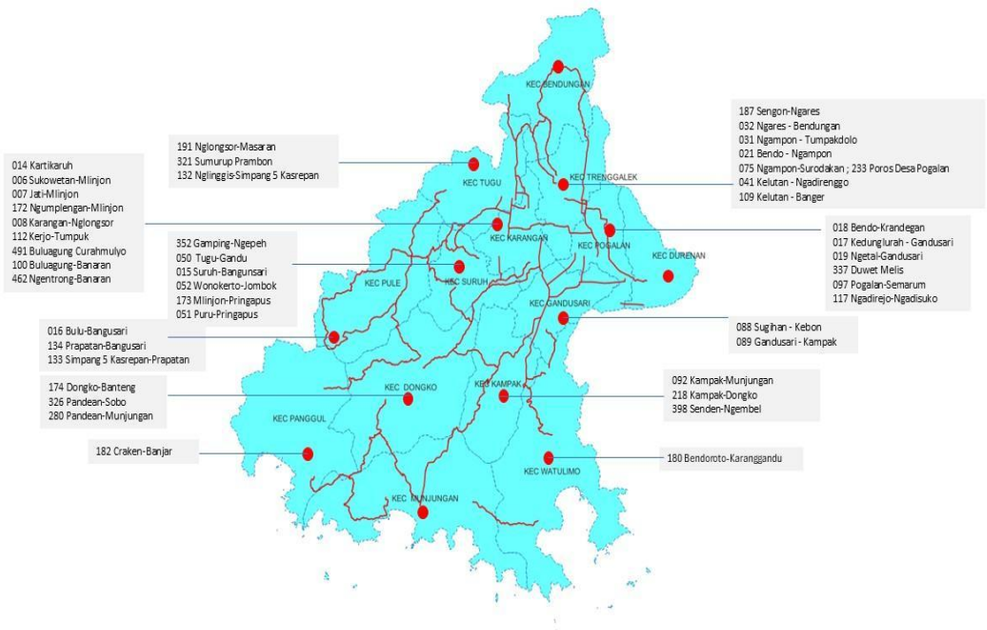
Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana di Trenggalek perlu difokuskan terutama pada penanggulangan dampak gempa bumi dan tanah longsor.

2.1.1.7 Indeks Konektivitas

Konektivitas wilayah adalah keterhubungan antara berbagai wilayah atau daerah yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang. Konektivitas antar wilayah memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang terhubung dengan baik akan mempermudah distribusi barang dari produsen ke konsumen dan lebih menarik bagi investor karena kemudahan akses ke pasar, bahan baku, dan tenaga kerja. Konektivitas wilayah juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena akses masyarakat ke fasilitas umum akan lebih mudah, yang berdampak juga pada pemerataan pembangunan.

Untuk mengukur keterhubungan antar wilayah ini digunakan Indeks Konektivitas. Indeks Konektivitas adalah angka yang mengukur tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui jaringan jalan, yang mencerminkan potensi interaksi antarwilayah dalam hal pergerakan manusia, barang, dan jasa. Semakin tinggi indeksnya, semakin baik konektivitas wilayah tersebut, yang ditandai dengan banyaknya jaringan jalan yang menghubungkan berbagai titik dalam wilayah tersebut. Indeks Konektivitas Kabupaten Trenggalek merupakan indikator baru yang diukur dengan komposit yang terdiri dari tiga variabel yaitu (1) jaringan jalan penghubung pusat kecamatan, (2) kemantapan jalan, dan (3) trayek angkutan. Dalam hal ini indeks konektivitas tidak hanya mengukur konektivitas jaringan jalan antar pusat kecamatan, tetapi juga melihat kualitas jalan yang ditunjukkan dengan tingkat kemantapan jalan. Lebih lanjut, indeks konektivitas juga mengukur ketersediaan sarana penghubung yang tergambarkan dalam jumlah trayek angkutan yang aktif beroperasi. Ketiga variabel tersebut kemudian diberikan bobot kepada masing-masing variabel berdasarkan urgensi dan target layanan yang ditetapkan. Rentang nilai indeks konektivitas adalah 0-1 yang artinya semakin mendekati 1 maka konektivitas antar kawasan di Kabupaten Trenggalek akan semakin baik. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka indeks konektivitas di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 sebesar 0,745 meningkat menjadi 0,748 di tahun 2023, dan menjadi 0,766 pada tahun 2024.

Gambar II.13
Jaringan Jalan Penghubung antar Kecamatan



Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2024

Kabupaten Trenggalek memiliki 14 kecamatan yang tersebar di wilayah kabupaten dan dihubungkan dengan jaringan jalan. Jaringan jalan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan kewenangannya terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Dalam hal ini variabel jaringan jalan penghubung pusat kecamatan menggunakan ruas jalan kewenangan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan tersebut. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, jumlah ruas jalan penghubung antar kecamatan sebesar 45 ruas. Dengan jumlah kecamatan sebesar 14 maka nilai variabel jaringan jalan penghubung tersebut sebesar 3,214. Nilai tersebut cenderung tetap dari tahun ke tahun karena sejak 5 tahun terakhir dan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan tidak ada rencana penambahan ruas jalan penghubung antar kecamatan yang baru.

Indeks konektivitas yang digunakan di Kabupaten Trenggalek mempertimbangkan variabel kemantapan jalan, karena kemantapan jalan berpengaruh terhadap kualitas konektivitas wilayah. Jalan yang mantap akan memperlancar mobilitas barang maupun penumpang. Berdasarkan data Dinas PUPR (2024), tingkat kemantapan jalan di 45 ruas penghubung antar kecamatan di Kabupaten Trenggalek sebesar 74,206 %. Terakhir, konektivitas yang baik ditunjukkan dengan ketersediaan trayek angkutan pedesaan. Hal ini juga sejalan dengan Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2024 yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pedoman tersebut konektivitas yang baik ditunjukkan dengan formula jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek dan kemudian dibagi jumlah kebutuhan trayek. Berdasarkan formula tersebut variabel trayek angkutan di Kabupaten Trenggalek sebesar 0,510 pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 0,673 pada tahun 2024. Adapun nilai variabel trayek angkutan di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.21
Trayek Angkutan

Keterangan	2022	2023	2024
Jumlah Layanan Trayek	5	6	6
Jumlah Moda	178	143	112
Jumlah Kebutuhan Trayek	7	7	7

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Gambar II.14
Peta Kebutuhan Trayek Angkutan



Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Dalam upaya meningkatkan indeks konektivitas di Kabupaten Trenggalek tentunya memenuhi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan kekuatan yang harus terus dioptimalkan untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun faktor pendukung peningkatan konektivitas di Kabupaten Trenggalek antara lain: 1) Kondisi alam dan potensi ekonomi seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata; 2) Komitmen dalam dokumen perencanaan; 3) Gotong royong dan partisipasi masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya antara lain: 1) Kondisi topografi pegunungan yang menyebabkan biaya konstruksi jalan tinggi; 2) Sering

terjadinya bencana yang merusak infrastruktur jalan; 3) Keterbatasan anggaran; 4) Penurunan jumlah pengguna angkutan umum.

2.1.1.8 Demografi

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Tabel II.22
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panggul	78.344	79.060	80.957	81.493	81.264
2.	Munjungan	52.908	53.381	54.159	54.498	54.441
3.	Watulimo	70.002	70.567	57.450	72.855	72.387
4.	Kampak	37.201	37.243	67.663	38.453	38.325
5.	Dongko	65.505	65.964	49.270	68.272	67.927
6.	Pule	55.822	56.168	50.451	57.843	57.585
7.	Karangan	49.930	50.251	38.275	50.853	50.612
8.	Suruh	26.028	26.105	71.927	26.795	26.795
9.	Gandusari	52.560	52.765	28.250	54.167	54.086
10.	Durenan	51.320	51.411	53.976	51.917	52.039
11.	Pogalan	52.234	52.525	66.621	53.737	53.608
12.	Trenggalek	64.306	64.297	53.614	66.887	66.862
13.	Tugu	47.829	47.903	51.722	49.749	49.433
14.	Bendungan	27.136	27.248	26.744	28.591	28.446
Kabupaten Trenggalek		**731.125**	**734.888**	**751.079**	**756.109**	**753.810**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021-2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2021-2025)

Pada tahun 2024 Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah penduduk sebanyak 753.810 jiwa. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berpenduduk sebanyak 731.125 jiwa. Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Panggul sebesar 81.264 jiwa.

Tabel II.23
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa) 2024	Kepadatan (jiwa/Km2)
1.	Panggul	131,56	81.264	617,7
2.	Munjungan	154,80	54.441	351,69

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa) 2024	Kepadatan (jiwa/Km2)
3.	Watulimo	154,44	72.387	468,71
4.	Kampak	79,00	38.325	485,13
5.	Dongko	141,20	67.927	481,07
6.	Pule	118,12	57.585	487,51
7.	Karangan	50,92	50.612	993,95
8.	Suruh	50,72	26.795	528,29
9.	Gandusari	54,96	54.086	984,1
10.	Durenan	57,16	52.039	910,41
11.	Pogalan	41,80	53.608	1.282,49
12.	Trenggalek	61,16	66.862	1.093,23
13.	Tugu	74,72	49.433	661,58
14.	Bendungan	90,84	28.446	313,14
2024		**1.261,40**	**753.810**	**597.60**
2023		**1.261,40**	**756.109**	**599,42**
2022		**1.261,40**	**751.079**	**586,39**
2021		**1.261,40**	**734.888**	**582,60**
2020		**1.261,40**	**731.125**	**579,61**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021-2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2021-2025)

Kabupaten Trenggalek selama lima tahun tidak mengalami pemutakhiran data luasan. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi tahun 2024 ada pada kecamatan Pogalan yakni sebesar 1.282,49 jiwa per km^2, sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Bendungan sebesar 313,14 jiwa per km^2.

Tabel II.24
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2022 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2024 (%)
1.	Panggul	-2,55	0,91	1,12	0,66	-0,28
2.	Munjungan	-1,00	0,89	1,10	0,63	-0,1
3.	Watulimo	-1,62	0,81	1,00	1,29	-0,64
4.	Kampak	-2,41	0,11	0,21	0,47	-0,33
5.	Dongko	-2,62	0,70	0,88	0,90	-0,51
6.	Pule	-2,16	0,62	0,79	0,68	-0,45
7.	Karangan	-1,89	0,64	0,81	0,80	-0,47
8.	Suruh	-3,17	0,30	0,41	0,19	0
9.	Gandusari	-3,15	0,39	0,52	0,35	-0,15
10.	Durenan	-1,43	0,18	0,28	0,38	0,23
11.	Pogalan	-3,81	0,56	0,71	0,23	-0,24
12.	Trenggalek	-4,13	0,01	0,06	0,40	-0,04
13.	Tugu	-3,60	0,15	0,25	0,97	-0,64

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2022 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2024 (%)
14.	Bendungan	-2,09	0,41	0,55	1,21	-0,51
Kabupaten Trenggalek		**-2,55**	**0,51**	**0,67**	**0,67**	**-0,30**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021-2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2021-2025), diolah

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Pada pertumbuhan penduduk di atas, menggunakan perhitungan dari data Kabupaten Trenggalek dalam Angka. Pada tahun 2024, terjadi penurunan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Trenggalek dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 0,67 menjadi -0,30 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam dinamika demografi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti peningkatan angka migrasi keluar, penurunan tingkat kelahiran, atau peningkatan angka kematian. Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah daerah perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan merumuskan kebijakan yang dapat menstabilkan pertumbuhan penduduk guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel II.25
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2024	373.120	371.400	744.520	100,46
2	2023	371.703	369.474	741.177	100,60
3	2022	371.527	368.142	739.669	100,92
4	2021	369.196	365.692	734.888	100,96
5	2020	367.372	363.753	731.125	100,99

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021-2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2021-2025)

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 lebih banyak daripada perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 100,46. Artinya, terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

c. Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur umur penduduk merujuk pada distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Adapun salah satu indikator dalam melihat struktur umur adalah melihat rasio ketergantungan *(dependency ratio)*. Angka ketergantungan memperlihatkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh mereka yang bekerja untuk mendukung mereka yang tidak bekerja. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh setiap pekerja. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.

Tabel II.26
Rasio Ketergantungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

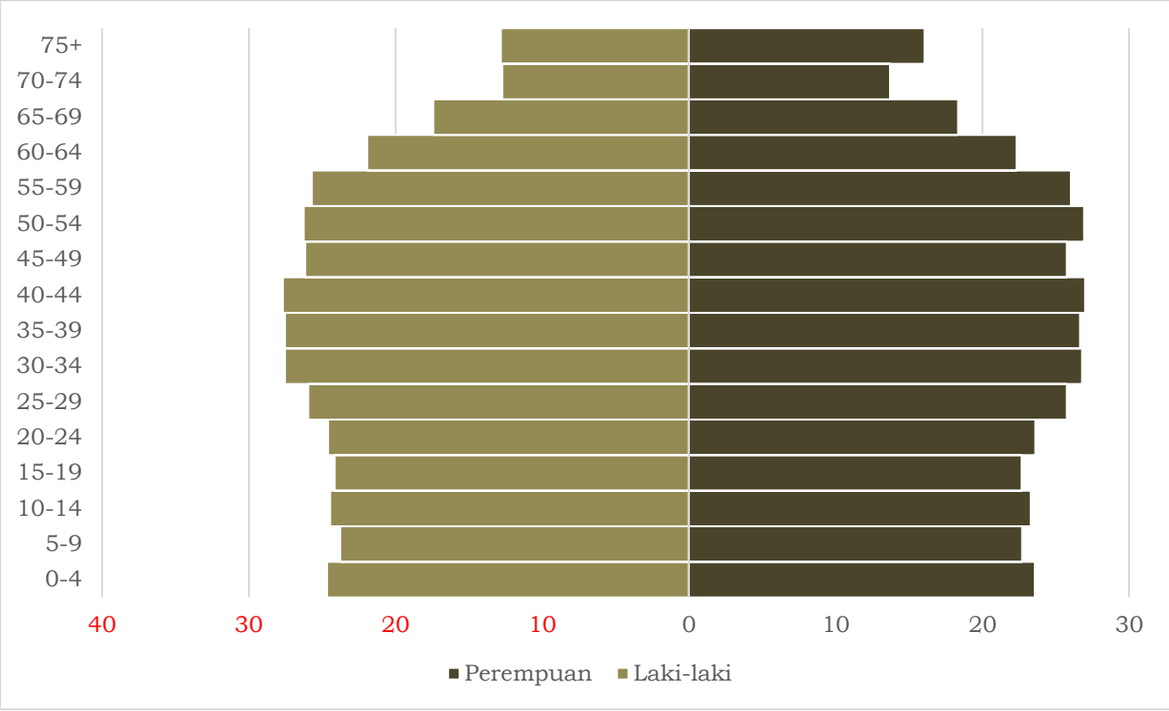
Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelompok Umur (Jiwa)	**731,16**	**734,89**	**739,67**	**741,18**	**744,52**
0–14	141,48	140,27	139,4	142,27	142,38
15–64	510,55	511,68	513,29	511,08	511,09
65+	79,13	82,94	86,98	87,83	91,06
***Dependency Ratio* (%)**	**43,21**	**43,62**	**44,1**	**45,02**	**45,67**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021-2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2021-2025), diolah

Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi perhatian dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan sosial karena dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis angka ketergantungan menjadi hal yang penting dalam mengembangkan strategi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Trenggalek telah mencapai angka ketergantungan di bawah 50 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir daerah ini memasuki kondisi bonus demografi, yaitu peluang untuk mempercepat pembangunan jika dimanfaatkan secara optimal. Namun, pada tahun 2024, angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek meningkat menjadi 45,67. Peningkatan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih optimal dalam memanfaatkan bonus demografi agar tetap mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari piramida penduduk Kabupaten Trenggalek didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Trenggalek memiliki cukup banyak penduduk usia muda namun sebagian besar berada pada usia produktif. Adapun penduduk usia tua juga meningkat di jumlah penduduk usia 75 tahun ke atas.

Grafik II.7
Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2025), diolah

d. Proyeksi Demografi Kabupaten Trenggalek

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan. Proyeksi penduduk di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir pembangunan jangka menengah periode 2025-2030 mencapai jumlah penduduk sebanyak 759,46 ribu jiwa. Kenaikan ini tentu saja menyebabkan kenaikan kepadatan penduduk hingga mencapai 600-601 jiwa/km^2. Dari sisi jenis kelamin, terlihat adanya penurunan rasio jenis kelamin hingga mencapai di bawah 100 yang mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk laki-laki lebih lambat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk perempuan hingga jumlah penduduk pada tahun 2029 didominasi oleh penduduk perempuan.

Pada indikator rasio ketergantungan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2030 mencapai 49,58. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Secara umum, seluruh kelompok umur mengalami kenaikan dimana penduduk usia muda sebanyak 139,81 ribu jiwa, penduduk usia produktif sebanyak 507,73 ribu jiwa dan penduduk usia tua sebanyak 111,92 ribu jiwa pada tahun 2030.

Tabel II.27
Proyeksi Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	747,61	750,48	753,09	755,46	757,46	759,46
Laki-laki	374,39	375,53	376,52	377,39	378,18	378,73
Perempuan	373,23	374,95	376,57	378,07	379,46	380,74
Rasio Jenis Kelamin	100,31	100,15	99,987	99,82	99,663	99,47
Kepadatan Penduduk	592,68	594,96	597,03	598,91	600,49	602,08
Rasio Ketergantungan	46,33	46,98	47,61	48,24	48,89	49,58
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)						
0–14	142,33	142,08	141,66	141,09	140,45	139,81
15–64	510,91	510,61	510,18	509,63	508,83	507,73
65+	94,39	97,79	101,24	104,75	108,31	111,92

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat berdasarkan pendapatan, akses terhadap lapangan kerja, serta daya beli yang stabil. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Semakin tinggi kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkelanjutan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,17 persen. Kontraksi ini dipicu terutama oleh dampak pandemi COVID-19, yang memukul sektor-sektor utama seperti Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-9,42 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-8,57 persen), dan Konstruksi (-7,25 persen). Aktivitas ekonomi masyarakat menurun tajam akibat pembatasan mobilitas, penutupan pasar, serta turunnya permintaan terhadap jasa akomodasi dan perdagangan, yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan ekonomi di Trenggalek. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan Trenggalek terhadap sektor-sektor berbasis pergerakan orang dan barang yang sangat rentan terhadap krisis kesehatan.

Namun mulai tahun 2021, ekonomi Trenggalek menunjukkan tren pemulihan positif dengan pertumbuhan 3,65 persen, kemudian meningkat

menjadi 4,52 persen pada 2022, dan 4,92 persen pada 2023. Pemulihan ini didorong oleh beberapa sektor utama seperti Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor Transportasi dan Pergudangan, melonjak hingga 16,93 persen pada 2022, menunjukkan pemulihan tajam dari keterpurukan sebelumnya. Kebangkitan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Trenggalek, seperti penyelenggaraan *Trenggalek Innovation Festival* di Pasar Pon yang mendorong semangat kewirausahaan lokal, pelibatan aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi, pemanfaatan platform digital untuk pemasaran UMKM, hingga upaya memperkuat sektor pertanian melalui integrasi hulu-hilir produksi pertanian dan bantuan data serta teknologi. Langkah-langkah tersebut mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi sektor riil sekaligus memperluas basis pertumbuhan baru berbasis inovasi lokal.

Memasuki tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Trenggalek sedikit melambat menjadi 4,71 persen. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh faktor eksternal, yakni kondisi cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun yang menyebabkan banyak petani gagal panen atau hanya mampu melakukan satu kali panen dalam setahun. Dampaknya sangat terasa pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya tumbuh sebesar 0,31 persen, jauh melambat dibandingkan pertumbuhan 2,72 persen pada 2023. Meski begitu, terdapat pergeseran menarik di antara sektor-sektor lain yakni sektor Transportasi dan Pergudangan yang tetap tumbuh tinggi di 12,36 persen (naik dibandingkan 10,04 persen di 2023), meskipun tingkat pertumbuhannya cenderung stabil. Sebaliknya, sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami lonjakan pertumbuhan signifikan dari 4,75 persen pada 2023 menjadi 9,15 persen di 2024, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi dan ekspansi aktivitas ekonomi, terutama di sektor rumah tangga dan industri kecil.

Melihat keseluruhan dinamika ini, prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek ke depan masih cukup menjanjikan, dengan basis pemulihan yang mulai menguat dan semakin terdorong oleh digitalisasi, penguatan sektor industri kecil, dan peningkatan akses energi. Tantangan terbesar ke depan adalah ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim serta kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor berbasis cuaca. Peluang besar terbuka melalui pengembangan energi terbarukan, perluasan pasar UMKM berbasis platform digital, serta penguatan konektivitas transportasi dan logistik. Jika pemerintah daerah mampu mengantisipasi tantangan ini dengan inovasi kebijakan yang adaptif dan investasi strategis, pertumbuhan ekonomi Trenggalek ke depan dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan eksternal.

Tabel II.28
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,10	-0,72	-1,46	2,72	0,31

No	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
2	Pertambangan dan Penggalian	-6,16	1,36	7,88	2,19	2,39
3	Industri Pengolahan	2,44	9,12	6,86	6,93	6,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	2,84	7,07	4,75	9,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,96	6,74	5,71	2,74	1,91
6	Konstruksi	-7,25	0,24	8,02	3,91	7,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-9,42	7,46	6,85	5,73	4
8	Transportasi dan Pergudangan	-5,39	9,48	16,93	10,04	12,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,57	2,36	8,98	8,10	5,76
10	Informasi dan Komunikasi	7,80	5,66	5,91	6,58	7,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,39	0,93	1,32	2,29	3,81
12	Real Estate	3,45	2,80	4,95	2,20	3,97
13	Jasa Perusahaan	-6,62	2,28	5,48	7,81	7,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,65	0,16	0,56	0,88	8,92
15	Jasa Pendidikan	2,91	1,61	1,19	6,68	5,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,92	5,71	2,43	4,08	6,13
17	Jasa lainnya	-15,18	3,66	11,13	9,87	8,38
Produk Domestik Regional Bruto		**-2,17**	**3,65**	**4,52**	**4,92**	**4,71**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2025)

Struktur distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pergeseran kontribusi antar lapangan usaha. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi paling signifikan, dari 28,05% pada 2020 menjadi 24,86% pada 2024, yang mencerminkan dampak pembatasan aktivitas akibat pandemi serta mulai terjadinya transformasi ekonomi ke sektor lain. Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan kontribusi dari 16,82% pada 2020 menjadi 19,42% pada 2024, menunjukkan penguatan sektor manufaktur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mempertahankan kontribusi besar meskipun sedikit menurun dari 15,53% pada 2021 menjadi 15,95% pada 2024. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan kontribusi yang cukup berarti, mencerminkan pemulihan mobilitas dan diversifikasi kegiatan ekonomi.

Perubahan struktur distribusi PDRB ini mengindikasikan arah diversifikasi ekonomi Trenggalek yang semakin kuat, dengan mengurangi ketergantungan berlebihan pada sektor primer seperti pertanian. Peralihan menuju penguatan sektor industri, perdagangan, dan jasa berpotensi memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi sektor sekunder dan tersier, serta meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja, khususnya di bidang industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama untuk memastikan sektor-sektor baru ini cukup inklusif dalam menciptakan lapangan

kerja yang berkualitas dan mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah terhadap gejolak global.

Secara keseluruhan, arah perubahan struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek dari 2020–2024 mengarah pada pola pertumbuhan yang lebih seimbang antar sektor. Potensi utama ke depan terletak pada sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa transportasi, serta penguatan jasa lain berbasis inovasi dan pariwisata. Tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur pendukung, dan penguatan ekosistem bisnis lokal. Implikasi terhadap strategi pengembangan sektor unggulan dalam RPJMD 2025–2029 adalah pentingnya mendorong hilirisasi sektor pertanian ke industri pengolahan, memperluas sektor jasa produktif, serta memperkuat ketahanan sektor perdagangan dan transportasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Tabel II.29
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,05	27,00	25,89	25,98	24,86
B	Pertambangan dan Penggalian	5,91	5,82	6,00	5,82	5,56
C	Industri Pengolahan	16,82	17,98	18,31	18,51	19,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
F	Konstruksi	7,13	6,89	7,20	7,05	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,99	15,53	16,05	16,14	15,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1,52	1,60	1,83	2,00	2,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,94	1,99	2,06	2,11	2,13
J	Informasi dan Komunikasi	5,79	5,85	5,74	5,67	5,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68	2,59	2,54	2,44	2,4
L	Real Estate	2,15	2,12	2,08	1,97	1,93
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,58	4,36	4,15	3,98	4,35
P	Jasa Pendidikan	4,76	4,55	4,31	4,34	4,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,99	0,97	0,96	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,37	2,39	2,54	2,67	2,79
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2025)

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek dalam nilai miliar rupiah tahun 2020–2024, terjadi pertumbuhan nilai ekonomi secara konsisten dari Rp18.314,46 miliar pada 2020 menjadi Rp24.364,74 miliar pada 2024. Kenaikan ini didorong

oleh peningkatan signifikan pada sektor Industri Pengolahan yang tumbuh dari Rp3.081,13 miliar menjadi Rp4.731,53 miliar, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang naik dari Rp2.745,16 miliar menjadi Rp3.886,54 miliar. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan pemulihan kuat pasca-pandemi dengan peningkatan lebih dari 80% selama lima tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan pergeseran ekonomi Trenggalek ke arah sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif dan berkontribusi besar terhadap total PDRB daerah.

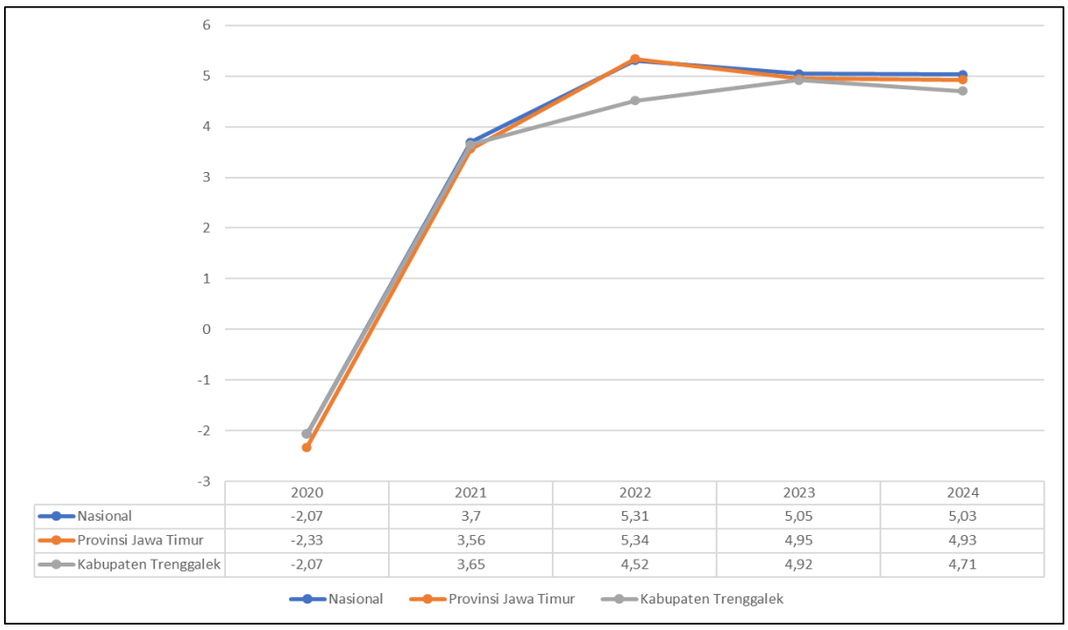
Tabel II.30
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Trenggalek (miliar rupiah), 2020–2024

Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.136,53	5.183,22	5.406,99	5.907,42	6.056,86
B. Pertambangan dan Penggalian	1.081,92	1.116,80	1.253,51	1.323,15	1.355,05
C. Industri Pengolahan	3.081,13	3.452,70	3.822,71	4.208,80	4.731,53
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,89	7,18	7,83	8,31	9,08
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,34	11,05	12,22	12,64	12,97
F. Konstruksi	1.305,16	1.321,96	1.503,78	1.602,89	1.723,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.745,16	2.980,65	3.352,31	3.670,84	3.886,54
H. Transportasi dan Pergudangan	278,97	307,4	381,43	454,26	515,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	354,86	381,18	429,21	480,7	520,13
J. Informasi dan Komunikasi	1.059,62	1.122,70	1.197,81	1.289,19	1.394,89
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	490,4	497,7	529,52	555,5	585,54
L. Real Estat	393,89	406,13	433,45	448,79	470,7
M, N. Jasa Perusahaan	47,66	49,44	53,86	59,55	65,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	838,05	836,77	865,97	905,16	1.061,03
P. Jasa Pendidikan	871,53	873,03	899,12	986,79	1.063,86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,32	191,02	203,17	218,16	232,89
R, S, T, U. Jasa Lainnya	434,03	459,31	529,43	607,9	679,15
Produk Domestik Regional Bruto	**18.314,46**	**19.198,25**	**20.882,31**	**22.740,05**	**24.364,74**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2025)

Salah satu sektor yang menggambarkan mindset dan preferensi masyarakat mengelola kesejahteraan keuangannya adalah investasi di sektor jasa keuangan dan asuransi. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek Tahun 2020–2024, sektor ini secara nominal masih bertumbuh secara moderat. Namun pertumbuhannya selalu dibawah pertumbuhan rata-rata PDRB. Dalam kurun waktu 2020 – 2024 pertumbuhan rata-rata PDRB tertinggi pada angka 4,92% sedangkan sektor jasa keuangan dan asuransi tertinggi pada angka 3,81%. Adapun secara struktur / porsi distribusi PDRB, sektor ini konsisten menurun. Tahun 2020 – 2024 secara berturut turut menempati porsi 2,68% 2,59% 2,54% 2,44% dan 2,4%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi masyarakat untuk mengelola aset keuangan demi mencapai derajat kesejahteraan dan kemakmurannya.

Grafik II.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03
Provinsi Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Kabupaten Trenggalek	-2,07	3,65	4,52	4,92	4,71

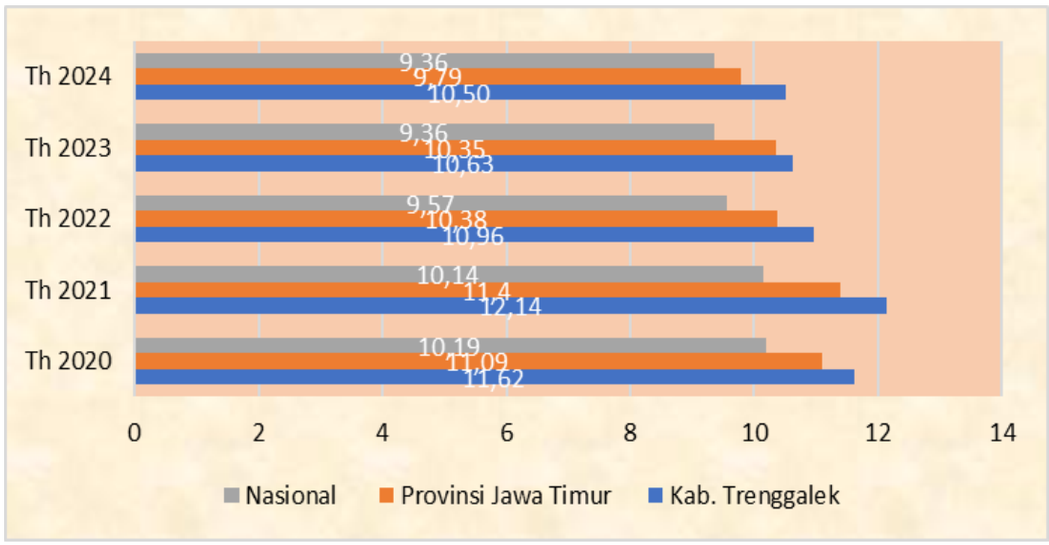
Sumber: BPS Republik Indonesia, 2025
BPS Provinsi Jawa Timur, 2025
BPS Kab. Trenggalek, 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Trenggalek menunjukkan pola yang hampir seragam dalam lima tahun terakhir. Dimana pada Tahun 2020 pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi tajam, laju pertumbuhan Nasional -2,07, Provinsi Jawa Timur -2,33, dan Kabupaten Trenggalek -2,07. Pada tahun 2021 sampai 2022 melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional, ekonomi kembali pulih dengan lonjakan pertumbuhan Nasional mencapai 5,31 pada Tahun 2022, Provinsi Jawa Timur lebih tinggi 5,34 dan Kabupaten Trenggalek 4,52. Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi relatif stabil, dengan tren sedikit melambat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek cenderung sedikit dibawah Nasional maupun Provinsi pada tahun 2022-2024.

b. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Grafik II.9
Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Trenggalek terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Republik Indonesia, 2025
BPS Provinsi Jawa Timur, 2025
BPS Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sebesar 10,50%. Sementara untuk capaian di tingkat provinsi sebesar 9.79% dan 9,36% pada tingkat nasional.

Tabel II.31
Indikator Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	**11,62**	**12,14**	**10,96**	**10,63**	**10,50**
a. Garis Kemiskinan (Rupiah)	340.915	358.831	381.448	411.527	434.146
b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	81,06	84,89	76,75	74,58	73,75
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,48	1,46	1,38	1,26	1,43
d. Indeks Keparahan Kemiskinan	0,31	0,25	0,28	0,21	0,28

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, yang mempengaruhi dinamika kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Tahun 2021 mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Namun, pada Maret 2024, terjadi kembali penurunan tingkat kemiskinan, yang mencerminkan perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Selain persentase penduduk miskin, terdapat indikator lain yang penting untuk diperhatikan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

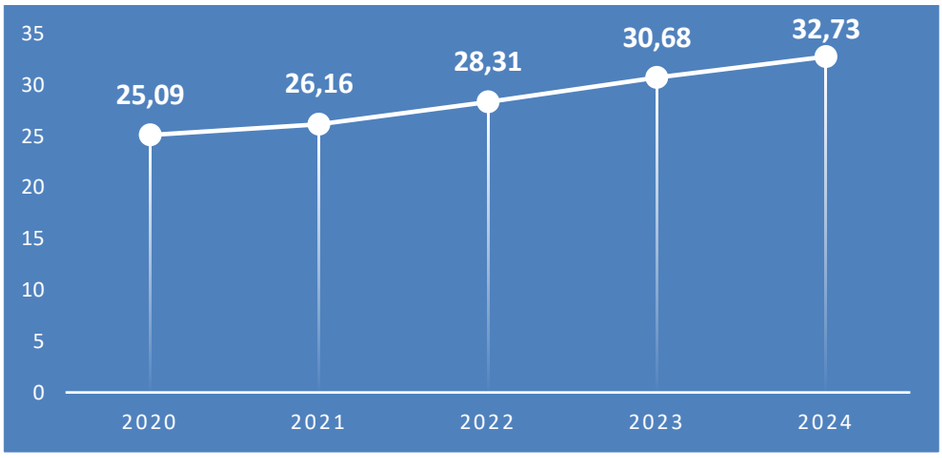
Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Trenggalek mencapai 1,43, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,26. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang naik dari 0,21 pada tahun 2023 menjadi 0,28 pada Maret 2024.

Peningkatan kedua indikator ini mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, yang berarti upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang lebih efektif. Meskipun biaya yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, terutama melalui cash transfer, tidak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya, tren ini juga menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih ada. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan perlu terus diperkuat agar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dapat ditekan secara optimal.

c. PDRB Per Kapita

Pengukuran kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu indikator tunggal, melainkan membutuhkan pendekatan multidimensi. Salah satu indikator ekonomi makro yang umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) memberikan gambaran rata-rata nilai tambah bruto yang diterima setiap penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil per kapita. Di Kabupaten Trenggalek, PDRB per kapita ADHB menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, yaitu sebesar Rp25,09 juta pada 2020, naik menjadi Rp26,16 juta pada 2021, Rp28,31 juta pada 2022, Rp30,68 juta pada 2023, dan mencapai Rp32,73 juta pada 2024. PDRB per kapita sering dijadikan salah satu acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah, karena nilai ini menggambarkan pendapatan rata-rata per individu dalam suatu wilayah.

Grafik II.10
PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

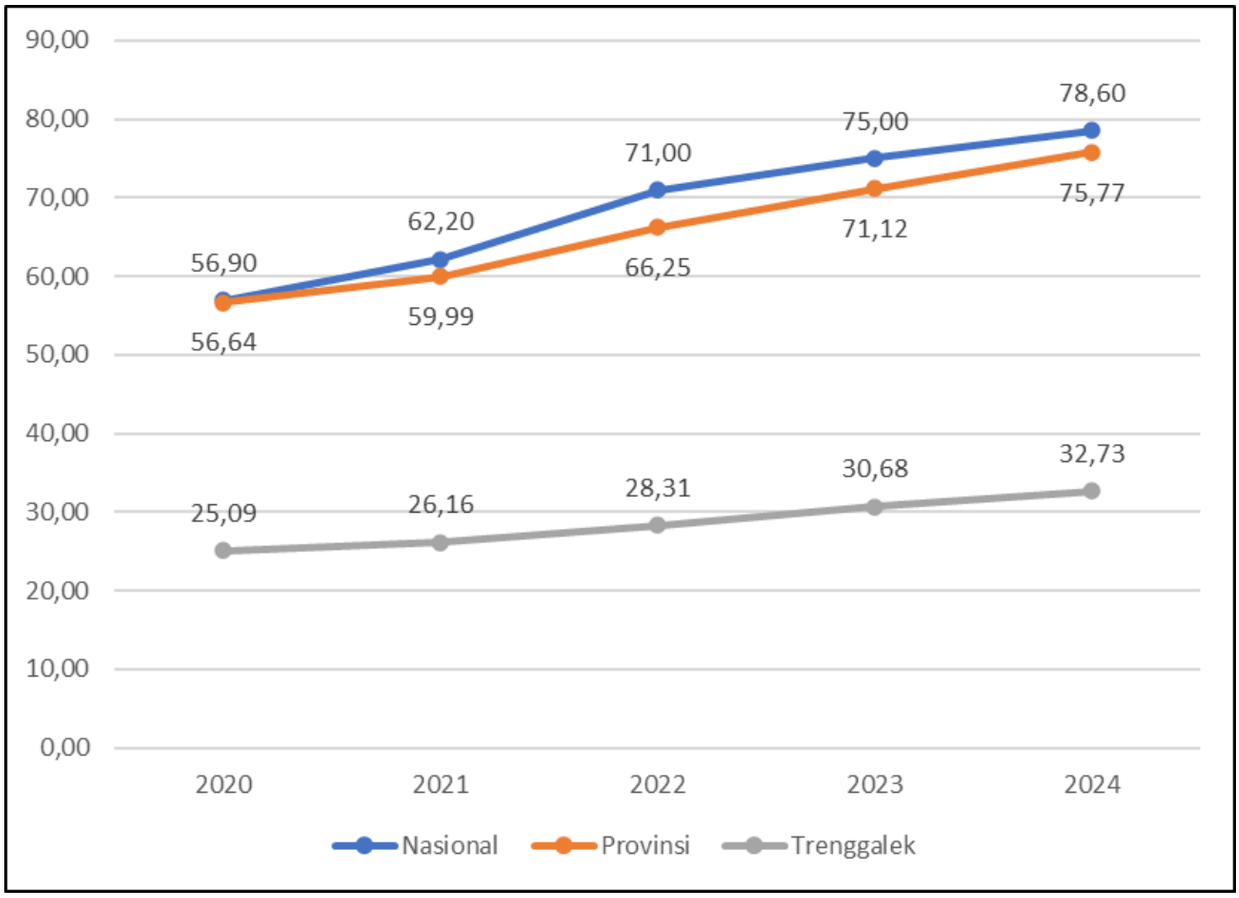


Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan grafik perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Trenggalek tahun 2019–2023, terlihat adanya penurunan pada tahun 2020 dari Rp26,65 juta (2019) menjadi Rp26,23 juta. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan sektor-sektor seperti perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum, transportasi, serta industri pengolahan mengalami kontraksi signifikan. Sektor-sektor ini terdampak pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan, yang memperburuk ketimpangan pendapatan. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah lebih rentan terhadap dampak krisis ini, memperlebar ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek.

Memasuki tahun 2021 hingga 2023, PDRB per kapita Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren pertumbuhan positif, yaitu masing-masing sebesar Rp 27,44 juta (2021), Rp28,23 juta (2022), dan melonjak menjadi Rp30,68 juta pada tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh pemulihan sektor utama seperti pertanian, konstruksi, serta perdagangan, seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi pasca pandemi dan stimulus fiskal daerah. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang positif, PDRB per kapita memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan distribusi pendapatan antar penduduk. Oleh karena itu, analisis ketimpangan pendapatan, yang salah satunya diukur dengan Indeks Gini, menjadi penting untuk memahami kesejahteraan masyarakat secara lebih akurat.

Grafik II.11
Perbandingan PDB Perkapita Nasional dengan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur dan PDRB Kabupaten Trenggalek (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Perbandingan angka PDB/ PBRB Per kapita nasional, provinsi dan Kabupaten Trenggalek menunjukkan kesenjangan yang tinggi karena dalam kurun waktu tahun 2020-2024 nilai PDRB per kapita di Kabupaten Trenggalek rata-rata kurang dari separuh PDB nasional dan PDRB Provinsi Jawa Timur. Beberapa hal penting yang bisa menjadi penyebab utama rendahnya PDRB per kapita di Kabupaten Trenggalek diantaranya sektor ekonomi unggulan daerah (pertanian, kehutanan dan perikanan) yang kurang berkembang atau memiliki nilai tambah yang lebih rendah, keterbatasan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, investasi dan infrastruktur yang kurang memadai, serta kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga mempengaruhi produktivitas dan kemampuan ekonomi masyarakat.

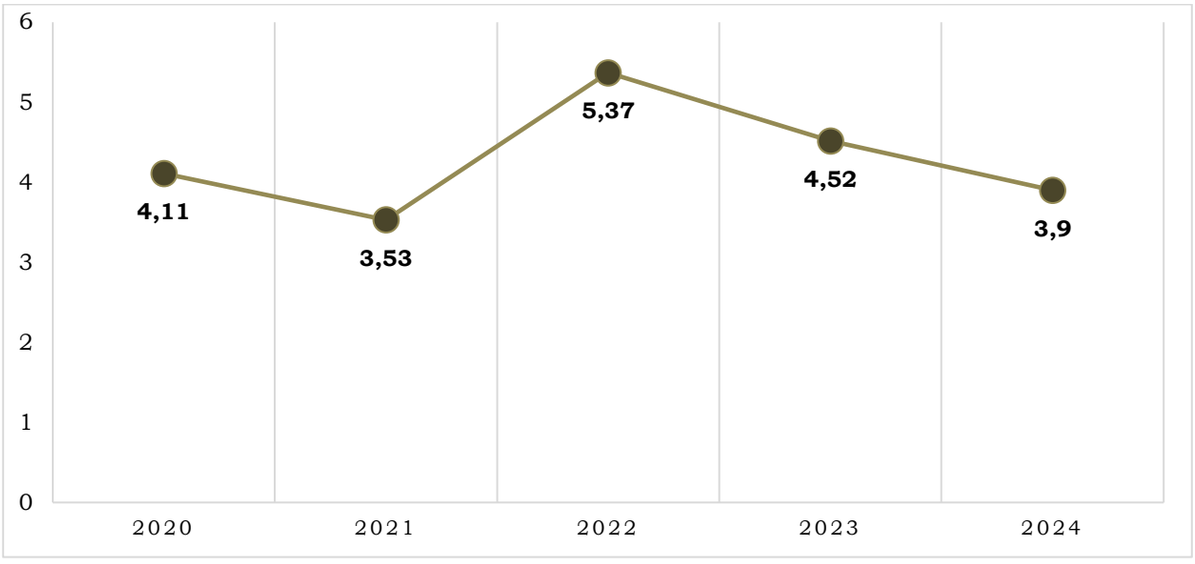
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Trenggalek dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Dalam lima tahun terakhir, angka pengangguran mengalami perubahan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,37 persen. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun-

tahun berikutnya, di mana TPT turun menjadi 4,52 persen pada 2023 dan 3,90 persen pada 2024. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari berbagai program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja serta menguatkan sektor ekonomi lokal.

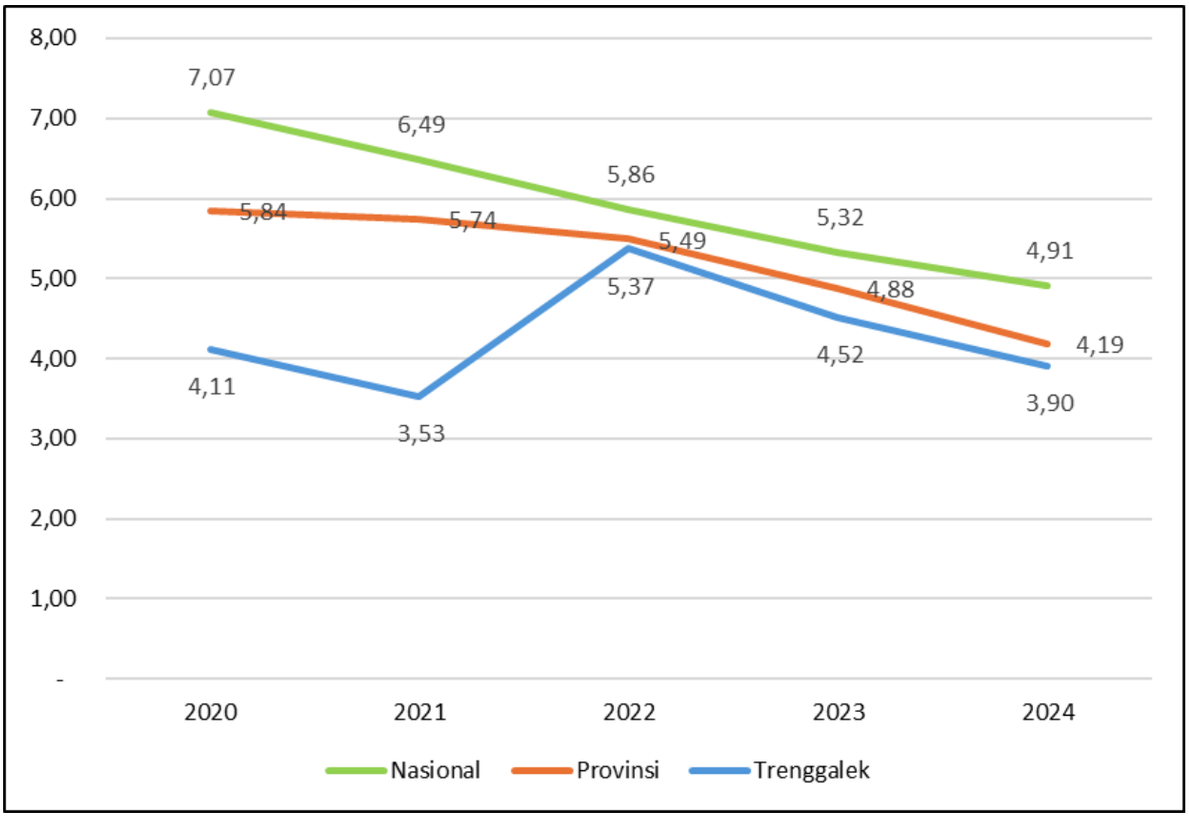
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, angka TPT sebesar 3,90 persen, yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 hingga 4 orang yang masih menganggur. Penurunan sebesar 0,62 persen poin dibandingkan tahun 2023 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Trenggalek, serta adanya musim panen cengkeh yang merata di beberapa kecamatan, yang membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kendati demikian, aspek kompetensi dan keahlian tenaga kerja tetap perlu diperkuat agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

Grafik II.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Grafik II.13
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Republik Indonesia, 2025
BPS Provinsi Jawa Timur, 2025
BPS Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan grafik perbandingan TPT nasional, provinsi dan kabupaten tersebut menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tingkat nasional TPT mengalami penurunan signifikan dari 7,07% pada tahun 2020 (puncak pandemi COVID-19) menjadi 4,91% pada tahun 2024. Ini menandakan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja secara nasional. Pada tingkat provinsi Jawa Timur menunjukkan TPT turun dari 5,84% di tahun 2020 menjadi 4,19% pada 2024. Meskipun sempat stagnan pada kisaran 5,7% di 2021, tren penurunan berlanjut setelahnya. Sedangkan pada tingkat kabupaten Trenggalek menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam. Setelah turun dari 4,11% (2020) menjadi 3,53% (2021), angka TPT naik cukup tinggi ke 5,37% pada 2022. Namun, kondisi kembali membaik pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 3,90% pada 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT provinsi maupun nasional.

Secara umum, baik nasional, Jawa Timur, maupun Trenggalek berhasil menurunkan tingkat pengangguran sepanjang periode 2020–2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan iklim ketenagakerjaan pasca pandemi, meskipun daerah seperti Trenggalek masih menghadapi dinamika yang lebih fluktuatif dibandingkan provinsi dan nasional.

e. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek dapat diukur dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini mengukur tingkat

ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai yang semakin tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Meskipun PDRB per kapita menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, data Indeks Gini mengungkapkan adanya ketidakmerataan pendapatan. Pada tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,331, yang menunjukkan adanya penurunan ketimpangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,336, dan diperkirakan akan mencapai 0,35 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada pemulihan ekonomi, distribusi pendapatan masih belum sepenuhnya merata. Pada tahun 2024, indeks Gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,373 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 0,379-0,381. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Trenggalek. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat Jawa Timur tergolong rendah.

Grafik II.14
Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Indeks Gini juga merupakan indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang mendukung Tujuan ke-10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. Dengan target nasional menurunkan Indeks Gini menjadi 0,36, hasil pengukuran di Kabupaten Trenggalek menunjukkan perkembangan yang cenderung positif meskipun ada kenaikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,379, kemudian menurun menjadi 0,335 pada tahun 2021 dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 0,331. Namun, meskipun ada peningkatan dalam dua tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 sebesar 0,35 masih berada dalam kategori ketimpangan yang sedang, yang masih berada di bawah target nasional.

Secara keseluruhan, meskipun ketimpangan pendapatan mengalami sedikit peningkatan pada dua tahun terakhir, nilai Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 yang sebesar 0,35 masih menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan secara umum telah mengalami perbaikan

dibandingkan dengan tahun 2020. Pencapaian ini memenuhi target nasional yang ditetapkan di bawah 0,36. Namun, perlu adanya perhatian lebih lanjut dan upaya yang lebih efektif untuk mempertahankan tren penurunan ketimpangan agar pembangunan ekonomi di Kabupaten Trenggalek dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia oleh suatu daerah yang dihitung berdasarkan umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, melalui pendekatan rata-rata geometrik dari ketiga dimensi tersebut. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*, yang diukur oleh usia harapan hidup,
b. Dimensi pengetahuan *(knowledge),* yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
c. Dimensi standar hidup layak *(a decent standard of living),* yang diukur dengan paritas daya beli.

Tabel II.32
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

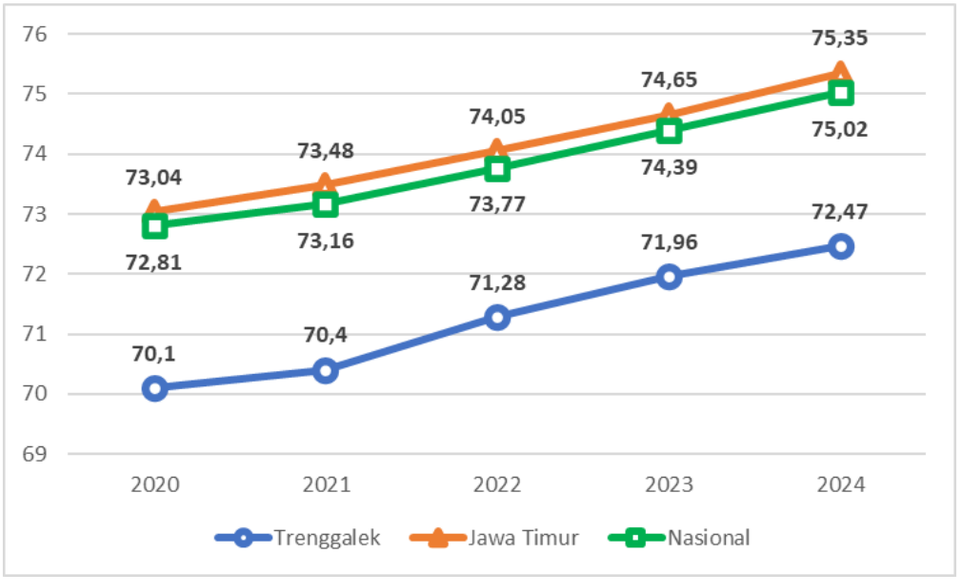
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	-	**70,10***	**70,40***	**71,28***	**71,96***	**72,47***
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,55	7,56	7,89	7,90	7,92
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35	12,47	12,50	12,62	12,63
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,58*	74,65*	74,91*	75,16*	75,35*
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	9.630	9.743	10.042	10.465	10.872

**) Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, setiap dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 sebesar 74,58 menjadi 75,35 pada tahun 2024. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan yang menjadi penentu dimensi

pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 sebesar 7,55 menjadi 7,92 di tahun 2024. Sedangkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 sebesar 12,35 menjadi 12,63 pada tahun 2024. Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari 9.630 ribu rupiah di tahun 2020 menjadi 10.872 ribu rupiah di tahun 2024.

Grafik II.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Republik Indonesia, 2025
BPS Provinsi Jawa Timur, 2025
BPS Kab. Trenggalek, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam berbagai dimensi penyusunnya. Pada tahun 2024, capaian IPM mencapai 72,47, dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM menunjukkan peningkatan, terutama pada standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun. Pada 2024, indikator ini meningkat sebesar Rp407 ribu (3,89 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sehingga masih diperlukan upaya memperkuat seluruh komponen IPM untuk memastikan pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

g. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi

Kabupaten Trenggalek memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), kontribusi

Trenggalek berkisar antara 0,76% hingga 0,80% selama periode 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018 dan 2019, Trenggalek menyumbang 0,78% dari total PDRB provinsi. Kontribusi ini mengalami peningkatan kecil pada tahun 2020 menjadi 0,80%, kemungkinan disebabkan oleh dinamika sektoral atau efek kebijakan pemulihan ekonomi di awal pandemi. Pada tahun 2020, Jawa Timur seperti wilayah lain di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi. Banyak daerah industri besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mengalami penurunan kinerja ekonomi yang lebih tajam, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Dengan kata lain, terjadi kontraksi ekonomi yang lebih besar.

Sedangkan, Trenggalek memiliki basis ekonomi yang cukup kuat di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan -sektor-sektor yang relatif lebih tahan terhadap guncangan pandemi dibanding sektor industri, jasa, dan perdagangan-. Ketika sektor jasa terpukul keras akibat pembatasan aktivitas, sektor primer seperti pertanian tetap berjalan, bahkan kadang meningkat permintaannya karena kebutuhan pangan tetap tinggi. Ini membuat kontribusi relatif Trenggalek meningkat. Ketika PDRB daerah lain menurun lebih tajam, kontribusi daerah seperti Trenggalek yang lebih bergantung pada sektor pertanian dan sektor primer lainnya secara proporsional tampak meningkat, meskipun secara nilai absolut belum tentu meningkat signifikan. Selain itu, selama pandemi, pemerintah pusat dan daerah meluncurkan berbagai program padat karya dan bantuan sosial, termasuk di wilayah pedesaan dan daerah seperti Trenggalek. Program ini bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi lokal dalam skala kecil hingga sedang, yang cukup untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun, setelah itu terjadi penurunan kembali ke 0,78% (2021) dan 0,76% (2022). Pada tahun 2023 dan 2024, kontribusi stabil di angka 0,77%. Selama tujuh tahun terakhir, kontribusi Trenggalek terhadap PDRB Jawa Timur menunjukkan pola yang cenderung stagnan tanpa adanya lompatan signifikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan ekonomi daerah, terutama pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan potensi sumber daya alam lainnya yang belum tergarap optimal.

Tabel II.33
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2024

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pacitan	0,68	0,67	0,69	0,67	0,66	0,66	0,65
2	Ponorogo	0,87	0,86	0,89	0,87	0,84	0,85	0,85
3	Trenggalek	0,78	0,78	0,8	0,78	0,76	0,77	0,77
4	Tulungagung	1,65	1,65	1,66	1,64	1,62	1,62	1,61
5	Blitar	1,54	1,54	1,56	1,54	1,52	1,52	1,51
6	Kediri	1,74	1,73	1,76	1,74	1,71	1,71	1,72
7	Malang	4,38	4,37	4,43	4,36	4,3	4,34	4,36

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Lumajang	1,39	1,37	1,39	1,37	1,34	1,36	1,36
9	Jember	3,25	3,25	3,3	3,3	3,22	3,22	3,24
10	Banyuwangi	3,52	3,52	3,52	3,5	3,42	3,43	3,43
11	Bondowoso	0,84	0,84	0,87	0,86	0,84	0,84	0,84
12	Situbondo	0,85	0,85	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85
13	Probolinggo	1,45	1,43	1,46	1,45	1,43	1,43	1,44
14	Pasuruan	6,14	6,14	6,32	6,4	6,32	6,32	6,35
15	Sidoarjo	8,55	8,6	8,56	8,58	8,98	9,26	9,35
16	Mojokerto	3,46	3,47	3,56	3,55	3,51	3,53	3,56
17	Jombang	1,71	1,7	1,73	1,7	1,68	1,69	1,7
18	Nganjuk	1,12	1,12	1,15	1,14	1,13	1,14	1,14
19	Madiun	0,8	0,8	0,83	0,82	0,8	0,81	0,81
20	Magetan	0,8	0,79	0,81	0,8	0,78	0,78	0,77
21	Ngawi	0,86	0,86	0,88	0,85	0,82	0,82	0,82
22	Bojonegoro	3,31	3,29	3,05	3,43	3,68	3,31	3,21
23	Tuban	2,74	2,74	2,71	2,68	2,75	2,77	2,74
24	Lamongan	1,68	1,67	1,7	1,67	1,66	1,66	1,64
25	Gresik	5,88	5,85	5,83	5,89	6	5,96	5,94
26	Bangkalan	1,08	1,04	1,01	1,01	0,99	0,94	0,91
27	Sampang	0,86	0,83	0,86	0,84	0,84	0,81	0,78
28	Pamekasan	0,72	0,72	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71
29	Sumenep	1,48	1,4	1,42	1,44	1,47	1,45	1,42
30	Kota Kediri	5,77	5,87	5,75	5,76	5,6	5,4	5,32
31	Kota Blitar	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
32	Kota Malang	3,06	3,06	3,13	3,12	3,11	3,15	3,15
33	Kota Probolinggo	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48
34	Kota Pasuruan	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
35	Kota Mojokerto	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27
36	Kota Madiun	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59
37	Kota Surabaya	24,35	24,45	24,07	24,03	24,01	24,2	24,34
38	Kota Batu	0,71	0,71	0,69	0,69	0,68	0,69	0,7

Sumber: BPS Privinsi Jawa Timur, 2025

Dari 38 kabupaten/kota, posisi Trenggalek berada di kelompok daerah dengan kontribusi rendah, setara dengan kabupaten lain seperti Pacitan, Magetan, dan Bondowoso. Keempat daerah ini adalah kabupaten yang punya struktur ekonomi serupa dominan di sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Mereka memiliki karakteristik geografis dan demografis mirip, seperti wilayah pegunungan, pertanian luas, serta keterbatasan akses

transportasi dan industri besar. Trenggalek termasuk dalam kelompok kontribusi rendah, karena kontribusinya di bawah 1% (meski lebih tinggi dari Kota Mojokerto dan Kota Blitar).

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

a. AIDS, Tuberkulosis, Malaria (ATM)

HIV, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria merupakan tiga penyakit menular yang masih menjadi perhatian serius dalam sistem kesehatan nasional dan global, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Penanganan HIV/AIDS di Trenggalek mengadopsi pendekatan "*Three Zero*" (*Zero New Infection, Zero Related Death, dan Zero Discrimination*), dengan fokus pada peningkatan akses tes HIV, pengobatan antiretroviral (ARV), serta upaya supresi viral load bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHIV). Sementara itu, upaya eliminasi TBC difokuskan pada penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, serta keterlibatan komunitas melalui gerakan "TOSS TBC dengan Prestasi". Adapun malaria telah dieliminasi di Trenggalek sejak 2017, dan seluruh kasus yang ditemukan sejak saat itu merupakan kasus impor tanpa penularan lokal (indigenous), sehingga strategi yang diterapkan saat ini adalah tahap pemeliharaan untuk mencegah kembalinya penularan setempat.

Berdasarkan data terbaru tahun 2020–2024, persentase penderita HIV yang mendapatkan terapi ARV di Kabupaten Trenggalek sempat mengalami peningkatan dari 84 persen pada 2020 menjadi 91 persen pada 2022. Namun, terjadi penurunan cukup tajam pada 2024, yakni hanya mencapai 63,2 persen. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya penemuan ODHIV yang berasal dari luar Kabupaten Trenggalek dan enggan menjalani pengobatan. Selain itu, rendahnya pemeriksaan viral load pada ODHIV di tahun 2024 yang hanya sebesar 17 persen, serta rendahnya pemberian pencegahan primer isoniazid (PP INH) pada ODHIV sebesar 2,8 persen, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian HIV. Hal ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penjangkauan, konseling, serta kemudahan akses pengobatan dan pemeriksaan lanjutan bagi ODHIV.

Di sisi lain, penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat fluktuasi. Treatment Success Rate (TSR) atau tingkat keberhasilan pengobatan TBC sempat menurun dari 86 persen pada 2020 menjadi 80 persen pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 88 persen pada 2023. Treatment Success Rate (TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun. Sementara itu, treatment coverage TBC yang berarti jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan diantara perkiraan jumlah semua kasus Tuberkulosis (insiden) meningkat pesat dari 16 persen pada 2021 menjadi 65 persen pada 2023, yang menandakan keberhasilan intervensi penemuan kasus aktif dan penguatan jejaring layanan TBC. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 31,99 persen pada 2021 menjadi 100 persen pada 2023 dan 2024.

Keberhasilan pengendalian TBC ini tidak terlepas dari berbagai upaya seperti bimbingan teknis ke rumah sakit dan klinik pemerintah maupun swasta,

validasi data secara rutin, pembinaan kader peduli TBC bersama komunitas (YABHISA), serta monitoring dan evaluasi program secara berkala. Selain itu, perluasan wilayah skrining TBC bersama fasilitas kesehatan, penyiapan layanan TBC Resisten Obat (RO) di RSUD dr. Soedomo, pengadaan logistik TBC seperti cartridge TCM, serta pelatihan TPT bagi petugas di fasyankes menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penemuan dan pengobatan kasus TBC. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan komunitas juga sangat penting untuk melakukan pelacakan dan pendampingan kasus mangkir, sehingga pasien dapat dimotivasi untuk menyelesaikan pengobatan hingga sembuh.

Sementara itu, jumlah penderita malaria di Kabupaten Trenggalek mengalami dinamika dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun dari 34 kasus pada 2020 menjadi 12 kasus pada 2021, angka kasus meningkat tajam menjadi 99 kasus pada 2023, sebelum turun kembali menjadi 53 kasus pada 2024. Seluruh kasus ini merupakan kasus impor, mengingat Trenggalek telah menerima Sertifikat Eliminasi Malaria sejak 2017 dan tidak ditemukan kasus indigenous maupun kematian akibat malaria. Meningkatnya kasus impor ini menegaskan pentingnya penguatan surveilans dan pencegahan melalui edukasi masyarakat serta skrining bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis sebagai bagian dari fase pemeliharaan eliminasi malaria.

Namun, tantangan pengendalian malaria di Trenggalek masih cukup besar. Pemeriksaan suspek malaria masih rendah, padahal idealnya jumlah suspek yang diperiksa minimal 10 kali jumlah kasus positif. Penduduk migran, khususnya yang pulang dari daerah endemis seperti Papua, Kalimantan, dan luar negeri (misal Gabon), umumnya enggan memeriksakan diri kecuali jika sudah merasa sakit. Selain itu, pemetaan daerah reseptif (survey jentik malaria) belum merata ke seluruh desa, dan pelaksanaan MoU dengan pihak pengerah tenaga kerja untuk melaporkan penduduk yang pulang dari daerah endemis masih kurang maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diambil antara lain meningkatkan kerjasama lintas sektor, khususnya dengan pemerintah desa, agar penduduk yang pulang dari daerah endemis dapat diperiksa malarianya meskipun tidak merasa sakit. Kerjasama dengan perangkat desa juga perlu ditingkatkan untuk melakukan pemetaan daerah reseptif secara menyeluruh. Selain itu, petugas layanan kesehatan didorong untuk aktif bertanya kepada pihak pengerah tenaga kerja mengenai siapa saja yang baru pulang dari daerah endemis, sehingga dapat segera dilakukan skrining dan pencegahan dini.

Pada aspek pelayanan kesehatan lain, capaian Kabupaten Trenggalek sangat baik. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar mencapai 100% pada 2023 dan 2024. Demikian pula, persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar juga mencapai 100% pada dua tahun terakhir, setelah sebelumnya sempat menurun menjadi 86,25% pada 2022. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas layanan serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan deteksi dan penanganan penyakit menular dilakukan secara komprehensif dan sesuai standar nasional.

Secara ringkas, data 2020–2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek telah mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian HIV, TBC,

dan malaria. Cakupan layanan pengobatan HIV dan TBC serta layanan standar bagi orang terduga TBC dan deteksi dini HIV mencapai 100% pada 2023 dan 2024, menandakan penguatan sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan. Namun, penurunan cakupan ARV dan rendahnya pemeriksaan viral load serta pemberian PP INH pada ODHIV masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, peningkatan kasus malaria impor menegaskan pentingnya penguatan surveilans, edukasi masyarakat, dan skrining bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis untuk mempertahankan status eliminasi. Upaya yang konsisten, kolaboratif, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai target eliminasi penyakit menular pada 2030 dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek secara menyeluruh.

Tabel II.34
Indikator AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penderita HIV yang mendapatkan ARV	84	89	91	84	63,2
2.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate/TSR)	86	85	80	88	86
3.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	27	16	38,83	65	51,90
4.	Jumlah Penderita Malaria	34	12	40	99	53
5.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	31,99	89,41	100	100
6.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	102,2	86,25	100	100

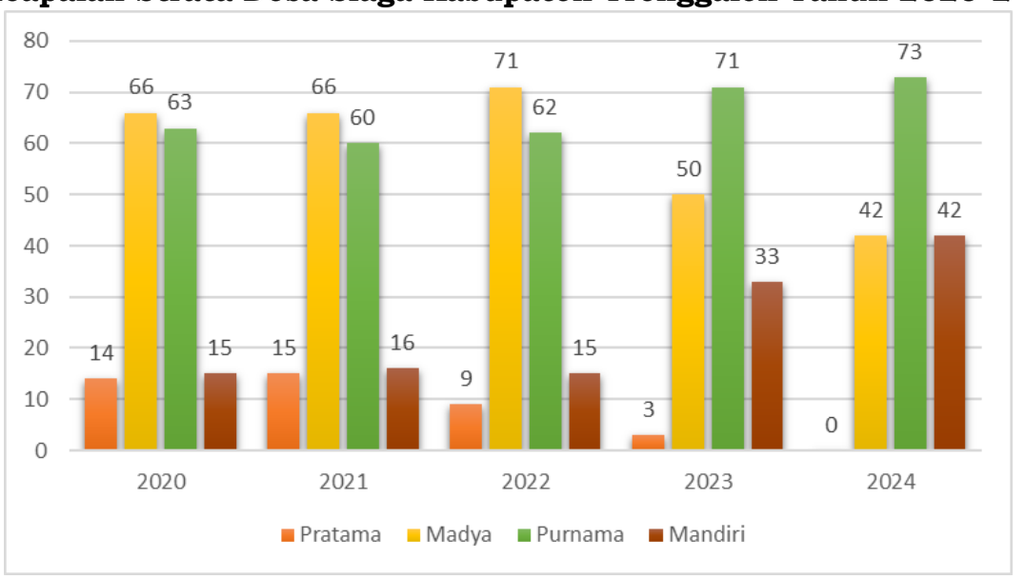
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

b. Cakupan desa siaga aktif

Desa Siaga Aktif di Kabupaten Trenggalek merupakan representasi nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebencanaan, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Adapun pencapaian strata Desa Siaga Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan untuk Desa Siaga Aktif kategori pratama sudah bergeser menjadi madya. Di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk Desa Siaga sebanyak 157 Desa/Kelurahan dengan strata sebagaimana Grafik II.17.

Grafik II.16.
Pencapaian Strata Desa Siaga Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

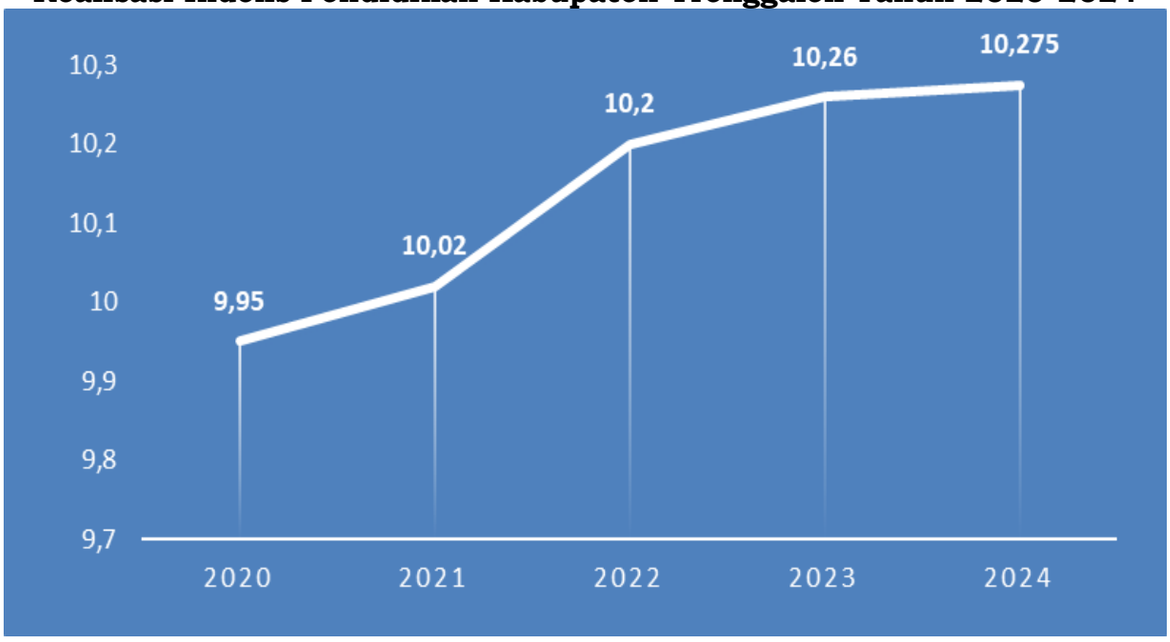
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata memegang peranan sentral dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, karena membuka akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang lebih luas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Melalui pendidikan, individu tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang berdaya saing, kritis, dan bertanggung jawab. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam sektor pendidikan merupakan langkah strategis untuk membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, dan bermartabat, serta mewujudkan bangsa yang maju dan berdaya saing di tingkat global.

a. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indeks yang merepresentasikan tingkat pembangunan di bidang pendidikan pada masing-masing wilayah. Komponen pembentuk dari Indeks Pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Berikut adalah realisasi indeks pendidikan Kabupaten Trenggalek periode tahun 2020 – 2024 :

Grafik II.17
Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2025

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa indeks pendidikan Kabupaten Trenggalek mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun. Trend kenaikan indeks pendidikan memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2024 nilai indeks pendidikan mencapai 10,275 poin dari target yang ditetapkan sebesar 10,15 poin atau memiliki tingkat capaian sebesar 100 persen. Kenaikan nilai indeks pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa secara kuantitas, rata- rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Trenggalek kian membaik. Sehingga diharapkan dengan semakin lamanya pendidikan yang diterima oleh masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat memperbaiki taraf perekonomian masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2024 telah dikonversi ke dalam perhitungan/ metode baru, dapat dijelaskan bahwa indikator pembentuk indeks pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata Lama Sekolah (RLS) selanjutnya dalam metode baru indikator HLS dan RLS dilakukan pengindeksan, dengan formulasi. 1) Indeks HLS = (Harapan Lama Sekolah (HLS)-Harapan Lama Sekolah (HLS)min/ Harapan Lama Sekolah (HLS) max-Harapan Lama Sekolah (HLS) min) dengan hasil sebesar = 0,702 ; 2) Indeks RLS (Rata Lama Sekolah (RLS)-Rata Lama Sekolah (RLS)min/Rata Lama Sekolah (RLS) max-Rata Lama Sekolah (RLS) min) dengan hasil sebesar = 0,528, sehingga diperoleh indek pendidikan dengan metode baru, dengan formulasi, Indeks Pendidikan = (Indeks HLS + Indeks RLS/2) yaitu = ((0,72+0,53)/2) dengan perolehan = 0,615 sehingga capaian indeks pendidikan 2024 sebesar 10,275 jika dikonversi dengan metode baru setara = 0,615 poin.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, peningkatan capaian ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan secara intensif, terpadu, dan berkelanjutan guna memastikan akses pendidikan yang lebih merata bagi

seluruh masyarakat. Selain itu, pendirian universitas negeri sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Upaya upaya lain juga dilakukan guna meningkatkan indeks pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyediakan bantuan bus sekolah untuk menjangkau wilayah terpencil. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi hambatan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah yang sulit dijangkau, sehingga mereka dapat bersekolah dengan lebih mudah dan teratur. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas cakupan penerima bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti beasiswa, subsidi biaya sekolah, serta dukungan untuk perlengkapan pendidikan.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga mendorong pendirian perguruan tinggi negeri di Kabupaten Trenggalek sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi negeri di daerah diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar bagi lulusan SMA/SMK serta mendorong pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Serta mencanangkan Program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup 1 tahun wajib pra-SD, sebagai langkah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih matang sejak dini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar serta memperkuat fondasi keterampilan dasar mereka sebelum masuk sekolah formal.

b. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV S1, S2, S2 Terapan, S3. Proporsi penduduk Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi tinggi = (Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/ berijazah pendidikan tinggi di daerah X / Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas di daerah X) X 100%. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Pada tahun 2024, angka Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi sebesar 4,65 persen yang akan menjadi baseline untuk perhitungan selanjutnya.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berketahanan terhadap berbagai guncangan sosial maupun ekonomi. Sistem perlindungan sosial yang baik tidak hanya memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi risiko

seperti kemiskinan, bencana, atau kehilangan pekerjaan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan yang terus berkembang. Dengan demikian, setiap individu, terutama kelompok rentan, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh kehidupan yang layak, akses terhadap layanan dasar, serta peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Di Kabupaten Trenggalek, perlindungan sosial terus dikembangkan melalui berbagai program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan program pusat dan daerah agar lebih responsif terhadap kondisi lokal, seperti kemiskinan pedesaan, lansia tanpa penghasilan tetap, serta dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, serta memperkuat daya tahan sosial masyarakat Trenggalek dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang akibat risiko sosial ekonomi selama bekerja. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk perlindungan sosial, tetapi juga sebagai kebijakan yang memperkuat hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja secara adil dan saling menguntungkan. Pelaksanaan program ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program jaminan sosial, termasuk di daerah seperti Kabupaten Trenggalek.

Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, tercatat 19.539 peserta aktif, terdiri dari 13.478 pekerja penerima upah dan 6.061 pekerja bukan penerima upah, namun pada 2021 jumlah ini menurun menjadi 15.334 peserta akibat penurunan peserta bukan penerima upah yang signifikan. Selanjutnya, kepesertaan kembali meningkat menjadi 19.292 pada 2022, kemudian melonjak tajam menjadi 26.077 peserta pada 2023 dengan 15.601 penerima upah dan 10.476 bukan penerima upah. Pada 2024, jumlah peserta aktif mencapai 34.577 orang, terdiri dari 20.601 penerima upah dan 13.976 bukan penerima upah, menunjukkan upaya pemerintah daerah yang efektif dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal, serta komitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kabupaten Trenggalek.

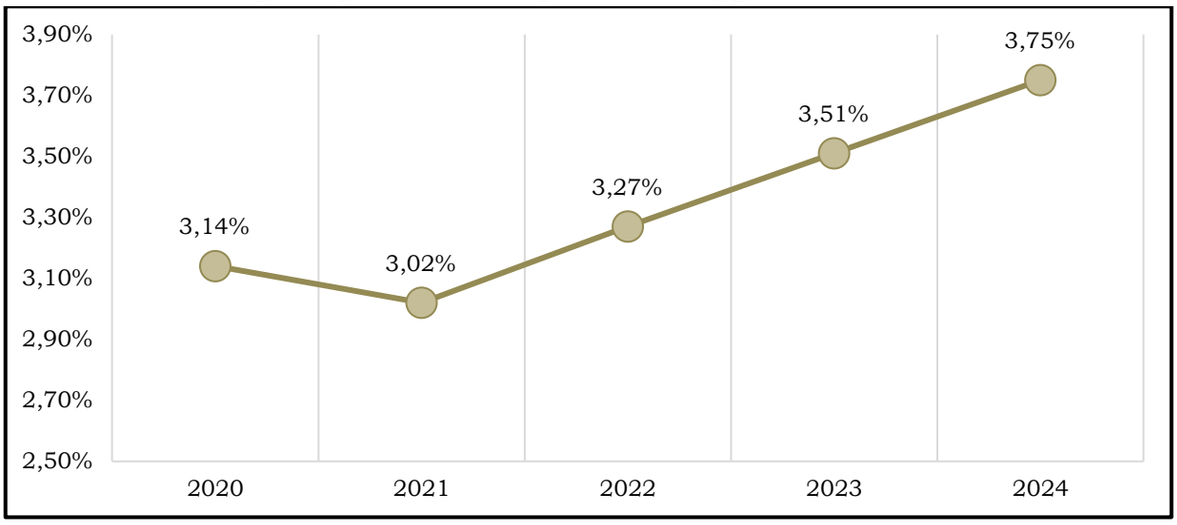
Tabel II.35
Jumlah Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kepesertaan Aktif		Jumlah
	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	
2020	13.478	6.061	19.539
2021	12.929	2.405	15.334
2022	14.176	5.116	19.292
2023	15.601	10.476	26.077
2024	23.204	11.393	34.597

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kab. Trenggalek, 2025

Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren yang meningkat secara bertahap selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3,14%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 3,02% pada tahun 2021. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi stabilitas dunia kerja, terutama di sektor informal dan pelaku usaha kecil yang terdampak signifikan. Namun mulai tahun 2022, kepesertaan mulai meningkat kembali, yaitu sebesar 3,27%, naik menjadi 3,51% di tahun 2023, dan mencapai 3,75% pada tahun 2024.

Grafik II.18
Persentase Tenaga Kerja (Penerima Upah) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2025

Mulai tahun 2023 ada upaya yang semakin kuat dalam memperluas perlindungan sosial tenaga kerja baik penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU), termasuk melalui sosialisasi yang lebih masif, penguatan regulasi ketenagakerjaan, serta peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi serta tumbuhnya sektor usaha yang menyerap tenaga kerja formal turut menjadi faktor pendukung. Meskipun tren kenaikannya positif, cakupan kepesertaan yang masih rendah menandakan perlunya strategi yang lebih agresif dalam menjangkau tenaga kerja di sektor nonformal agar seluruh pekerja dapat memperoleh jaminan sosial yang layak. Sehingga pada tahun 2024 sebagai data dasar RPJMD periode 2025-2029 didapatkan data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 23,14%.

2.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing sebagai penggerak pembangunan. Upaya ini mencakup penguatan ketahanan keluarga, peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, serta penciptaan lingkungan sosial yang inklusif dan setara.

Pengarusutamaan gender juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau negara, berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam berbagai program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam program tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

Tabel II.36
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)*	92,93	92,56	92,41	93,18	93,20

Sumber: BPS Republik Indonesia, 2025 (Menggunakan hasil LF SP2020)

Upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan. Langkah ini dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, penyediaan data terpilah, penyusunan kebijakan responsif gender, serta pemberdayaan masyarakat guna memastikan setiap program pembangunan ramah bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga membentuk jejaring koordinasi antarperangkat daerah, memperkuat peran TP PKK dan lembaga masyarakat, serta meningkatkan komitmen anggaran responsif gender di setiap program kerja. Seluruh upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan, memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial, sekaligus mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024, dengan capaian sebesar 92,93 pada

2020, menurun menjadi 92,56 pada 2021 dan 92,41 pada 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 93,18 pada 2023 dan 93,2 pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan di tahun-tahun awal, upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kesetaraan gender terus berlanjut, dengan IPG yang semakin mendekati angka 100 menandakan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan IPG pada dua tahun terakhir mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender yang perlu terus didorong agar kesetaraan gender di Kabupaten Trenggalek semakin optimal dan inklusif.

b. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. Persentase cakupan kepesertaan JKN = (Jumlah Peserta JKN/ Jumlah Penduduk) * 100%. Adapun realisasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Trenggalek tahun 2024 yakni 98,32 persen yang menjadi baseline untuk tahun selanjutnya.

Sedangkan cakupan kepesertaan aktif JKN Kabupaten Trenggalek tahun 2024 sebesar 62.39%. Kepesertaan aktif JKN merujuk pada peserta yang status kepesertaannya aktif, yaitu mereka yang rutin membayar iuran dan masih berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN.Cakupan kepesertaan aktif JKN menjadi indikator penting karena menunjukkan sejauh mana program JKN benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Meningkatkan cakupan kepesertaan aktif JKN bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Tabel II.37
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	63,2	68,05	72,48	74,78	98,32

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	-	-	-	-	62,39

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

c. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi kunci dalam menurunkan angka kelahiran, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Indikator proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern menggambarkan sejauh mana perempuan usia reproduktif (15–49 tahun) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan benar-benar menggunakan metode kontrasepsi modern. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern merupakan persentase pasangan usia subur (PUS) yang memiliki kebutuhan ber- KB (ingin menunda, mengatur jarak, atau menghentikan kelahiran) dan menggunakan metode kontrasepsi modern untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibandingkan dengan total pasangan usia subur yang memiliki kebutuhan ber-KB pada periode waktu tertentu.

Alat/cara KB modern yang dimaksud meliputi : (1) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) diantaranya IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), implan/susuk, sterilisasi wanita, dan sterilisasi pria. (2) Metode Non-MKJP diantaranya suntikan KB, pil KB, kondom, dan metode modern lainnya (misalnya diafragma atau spermisida modern).

Adapun nilai proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern dimulai penghitungannya di tahun 2024 dengan capaiannya sebesar 89,4% dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengukuran pada saat RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan.

d. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)

Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) / Unintended Pregnancy adalah kehamilan yang terjadi pada saat seorang perempuan atau pasangan tidak menginginkan untuk hamil, baik pada saat itu maupun di masa depan. Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama kehamilan tidak diinginkan (unwanted pregnancy) yang merupakan kehamilan yang terjadi ketika pasangan tidak ingin memiliki anak lagi. Kedua kehamilan tidak tepat waktu (mistimed pregnancy) merupakan kehamilan yang terjadi ketika pasangan ingin memiliki anak, tetapi pada waktu yang belum direncanakan.

Adapun capaian untuk Presentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) tahun 2024 sebesar 12,8% dan akan dilakukan pengukuran pada saat RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan.

e. Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (IPKR)

Peran penting pelibatan orang tua dan pengasuh sebagai mitra kunci dalam menjaga dan mendukung perkembangan remaja yang sehat. Seiring perkembangan remaja menjadi lebih dewasa, orang tua tetap memiliki pengaruh

penting atas aspek-aspek penting dalam perkembangan remaja, seperti identitas, kesejahteraan emosional, dan hubungan interpersonal.

Oleh karena itu diperlukan sebuah alat ukur yang digunakan menilai sejauhmana kualitas pengasuhan yang diberikan keluarga kepada anggota keluarga kepada anggota keluarga yang berada pada usia (10-24 tahun) melalui Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (IPKR). IPKR ini menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam pencegahan perilaku berisiko, penguatan karakter, dan peningkatan kualitas hidup generasi muda.

Adapun Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (IPKR) dimulai penghitungannya di tahun 2024 dengan capaiannya sebesar 84,09% dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengukuran pada saat RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan.

f. Indeks Lansia Berdaya

Indek komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan. Lansia berdaya di Kabupaten Trenggalek saat ini menunjukkan profil yang relatif positif, dengan meningkatnya mandiri secara fungsional, melalui pelatihan caregiver dan bantuan alat bantu. Produktif dan bermakna, melalui Sekolah Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh serta pemberian dukungan ekonomi. Disamping itu lansia di Kabupaten Trenggalek juga terhubung secara sosial, dengan adanya sekolah lansia dan komunitas. Serta penyediaan akses layanan lebih baik, ditopang inovasi kesehatan dan bantuan sosial.

Adapun capaian untuk Indeks Lansia Berdaya di tahun 2024 mencapai 58,06 point sebagai base data awal yang sebelumnya masih belum tersedia dan selanjutnya akan dilakukan pengukuran pada saat RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan.

g. Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah mandiri merupakan satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang telah mencapai tingkat kemandirian. Kabupaten Trenggalek terus berupaya mendorong pembangunan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, salah satu upaya yang dilakukan dengan mencanangkan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri.

Di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 belum terdapat kampung keluarga berkualitas yang mandiri, terjadi lonjakan yang signifikan pencapaiannya sebesar 22,22%, hal ini menunjukkan awal implementasi Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri di Trenggalek berjalan cepat pada tahun pertama pelaksanaan. Dan mengalami penurunan sampai dengan di tahun 2024, bahwa terdapat indikasi adanya tantangan mempertahankan kemandirian kampung, bisa terkait keberlanjutan program, partisipasi masyarakat, atau pendanaan.

Oleh karena itu dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan, sumber dana lokal, dan kaderisasi.

Tabel II.38
Capaian Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	0	22,22	17,54	16,88	15,92

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

h. Persentase PPKS yang mandiri

PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

PPKS yang Mandiri adalah PPKS yang telah mencapai kemandirian, artinya mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, tanpa terlalu bergantung pada bantuan sosial

PPKS merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau perlindungan sosial karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, disabilitas, atau masalah sosial lainnya. Kemandirian dalam konteks ini mengacu pada kemampuan PPKS untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan berkontribusi pada masyarakat. Kemandirian PPKS merupakan tujuan penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, meningkatkan martabat individu, dan memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan. Adapun realisasi indikator Persentase PPKS yang mandiri Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 yakni sebesar 5,6 persen. Realisasi tersebut merupakan baseline dari dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2025 - 2030.

i. Persentase Pelindungan Kebudayaan

Pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi juga menjadi arus utama pembangunan daerah. Pelindungan Kebudayaan akan terintegrasi dengan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Trenggalek. Hal ini akan mewujudkan pembangunan yang inklusif, berakar pada identitas lokal, sekaligus berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.

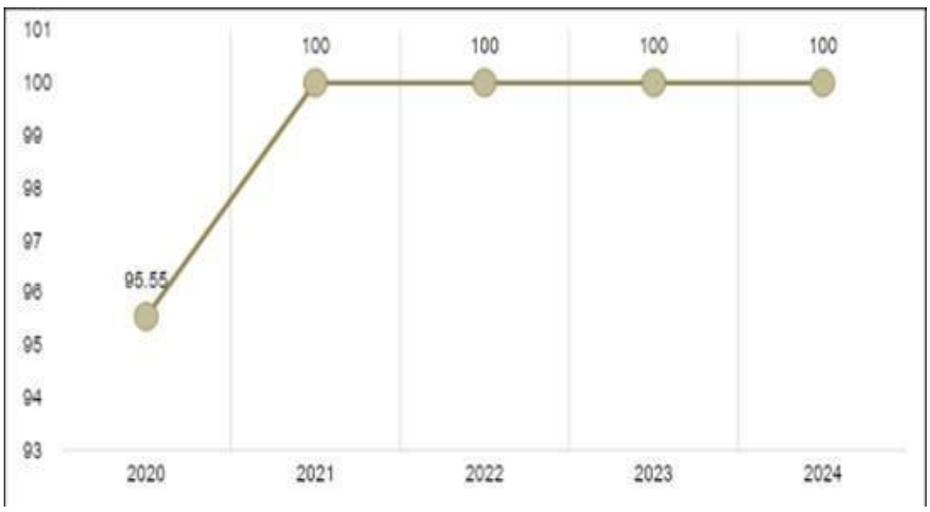
Pemerintah memiliki peran sentral dalam memajukan kebudayaan, termasuk dalam pelaksanaannya. Upaya pelindungan kebudayaan juga mencakup perlindungan ekspresi budaya tradisional yang merupakan identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan juga menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya. Pada tahun 2024 realisasi persentase pelindungan kebudayaan mencapai 5,6 persen yang menjadi tahun perhitungan pertama dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025 - 2030. Pelindungan Kebudayaan adalah

Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelindungan Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Pelestarian cagar budaya di Kabupaten Trenggalek menunjukkan konsistensi yang sangat baik sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Persentase terlestarikannya cagar budaya secara berturut-turut tercatat sebesar 95,55 persen pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2021, dan bertahan stabil hingga tahun 2024. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan sejarah dan budaya sebagai bagian penting dari identitas masyarakat Trenggalek.

Upaya pelestarian ini juga sejalan dengan arah pembangunan RPJP yakni Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Pelestarian cagar budaya tidak hanya menjaga nilai-nilai sejarah dan tradisi lokal, tetapi juga memperkuat karakter masyarakat yang berakhlak, menghargai warisan leluhur, dan siap beradaptasi dengan kemajuan zaman. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem sosial yang harmonis, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Grafik II.19
Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Paribud Kab. Trenggalek, 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perekonomian daerah. SDM yang berkualitas, produktif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja akan memperkuat kapasitas daerah dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan inovasi, serta menarik investasi. Oleh karena itu,

peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja menjadi strategi penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Angka ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.

Semakin besar angka ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi perhatian dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan sosial, karena dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis angka ketergantungan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan strategi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun pencapaian angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 berada di bawah 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi dimana merupakan peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat dimanfaatkan dengan optimal. Pada tahun 2024, angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek kembali naik ke angka 45,67.

Tabel II.39
Angka Ketergantungan (Persen)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia <15 tahun	141,48	140,27	139,40	142,27	142,38
Jumlah penduduk usia >64 tahun	79,13	82,94	86,98	87,83	91,06
Jumlah penduduk usia tidak produktif	220,61	223,21	226,38	230,1	233,44
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	510,55	511,68	513,29	511,08	511,09

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	43,21	43,62	44,10	45,02	45,67

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021-2025 (Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2021-2025), diolah

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Keberadaan Iptek tidak hanya berfungsi sebagai penunjang efisiensi dan efektivitas proses produksi, tetapi juga sebagai pendorong utama lahirnya solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global dan dinamika pasar. Peningkatan kapasitas inovasi daerah akan memperkuat produktivitas sektor-sektor ekonomi utama serta memperkokoh struktur ekonomi dalam jangka panjang, sehingga mampu menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Trenggalek secara bertahap mengalami kemajuan. Pemerintah daerah telah menetapkan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2021–2026 dan tengah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJ PID) Tahun 2025–2029 sebagai landasan strategis. Dukungan SDM riset berasal dari Bapperida, perguruan tinggi, serta inovator, meskipun jumlah peneliti, perekayasa dan analis pemanfaatan IPTEK masih terbatas. Infrastruktur riset mulai terbangun melalui rintisan Science Techno Park Atsiri, Taman Teknologi Pertanian Dillem Wilis, Rintisan Kebun Raya Bambu, serta sejumlah laboratorium. Anggaran riset dari APBD menunjukkan tren peningkatan, walaupun skalanya masih relatif kecil, dan upaya perlindungan kekayaan intelektual belum optimal.

Selain itu, kapasitas kelembagaan dan budaya inovasi daerah terus tumbuh melalui kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, BRIN, swasta, serta penguatan jejaring pentahelix. Indeks Inovasi Daerah Trenggalek konsisten meningkat dari kategori inovatif pada 2021 menjadi sangat inovatif pada 2024. Berbagai kompetisi inovasi, kampanye, serta pendampingan bagi pelaku usaha turut mendorong tumbuhnya budaya riset. Meskipun kelembagaan riset masih pada level sub-bidang dan klaster inovasi berbasis produk unggulan belum spesifik, potensi besar terlihat dari meningkatnya jumlah riset, inovasi daerah, serta kerja sama internasional. Hal ini menegaskan bahwa Trenggalek memiliki kapasitas untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Trenggalek masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi sektor basis daerah dengan pertumbuhan industri pengolahan yang relatif pesat, namun kontribusinya terhadap PDRB terus menurun. Sebaliknya, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan peningkatan meskipun belum menjadi sektor basis. Berdasarkan kajian Penentuan Produk Unggulan Daerah dalam Perspektif Pentahelix (2023), prioritas pengembangan diarahkan pada tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan dengan kriteria utama berupa kontribusi terhadap perekonomian, ketersediaan bahan baku, dan ketersediaan pasar.

Permasalahan utama komoditas unggulan adalah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga ke depan arah kebijakan pembangunan perlu menitikberatkan pada hilirisasi, industrialisasi, kepastian pasar dan penguatan daya saing produk unggulan daerah secara berkelanjutan.

Selain permasalahan komoditas, permasalahan lain yang menjadi titik fokus riset dan inovasi adalah ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek ekonomi, tantangan yang dihadapi berupa rendahnya daya dorong sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi, rendahnya kapasitas fiskal daerah, masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, serta infrastruktur pembangunan yang belum merata dan tingginya potensi bencana daerah. Pada aspek lingkungan, permasalahan terletak pada meningkatnya kerusakan lingkungan hidup, terbatasnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, pada aspek SDM, kendala yang muncul adalah rendahnya daya saing SDM serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada transformasi. Berdasarkan besarnya kesenjangan (*gap*) antara kondisi awal dengan target 2030 serta dampak sistemik terhadap indikator pembangunan daerah, maka permasalahan prioritas Kabupaten Trenggalek adalah belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif, yang menuntut dukungan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Berdasarkan data rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Trenggalek tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang konsisten dari 16,82% pada tahun 2020 menjadi 19,42% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kontribusi yang semakin besar dari sektor ini terhadap total PDRB daerah, mencerminkan adanya penguatan kapasitas produksi, peningkatan nilai tambah, dan adanya investasi. Sementara itu, rasio PDRB dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami pertumbuhan meskipun dalam skala yang lebih kecil, yakni dari 1,94% di tahun 2020 menjadi 2,13% pada tahun 2024, menandakan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan jasa pendukung.

Pertumbuhan kedua sektor ini, terutama industri pengolahan, menunjukkan adanya pergeseran ke arah struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Kenaikan rasio PDRB pada sektor-sektor tersebut dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap peningkatan produktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel II.40
Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (%)

Kontribusi Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Industri Pengolahan	16,82	17,98	18,31	18,51	19,42

Kontribusi Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
B	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,94	1,99	2,06	2,11	2,13

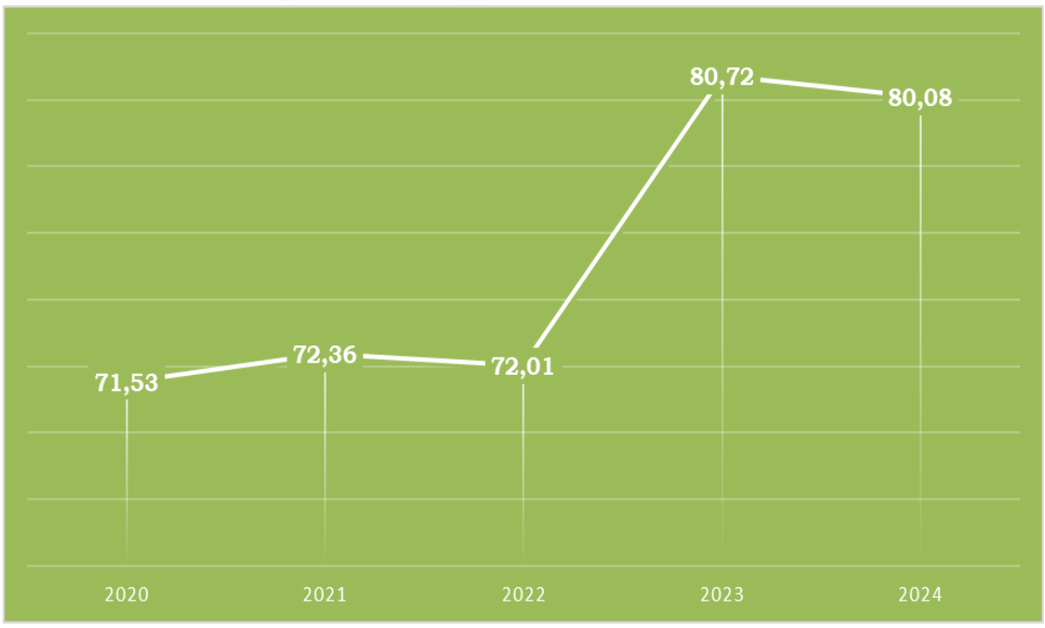
Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 hingga 2024 bergerak fluktuatif. TAPK tahun 2020 sebesar 71,53 persen, naik pada tahun 2021 menjadi 72,36 persen dan sedikit menurun menjadi 72,01 di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 8,71 persen menjadi 80,72 persen dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 80,08 persen. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam upaya lebih meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyerapan angkatan kerja agar tidak menjadi pengangguran.

Grafik II.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

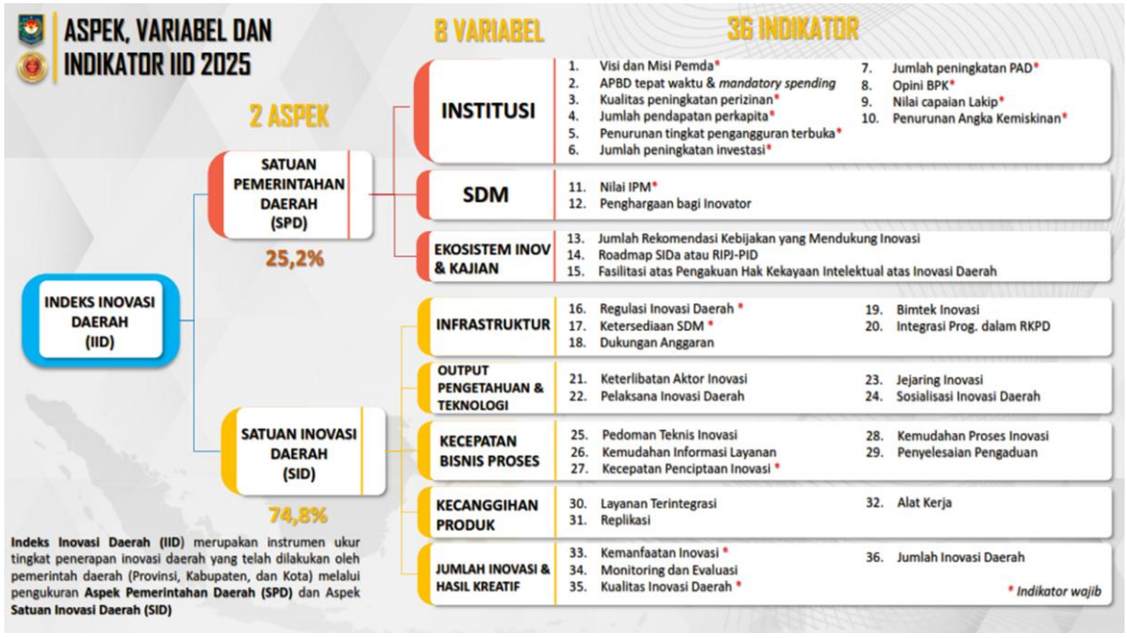


Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

c. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan instrumen ukur tingkat penerapan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) melalui pengukuran aspek pemerintahan daerah (SPD) dan Aspek Satuan inovasi daerah (SID). Aspek pemerintahan daerah yang wajib diukur berjumlah 10 indikator yang terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan,Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM. Sedangkan indikator aspek Inovasi daerah yang wajib diukur berjumlah berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah.

Gambar II.15
Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

Kabupaten Trenggalek telah mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah sejak tahun 2018. Pada tahun 2020 (Metode penghitungan lama), nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 3.342 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat 47. Pada tahun 2021, skor Indeks Inovasi Kabupaten Trenggalek mencapai 55,28 (skala 0-100) dengan kategori inovatif dan menempati peringkat 49 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Tahun 2022, skor indeks meningkat menjadi 56,38 dengan kategori inovatif dan berada di peringkat 58. Pada tahun 2023, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek kembali meningkat menjadi 62,76 dengan kategori sangat inovatif, menempati peringkat 24 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Terbaru, pada tahun 2024, skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek naik menjadi 69,98 dengan kategori sangat inovatif, menempati peringkat 29 secara nasional. Peningkatan indeks terlihat dari peningkatan jumlah inovasi daerah, tahun 2023 terdapat 51 inovasi, tahun 2024 menjadi 98 inovasi yang dilaporkan, selain itu rata-rata skor kematangan inovasi daerah juga meningkat pada skor 100.

Tabel II.41
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks	Kategori	Peringkat
2020	3.342	Sangat inovatif	47
2021	55,28	Inovatif	49
2022	56,38	Inovatif	58
2023	62,76	Sangat inovatif	24
2024	69,98	Sangat inovatif	29

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

d. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang jan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

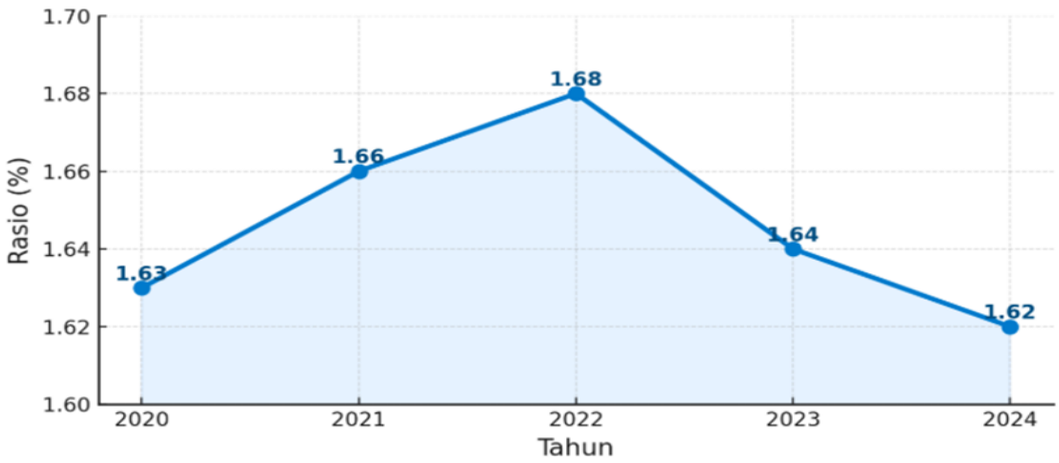
Secara sederhana semakin tinggi rasio volume usaha koperasi maka semakin tinggi pula kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Semakin rendah rasio, berarti koperasi belum menjadi aktor ekonomi yang dominan atau signifikan dalam perekonomian daerah tersebut.

Tabel II.42
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024

Tahun	Volume Usaha Koperasi	PDRB ADHB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)
2020	298.870.660.751	18.314.461.260.000	1,63
2021	318.822.097.135	19.198.246.560.000	1,66
2022	351.309.180.889	20.882.311.900.000	1,68
2023	373.901.422.753	22.740.050.560.000	1,64
2024	394.390.151.284	24.364.740.000.000	1,62

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Grafik II.21
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Dari data pada tabel dan grafik di atas dapat dianalisa bahwa di Kabupaten Trenggalek Kontribusi Koperasi terhadap perekonomian mengalami kenaikan pada tahun 2020–2022. Pada tahun 2020, rasio berada di 1,63% dan terjadi kenaikan berturut-turut hingga mencapai 1,68% pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap PDRB semakin meningkat, yang bisa disebabkan oleh:

- Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
- Penguatan kelembagaan koperasi .
- Peningkatan volume usaha per koperasi.

Terjadi penurunan ringan pada tahun 2023–2024. Setelah puncaknya di 2022, terjadi penurunan rasio menjadi 1,64% di 2023, dan turun lagi ke 1,62% di 2024. Penurunan ini disebabkan antara lain banyak koperasi yang tidak aktif dibubarkan atau membubarkan diri, di sisi lain nilai PDRB tumbuh lebih cepat.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Trenggalek terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

Capaian kinerja pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek juga tercermin dari dinamika sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selama periode 2020 hingga 2024, sektor ini mengalami perkembangan yang beragam. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sektor ini tercatat sebesar 0,10 persen, namun mengalami kontraksi pada tahun 2021 dan 2022 dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -0,72 persen dan -1,46 persen. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan pertumbuhan positif sebesar 2,72 persen, meskipun kembali melambat menjadi 0,31 persen pada tahun 2024.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap struktur PDRB Kabupaten Trenggalek.

Tercatat, kontribusi sektor ini mengalami penurunan secara bertahap dari 28,05 persen pada tahun 2020 menjadi 24,86 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian masih memiliki peran signifikan, namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor ini secara berkelanjutan agar tetap menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi daerah.

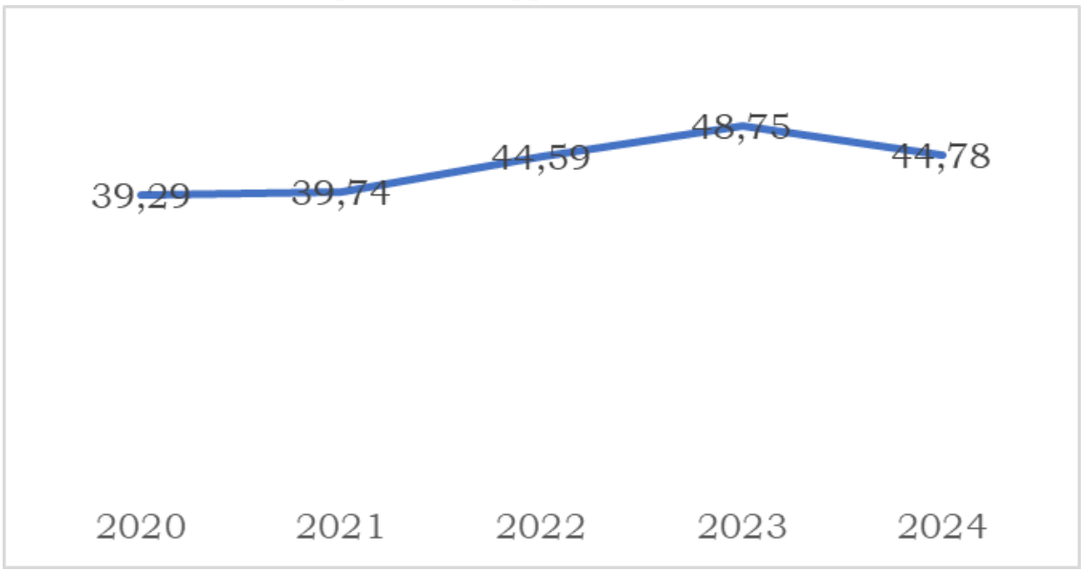
Tabel II.43
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,10	-0,72	-1,46	2,72	0,31
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,05	27,00	25,89	25,98	24,86

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Terhitung sejak tahun 2020 hingga 2023, Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren positif dengan skor berada pada kategori Sedang Tier 2, yaitu dalam rentang capaian 39–48. Capaian tahun 2023 bahkan hampir menyentuh ambang batas kategori Baik Tier 1 (50,01). Namun, pada tahun 2024 skor mengalami penurunan menjadi 44,78. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi pembangunan hijau. Meskipun demikian, dalam waktu dekat Kabupaten Trenggalek memiliki peluang untuk naik ke kategori Baik Tier 1, dengan catatan diperlukan konsistensi kebijakan hijau, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta pengurangan ketergantungan pada sektor-sektor yang berisiko menurunkan skor, seperti pertambangan konvensional.

Grafik II.22
Indeks Ekonomi Hijau
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2025

Adapun, ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Di Indonesia, implementasi ekonomi hijau diukur menggunakan Indeks Ekonomi Hijau, yang merepresentasikan progres dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Berdasarkan klasifikasi Bappenas, Indeks Ekonomi Hijau terbagi menjadi 6 (enam) kategori sebagai berikut:

Tabel II.44
Klasifikasi Skor Indeks Ekonomi Hijau

Skor Indeks Ekonomi Hijau	Kategori
0,00 - 25,00	Kurang
25,01 - 37,50	Sedang Tier 1
37,51 - 50,00	Sedang Tier 2
50,01 - 62,50	Baik Tier 1
65,51 - 75,00	Baik Tier 2
75,01 - 100,00	Sangat Baik

Sumber : Bappenas, 2024

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam pembangunan daerah menjadi pendorong penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, termasuk dalam memperkuat peran dalam rantai pasok global. Di Kabupaten Trenggalek, arah pembangunan tersebut tercermin dari indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran.

Kinerja PMTB di Trenggalek dalam lima tahun terakhir menunjukkan stabilitas kontribusi terhadap struktur ekonomi daerah, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, PMTB menyumbang 19,19 persen terhadap PDRB dan tetap berada pada kisaran 18–19 persen hingga tahun 2024, dengan capaian 18,94 persen. Sementara itu, kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa masih menunjukkan tren negatif, yang mengindikasikan bahwa nilai impor barang dan jasa masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Pada tahun 2024, net ekspor tercatat sebesar -4,76 persen, setelah sebelumnya mencapai angka terendah -5,74 persen di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan pentingnya

penguatan sektor produksi lokal dan strategi hilirisasi untuk meningkatkan daya saing ekspor Kabupaten Trenggalek secara berkelanjutan.

Tabel II.45
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-5,66	1,26	1,35	5,31	5,94
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,19	18,96	18,47	18,75	18,94
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-5,74	-3,85	-1,45	-4,08	-4,76

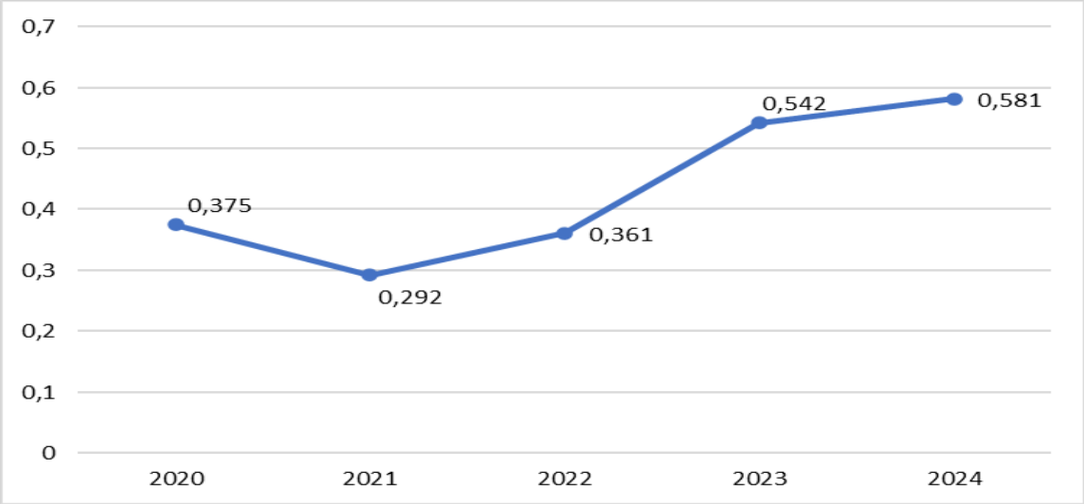
Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah penanaman modal, termasuk dalam memberikan kemudahan dan mempercepat layanan perizinan usaha. Pada tahun 2020, realisasi peningkatan jumlah izin usaha yang terbit di Kabupaten Trenggalek mencapai 5,38 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,22 persen. Tren positif mulai terlihat pada tahun 2022 dengan kenaikan signifikan menjadi 39,3 persen dan berlanjut pada tahun 2023 yang mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan efektivitas pelayanan perizinan.

Dari sisi nilai investasi, tren juga menunjukkan pola fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sebesar Rp 0,375 triliun, kemudian turun pada tahun 2021 menjadi Rp 0,292 triliun. Namun, terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp 0,361 triliun dan melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi Rp 0,542 triliun. Pada tahun 2024, nilai investasi kembali meningkat mencapai Rp 0,581 triliun. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh ketidakpastian makro ekonomi global dan nasional, serta kendala internal berupa tata ruang yang masih perlu direvisi.

Untuk mempercepat pencapaian target investasi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengoptimalkan dua inovasi utama, yaitu lelang investasi dan program Jemput Bola Layanan (JEMPOL). Lelang investasi difokuskan pada potensi aset pemerintah, korporasi, dan produk unggulan daerah dengan menyasar calon investor yang telah memiliki jejaring bisnis di Trenggalek. Sementara itu, inovasi JEMPOL diarahkan untuk mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat melalui kegiatan *Meningdeh*, *Meningpas*, dan donasi NIB.

Grafik II.23
Realisasi Investasi (Triliun Rp)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2025

Koperasi dan usaha mikro merupakan pilar penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Trenggalek. Persentase meningkatnya koperasi berkualitas dan usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha menunjukkan sejauh mana efektivitas pembinaan, pendampingan, serta ekosistem usaha yang mendukung di daerah. Keberhasilan dalam aspek ini mencerminkan ketahanan ekonomi lokal dan kontribusi sektor informal terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan data, persentase meningkatnya koperasi berkualitas pada tahun 2021 mencapai 70,97 persen, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam menjadi 25,59 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan variabel yaitu sebelum tahun 2024 dihitung dengan variabel jumlah koperasi yang RAT dibagi jumlah koperasi yang aktif. Namun mulai tahun 2024 variabelnya berubah menjadi koperasi yang naik volume usaha dan asetnya dibanding jumlah koperasi aktif. Untuk usaha mikro, persentase yang berhasil menjadi wirausaha tercatat konsisten sebesar 100 persen dari tahun 2021 hingga 2023, namun juga menurun pada tahun 2024 menjadi 17,92 persen. Penurunan usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya perubahan variabel yaitu sebelum tahun 2024 dihitung berdasarkan variabel jumlah keseluruhan usaha mikro baik yang memiliki legalitas maupun yang belum memiliki legalitas dibagi jumlah usaha mikro berdasarkan ODS *(online data system)*. Namun mulai tahun 2024 variabelnya berubah menjadi jumlah usaha mikro yang telah memiliki legalitas usaha (NIB) dibagi jumlah usaha mikro berdasarkan ODS *(online data system)*. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan besar pada tahun 2024, baik dari sisi regulasi, pembiayaan, maupun daya saing usaha mikro dan koperasi.

Tabel II.46
Realisasi Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	70,97	100	100	25,59
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100	100	17,92

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025

2.1.3.5 Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi elemen kunci dalam mendukung akselerasi pembangunan di berbagai sektor, baik pada tataran nasional maupun daerah. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mendorong efisiensi dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Melalui digitalisasi, tata kelola pemerintahan dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

a. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memetakan kondisi masyarakat digital di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota. IMDI mengukur empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan, dengan tujuan mendukung visi Indonesia Digital 2045. Infrastruktur digital merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. yang terbentuk dari 3 sub pilar yaitu Akses dan Adopsi Teknologi Digital yang berasal dari data akses dan penggunaan TIK, dan adopsi teknologi yang dilakukan sektor privat/bisnis; Ekosistem Pembelajaran yang berasal dari jumlah sekolah dari tingkat dasar sampai menengah dengan akses internet, serta jumlah pendidikan tinggi bidang TIK; dan Digitalisasi Pemerintah yang berasal dari data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pengukuran ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai perkembangan digital masyarakat di berbagai wilayah. Di Kabupaten Trenggalek, skor IMDI menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada 2022, skor IMDI Trenggalek tercatat sebesar 37,88, kemudian meningkat menjadi 41,93 pada 2023 dan mencapai 46,75 pada 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh kemajuan signifikan pada pilar Infrastruktur dan Ekosistem yang naik dari 42,7 (2022) menjadi 65,39 (2024). Hal ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah daerah, seperti pembangunan jaringan intra pemerintah, penyediaan wifi corner di 13 kecamatan, serta fasilitas smartbench dan smart gazebo di ruang publik. Pilar Keterampilan Digital juga meningkat dari 52,76 menjadi 58,55, menandakan

kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital terus berkembang.

Meski demikian, Pilar Pemberdayaan masih menjadi tantangan utama dengan skor yang relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 15,45 pada 2022 menjadi 25,83 pada 2024. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Pilar Pekerjaan juga mengalami fluktuasi, turun pada 2023 tetapi kemudian naik kembali menjadi 38,91 pada 2024, mencerminkan adanya perkembangan peluang kerja berbasis digital yang mulai tumbuh di Trenggalek.

Tabel II.47
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2022-2024

Pilar	2022	2023	2024
Pilar Infrastruktur Dan Ekosistem	42,7	61,77	65,39
Pilar Ketrampilan Digital	52,76	51,77	58,55
Pilar Pemberdayaan	15,45	24,53	25,83
Pilar Pekerjaan	42,02	28,79	38,91
IMDI	**37,88**	**41,93**	**46,75**

Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2025

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan yang positif, kategori IMDI Kabupaten Trenggalek masih berada dalam kategori "cukup." Hal ini menandakan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat ruang besar untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital secara lebih optimal agar transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan inklusif bagi seluruh warga Trenggalek. Pemerintah daerah terus berupaya melalui berbagai inovasi dan program untuk mempercepat akselerasi digitalisasi di wilayah ini.

Dengan capaian ini, Trenggalek tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam infrastruktur dan keterampilan digital, tetapi juga berpotensi menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi digital. Dukungan berkelanjutan dan kolaborasi multisektor akan menjadi kunci untuk membawa Trenggalek ke kategori yang lebih tinggi dalam IMDI di masa mendatang.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan perkembangan daerah otonom terutama dari segi demografi. Kondisi ini akan membawa tantangan tersendiri bagi daerah. Dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu daerah maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan mendasar juga akan meningkat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

a. Jalan Kondisi Mantab

Berdasarkan data kondisi panjang jalan di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa terjadi perubahan total panjang jalan. Pada tahun 2020 hingga 2023, total panjang jalan tercatat konstan yaitu sebesar 931,23 km. Namun pada tahun 2024 total panjang jalan menurun menjadi 859,96 km (SK Jalan Nomor 188.45/500/406.001.3/2023). Penurunan panjang jalan ini dipengaruhi karena adanya revisi terhadap SK ruas jalan Kabupaten dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan ketentuan standar jalan yang berlaku .

Jika dilihat lebih rinci, kondisi jalan pada tahun 2020 hingga 2023 didominasi oleh jalan dengan kondisi baik, yaitu sekitar 572,80 km pada 2020 dan 2022, serta sedikit menurun menjadi 569,90 km pada 2021 dan 543,80 pada 2023. Jalan dengan kondisi sedang berkisar antara 110,19 km hingga 168,68 km, sedangkan kondisi rusak ringan masing-masing berada pada kisaran 20–30 km dan rusak berat sekitar 219 km. Adapun pada tahun 2024 dan 2025, karena total panjang jalan mengalami perubahan maka untuk rincian kondisi jalan juga berubah. Untuk kondisi jalan baik mengalami penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2024 sekitar 393,23 km menjadi 318,43 km pada tahun 2025. Sementara kondisi jalan sedang, rusak ringan, dan rusak berat mengalami peningkatan. Untuk kondisi jalan sedang tahun 2024 sekitar 226,28 km meningkat menjadi 256,79 km pada tahun 2025. Kondisi jalan rusak ringan meningkat dari 118,70 km pada tahun 2024 menjadi 120,05 tahun 2025. Kondisi rusak berat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 121,76 km pada tahun 2024 menjadi 164,69 km pada tahun 2025. Kondisi kerusakan infrastruktur jalan yang terus meningkat salah satunya disebabkan karena meningkatnya intensitas kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan jalan kedepan perlu diperhatikan terkait dengan kualitas infrastruktur jalan yang tahan terhadap bencana.

Berdasarkan data persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) selama periode tahun 2020-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif yaitu 74,24% (2020), 73,03% (2021), 74,24% (2022), 76,51% (2023), dan pada tahun 2024-2025 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana dari 72,18% pada tahun 2024 menjadi 66,89% pada tahun 2025. Kondisi ini berbanding lurus dengan data kondisi jalan yang berarti secara

umum tidak terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas kemantapan jalan pada rentang waktu tersebut. Penurunan kondisi kemantapan jalan utamanya dikarenakan cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana banjir, genangan, dan tanah longsor. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih fokus terhadap perbaikan jalan rusak, terutama untuk menjaga konsistensi kemantapan jalan.

Tabel II.48
Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Jalan dalam kondisi mantap	74,24%	73,03%	74,24%	76,51%	72,04%	66,89%
Kondisi Baik	572,80	569,90	572,80	543,80	393,23	318,43
Kondisi Sedang	118,55	110,19	118,55	168,68	226,28	256,79
Kondisi Rusak Ringan	20,39	29,60	20,39	19,46	118,70	120,05
Kondisi Rusak Berat	219,49	221,54	219,49	199,29	121,76	164,69
Jumlah	**931,23**	**931,23**	**931,23**	**931,23**	**859,96**	**859,96**

**** kondisi jalan tahun 2025 s.d bulan Mei***

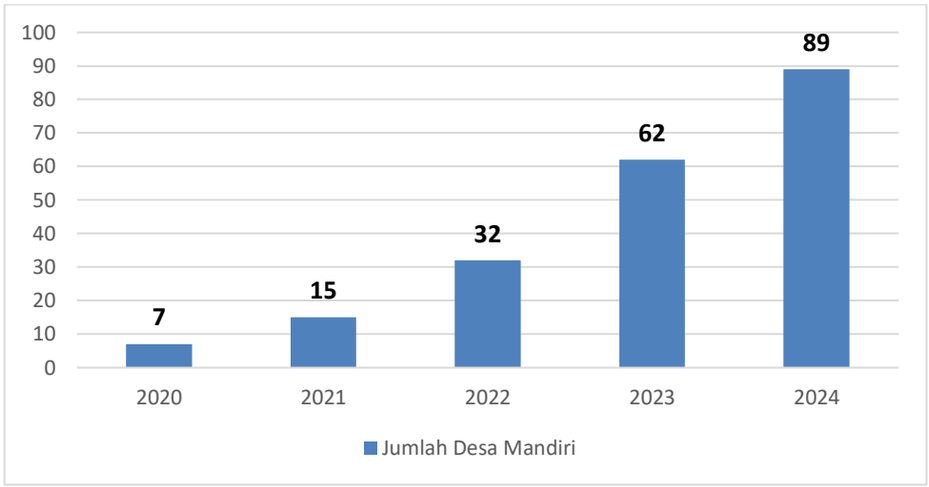
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2025

b. Desa Mandiri

Pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai simpul strategis dalam mendukung penguatan ekonomi lokal dan nasional. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat 7 desa mandiri atau sebesar 4,61 persen dari total desa, kemudian meningkat menjadi 15 desa atau 9,87 persen pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan total 32 desa mandiri atau 21,05 persen sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 80 Tahun 2022.

Pada tahun 2023, jumlah desa mandiri kembali mengalami lonjakan signifikan menjadi 62 desa atau setara dengan 40,79 persen dari total desa, berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 174 Tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024, persentase desa mandiri diperkirakan terus meningkat dan mencapai 58,55 persen. Perkembangan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemberdayaan dan pembangunan desa yang telah dilaksanakan, serta menunjukkan kemajuan dalam kemandirian desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Grafik II.24
Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2025

Peningkatan jumlah desa mandiri ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek, khususnya dalam upaya mendorong kemandirian desa secara menyeluruh—baik dari aspek ekonomi lokal, kualitas layanan dasar, maupun tata kelola pemerintahan desa. Pertumbuhan yang konsisten ini juga menjadi indikator penting atas peningkatan kapasitas desa dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya desa yang mandiri, diharapkan ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat.

Pengukuran Persentase Desa Mandiri menggunakan basis data Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Indeks Desa bertujuan mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Melalui Indeks Desa, pemerintah dapat menyalurkan sumber daya secara tepat guna serta memantau kemajuan pembangunan desa secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dalam berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

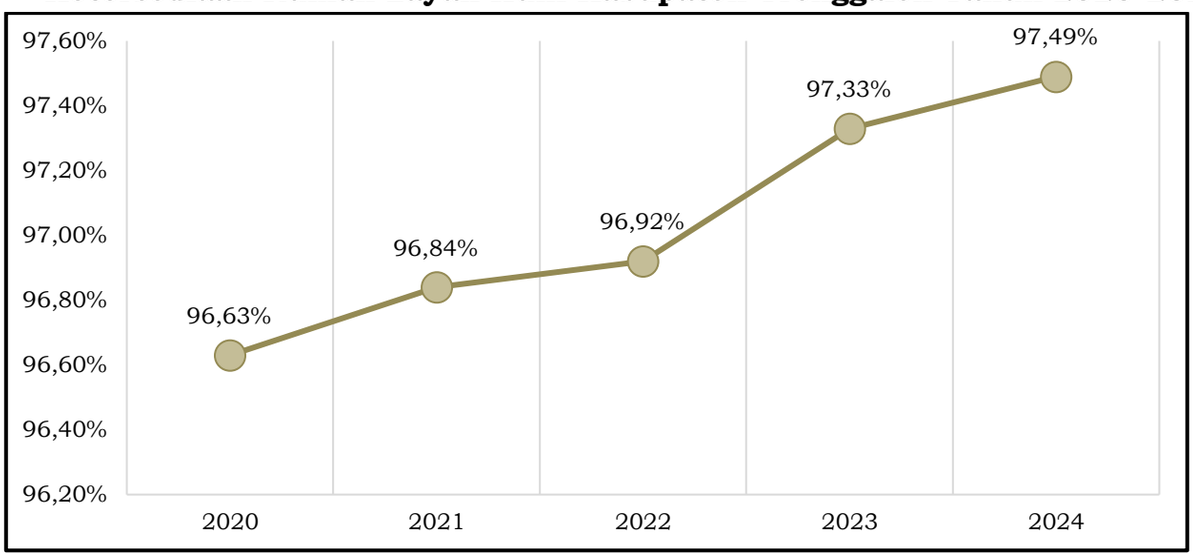
Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

c. Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni berada pada angka 96,63%, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 96,84% di tahun 2021, 96,92% di tahun 2022, 97,33% di tahun 2023, hingga mencapai 97,49% di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendorong kualitas hunian yang layak bagi masyarakat, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan warga.

Salah satu strategi yang ditempuh dalam meningkatkan ketersediaan rumah layak huni adalah dengan melaksanakan koordinasi aktif bersama anggota DPR RI guna memperluas akses terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya ini bertujuan untuk menambah kuota bantuan stimulan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki atau membangun rumah agar memenuhi standar kelayakan. Analisis singkat terhadap tren data menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan legislatif pusat mampu memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas hunian, meskipun masih terdapat ruang peningkatan menuju cakupan 100% rumah layak huni.

Grafik II.25
Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025

d. Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani

Permukiman kumuh merupakan kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian, baik dari aspek kepadatan kumuhbangunan, akses infrastruktur dasar, maupun sanitasi lingkungan yang tidak memadai. Keberadaan kawasan kumuh, khususnya yang berada di bawah luasan 10 hektar, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan. Penanganan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan

kualitas fisik lingkungan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk melakukan penanganan kawasan kumuh secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor serta pelibatan aktif masyarakat. Penanganan kawasan kumuh juga diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya target 11.1, yaitu memastikan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua.

Pada tahun 2022, kawasan kumuh di bawah 10 hektare di Kabupaten Trenggalek sudah tertangani. Berdasarkan SK penetapan kawasan kumuh tahun 2020 meliputi kecamatan Munjungan dan kecamatan Watulimo serta SK penetapan kawasan kumuh tahun 2021 meliputi Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Durenan, pemerintah daerah sudah melakukan penanganan kawasan kumuh tersebut sehingga capaiannya sebesar 100%. Namun demikian, kawasan kumuh bisa muncul kembali karena berbagai faktor baik dari segi fisik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh sebab itu perlu dilakukan identifikasi kembali kawasan kumuh di Kabupaten Trenggalek sebagai bahan penentuan baseline awal perencanaan. Identifikasi tersebut kemudian ditetapkan oleh Bupati Trenggalek. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan program penataan kawasan permukiman.

Tabel II.49
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pengurangan luasan kawasan kumuh (di bawah 10 Hektar)	74,14	99,98	100	100	100

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025

e. Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn)

Pemerataan infrastruktur merupakan aspek penting dalam memastikan keadilan pembangunan antar kawasan di dalam suatu daerah. Akses yang setara terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, air minum, air limbah, rumah layak huni, dan persampahan sangat menentukan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Ketimpangan distribusi infrastruktur dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah, sehingga perlu ditangani secara terarah dan berkelanjutan.

Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan layanan infrastruktur berbasis kewilayahan di Kabupaten Trenggalek. Semakin kecil nilai indeks yang ditunjukkan, maka semakin baik pemerataan infrastruktur di wilayah tersebut. Indeks ini menjadi acuan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan inklusif. Dalam Indeks Pemerataan Infrastruktur disamping memperhatikan nilai IPIn juga perlu memperhatikan nilai rata-rata kinerja setiap sektor infrastruktur, hal ini untuk mengetahui apakah pemerataan infrastruktur ke arah peningkatan kinerja atau penurunan kinerja.

Pada tahun 2024, nilai IPIn Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,216 poin, yang menjadi baseline awal dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terpencil, atau kantong kemiskinan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

f. Indeks Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator utama yang mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar di suatu daerah. Bagi Kabupaten Trenggalek, indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diukur sejak tahun 2024. Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk menunjang kelancaran pembangunan daerah, karena tanpa dukungan infrastruktur yang baik, proses pembangunan akan terhambat dan hasilnya tidak optimal. Infrastruktur yang berkualitas juga meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, mobilitas ekonomi, serta pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berperan sebagai penyedia layanan yang harus memenuhi harapan masyarakat melalui peningkatan kualitas fasilitas publik yang layak dan sesuai standar.

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah, mencakup sektor jalan, jembatan, transportasi, irigasi, drainase, air minum (bersih), sanitasi, persampahan, perumahan, dan bangunan gedung. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan cakupan layanan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada kualitas layanan dasar. Indeks infrastruktur merupakan rata-rata capaian tahunan dari 13 indikator diantaranya:

1. Persentase jalan mantab
2. Persentase jembatan berfungsi baik
3. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
4. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman
5. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik
6. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
7. Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik
8. Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani
9. Proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, berkelanjutan
10. Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
11. Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
12. Persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
13. Indeks aksesibilitas

Pada tahun 2024, Indeks Infrastruktur Kabupaten Trenggalek berada pada angka 50,09 poin, yang menjadi baseline awal dalam periode perencanaan pembangunan daerah. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Trenggalek masih berada pada tingkat sedang, namun masih terdapat ruang peningkatan, khususnya dalam

menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dasar.

g. Indeks Kota Hijau

Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan merupakan pilar penting dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, sehat, dan layak huni. Dalam konteks ini, Indeks Kota Hijau (IKH) menjadi indikator strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian kota atau kawasan perkotaan yang ramah lingkungan berdasarkan dimensi tata ruang, ruang terbuka hijau, transportasi berkelanjutan, pengelolaan air dan limbah, efisiensi energi, dan partisipasi masyarakat. IKH tidak hanya mencerminkan kondisi lingkungan fisik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Peningkatan indeks ini berkontribusi langsung terhadap ketahanan kota dalam menghadapi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.

Untuk menghitung indeks kota hijau, mulai tahun 2024 Kabupaten Trenggalek mengacu pada pengukuran keberlanjutan kota yang dilakukan oleh Universitas Indonesia berupa UI Green City Metric. UI Green City Metric merupakan pemeringkatan bagi kabupaten/kota di Indonesia di bidang keberlanjutan dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. UI Green City Metric terdiri dari 6 kategori penilaian, antara lain Penataan Ruang dan Infrastruktur (SI), Energi dan Perubahan Iklim (EC), Tata Kelola Sampah dan Limbah (WS), Tata Kelola Air (WR), Akses dan Mobilitas (TR), serta Tata Pamong/Governance (GV). Adapun metodologi pengukuran Indeks Kota Hijau (IKH) Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.16
Metodologi Pengukuran Indeks Kota Hijau (IKH)
Kabupaten Trenggalek

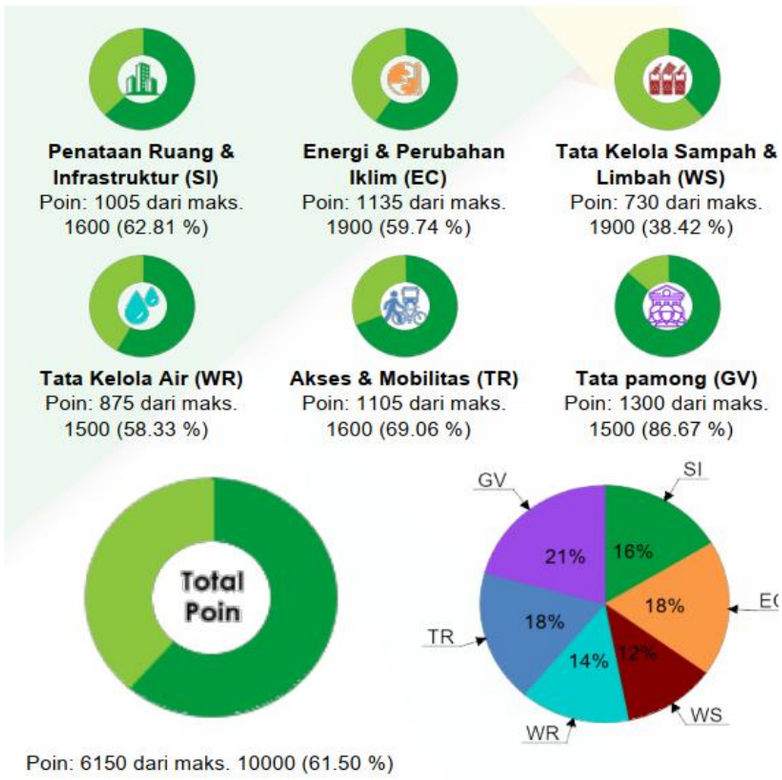


Sumber: Universitas Indonesia, 2025

Pada tahun 2024, Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 61,5%, yang menjadi baseline untuk periode perencanaan RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar komponen kota hijau telah mulai diimplementasikan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan,

khususnya dalam aspek energi dan perubahan iklim, akses dan mobilitas, tata kelola sampah, dan tata kelola air.

Gambar II.17
Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek



Sumber: Bappelitbang Kab. Trenggalek, 2025

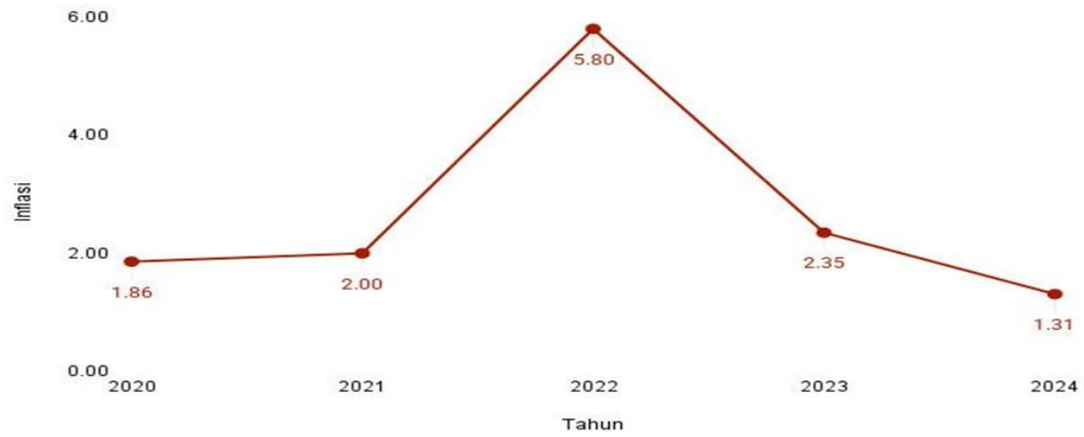
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, menjaga stabilitas moneter, serta memperkuat sektor keuangan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan yang bersifat pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan guna menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan inklusif. Dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga, pemerintah dapat memastikan daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan global, sekaligus mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

a. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Di Kabupaten Trenggalek, tingkat inflasi berdasarkan PDRB pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh pelaku ekonomi berubah-ubah setiap tahunnya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasokan dan permintaan.

Grafik II.26
Tingkat Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



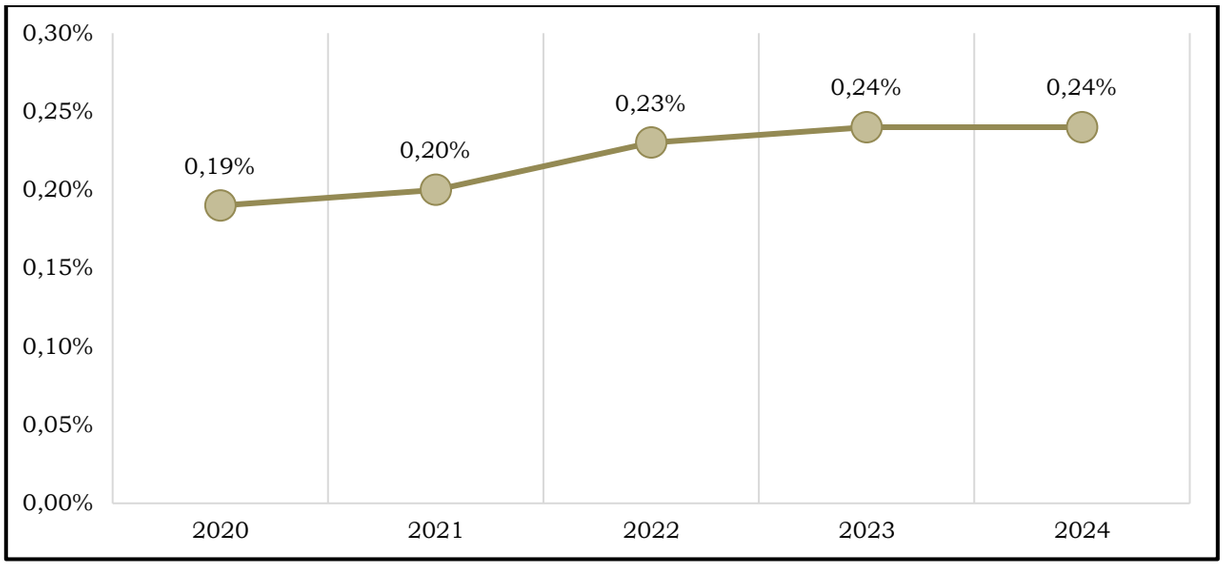
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025
Data Inflasi Kota Madiun (Sistercity Kabupaten Trenggalek) dari tahun 2020-2024

Secara rinci, inflasi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,86% kemudian mengalami kenaikan menjadi 2,00% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yang sangat signifikan menjadi 5,80%. Pada tahun 2021 hingga 2022 pandemi Covid-19 menyebabkan dinamika harga yang sangat tinggi. Namun tren tersebut berbalik arah di tahun 2023 dengan mulai pulihnya ekonomi yang ditunjukkan dengan inflasi yang turun menjadi 2,35% dan terus menurun pada tahun 2024 dengan angka inflasi sebesar 1,31%. Penurunan inflasi menunjukkan adanya tekanan harga yang lebih ringan di tingkat produksi dan konsumsi, yang bisa mencerminkan kondisi pasokan yang stabil atau melemahnya permintaan. Meski demikian, inflasi yang terlalu rendah juga perlu diwaspadai karena dapat mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi.

b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Trenggalek menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, dengan angka yang berturut-turut sebesar 0,19%, 0,20%, 0,23%, 0,24%, dan 0,24%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penerimaan pajak daerah yang relatif sebanding dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun nilai rasio ini masih terbilang rendah, tren yang terus meningkat menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui sektor pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan kinerja sektor pajak, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun penguatan sistem administrasi pajak daerah. Ke depan, perluasan basis pajak dan efisiensi pengelolaan pajak daerah menjadi kunci untuk mendongkrak rasio ini lebih tinggi, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

Grafik II.27
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024



Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2025

c. Indeks Infrastruktur Permukiman pada wilayah kantong kemiskinan

Indeks Infrastruktur Permukiman merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana dasar di suatu wilayah, khususnya dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur permukiman mencakup ketersediaan dan kualitas fasilitas dasar seperti akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, dan pengelolaan sampah. Keberadaan infrastruktur ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin standar pelayanan dasar yang layak. Kondisi infrastruktur di wilayah kantong kemiskinan menjadi perhatian tersendiri, mengingat keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah tersebut menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, peningkatan infrastruktur permukiman juga mendorong konektivitas sosial dan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Infrastruktur Permukiman di wilayah kantong kemiskinan Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 80,59. Angka ini menjadi titik awal (baseline) yang merefleksikan kondisi eksisting dan menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas, terutama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah secara kuantitatif dan objektif. IPKD mencerminkan tingkat kepatuhan, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good

governance). Indeks ini menjadi alat evaluasi penting dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki korelasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah dan pencapaian target pembangunan. Penguatan dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki iklim investasi, serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan tepat sasaran juga berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan program pembangunan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar 61,93, tahun 2021 sebesar 67,57%, tahun 2022 sebesar 73,03%, tahun 2023 sebesar 74,99%. Pada tahun 2024, nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 74,99%. Nilai ini merupakan capaian kinerja pada tahun 2023 yang akan menjadi baseline perencanaan strategis dalam peningkatan kinerja keuangan di tahun-tahun berikutnya. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah telah berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan internal.

Tabel II.50
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

Tahun	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
2020	61,93
2021	67,57
2022	73,03
2023	74,99
2024	74,99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, 2025

e. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah merupakan persentase kenaikan atau penurunan jumlah PAD dari satu periode waktu tertentu ke periode berikutnya, yang digunakan untuk mengukur laju perkembangan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. PAD bersumber dari kemampuan daerah itu sendiri dalam menggali potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingkat pertumbuhan PAD menjadi indikator penting untuk menilai dinamika kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pertumbuhan PAD yang positif dan berkelanjutan akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas cakupan pembangunan infrastruktur, serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu,

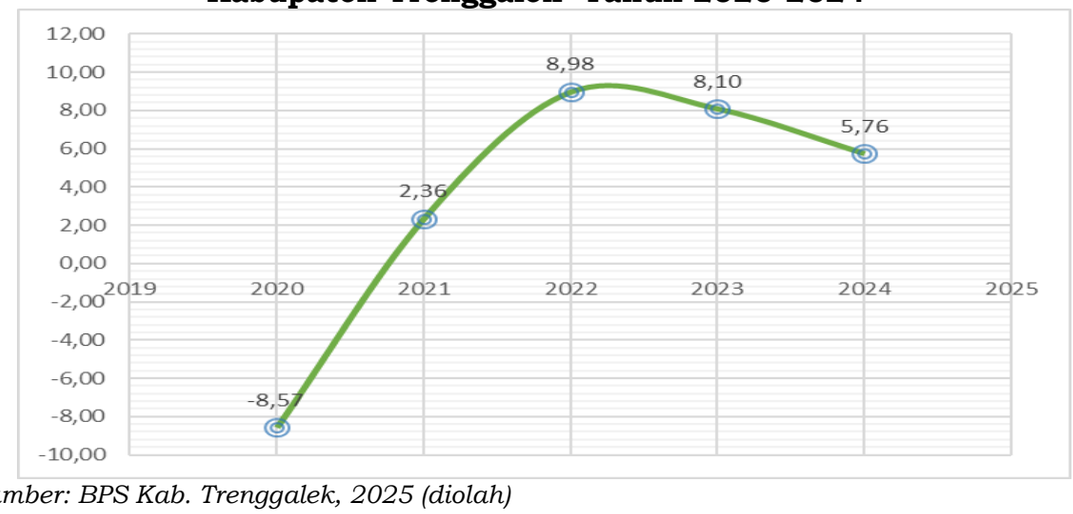
Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 5,26%. Capaian ini menjadi baseline yang merefleksikan kondisi awal kemampuan daerah dalam mengelola dan meningkatkan pendapatannya. Nilai ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam peningkatan penerimaan daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun lokal, serta adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah.

f. Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor pariwisata, khususnya sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman, merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas basis penerimaan daerah melalui aktivitas ekonomi yang berbasis potensi lokal. Pengembangan sektor pariwisata juga berdampak ganda *(multiplier effect)* terhadap sektor-sektor lain, seperti transportasi, perdagangan, dan industri kreatif. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi indikator penting untuk mengukur dinamika aktivitas ekonomi pariwisata di daerah. Kinerja sektor ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wisatawan, daya beli masyarakat, pengembangan destinasi wisata, serta dukungan infrastruktur dan promosi pariwisata yang efektif.

Grafik II.28
Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

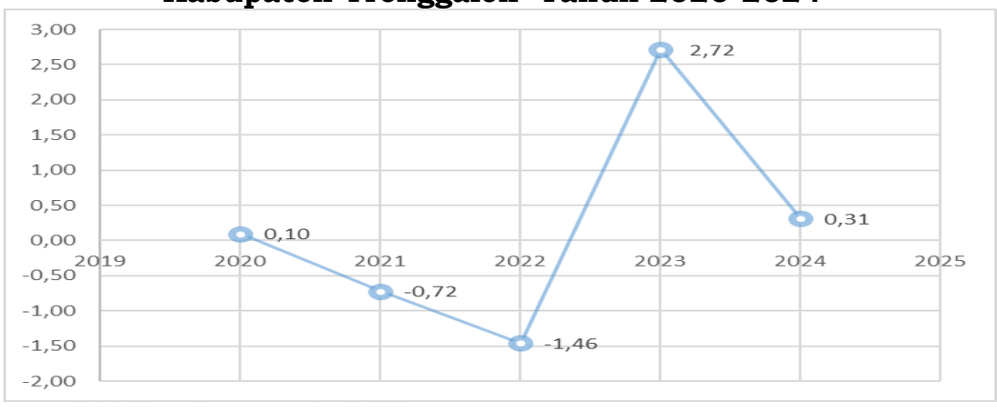
Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum naik signifikan dalam kurun waktu tahun 2020-2021 dan mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 8,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini pulih lebih cepat dibandingkan sektor lainnya pasca pandemi Covid 19. Namun pertumbuhan yang sangat baik ini kemudian mengalami perlambatan meskipun nilainya tetap positif di tahun 2023-2024 hingga mencapai 5,76%. Meskipun lapangan usaha ini hanya menyumbang kontribusi sekitar 2%

terhadap total perekonomian di Trenggalek, namun perannya sangat signifikan karena mendukung sektor pariwisata secara langsung terutama di bidang kuliner. Nilai pertumbuhan PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 menjadi baseline yang mencerminkan tren pertumbuhan positif serta potensi pengembangan yang cukup besar dalam sektor ini. Capaian tersebut juga menunjukkan adanya kebangkitan aktivitas ekonomi pariwisata pasca pandemi, meskipun masih diperlukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing destinasi dan kualitas layanan pariwisata di tingkat lokal.

g. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan tulang punggung perekonomian daerah, terutama bagi wilayah yang didominasi oleh aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Ketiga subsektor ini tidak hanya menjadi penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan sektor ini menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana pemanfaatan potensi agraris daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Pertumbuhan PDRB pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, akses terhadap teknologi pertanian, infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang mendorong produktivitas dan daya saing petani, nelayan, serta pelaku usaha kehutanan rakyat. Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap lahan produksi, sektor ini dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi.

Grafik II.29
Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

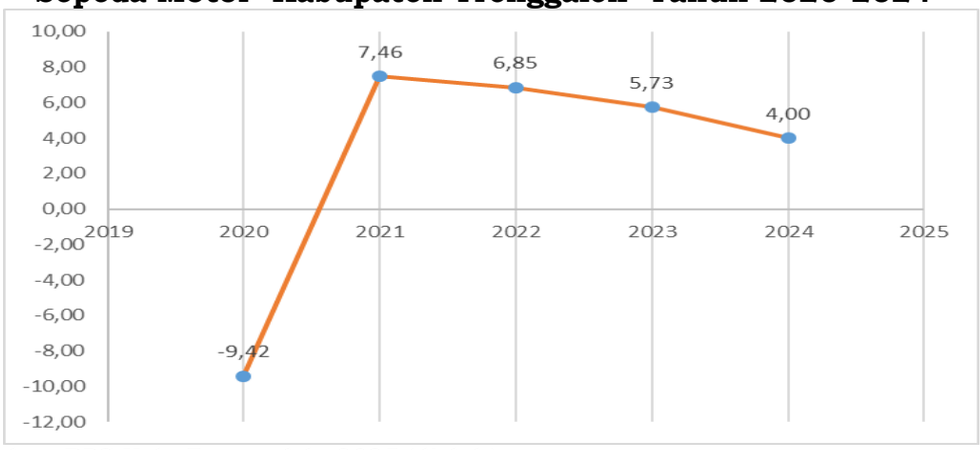
PDRB pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan lapangan usaha penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Kontribusinya selama kurun waktu tahun 2020-2024 mencapai kisaran 24,86%-28,05%. berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Trenggalek yang bekerja di sektor pertanian mencapai 49,29%. Dapat dibayangkan kue ekonomi sebesar kurang lebih 25% diperebutkan oleh hampir separuh penduduk bekerja di Kabupaten Trenggalek, sehingga berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan petani yang relatif rendah.

Pertumbuhan PDRB pertanian, perikanan, dan kehutanan Kabupaten Trenggalek fluktuatif selama 5 tahun terakhir, yang terendah pada tahun 2022, mengalami kontraksi hingga minus 1,46% dan yang tertinggi tercatat sebesar 2,72% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 pertumbuhannya kembali menurun ke angka 0,31%. Nilai ini menjadi baseline awal yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan sektor primer ini. Pertumbuhan yang masih rendah mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal serta adanya tantangan dalam aspek produksi, pemasaran, dan nilai tambah komoditas.

h. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur perekonomian daerah. Sektor ini berperan penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, mendukung aktivitas konsumsi masyarakat, serta menjadi penggerak utama dalam perputaran ekonomi lokal. Selain itu, sektor perdagangan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan tingkat daya beli masyarakat, dinamika konsumsi rumah tangga, serta efisiensi sistem logistik dan distribusi barang. Perdagangan yang berkembang secara sehat dan terorganisir akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, termasuk industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata, karena saling berkaitan dalam rantai pasok daerah.

Grafik II.30
Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Pada kurun waktu tahun 2020-2024, pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Trenggalek tercatat fluktuatif. Setelah mengalami kontraksi hebat pada tahun 2020 hingga pertumbuhannya minus -9,42%, kemudian meningkat pesat pertumbuhannya sebesar 7,46% pada tahun 2021. Tahun berikutnya lapangan usaha ini tetap tumbuh positif namun sedikit melambat dari 6,85% pada tahun 2022 menjadi 4% pada tahun 2024. Kontribusi lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir

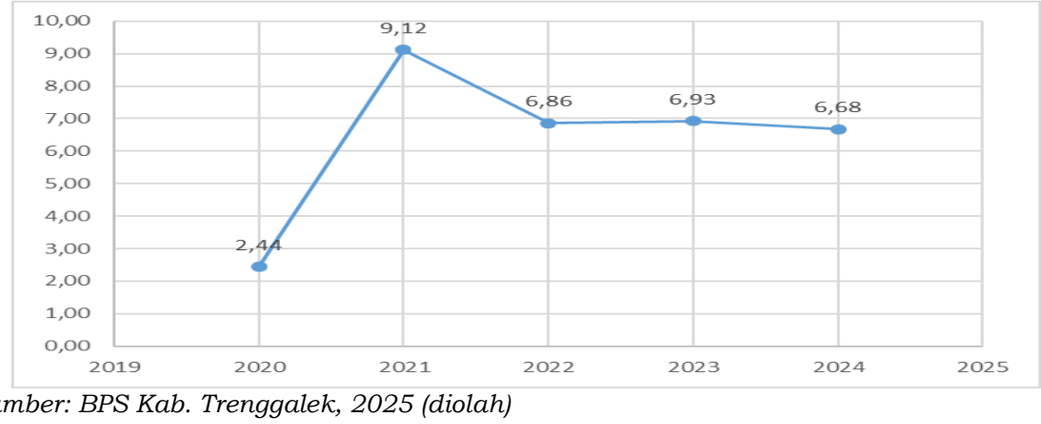
terhadap perekonomian Trenggalek mencapai 14,99%-16,14%, dan merupakan 3 besar kontributor perekonomian daerah.

Pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Trenggalek mencerminkan pergerakan ekonomi masyarakat serta adanya potensi peningkatan aktivitas perdagangan dan pemulihan ekonomi daerah. Capaian ini juga menjadi indikasi bahwa sektor perdagangan masih memiliki ruang pertumbuhan yang luas melalui penguatan struktur usaha dan peningkatan kualitas pelayanan.

i. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Industri pengolahan memainkan peran strategis dalam mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi, yang dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal serta memperluas akses pasar domestik maupun ekspor. Selain sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga memiliki kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku lokal, infrastruktur pendukung, iklim investasi yang kondusif, serta kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Keberhasilan pembangunan sektor ini akan berdampak luas terhadap sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan jasa, mengingat posisi industri sebagai penghubung dalam rantai pasok (value chain) ekonomi daerah.

Grafik II.31
Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 2,44% yang mencerminkan kinerja yang relatif rendah karena dampak dari pandemi Covid19. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 9,12% yang menandakan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas industri. Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan mengalami perlambatan menjadi 6,86**%** meskipun tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2023, pertumbuhan industri pengolahan kembali meningkat dengan capaian 6,93%. Sementara itu, pada

tahun 2024 laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 6,68%, namun tetap mencerminkan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Secara umum, tren pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Trenggalek dalam periode 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang cukup baik dengan lonjakan pertumbuhan pada 2021, diikuti dengan kecenderungan stabil pada tahun-tahun berikutnya meskipun dengan sedikit perlambatan. Hal ini dapat menunjukkan potensi dan geliat positif sektor industri dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ini perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi proses, serta penguatan akses terhadap pasar dan teknologi.

j. Nilai Ekspor Non Migas

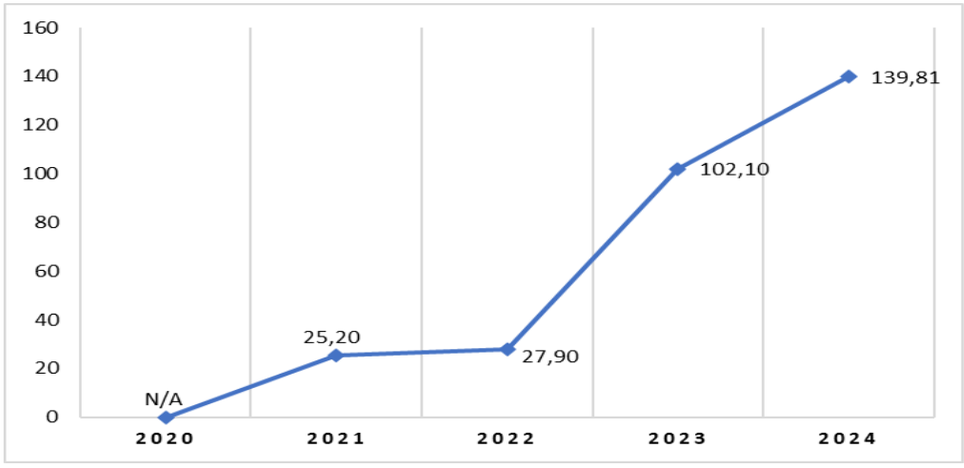
Ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan pasar bagi produk lokal. Khususnya ekspor non migas, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi sektor-sektor unggulan berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan, kehutanan, kerajinan, dan industri pengolahan. Nilai ekspor non migas tidak hanya menunjukkan daya saing produk daerah di pasar internasional, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam membangun ekosistem produksi dan distribusi yang efisien, inovatif, serta memenuhi standar mutu global. Peningkatan ekspor non migas juga memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti logistik, transportasi, dan jasa keuangan. Pada tahun 2024, nilai ekspor non migas Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar Rp139,81 miliar, yang menjadi baseline awal dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Nilai tersebut merefleksikan kontribusi berbagai komoditas unggulan daerah yang telah mampu menembus pasar luar negeri, meskipun masih terdapat potensi besar yang belum tergarap secara optimal.

Tabel II.51
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024 (*Milyar Rupiah*)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Rupiah)	N/A	25,2	27,9	102,10	139,81

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025

Grafik II.32
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025

Nilai ekspor non migas di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai ekspor non migas tercatat sebesar Rp25,20 milyar. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan meskipun relatif moderat menjadi Rp27,90 milyar. Selanjutnya, lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2023 dengan nilai ekspor non migas mencapai Rp102,10 milyar yang mencerminkan adanya peningkatan daya saing dan kinerja ekspor daerah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp139,81 milyar. Secara keseluruhan, nilai ekspor non migas di Kabupaten Trenggalek memperlihatkan pertumbuhan yang pesat terutama sejak tahun 2023 yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Trenggalek.

k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan merupakan indikator penting untuk melihat potensi tenaga kerja perempuan dan dampaknya pada pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah persentase jumlah perempuan dalam usia kerja yang aktif dalam angkatan kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk usia kerja perempuan. TPAK Perempuan berfokus pada kelompok perempuan, mengukur seberapa besar perempuan usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Tahun 2020-2024 nilai TPAK Perempuan Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif, tahun 2020 sebagai

mencapai 64 persen mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 senilai -1,15 persen.

Tabel II.52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

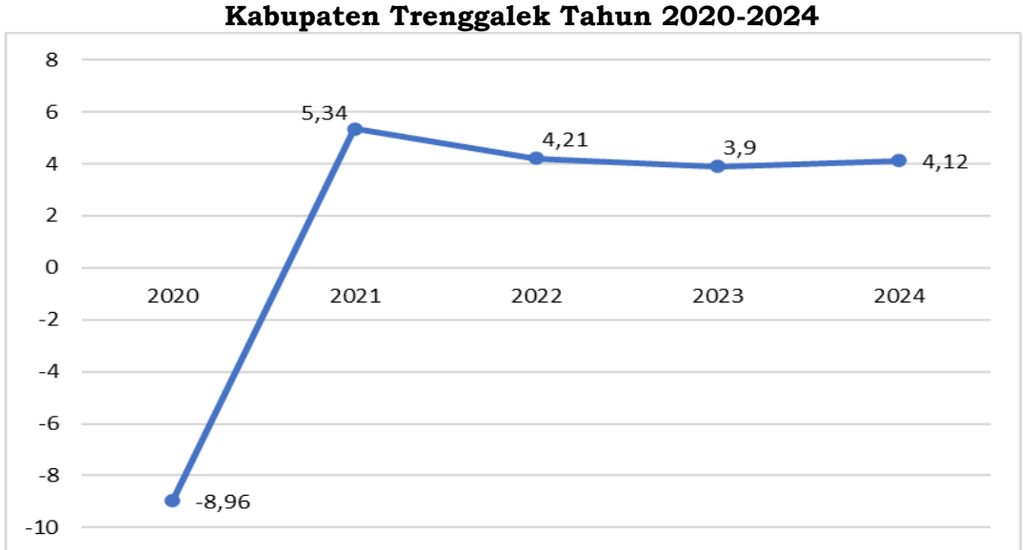
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	64,26	59,32	58,17	72,45	70,27

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2025

l. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital *Output Ratio* (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”. ICOR Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar -8,69 dan naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 5,34. Pada Tahun 2022 ICOR turun menjadi 4,21 dan turun lagi menjadi 3,9 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 ICOR naik lagi menjadi 4,12.

Grafik II.33
Incremental *Capital Output Rasio* (ICOR)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2025 (PDRB Kab. Trenggalek menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025)

m. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin

dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

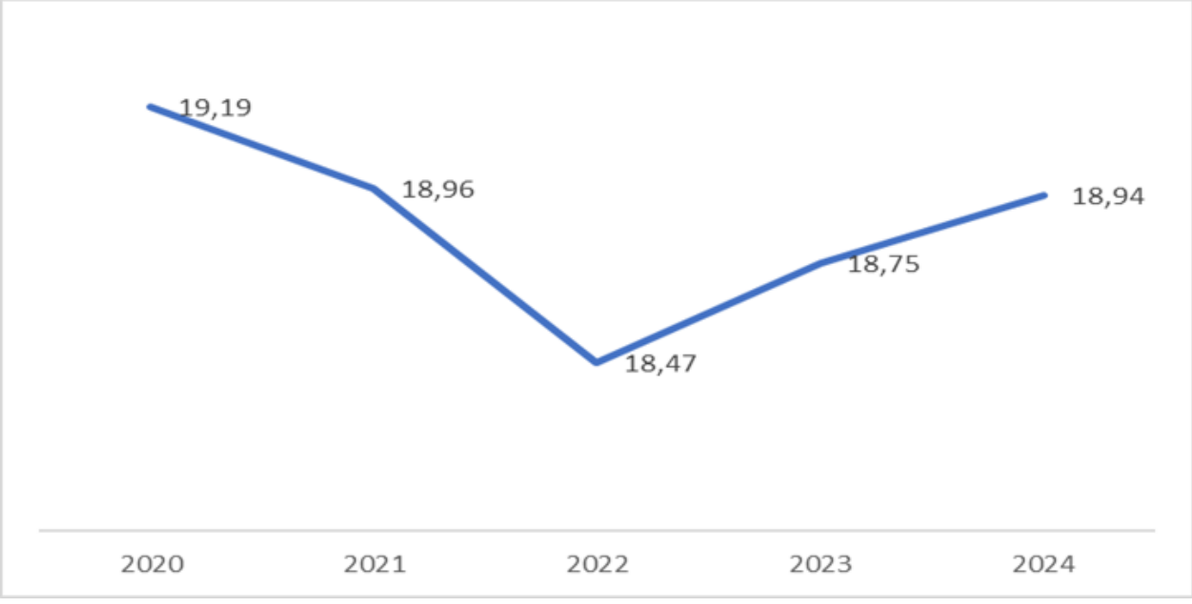
Pembentukan modal tetap bruto digambarkan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli *(financial leasing),* serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dihitung dengan membandingkan total PMTB ADHK dengan total PDRB ADHK tahun berkenaan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 capaian PMTB Kabupaten Trenggalek sebesar 19,19% kemudian turun menjadi Rp. 18,96% pada tahun 2021 dan 18,47% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 PMTB mulai mengalami kenaikan menjadi 18,75 dan 18,94 pada tahun 2024.

Fluktuasi PMTB Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2024 digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.34
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Trenggalek 2020-2024
(% PDRB)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2025

Pertumbuhan PMTB yang positif disertai dengan tingkat efisiensi investasi yang tercermin dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang rendah dan ideal akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

n. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu

Koefisien Variasi (KV) Harga Antar Waktu adalah ukuran dispersi relatif (penyebaran) harga dari waktu ke waktu, yang dihitung dengan membandingkan simpangan baku harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Koefisien variasi harga antar waktu mengukur seberapa besar fluktuasi atau ketidakstabilan harga suatu barang dalam periode waktu tertentu, seperti antar bulan atau antar tahun, dengan membandingkan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga dalam bentuk persentase. Nilai koefisien variasi yang tinggi menunjukkan harga yang sangat tidak stabil, sedangkan nilai yang rendah menandakan harga yang cenderung stabil. Koefisien Variasi (KV) Harga Antar Waktu di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.53
Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kabupaten Trenggalek 2020-2024

No	Tahun	KVHAW (%)
1	2020	12,64
2	2021	9,87
3	2022	11,83
4	2023	11,89
5	2024	11,48

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

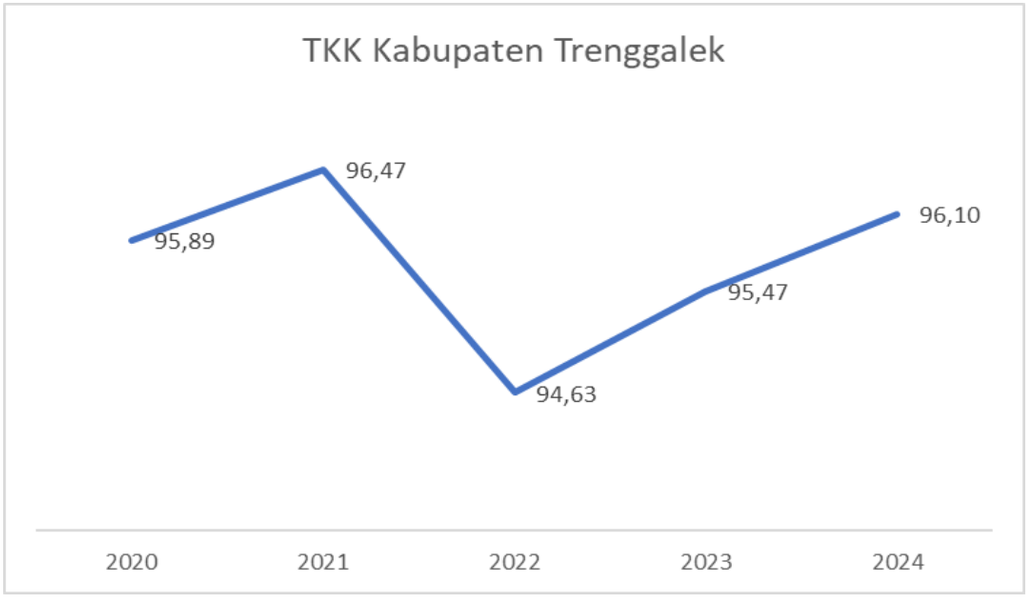
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan variasi harga di Kabupaten Trenggalek cenderung stabil dan tidak ada fluktuasi yang berarti. Pada tahun 2020 nilai koefisien variasi harga antar waktu 12,64%. Pada tahun 2021 juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan nilai 9,87%. Kemudian pada tahun 2023-2025 koefisien harga antar waktu naik dan stabil di kisaran angka 11% . Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pasca pandemi Covid 19, selain itu koefisien variasi harga antar waktu juga berkorelasi dengan tingkat inflasi di kabupaten Trenggalek yang naik cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 5,8%.

o. Tingkat Kesempatan Kerja

Semakin tinggi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menunjukkan kesempatan kerja semakin tinggi. Tahun 2021 merupakan tingkat kesempatan kerja tertinggi sepanjang periode 2020-2024 yaitu 96,47%. Tahun 2021 merupakan tahap pemulihan awal setelah perlambatan akibat pandemi COVID-19, dengan aktivitas ekonomi yang mulai kembali berjalan. Dari struktur PDRB Lapangan Usaha, di Kabupaten Trenggalek yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan turut membuat TKK pada tahun 2021 meningkat. Hal ini dikarenakan sektor ini lebih tahan dibandingkan dengan sektor lain.

Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 94,63 persen, yang menunjukkan melemahnya daya serap pasar kerja terhadap angkatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2023 TKK kembali meningkat menjadi 95,47 % dan berlanjut naik pada tahun 2024 sebesar 96,10%. Kenaikan ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu mendorong penciptaan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Meskipun mengalami pemulihan kondisi ketenagakerjaan serta membaiknya serapan tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek, namun TKK pada tahun 2024 masih di bawah TKK pada tahun 2021.

Grafik II.35
Tingkat Kesempatan Kerja Kab. Trenggalek Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Tata kelola ini didasarkan pada sistem pertukaran informasi yang terbuka dan transparan, serta memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan mengutamakan integritas dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika perubahan, tata kelola ini menjadi landasan penting untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

a. Indeks Reformasi Hukum

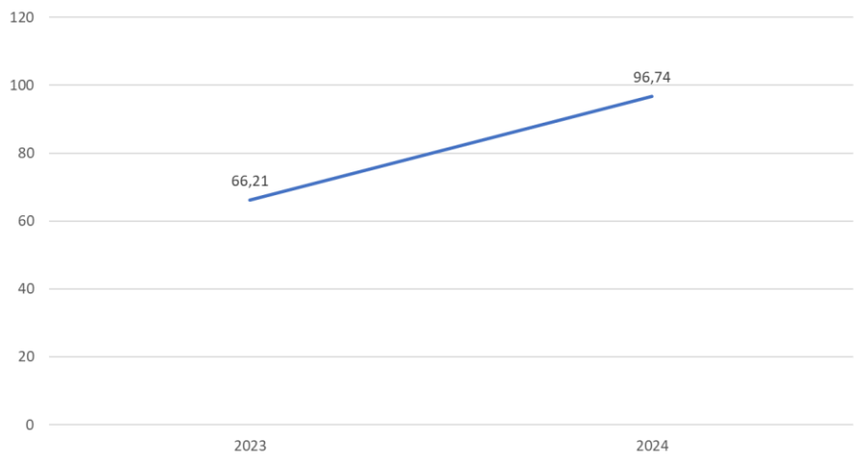
Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan reformasi hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan birokrasi yang kapabel dan profesional sesuai dengan sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga bertujuan memberikan

saran perbaikan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas reformasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Melalui IRH, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, seperti harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam penyusunan peraturan, serta penataan sistem dokumentasi regulasi yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, IRH menjadi salah satu tolok ukur penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 memperoleh skor sebesar 66,21 dengan kategori B (Cukup Baik) berdasarkan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Skor tersebut terdiri dari nilai awal sebesar 51,05 yang merupakan akumulasi dari empat variabel utama, yaitu tingkat koordinasi untuk harmonisasi regulasi dengan nilai 13,9; kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) dengan nilai 21,2; kualitas re-regulasi atau deregulasi berdasarkan hasil reviu peraturan perundang-undangan dengan nilai 4,7; serta penataan database peraturan perundang-undangan dengan nilai 11,25. Nilai apresiasi sebesar 15,16 turut menambah capaian IRH tersebut. Meski sudah menunjukkan upaya positif, hasil ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan terutama pada kualitas substansi regulasi dan tata kelola dokumentasi.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berhasil meningkatkan skor IRH secara signifikan menjadi 96,74 dengan kategori AA (Istimewa). Peningkatan ini didukung oleh capaian yang jauh lebih baik pada keempat variabel utama, yaitu tingkat koordinasi yang naik menjadi 23,6; kompetensi ASN sebagai perancang regulasi meningkat menjadi 25; kualitas re-regulasi atau deregulasi melonjak tajam menjadi 20,1; serta penataan database peraturan yang membaik menjadi 15. Perbaikan ini menunjukkan kemajuan yang substansial dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sistem dokumentasi regulasi yang lebih rapi dan terintegrasi.

Grafik II.36
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2024



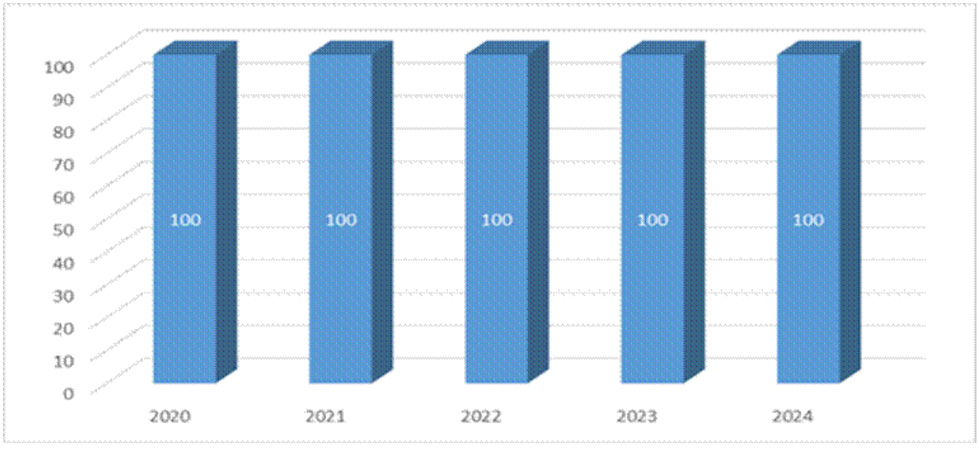
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025

Capaian IRH yang tinggi pada tahun 2024 ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendorong reformasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak hanya sesuai kebutuhan daerah, tetapi juga selaras dengan regulasi di tingkat nasional dan provinsi. Dengan peningkatan kualitas koordinasi antarinstansi, penguatan kompetensi ASN, serta penataan database yang lebih baik, Kabupaten Trenggalek semakin siap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Persentase Penyelesaian Konflik

Konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat merupakan salah satu penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat dan terkikisnya kearifan lokal. Penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Penyelesaian konflik di Kabupaten Trenggalek dalam 5 tahun terakhir mencapai 100%. Artinya konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek selalu dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Berikut perkembangan persentase penyelesaian konflik tahun 2020-2024 :

Grafik II.37
Persentase Penyelesaian Konflik (%) Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek, 2025

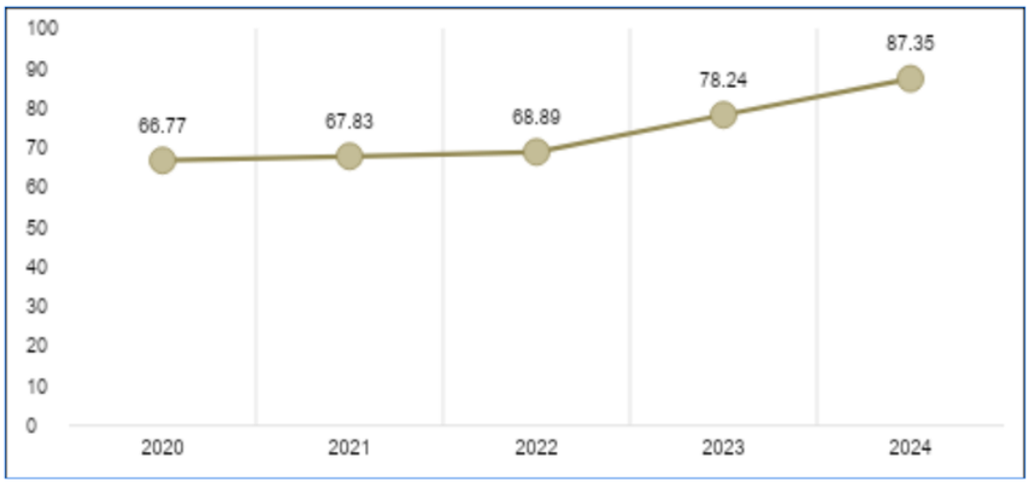
c. Indeks Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi menjadikan birokrasi yang cepat, murah, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi berperan sebagai mesin pembangunan yang krusial dalam memastikan seluruh agenda dan program pembangunan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, modernisasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika global yang terus berubah.

Momentum penting dalam reformasi birokrasi terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menandai upaya modernisasi sistem birokrasi di Indonesia. UU ASN menekankan penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di

sektor pemerintahan dengan visi mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan SDM diarahkan untuk menggali potensi yang ada sehingga ASN dapat menjadi aset strategis atau modal manusia (human capital) yang mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Grafik II.38
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPANRB RI, 2025

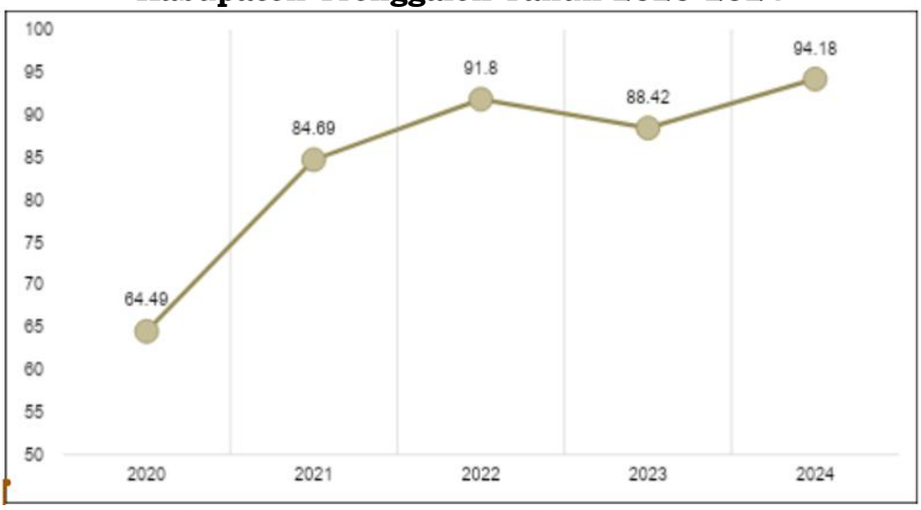
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan, termasuk dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis untuk meningkatkan independensi dan netralitas ASN, kompetensi, produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, serta kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara juga menjadi fokus utama agar birokrasi dapat berjalan transparan dan bertanggung jawab. Reformasi birokrasi ini tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga dijadikan indikator penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Trenggalek.

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2020, IRB tercatat sebesar 66,77 dengan kategori B, naik menjadi 67,83 pada 2021, dan terus meningkat menjadi 68,89 pada 2022. Lonjakan signifikan terjadi pada 2023 dengan capaian 78,24, dan semakin meningkat menjadi 87,35 (A-) pada 2024. Meskipun tren ini menunjukkan kemajuan positif, tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara berkelanjutan agar dapat benar-benar mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

d. *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP)

Upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi salah satunya dengan adanya *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP). *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) merupakan sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. MCSP merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yaitu MCP (Monitoring Center for Prevention), dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pelaporan dan tata kelola yang baik yang meliputi 8 (delapan) area intervensi yaitu area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang dan jasa, area pelayanan publik, area manajemen ASN, area pengelolaan barang milik daerah, area optimalisasi penerimaan daerah, dan area penguatan APIP.

Grafik II.39
Hasil Penilaian *Monitoring Control for Prevention* (MCP)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2025

Hasil penilaian MCP Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 sebesar 64,49. Pada tahun 2021, nilai tersebut meningkat menjadi 84,69, kemudian pada tahun 2022 naik signifikan menjadi 91,80. Namun, pada tahun 2023, MCP mengalami penurunan menjadi 88,42, dan pada tahun 2024 naik kembali menjadi 94,18.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat harus diwujudkan. Fokus pelayanan umum bersandar pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan publik ditekankan pada aspek berikut:

1. **Struktural**. Perbaikan struktural pemerintah daerah harus dilakukan dari tingkat *top* manajemen hingga *lower* manajemen.
2. **Operasional**. Perangkat Daerah harus mewujudkan kebutuhan masyarakat apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara

langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan.

3. **Strategi pelayanan**. Merupakan cara yang harus ditentukan Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud. Terdapat beberapa strategi dalam mengembangkan pelayanan prima yang meliputi:

Penyusunan Standart Pelayanan

Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembukuan pelayanan yang baik, serta merupakan tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengelolaan Pengaduan

Hal ini dimaksudkan agar adanya partisipasi dari pelanggan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi.

e. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif.

Tujuan dari IKAD adalah sebagai berikut:

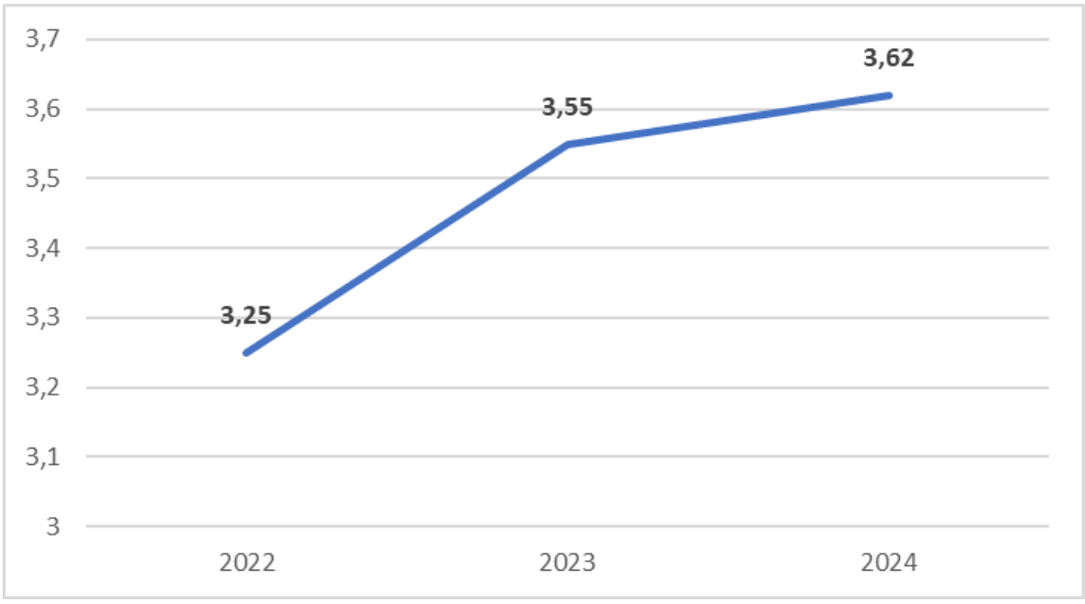
1. Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;
2. Memperkuat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan memberi informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;
3. Melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), memperluas cakupan, serta memberikan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam.

Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply

dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai IKAD berkisar antara 0-10. Nilai ini menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.

Penilaian IKAD berasal dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun capaian IKAD Kabupaten Trenggalek dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik II.40
Realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah Kab. Trenggalek
Tahun 2022 - 2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2025

f. Indeks Berakhlak

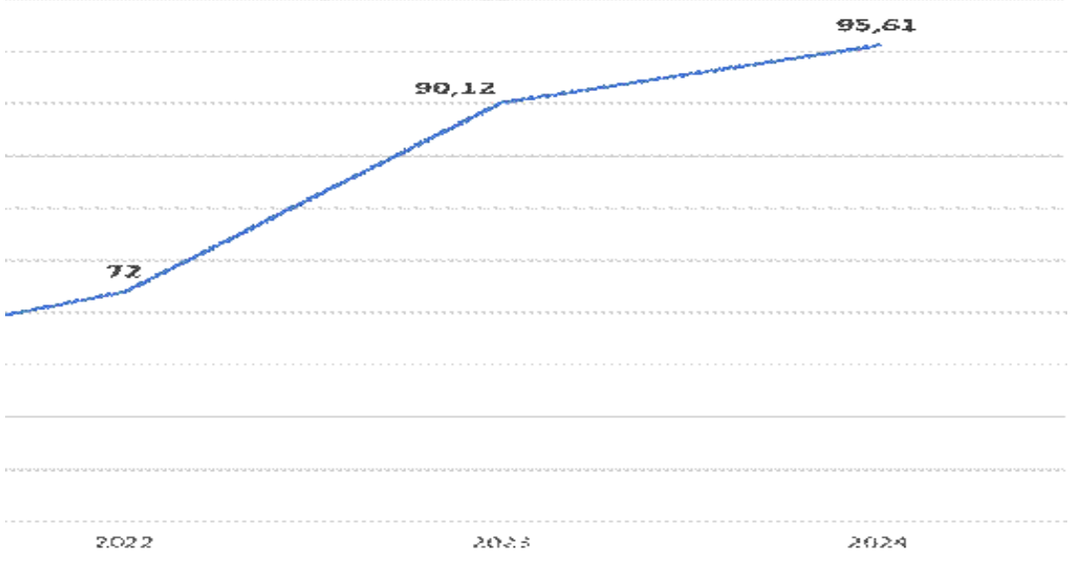
Indeks berakhlak merupakan alat ukur untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dasar ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berakhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif pada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tingkat kesehatan budaya organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Indeks ini mengukur seberapa baik ASN menerapkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku kerja sehari-hari dan sejauh mana nilai-nilai tersebut selaras dengan budaya organisasi. Indeks ini digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. pada tahun 2024, nilai Indeks Berakhlak Kabupaten Trenggalek sebesar 78,9.

g. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Implementasi NSPK adalah pelaksanaan

norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah angka yang menunjukkan kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan NSPK Manajemen ASN pada instansi pemerintah. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dari tahun 2021-2024 memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2021 sebesar 65, meningkat menjadi 72 pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 90,12 pada tahun 2023 dan 95,61 pada tahun 2024.

Grafik II.41
Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

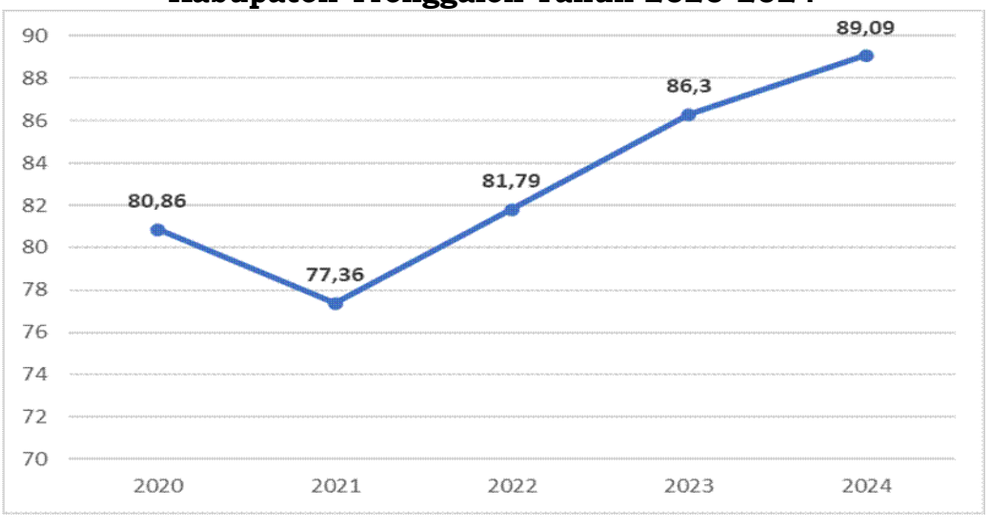


Sumber : BKN RI, 2024

h. Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan

Indeks Sinergitas Kecamatan adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Indeks ini berfokus pada sejauh mana kecamatan mampu bersinergi dan berkoordinasi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di wilayahnya. Indeks Sinergitas Kecamatan diukur berdasarkan Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari 14 Kecamatan.

Grafik II.42
Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : Bagian Adm Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, 2025

i. Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. Adapun nilai Indeks Zakat Nasional masih belum tersedia dan akan dilakukan pengukuran pada saat RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2026 dilaksanakan.

Tabel II.54
Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,54	0,73	0,73	0,62	0,63

Sumber : Baznas Kab. Trenggalek, 2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan pilar penting dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadaban. Pembangunan hukum diarahkan untuk menegakkan supremasi hukum yang menjunjung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, pembangunan demokrasi difokuskan pada penguatan demokrasi substansial yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar merepresentasikan aspirasi dan amanat rakyat. Dalam kerangka ini, penguatan sistem hukum dan demokrasi berjalan seiring dengan upaya

membangun sistem keamanan nasional yang tangguh guna menjaga stabilitas dan keutuhan negara secara berkelanjutan.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan satuan TNI. Upaya penertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Maka, untuk meminimalisir terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, pemerintah daerah memprogramkan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat misalnya dengan melakukan operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisi).

Upaya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Indeks ini merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana dengan nilai komposit yang diukur:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dengan aspek penilaian yang meliputi strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda, strategi dalam mencapai kineria Satpol PP dalam penyelenggaraan Tibumtranmas;
2. Indeks Penyelenggaran Manajemen Satlinmas dengan aspek penilaian yang meliputi pelaksanaan fungsi Satlinmas, kebijakan Satlinmas, inovasi peningkatan kapasitas Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas, sarana dan prasarana Satlinmas;
3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian SPM, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM terferivikasi dan pemberdayaan masyarakat,
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, SDM, kebijakan, pendanaan teknis operasional dan kepemimpinan.

Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI mulai Tahun 2024. Hasil pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah 58,61.

Tabel II.55
Indikator Trantibum, Kebakaran dan Aksi HAM di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-	-	-	-	58,61

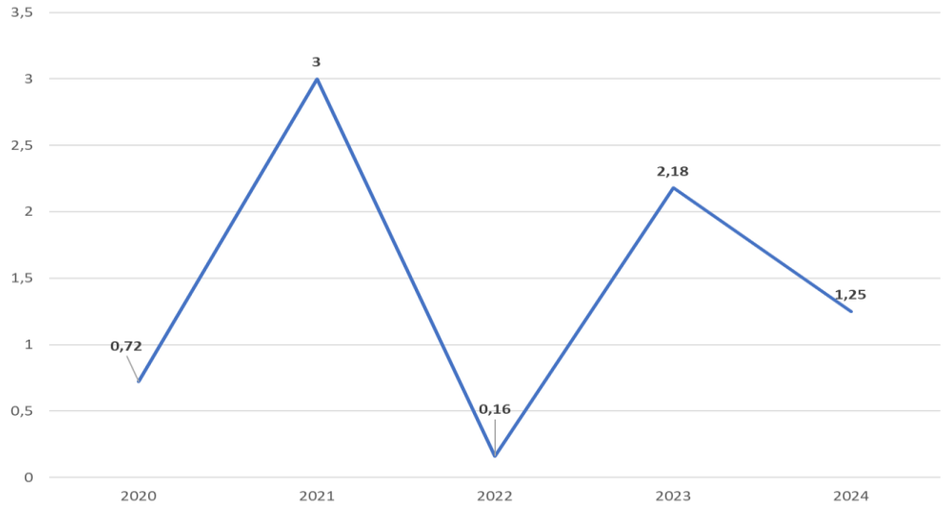
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengendalian kebakaran dan penyelamatan	100%	100%	77,42%	65,06%	93%
Persentase Capaian Aksi HAM	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2025
Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek, 2025

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan capaian aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan pencapaian yang baik, dengan masing-masing mencapai 100% setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Angka ini mencerminkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan serta melaksanakan kebijakan terkait hak asasi manusia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara efektif, meskipun tantangan di lapangan tetap ada.

Pencapaian 100% dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan capaian aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Trenggalek mencerminkan komitmen terhadap prinsip hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial. Pembangunan hukum di daerah ini menegakkan supremasi hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat, serta berlandaskan pada hak asasi manusia. Di sisi lain, penguatan demokrasi substansial memastikan pemerintahan yang merepresentasikan aspirasi rakyat, sementara sistem hukum dan demokrasi yang kuat juga mendukung terciptanya keamanan nasional yang stabil dan menjaga keutuhan negara.

Grafik II.43
Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Trenggalek, 2025

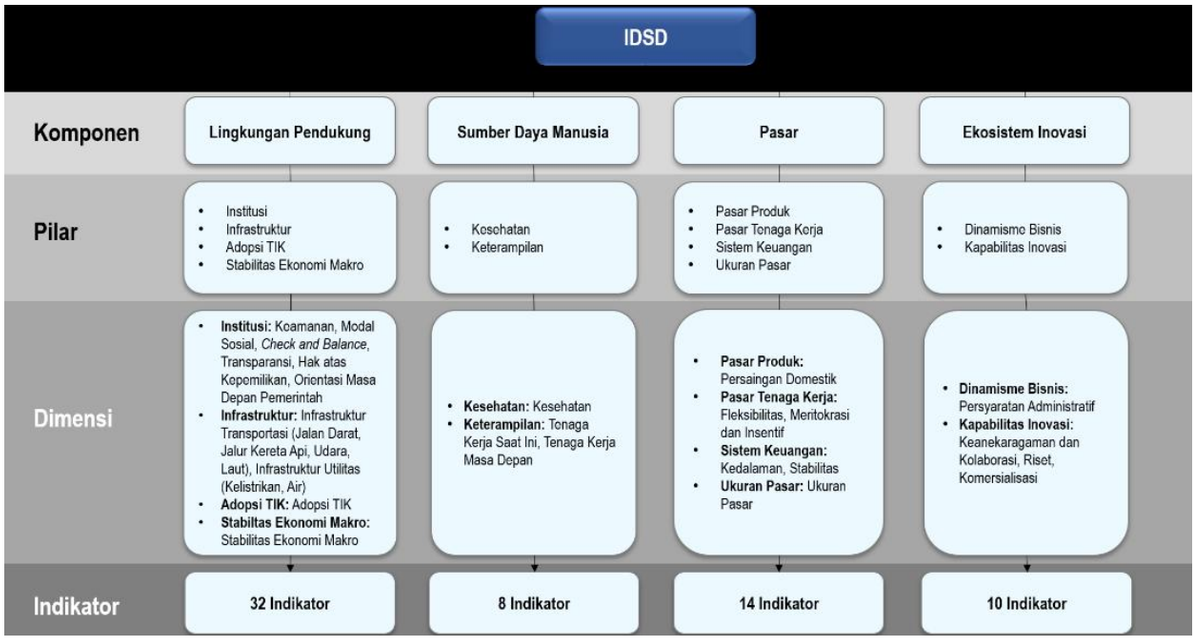
Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu serta segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma-norma sosial dan agama. Tindak

kejahatan/kriminal dapat dipicu adanya kesenjangan sosial, tekanan mental dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat yang mengikuti era modern, teknologi yang disalahgunakan dan meninggalkan budaya yang sudah ada yaitu budaya adat ketimuran.

2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks daya saing daerah terdiri dari 4 komponen, 12 pilar, 12 dimensi dan 51 indikator. Berkaitan dengan riset dan inovasi, Pilar Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

Gambar II.18
Kerangka Indeks Daya Saing Daerah



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir, meningkat dari 2,84 pada 2022 menjadi 3,13 di 2023, dan mencapai 3,40 di 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya nyata dalam memperkuat daya saing daerah, terutama pada pilar-pilar seperti

Adopsi TIK (yang naik dari 3,2 menjadi 4,51) dan Infrastruktur (dari 2,04 menjadi 3,12). Pilar Institusi tetap menjadi kekuatan utama dengan nilai stabil tinggi, menunjukkan tata kelola pemerintahan yang relatif kuat. Namun, tantangan utama masih terlihat pada Pilar Sistem Keuangan dan Pasar Tenaga Kerja, di mana skor tetap rendah, bahkan mengalami penurunan, yang berpotensi menghambat kelancaran investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Tabel II.56
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2024

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	4,58	4,56	4,88
Pilar Infrastruktur	2,04	2,38	3,12
Pilar Adopsi TIK	3,20	4,26	4,51
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,17	2,82	2,96
Pilar Kesehatan	4,15	4,17	4,14
Pilar Keterampilan	2,94	3,24	3,73
Pilar Pasar Produk	2,96	2,89	3,35
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,50	2,58	2,35
Pilar Sistem Keuangan	2,64	1,41	1,57
Pilar Ukuran Pasar	0,85	4,24	4,26
Pilar Dinamisme Bisnis	5,0	3,23	3,55
Pilar Kapabilitas Inovasi	1,04	1,78	2,35
Indeks Daya Saing Daerah	**2,84**	**3,13**	**3,40**

Sumber: *BRIN, 2025*

Peningkatan IDSD Trenggalek berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pilar Adopsi TIK dan Dinamisme Bisnis yang menguat menjadi motor penting dalam menarik investasi baru dan mendorong inovasi lokal. Namun, dengan masih lemahnya sektor keuangan dan pasar tenaga kerja, ke depan fokus pembangunan perlu diarahkan pada reformasi sistem keuangan lokal, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja secara terukur. Pendekatan fokus pada pilar terlemah ini penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Trenggalek.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana penjabaran berikut:

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menjadi penentu dimensi pengetahuan Indeks Pembangunan Manusia secara konsisten juga mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah adalah ukuran yang menunjukkan berapa lama (dalam tahun) rata-rata penduduk telah menghabiskan waktu untuk bersekolah. Secara khusus, ini mengacu pada jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang dalam sistem pendidikan formal. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan kemajuan pembangunan sistem pendidikan di suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS, capaian indikator pendidikan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan dari 7,55 tahun pada 2020 menjadi 7,92 tahun di 2024. Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,35 tahun pada 2020 menjadi 12,63 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan, serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Namun capaian RLS menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Trenggalek hanya mengikuti pendidikan selama 7 hingga 8 tahun atau setara dengan kelas 2 sampai 3 SMP. Sehingga penduduk di Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya memenuhi program wajib belajar 12 tahun. Padahal harapan terhadap kesempatan belajar yang dirasakan oleh penduduk Trenggalek berusia 7 tahun ke atas mencapai 12,63 tahun (setara dengan jenjang pendidikan SMA/sederajat). Selisih antara HLS dan RLS menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan, sehingga diperlukan strategi lanjutan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah lanjutan dan mencegah putus sekolah.

Tabel II.57
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	7,55	7,56	7,89	7,90	7,92
Harapan Lama Sekolah	12,35	12,47	12,50	12,62	12,63

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025

Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan. Tercatat sebanyak 3.386 anak tidak sekolah pada tahun 2023, dan jumlah ini meningkat menjadi 4.917 anak pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, serta potensi pernikahan dini dan pekerja anak. Upaya intervensi terpadu dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan untuk menekan angka anak tidak sekolah dan memastikan hak atas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak di Trenggalek.

Skor Literasi dan Skor Numerasi

Skor numerasi adalah ukuran kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks. Ini melibatkan pemahaman konsep, prosedur, dan fakta matematika, serta kemampuan menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, dan diagram, sedangkan Skor literasi adalah ukuran kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencakup kemampuan untuk memahami informasi tertulis, menganalisisnya, dan menerapkannya dalam berbagai konteks. Kemampuan literasi dan numerasi penting bagi murid di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai dasar pengetahuan, mengembangkan keterampilan berpikir logis, kritis dan analitis, serta bekal daya saing di era globalisasi dan teknologi. Kemampuan literasi adalah kemampuan murid memahami dan memanfaatkan berbagai jenis bacaan untuk memecahkan masalah, mengembangkan diri, dan berkontribusi di masyarakat. Sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan murid menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kompetensi minimum ini mencakup kemampuan untuk berpikir logis, bernalar menggunakan pengetahuan matematika, dan menganalisis informasi dalam berbagai bentuk untuk memecahkan masalah praktis. Data skor literasi dan numerasi berasal dari hasil Asesmen Nasional (AN) melalui alat ukur penilaian Asesmen Kompetensi Minimum yang dipublikasi dalam Rapor Pendidikan. Berikut capaian skor literasi dan numerasi Kabupaten Trenggalek:

Tabel II.58
Skor Literasi dan Numerasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024
Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,68	1,88	85,73	70,07
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,52	1,58	69,75	60,55
Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,89	1,91	77,63	76,72
Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,7	1,74	54,92	67,17
Skor Literasi	Nilai	1,79	1,90	81,68	73,40
Skor Numerasi	Nilai	1,61	1,66	62,34	63,86
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	%	-	50,00	54,84	89,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabu. Trenggalek, 2025
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2025

Skor Literasi di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 8,28 angka. Pada tahun 2023 skor literasi Kabupaten Trenggalek sebesar 81,68, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 73,40. Penurunan ini merupakan hasil dari penurunan rata-rata kemampuan Literasi baik pada jenjang SD maupun SMP. Rata-rata kemampuan Literasi SD mengalami penurunan signifikan sebesar 15,66 angka. Pada tahun 2023, Rata-rata kemampuan Literasi SD sebesar 85,73 menurun menjadi 70,07 pada tahun 2024. Rata-rata kemampuan Literasi SMP sebesar 77,63 pada tahun 2023 menjadi 76,72 pada tahun 2024 atau menurun sebesar 0,91 angka

Sementara itu Skor Numerasi Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 skor Numerasi Kabupaten sebesar 63,86. Angka ini meningkat sebesar 1,52 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 62,34. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan Rata-rata kemampuan Numerasi SMP sebesar 12,25 angka. Pada tahun 2023 Rata-rata kemampuan Numerasi SMP sebesar 54,92 yang meningkat menjadi 67,17 pada tahun 2024. Meskipun demikian, Rata-rata kemampuan Numerasi SD justru mengalami penurunan. Rata-rata kemampuan Numerasi SD menurun sebesar 9,2 angka dari 69,75 di tahun 2023 menjadi 60,55 di tahun 2024.

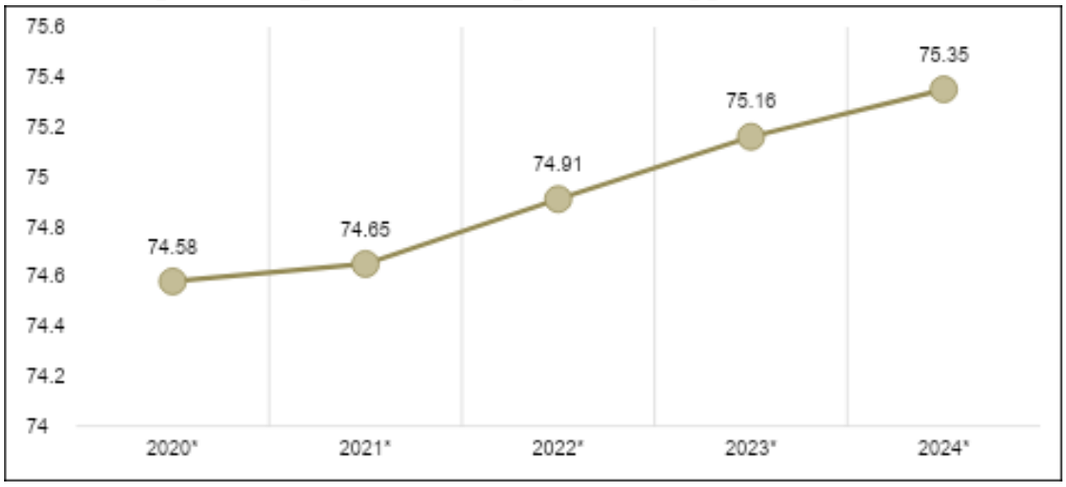
Pada tingkat satuan pendidikan, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi meningkat setiap tahunnya. Indikator ini menghasilkan gambaran satuan pendidikan yang memiliki hasil AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) di atas atau mencapai batas kompetensi minimum yang ditetapkan. AKM sendiri mengukur kemampuan mendasar peserta didik dalam literasi membaca dan numerasi, serta survei karakter dan lingkungan belajar. Capaian Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi tahun 2022 sebesar 50%, meningkat menjadi 54,84% pada tahun 2023 dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 89,84%.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa pola tingkat kematian pada saat itu tetap berlaku sepanjang hidupnya. Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan peningkatan konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 74,58 tahun, kemudian meningkat menjadi 74,65 tahun pada 2021, 74,91 tahun di 2022, 75,16 tahun di 2023, dan mencapai 75,35 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang semakin baik, serta peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat. Secara keseluruhan, tren ini menjadi indikator positif terhadap kualitas hidup masyarakat Trenggalek yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Grafik II.44
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

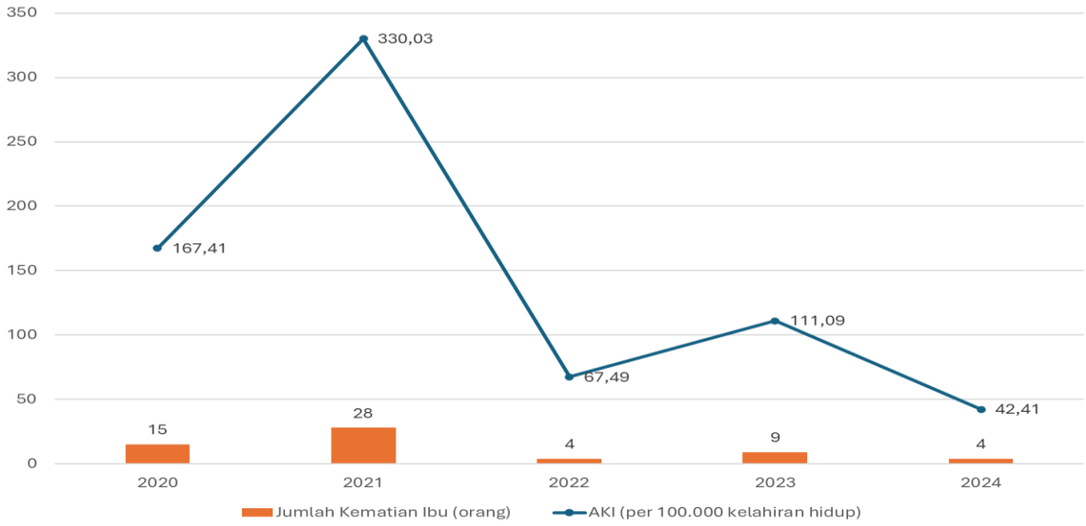


Sumber: BPS Prov. Jawa Timur, 2025
**) Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan saat hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan ibu dan akses layanan kesehatan yang memadai. AKI memberikan gambaran tentang kesehatan ibu dan anak, serta kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Grafik II.45
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

Peningkatan AKI menunjukkan adanya masalah dalam pelayanan kesehatan ibu, termasuk akses dan kualitasnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sesuai dengan harapan dari 111,09 per 100.000 Kelahiran hidup menjadi 42,41 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu 9 orang tahun 2023 menjadi 4 orang pada tahun 2024.

Prevalensi Stunting

Upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting menjadi salah satu program prioritas nasional, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai kebijakan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, untuk memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan secara terintegrasi. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan aksi konvergensi, Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk menurunkan angka stunting sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Prevalensi Stunting adalah Persentase balita (anak usia 0–59 bulan) yang mengalami tumbuh pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut umur, dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Berdasarkan data yang dihimpun dari dua sumber utama, yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi balita stunting di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Prevalensi stunting di Kabupaten Trenggalek dari hasil SSGBI Tahun 2019 tercatat 26,8% menurun pada SSGI Tahun 2021 menjadi 18,1%. Untuk Tahun 2020 karena pandemi COVID pada SSGI tidak dilakukan pengukuran status gizi balita. Pada SSGI Tahun 2022, prevalensi stunting mengalami peningkatan menjadi 19,5 berikutnya menurun menjadi 15,8% pada SKI Tahun 2023 dan menunjukkan tren penurunan sesuai harapan pada SSGI tahun 2024 yaitu 6,7%. Sedangkan tren prevalensi stunting dari bulan Penimbangan yang dilaporkan melalui E-PPGBM sejak tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 13,4% di tahun 2019, 11,4 di tahun 2020, 9,7% di tahun 2021, 7,9% di tahun 2022, 6,6% di tahun 2023 dan 5,8% di tahun 2024

Penurunan prevalensi ini mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat di seluruh perangkat daerah dan lintas sektor di Kabupaten Trenggalek. Berbagai intervensi telah dilakukan, mulai dari pengukuran terstandar, skrining penyakit infeksi, hingga pemberian rujukan bagi kelompok sasaran prioritas seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, baduta, dan balita. Selain itu, penentuan lokus desa stunting juga dilakukan secara selektif berdasarkan ambang batas prevalensi dan kondisi keuangan daerah, sehingga intervensi dapat lebih terarah dan efektif.

Walaupun capaian prevalensi stunting di Kabupaten Trenggalek sudah berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur (17,7%), upaya percepatan penurunan tetap harus dilakukan agar target nasional 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai. Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan cakupan intervensi, serta melakukan inovasi seperti program “Adipura Desa” untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung penurunan stunting secara berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen bersama, diharapkan angka stunting di Kabupaten Trenggalek dapat terus ditekan sesuai target yang telah ditetapkan.

Grafik II.46
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

Disamping percepatan penurunan angka prevalensi stunting, Kabupaten Trenggalek terus melakukan upaya sistematis dalam menangani balita dengan status gizi buruk akut, yang mencakup penurunan berat badan ekstrim akibat kekurangan energi dan protein. Jumlah kasus balita dengan status gizi buruk di tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif meskipun jumlahnya tidak sebesar kasus stunting, Angka prevalensi gizi buruk tahun 2020 sebesar 0,08 persen, di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,10 persen. Tahun 2022 adalah sebesar 0,08 persen dan tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,010 persen. Sedangkan di tahun 2024 Angka Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Trenggalek berhasil turun diangka 0,06 persen.

Status gizi balita merupakan kondisi kesehatan anak usia 0-59 bulan yang dinilai berdasarkan asupan gizi yang mereka terima. Status gizi ini penting untuk diketahui karena mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak secara keseluruhan. Status gizi yang baik memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Status gizi balita kurang di Kabupaten Trenggalek menunjukkan kondisi yang menurun selama periode 2020 hingga 2023, sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar . Pada tahun 2020, status gizi tercatat sebesar 4,15 persen, kemudian menurun menjadi 3,62 persen di tahun 2021 dan menurun kembali di tahun 2022 sebesar 3,40. Sejumlah 1.063 balita gizi kurang di tahun 2023 atau 3,02 persen, sementara capaian status gizi balita kurang di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen, sehingga capaiannya di akhir tahun 2024 menjadi 3,73 persen atau sejumlah 1.320 balita.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak merujuk pada ketersediaan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja yang aman (tangki septik atau IPAL). Fasilitas ini digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama beberapa rumah tangga lain, dan memastikan pembuangan limbah manusia yang aman. Sanitasi layak

adalah hak dasar manusia, bukan hanya fasilitas, yang berdampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Fasilitas sanitasi yang baik mengurangi risiko penyakit, mencegah pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sanitasi yang layak juga terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menggunakan formula jumlah tumah tangga yang memiliki sanitasi layak dibandingkan dengan total rumah tangga. Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada tahun 2024 sebesar 84,66 persen yang menjadi baseline perhitungan pada tahun berikutnya. Adapun capaian akses sanitasi layak pada tahun 2020 sebesar 64,9 persen, meningkat menjadi 65,38 persen tahun 2021, sebesar 82,6 persen tahun 2022, dan meningkat kembali menjadi 83,05 persen tahun 2023.

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

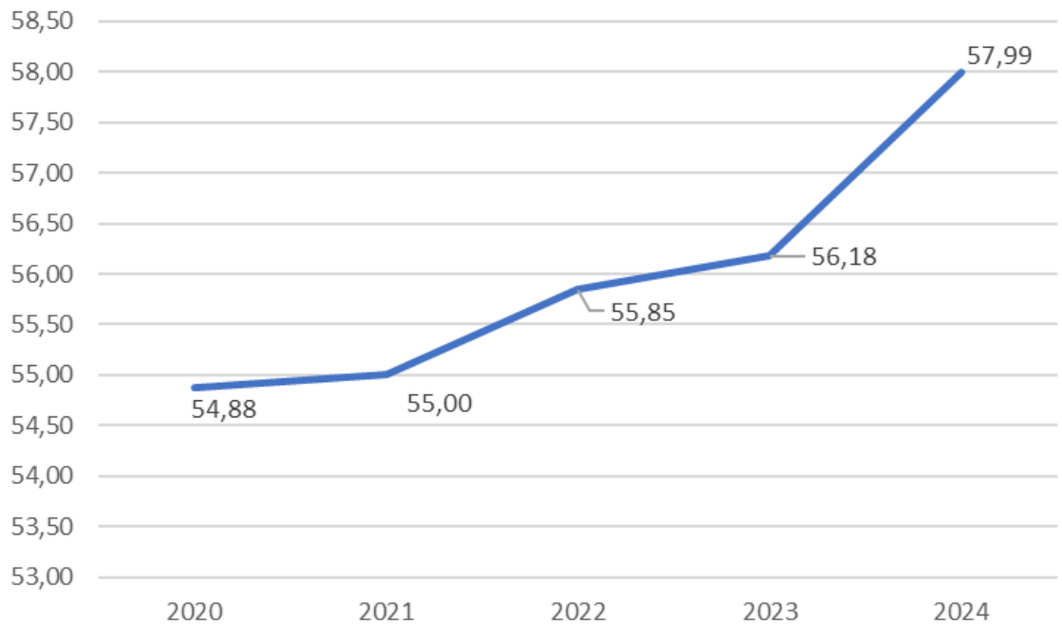
Salah satu infrastruktur yang penting untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah sistem irigasi. Sistem irigasi yang baik sangat mempengaruhi keberlanjutan sektor pertanian dan memainkan peran penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Namun infrastruktur irigasi juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti perubahan curah hujan, frekuensi kekeringan, banjir, maupun dampak perubahan iklim lainnya.

Curah hujan yang polanya mengalami perubahan serta terjadinya peningkatan suhu permukaan akan mempengaruhi ketersediaan air untuk pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan produktivitas lahan melalui modernisasi praktik pertanian dan penggunaan teknologi serta meningkatkan investasi dalam sistem irigasi yang dapat memastikan akses yang merata bagi seluruh petani di Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut, sistem irigasi yang memadai juga dapat menghindari terjadinya banjir di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Dengan pengelolaan aliran air serta drainase yang efisien, sistem irigasi dapat mengurangi risiko penggenangan serta erosi tanah yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen.

Adapun kondisi jaringan di Kabupaten Trenggalek cukup memprihatinkan. Pada tahun 2024, sebesar 40 persen jaringan irigasi mengalami kerusakan. Bahkan pada tahun 2020, Kabupaten Trenggalek mengalami tingkat kerusakan jaringan irigasi yang lebih parah sebesar 45 persen. Namun, dengan bertambahnya persentase jaringan irigasi dalan kondisi baik dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berkomitmen untuk melakukan pemerataan akses petani terhadap jaringan irigasi.

Grafik II.47
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2025

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTR

Untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman. produktif, dan berkelanjutan maka diperlukan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan konsep dalam penataan ruang yang memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang seperti pembangunan dan kegiatan usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang akan menjadi persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, memastikan keselarasan antara rencana kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Formula perhitungan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dengan cara membandingkan luas kawasan pemanfaatan ruang yang direkomendasikan dibanding luas kawasan peruntukan rencana tata ruang yang diajukan. Adapun capaian kinerja indikatornya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.59
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Trenggalek

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kesesuaian pemanfataan ruang dengan rencana tata ruang	92%	49%	82%	96%	95%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2025

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan hak dasar setiap warga negara serta menjadi elemen penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Akses terhadap hunian yang memenuhi syarat kelayakan fisik, keamanan, keterjangkauan, serta keberlanjutan lingkungan tidak hanya

berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah yang inklusif. Pemenuhan kebutuhan hunian layak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan penting dalam menciptakan ekosistem perumahan yang sehat melalui penguatan regulasi, perencanaan tata ruang, penyediaan lahan, dan fasilitasi pembiayaan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjawab tantangan urbanisasi, keterbatasan lahan, dan peningkatan kebutuhan rumah setiap tahunnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah kayak huni, terjangkau, dan berkelanjutan harus memenuhi: 1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dapat diukur dengan menggunakan proksi yaitu memenuhi 4 kriteria sebagai berikut: 1) ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah memenuhi syarat; 2) Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita >7,2 m; 3) Memiliki akses air minum layak; dan 4) Memiliki akses sanitasi layak.

Dalam periode 2020 hingga 2024, persentase hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 67,34 persen pada tahun 2020 menjadi 68,26 persen pada 2021 kemudian menurun menjadi 67,3 persen di tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa penyediaan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek belum sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk. Oleh karena itu masih diperlukan program-program perbaikan infrastruktur, bantuan perumahan dari pemerintah, serta peningkatan peran serta swasta dan masyarakat.

Tabel II.60
Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah layak, terjangkau, berkelanjutan	188.706	189.120	189.529	190.220	190.752
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	280.234	277.050	279.212	280.350	283.435
Akses hunian layak, terjangkau, berkelanjutan (%)	67,34	68,26	67,88	67,85	67,3

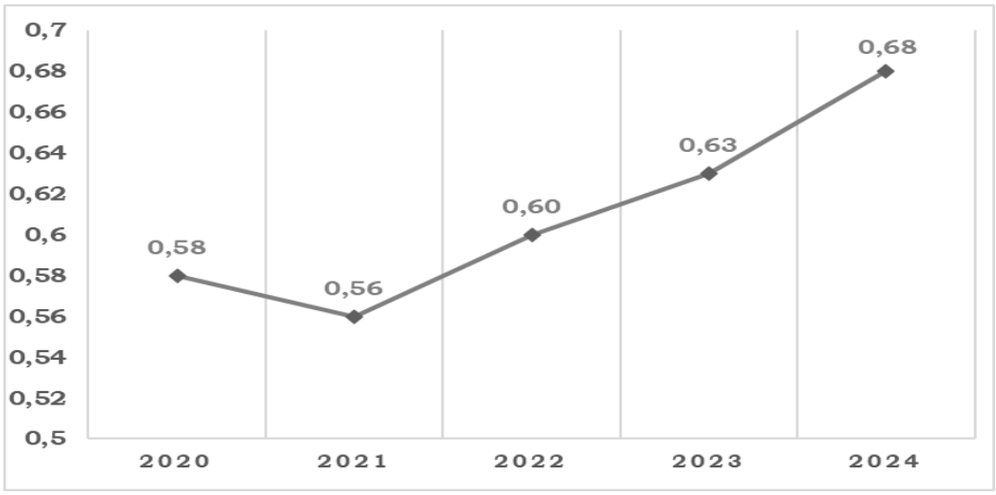
Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025
Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Trenggalek, 2025

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Indeks Ketahanan Daerah

Pengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi komponen kapasitas dalam menghasilkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) serta diperlukan untuk menjadi acuan pemantauan dan evaluasi pembangunan resiliensi daerah (BNPB, 2023). IKD Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2022 sebesar 0,60, pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,63, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,68. Meskipun dengan pencapaian ini, Kabupaten Trenggalek masih berada di Indeks Ketahanan Sedang, namun diharapkan ke depannya mampu mencapai Indeks Ketahanan Tinggi.

Grafik II.48
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2025

Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan TNI. Upaya penertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat dengan melakukan operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisi). Upaya Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak mudah. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena

tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dihitung dengan formula (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani / Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x100%.

Tabel II.61
Capaian Indikator Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2025

Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan

Pengendalian Kebakaran dan penyelamatan adalah Pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebakaran, kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis. Upaya yang telah dilakukan di Bidang Urusan ini dalam rangka pengendalian kebakaran dan penyelamatan dengan pembentukan relawan kebakaran di desa-desa, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP dan pemenuhan sarana prasarana penunjang. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang urusan ini yaitu persentase pengendalian kebakaran dan penyelamatan, dimana Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan merupakan ukuran yang menggambarkan Penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dalam situasi dan kondisi kedaruratan kebakaran. Persentase pengendalian kebakaran dan penyelamatan dihitung dengan formula (Jumlah pengendalian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani / Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan) x100%.

Tabel II.62
Capaian Indikator Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%	77,42 %	65,06 %	93%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2025

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial

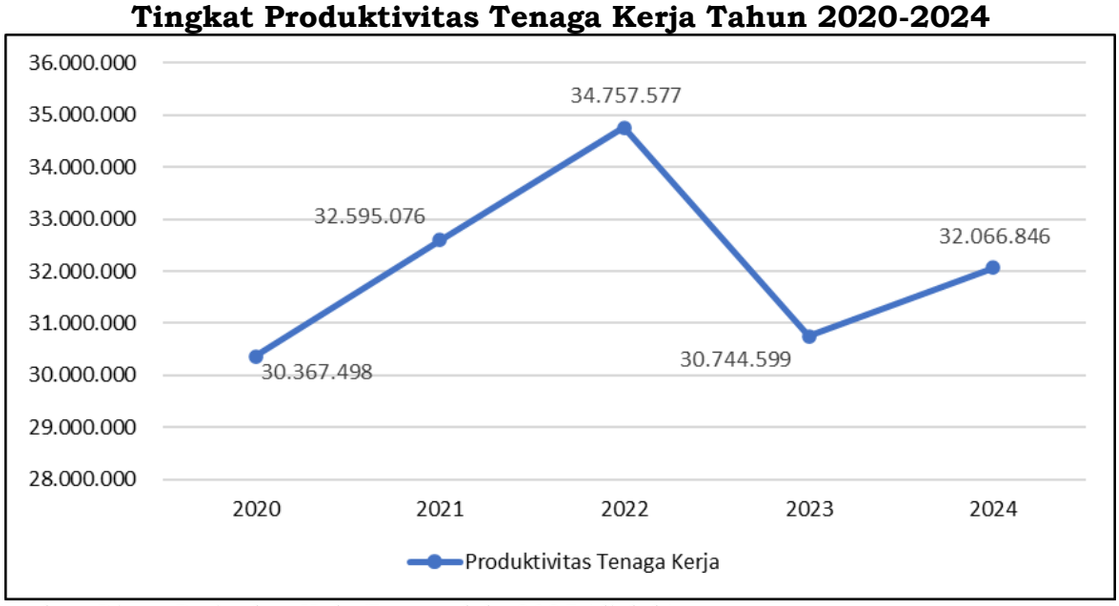
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, baik secara objektif maupun subjektif. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas hidup, dan pembangunan manusia. Pentingnya Indikator Kesejahteraan Sosial yakni membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami kondisi sosial mereka dan berpartisipasi dalam Pembangunan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Adapun nilai Indeks Kesejahteraan pada tahun 2024 sebesar 56,85.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah ukuran seberapa efektif tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks makro, produktivitas tenaga kerja sering diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja. Produktivitas juga dapat dilihat dari kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan terus meningkatkan hasil yang dicapai.

Grafik II.49
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perinaker Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2020-2023 naik secara signifikan dari Rp. 30.367.498,00 per orang menjadi Rp. 34.757.577,00 per orang pada tahun 2023. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan teknologi dan infrastruktur serta peningkatan output yang lebih tinggi sehingga pendapatan perusahaan naik. Tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat produktivitas yang cukup signifikan menjadi Rp. 30.744.599,00 per orang, dan meningkat tipis pada tahun 2024 sebesar Rp. 32.066.846,00 per orang. Realisasi pada tahun 2024 merupakan baseline dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2030.

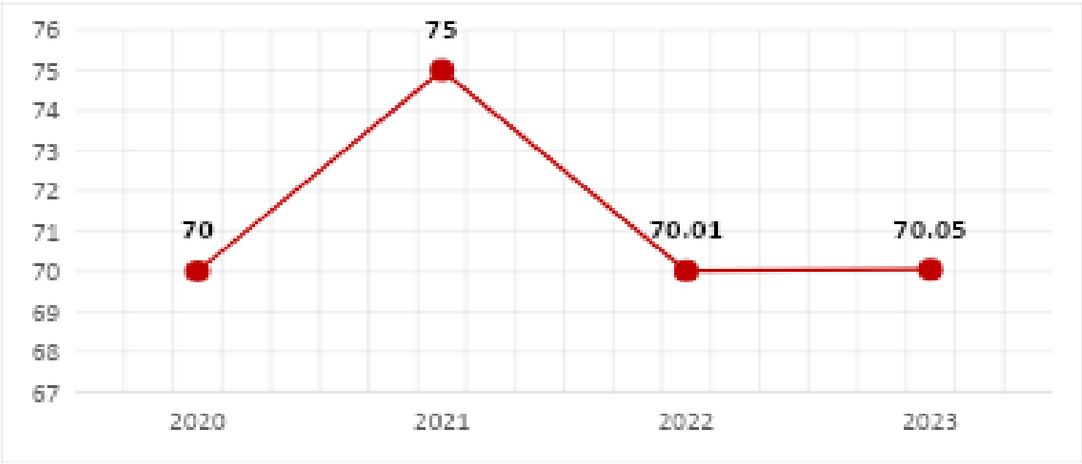
H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Perlindungan Anak

Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan indikator yang menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dimaksud tercermin pada angka atau nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), yang terdiri dari 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus.

Data angka PUHA diperoleh dari nilai atau skor perolehan penilaian KLA dibagi nilai maksimal KLA (skor = 1000). Angka PUHA tahun 2020, karena pandemi Kementerian PPPA meniadakan Evaluasi KLA melalui penilaian, tetapi evaluasi dilakukan melalui rapat daring baik oleh Pusat maupun Provinsi. Pada tahun 2021 angka PUHA sebesar 75 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen dan pada tahun 2022 angka PUHA sebesar 70,01 persen. Angka PUHA pada tahun 2023 naik menjadi sebesar 70,5 persen dihitung berdasarkan skor yang diukur dengan self asesmen dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI.

Grafik II.50
Angka Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Trenggalek, 2024

Untuk perlindungan anak telah dirumuskan pengukuran Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus.

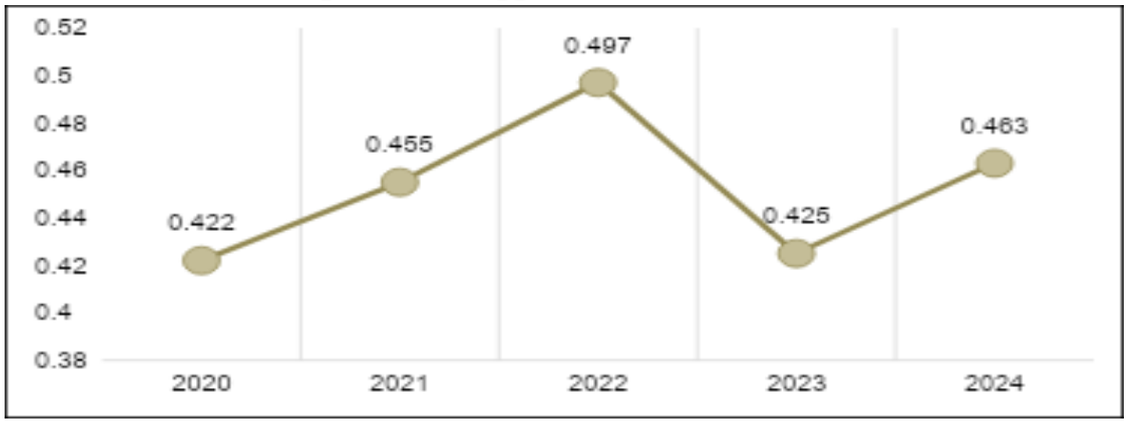
Pemerintah Daerah mendorong upaya pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimandatkan dalam Konvensi Hak Anak yang dihitung dengan indeks Pemenuhan Hak Anak dan meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang dihitung dengan Indeks Perlindungan Anak (IPKA).

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Pada capaian Indeks Ketimpangan Gender dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2024, dapat terlihat capaian tahun 2020 menunjukkan angka 0,422 dan semakin menurun hingga tahun 2023 mencapai angka 0,425, meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami kenaikan menjadi 0,497. Pada tahun 2024, indeks kembali meningkat menjadi 0,463. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketidaksetaraan gender mengalami penurunan di tahun 2023. Kondisi kenaikan pada beberapa tahun perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya pengarusutamaan gender karena ketimpangan gender yang semakin melebar pada tahun tertentu.

Grafik II.51
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



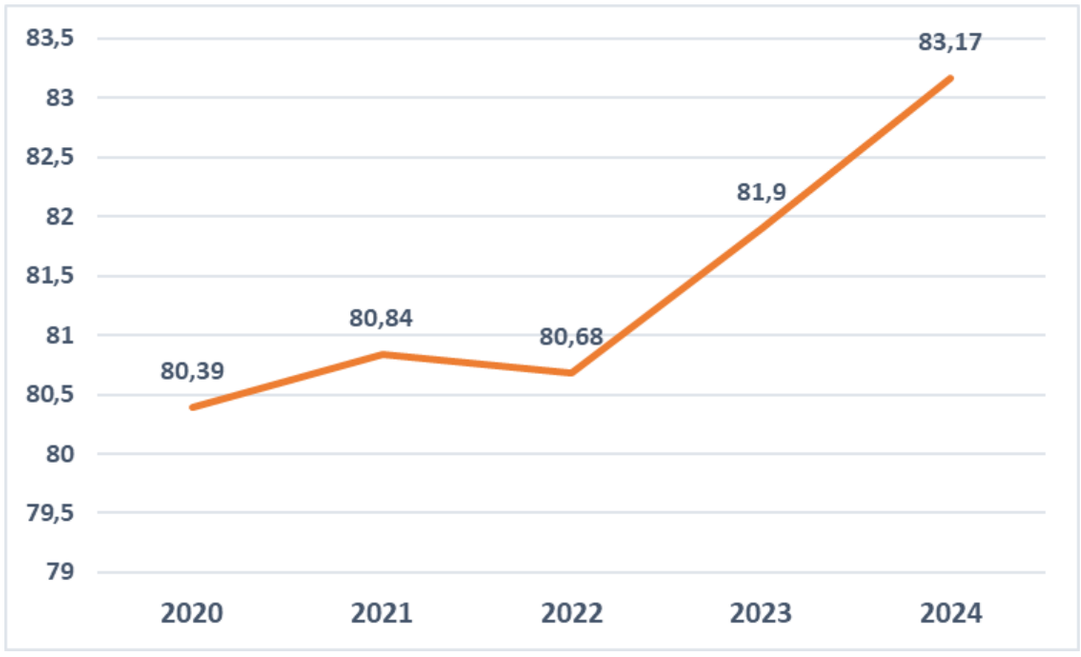
Sumber: BPS Prov. Jawa Timur, 2025

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan positif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai berturut-turut sebesar 80,39 pada tahun 2020, 80,84 pada 2021, 80,68 pada 2022, 81,90 pada 2023, dan mencapai 83,17 pada 2024, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan pada tahun 2022 disebabkan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan. Pada tahun 2022 Kabupaten Trenggalek mengalami bencana banjir pada beberapa kecamatan pada bulan Oktober dan November dan terjadi dinamika harga yang sangat tinggi di tahun tersebut. Kenaikan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan perbaikan yang konsisten dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan , dan pemanfaatan pangan di daerah. Meningkatnya indeks ini dapat diasosiasikan dengan penguatan program pertanian, distribusi pangan yang lebih merata, serta peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa Trenggalek menurut Cut Off Poin Indek Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten yang memiliki Ketahanan yang paling baik., namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan peningkatan ini merata hingga ke tingkat rumah tangga dan kelompok rentan.

Grafik II.52
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Trenggalek tergambarkan juga di dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA. Dokumen tersebut merupakan penerjemahan amanat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi. Adapun Sistem informasi dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilitas pasokan dan harga pangan serta sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi".

FSVA merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.

Aspek ketersediaan pangan terdiri dari 2 indikator: Rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk; dan Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Aspek akses terhadap pangan terdiri dari 2 indikator yaitu Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk; dan Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara. Sedangkan Aspek Pemanfaatan Pangan terdiri dari indikator: Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

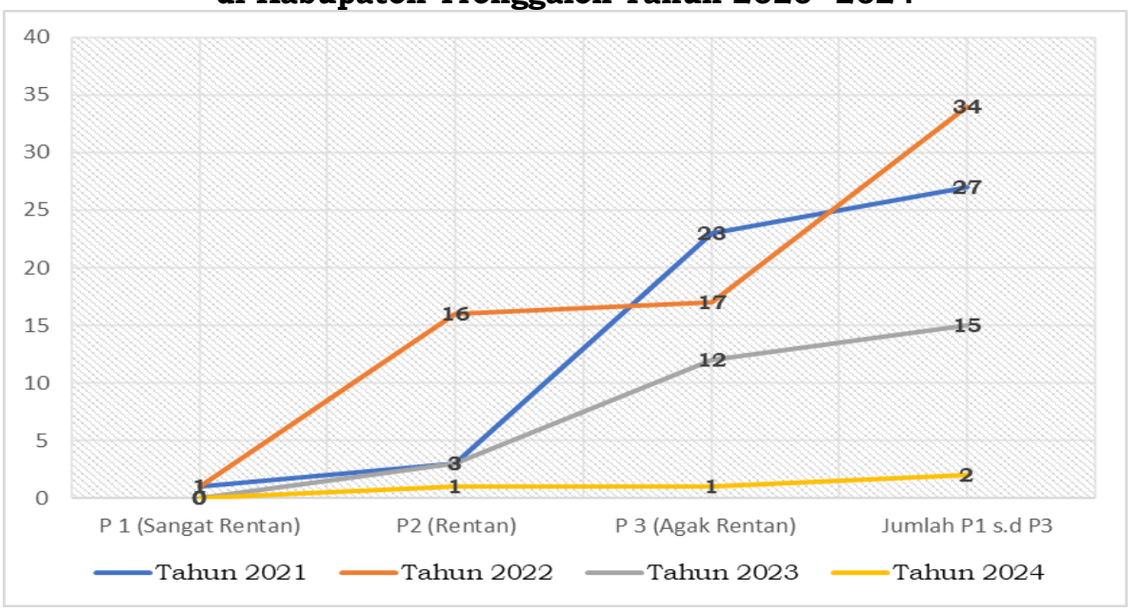
Tabel II.63
Tabel Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan di Kabupaten Trenggalek

Prioritas (P)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
P 1 (Sangat Rentan)	NA (Pandemi Covid19/ Efisiensi Anggaran)	1	1	0	0
P2 (Rentan)		3	16	3	1
P 3 (Agak Rentan)		23	17	12	1
Jumlah P1 s.d P3	**NA**	**27**	**34**	**15**	**2**

Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Grafik II.53
Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

Berdasarkan periode pengukuran tahun 2020 sampai dengan 2024, dari 157 desa/kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan, jumlah desa/kelurahan rawan pangan mencapai puncak pada 2022 (34 desa/kelurahan), kemudian menurun tajam menjadi 15 desa (2023) dan hanya 2 desa (2024). Secara persentase, pada tahun 2022 naik 25,9% dari 2021, 2023 turun 55,9% dari 2022, 2024 turun 86,7% dari 2023. Sedangkan, secara kumulatif dari tahun 2021 sampai dengan 2024 jumlah desa rawan pangan berkurang 25 desa atau turun 92,6%.

Desa dengan kondisi P1 (Sangat Rentan) mulai teridentifikasi pada pengukuran tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah 1 (satu desa) kemudian menghilang sejak 2023. Selanjutnya, desa dengan kondisi P2 (Rentan) mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022 (16 desa) yang awalnya hanya berjumlah 3 desa di tahun 2021. Namun, kondisi tersebut kembali menurun drastis menjadi 3 desa (2023), dan hanya tersisa 1 (satu) desa pada tahun 2024. Lonjakan 2022 bisa disebabkan dampak lanjutan pandemi terhadap ekonomi dan pangan, serta peningkatan kualitas pendataan. Terakhir, desa dengan kondisi P3 (Agak Rentan) sepanjang periode pengukuran menjadi kelompok

dengan jumlah terbesar yaitu 23 desa (2021), 17 desa (2022), 12 desa (2023), dan tersisa 1 desa (2024). Meski awalnya mendominasi, desa dengan kondisi P3 ini konsisten menurun setiap tahun.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD

Penggunaan Kawasan Hutan untuk proyek strategis nasional dan strategis daerah di kabupaten Trenggalek memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum rujukannya adalah PP nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat 2 proyek strategis nasional yaitu pembangunan Jalan Lintas Selatan dan Pembangunan Bendungan Bagong. Pada proyek strategis nasional tersebut Pemkab trenggalek mempunyai tugas melaksanakan penyediaan lahan pada kawasan hutan. Pada tahun 2020 pemerintah kabupaten Trenggalek menguruskan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan bendungan bagong seluas 141 Ha. Pada Tahun 2021 Pemkab Trenggalek melaksanakan penataan batas dan inventarisasi tegakan pada area pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan bendungan bagong. Pada Tahun 2022 pemkab trenggalek dan BBWS Brantas mengajukan rencana tebang untuk area penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan bendungan bagong seluas 70 Ha.

Pada proyek strategis nasional untuk pembangunan Jalan Lintas selatan, Pemkab Trenggalek mengajukan perubahan persetujuan penggunaan kawasan hutan karena ada beberapa trase yang berubah. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan rekomendasi gubernur jawa timur untuk perubahan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan JLS seluas 300 Ha.

Pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk proyek strategis daerah adalah penggunaan kawasan hutan untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Penggunaan Kawasan Hutan untuk ruas jalan kabupaten dan Pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan kota maritim baru Prigi.

Pada tahun 2020 telah keluar SK Menteri Kehutanan tentang penggunaan kawasan hutan untuk 12 ruas jalan kabupaten, pada tahun 2022 telah keluar penetapan areal kerja untuk 10 ruas jalan kabupaten dan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan kota maritim prigi seluas 36 ha. Pada tahun 2022 telah terbit SK Menteri LHK tentang penetapan batas areal kerja untuk Tempat Pembuangan Sampah Srabah, Panggul dan Watulimo seluas 16 Ha.

Tabel II.64
Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD

INDIKATOR	Baseline				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	4,03	6,6	12,4	19	28,02

Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2025

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Penurunan Emisi GRK kumulatif

Salah satu sektor penting yang menyumbang emisi terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah sektor energi sebesar 42% dan sektor pertanian sebesar 40% dari total emisi karbon. Penyumbang emisi CO2 dari sektor energi berasal dari konsumsi listrik yang masih bertumpu pada bahan bakar fosil serta emisi yang berasal dari sektor transportasi. Lebih lanjut emisi sektor pertanian sebagian besar berasal dari praktik pertanian yang belum ramah lingkungan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan sektor tersebut diatas yang mengedepankan prinsip kelestarian menjadi kunci penting dalam strategi penurunan emisi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mulai mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, menjaga daya dukung sumber daya alam, serta melindungi kawasan konservasi dari tekanan eksploitasi. Kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan untuk membangun sistem bisnis pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan perlindungan lingkungan jangka panjang. Lebih lanjut, kebijakan sektor energi juga harus dikedepankan melalui peningkatan bauran energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil di sub sektor energi listrik dan transportasi.

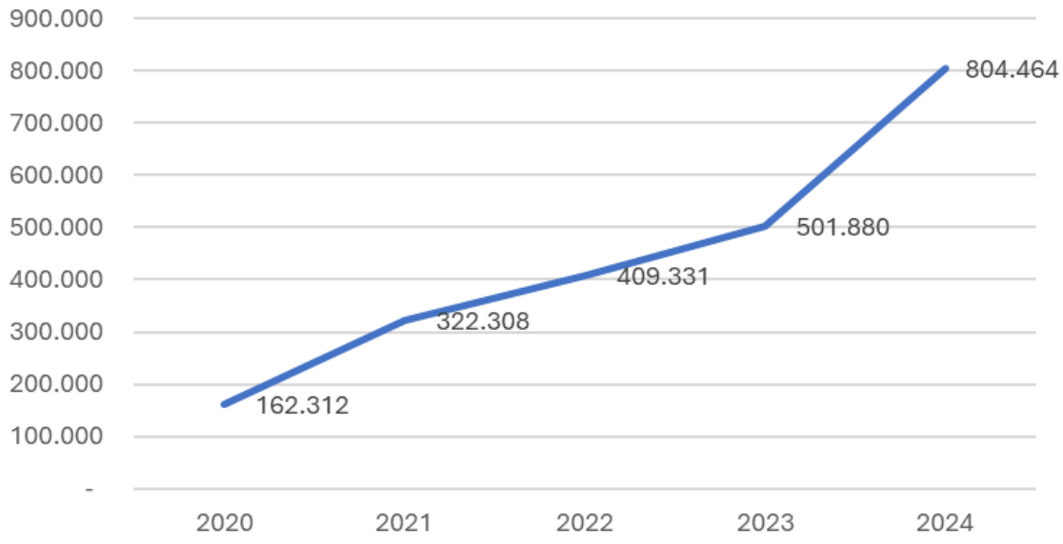
Sejak tahun 2018, Kabupaten Trenggalek mengalami net positif yaitu 198,48 ton CO2 pada tahun 2018 dan sebesar 115,12 ton CO2 pada tahun 2022. Untuk mencapai net zero emission, maka diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi dan menambah sekuestrasi. Sejak tahun 2018, Kabupaten Trenggalek senantiasa melakukan upaya aksi mitigasi untuk mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Upaya tersebut terdokumentasi dalam platform AKSARA yang dikembangkan Bappenas. Pada umumnya, penurunan emisi CO2 secara kumulatif meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 162.312 ton CO2 dan meningkat menjadi 804.464 ton CO2 pada tahun 2024. Sementara itu, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penurunan emisi CO2 tahunan di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuatif. Fluktuasi ini mencerminkan belum konsistennya upaya mitigasi emisi, terutama dari sektor-sektor penyumbang emisi utama (energi dan pertanian) yang memerlukan pendekatan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Tabel II.65
Emisi CO2 (ton CO2) Kabupaten Trenggalek

No	Sektor	Emisi (Gg CO2)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Energi	447,64	463,68	463,27	479,48	493,99
	1A1a1. Electricity Consumption	172,20	185,17	213,67	214,97	215,60
	1A2. Manufacturing Industries and Construction	10,62	13,27	10,06	9,5	9,5
	1A3. Transport	208,47	208,78	179,16	195,39	197,92
	1A4b. Residential	56,35	56,46	60,38	59,62	70,97
2	IPPU	3,14	3,15	3,15	3,16	3,17
	2H2. Food and Beverages Industry	3,14	3,15	3,15	3,16	3,17
3	Pertanian	402	392,38	387,92	414,46	460,49
	3A1. Enteric Fermentation	77,58	79,98	82,64	84,12	85,67
	3A2.a (CH4) From Manure Management	4,58	4,8	5,09	5,39	5,34
	3A2.b Direct N2O From Manure Management	39,29	40,39	40,8	41,64	41,6
	3C1.a Biomass Burning Cropland	2,33	2,27	2,31	2,4	2,35
	3C1.b Biomass Burning Grassland	0,31	0,32	0,3	0,28	0,19
	3C2. Liming	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
	3C3. Urea Fertilization	8,03	8,07	8,07	8,02	7,9
	3C4. Direct N2O Emissions from Managed Soils	86,68	85,28	78,75	93,29	132
	3C5. Indirect N2O Emissions from Managed Soils	20,82	20,18	18,97	21,86	29,23
	3C6. Indirect N2O Emissions from Manure Management	5,45	4,57	4,69	6,15	4,87
	3C7. Rice Cultivations	156,78	146,38	146,17	151,18	151,22
4	FOLU	-1225,31	-970,95	-978,22	-1026,98	-1033,92
	3B. Forest and Other Land Use					
	3B1a. Forest Remaining Forest	-1167,25	-885,22	-891,96	-949,41	-957,73
	3B2a. Cropland Remaining Cropland	-60,05	-85,84	-86,26	-77,57	-76,19
	3C1a. Biomass Burning in Forest Land	1,99	0,11	0	0	0
5	Limbah	174,05	178,07	178,61	188,15	191,39
	4A. Pembuangan Akhir Sampah Padat	13,99	14,43	14,8	15,11	15,62
	4B. Pengolahan Limbah Padat secara Biologi	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
	4C. Pembakaran Sampah melalui Insinerator dan Pembakaran Sampah secara Terbuka	23,36	23,41	23,45	24,71	24,87
	4D1. Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	98,41	98,78	98,77	103,17	103,07
	4D2. Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Industri	38,22	41,38	41,52	45,08	47,75
Total		- 198,48	66,33	54,73	58,27	115,12

Sumber: Traction Energy Asia, 2024

Grafik II.54
Penurunan Emisi GRK kumulatif (tonCO2eq) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Bappenas, 2025

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk hasil registrasi tahun 2024 hasil Data Konsolidasi Bersih sebanyak 753.810 jiwa. Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik, dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk Kabupaten Trenggalek baru mulai terlaksana tahun 2012. Kabupaten Trenggalek saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi

kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara online. Tabel di bawah ini adalah gambaran capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel II.66
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Uraian	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1.	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK (%)	99,88	99,98	99,92	99,93	99,86
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	B(83,23)	B(87,87)	B{85,53)	A(98,85)	A(99,58)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2025

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Persentase Desa Cepat Klasifikasi Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang adalah desa yang memiliki tingkat kemajuan dan potensi untuk terus berkembang lebih pesat, ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, serta perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Desa ini biasanya sudah mencapai tahap swasembada atau mendekati, dengan masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor pertanian dan mulai mengembangkan potensi lokal serta memiliki akses yang baik ke berbagai fasilitas dan layanan. Capaian desa cepat berkembang di Kabupaten Trenggalek dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.67
Jumlah Desa berdasarkan Kategori Desa Tahun 2020-2024
di Kabupaten Trenggalek

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cepat Berkembang	63	69	74	76	90
Berkembang	50	59	56	62	31
Kurang Berkembang	39	24	22	14	8
Jumlah	152	152	152	152	152

Sumber : Dinas PMD Kab. Trenggalek, 2025

Persentase desa klasifikasi cepat berkembang pada tahun 2020 sebesar 41,44 persen, tahun 2021 naik menjadi 45,39 persen, tahun 2022 sebesar 48,68 persen, dan tahun 2023 naik mencapai angka 50 persen. Sedangkan tahun 2024 naik signifikan menjadi 59,21 persen.

Desa yang dikategorikan berkembang pesat di Trenggalek, berdasarkan penilaian dalam lomba desa tingkat kabupaten, adalah Desa Pandean, Kecamatan Durenan. Desa ini menonjol dalam bidang pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, seperti penyediaan PAUD gratis. Selain itu, Desa Pandean juga dikenal dengan partisipasi aktif masyarakatnya dalam berbagai kegiatan, termasuk pagelaran seni dan pasar UMKM.

Persentase BUMDES Kategori Maju

BUMDes kategori maju adalah Badan Usaha Milik Desa yang memiliki kinerja dan dampak yang signifikan terhadap perekonomian desa dan masyarakat. Kategori ini menunjukkan bahwa BUMDes tersebut telah mencapai kemandirian usaha, memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memiliki dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat desa

Jumlah BUMDES berdasarkan kategori BUMDES dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.68
Jumlah BUMDes berdasarkan Kategori BUMDes
Tahun 2020-2024 di Kabupaten Trenggalek

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maju	4	4	5	5	6
Berkembang	19	20	23	23	25
Pemula	60	61	61	59	57
Perintis	69	67	63	65	64
Jumlah	152	152	152	152	152

Sumber : Dinas PMD Kab. Trenggalek, 2025

Persentase BUMDes kategori maju pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 2,63 persen, tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,29 persen, dan tahun 2024 naik menjadi sebesar 3,95 persen.

Kemajuan BUMDes sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- **Potensi desa:** Potensi desa yang ada harus dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Peran pemerintah desa:** Pemerintah desa yang serius dan mendukung akan memperkuat BUMDes.
- **Partisipasi masyarakat:** Partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta juga sangat penting untuk kemajuan BUMDes.

BUMDes yang dikategorikan maju di Trenggalek adalah BUMDes Maju Jaya Masaran, yang berfokus pada pengembangan usaha di bidang penyewaan alat dan desa wisata, serta BUMDes Bangkit Prima, yang juga masuk kategori BUMDes baik di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, BUMDes Sumbreng Prima di Desa Munjungan juga memiliki potensi usaha yang menjanjikan dan didukung oleh Pemerintah Desa, menurut BUMDes Sumbreng Prima.

Beberapa BUMDes lain yang juga disebutkan dalam konteks potensi kemajuan di Trenggalek, meskipun tidak secara eksplisit dikategorikan "maju", adalah:

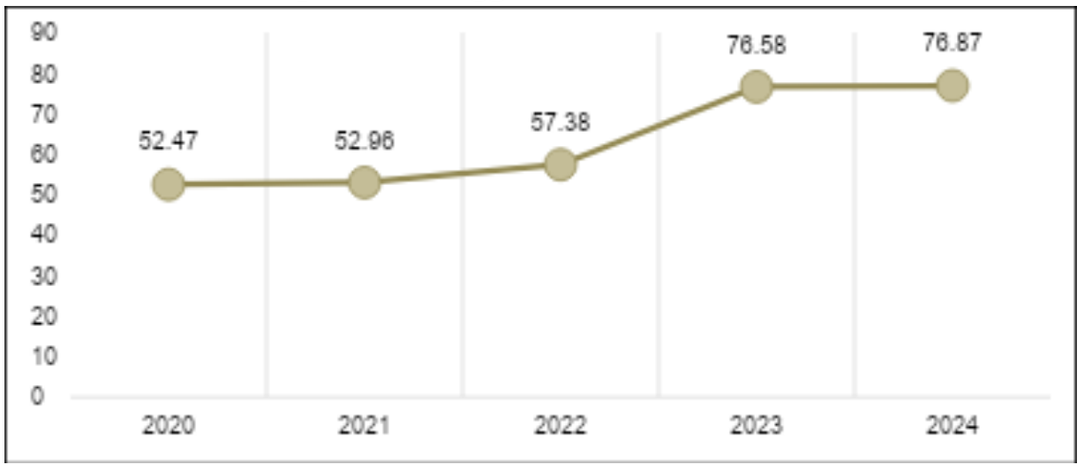
1. **BUMDes Maju Jaya Makmur (MJM) :** Bergerak di bidang pengelolaan sampah, layanan kuliner, dan fasilitas parkir.
2. **BUMDes di Desa Wonocoyo :** Bergerak di bidang simpan pinjam dan pelayanan jasa fotocopy serta menjual ATK, dengan potensi di bidang pariwisata seperti Pantai Kili-Kili dan Pantai Pelang.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awalnya selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Trenggalek yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga menggunakan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA). Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) adalah indikator keberhasilan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan 3 dimensi yakni dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan keluarga.

Grafik II.55
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, iBangga tercatat sebesar 52,47 dengan kategori berkembang, kemudian meningkat menjadi 52,96 pada tahun 2021 dengan kategori yang sama. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2022 dengan lonjakan sebesar 4,41 persen, mencapai 57,37. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana iBangga

melonjak menjadi 76,58 dan kembali naik sedikit menjadi 76,87 pada tahun 2024.

Peningkatan luar biasa ini menunjukkan bahwa unsur ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di Trenggalek semakin optimal. Pada tahun 2025, iBangga mencapai kategori Tangguh, mencerminkan keberhasilan berbagai upaya komprehensif yang telah dilakukan. Program seperti pendampingan keluarga, pembentukan Kampung KB, serta optimalisasi peran penyuluh KB berkontribusi besar dalam menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai sejauh mana pembangunan daerah telah memperhatikan aspek kependudukan sebagai titik sentral perencanaan pembangunan. IPBK disusun untuk mengukur tingkat integrasi kebijakan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bahwa Kabupaten Trenggalek mampu mengarahkan program dan kebijakan yang relevan dengan dinamika kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, pengendalian mobilitas penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Dengan adanya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) perencanaan pembangunan daerah lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Karena seluruh aspek pembangunan disusun dengan memperhatikan struktur, komposisi, distribusi, serta karakteristik penduduk. Adapun nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di tahun 2024 sebesar 61,8 meskipun IPBK baru terhitung capaiannya di Tahun 2024 yang sebelumnya belum terdapat indeks dimaksud.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

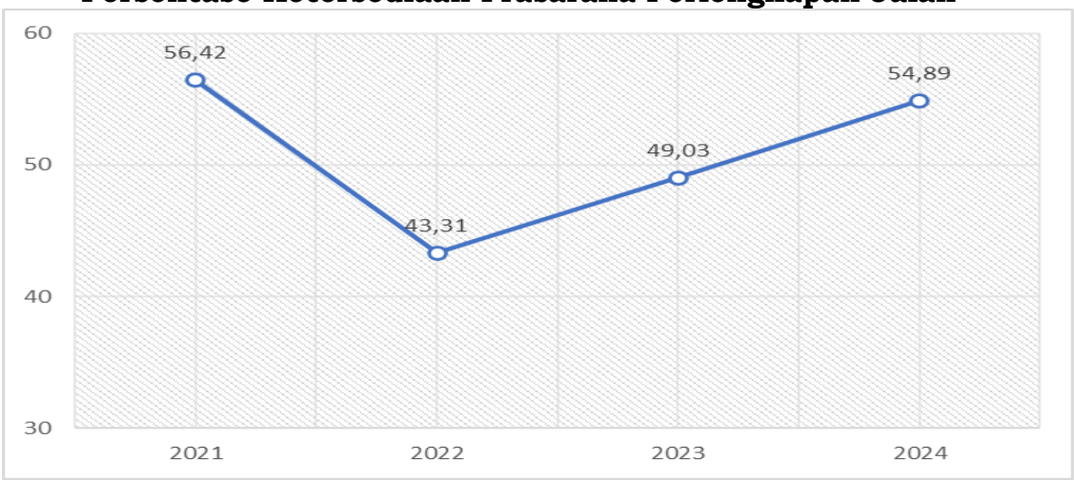
Indeks Aksesibilitas

Penerapan Indeks Aksesibilitas tidak hanya menjadi bagian dari pengukuran kinerja pembangunan, tetapi juga menjadi arah kebijakan strategis Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang inklusif, berkeadilan, dan rendah karbon. Indeks ini mencerminkan tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap layanan transportasi umum dan sarana berjalan kaki, berdasarkan dimensi jarak, moda, dan kualitas infrastruktur. Dari sisi sosial dan demografi, Kabupaten Trenggalek memiliki karakteristik kependudukan yang tersebar di wilayah perbukitan, pesisir, dan dataran rendah, dengan aksesibilitas yang tidak merata antarwilayah. Ketimpangan ini dapat menyebabkan keterbatasan akses ke layanan dasar, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan Indeks Aksesibilitas menjadi bentuk afirmasi terhadap kelompok marjinal seperti pelajar dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat desa terpencil.

Secara ekonomi, konektivitas dan mobilitas yang lebih inklusif dan efisien akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini mendorong partisipasi pelaku UMKM, meningkatkan akses ke pasar dan jasa, serta

mengurangi biaya logistik dan transportasi. Transportasi yang mudah diakses dan terjangkau juga akan memperkuat basis ekonomi regeneratif yang sedang dibangun dalam Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif RPJMD Trenggalek. Dalam pengukuran indeks ini, indikator teknis yang dipertimbangkan mencakup tiga dimensi utama yakni (1) Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia,; (2) Persentase layanan angkutan darat; (3) Persentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi.

Grafik II.56
Persentase Ketersediaan Prasarana Perlengkapan Jalan



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek, 2025

Aksesibilitas yang baik tentunya juga harus didukung dengan ketersediaan prasarana pendukung kelengkapan jalan seperti PJU, rambu, marka, guardrail, separator dan prasarana pendukung lainnya. Prasarana tersebut juga berperan penting dalam peningkatan aspek keselamatan lalu-lintas. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga terus berupaya dalam penyediaan prasarana pendukung kelengkapan jalan tersebut.

Manfaat jangka panjang dari Indeks Aksesibilitas tidak hanya dalam konteks pelayanan transportasi, tetapi juga dalam mendukung penurunan emisi karbon, penguatan keadilan spasial, serta percepatan pencapaian target SDGs. Secara spesifik, indeks ini berkontribusi pada SDG 10 (pengurangan ketimpangan), SDG 11 (kota dan permukiman berkelanjutan), dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim). Pada tahun 2024, realisasi Indeks Aksesibilitas Kabupaten Trenggalek sebesar 33,91 persen yang sekaligus merupakan pertama kali dihitungnya indikator Indeks Aksesibilitas. Adapun faktor penghambat untuk mencapai target di masa mendatang antara lain: 1) penurunan jumlah pengguna angkutan umum; 2) Keterbatasan pengguna angkutan umum; 3) Keterbatasan prasarana pelengkap jalan. Sedangkan faktor pendorongnya antara lain: 1) Komitmen pemerintah dalam dokumen perencanaan; 2) Meningkatnya tren gaya hidup hijau dimasa mendatang; 3) Peluang penyediaan akses ke kawasan pariwisata.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dari sisi peningkatan digitalisasi pemerintahan dapat terlihat dari capaian Indeks SPBE (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks

SPBE diukur menggunakan sejumlah indikator yang memiliki bobot nilai tertentu dengan range nilai dari 1 - 5. Hasil kumulatif dari penilaian setiap indikator tersebut akan menghasilkan skor akhir Indeks SPBE yang diklasifikasikan ke dalam predikat sebagai berikut:

- Kurang: Indeks SPBE < 1,8
- Cukup: Indeks SPBE 1,8 s.d < 2,6
- Baik: Indeks SPBE 2,6 s.d < 3,5
- Sangat Baik: Indeks SPBE 3,5 s.d < 4,2
- Memuaskan: Indeks SPBE 4,2 s.d 5,0

SPBE merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 mencapai 3,2. Sedangkan pada tahun 2021, indeks mengalami penurunan menjadi 2,58, dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 2,55. Namun, pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 4,21. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan Indeks SPBE meningkat sedikit menjadi 4,22, yang mengindikasikan terus berkembangnya digitalisasi dalam pengelolaan pembangunan, khususnya pada pelayanan publik kepada masyarakat Trenggalek.

Grafik II.57
Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPANRB, 2025

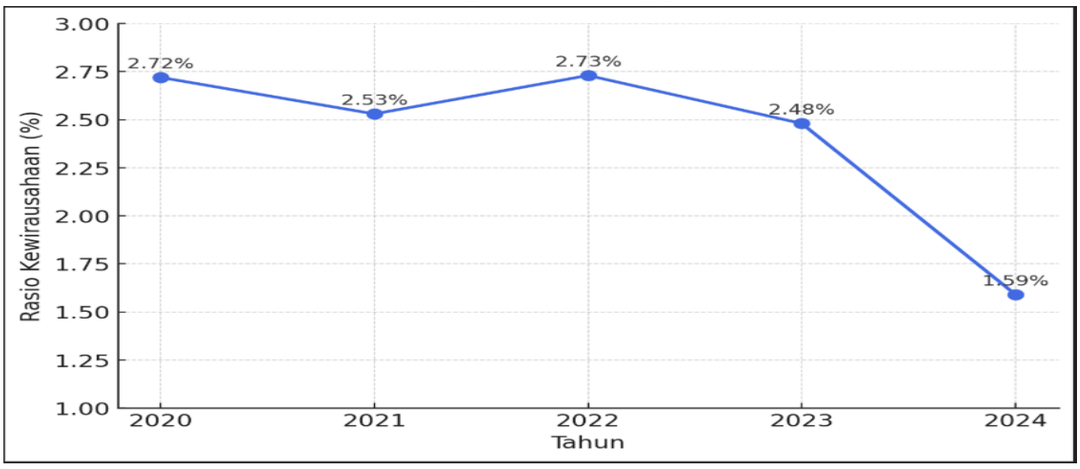
Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan Kabupaten Trenggalek menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 2,72 persen, namun mengalami penurunan menjadi 2,53 persen pada tahun 2021. Penurunan ini diduga disebabkan oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya tahan pelaku usaha mikro dan kecil, serta terbatasnya aktivitas pelatihan dan pembinaan kewirausahaan pada masa tersebut. Namun demikian, rasio ini

kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 2,73 persen, sayangnya pada tahun 2023 hingga 2024, kembali terjadi penurunan menjadi 2,48 persen, dan 1,59 persen.

Grafik II.58
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025

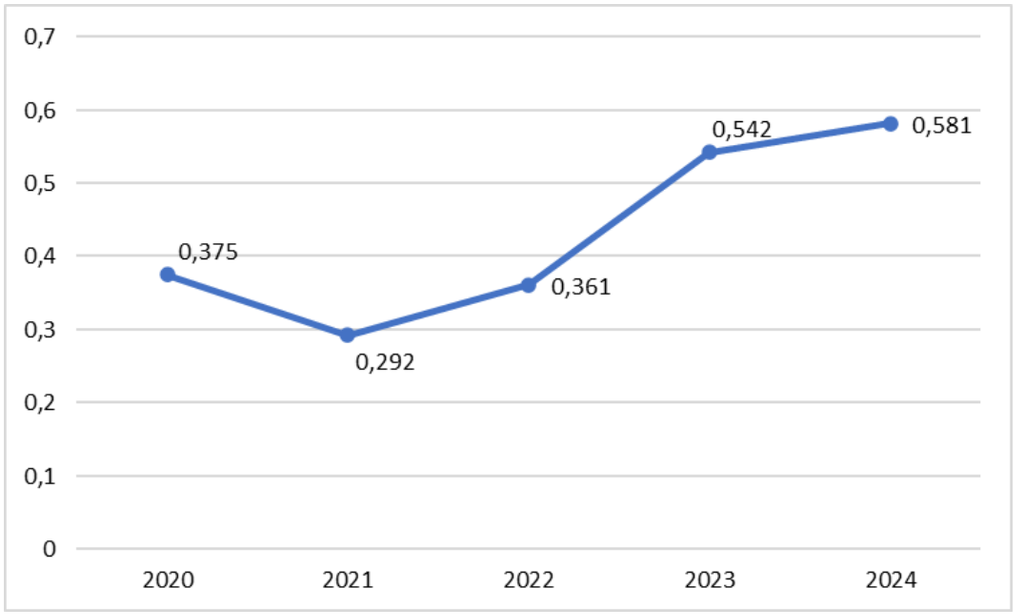
Kenaikan rasio kewirausahaan pada tahun 2022 mengindikasikan pemulihan dan pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di Trenggalek. Hal ini tidak lepas dari dukungan program pemerintah daerah dalam mendorong ekosistem kewirausahaan, termasuk fasilitasi permodalan, pelatihan keterampilan wirausaha, dan pembukaan akses pasar melalui digitalisasi UMKM. Namun penurunan rasio kewirausahaan pada tahun 2023 dan 2024 perlu diwaspadai dan memerlukan upaya lebih dari pemerintah untuk menumbuhkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi pelaku usaha sebagai bagian dari strategi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemandirian ekonomi lokal.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Realisasi Investasi (*Triliun Rupiah*)

Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi menjadi salah satu faktor penting bagi investor dalam pengambilan keputusan penanaman modal. Semakin tinggi realisasi investasi menunjukkan semakin tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Trenggalek. Realisasi investasi di Kabupaten Trenggalek pada kurun 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik II.59
Realisasi Investasi
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 tercapai sebesar Rp. 0,375 triliun dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 0,292 triliun dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 realisasi investasi mulai mengalami pemulihan menjadi sebesar Rp. 0,361 triliun dan kemudian cenderung naik sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 realisasi investasi menjadi Rp 0,542 triliun dan tahun 2024 realisasi Investasi mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar Rp 0,581 triliun.

Kenaikan realisasi investasi ini menunjukkan adanya efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya tarik bagi investor. Berdasarkan penjelasan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, kenaikan tersebut didorong oleh adanya peningkatan kapasitas usaha dari pengusaha eksisting. Untuk mempertahankan capaian pada tahun 2024, beberapa hal yang akan dilaksanakan antara lain: melanjutkan dan terus memperbaharui SP dan SOP, inovasi jemput bola layanan, pengawasan terpadu, *business matching* dan investor gathering.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)

Indeks Partisipasi Olahraga yang selanjutnya disingkat IPO adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan. Indeks Partisipasi Olahraga adalah bagian dari Sport Development Index (SDI) yang mengukur seberapa aktif masyarakat dalam berolahraga. Di Indonesia, SDI digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan olahraga dan

mengukur berbagai aspek, termasuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berolahraga dan meraih manfaat optimal dari kegiatan olahraga. Dalam Permenpora Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengukuran Sport Development Index (SDI/IPO), IPO digunakan untuk memotret pembangunan olahraga secara nasional. Melalui sembilan dimensi pengukuran yang meliputi; SDM olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi dan performa, IPO memiliki peran yang sangat krusial dalam menyediakan data dukung sebagai dasar penyusunan kebijakan keolahragaan. Pada tahun 2024 realisasi IPO sebesar 68,95 poin yang menjadi tahun perhitungan pertama pada RPJMD Periode Tahun 2025-2030.

Tabel II.69
Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	2024
1	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Poin	68,95

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek, 2025

Indeks Pembangunan Pemuda

Pada tahun 2024, Kabupaten Trenggalek mencatat realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 51,33, yang sekaligus menjadi tahun pertama dilakukannya penghitungan IPP di daerah ini. Capaian awal ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi arah pembangunan kepemudaan yang berkontribusi pada terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Peningkatan IPP ke depan perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat partisipasi dan kapasitas pemuda, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta ruang-ruang partisipasi sosial yang mendorong tumbuhnya generasi yang tangguh dan inklusif.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sendiri merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi dan perkembangan pemuda dalam lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan peluang kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kelima domain ini saling terkait dan menjadi ukuran menyeluruh terhadap kualitas hidup pemuda serta keterlibatannya dalam pembangunan. Dengan memantau IPP secara periodik, pemerintah daerah dapat menyusun intervensi yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan pemuda, sehingga mampu mendukung transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan

SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai IPS diperoleh dari nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Penilaian ini menggunakan tingkatan kematangan, dari Rintisan hingga Optimum, dengan kategori hasil seperti Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik, dan Memuaskan. Semakin tinggi nilai IPS, semakin baik kualitas dan integrasi data yang dimiliki, sehingga keputusan yang diambil pemerintah akan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

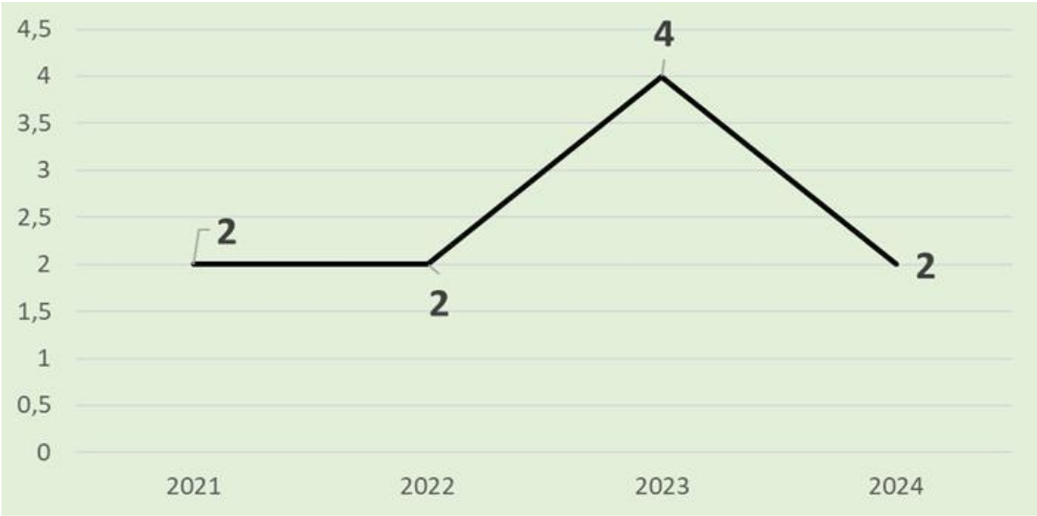
Pada periode 2020 hingga 2022, data Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Trenggalek belum tersedia (N/A). IPS mulai terukur pada tahun 2023 dengan nilai 2,18 dan meningkat menjadi 2,59 pada tahun 2024. Nilai tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan data masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan data yang lebih terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data di Kabupaten Trenggalek.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Nilai Aspek Keamanan SPBE

Nilai Aspek Keamanan SPBE merupakan skor yang mencerminkan seberapa matang sebuah instansi pemerintah menerapkan keamanan dalam sistem digitalnya. Penilaian ini mencakup pengelolaan risiko, penerapan standar keamanan, dan perlindungan data dari ancaman siber. Pengukuran dilakukan melalui evaluasi pada beberapa indikator kunci, antara lain manajemen keamanan informasi, penerapan standar teknis dan prosedur keamanan, serta pemenuhan lima aspek esensial keamanan informasi yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*). Skor yang dihasilkan dalam penilaian dikategorikan dalam tingkat kematangan, mulai dari Rintisan hingga Optimum (Level 1-5), yang mencerminkan perkembangan dan konsistensi penerapan keamanan di suatu instansi. Semakin tinggi nilai aspek keamanan, semakin baik pula kemampuan instansi dalam mencegah kebocoran data, melindungi sistem dari gangguan, dan menjaga keberlangsungan layanan publik berbasis elektronik.

Grafik II.60
Nilai Hasil Penilaian Aspek Keamanan SPBE/ Pemerintahan Digital oleh Kementerian PAN RB



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan data Nilai Aspek Keamanan SPBE Kabupaten Trenggalek periode 2020–2024, terlihat adanya perkembangan yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai belum tersedia (N/A). Memasuki tahun 2021 dan 2022, nilai aspek keamanan berada pada angka 2, menunjukkan tingkat kematangan yang masih awal. Tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 4, yang mencerminkan peningkatan penerapan keamanan informasi secara lebih baik. Namun, pada tahun 2024 nilai kembali turun menjadi 2, mengindikasikan adanya penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan nilai ini menunjukkan bahwa penerapan keamanan SPBE di Kabupaten Trenggalek masih memerlukan penguatan yang konsisten agar capaian positif dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Persentase budaya yang dikembangkan

Persentase budaya yang dikembangkan merupakan indikator kinerja pembangunan bidang kebudayaan. Indikator ini dipakai untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan, melestarikan, memanfaatkan potensi budaya lokal dan untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan memperluas Kebudayaan. Persentase budaya yang dikembangkan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah unsur/jenis budaya yang berhasil dikembangkan dengan jumlah total unsur/jenis budaya yang ada di suatu daerah, yang dihitung dalam bentuk persentase.

Tabel II.70
Persentase Budaya yang Dikembangkan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase budaya yang dikembangkan	Persentase	3,7	11,11	16,30	22,22	7,59

Sumber : Dinas Paribud Kab. Trenggalek, 2025

Persentase pengembangan kebudayaan menunjukan tren fluktuaktif di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020 hingga 2024, dengan penurunan signifikan pada tahun 2024 yang di pengaruhi oleh adanya pemutakhiran data PPKD pada tahun tersebut sampai dengan tahun 2025 sehingga data pembanding kebudayaan (obyek pamajuan kebudayaan) yang ada bertambah secara signifikan lebih dari 200% dari data tahun sebelumnya yang memakai data dari PPKD tahun 2018 sehingga adanya pemutakhiran ini berpengaruh terhadap realiasi prosentasi kebudayaan pada tahun 2024.

Strategi yang dilakukan Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan budaya yang dikembangkan dengan :

- Meningkatkan pelindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional
- Melakukan investasi jangka panjang untuk memajukan kebudayaan secara menyeluruh dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi
- Meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian
- Meningkatkan pelindungan dan pengembangan cagar budaya untuk membentuk tata ruang yang berkeadilan dan ramah terhadap lingkungan hidup
- Rencana kegiatan
- Melakukan pendokumentasian melalui kegiatan kajian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Pendataan cagar budaya dan obyek diduga cagar, pencatatan dan pendokumentasian Obyek Pemajuan Kebudayaan serta penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya dan obyek diduga cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan
- Memperkuat platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- Membuat pemetaan yang menyeluruh terhadap cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata
- Melaksanakan Fasilitasi pemanfaatan Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan budaya literasi di daerah. Indeks Pembangunan Literasi merupakan peningkatan budaya literasi masyarakat melalui pemanfaatan layanan perpustakaan, pemerataan koleksi perpustakaan, pemerataan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan pemustaka, perpustakaan yang sudah ber SNP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan jumlah pemustaka sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca mengukur tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu

tertentu. Kedua indikator ini saling berkaitan erat dalam mendukung penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Trenggalek. Penguatan literasi menjadi landasan strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas, adaptif, dan produktif.

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 tercatat sebesar 44,46, kemudian pada tahun 2022 menjadi 70,87 dan menjadi 84,17 di tahun 2023, sebelum sedikit turun di tahun 2024 menjadi 80,34. Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca juga menunjukkan tren serupa, dari 2,53 pada tahun 2021 sedikit naik ke 2,67 di tahun 2022, lalu melonjak ke 66,9 pada tahun 2023, dan terus meningkat ke 74,88 pada tahun 2024. Penurunan capaian pada tahun 2022 disebabkan oleh keterbatasan akses akibat pandemi COVID-19, diperparah dengan kendala struktural seperti kurangnya sarana prasarana serta terbatasnya kompetensi SDM pengelola perpustakaan yang belum berlatar belakang pendidikan perpustakaan.

Menghadapi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai upaya strategis untuk mendorong perbaikan literasi masyarakat. Pendataan terhadap perpustakaan sekolah dan desa dilakukan untuk memperkuat komponen pendukung Tingkat Kegemaran Membaca, seperti jumlah bahan pustaka, pustakawan, pengunjung, dan anggota perpustakaan. Selain itu, sosialisasi gerakan gemar membaca, pelayanan mobil perpustakaan keliling ke sekolah dan desa, partisipasi aktif dalam kegiatan Car Free Day (CFD) melalui Pojok Baca, serta penempatan Pojok Baca Digital (Pocadi) di Mal Pelayanan Publik menjadi langkah konkret yang berkontribusi terhadap peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Ke depan, kesinambungan upaya ini penting untuk mempertahankan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Trenggalek secara lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel II.71
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	44,46	70,87	84,17	80,34
Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25	66,75	67,25	74,88

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2025

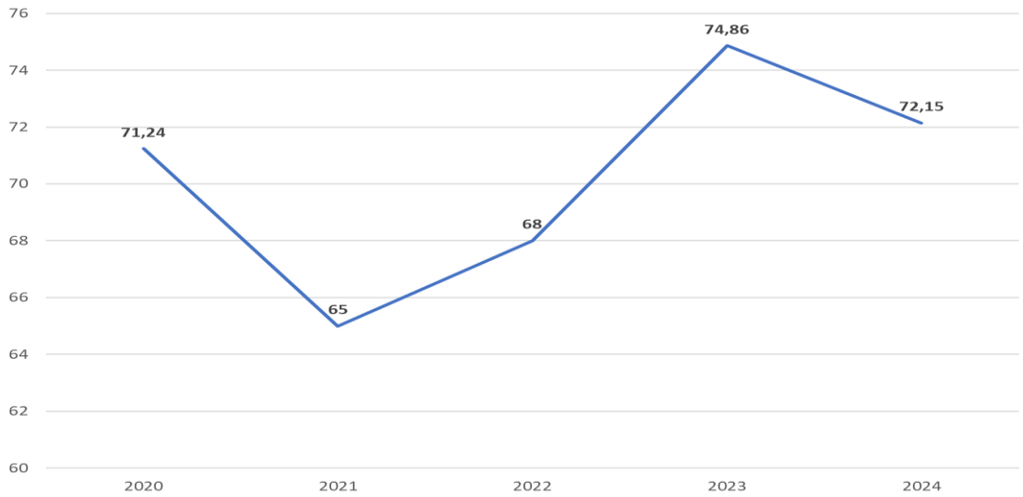
X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan arsip di instansi pemerintah daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan arsip, baik secara internal maupun eksternal, serta

tingkat digitalisasi arsip. Hasil pengawasan ini menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip di masa mendatang. Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah dilakukan secara berkala oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau dinas kearsipan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 sebesar 72,15 dengan kategori BB.

Grafik II.61
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025

Pencapaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah ditunjang oleh tersedianya arsiparis di daerah. Secara umum, tugas arsiparis di lingkungan pemerintah daerah adalah memastikan pengelolaan arsip berjalan tertib, mulai dari penciptaan, penataan, penyimpanan, hingga pelayanan penggunaan arsip. Arsiparis juga bertanggung jawab menjaga autentisitas, keamanan, dan kemudahan akses arsip, baik arsip aktif, inaktif, vital, maupun statis. Dengan pengelolaan arsip yang profesional, arsiparis berperan penting dalam meningkatkan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan mendukung akuntabilitas pemerintahan. Pada tahun 2024 Kabupaten Trenggalek memiliki 9 orang arsiparis sebagai berikut:

Tabel II.72
Daftar Arsiparis Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Perangkat Daerah	Jabatan	Jumlah Arsiparis
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Arsiparis Ahli Muda	1
	Arsiparis Ahli Pertama	3
	Arsiparis Terampil	3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Arsiparis Ahli Pertama	1
Sekretariat DPRD	Arsiparis Ahli Muda	1
Total		**9**

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2025

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif. Oleh karena indikator tersebut juga merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya NTN ini juga disebut sebagai Nilai Tukar Subsisten (Subsistence Terms of Trade). Secara konsep, NTN menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan. Adapun definisi Nilai Tukar Nelayan (NTN) tersebut adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Formulasi penghitungan NTN adalah sebagai berikut:

NTN = Yt/Et
Dimana :
Yt = total pendapatan keluarga nelayan periode t (harga bulan berlaku)
Et = total pengeluaran keluarga nelayan periode t
t = periode waktu (bulan, tahun, dll)

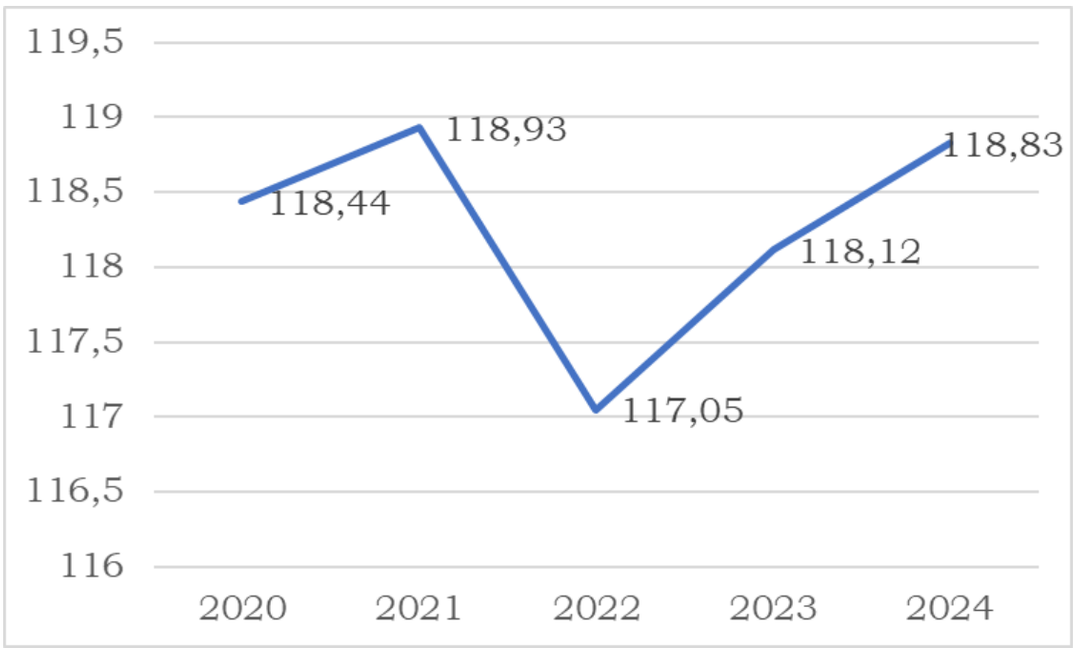
NTN > 100 berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya. Dengan kata lain rumah tangga nelayan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan lainnya atau menabung. NTN = 100 berarti nelayan mengalami impas.dengan kata lain rumah tangga nelayan yang bersangkutan hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasionalnya saja Sedangkan NTN < 100 berarti nelayan mengalami defisit, pendapatan nelayan turun, lebih kecil dari pengeluaran. rumah tangga nelayan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasional serta mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya.

Tabel II.73
Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
	118,44	118,93	117,05	118,12	118,83

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek 2025 (diolah)

Grafik II.62
Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Trenggalek berdasarkan tabel dan grafik diatas pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, akan tetapi masih di angka > 100. Pada tahun 2020 diperoleh NTN sebesar 118,44 kemudian meningkat di Tahun 2021 diperoleh NTN sebesar 118,93. Di tahun 2022 NTN mengalami penurunan signifikan hingga diperoleh NTN sebesar 117,05, hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan harga jual serta kenaikan biaya produksi seperti nelayan kesulitan mendapatkan BBM yang merupakan faktor produksi utama pada usaha penangkapan ikan. di tahun 2023 angka NTN kembali naik di angka 118,12, dan terus meningkat di tahun 2024 di angka 118,83 karena adanya fasilitasi bantuan sarana penangkapan bagi nelayan.

Tabel II.74
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Agregat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Jenis Alat Tangkap	Tahun 2023		Tahun 2024	
	NTN Murni	INTN	NTN Murni	INTN
Payang	119,99	127,01	120,24	126,72
Pukat Pantai	116,08	127,11	116,25	122,84
Pukat Cincin	123,96	127,76	122,22	131,44
Jaring Insang	116,15	124,23	116,45	128,03
Pancing Tonda	115,58	124,73	116,97	134,59
Pancing Ulur	114,95	123,07	110,33	121,03
Agregat	118,12	125,98	118,63	128,99

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Diketahui bahwa kegiatan perikanan tangkap dilakukan pada 3 kecamatan (Munjungan, Panggul, Watulimo). Jenis alat tangkap yang sering digunakan antara lain: Payang, Pukat Pantai, Pukat Cincin, Jaring Insang, Pancing Tonda, dan Pancing Ulur. Berdasarkan hasil agregat seluruh NTN murni Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, nilai NTN secara agregat dari yang terbesar adalah Pukat cincin, payang, pancing tonda, jaring insang, pukat pantai dan pancing ulur. Artinya nelayan pukat cincin memiliki selisih pendapatan dengan pengeluaran yang paling besar atau margin keuntungannya paling tinggi. Sedangkan nelayan pancing ulur memiliki margin keuntungan yang lebih kecil dibandingkan nelayan secara keseluruhan.

Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

NTPi adalah Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya beli pembudidaya ikan, yang menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima pembudidaya ikan dengan harga yang mereka bayar. Dengan kata lain, NTPi menunjukkan seberapa baik kondisi ekonomi pembudidaya ikan di Kabupaten Trenggalek dalam hal kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa dari hasil panen mereka. Secara konsep, NTPi menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan pembudidaya ikan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan.

Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan secara utuh perlu dilihat dari sisi lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini pembudidaya ikan sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup pembudidaya ikan beserta keluarganya;
2. Pengeluaran untuk produksi/budidaya pembudidaya ikan yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal.

Perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) pada dasarnya mengikuti konsep nilai tukar petani versi subsektor perikanan budidaya yang digunakan BPS. Rumus umumnya adalah:

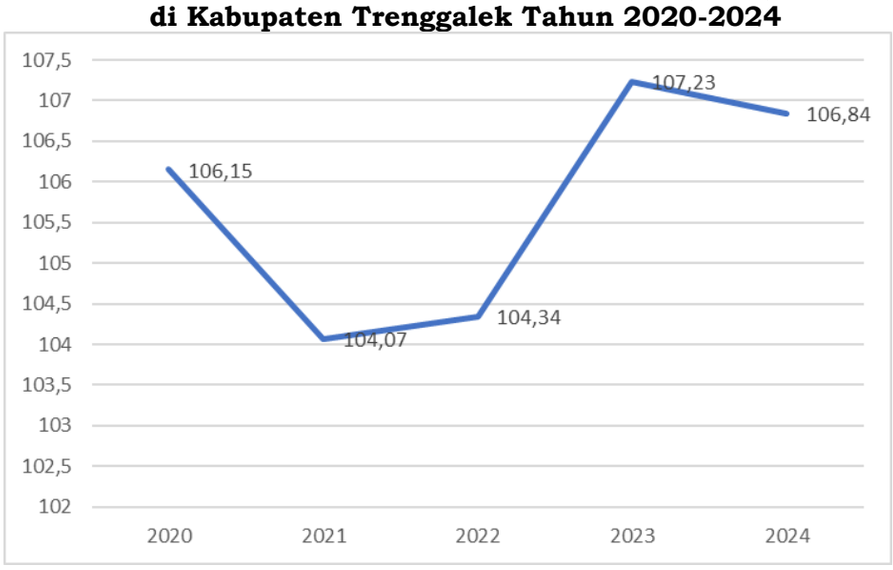
$$NTPi = \frac{It}{Ib} \times 100$$

Keterangan :

- **It** = *Indeks harga yang diterima pembudidaya ikan* → menggambarkan harga rata-rata produk hasil budidaya yang dijual.
- **Ib** = *Indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan* → mencakup harga barang dan jasa untuk konsumsi rumah tangga serta biaya produksi/budidaya (input, pakan, benih, obat, peralatan).
- **100** = angka dasar (jika NTPi = 100 berarti pendapatan sama dengan pengeluaran).

Jika NTPi di atas 100, berarti rumah tangga pembudidaya ikan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan non primernya atau menabung. Jika NTPi berada di kisaran 100 atau sama dengan 100, berarti rumah tangga pembudidaya ikan yang bersangkutan hanya mampu mencukupi kebutuhan primernya saja. Jika NTPi berada di bawah 100, berarti rumah tangga pembudidaya ikan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya serta mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya.

Grafik II.63
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat diuraikan sebagai berikut : Nilai NTPi 106,84 menunjukkan bahwa kesejahteraan pembudidaya ikan masih relatif baik karena nilai berada di atas 100. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan dikarenakan harga komoditas ikan budidaya air tawar mengalami penurunan, akan tetapi harga pakan terus mengalami kenaikan. Penyebab

utama penurunan yaitu Harga input (biaya produksi dan barang modal) meningkat, terutama pada pakan ikan. Harga output (hasil panen) relatif stabil atau sedikit turun pada beberapa komoditas. Dampaknya margin keuntungan pembudidaya berkurang, meskipun masih positif.

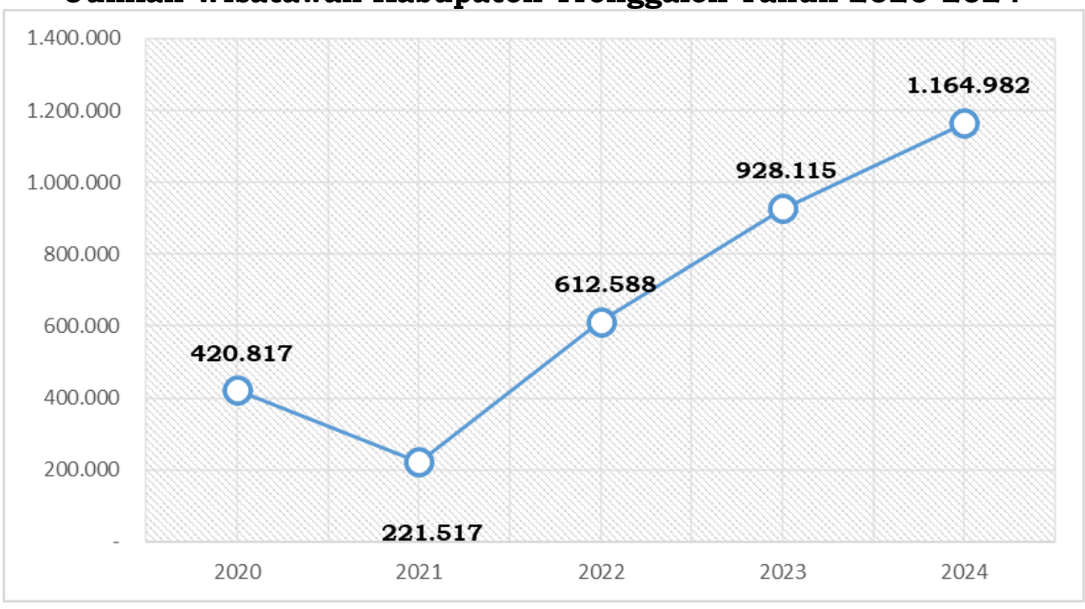
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penurunan harga ikan antara lain dengan mengoptimalkan waktu panen, meningkatkan kualitas ikan, menjalin kerjasama yang baik dengan mitra, serta diversifikasi produk olahan ikan untuk meningkatkan nilai jual.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan adalah indikator yang menunjukkan jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dari tahun ke tahun. Jumlah wisatawan sangat dipengaruhi oleh atraksi, aksesibilitas dan amenitas pariwisata, ekosistem industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif serta pemasaran pariwisata. Jumlah wisatawan merupakan variabel penting dalam sektor pariwisata Kabupaten Trenggalek karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung dapat mengungkit dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor lainnya di Kabupaten Trenggalek. Adapun perkembangan jumlah wisatawan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.64
Jumlah Wisatawan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2025

Pada tahun 2024, jumlah wisatawan tercatat sebanyak 1.164.982 orang, melampaui target yang ditetapkan yaitu 800.000 orang. Pada tahun 2023 jumlah wisatawan sebanyak 928.115 orang, tahun 2022 sebanyak 612.588 orang, tahun 2021 sebanyak 221.517 orang dan tahun 2020 sebesar 420.817 orang. Pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan jumlah wisatawan akibat terjadinya pandemi COVID-19 dimana diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Namun secara umum dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah wisatawan pada periode

tahun tersebut disebabkan antara lain antusiasme masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata mulai meningkat signifikan sejak tahun 2022 ketika pembatasan aktivitas sosial mulai dilonggarkan. Secara lebih khusus kenaikan jumlah wisatawan secara signifikan juga terjadi di pertengahan tahun 2023 karena jalur JLS Tulungagung-Trenggalek mulai dibuka. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan tren berwisata di alam (*outdoor)* dan *staycation* yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani (komoditas Tanaman hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan). NTP bisa di artikan sebagai tolak ukur untuk melihat kemampuan keluarga petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan harga yang diterima petani (IT) dengan harga yang dibayar petani (IB). Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Trenggalek merupakan rata-rata keseluruhan nilai Tukar petani pada sektor Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang menjadi nilai akhir perhitungan NTP.

NTP dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTP = \frac{[T}{[B} \times 100$$

Dimana:
IT : Indeks harga yang diterima petani
IB : Indeks harga yang dibayar petani

NTP > 100 mempunyai arti petani mengalami surplus yaitu hasil produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Nilai ini menggambarkan bahwa rumah tangga petani mempunyai tingkat kesejahteraan cukup, dan mempunyai kesempatan untuk menabung. Untuk nilai NTP= 100 mempunyai arti bahwa petani mengalami impas, dimana harga produksi dan tingkat konsumsi kurang lebih sama, sehingga didapati kesimpulan bahwa keluarga petani hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Sedangkan NTP<100 mempunyai arti bahwa petani mengalami defisit dimana harga produksi lebih kecil dibandingkan tingkat konsumsinya, sehingga tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan.

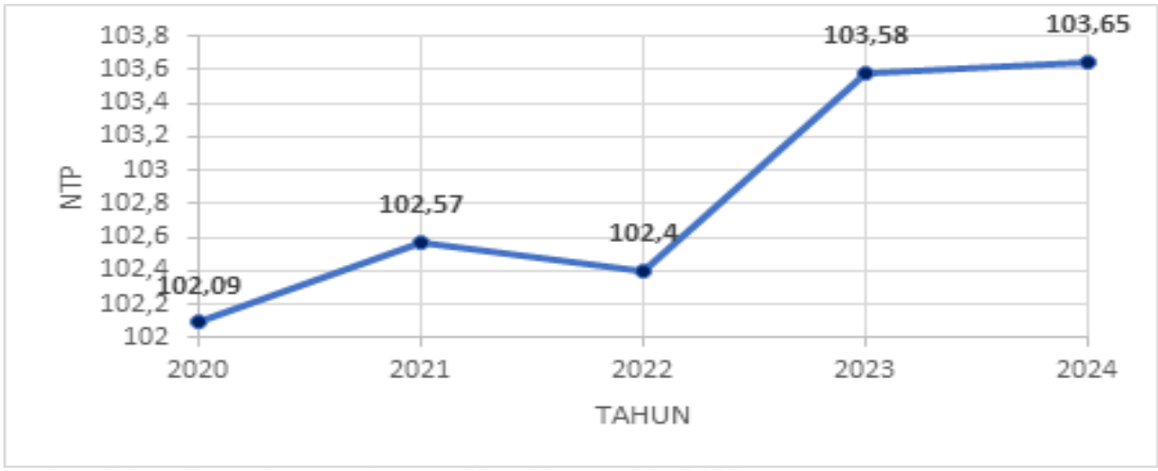
Tabel II.75

Nilai Tukar Petani (NTP)	2020	2021	2022	2023	2024
	102,09	102,57	102,40	103,58	103,65

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2025

Grafik II.65
Nilai Tukar Petani (NTP)
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2025

Perhitungan NTP pada tahun 2020 dan tahun 2021 menggunakan 4 sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, namun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 hanya menggunakan 3 sektor meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan karena sektor peternakan dihitung secara terpisah dan dilaksanakan oleh instansi terkait (Dinas Peternakan).

Nilai Tukar Petani dalam kurun waktu tahun 2020-2024 relatif meningkat, kecuali pada tahun 2022 menurun sebanyak 0,17 poin dibandingkan tahun 2021 yang diantaranya disebabkan oleh 1) perubahan jumlah sektor, 2) Kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan modal produksi mengalami peningkatan, sedangkan harga jual produk tetap (stagnan) dan cenderung turun, 3) perubahan kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 yang awalnya dialokasikan untuk 69 komoditas menjadi 9 komoditas sehingga petani yang melakukan budidaya diluar 9 komoditas tersebut mengalami peningkatan biaya produksi.

Tabel II.76
Nilai Tukar Petani Agregat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No.	Nilai Tukar Petani	Total Pengeluaran (rupiah per bulan)	Total Pemasukan			2024	
			Pendapatan pada sektor pertanian	Pendapatan bidang lain	Total pemasukan per bulan	NTP Murni	INTP
1	Tanaman Pangan	6,597,258	6,860,630	931,713	7,792,342	103,99	118,11
2	Hortikultura	6,066,434	6,249,727	838,830	7,088,557	103,02	116,85
3	Perkebunan	7,418,377	7,705,282	1,218,476	8,923,758	103,87	120,29
Kab. Trenggalek		**6,694,023**	**6,938,546**	**996,340**	**7,934,886**	**103,65**	**118,54**

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Tukar Petani Agregat, maka dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran petani (per bulan) di Kabupaten Trenggalek tahun 2024 adalah Rp.6.694.023,00. Sedangkan rata-rata pemasukan petani (perbulan) adalah Rp.7.934.886,00. Pendapatan tersebut secara rinci terbagi menjadi 2 bagian, yakni rata-rata pemasukan sektor pertanian sebesar Rp.6.938.546,00 dan pendapatan pada bidang lain sebesar

Rp.996.340,00. Secara rata-rata petani di Kabupaten Trenggalek memiliki pemasukan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluarannya.

Sektor tanaman pangan memiliki NTP murni paling besar dibandingkan dua sektor lainnya sebesar 103,99 disusul sektor perkebunan sebesar 103,87 di urutan kedua dan sektor hortikultura sebesar 103,02 di urutan ketiga. Namun demikian apabila melihat nilai INTP nya, sektor perkebunan memiliki nilai tertinggi yaitu 120,29 yang menandakan bahwa margin keuntungan atau selisih antara total pemasukan dengan total pengeluaran paling besar. Artinya sektor perkebunan memiliki peluang paling besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama dari pendapatan bidang lain.

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat petani (sektor komoditas peternakan) secara relatif. Oleh karena indikator tersebut juga merupakan ukuran untuk melihat kemampuan keluarga peternak untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Nilai NTPT didefinisikan sebagai nisbah antara harga yang diterima peternak (HT) dengan harga yang dibayar peternak (HB). Adapun, NTPT di Kabupaten Trenggalek merupakan rata-rata keseluruhan nilai tukar petani peternakan pada subsektor Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas, dan Aneka Ternak, yang menjadi nilai akhir atau kesimpulan dari seluruh perhitungan NTPT.

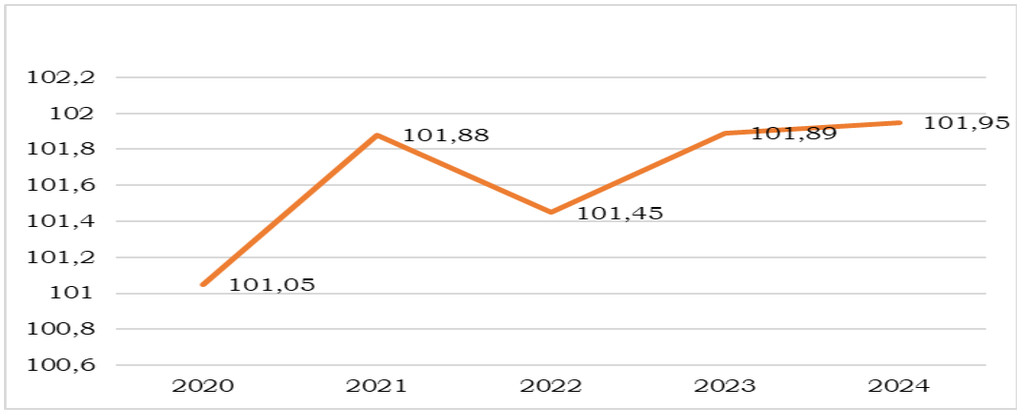
Tabel II.77
NTPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	2020	2021	2022	2023	2024
	101,05	101,88	101,45	101,89	101,95

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, NTPT menunjukkan tren yang fluktuatif dengan nilai NTPT > 100. Pada tahun 2020, NTPT tercatat sebesar 101,05 kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 101,88. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 101,45 yang dapat mengindikasikan adanya kenaikan biaya produksi atau penurunan harga jual hasil ternak pada periode tersebut. Memasuki tahun 2023, NTPT kembali naik menjadi 101,89 dan terus mengalami peningkatan tipis pada tahun 2024 menjadi 101,95. Kenaikan yang cenderung lambat pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan peternak berjalan positif, namun masih terbatas. Secara keseluruhan, meskipun kondisi peternak berada dalam posisi surplus, margin keuntungan relatif tipis (sekitar 1–2%), sehingga masih rentan terhadap gejolak harga pakan, bibit, maupun fluktuasi harga jual hasil ternak.

Grafik II.66
NTPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Peternakan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Adapun secara teori, NTPT > 100 berarti peternak mengalami surplus yang mana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Begitu juga pendapatan peternak naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai ini memberikan gambaran rumah tangga peternak yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan lainnya atau menabung.

Apabila NTPT = 100 berarti peternak mengalami impas yaitu kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang yang dikonsumsi. NTPT =100, menggambarkan rumah tangga peternak yang bersangkutan hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasionalnya saja. Sedangkan, NTPT < 100 berarti peternak mengalami defisit yang artinya kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang konsumsinya. Selain itu pendapatan peternak lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Gambarannya, jika NTPT berada di bawah 100, berarti rumah tangga peternak yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasional serta mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya.

Tabel II.78
NTPT Agregat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No	Sub Sektor	Total Pengeluaran (Per Bulan)	Total Pemasukan			2024	
			Pendapatan Peternakan	Pendapatan Bidang Lain	Total Pemasukan (per bulan)	NTPT Murni	INTPT (Indeks Nilai Tukar Petani Peternakan)
1.	Ternak Besar	10.831.358	11.137.081	1.029.583	12.166.664	102,82	112,33
2.	Ternak Kecil	9.800.870	9.974.932	942.389	10.917.321	101,78	111,39
3.	Unggas	67.528.246	68.819.411	1.652.481	70.471.892	101,91	104,36
4.	Aneka Ternak	11.683.604	11.859.015	1.337.121	13.196.136	101,50	112,95
Kabupaten Trenggalek		24.961.019	25.447.610	1.240.394	26.688.003	101,95	106,92

Sumber: Dinas Peternakan Kab.Trenggalek, 2025 (diolah)

Ditinjau dari NTPT Agregat tahun 2024 diketahui bahwa rata-rata pengeluaran peternak (per bulan) tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek adalah Rp.24.961.019,00. Sedangkan rata-rata pemasukan peternak (per bulan) adalah Rp.26.688.003,00. Pendapatan tersebut secara rinci terbagi menjadi 2 bagian, yakni rata-rata pemasukan sektor peternakan sebesar Rp.25.447.610,00 dan pendapatan pada bidang lain sebesar Rp.1.240.394,00. Secara rata-rata peternak di Kabupaten Trenggalek memiliki pemasukan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluarannya. Melalui hasil rata-rata pengeluaran dan pemasukan tersebut, maka dapat dihitung nilai agregat NTPT Kabupaten Trenggalek. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa NTPT Murni Agregat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah sebesar 101,95 dan INTPT adalah sebesar 106,92. Data tahun 2024 dari seluruh subsektor peternakan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan NTPT di atas 100, yang berarti pendapatan peternak dari usaha peternakan masih mampu menutupi seluruh pengeluaran usahanya. Secara agregat, NTPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 101,95 menunjukkan surplus tipis dengan selisih sekitar 1,95% di atas pengeluaran.

Subsektor ternak besar memiliki NTPT tertinggi, yaitu 102,82 dengan total pemasukan sebesar Rp12,16 juta per bulan. Hal ini menandakan bahwa pendapatan dari usaha ternak besar relatif lebih menguntungkan dibanding subsektor lain, apalagi jika ditambah pendapatan di luar peternakan yang mendorong INTPT menjadi 112,33. Selanjutnya, subsektor unggas, meskipun memiliki skala nilai ekonomi terbesar dengan pemasukan total mencapai Rp70,47 juta per bulan, hanya mencatat NTPT 101,91. Kenaikan daya beli (INTPT) di subsektor ini juga relatif kecil, yakni 104,36 yang mengindikasikan bahwa tambahan pendapatan di luar peternakan unggas tidak terlalu besar. Subsektor ternak kecil dan aneka ternak sama-sama memiliki NTPT di kisaran 101,50–101,78, yang berarti margin keuntungan dari usaha murni peternakan sangat tipis. Namun, ketika pendapatan dari bidang lain diperhitungkan, daya beli peternak meningkat cukup signifikan, terutama pada subsektor aneka ternak yang mencapai INTPT 112,95.

Meskipun kondisi peternak di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 berada dalam posisi surplus, margin keuntungan yang tipis membuat mereka rentan terhadap kenaikan harga input seperti pakan, obat-obatan, dan bibit. Upaya yang strategis diperlukan untuk menekan biaya produksi melalui efisiensi usaha, memperluas akses pasar untuk meningkatkan harga jual, serta mendorong diversifikasi sumber pendapatan agar daya beli dan kesejahteraan peternak dapat meningkat secara lebih signifikan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Persentase pertumbuhan ekspor non-migas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan nilai ekspor komoditas non-migas dari suatu periode ke periode berikutnya. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai ekspor non-migas pada periode berjalan terhadap nilai ekspor non-migas pada periode sebelumnya, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila persentase yang

diperoleh menunjukkan nilai positif, maka hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan kinerja ekspor non-migas. Sebaliknya, apabila persentasenya bernilai negatif, maka menunjukkan adanya penurunan aktivitas ekspor non-migas dibandingkan periode sebelumnya. Indikator ini memiliki signifikansi strategis karena dapat digunakan untuk menilai dinamika perdagangan internasional, mengevaluasi daya saing produk nasional di pasar global, serta menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan perdagangan.

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas (%) = (nilai ekspor pada tahun berkenaan (n)-nilai ekspor tahun sebelumnya (n-1)/nilai ekspor tahun dasar)*100

Tabel II.79
Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 – 2024

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas	2020	2021	2022	2023	2024
	NA	NA	10,71	265,95	36,93

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekspor non-migas Kabupaten Trenggalek menunjukkan dinamika yang signifikan. Setelah mulai tumbuh sebesar 10,71% pada 2022, ekspor melonjak tajam hingga **265,95% pada 2023**, menandai akselerasi luar biasa dalam kinerja perdagangan luar negeri. Memasuki tahun **2024**, pertumbuhan melambat menjadi **36,93%**, namun tetap menunjukkan tren positif dengan basis nilai ekspor yang semakin besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekspor non-migas Trenggalek berada pada jalur peningkatan yang menjanjikan, meskipun diperlukan langkah strategis untuk menjaga konsistensi pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Realisasi rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2020-2024 memiliki tren meningkat, yaitu berturut-turut sebesar 16,82 pada tahun 2020, 17,98

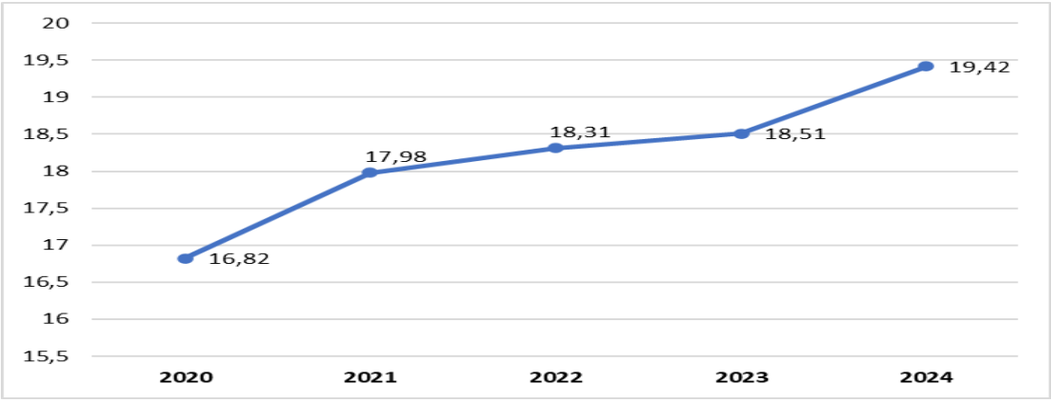
pada tahun 2021, 18,31 pada tahun 2022, 18,51 pada tahun 2023 dan 19,42 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peran lapangan usaha industri pengolahan terhadap perekonomian di Kabupaten Trenggalek cukup besar dan memiliki pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Selama 3 tahun terakhir, industri pengolahan juga menjadi 3 besar lapangan usaha yang mensupport perekonomian Trenggalek. Beberapa program yang diidentifikasi mendukung pengembangan industri antara lain Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Berikut adalah grafik pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel II.80
Rasio PDRB Industri Pengolahan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Rasio PDRB Industri Pengolahan	2020	2021	2022	2023	2024
	16,82	17,98	18,31	18,51	19,42

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Grafik II.67
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Persentase Transmigran yang Tidak Meninggalkan Daerah Penempatan

Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. Penempatan transmigran merupakan upaya dalam rangka menyukseskan program transmigrasi. Beberapa hal yang menyebabkan warga Kabupaten Trenggalek tertarik untuk mengikuti transmigrasi antara lain karena calon transmigran tidak memiliki lahan usaha (bertani) maupun tempat tinggal serta sulit mencari lapangan pekerjaan dan juga didorong keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sebenarnya animo masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti program transmigrasi tetapi alokasi dari pemerintah masih rendah dan belum sesuai dengan animo masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kuota penempatan transmigrasi dibanding jumlah calon transmigran, kurangnya informasi potensi lokasi transmigrasi yang akan dituju serta lokasi

tujuan transmigrasi yang ditentukan berbeda dengan lokasi yang diminati oleh pendaftar transmigrasi.

Sejak tahun 2020-2024 jumlah transmigran dari Kabupaten Trenggalek yang telah ditempatkan sebanyak 19 KK. Lokasi penempatan berada di beberapa daerah di Sulawesi sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.81
Data Penempatan Transmigran Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH KUOTA	TUJUAN	JUMLAH PENEMPATAN
1	2020	0	Tidak ada penempatan karena pandemi COVID - 19	0
2	2021	8 KK	UPT Salulisu Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	8 KK
3	2022	7 KK	- UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan - UPT Raimuna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara	5 KK 2 KK
4	2023	2 KK	UPT Wala Lagading Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan	2 KK
5	2024	2 KK	UPT Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah	2 KK
JUMLAH		**19 KK**		**19 KK**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah transmigran yang ditempatkan terpenuhi 100% sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2020 tidak ada penempatan transmigran dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tingkat keberhasilan berdasarkan indikator persentase transmigran yang tidak meninggalkan lokasi penempatan juga menunjukkan angka 100% dimana sampai dengan saat ini tidak ada transmigran yang meninggalkan lokasi penempatan.

Tabel II.82
Persentase Transmigran yang Tidak Meninggalkan Daerah Penempatan

Indikator kinerja	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2025

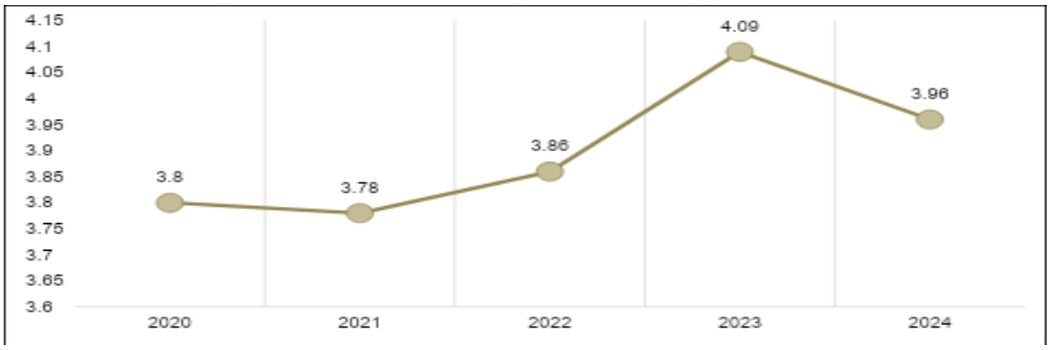
EE. SEKRETARIAT DAERAH

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penting yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik dengan mengacu pada beberapa komponen utama seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi pelayanan. Penilaian IPP dilakukan secara sistematis melalui survei kepuasan masyarakat dan evaluasi internal yang menghasilkan skor indeks, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan, sehingga pemerintah dapat merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, IPP berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik demi memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan efisien.

Grafik II.68
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

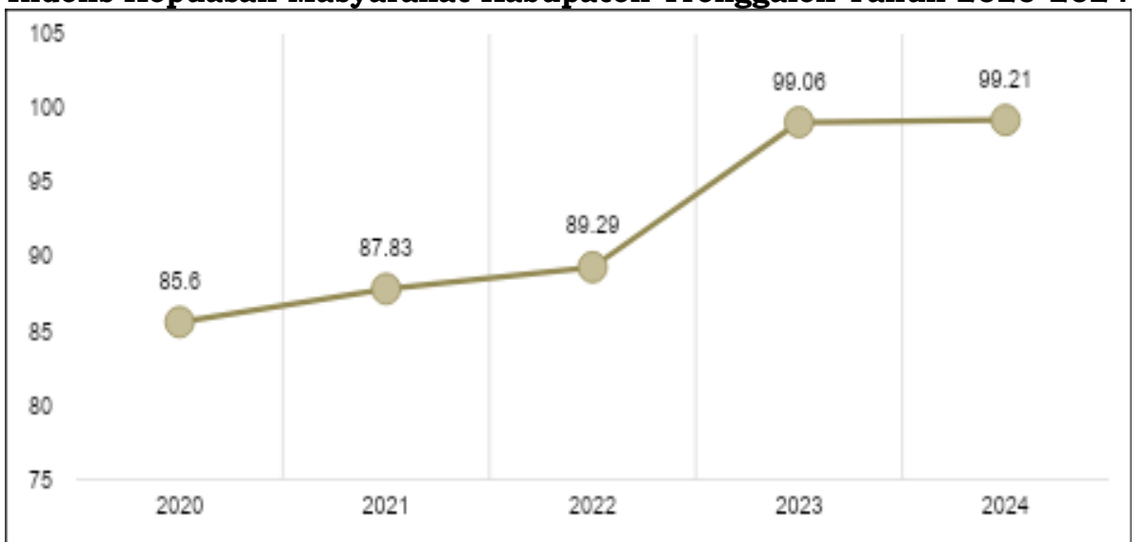


Sumber: KemenPANRB, 2025

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2020 hingga 2023, dengan nilai yang sempat naik dari 3,80 pada 2020 menjadi puncaknya 4,09 pada 2023. Pada tahun 2024, meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 3,96, dikarenakan adanya penambahan penilaian melalui google review yang dialami pada RSUD dr. Soedomo, capaian ini tetap berada dalam kategori "Baik" menurut standar penilaian pelayanan publik. Hasil ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta aksesibilitas yang terus dioptimalkan.

Peningkatan IPP ini didukung oleh berbagai langkah strategis, seperti pelaksanaan survei kepuasan masyarakat oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aktif membuka kanal komunikasi publik melalui media sosial. Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi wujud transformasi layanan yang mempercepat integrasi layanan lintas sektor dan mempermudah proses berusaha bagi masyarakat. Inovasi pelayanan seperti "Kenek Beraksi" yang berhasil menjadi finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 juga menunjukkan bahwa Trenggalek tidak hanya fokus pada peningkatan angka indeks, tetapi juga pada transformasi budaya pelayanan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Grafik II.69
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



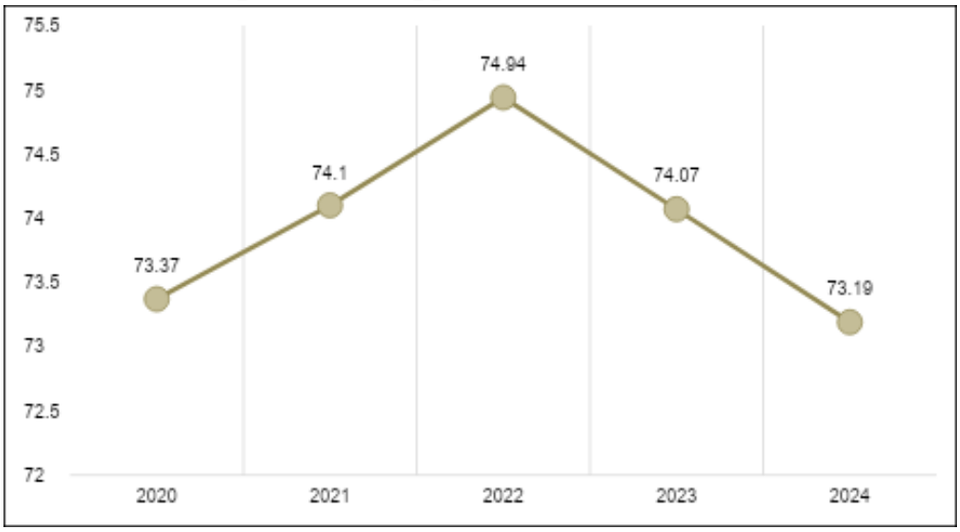
Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar 85,6. Pada tahun 2021, IKM mengalami kenaikan sebesar 2,23 menjadi 87,83, dan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 1,46 menjadi 89,29. Tahun 2023, IKM naik signifikan menjadi 99,06, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan lagi menjadi 99,21.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Selain itu, dalam rangka mengukur kinerja instansi pemerintah, ditetapkan aturan terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja instansi tersebut. Nilai SAKIP diberikan berdasarkan skala tertentu, dan predikat yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Grafik II.70
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPANRB, 2025

Laporan kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 sebesar 73,37. Pada tahun 2021, nilai tersebut naik sebesar 0,73 menjadi 74,10. Sedangkan pada tahun 2022, kembali meningkat sebesar 0,84 menjadi 74,94. Namun, pada tahun 2023, nilai mengalami sedikit penurunan menjadi 74,07, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 73,19. Meskipun mengalami penurunan tetapi implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

FF. SEKRETARIAT DPRD

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan eksekutif dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan. Sehingga pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD harus meningkat kualitasnya. Nilai kepuasan Anggota DPRD merupakan angka yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan yang disampaikan dan diisi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Mulai tahun 2021, kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan Sekretariat DPRD yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD semakin baik. Persentase kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Gambaran perkembangan pelaksanaan urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Trenggalek sebagaimana pada grafik berikut ini:

Grafik II.71
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Trenggalek, 2024

GG. PERENCANAAN

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD yang ditentukan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan yang dirumuskan berdasarkan jumlah program pada Perubahan RKPD yang selaras dengan program RPJMD pada tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan, keselarasan RKPD dengan Renja OPD serta keselarasan RKPD dengan DPA OPD. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pada tahun 2021-2022 terealisasi 100% dan pada tahun 2023-2024 terealisasi sebesar 99,89%, dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait kewenangan pelaksanaan program pembangunan. Program Pengelolaan Izin Lokasi pada urusan pertanahan, mulai tahun 2022 menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga mulai tahun 2022 program tersebut tidak digunakan pada penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek.

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kabupaten Trenggalek pada RPJMD Tahun 2025-2029 akan tetap dihitung namun dengan formula yang berbeda dibandingkan perhitungan tahun-tahun sebelumnya. IPPD tersebut dirumuskan dengan mengacu pada pola perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang dihitung oleh BAPPENAS. Dimana IPPN digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Provinsi, belum sampai level kabupaten/ kota, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

IPPD Kabupaten Trenggalek diukur melalui 3 Aspek yakni sinergi, kualitas perencanaan, dan keterhubungan perencanaan. Adapun pada tahun 2024, Indeks Perencanaan sebesar 84.

HH. KEUANGAN

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, terutama dalam bentuk dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai belanja pemerintahannya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah, yang dapat berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk merancang kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu fokus dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, guna mendorong kemandirian dan daya tahan fiskal dalam jangka panjang.

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 sd 2023 berturut-turut tahun 2021 sebesar 65,73%, tahun 2022 sebesar 63,56%, tahun 2023 sebesar 65,92%. Pada tahun 2024, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 66,82%. Nilai ini menjadi baseline yang menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan perlunya strategi komprehensif untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui penguatan PAD, efisiensi belanja, dan inovasi pembiayaan daerah.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan indikator yang menilai pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang berkomitmen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. Kepatuhan terhadap praturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK yakni:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali

untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Menolak memberikan opini (disclaimer) yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel II.83
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

Tahun	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Inspektorat Kab. Trenggalek, 2025

II. KEPEGAWAIAN

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) ASN. Sistem merit itu sendiri merujuk pada sistem yang menekankan pada kompetensi, kualifikasi, dan prestasi sebagai dasar dalam penempatan, pengangkatan, pengembangan karier, serta pemberhentian ASN.

Penggunaan Indeks Sistem Merit memiliki berbagai manfaat, diantaranya untuk meningkatkan profesionalisme ASN karena penilaian dan pengembangan karier didasarkan pada kompetensi dan kinerja, menjamin pemerataan kesempatan bagi ASN dalam pengembangan karier, tanpa terhalang oleh faktor-faktor eksternal seperti hubungan pribadi atau politis. Serta memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN di instansi pemerintahan.

Tabel II.84
Indeks Sistem Merit Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Merit	162,5	256	283	283

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2025

jj. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dimensi Kompetensi merupakan alat ukur penting untuk menilai sejauh mana kualitas, kinerja, dan perilaku ASN sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu dimensi utama

dalam pengukuran indeks ini adalah dimensi kompetensi, yang menilai kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya secara efektif. Dalam kerangka pembangunan daerah, peningkatan kompetensi ASN menjadi krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan, termasuk implementasi kebijakan yang berbasis data, transparansi birokrasi, serta inovasi pelayanan. Adapun capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dimensi Kompetensi Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebesar 26,21. Adapun realisasi Indeks Profesionalitas ASN dimensi kompetensi tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.85
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	33,00	33,45	40,83	58,60	26,21

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2025

JJ. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Penggunaan bukti dalam pengambilan kebijakan (evidence based policy) dewasa ini semakin dinilai sangat penting dan menjadi tuntutan. Salah satu dasar bukti kebijakan yang mampu mengilmiahkan kebijakan adalah hasil penelitian. Penggunaan hasil penelitian yang tidak akurat dalam pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan kebijakan. Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan para pengambil kebijakan, namun demikian masih diperlukan upaya untuk memastikan agar penelitian dapat diakses oleh para pembuat kebijakan sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan secara lebih efektif.

Demikian halnya di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dalam proses perencanaan Pembangunan daerah diupayakan didukung dengan adanya kajian-kajian sebagai dasar penentuan kebijakan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2021-2024 telah dihasilkan beberapa kajian dan telah menjadi dasar dalam proses perencanaan hingga penentuan kebijakan daerah, diantaranya sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.86
Kajian Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2024

No	Judul Kajian	Tahun Penyusunan
1	Studi Kelayakan Pengembangan Panggul Little Jogja	2021
2	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage	2022
3	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Durenan	2022
4	Keberdayaan Gender di Sektor Wisata: Solusi Feminisasi Kemiskinan?	2022
5	Prediksi Dampak Pengembangan Rumah Sakit Terhadap Aspek Ekonomi Dan Kinerja Pelayanan Kesehatan	2022
6	Studi pada Pengembangan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	2022
7	Naskah Akademik RPJPD 2025-2045	2023
8	Penentuan Produk Unggulan Daerah Dalam Perspektif Penta Helix Di Kabupaten Trenggalek	2023
9	Background Study RPJMD Tahun 2025-2029 Lingkup Ekosda	2024
10	Naskah akademik RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	2024
11	Background Study RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2024
12	Background Study RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 Bidang Infraswil	2024

Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2025

KK. INSPEKTORAT DAERAH

Indeks Integritas

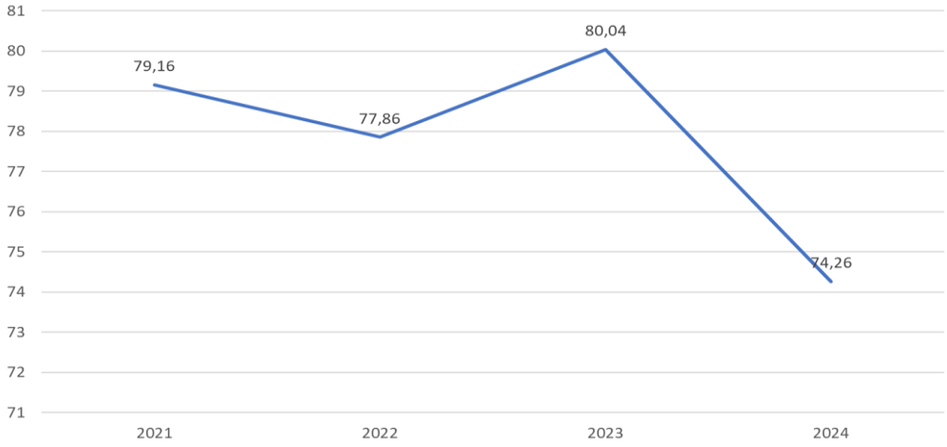
Indeks integritas dan transparansi dalam pemerintahan serta pelayanan publik merupakan ukuran penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peningkatan dalam indikator ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.

Indeks Integritas merupakan indeks yang dihasilkan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yaitu ukuran yang digunakan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun daerah. Pengukurannya mencakup pengukuran persepsi dan pengalaman masyarakat (pengguna layanan), pegawai, serta ahli mengenai integritas instansi tersebut

dalam berbagai aspek, seperti pelayanan, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan.

Indeks Integritas diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Program SPI diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi dan meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik. Dengan melibatkan pegawai pemerintah, masyarakat pengguna layanan, dan para pakar yang terampil dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah, SPI diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat integritas dan potensi risiko korupsi pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Grafik II.72
Indeks Integritas (Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI))
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2025

Data terkait tingkat integritas dan transparansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Hasil menunjukkan nilai berturut-turut sebesar 79,16 di tahun 2021, sedikit menurun menjadi 77,86 pada 2022, meningkat menjadi 80,04 pada 2023, dan kembali menurun menjadi 74,26 pada 2024. Penurunan yang terjadi pada 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya respon dari beberapa pihak dalam sampel SPI, baik dari sisi pemahaman responden maupun ketepatan waktu pengisian/pengiriman survei.

LL. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indeks Harmoni Indonesia (IHI)

Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah sebuah metrik komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Indeks ini juga sering digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi situasi sosial, serta sebagai dasar untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam mempromosikan harmoni dan persatuan di tengah keragaman masyarakat. Perhitungan Indeks Harmoni dimulai tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat (2), Posyandu tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mendukung transformasi ini, seluruh perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap SPM perlu terlibat aktif dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing. Tujuan utama dari transformasi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, tidak hanya terbatas pada kesehatan ibu dan anak

1. Pendidikan

Berdasarkan Permendagri nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022, indikator SPM Pendidikan digunakan pemerintah daerah sebagai referensi perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kualitas pendidikan. Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan adalah jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Oleh sebab itu, visi besar Transformasi Pendidikan Indonesia akan tercapai dengan terpenuhinya SPM Pendidikan di daerah. Transformasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada semua warga negara, yang menjadi fokus dalam transformasi SPM di pendidikan meliputi : Akses Pendidikan, Fasilitas dan Infrastruktur, Partisipasi sekolah, Kualitas Pengajaran, Kualitas lingkungan sekolah, dan kualitas pendidik. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, transformasi SPM pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan inklusif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui perwujudan SPM, pemerintah daerah dituntut untuk tidak lagi sekadar menyediakan layanan, tetapi menjamin mutu dan

pemerataan layanan dasar. Ini adalah transformasi besar dari orientasi birokrasi administratif menuju birokrasi yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat paling mendasar. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024.

Tabel II.87
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	N/A	N/A	N/A	N/A	82,25
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	N/A	N/A	84,99	81,40	81,10
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	N/A	N/A	N/A	76,24	85,48
2	Pendidikan Dasar	Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS	N/A	97,02	94,13	99,17	99,18
		Kemampuan literasi SD	N/A	1,68	1,88	85,73	70,07
		Kemampuan numerasi SD	N/A	1,52	1,58	69,75	60,55
		Indeks iklim keamanan SD	N/A	2,35	71,15	71,65	77,78
		Indeks iklim kebhinekaan SD	N/A	2,25	60,98	70,91	74,16
		Indeks iklim inklusivitas SD	N/A	2,06	55,27	57,52	61,63
		Kemampuan literasi SMP	N/A	1.89	1.91	77,63	76,72
		Kemampuan numerasi SMP	N/A	1.70	1.74	54,92	67,17
		Indeks iklim keamanan SMP	N/A	2,43	73,72	68,41	70,73
		Indeks iklim kebhinekaan SMP	N/A	2,36	60,07	68,27	70,40
		Indeks iklim inklusivitas SMP	N/A	2,02	53,32	55,12	58,11
2	Pendidikan Kesetaraan	Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	N/A	N/A	N/A	N/A	14,71

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2025

2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. SPM Bidang Urusan Kesehatan untuk Kabupaten/Kota ada 12 (dua belas) jenis layanan. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024.

Tabel II.88
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	94,5	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100	100	91,86	100	100,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	100	100	100	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	82,07	100	100,00
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	100	100	96,94	96,39
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100	100	98,58	92,2	98,69
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	78,36	95,19	100	96

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	90,75	77,82	100	99,40
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	81,02	97,57	104,22	100	99,10
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	124,96	100,64	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100	100	89,41	100	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	"Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang	100	102,2	86,25	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2025

3. Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pekerjaan Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023. Jenis pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum kewenangan Kabupaten Kota terdiri atas Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Capaian penerapan SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang diukur dengan indikator jumlah warga negara yang terlayani serta jumlah mutu barang/jasa dari ukuran kuantitas dan kualitas. Upaya pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Sedangkan capaian penerapan SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik juga diukur dengan indikator jumlah warga negara yang terlayani serta jumlah mutu barang/jasa dari ukuran kuantitas dan kualitas. Upaya pemenuhan Kualitas Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Berikut

capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024.

Tabel II.89
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok- pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, 2025
(Laporan SPM Kab. Trenggalek 2020-2024)

4. Perumahan Rakyat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pekerjaan Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023. Jenis pelayanan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat kewenangan Kabupaten/Kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga negara yang harus dilayani serta jumlah mutu barang/jasa/sumber daya manusia seperti rehabilitasi/pembangunan/permukiman kembali/bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah warga negara yang harus dilayani serta jumlah mutu barang/jasa/sumber daya manusia seperti fasilitasi penggantian hak atas tanah/bangunan, bantuan akses rumah sewa layak huni. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024.

Tabel II.90
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persentase Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak Ada	0%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Persentase warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi	Tidak Ada	Tidak Ada	0%	100%	0%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, 2025
(Laporan SPM Kab. Trenggalek 2020-2024)

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungnan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024.

Tabel II.91
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, 2025
(*Laporan SPM Kab. Trenggalek 2020-2024)*

6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Bab III Pasal 26 SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024.

Tabel II.92
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 -2024

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti	Persentase warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar Panti	Persentase anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Persentase warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Persentase warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase korban Bencana skala Kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, 2025
(Laporan SPM Kab. Trenggalek 2020-2024)

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *the Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India**,** Indonesia, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat.

Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh

5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan gradually menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Trenggalek adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil sepeda motor. Dengan demikian, ekonomi Kabupaten Trenggalek masih bergantung pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian, komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, ketela pohon. Tanaman Hortikultura adalah durian, manggis, alpukat, cabai, jahe dan bawang merah, serta tanaman perkebunan meliputi kopi, kakao, kelapa, cengkeh, tembakau dan nilam. Oleh karena itu tantangan ekonomi Kabupaten Trenggalek adalah diversifikasi ekonomi sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor khususnya ekstraktif. Untuk itu membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan pelabuhan, dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong investasi.

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi yang ditandai dengan tren naik dari tahun 2020 (14,09%) sampai tahun 2021 (12,55%) hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sampai menyentuh pada 20,65%. kemudian pada tahun 2023 mulai ada penurunan kembali menjadi 14,21% lalu ada kenaikan yang sedikit signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 14,23%. Secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) DOFD Kabupaten Trenggalek berada di 15,24% masih masuk di kategori 'Kurang'.

Fluktuasi DOFD tersebut dipengaruhi oleh belum konsistennya kekuatan/capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali dan optimalisasi sumber-sumber PAD dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.94
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Trenggalek, Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	257,977,450,484	1,831,177,618,128	14,09
2	2021	233,490,679,201	1,859,926,435,397	12,55
3	2022	422,488,717,358	2,046,436,048,933	20,65
4	2023	267,177,163,229	1,879,855,240,414	14,21
5	2024	281,233,905,461	1,976,717,300,282	14,23
Rata-Rata		292,473,583,146	1,918,822,528,631	15,24

Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

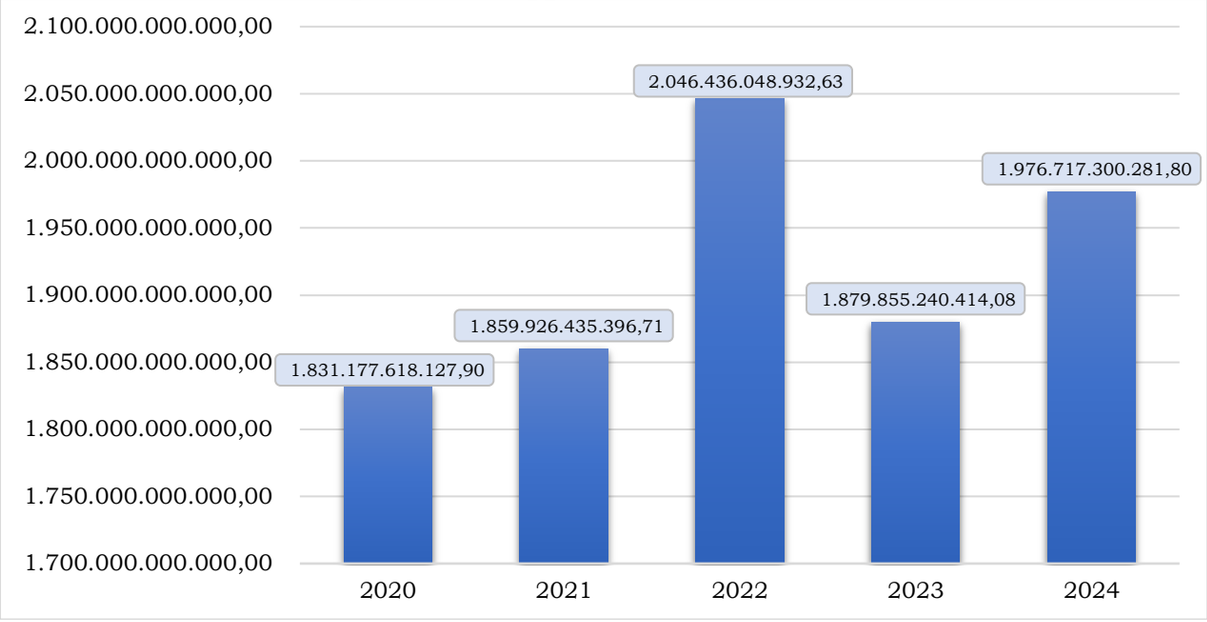
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan Pendapatan Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi tetapi masih dalam tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 1,93% per tahun, di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 1,831 triliun menjadi Rp. 1,976 triliun di tahun 2024, yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer.

Adapun capaian Pendapatan Daerah tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp. 2,046 triliun, didorong oleh meningkatnya dana transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA.

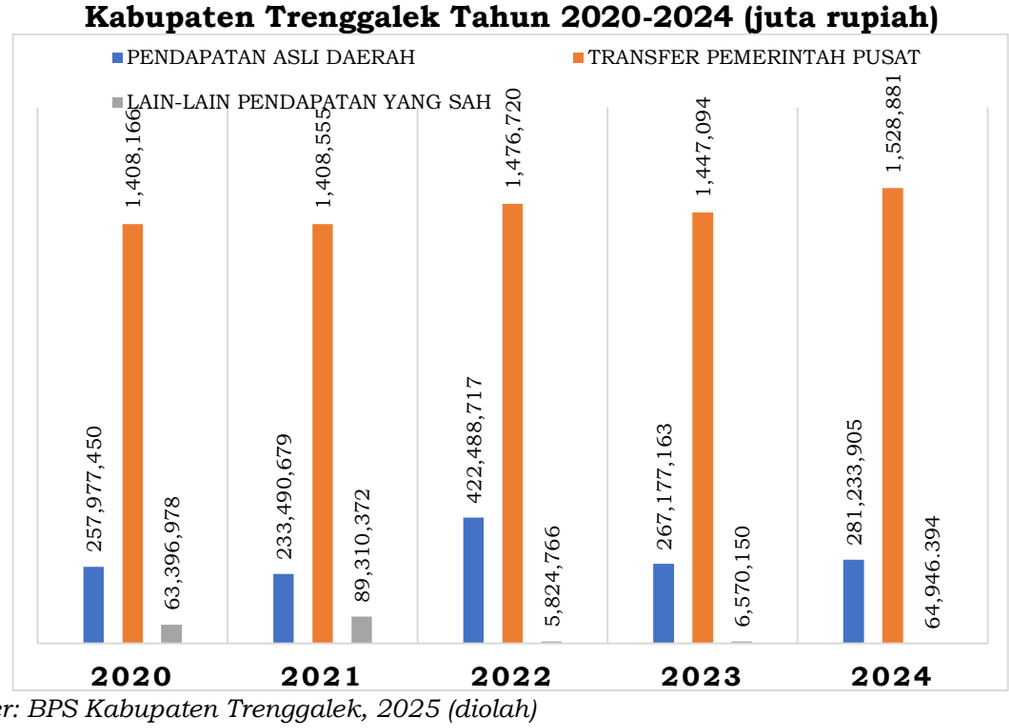
Grafik II.73
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024), terlihat bahwa Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dengan pertumbuhan sebesar 2,94% dari 1,509 triliun (2020) menjadi 1,695 triliun (2024). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata pertumbuhan secara berurutan sebesar 2,18% dan -82,11%.

Grafik II.74
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak Kabupaten Trenggalek mengalami tren kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 14,27% dari Rp 34,601 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 58,999 miliar pada tahun 2024. Untuk meningkatkan PAD dari Pajak Daerah selain intensifikasi dan ektensifikasi ke depan juga perlu dilakukan penegakan perda pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Trenggalek mengalami tren fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan yang mencapai 89,61% per tahun dari Rp. 15,977 miliar (2020) menjadi Rp. 206,52 miliar (2024). Peningkatan signifikan pada tahun 2024 tersebut disebabkan perpindahan rekening pendapatan BLUD yang sebelumnya pada rekening lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpindah ke rekening retribusi daerah selain itu kenaikan didorong oleh semakin efektifnya retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi jasa umum dari retribusi layanan Kesehatan dan layanan kebersihan/persampahan. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber

retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,63% per tahun dari Rp. 5,112 miliar (2020) menjadi Rp. 6,366 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Trenggalek pada lembaga keuangan (Bank BPR dan Bank Jatim), aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan signifikan di tahun 2024 dengan rata-rata penurunan pertumbuhan sebesar -53,64% dari Rp. 202,286 miliar (2020) menjadi Rp. 9,347 miliar (2024). Penurunan ini disebabkan perpindahan rekening pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpindah ke rekening retribusi daerah. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 351,318 miliar karena tingginya Pendapatan BLUD dibandingkan tahun-tahun lainnya akibat Covid-19. Oleh karena itu bisa dikatakan Pendapatan BLUD merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi tinggi rendahnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah maka kinerja BLUD perlu ditingkatkan.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik II.75
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

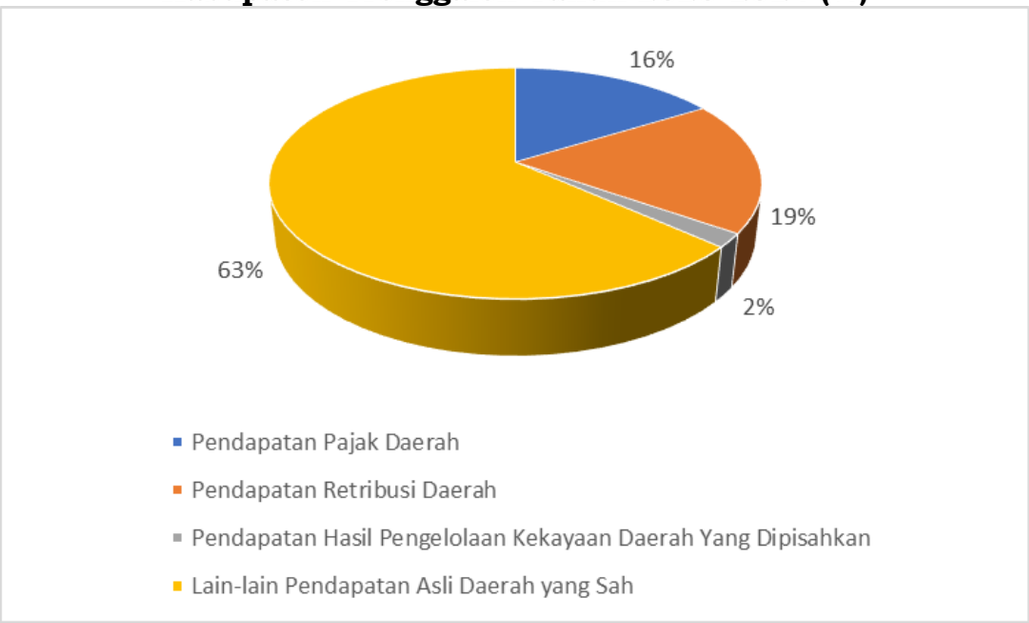


Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Trenggalek. Secara rata-rata, kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir

(2020–2024) mencapai 75,3% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 16,7% per tahun, berikutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 2,0% per tahun, dan terakhir Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 6,1% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalian sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang kontribusinya masih sangat rendah.

Grafik II.76
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

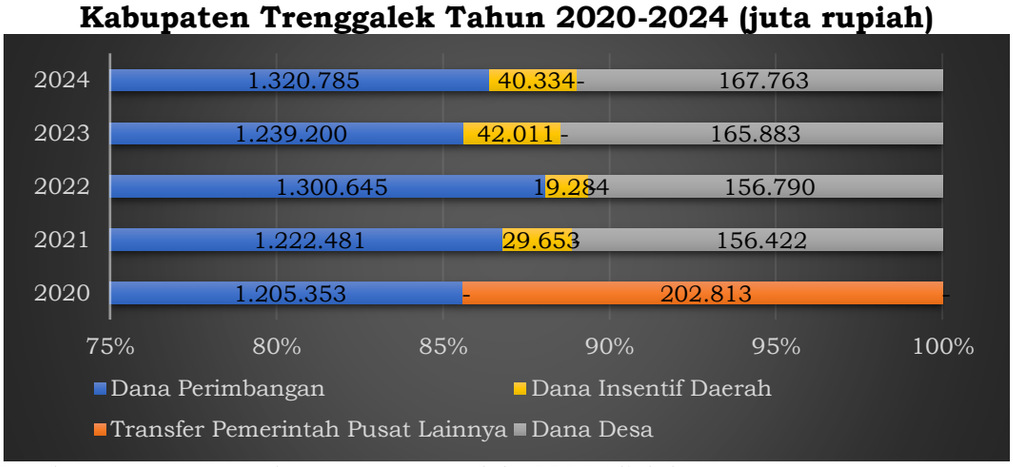
Grafik II.77
Komponen Pendapatan Transfer
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan transfer Kabupaten Trenggalek mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,94%, dari Rp 1,509 triliun (2020) menjadi Rp 1,695 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2024, karena relatif tingginya pendapatan transfer pemerintah pusat dari sumber Dana Perimbangan pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya, maka mayoritas Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat, yang mengalami peningkatan setiap tahun. Jika melihat komponen utama Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka kontribusi utama berasal dari Dana Perimbangan, sedangkan sisanya berasal dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Grafik II.78
Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



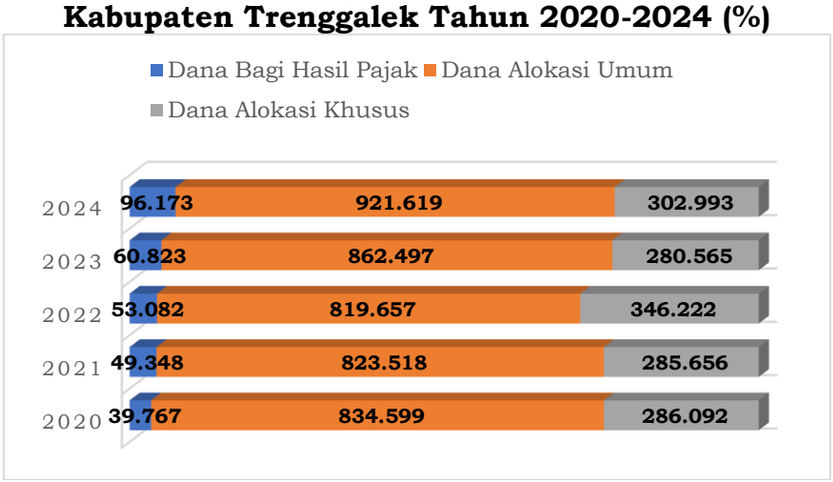
Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,31%, dari Rp. 1.205,353

miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 1.320,785 miliar di tahun 2024. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri, tren Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relatif fluktuatif, di mana secara berturut-turut tren penurunannya sebesar 2,51% dan 1,45%. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) justru mengalami rata-rata tren peningkatan cukup signifikan sebesar 24,70%, dari Rp. 39,767 miliar (2020) menjadi Rp. 96,173 miliar (2024).

Meskipun mengalami penurunan, namun DAU masih menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2024 sebesar 69,78%, kemudian DAK sebesar 22,94%, sementara DBH Pajak dan SDA menjadi kontributor terkecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,28%.

Grafik II.79
Kontribusi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (%)



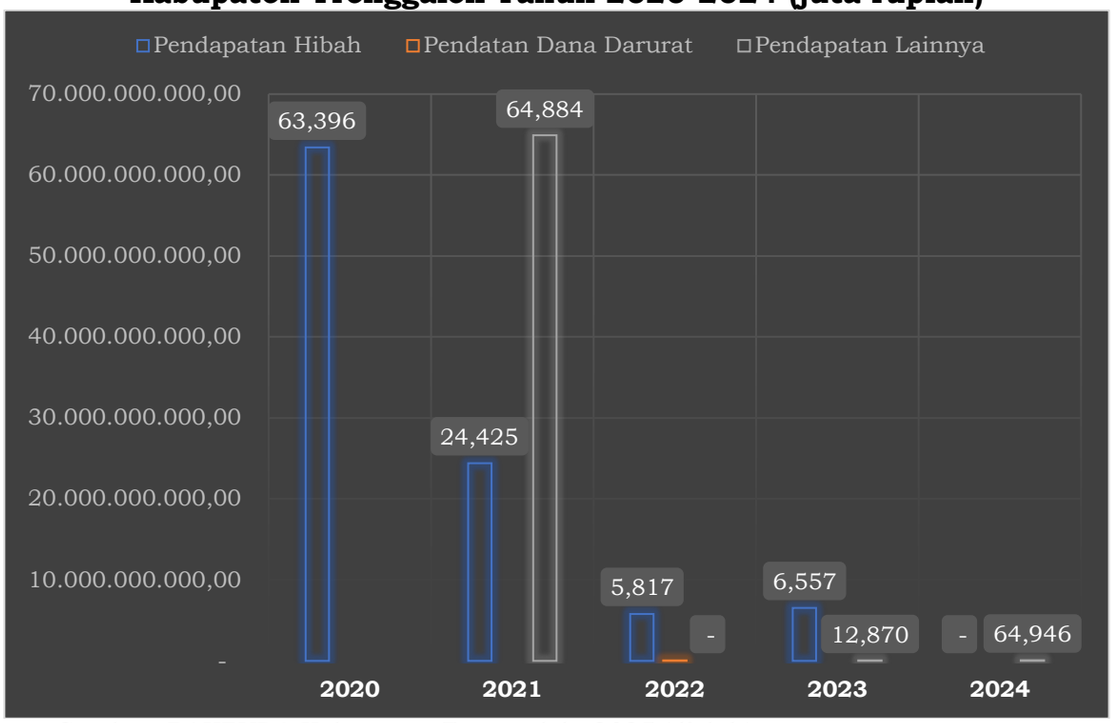
Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -82,11% per tahun, dari Rp 63,396,978,255.00 (2020) menjadi Rp 64,946,394.79 (2024). Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai Rp 89,310,372,721.00.

Jika dilihat lebih dalam, sebagian besar sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, yang mengalami perubahan dari Rp 63,396,978,255.00 (2020) menjadi Rp 6,557,280,395.00 (2023). Selain itu, Pendapatan Lainnya mengalami penurunan signifikan dari Rp 64,884,729,963.00 (2021) menjadi Rp 12,870,000.00 (2023). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa telah terjadi transisi dari Pendapatan Hibah ke Pendapatan Lainnya, yang kini menjadi penyumbang utama serta berperan besar dalam menentukan perubahan tren Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama 5 (lima) tahun terakhir.

Grafik II.80
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapatan Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

a. Mendorong investasi: Pemerintah daerah perlu membuat regulasi ramah lingkungan, membangun Infrastruktur Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dapat mendukung kelancaran kegiatan investasi.
b. Memberikan insentif bagi investor: Pemerintah daerah dapat memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau subsidi, untuk menarik investor.
c. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
d. Peningkatan pengelolaan aset daerah: Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara optimal. Aset-aset daerah yang tidak terpakai dapat dialihkan menjadi sumber pendapatan melalui sewa, kerjasama, atau penjualan.
e. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
f. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
g. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui

pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.

h. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

i. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah: Mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi di daerahnya, seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah..

j. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.95
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**1.831.177.618.128**	**1.859.926.435.397**	**2.046.436.048.933**	**1.879.855.240.414**	**1.976.717.300.282**	**1,93**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**257.977.450.484**	**233.490.679.201**	**422.488.717.358**	**267.177.163.229**	**281.233.905.461**	**2,18**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	34.601.359.086	39.026.817.857	48.342.171.621	55.434.711.327	58.999.202.750	**14,27**
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	15.977.293.384	12.613.997.046	16.992.458.116	19.683.753.888	206.521.149.464	**89,61**
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	5.112.428.297	5.428.465.729	5.836.041.736	5.401.239.576	6.365.697.366	**5,63**
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	202.286.369.717	176.421.398.568	351.318.045.885	186.657.458.438	9.347.855.882	**-53,64**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.509.803.189.389**	**1.537.125.383.475**	**1.618.122.565.458**	**1.606.107.926.790**	**1.695.418.448.426**	**2,94**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.408.166.466.051**	**1.408.555.802.391**	**1.476.720.332.106**	**1.447.094.222.990**	**1.528.881.982.876**	**2,08**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.205.353.056.184**	**1.222.481.059.391**	**1.300.645.390.706**	**1.239.200.413.990**	**1.320.785.110.876**	**2,31**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	39.767.439.348	49.348.284.742	53.082.401.184	60.823.498.969	51.463.501.000	6,66
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	44.894.000.634	63.958.414.882	81.684.194.698	35.315.338.000	44.709.152.000	-0,10
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	834.599.215.000	823.518.272.000	819.657.002.028	862.496.722.805	921.619.169.751	2,51
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	286.092.401.202	285.656.087.767	346.221.792.796	280.564.854.216	302.993.288.125	1,45
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	-	**29.652.969.000**	**19.284.465.000**	**42.011.238.000**	**40.333.727.000**	**10,80**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**202.813.409.867**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100,00**
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	202.813.409.867	-	-			-100,00
1.2.1.4	**Dana Desa**	**-**	**156.421.774.000**	**156.790.476.400**	**165.882.571.000**	**167.763.145.000**	**2,36**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**101.636.723.338**	**128.569.581.084**	**141.402.233.352**	**159.013.703.800**	**166.536.465.550**	**13,14**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**94.323.984.338**	**121.121.859.227**	**124.452.089.352**	**152.298.834.600**	**150.573.341.050**	12,40
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**7.312.739.000**	**7.447.721.857**	**16.950.144.000**	**6.714.869.200**	**15.963.124.500**	**21,55**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.312.739.000	7.447.721.857	16.950.144.000	6.714.869.200	15.963.124.500	21,55
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota		-	-			
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**63.396.978.255**	**89.310.372.721**	**5.824.766.117**	**6.570.150.395**	**64.946.395**	**-82,11**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	**63.396.978.255**	**24.425.642.758**	**5.817.728.117**	**6.557.280.395**	**-**	**-100,00**
1.3.2	**Pendatan Dana Darurat**	**-**		**7.038.000**	**-**	**-**	**-100,00**
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**		**64.884.729.963**	**-**	**12.870.000**	**64.946.395**	**-90,00**

Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah).

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

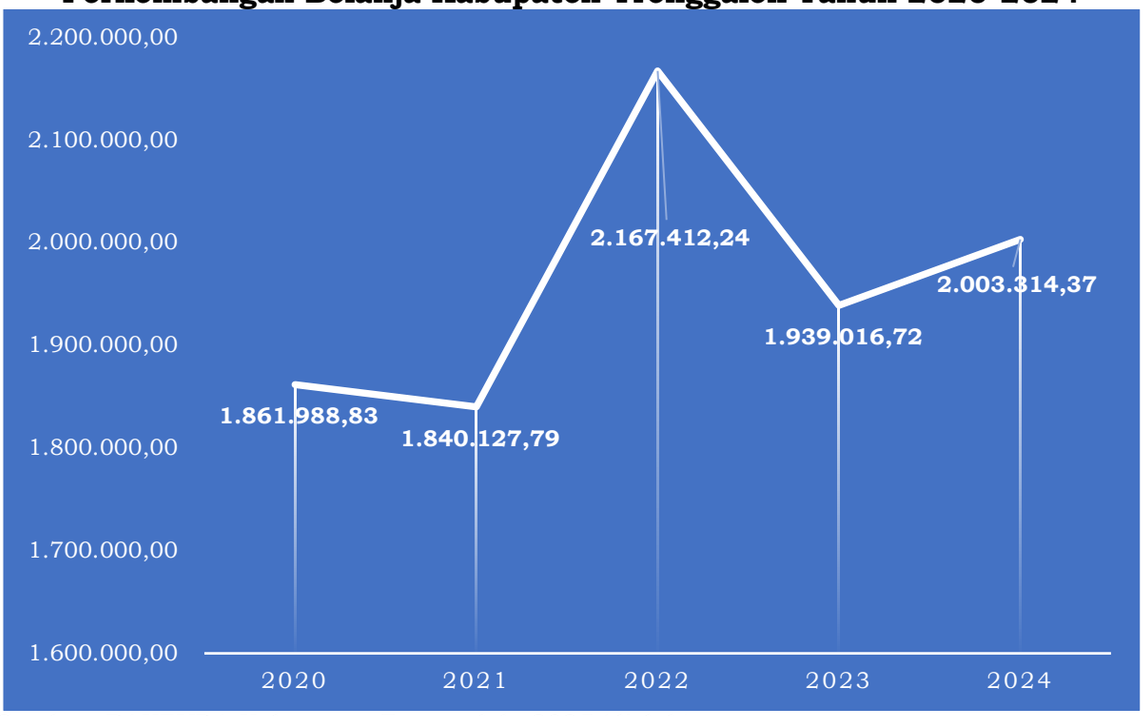
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2) Belanja modal
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3) Belanja tidak terduga
   Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4) Belanja transfer
   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) secara konsisten meningkat cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,95% per tahun dari 1,506 triliun (2020) menjadi 2,240 triliun (2024).

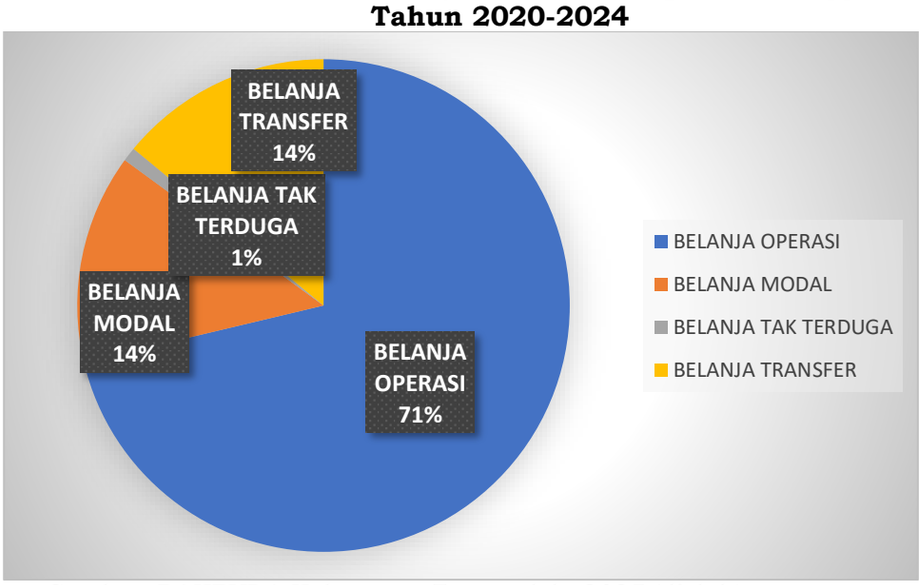
Grafik II.81
Perkembangan Belanja Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat yaitu Belanja Operasi (4,74%) dan Belanja Transfer (1,04%). Hanya dua komponen yang mengalami penurunan tren yaitu Belanja Modal (-8,04%) dan Belanja Tak Terduga (-51,82%). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 71,28% Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, kemudian 13,77% digunakan untuk Belanja Modal, 14,02% digunakan untuk Belanja Transfer, dan sisanya 0,92% digunakan untuk Belanja Tak Terduga.

Grafik II.82
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



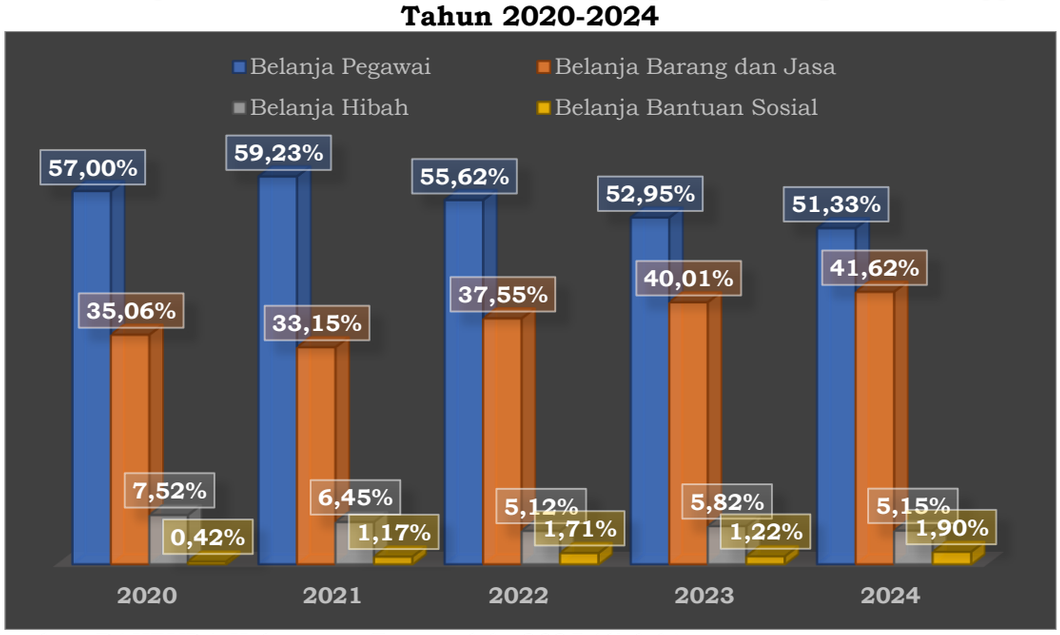
Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

a. Belanja Operasi

Dalam lima tahun terakhir, Belanja Operasi Kabupaten Trenggalek telah mengalami pertumbuhan rata-rata 4,74% per tahun, dari Rp. 1,294,508.62

miliar pada 2020 menjadi Rp. 1,558,060.01 miliar pada 2024. Sebagian besar Belanja Operasi dialokasikan untuk Belanja Pegawai, diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa. Jika melihat perkembangannya, proporsi Belanja Pegawai terbesar terjadi pada 2020, yaitu 56.98% dari total Belanja Operasi, dan terus mengalami penurunan hingga 32.94% pada 2024. Di sisi lain, proporsi Belanja Barang dan Jasa meningkat setiap tahun, dari 35.01% pada 2020 menjadi 37.82% pada 2024, menunjukkan peningkatan alokasi untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Sementara itu, Belanja Operasi lainnya (belanja bunga, hibah, dan bantuan sosial) memiliki proporsi yang relatif kecil, tidak pernah lebih dari 13%, dengan angka tertinggi 12.30% pada 2024.

Grafik II.83
Perkembangan Kontribusi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Meskipun secara proporsi Belanja Pegawai terus menurun, namun secara nominal nilainya tetap mengalami peningkatan dari Rp. 737,624.74 miliar pada 2020 menjadi Rp. 513,146.00 miliar pada 2024. Peningkatan nilai nominal ini perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu proporsi dan kualitas belanja publik yang berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tabel II.96
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	1,861,988.83	1,840,127.79	2,167,412.24	1,939,016.72	2,003,314.37	1.85
2.1	BELANJA OPERASI	1,294,508.62	1,324,984.03	1,343,536.02	1,456,285.58	1,558,060.01	4.74
2.1.1	Belanja Pegawai	737,624.74	784,241.91	770,428.55	784,401.11	930,273.24	5.97
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	453,532.91	481,440.46	512,914.79	582,568.08	519,929.86	3.47
2.1.2	Belanja Bunga	-	64.85	6,001.52	11,531.76	7,945.40	396.66
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	5.10	-	-	-100.00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.5	Belanja Hibah	97,936.70	52,209.18	50,011.12	75,769.25	97,835.63	-0.03
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,414.27	7,027.62	4,174.95	2,015.38	2,075.89	-21.31
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0.00

Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

b. Belanja Modal

Dalam lima tahun terakhir, Belanja Modal Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi dengan tren menurun rata-rata sebesar -8,44% per tahun. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp. 231,313 miliar dan terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 162,562 miliar pada tahun 2024. Beberapa komponen belanja modal yang mengalami tren penurunan signifikan adalah belanja tanah yang berkurang 24,37%, belanja aset tetap lainnya yang turun 44,82%, dan belanja aset lainnya yang mengalami penurunan drastis sebesar 51,82%. Belanja peralatan dan mesin mengalami penurunan juga dari Rp. 68,646 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 38,067 miliar pada tahun 2024, belanja bangunan dan gedung ikut mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar –10,39% per tahun. Sementara itu, belanja untuk jalan, irigasi, dan jaringan mengalami penurunan dari Rp. 95,796 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 91,226 miliar pada tahun 2024 atau menurun rata-rata 1,21% per tahun dalam lima tahun terakhir.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, struktur alokasi belanja modal perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam penganggaran sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang mampu meningkatkan konektivitas serta efisiensi logistik, sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan. Selain itu, belanja peralatan dan mesin harus diarahkan untuk mendukung produktivitas melalui penerapan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing berbagai sektor ekonomi. Pengalokasian belanja modal secara strategis juga berpotensi mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang masih kurang berkembang. Oleh karena itu, optimalisasi belanja modal menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.97
Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Trenggalek Tahun 2020-2024
(juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	1,861,988.83	1,840,127.79	2,167,412.24	1,939,016.72	2,003,314.37	1.85
2.2	BELANJA MODAL	231,313.88	238,767.15	552,521.69	191,370.87	162,562.43	-8.44

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.1	Belanja Tanah	826.69	3,059.83	139.79	4,223.48	270.46	-24.37
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	68,146.71	53,061.94	172,067.59	69,378.22	38,067.32	-13.55
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49,212.04	89,203.48	156,244.12	48,112.26	31,735.69	-10.39
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95,796.79	89,870.10	220,946.67	68,194.81	91,226.71	-1.21
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8,438.11	3,571.80	3,123.53	1,159.78	782.27	-44.82
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	8,893.55	-	-	302.32	479.97	-51.80

Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

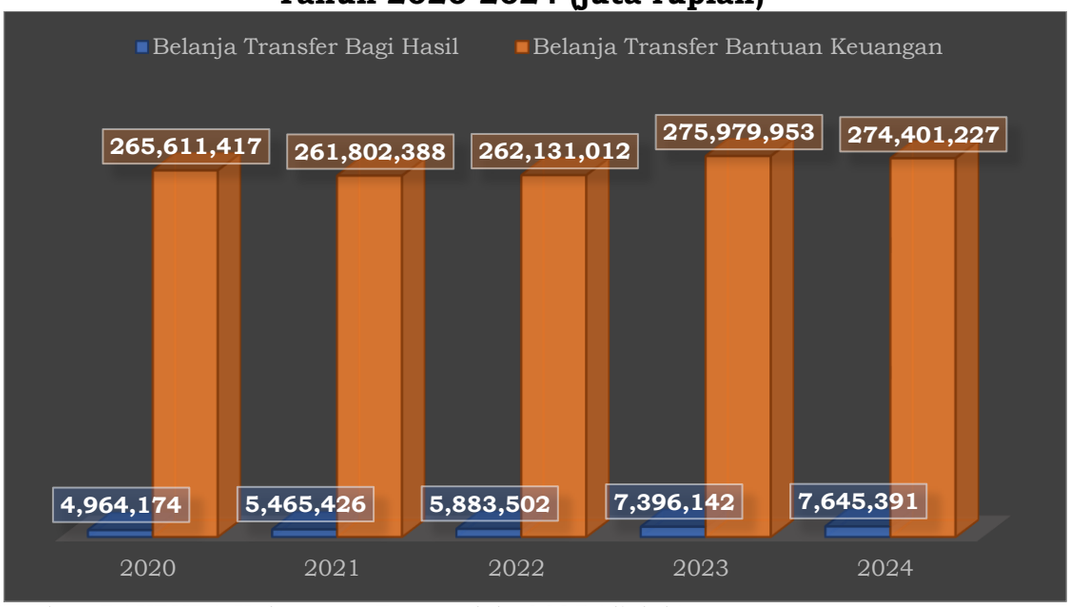
c. Belanja Tak Terduga

Dalam lima tahun terakhir, realisasi belanja tak terduga Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren negatif dengan rata-rata penurunan cukup signifikan sebesar 68,51% per tahun, dari Rp. 65,59 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 645,91 juta pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan darurat, seperti penanganan bencana dan kejadian tak terduga lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Dalam lima tahun terakhir, belanja transfer Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan rata-rata 1,04% per tahun, dari Rp. 270,575 miliar pada 2020 menjadi Rp. 282,046 miliar pada 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan belanja transfer bagi hasil sebesar 11,40% per tahun, dari Rp. 4,964 miliar pada 2020 menjadi Rp. 7,645 miliar pada 2024, serta belanja transfer bantuan keuangan yang naik 0,82% per tahun, dari Rp. 265,611 miliar pada 2020 menjadi Rp. 274,401 miliar pada 2024. Sebagian besar atau lebih dari 98% belanja transfer dialokasikan untuk bantuan keuangan ke desa.

Grafik II.84
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Dari aspek surplus/defisit belanja, dalam lima tahun terakhir defisit terjadi pada tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024, masing-masing sebesar Rp. 30,811 miliar, Rp. 120,976 miliar, Rp. 59,161 miliar dan Rp. 16,597 miliar. Meskipun mengalami defisit, kondisi ini masih dapat ditutup oleh SiLPA yang tersedia dalam tahun-tahun tersebut, Sementara itu, tahun 2022 mengalami surplus anggaran, menandakan adanya perbaikan keseimbangan fiskal daerah.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
4) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.98
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	1,861,988,83	1,840,127,79	2,167,412,24	1,939,016,72	2,003,314,37	1,85
2.1	BELANJA OPERASI	1,294,508,62	1,324,984,03	1,343,536,02	1,456,285,58	1,558,060,01	4,74
2.1.1	Belanja Pegawai	737,624,74	784,241,91	770,428,55	784,401,11	930,273,24	5,97
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	453,532,91	481,440,46	512,914,79	582,568,08	519,929,86	3,47
2.1.2	Belanja Bunga	-	64,85	6,001,52	11,531,76	7,945,40	396,66
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	5,10	-	-	-100,00
2.1.5	Belanja Hibah	97,936,70	52,209,18	50,011,12	75,769,25	97,835,63	-0,03
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,414,27	7,027,62	4,174,95	2,015,38	2,075,89	-21,31
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	231,313,88	238,767,15	552,521,69	191,370,87	162,562,43	-8,44
2.2.1	Belanja Tanah	826,69	3,059,83	139,79	4,223,48	270,46	-24,37
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	68,146,71	53,061,94	172,067,59	69,378,22	38,067,32	-13,55
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49,212,04	89,203,48	156,244,12	48,112,26	31,735,69	-10,39
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95,796,79	89,870,10	220,946,67	68,194,81	91,226,71	-1,21
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8,438,11	3,571,80	3,123,53	1,159,78	782,27	-44,82

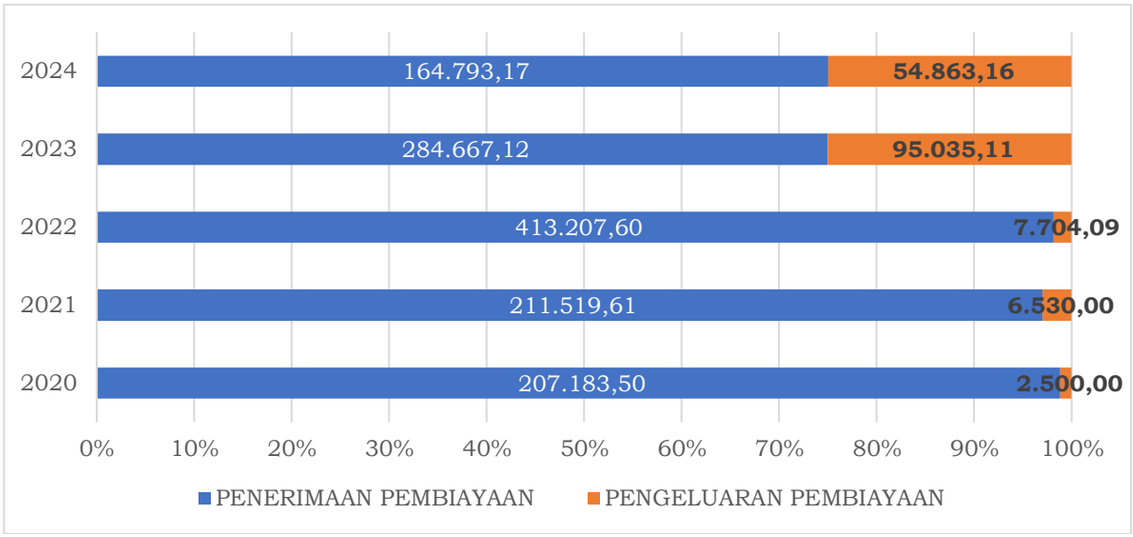
No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.6	**Belanja Aset Lainnya**	**8,893,55**	**-**	**-**	**302,32**	**479,97**	**-51,80**
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**65,590,74**	**9,108,80**	**3,340,00**	**7,984,18**	**645,31**	**-68,51**
2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	**65,590,74**	**9,108,80**	**3,340,00**	**7,984,18**	**645,31**	
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**270,575,59**	**267,267,81**	**268,014,51**	**283,376,10**	**282,046,62**	**1,04**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**4,964,17**	**5,465,43**	**5,883,50**	**7,396,14**	**7,645,39**	**11,40**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2,534,33	5,465,43	5,883,50	7,396,14	7,645,39	31,79
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	2,429,85	-	-	-	-	-100,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**265,611,42**	**261,802,39**	**262,131,01**	**275,979,95**	**274,401,23**	**0,82**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	265,611,42	261,802,39	262,131,01	275,979,95	274,401,23	0,82
2.4.2.4	Transfer Bantuan	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Keuangan Lainnya						
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30,811,21)	19,798,64	(120,976,19)	(59,161,48)	(26,597,07)	-3,61

3. Pembiayaan

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan pembiayaan netto Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama akibat berkurangnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA, khususnya dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jika dilihat lebih mendalam, SiLPA mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan rata-rata -9,21% per tahun, dari Rp. 192,040 miliar pada 2020 menjadi Rp. 130,470 miliar pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023, yang berkontribusi terhadap berkurangnya pembiayaan netto pada tahun berikutnya.

Grafik II.85
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024



Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.99
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**1.831.177.618.128**	**1.859.926.435.397**	**2.046.436.048.933**	**1.879.855.240.414**	**1.976.717.300.282**	**1,93**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**257.977.450.484**	**233.490.679.201**	**422.488.717.358**	**267.177.163.229**	**281.233.905.461**	**2,18**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	34.601.359.086	39.026.817.857	48.342.171.621	55.434.711.327	58.999.202.750	**14,27**
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	15.977.293.384	12.613.997.046	16.992.458.116	19.683.753.888	206.521.149.464	**89,61**
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	5.112.428.297	5.428.465.729	5.836.041.736	5.401.239.576	6.365.697.366	**5,63**
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	202.286.369.717	176.421.398.568	351.318.045.885	186.657.458.438	9.347.855.882	**-53,64**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.509.803.189.389**	**1.537.125.383.475**	**1.618.122.565.458**	**1.606.107.926.790**	**1.695.418.448.426**	**2,94**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.408.166.466.051**	**1.408.555.802.391**	**1.476.720.332.106**	**1.447.094.222.990**	**1.528.881.982.876**	**2,08**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.205.353.056.184**	**1.222.481.059.391**	**1.300.645.390.706**	**1.239.200.413.990**	**1.320.785.110.876**	**2,31**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	39.767.439.348	49.348.284.742	53.082.401.184	60.823.498.969	51.463.501.000	6,66
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	44.894.000.634	63.958.414.882	81.684.194.698	35.315.338.000	44.709.152.000	-0,10
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	834.599.215.000	823.518.272.000	819.657.002.028	862.496.722.805	921.619.169.751	2,51
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	286.092.401.202	285.656.087.767	346.221.792.796	280.564.854.216	302.993.288.125	1,45

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	29.652.969.000	19.284.465.000	42.011.238.000	40.333.727.000	10,80
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	202.813.409.867	-	-	-	-	-100,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	202.813.409.867	-	-			-100,00
1.2.1.4	Dana Desa	-	156.421.774.000	156.790.476.400	165.882.571.000	167.763.145.000	2,36
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	101.636.723.338	128.569.581.084	141.402.233.352	159.013.703.800	166.536.465.550	13,14
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.323.984.338	121.121.859.227	124.452.089.352	152.298.834.600	150.573.341.050	12,40
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	7.312.739.000	7.447.721.857	16.950.144.000	6.714.869.200	15.963.124.500	21,55
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.312.739.000	7.447.721.857	16.950.144.000	6.714.869.200	15.963.124.500	21,55
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota		-	-			
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	63.396.978.255	89.310.372.721	5.824.766.117	6.570.150.395	64.946.395	-82,11
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.396.978.255	24.425.642.758	5.817.728.117	6.557.280.395	-	-100,00
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-		7.038.000	-	-	-100,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		64.884.729.963	-	12.870.000	64.946.395	-90,00
2	BELANJA	1.861.988.825.777	1.840.127.791.074	2.167.412.235.228	1.939.016.718.971	2.003.314.373.216	1,85

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	BELANJA OPERASI	1.294.508.621.337	1.324.984.026.591	1.343.536.024.840	1.456.285.575.058	1.558.060.006.464	4,74
2.1.1	Belanja Pegawai	737.624.742.537	784.241.905.822	770.428.550.180	784.401.105.804	930.273.344.451	5,97
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	453.532.912.374	481.440.461.959	512.914.787.940	582.568.082.145	519.929.748.405	3,47
2.1.2	Belanja Bunga		64.854.167	6.001.517.142	11.531.763.757	7.945.396.170	396,66
2.1.4	Belanja Subsidi		-	5.100.000	-	-	-100,00
2.1.5	Belanja Hibah	97.936.696.171	52.209.184.644	50.011.119.578	75.769.248.352	97.835.627.439	-0,03
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.414.270.255	7.027.620.000	4.174.950.000	2.015.375.000	2.075.890.000	-21,31
2.1.7	Belanja keuangan						
2.2	BELANJA MODAL	231.313.877.678	238.767.153.103	552.521.694.988	191.370.867.048	162.562.434.552	-8,44
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	826.685.533	3.059.830.279	139.788.050	4.223.481.345	270.463.367	-24,37
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	68.146.707.077	53.061.944.406	172.067.592.955	69.378.223.671	38.067.324.757	-13,55
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49.212.038.309	89.203.484.453	156.244.118.906	48.112.256.131	31.735.693.254	-10,39
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.796.787.008	89.870.098.715	220.946.670.044	68.194.811.822	91.226.711.566	-1,21
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.438.114.040	3.571.795.250	3.123.525.034	1.159.777.580	782.268.679	-44,82
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	8.893.545.712			302.316.500	479.972.930	-51,80

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**65.590.735.355**	**9.108.796.578**	**3.340.000.801**	**7.984.181.165**	**645.313.800**	**-68,51**
2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	**65.590.735.355**	**9.108.796.578**	**3.340.000.801**	7.984.181.165	**645.313.800**	**-68,51**
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**270.575.591.407**	**267.267.814.802**	**268.014.514.599**	**283.376.095.700**	**282.046.618.400**	**1,04**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**4.964.174.115**	**5.465.426.402**	**5.883.502.000**	**7.396.142.100**	**7.645.391.200**	**11,40**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.534.325.045	5.465.426.402	**5.883.502.000**	7.396.142.100	7.645.391.200	31,79
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	2.429.849.070				-	-100,00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**265.611.417.292**	**261.802.388.400**	**262.131.012.599**	**275.979.953.600**	**274.401.227.200**	**0,82**
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	265.611.417.292	261.802.388.400	262.131.012.599	275.979.953.600	274.401.227.200	0,82
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.811.207.649)	19.798.644.323	(120.976.186.295)	(59.161.478.557)	(26.597.072.934)	-3,61
3	**PEMBIAYAAN**	**204.683.498.369**	**204.989.608.995**	**405.503.500.432**	**189.632.011.258**	**109.930.009.060**	**-14,39**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**207.183.498.369**	**211.519.608.995**	**413.207.595.185**	**284.667.121.921**	**164.793.172.469**	**-5,56**
3.1.1	**Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**	**192.040.767.729**	**173.872.290.720**	**224.788.253.317**	284.527.314.136	**130.470.532.702**	**-9,21**
3.1.2	**Pencairan Dana Cadangan**	**15.000.000.000**	**-**		**-**	**29.000.000.000**	**17,92**
3.1.4	**Penerimaan Pinjaman Daerah;**	**142.730.640**	**37.500.000.000**	**188.296.584.272**	**-**	**5.000.000.000**	**143,28**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	322.639.767	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.		147.318.275	122.757.596	139.807.785		-100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	6.530.000.000	7.704.094.753	95.035.110.663	54.863.163.409	116,44
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo			4.704.094.753	63.035.110.663	54.863.163.409	241,51
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	2.500.000.000	6.530.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000		-100,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;				29.000.000.000		-100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	204.683.498.369	204.989.608.995	405.503.500.432	189.632.011.258	109.930.009.060	-14,39

Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Trenggalek dari tahun 2019-2023 mengalami tren penurunan dengan rata-rata kenaikan mencapai 3,96% per tahun dari Rp. 2,412 triliun (2019) menjadi Rp. 2,817 triliun (2023). Jika dilihat proporsinya, maka rata-rata lebih dari 80% nilai total aset yang ada berasal dari jumlah ekuitas.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tahun 2019-2023 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut mengalami fluktuasi yaitu dari Rp. 25,317 miliar (2019), meningkat menjadi Rp. 116,089 miliar (2021), kemudian menurun menjadi Rp. 77,450 miliar (2022), dan kembali menurun menjadi Rp. 75,610 miliar (2023). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang beban yang trennya fluktuatif namun cenderung meningkat yang ditampilkan secara berturut-turut sebagai berikut: dari Rp. 4,335 miliar (2019) menjadi Rp. 17,048 miliar (2023).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori

yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Trenggalek berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,49% pertahun, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,386 Triliun menjadi Rp. 2,633 Triliun di tahun 2023. Ekuitas dari tahun 2020-2021 nilainya mengalami peningkatan namun kemudian nilainya menurun di tahun 2022, kemudian setelah itu dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan kembali. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Trenggalek disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.100
Neraca Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	153.910.690.862	208.516.608.921,40	246.983.429.546	116.737.983.998	67.062.208.775	(18,75)
Kas di Bendahara Penerimaan	278.289.137,00	20.024.900,00		75.332.727	11.443.817	(54,97)
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.580.000,00	130.148.331		334.036.359	495,72
Kas di BLUD	16.457.506.302,64	13.330.447.418,84	36.713.210.740	7.452.822.394	11.687.190.635	(8,20)
Kas di Bendahara FKTP						
Kas di Bendahara BOS		2.919.592.076,89	700.525.519	6.178.561.143	146.135.176	(63,15)
Kas dana BOK Puskesmas					4.091.921.362	
Kas Lainnya	3.225.804.418,11					(100,00)
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	1.730.168.230	1.866.680.761,00	2.074.541.114	2.384.179.793	2.644.955.202	11,19
Penyisihan Piutang Pajak						
Piutang Retribusi	1.335.204.436	1.399.447.102,67	1.526.833.586	1.450.554.606	14.831.364.897	82,56
Penyisihan Piutang Retribusi						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.285.067.740	1.412.871.921	5.341.239.576	6.365.708.275	1.446.253.711	3,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.282.090.300,16	181.825.731.586,35	16.054.462.414	4.665.492.903	3.007.311.591	(36,31)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		150.500.000	150.500.000	150.505.141	14.255.059.000	355,84
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat						
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		7.918.707.664,00	9.190.249.900			(100,00)
Piutang Dana Bagi hasil	10.442.227.479					(100,00)
Piutang Lainnya	7.647.289	499.285.750,77	499.285.751	530.120.751	369.029.751	163,57
Penyisihan Piutang	(2.420.305.329)	(2.474.421.388)	-2.639.659.193	(3.288.067.122)	(3.563.675.429)	10,16
Beban Dibayar Dimuka	256.136.547,65	91.729.166,67	44.729.167	16.062.500	45.208.333	(35,18)
Persediaan	26.753.780.140,23	58.406.922.975,38	105.558.538.154	196.066.298.526	237.015.528.234	72,52

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Aset Lancar	**231.544.307.552**	**475.885.708.857**	**422.328.034.606**	**338.785.555.634**	**353.383.971.414**	**11,15**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	4.480.610.606	4.333.292.331	4.211.534.735	4.070.726.950	3.748.087.183	(4,36)
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya Tidak Tertagih					(3.748.087.183)	
Dana Bergulir						
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(4.473.729.849)	(4.326.411.574)	(4.204.653.978)	(4.070.726.950)		(100,00)
Jumlah Investasi Non Permanen	**6.880.757**	**6.880.757**	**6.880.757**	**-**	**-**	**(100,00)**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	75.511.953.209,96	92.652.712.814,26	95.232.398.106,34	98.668.519.803	99.510.758.321	7,14
Jumlah Investasi Permanen	**75.511.953.210**	**92.652.712.814**	**95.232.398.106**	**98.668.519.803**	**99.510.758.321**	**7,14**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**75.518.833.967**	**92.659.593.571**	**95.239.278.863**	**98.668.519.803**	**99.510.758.321**	**7,14**
ASET TETAP						
	386.701.435.161,00	395.616.395.566,00	395.263.144.546,00	401.527.530.991	349.452.940.601	(2,50)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Peralatan dan Mesin	649.005.140.402,00	725.018.756.499,00	907.554.648.662,00	965.361.304.998	1.004.935.594.696	11,55
Gedung dan Bangunan	966.403.927.390,73	1.050.702.794.520,73	1.213.338.829.319,73	1.356.162.476.000	1.364.362.251.020	9,00
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.014.890.496.381,00	2.092.936.643.943,00	2.270.825.504.721,00	2.362.406.092.464	2.465.348.410.110	5,17
Aset Tetap Lainnya	24.852.305.413,00	23.999.208.311,00	24.285.202.937,00	24.234.747.712	24.856.659.556	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	22.117.670.888,08	55.805.775.182,08	26.601.388.016,00	7.389.539.682	9.660.550.791	(18,70)
Akumulassi Penyusutan	(2.029.050.109.947)	-2.262.484.940.058,09	-2.531.243.667.649,09	(2.800.997.010.688)	(3.121.645.293.821)	11,37
Jumlah Aset Tetap	**2.034.920.865.689**	**2.081.594.633.964**	**2.306.625.050.553**	**2.316.084.681.159**	**2.096.971.112.952**	**0,75**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	29.000.000.000		(100,00)
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**29.000.000.000**	**-**	**(100,00)**
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi					**61.921.936.282**	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					**(2.052.936.571)**	
Jumlah Properti Investasi					**59.868.999.711**	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	805.900.000	805.900.000,00	805.900.000	805.900.000	805.900.000	-
Aset Tak Berwujud	3.636.309.705	6.921.145.705,00	12.530.260.671,00	15.685.567.987	17.289.872.733	47,67
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.000.749.373)	(4.542.646.706,34)	-7.225.879.301,34	(10.186.021.558)	(12.581.975.233)	43,10
Aset Lain-Lain	8.869.632.345	9.341.170.957,80	8.986.530.383,80	8.810.088.938	8.697.091.631	(0,49)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain						
Dana Transfer Treasury Depoosit Facility (TDF)				19.623.547.000	432.908.000	(97,79)
Kas Yang dibatasi Penggunaannya			12.250.325.969			(100,00)
Jumlah Aset Lainnya	**10.311.092.677**	**12.525.569.956**	**27.347.137.722**	**34.739.082.366**	**14.643.797.131**	**9,17**
JUMLAH ASET	**2.352.295.099.885**	**2.662.665.506.349**	**2.851.539.501.744**	**2.788.277.838.962**	**2.564.509.639.818**	**2,77**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4.930.529		(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.153.595.474,77	290.385.586	450.799.418,80	308.975.925	478.551.073	(19,75)
Utang Beban	20.417.929.859,71	89.159.446.427	16.726.447.267,16	17.048.887.821		(100,00)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Belanja					29.225.085.234	
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.773.070.124,00	26.639.543.078	3.823.647.836,14	8.384.700.032	11.895.323.676	25,64
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			56.449.146.068,00	49.863.163.409	56.449.137.036	(0,00)
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**26.344.595.458**	**116.089.375.091**	**77.450.040.590**	**75.610.657.716**	**98.048.097.019**	**38,90**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	37.500.000.000	-			(100,00)
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	164.643.343.451			(100,00)
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				108.194.215.447	51.745.078.411	(52,17)
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**37.500.000.000**	**164.643.343.451**	**108.194.215.447**	**51.745.078.411**	**11,33**
JUMLAH KEWAJIBAN	**26.344.595.458**	**153.589.375.091**	**242.093.384.041**	**183.804.873.163**	**149.793.175.430**	**54,42**
EKUITAS						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
EKUITAS						
Equitas	2.325.950.504.427	2.509.076.131.257,39	2.609.446.117.703,39	**2.633.472.965.799**	**2.474.585.464.100**	1,56
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	**2.325.950.504.427**	**2.509.076.131.257**	**2.609.446.117.703**	**2.633.472.965.799**	**2.474.585.464.100**	**1,56**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.352.295.099.885**	**2.662.665.506.348**	**2.851.539.501.744**	**2.817.277.838.962**	**2.624.378.639.530**	**2,77**

Sumber: Bakeuda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Trenggalek periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2024 cukup berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 22,04 (2020) menjadi 7,58 (2023). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 22 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2023 nilai aset lancarnya hanya 7-8 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2023, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas Pemerintah Kabupaten Trenggalek rendah karena kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan cukup rendah. Untuk itu yang perlu dilakukan pembatasan jumlah kewajiban lancarnya agar mengecil atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada.

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023.

Tabel II.101
Rasio Lancar Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	356,613,643,085	355,662,480,944	239,994,656,377	231,013,474,144	353.383.971.414
KEWAJIBAN LANCAR	16,183,319,247	35,012,322,029	23,214,743,116	30,470,457,258	51.745.078.411
RASIO LANCAR	22,04	10,16	10,34	7,58	6,83

Sumber: Bakeuda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020-2023 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar **0,003** dan yang tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar **0,006**. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020, dimana nilai kewajiban yang ada jumlahnya sekitar **0,28%** dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021, dimana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya sekitar **0,60%** dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban dalam kurun waktu 2020-2023 nilainya masih lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki, sehingga kemampuan Kabupaten Trenggalek cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih baik. Namun, jika melihat data di tahun 2023 yang nilainya sudah mulai meningkat, maka pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu berhati-hati dalam menambah kewajibannya di masa yang akan datang.

Tabel II.102
Rasio Hutang Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	26.344.595.458	153.589.375.091	242.093.384.041	183.804.873.163	149.793.175.430
EKUITAS	2.325.950.504.427	2.509.076.131.257	2.609.446.117.703	2.633.472.965.799	2.474.585.464.100
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,011	0,061	0,093	0,070	0,061

Sumber: Bakueda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif, di

mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dengan nilai rasio 0,0059 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0028. Oleh karena itu, secara keseluruhan Kabupaten Trenggalek tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya, secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Trenggalek. Namun demikian, data pada tahun 2021 harus menjadi catatan khusus karena nilainya sudah cukup tinggi.

Tabel II.103
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	26.344.595.458	153.589.375.091	242.093.384.041	183.804.873.163	149.793.175.430
AKTIVA	2.352.295.099.885	2.662.665.506.349	2.851.539.501.744	2.817.277.838.962	2.624.378.639.529
TOTAL DEBT TO ACTIVA RATIO	0,011	0,058	0,085	0,065	0,057

Sumber: Bakueda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren cukup berfluktuasi namun terus menurun. Rasio tahun 2020 mencapai 0,051 dan menurun menjadi 0,045 di tahun 2021, kemudian sempat naik lagi tahun 2022 menjadi 0,080, tetapi pada tahun 2023 terus mengalami penurunan menjadi 0,054 dan mengalami ketidakterhitungan di tahun 2024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin kurang, di mana pada tahun 2020 dari Rp. 5,030 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 257,977 miliar atau 5,13% dari nilai aset tetap, dan pada tahun 2023 kinerjanya semakin menurun lagi, di mana dengan aset senilai Rp. 4,908 triliun hanya mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 267,177 miliar atau 5,44% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu, efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.104
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	257.977.450.484	233.490.679.201	422.488.717.358	267.177.163.229	281.233.905.461
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	2.034.920.865.689	2.081.594.633.964	2.306.625.050.553	2.316.084.681.159	2.096.971.112.952
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,127	0,112	0,183	0,115	0,134

Sumber: Bakeuda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami perkembangan positif, di mana rasio dari nilai rasio 0,045 tahun 2020 menjadi 0,048 di tahun 2023. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 4,50% dari nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2023 semakin optimal hingga mampu menghasilkan 4,80% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin tidak optimal ke depan masih sangat perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.

e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.

f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.

g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.105
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	257.977.450.484	233.490.679.201	422.488.717.358	267.177.163.229	281.233.905.461
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2.352.295.099.885	2.662.665.506.349	2.851.539.501.744	2.817.277.838.962	2.624.378.639.529
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,110	0,088	0,148	0,095	0,107

Sumber: Bakeuda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek 2019-2023 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;

b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 40,16%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2023 yang mencapai 45,20% sedangkan capaian terakhir tahun 2022 sebesar 38,56%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 46%, bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu, Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya. Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.106
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2019	737,624,74	1,864,488,83	39,56%
2	2020	784,241,91	1,846,657,79	42,47%
3	2021	770,428,55	2,175,116,33	35,42%
4	2022	784,401,11	2,034,051,83	38,56%
5	2023	930,273,24	2,058,177,54	45,20%
Rata-Rata		**801,393,91**	**1,995,698,46**	**40,16%**

Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka

penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,32% per tahun dari Rp. 1,179,642 miliar (2020) menjadi Rp. 1,375,685 miliar (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp. 737,624 miliar (2020) menjadi Rp. 930,273 miliar (2024), Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Rp. 265,611 miliar (2020) menjadi Rp. 274,401 miliar (2024), dan belanja hibah dari Rp. 97,386 miliar (2020) menjadi Rp. 97,835 miliar (2024). Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali.

Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
2) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
3) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
5) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.107
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**840,975,71**	**843,543,56**	**830,621,24**	**873,717,49**	**1,038,130,15**	**5,41**
1.1	Belanja Pegawai	737,624,74	784,241,91	770,428,55	784,401,11	930,273,24	5,97
1.2	Belanja Bunga	-	64,85	6,001,52	11,531,76	7,945,40	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	5,10	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	97,936,70	52,209,18	50,011,12	75,769,25	97,835,63	(0,03)
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,414,27	7,027,62	4,174,95	2,015,38	2,075,89	(21,31)
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2	**Belanja Transfer**	**270,575,59**	**267,267,81**	**268,014,51**	**283,376,10**	**282,046,62**	**1,81**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4,964,17	5,465,43	5,883,50	7,396,14	7,645,39	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	265,611,42	261,802,39	262,131,01	275,979,95	274,401,23	1,58
3	**Belanja Tak Terduga**	**65,590,74**	**9,108,80**	**3,340,00**	**7,984,18**	**645,31**	**(68,51)**
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2,500,00**	**6,530,00**	**7,704,09**	**95,035,11**	**54,863,16**	**116,44**
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	4,704,09	63,035,11	54,863,16	241,51
4.2	penyertaan modal daerah;	2,500,00	6,530,00	3,000,00	3,000,00	-	(100,00)
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	29,000,00	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**1,179,642,04**	**1,126,450,18**	**1,109,679,85**	**1,260,112,88**	**1,375,685,25**	**3,92**

Sumber: Bakeuda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

2.2.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2025) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2022, di mana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 33,311 miliar, Rp 13,268 miliar, dan Rp 128,680 miliar. Sementara pada tahun 2023 dan 2024 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.108
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,831,177,62	1,859,926,44	2,046,436,05	1,879,855,24	1,976,717,30
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1,861,988,83	1,840,127,79	2,167,412,24	1,939,016,72	2,003,314,37
3	Pengeluaran Pembiayaan	2,500,00	6,530,00	7,704,09	95,035,11	54,863,16
	(Defisit Riil)	- 33,311,21	13,268,64	- 128,680,28	- 154,196,59	- 81,460,24

Sumber: BAKEUDA Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Pemerintah Kabupaten Trenggalek merencanakan penggunaan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tercantum dalam pos Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pinjaman ini bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan belanja pembangunan strategis dan kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Rencana ini muncul dari urgensi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti peningkatan jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pinjaman dianggap sebagai instrumen yang sah dan strategis guna mempercepat pembangunan tanpa harus menunggu terkumpulnya pendapatan daerah secara penuh.

Namun, rencana pinjaman ini perlu dianalisis secara cermat dari sisi kemampuan fiskal daerah untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman, serta dampaknya terhadap struktur keuangan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus memastikan bahwa pinjaman yang diajukan memiliki skema yang jelas, proyek yang dibiayai bersifat produktif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mendapat persetujuan dari DPRD dan evaluasi dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri. Dengan perencanaan dan tata kelola yang baik, pinjaman daerah dapat menjadi solusi pembiayaan

yang efektif dan berkelanjutan dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya, diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi dapat ditutup sepenuhnya oleh SiLPA pada tahun yang bersangkutan, yaitu sebesar Rp 33,311 miliar (2020), Rp 13,268 miliar (2021), dan Rp 128,680 miliar (2022). Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman, bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

Tabel II.109
Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	192,040,77	173,872,29	224,788,25	284,527,31	130,470,53	83,332,94
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-	
Total Komposisi Penutup Defisit	**192,040,77**	**173,872,29**	**224,788,25**	**284,527,31**	**130,470,53**	**83,332,94**

Sumber: Bakeuda Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Trenggalek.

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas

riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2030.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan

diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2023 dan/atau target RKPD tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Trenggalek masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2030 diproyeksikan hanya tumbuh ± 1,37% per tahun dari Rp. 1,879 triliun (2023) menjadi Rp. 2,064 triliun (2030). Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 1,93% per tahun namun hanya didorong oleh tumbuhnya pendapatan transfer saja, sementara realisasi PAD justru terkontraksi -0,62% per tahun. Sementara komponen proyeksi pendapatan ke depan sekaligus untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis, maka berbagai kebijakan keuangan perlu difokuskan untuk menumbuhkan PAD secara berkelanjutan. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan konsisten dengan pertumbuhan 5% per tahun dari tahun dasar angka target RKPD tahun 2025.

Untuk PAD tahun 2025-2029 diproyeksikan tumbuh ± 5.24 % per tahun dari Rp. 375,056 miliar (2025) menjadi Rp. 484.169 miliar (2030). Dari seluruh komponen sumber PAD, baik itu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan naik ±5% per tahun, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan tumbuh ± 10% per tahun, sementara untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh ± 7% per tahun.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar ± 5% per tahun dari Rp. 55,434 miliar (2023) menjadi Rp. 145,860 miliar (2030), yang terutama akan didorong oleh sumber opsen PKB dan BBNKB. Selain itu, target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.

2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Trenggalek. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2030 ditargetkan tumbuh ± 5% per tahun dari Rp. 233,750 miliar (2025) menjadi Rp. 314,883 miliar (2030). Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 6,92% per tahun. Pada umumnya, ruang Pendapatan Retribusi Daerah relatif terbatas yang merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022, di mana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan oleh Daerah.

Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk

sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.

2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh ± 10% per tahun dari Rp. 5,865 miliar (2025) menjadi Rp. 9,801 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangkan pertumbuhan masa lalu yang mencapai 5,63% per tahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang

efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.

3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2025-2030 ditargetkan mengalami kenaikan ± 7% pertahun dari Rp. 20,231 miliar (2025) menjadi Rp. 13.624 miliar (2030). Fluktuatifnya lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ini dikarenakan semakin menurunnya pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah dari penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan meningkatkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

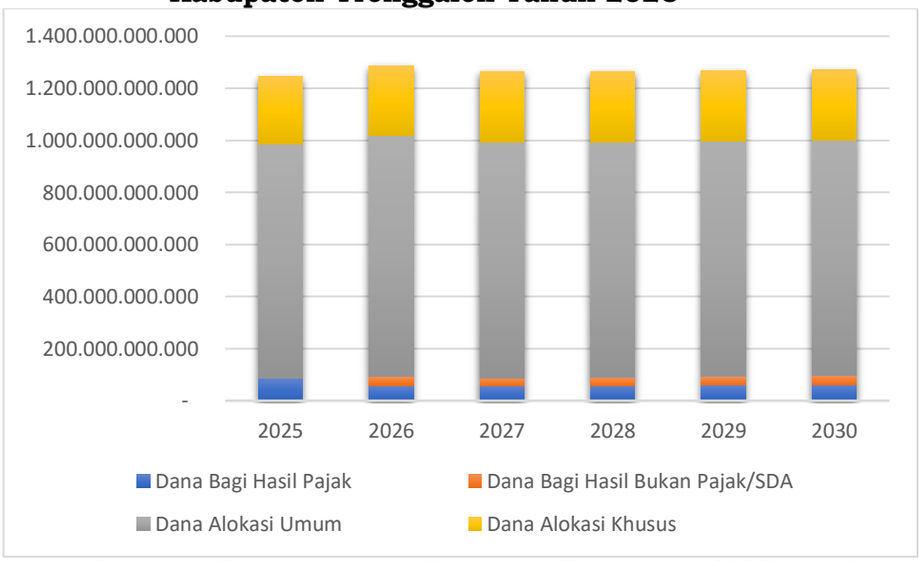
Grafik II.86
Target Komposisi PAD
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030



Sumber: Bakeuda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara.

Grafik II.87
Target Komposisi Dana Perimbangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025



Sumber: Bakeuda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Sumber Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil provinsi juga ditargetkan tumbuh, dari Rp. 98,301 miliar (2025) menjadi Rp 113,8 miliar (2030), sementara realisasi tahun 2023 sebesar Rp 113,806 miliar.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.110
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**1.928.594.341.324**	**1.967.755.766.749**	**1.970.806.285.550**	**1.997.195.281.674**	**2.029.674.903.984**	**2.064.013.584.870**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**375.056.669.957**	**385.726.173.575**	**409.972.159.037**	**432.814.082.031**	**457.731.182.276**	**484.169.634.812**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	115.209.458.666	121.745.000.000	126.000.000.000	132.300.000.000	138.915.000.000	145.860.750.000
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	233.750.941.988	247.212.149.975	265.838.049.975	280.514.109.814	297.173.212.003	314.883.606.620
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	5.865.000.000	6.375.127.000	7.012.639.700	8.100.000.000	8.910.000.000	9.801.000.000
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	20.231.269.303	10.393.896.600	11.121.469.362	11.899.972.217	12.732.970.273	13.624.278.192
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.539.618.685.597**	**1.582.029.593.174**	**1.560.834.126.513**	**1.564.381.199.643**	**1.571.943.721.708**	**1.579.843.950.058**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.441.317.591.597**	**1.482.274.012.667**	**1.459.159.589.687**	**1.458.820.141.744**	**1.462.340.681.893**	**1.466.037.249.050**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.246.282.567.597**	**1.287.162.416.667**	**1.264.047.993.687**	**1.263.708.545.744**	**1.267.229.085.893**	**1.270.925.653.050**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	87.548.933.000	59.015.663.000	56.634.326.000	57.944.061.350	59.325.832.144	60.783.600.332
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA		35.315.338.000	30.914.607.000	30.914.607.000	33.053.376.355	35.292.175.325
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	900.265.940.000	923.420.298.667	907.087.943.687	905.438.760.394	905.438.760.394	905.438.760.394
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	258.467.694.597	269.411.117.000	269.411.117.000	269.411.117.000	269.411.117.000	269.411.117.000

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**31.726.484.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**
1.2.1.4	**Dana Desa**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**98.301.094.000**	**99.755.580.507**	**101.674.536.826**	**105.561.057.899**	**109.603.039.815**	**113.806.701.008**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	93.425.307.000	95.244.070.507	97.163.026.826	101.049.547.899	105.091.529.815	109.295.191.008
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**4.875.787.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.875.787.000	4.511.510.000	4.511.510.000	4.511.510.000	4.511.510.000	4.511.510.000
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**13.918.985.770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**	13.918.985.770	-	-	-	-	-

Sumber: Bakeuda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
    a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
    b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Trenggalek, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan ± 0,76% per tahun dari Rp. 2,011 triliun (2025) menjadi Rp. 2,088 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu 2020-2024, yang mencapai pertumbuhan ± 1,85% per tahun karena adanya peningkatan pendapatan transfer dalam kurun waktu 2020 ke 2024.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal, khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi, akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Adapun belanja operasi mulai tahun 2025 tumbuh dari Rp. 1,600 triliun (2025) menjadi Rp.1,545 triliun (2030), sementara realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1,456 triliun (2023). Dalam komposisi Belanja Operasi, jenis belanja Hibah akan ditekan secara signifikan dengan target penurunan -15% per tahun dari Rp. 53,417 miliar (2025) menjadi Rp. 30 miliar (2030). Sedangkan belanja pegawai diproyeksikan meningkat di tahun 2030 dibandingkan realisasi 2023, kemudian ditarget meningkat—namun peningkatan tersebut untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan tambahan ASN—dengan target peningkatan rata-rata sebesar ± 1% per tahun dari Rp. 990,227 triliun (2025) menjadi Rp. 1,022 triliun (2030). Adapun realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 784,401 miliar. Untuk bantuan sosial ditargetkan konstan sebagaimana realisasi tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 2,709 miliar per tahun hingga 2030. Untuk belanja Barang dan Jasa, porsinya lebih rendah jika dibandingkan realisasi tahun 2023, yang sebesar Rp. 582,568 miliar. Adapun target belanja Barang dan Jasa dari tahun 2025 hingga 2030 akan mengalami penurunan sebesar -0,16% per tahun dari Rp. 549,351 miliar (2025) menjadi Rp. 490,327 miliar (2030).

Grafik II.88
Target Belanja Operasi
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)



Sumber: Bakueda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan dari Rp179,9 miliar (2025) menjadi Rp 199,1 miliar (2030). Pada tahun 2025 dan 2026 belanja modal direncanakan mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah. Pinjaman tersebut diarahkan penggunaannya untuk belanja daerah berupa peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, percantikan kawasan dan pariwisata, sumber daya alam untuk ketahanan pangan dan mitigasi bencana, perbaikan sarana olahraga serta pembangunan sarana ekonomi kreatif.

Secara umum porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan, irigasi, dan jaringan, dengan alokasi 56% dari total belanja modal (Rp 239,737 miliar pada 2030), kemudian belanja bangunan dan gedung sebesar 19% (Rp 46,364 miliar pada 2030), belanja peralatan dan mesin sebesar 23% (Rp 50,00 miliar pada 2030), serta sisanya belanja aset tetap lainnya sebesar 0,48% (Rp2,287 miliar pada 2030). Arah pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan difokuskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Oleh karena itu, sasaran pembangunan harus jelas dan spesifik. Sementara itu, belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat proses produksi di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta wilayah secara bersamaan.

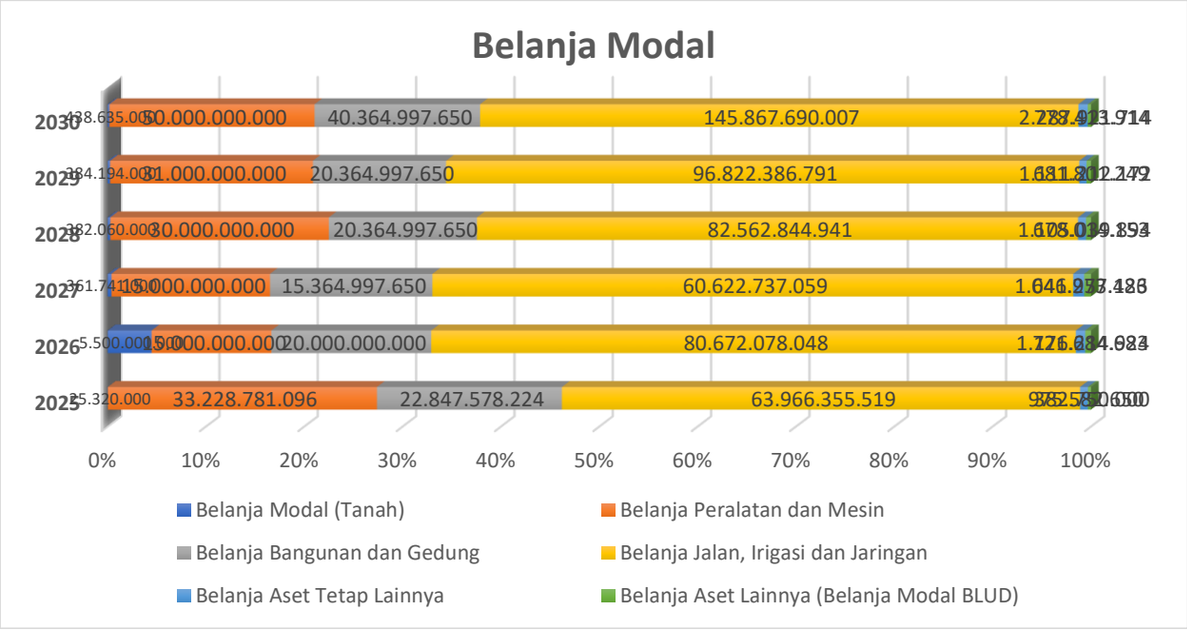
Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.89
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030



Sumber: Bakeuda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Grafik II.90
Target Alokasi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)



Sumber: Bakeuda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025(diolah)

Belanja Tak Terduga tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 5,6 M dan meningkat menjadi sebesar Rp. 15,4 M pada tahun 2030. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat, seperti penanganan bencana banjir, yang memerlukan respon cepat dan sejenisnya.

Sementara itu, Belanja Transfer ditargetkan mengalami peningkatan 0.7% per tahun dalam kurun waktu 2025-2030, dari Rp. 282,313.80 juta menjadi Rp. 285,048.68 juta.

Dengan melihat potensi semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah.

Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.

4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.111
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	**BELANJA**	**2.011.130.230.680**	**2.003.958.719.980**	**1.954.643.084.529**	**1.965.398.234.905**	**2.060.877.857.215**	**2.088.716.538.101**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.600.891.467.246**	**1.591.897.888.418**	**1.564.899.066.568**	**1.539.401.360.639**	**1.614.681.937.508**	**1.545.881.937.508**
2.1.1	Belanja Pegawai	990.227.365.356	1.070.442.440.513	1.089.364.601.332	1.066.138.021.564	1.042.121.422.076	1.022.844.940.908
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	549.351.011.905	492.745.768.405	450.524.785.737	452.703.659.575	471.050.835.932	490.327.317.100
2.1.2	Belanja Bunga	6.301.382.869	6.000.000.000	5.300.000.000	3.400.000.000	1.000.000.000	-
2.1.4	Belanja Subsidi	25.000.000					
2.1.5	Belanja Hibah	52.417.027.616	20.000.000.000	17.000.000.000	14.450.000.000	97.800.000.000	30.000.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.569.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500
2.1.7	Belanja keuangan						
2.2	**BELANJA MODAL**	**121.426.367.489**	**123.069.977.655**	**93.037.706.317**	**135.092.956.639**	**150.364.591.861**	**239.737.658.285**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	25.320.000	5.500.000.000	361.741.000	382.060.000	384.194.000	438.635.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.228.781.096	15.000.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000	31.000.000.000	50.000.000.000
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	22.847.578.224	20.000.000.000	15.364.997.650	20.364.997.650	20.364.997.650	40.364.997.650
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.966.355.519	80.672.078.048	60.622.737.059	82.562.844.941	96.822.386.791	145.867.690.007

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.5	**Belanja Aset Tetap Lainnya**	975.582.650	1.176.214.924	1.046.273.486	1.105.039.894	1.111.212.172	2.287.921.714
2.2.6	**Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)**	382.750.000	721.684.683	641.957.123	678.014.153	681.801.249	778.413.914
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**6.008.598.919**	**6.054.157.249**	**13.281.524.986**	**6.781.524.986**	**10.981.524.986**	**17.481.524.986**
2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	6.008.598.919	6.054.157.249	13.281.524.986	6.781.524.986	10.981.524.986	17.481.524.986
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**282.803.797.026**	**282.936.696.658**	**283.424.786.658**	**284.122.392.641**	**284.849.802.860**	**285.615.417.322**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**14.023.917.526**	**14.646.817.158**	**15.134.907.158**	**15.832.513.141**	**16.559.923.360**	**17.325.537.822**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	14.023.917.526	12.174.500.000	12.600.000.000	13.230.000.000	13.891.500.000	14.586.075.000
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi		2.472.317.158	2.534.907.158	2.602.513.141	2.668.423.360	2.739.462.822
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**268.779.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	268.779.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.535.889.356)	(36.202.953.231)	16.163.201.021	31.797.046.769	(31.202.953.231)	(24.702.953.231)

Sumber: Bakeuda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

2.2.3.2. Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan neto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pembiayaan Daerah, meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
4) Dalam mendukung berlangsungnya program kegiatan prioritas daerah, kebijakan dalam penerimaan daerah maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penerimaan daerah juga lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.
5) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek diantaranya diarahkan pada pembayaran cicilan pokok utang, pembentukan dana cadangan sebagai persiapan pembiayaan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2029 serta penyertaan modal ke BUMD sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah.

Dari sisi penerimaan pembiayaan pada proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar 139,535 milyar rupiah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Hingga pada tahun 2030 penerimaan pembiayaan diproyeksikan menurun menjadi sebesar 27,202

milyar rupiah. Ditopang dengan asumsi capaian indikator makro ekonomi Nasional serta beberapa asumsi terkait penetapan angka-angka proyeksi, maka perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

1. Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun 2025-2030 diproyeksikan cenderung menurun dari tahun ke tahun, seiring dengan harapan semakin baiknya pengelolaan pengeluaran belanja pembangunan daerah.
2. Pencairan Dana Cadangan di tahun 2029 dari hasil pembentukan dana cadangan yang digunakan pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2029.
3. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI direncanakan direalisasi pada tahun 2025 (P-APBD 2025) dan tahun 2026 (APBD tahun 2026) diarahkan penggunaannya untuk belanja daerah berupa peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sanitasi dan persampahan, percantikan kawasan dan pariwisata, sumber daya alam untuk ketahanan pangan dan mitigasi bencana, perbaikan sarana olahraga serta pembangunan sarana ekonomi kreatif.

   Lebih lanjut terkait kerjasama pinjaman daerah tersebut akan menyesuaikan dengan hasil perjanjian / kesepakatan kerjasama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan PT. SMI untuk pengalokasian/ realisasinya, tetap menjadi 2 tahap/ kali di Perubahan APBD TA 2025 dan APBD TA 2026 atau menjadi semuanya di 1 tahun, APBD TA. 2026.
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman untuk tiap tahunnya diproyeksikan sama dengan target penerimaan Tahun 2025;
5. Pembentukan dana cadangan untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2029. Pembentukan dana cadangan diproyeksikan dilaksanakan di tahun 2027 dan 2028.
6. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diantaranya melalui penyertaan modal ke Swasta/BUMD sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah.
7. Pembayaran pokok utang dan bunga pinjaman daerah :
   a. kewajiban pembayaran sisa pokok utang di tahun 2025-2026 atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, percantikan kawasan dan pariwisata, sumber daya alam untuk ketahanan pangan dan mitigasi bencana, perbaikan sarana olahraga serta pembangunan sarana ekonomi kreatif dari Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI.
   b. Pembayaran pokok utang atas pengajuan pinjaman daerah kembali ke Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI. Kewajiban pembayaran tersebut direncanakan dimulai tahun 2026 dan berakhir di tahun 2029.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.112
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	**PEMBIAYAAN**	**82.535.889.356**	**36.202.953.231**	**(16.163.201.021)**	**(31.797.046.769)**	**31.202.953.231**	**24.702.953.231**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**139.535.889.356**	**100.202.953.231**	**30.336.798.979**	**29.202.953.231**	**68.202.953.231**	**27.202.953.231**
3.1.1	**Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**	83.332.936.125	50.000.000.000	30.133.845.748	29.000.000.000	28.000.000.000	27.000.000.000
3.1.2	**Pencairan Dana Cadangan**					40.000.000.000	
3.1.4	**Penerimaan Pinjaman Daerah;**	56.000.000.000	50.000.000.000				
3.1.5	**Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	202.953.231	202.953.231	202.953.231	202.953.231	202.953.231	202.953.231
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**57.000.000.000**	**64.000.000.000**	**46.500.000.000**	**61.000.000.000**	**37.000.000.000**	**2.500.000.000**
3.2.1	**Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo**	57.000.000.000	64.000.000.000	22.000.000.000	38.500.000.000	34.500.000.000	-
3.2.2	**Penyertaan modal daerah;**			4.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.2.3	**Pembentukan Dana Cadangan;**			20.000.000.000	20.000.000.000		
	PEMBIAYAAN NETTO	**82.535.889.356**	**36.202.953.231**	**(16.163.201.021)**	**(31.797.046.769)**	**31.202.953.231**	**24.702.953.231**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	0	0	- 0	- 0	-	- 0

Sumber: Bakeuda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

Tabel II.113
Proyeksi APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030 (rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**1.928.594.341.324**	**1.967.755.766.749**	**1.970.806.285.550**	**1.997.195.281.674**	**2.029.674.903.984**	**2.064.013.584.870**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**375.056.669.957**	**385.726.173.575**	**409.972.159.037**	**432.814.082.031**	**457.731.182.276**	**484.169.634.812**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	115.209.458.666	121.745.000.000	126.000.000.000	132.300.000.000	138.915.000.000	145.860.750.000
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	233.750.941.988	247.212.149.975	265.838.049.975	280.514.109.814	297.173.212.003	314.883.606.620
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	5.865.000.000	6.375.127.000	7.012.639.700	8.100.000.000	8.910.000.000	9.801.000.000
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	20.231.269.303	10.393.896.600	11.121.469.362	11.899.972.217	12.732.970.273	13.624.278.192
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.539.618.685.597**	**1.582.029.593.174**	**1.560.834.126.513**	**1.564.381.199.643**	**1.571.943.721.708**	**1.579.843.950.058**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.441.317.591.597**	**1.482.274.012.667**	**1.459.159.589.687**	**1.458.820.141.744**	**1.462.340.681.893**	**1.466.037.249.050**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.246.282.567.597**	**1.287.162.416.667**	**1.264.047.993.687**	**1.263.708.545.744**	**1.267.229.085.893**	**1.270.925.653.050**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	87.548.933.000	59.015.663.000	56.634.326.000	57.944.061.350	59.325.832.144	60.783.600.332
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA		35.315.338.000	30.914.607.000	30.914.607.000	33.053.376.355	35.292.175.325
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	900.265.940.000	923.420.298.667	907.087.943.687	905.438.760.394	905.438.760.394	905.438.760.394
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	258.467.694.597	269.411.117.000	269.411.117.000	269.411.117.000	269.411.117.000	269.411.117.000
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**31.726.484.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**	**31.803.056.000**
1.2.1.4	**Dana Desa**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**	**163.308.540.000**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**98.301.094.000**	**99.755.580.507**	**101.674.536.826**	**105.561.057.899**	**109.603.039.815**	**113.806.701.008**

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	93.425.307.000	95.244.070.507	97.163.026.826	101.049.547.899	105.091.529.815	109.295.191.008
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**4.875.787.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**	**4.511.510.000**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.875.787.000	4.511.510.000	4.511.510.000	4.511.510.000	4.511.510.000	4.511.510.000
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**13.918.985.770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**	13.918.985.770	-	-	-	-	-
2	**BELANJA**	**2.011.130.230.680**	**2.003.958.719.980**	**1.954.643.084.529**	**1.965.398.234.905**	**2.060.877.857.215**	**2.088.716.538.101**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.600.891.467.246**	**1.591.397.888.418**	**1.564.899.066.568**	**1.539.401.360.639**	**1.614.681.937.508**	**1.545.881.937.508**
2.1.1	**Belanja Pegawai**	990.227.365.356	1.070.442.440.513	1.089.364.601.332	1.066.138.021.564	1.042.121.422.076	1.022.844.940.908
2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	549.351.011.905	492.245.768.405	450.524.785.737	452.703.659.575	471.050.835.932	490.327.317.100
2.1.2	**Belanja Bunga**	6.301.382.869	6.000.000.000	5.300.000.000	3.400.000.000	1.000.000.000	-
2.1.4	**Belanja Subsidi**	25.000.000					
2.1.5	**Belanja Hibah**	52.417.027.616	20.000.000.000	17.000.000.000	14.450.000.000	97.800.000.000	30.000.000.000
2.1.6	**Belanja Bantuan Sosial**	2.569.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500	2.709.679.500
2.1.7	**Belanja keuangan**						
2.2	**BELANJA MODAL**	**121.426.367.489**	**123.069.977.655**	**93.037.706.317**	**135.092.956.639**	**150.364.591.861**	**239.737.658.285**
2.2.1	**Belanja Modal (Tanah)**	25.320.000	5.500.000.000	361.741.000	382.060.000	384.194.000	438.635.000
2.2.2	**Belanja Peralatan dan Mesin**	33.228.781.096	15.000.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000	31.000.000.000	50.000.000.000
2.2.3	**Belanja Bangunan dan Gedung**	22.847.578.224	20.000.000.000	15.364.997.650	20.364.997.650	20.364.997.650	40.364.997.650

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.4	**Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**	63.966.355.519	80.672.078.048	60.622.737.059	82.562.844.941	96.822.386.791	145.867.690.007
2.2.5	**Belanja Aset Tetap Lainnya**	975.582.650	1.176.214.924	1.046.273.486	1.105.039.894	1.111.212.172	2.287.921.714
2.2.6	**Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)**	382.750.000	721.684.683	641.957.123	678.014.153	681.801.249	778.413.914
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**6.008.598.919**	**6.554.157.249**	**13.281.524.986**	**6.781.524.986**	**10.981.524.986**	**17.481.524.986**
2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	6.008.598.919	6.554.157.249	13.281.524.986	6.781.524.986	10.981.524.986	17.481.524.986
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**282.803.797.026**	**282.936.696.658**	**283.424.786.658**	**284.122.392.641**	**284.849.802.860**	**285.615.417.322**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**14.023.917.526**	**14.646.817.158**	**15.134.907.158**	**15.832.513.141**	**16.559.923.360**	**17.325.537.822**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	14.023.917.526	12.174.500.000	12.600.000.000	13.230.000.000	13.891.500.000	14.586.075.000
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi		2.472.317.158	2.534.907.158	2.602.513.141	2.668.423.360	2.739.462.822
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**268.779.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**	**268.289.879.500**
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	268.779.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500	268.289.879.500
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(82.535.889.356)**	**(36.202.953.231)**	**16.163.201.021**	**31.797.046.769**	**(31.202.953.231)**	**(24.702.953.231)**
3	**PEMBIAYAAN**	**82.535.889.356**	**36.202.953.231**	**(16.163.201.021)**	**(31.797.046.769)**	**31.202.953.231**	**24.702.953.231**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**139.535.889.356**	**100.202.953.231**	**30.336.798.979**	**29.202.953.231**	**68.202.953.231**	**27.202.953.231**
3.1.1	**Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**	83.332.936.125	50.000.000.000	30.133.845.748	29.000.000.000	28.000.000.000	27.000.000.000
3.1.2	**Pencairan Dana Cadangan**					40.000.000.000	
3.1.4	**Penerimaan Pinjaman Daerah;**	56.000.000.000	50.000.000.000				

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.953.231	202.953.231	202.953.231	202.953.231	202.953.231	202.953.231
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**57.000.000.000**	**64.000.000.000**	**46.500.000.000**	**61.000.000.000**	**37.000.000.000**	**2.500.000.000**
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	57.000.000.000	64.000.000.000	22.000.000.000	38.500.000.000	34.500.000.000	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;			4.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;			20.000.000.000	20.000.000.000		
	PEMBIAYAAN NETTO	**82.535.889.356**	**36.202.953.231**	**(16.163.201.021)**	**(31.797.046.769)**	**31.202.953.231**	**24.702.953.231**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	0	0	- 0	- 0	-	- 0

Sumber: Bakueda, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025 (diolah)

2.2.4 Alternatif Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta memberikan alternatif sumber pembiayaan demi mendukung percepatan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM), dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan antara lain dapat dilaksanakan melalui :

a. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

Dalam mendukung berlangsungnya program kegiatan prioritas daerah, kebijakan melakukan pinjaman daerah pada tahun 2025 dan 2026 melalui PT SMI dalam rangka mendukung peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sanitasi dan persampahan, percantikan kawasan dan pariwisata, sumber daya alam untuk ketahanan pangan, mitigasi bencana, perbaikan sarana olahraga serta pembangunan sarana ekonomi kreatif. Namun di luar tahun 2025 dan 2026, pada periode tahun 2027-2030 sangat dimungkinkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat memanfaatkan kerjasama pinjaman daerah untuk pembiayaan peningkatan pembangunan daerah, meskipun dalam proyeksi pendanaan yang telah di bahas pada bab dan sub bab sebelumnya belum terdapat proyeksi. Hal ini mengingat saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang besarannya tergantung kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan proyeksi pembiayaan pinjaman daerah tersebut nantinya akan tertuang dalam penyusunan dokumen RKPD periode

tahun 2027-2030 dengan memperhatikan dan berpedoman pada perturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 jenis pinjaman yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk daerah dalam rangka PEN. Pertama, Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN dan Kedua, Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang sumber dananya dari PT SMI.

Pinjaman daerah yang lebih atraktif dapat berupa penerbitan Obligasi Daerah atau Surat Berharga Daerah. Selain mendorong literasi akses keuangan daerah, Obligasi Daerah dapat menciptakan ekosistem investasi sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakatnya. Di pasar perdana, masyarakat dan korporasi lokal dapat diprioritaskan sebagai investor yang menyerap Obligasi Daerah. Disisi lain, *sense of belonging* juga dapat mendorong para investor berperan mengawasi penggunaan dana pinjaman daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Termasuk *"awareness"* dalam suksesnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk membayar pokok dan bunga / kupon dari Obligasi Daerah.

Dengan adanya beberapa alternatif pinjaman daerah tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek. Karateristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

c. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut corporate social responsibility (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangun Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL) atau nilai perusahaan (corporate value) dilihat dari segi kondisi ekonominya (financial) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Ketiga pilar (3P) ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gap* antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan, maka dalam mempertimbangkan kebijakan jangka menengah perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Trenggalek. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional/Global, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi masalah utama Kabupaten Trenggalek **"Belum terwujudnya pembangunan daerah yang adil dan makmur"** dengan permasalahan pokok sebagai berikut:

Gambar II.19
Kerangka Indeks Daya Saing Daerah
Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Trenggalek



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Dengan merujuk pada perumusan permasalahan pokok diatas, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses dan kualitas infrastruktur yang memadai

Permasalahan masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses dan kualitas infrastruktur yang memadai di Kabupaten Trenggalek berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu dampak utamanya adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik yang memadai. Infrastruktur yang kurang memadai tidak hanya menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur menyebabkan wilayah pedesaan atau terpencil tertinggal dibandingkan daerah perkotaan, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang merata terlihat pada kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan belum optimalnya kualitas jaringan jalan yang tersebar di wilayah tersebut. Meskipun terjadi penurunan total panjang jalan menjadi 859,96 km, masih terdapat bagian jalan yang mengalami kerusakan cukup serius. Hal ini berdampak pada terganggunya konektivitas antarwilayah, distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan pegunungan. Permasalahan ini mengindikasikan perlunya perbaikan strategi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam pembangunan serta pemeliharaan jalan. Pada periode awal

tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik tercatat sebanyak 393,23 km, namun persoalan kerusakan jalan yang masih cukup tinggi. Tercatat panjang jalan dalam kondisi rusak ringan mencapai 118,7 km, dan rusak berat sebesar 121,76 km, sehingga total panjang jalan rusak mencapai 240,46 km atau sekitar 28% dari total panjang jalan yang ada. Bahkan, kondisi jalan mantap sampai dengan awal tahun 2025 justru mengalami penurunan menjadi 66,89%. Tingginya jumlah jalan yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, menjadi indikasi lemahnya program pemeliharaan rutin dan berkala yang seharusnya dapat mencegah kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu melakukan langkah strategis dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan kolaborasi lintas sektor, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan berbasis data spasial menjadi hal krusial agar pembangunan jalan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain jalan, tantangan infrastruktur lainnya juga terlihat dari keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak masih sebesar 86,33%. Sementara itu, akses terhadap sanitasi yang layak, yang diukur dari persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak, baru mencapai 84,66%.

Berdasarkan permasalahan dan data yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Trenggalek berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta perkembangan ekonomi daerah. Salah satu dampak utamanya adalah terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, terutama di daerah terpencil yang kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Ketimpangan infrastruktur ini menyebabkan kesenjangan dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Masyarakat di wilayah dengan infrastruktur yang kurang berkembang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesempatan ekonomi. Dengan ini diharapkan adanya pendekatan yang lebih berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan lebih efektif, merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

2. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di setiap perangkat daerah Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu indikator untuk melihat kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Capaian IRB mengalami peningkatan dari 78,24 pada tahun menjadi 87,35 (A-) pada 2024. Meskipun tren IRB menunjukkan kemajuan positif, tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kualitas

reformasi birokrasi secara berkelanjutan agar dapat benar-benar mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Masih terdapat beberapa langkah-langkah untuk menghindari stagnasi reformasi birokrasi seperti penguatan sistem merit, penanganan resistensi terhadap perubahan dari sebagian aparatur, dan opimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu, faktor koordinasi lintas perangkat daerah serta keterbatasan kapasitas SDM birokrasi perlu untuk ditangani. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program reformasi birokrasi, meningkatkan pelatihan dan pengawasan, serta memperkuat budaya kerja berbasis kinerja untuk menghindari kemunduran pada masa mendatang.

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi 73,19, menandakan adanya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat menjadi indikasi belum optimalnya sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini juga mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan komitmen terhadap budaya kerja berbasis hasil (result-based management).

Berdasarkan data nilai AKIP tahun 2023 mencapai 74,07, dan mengalami penurunan ke 2024 menjadi 73,19. Penurunan selama dua tahun berturut-turut ini menandakan adanya persoalan yang belum ditangani secara tuntas, baik dari segi perencanaan strategis maupun pelaksanaan program-program prioritas. Permasalahan yang menjadi penyebab penurunan AKIP di antaranya adalah kurangnya penguatan mekanisme evaluasi internal, lemahnya integrasi antara dokumen perencanaan dan anggaran, serta belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja. Di samping itu, kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu melakukan penguatan kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas pengawasan internal, serta mendorong penerapan manajemen kinerja yang lebih akuntabel dan transparan.

Hasil penilaian *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan menjadi 94,18 setelah sebelumnya pada tahun 2023 mencapai 88,42. Jika meninjau tren dari tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Trenggalek sempat mencatatkan peningkatan MCP yang signifikan. Pada tahun 2020, skor MCP hanya 64,49, kemudian naik menjadi 84,69 pada tahun 2021, dan meningkat signifikan menjadi 91,80 di tahun 2022. Kenaikan tersebut menunjukkan keberhasilan signifikan dalam memperbaiki sistem pengawasan internal dan komitmen terhadap pencegahan korupsi. Fluktuasi capaian MCP tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam menjaga konsistensi implementasi delapan area intervensi MCP seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak. Permasalahan utama yang memengaruhi antara lain lemahnya monitoring internal secara berkelanjutan,

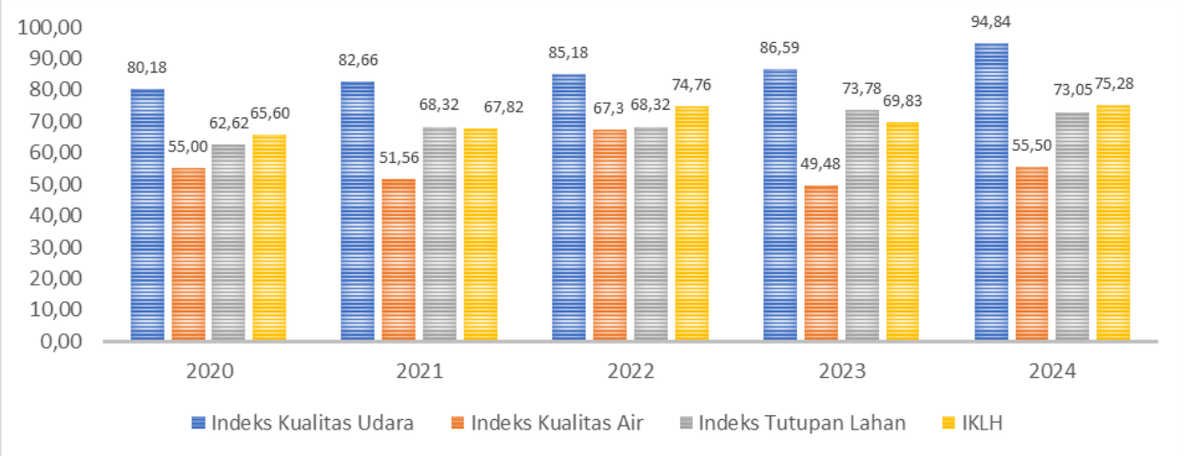
kurang optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum menyeluruhnya integrasi sistem informasi dalam mendukung delapan area intervensi MCP. Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu memperkuat sistem pencegahan korupsi secara holistik, meningkatkan kapasitas SDM pengawasan, serta memastikan bahwa seluruh sektor layanan publik berjalan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu dampak utama dari belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan adalah rendahnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang pada tahun 2023 hanya mencapai 3,13 dari skala maksimal 5. Capaian ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Trenggalek masih belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan dari berbagai pilar pembentuk IDSD, termasuk kualitas birokrasi, efisiensi kebijakan, dan inovasi daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani, diperlukan langkah strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

3. Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup

Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek merupakan masalah yang semakin mendesak untuk diatasi. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berdasarkan data IKLH Kabupaten Trenggalek mencapai 69,83 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 75,28. Penilaian IKLH Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa indikator komposit yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan vegetasi. Indeks tertinggi adalah kualitas udara, yang mencatat angka sebesar 94,84 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa udara di Trenggalek relatif bersih dan sehat. Kemudian Indeks kualitas lahan, mencapai 73,05 pada tahun 2024, indeks kualitas air dengan capaian 55,5, yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan capaian 49,48 seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.

Grafik II.91
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Risiko lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek memerlukan perhatian khusus seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap kualitas ekosistem daerah. Berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD, meskipun secara umum Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih tergolong baik, terdapat penurunan cukup signifikan pada Indeks Kualitas Air (IKA) dari 67,3 di tahun 2022 menjadi 49,48 di tahun 2023, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pengelolaan limbah domestik dan aktivitas pertanian ramah lingkungan. Di sisi lain, daya dukung kawasan lindung berada pada kategori sedang dengan nilai 0,5, menunjukkan bahwa sebagian wilayah lindung memerlukan penguatan fungsi dan perlindungan lebih lanjut. Selain itu, sejumlah wilayah juga memiliki potensi bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang berdampak pada sektor pertanian, sumber air, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu semakin memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui penguatan fungsi lindung, peningkatan kualitas air dan tanah, serta strategi mitigasi risiko bencana secara terpadu.

4. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif di Kabupaten Trenggalek belum optimal

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif di Kabupaten Trenggalek masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kontribusi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, keterbatasan akses permodalan, serta rendahnya daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Infrastruktur pendukung seperti fasilitas produksi, distribusi, serta digitalisasi usaha juga belum merata dan belum mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif. Kondisi ini menyebabkan potensi ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat, belum mampu dimaksimalkan secara berkelanjutan. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan turut menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan inovatif. Program pemberdayaan yang ada cenderung bersifat sporadis dan belum menyentuh akar persoalan struktural yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kecil. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang lebih terintegrasi dan berbasis potensi lokal, serta dukungan kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas SDM, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi agar ekonomi kerakyatan di Trenggalek dapat tumbuh secara produktif dan kompetitif.

Dengan memahami perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek yang mana jika melihat pada struktur PDRB terdapat 3 sektor yang cukup mendominasi yaitu sektor pertanian sebesar 25,98 persen dan industri pengolahan sebesar 18,51 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,14 persen. Kemudian jika melihat pada sektor lainnya yang cukup potensial namun belum berkembang secara signifikan adalah sektor pariwisata dan jasa lainnya. Dengan melihat kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum sebagai asumsi kontribusi pariwisata masih mencapai 2,11 persen dan jasa lainnya masih mencapai 2,67 persen. Terkait dengan pariwisata dengan adanya obyek wisata yang ada di Kabupaten

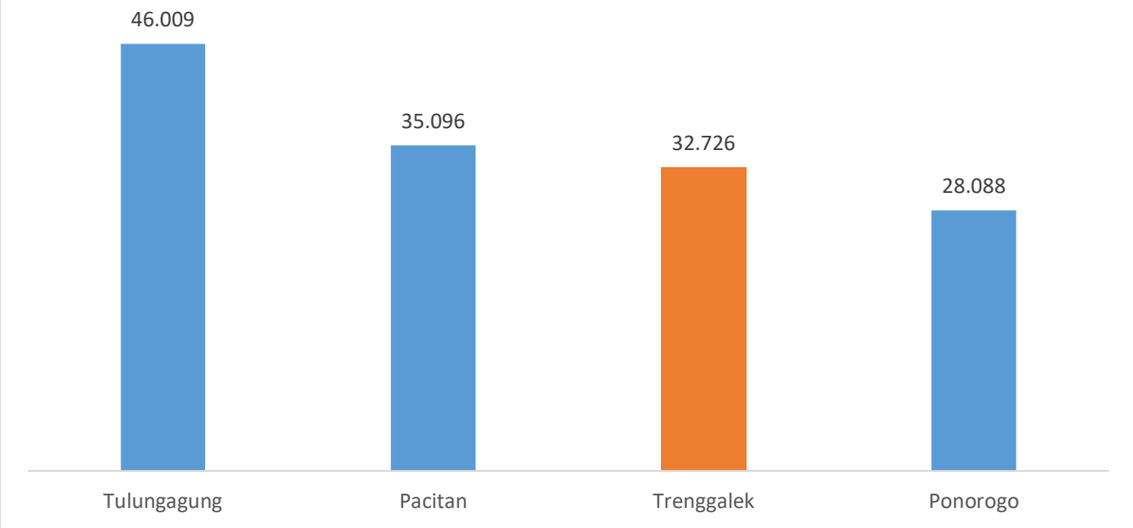
Trenggalek, belum menunjukkan kontribusi yang maksimal, jika melihat rata-rata lama tinggal wisatawan 1 hari. Dengan ini dapat diindikasikan bahwa belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian selain pengelolaan yang masih belum maksimal dengan melihat sektor jasa, pemasaran produk juga masih belum optimal terutama pemanfaatan IT/media social masih perlu ditingkatkan. Sehingga diharapkan nantinya produk-produk yang dihasilkan harus sudah terolah/terproses melalui industri baik skala besar ataupun kecil. Dengan begitu produk unggulan daerah memiliki nilai tambah yang mampu dipasarkan didalam dan luar daerah bahkan hingga keluar negeri (ekspor).

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek dari 4,92 persen pada tahun 2023 menjadi 4,71 persen di tahun 2024 mencerminkan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh melambatnya kinerja sektor-sektor unggulan serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kondisi eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global maupun nasional juga turut mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor perdagangan, pertanian, dan industri kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Trenggalek.

Dengan permasalahan ini ke depan perlu adanya upaya percepatan pembangunan ekonomi masih membutuhkan penguatan yang lebih menyeluruh, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur pendukung, maupun kapasitas pelaku ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan ekonomi yang telah berjalan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengakselerasi pertumbuhan melalui inovasi, peningkatan daya saing, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan langkah yang tepat dan terukur, diharapkan LPE Trenggalek dapat kembali meningkat secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mengetahui kondisi kesejahteraan/ekonomi Masyarakat salah satunya melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita. Semakin tinggi PDRB Perkapita berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Trenggalek mencapai 32,73 juta perkapita, jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih dibawah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Pacitan, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini. Dengan ini mengindikasikan belum optimalnya pembangunan ekonomi Masyarakat.

Grafik II.92
PDRB Perkapita (Ribu) Atas Dasar Harga Berlaku daerah sekitar Kabupaten Trenggalek Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Dalam rangka mengetahui pembangunan ekonomi sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka perlu dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). IPEI merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi di suatu wilayah melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan indikator IPEI dapat melihat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua Masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok masyarakat miskin dan masyarakat minoritas termasuk disabilitas. Jika IPEI menunjukkan nilai yang tinggi, artinya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut telah berhasil menciptakan kesempatan dan manfaat bagi semua penduduk tanpa terkecuali. Sebaliknya, jika nilai IPEI rendah, ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dan banyak orang yang belum merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif dan merata. Berdasarkan data Bappenas RI, IPEI Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mencapai 5,69. IPEI memiliki 3 pilar indeks pembentuk IPEI yaitu indeks pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan capaian 4,96, indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dengan capaian indeks 6,48 dan indeks perluasan akses dan kesempatan dengan capaian 6,59. Dengan capaian ini terlihat IPEI Kabupaten Trenggalek menunjukkan inklusivitas pembangunan ekonomi yang masih belum merata, hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat ekonomi Masyarakat.

Permasalahan belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi kerakyatan di Kabupaten Trenggalek membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan, stagnasi pertumbuhan sektor unggulan, serta belum optimalnya nilai tambah dari sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata mengakibatkan masih rendahnya PDRB per kapita dan melambatnya Pertumbuhan Ekonomi. Di sisi lain, capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang masih belum ideal menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok rentan dan masyarakat miskin.

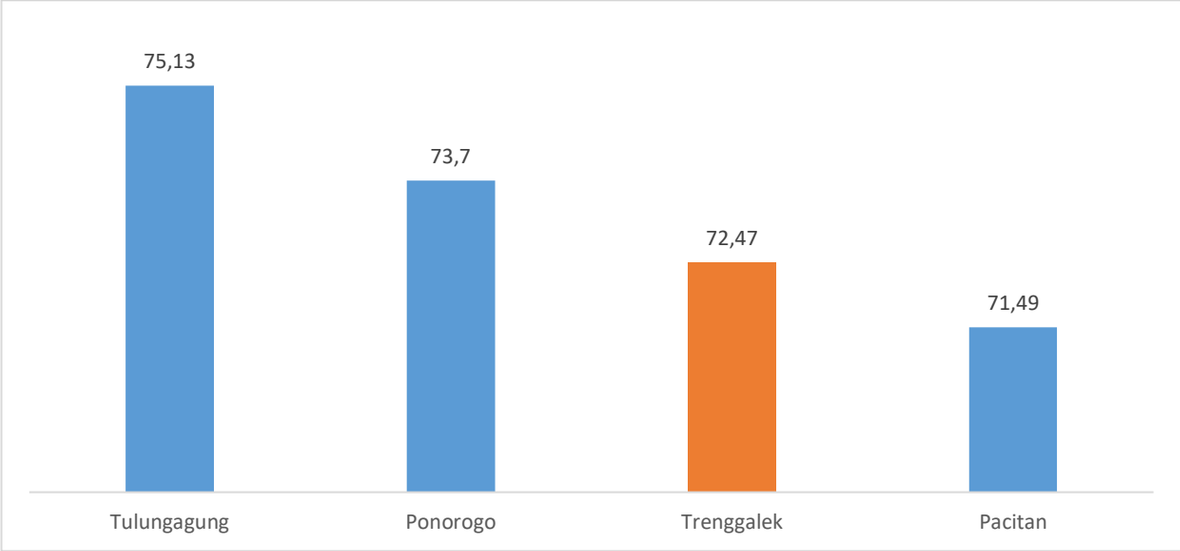
Ketidakseimbangan ini memperbesar risiko ketimpangan sosial dan memperlemah fondasi ekonomi lokal, jika tidak segera diintervensi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD 2025–2029 menjadi sangat krusial untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan mampu memperkuat rantai nilai melalui pendekatan hilirisasi serta digitalisasi, agar Trenggalek dapat bangkit menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya daya saing SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera

Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan sejahtera di Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun berbagai program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial telah dilaksanakan, capaian indikator kualitas SDM seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masih menunjukkan kesenjangan. Masih banyak masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup dan produktivitas mereka. Rendahnya keterampilan kerja dan akses terhadap pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing SDM lokal. Di sisi lain, tantangan stunting, pengangguran terbuka, serta ketimpangan sosial-ekonomi turut memperkuat kompleksitas persoalan SDM di Trenggalek. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih terarah dan terintegrasi melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan skill berbasis potensi lokal, serta kebijakan afirmatif yang mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, dan sejahtera secara merata.

Salah satu indikator yang menunjukkan kualitas SDM adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Trenggalek mencapai 72,47 dengan kategori **“Tinggi”.** Dengan capaian tersebut, IPM Kabupaten Trenggalek masih belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan agar mencapai nilai diatas 80 dengan kategori sangat tinggi. Kemudian jika dibandingkan dengan beberapa daerah sekitar, capaian IPM Kabupaten Trenggalek masih dibawah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung, seperti yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

Grafik II.93
Perbandingan IPM (LF 2020) Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Terdekat Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Memahami lebih mendalam, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dalam bidang pendidikan, dapat dilihat pada capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RRLS) Kabupaten Trenggalek masih mencapai 7,90 dengan nilai standar maksimal 15 tahun, yang berarti sebagian besar masyarakat Kabupaten Trenggalek mencatat rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2024 sebesar 7,92 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 2. Sementara itu, harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,63 tahun dari nilai standar maksimal 18 tahun, yang berarti sebagian besar masyarakat Kabupaten Trenggalek memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga tamat SMA dan sebagian hingga setara Diploma 1. Capaian RLS dan HLS tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Trenggalek masih belum optimal karena belum mencapai nilai standar maksimal.

Di bidang kesehatan, angka harapan hidup (UHH) masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 mencapai 75,35 tahun dari standar maksimal 85 tahun, yang menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar maksimal. Jika dicermati lebih detail perkembangan UHH Kabupaten Trenggalek ditahun 2024 peningkatannya tidak setinggi yang terjadi ditahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesehatan Masyarakat Kabupaten Trenggalek ditahun 2024 sebetulnya terdapat penurunan jika dibandingkan dengan peningkatan ditahun 2023.

Selanjutnya, dari sisi kesejahteraan, pengeluaran per kapita riil masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 mencapai Rp 10,87 juta per kapita dari standar maksimum Rp 26,57 juta per kapita, yang mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih berada di bawah standar hidup layak. Dengan ini berarti kualitas pendidikan tenaga kerja masih rendah sehingga sebagian masyarakat bekerja pada sektor yang masih rendah pendapatannya. Dengan ini dapat disimpulkan belum optimalnya kualitas SDM di Kabupaten Trenggalek terlihat dari belum optimalnya keterampilan kerja yang kuat dalam sektor-sektor ekonomi lokal seperti

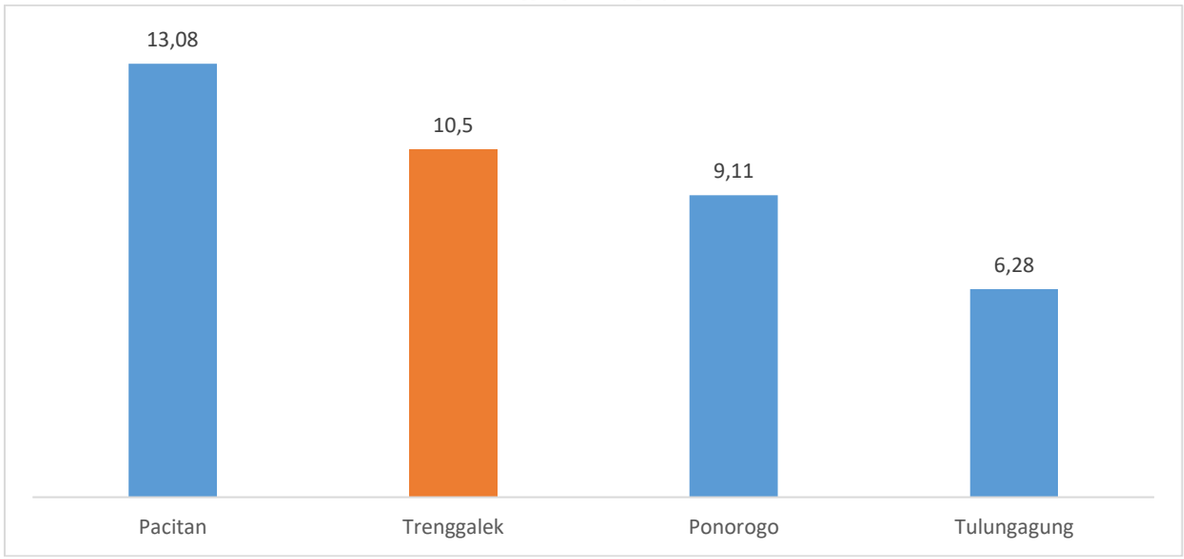
pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Kemudian kemampuan dalam pemanfaatan IT dalam meningkatkan skill dan kompetensi masih sangat terbatas. Dengan terus mendorong peningkatan kualitas kompetensi masyarakat, harapannya Kabupaten Trenggalek dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak positif dalam pembangunan daerah.

6. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkesinambungan

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal, baik dari sisi efektivitas program maupun keberlanjutannya. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun laju penurunannya masih tergolong lambat. Faktor lain yang turut memperlambat pengentasan kemiskinan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, serta layanan dasar seperti kesehatan. Kurangnya pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha produktif juga menjadikan masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di Trenggalek memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan agar mampu menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemiskinan adalah keterbatasan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, artinya Masyarakat tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh kualitas pemberdayaan masih masih belum optimal. Hal ini terkait dengan kualitas tenaga kerja Kabupaten Trenggalek, yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah dengan capaian 43,86 persen ditahun 2024, dengan kondisi saat ini Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor yang masih rendah pendapatannya. Kemudian jika melihat data tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, terlihat sektor pertanian paling tinggi mencapai 49,29%. Dengan ini berarti sebagian besar Masyarakat Kabupaten Trenggalek bekerja pada sektor pertanian, yang relative masih rentan dengan penghasilan rendah. Kemudian berdasarkan data pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten trenggalek mencapai 10,5%. Kemudian jika dibandingkan dengan beberapa daerah sekitar, tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek masih lebih tinggi daripada Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung seperti pada gambar dibawah ini. Hal ini mengindikasikan penurunan Tingkat kemiskinan yang masih belum optimal.

Grafik II.94
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Dengan Kabupaten sekitar
Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan pemerataan pendapatan Masyarakat. Pemerataan pendapatan masyarakat, di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dari Indeks Gini. Indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana rasio gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sedangkan rasio gini bernilai 1 artinya terjadi ketimpangan sempurna. Kategori ketimpangan rendah terjadi jika rasio gini berada diantara 0 dan 0,3. Kategori ketimpangan moderat/sedang terjadi jika rasio gini berada diantara 0,3 hingga 0,5, sedangkan kategori ketimpangan tinggi terjadi apabila rasio gini berada di atas 0,5. Berdasarkan data BPS Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 mencapai 0,336 kemudian meningkat ditahun 2024 yang mencapai angka 0,35 mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin tinggi. Indeks Gini yang mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, dan kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sebagian kecil masyarakat memperoleh proporsi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya ketimpangan ini antara lain adalah belum meratanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta terbatasnya kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, sektor informal yang banyak digeluti oleh masyarakat miskin cenderung memiliki produktivitas dan penghasilan yang lebih rendah dibandingkan sektor formal. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti permodalan, teknologi, dan informasi juga memperbesar jurang kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan afirmatif yang memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta pemerataan pembangunan agar distribusi hasil pembangunan dapat lebih adil dan merata.

Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pendapatan Masyarakat di Kabupaten trenggalek. Ketimpangan pendapatan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dapat mengakibatkan sebagian besar penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses terhadap peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam kondisi ekonomi yang buruk, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain itu, ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan dapat meningkat di kalangan masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dapat memicu konflik sosial, kerusuhan, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Ketimpangan pendapatan juga dapat mengurangi kohesi sosial, menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan swasta. Dengan demikian, harapannya melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas kompetensi/skill serta pemerataan aksesibilitas, permasalahan belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkesinambungan dapat diatasi sehingga mampu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penjabaran permasalahan pokok atas, maka beberapa permasalahan urusan sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.114
Permasalahan Perurusan Kabupaten Trenggalek

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan kesetaraan sesuai dengan standar
		Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan Standar Kompetensi
		Partisipasi sekolah masyarakat dalam rangka menuntaskan pendidikan 12 tahun belum optimal
		Masih adanya satuan pendidikan yang akreditasinya di bawah B
		Kualitas pembelajaran peserta didik berdasarkan hasil Asesment Nasional masih dalam level sedang

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
2	Kesehatan	Belum terpenuhinya tenaga kesehatan sesuai standar
		Masih adanya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tidak sesuai standar
		Masih ditemukannya kasus stunting, gizi buruk serta penyakit menular dan tidak menular
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Keterbatasan aksesibilitas di kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan
		Belum optimalnya kondisi jalan sebagai konektivitas dari/menuju pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis kabupaten
		Belum optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman, khususnya air minum dan sanitasi bersih dan aman
		Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM anggota Trantibumlinmas
		Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat
		Belum optimalnya penegakan PERDA
		Belum optimalnya Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
6	Sosial	Masih tingginya tingkattingkat kemiskinan karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber ekonomi
		Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS
		Belum optimalnya pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi dalam program perlindungan sosial
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
6	Tenaga Kerja	Belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
		Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja
		Belum optimalnya keikutsertaan pekerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan
		Belum optimalnya perlindungan hak dan kewajiban pekerja
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan
		Masih tingginya kesenjangan gender dalam pembangunan
		Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di keluarga
		Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
8	Pangan	Adanya potensi daerah rawan pangan
		Konsumsi pangan belum beragam, bergizi seimbang dan aman
		Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan
9	Pertanahan	Belum optimalnya administrasi pertanahan
10	Lingkungan Hidup	Potensi kerusakan sebagai dampak aktivitas ekonomi meningkat
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan sampah
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan registrasi terkait kondisi kependudukan
		Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
		Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya akses dan pelayanan terkait KB (masih tingginya unmet need)
		Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesejahteraan dan ketahanan keluarga
14	Perhubungan	Belum optimalnya penyelenggaraan perhubungan darat dan laut dari aspek Perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
15	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya pengelolaan media desiminasi informasi

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
		Belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi
16	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Belum optimalnya keaktifan dan pemenuhan regulasi koperasi secara menyeluruh
		Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran koperasi dan Usaha Mikro
		Belum optimalnya kualitas SDM pelaku koperasi dan Usaha Mikro
17	Penanaman Modal Daerah	Belum optimalnya iklim investasi di daerah terkait rencana tata ruang wilayah dan rencana umum penanaman modal (pemetaan potensi, promosi dan pengendalian penanaman modal)
		Belum optimalnya integrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan usaha berbasis digital
18	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya kegiatan kepemudaan untuk mengeksplorasi kreatifitas dan eksistensi pemuda
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
		Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder/pembina olahraga terkait peningkatan prestasi atlet di tingkat regional, nasional, dan internasional
19	Statistik	Belum optimalnya penyediaan data yang valid dan tepat waktu
		Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Trenggalek
20	Persandian	Belum optimalnya jaringan keamanan informasi
		Kualitas dan kuantitas SDM Persandian belum memadai
21	Kebudayaan	Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar dan nilai budaya
		Kurang optimalnya pembinaan SDM kebudayaan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan aktivitas seni budaya
22	Perpustakaan	Masih kurangnya minat baca masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
23	Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan
		Belum terpenuhinya jumlah SDM Arsiparis
Urusan Pemerintahan Pilihan		

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
24	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumberdaya ikan dan pesisir
		Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas penangkapan ikan
		Belum tertatanya lokasi usaha budidaya tambak dan pengolahan hasil perikanan
25	Pariwisata	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata baik dari segi pengelola (SDM) maupun obyek wisata
		Belum optimalnya peningkatan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas pariwisata
		Belum berkembangnya ekosistem industri pariwisata yang mengedepankan kerjasama antar pelaku usaha yang saling menguntungkan
		Persaingan pasar pariwisata sangat ketat
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
26	Pertanian	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian
		Petani milenial/taruna tani semakin berkurang
		Kapasitas SDM petani, penyuluh, dan kelembagaan petani belum maksimal
		Luas lahan pertanian berkelanjutan semakin terancam
		Adanya potensi terjadi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)
		Produk pertanian yang belum terstandarisasi
		Penerapan *smart farming* belum optimal
27	Perdagangan	Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat
		Belum optimalnya akses pemasaran produk lokal ke pasar regional, nasional, dan internasional
		Belum optimalnya pengendalian harga serta barang kebutuhan pokok
28	Perindustrian	Perlu penguatan sentra industri yang berorientasi pada produk unggulan daerah.
		Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemenuhan standarisasi, sertifikasi, perizinan resmi, dan pelaporan industri kecil dan menengah

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
		Perlu upaya lebih lanjut untuk pengembangan industri hijau
29	Transmigrasi	Adanya keterbatasan kemampuan daerah dalam pengiriman transmigran
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
30	Sekretariat Daerah	Belum optimalnya sinergitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah
		Belum semua PD memiliki agen perubahan, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan survei kepuasan masyarakat
		Belum optimalnya penataan organisasi dan tata kelola dalam menjawab tantangan regulasi pemerintah pusat dan tuntutan reformasi birokrasi
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Trenggalek
31	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam meningkatkan capaian kinerja Anggota Dewan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja DPRD
32	Perencanaan Pembangunan	Tantangan dalam mewujudkan integrasi dan sinkronisasi yang optimal antar tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan
		Tantangan ketersediaan sumber daya manusia perencana yang kompeten
		Tantangan dalam menyediakan data dan informasi pembangunan yang akurat, real-time, dan terstruktur secara komprehensif
33	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
		Belum optimalnya pengelolaan aset pemerintah daerah
34	Kepegawaian	Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen karier PNS dengan metode sistem merit
		Belum optimalnya sistem pembinaan, *reward* dan *punishment*
		Belum optimalnya tata kelola peningkatan kompetensi ASN dan kesesuaian penempatan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
35	Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN
36	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan sistem inovasi daerah (SIDa), penelitian dan pengkajian
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk pelaksanaan pembangunan
37	Pengawasan	Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
38	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
		Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
		Belum optimalnya tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN di kecamatan
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila dan Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi, serta kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Bangsa Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
		Masih adanya potensi konflik yang terjadi di masyarakat
		Belum optimalnya tata kelola Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat

2.3.2. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang kebijakan dan program yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun,

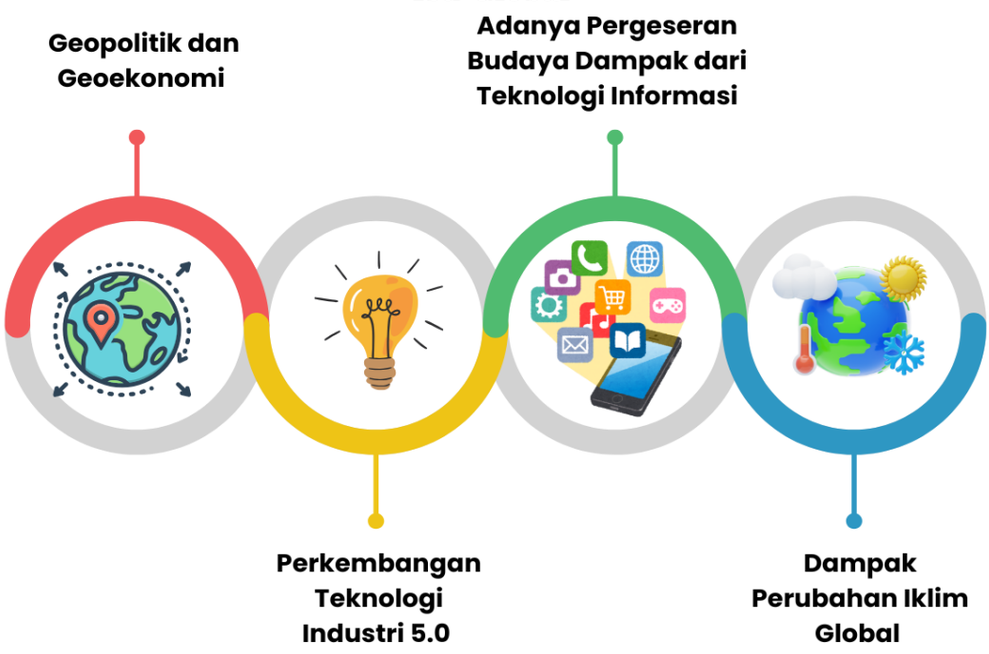
sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional menjadi isu global yang penting dalam pembangunan nasional pada jangka menengah (RPJMN) yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Trenggalek. Isu strategis internasional akan dijabarkan sebagai berikut:

Gambar II.20
Isu Global



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang sarat ketidakpastian—seperti ketegangan antarnegara, kebijakan proteksionisme, dan volatilitas harga komoditas—Kabupaten Trenggalek dituntut untuk memperkuat ketahanan ekonominya secara strategis. Sebagai daerah dengan keunggulan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, penguatan ekonomi lokal perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk olahan yang inovatif dan berorientasi ekspor. Pengembangan produk seperti olahan padi, jagung, kopi, ikan asap, dan ikan

beku dapat menjadi pendorong ketahanan ekonomi yang lebih adaptif terhadap tekanan global. Untuk menopang strategi ini, penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas perdagangan menjadi krusial, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan, jaringan transportasi, dan jalur distribusi. Selain itu, promosi intensif produk unggulan ke pasar internasional dan pembentukan kemitraan strategis dengan investor serta pelaku bisnis, baik nasional maupun global, akan mempercepat transfer teknologi, perluasan pasar, dan masuknya investasi baru. Dengan pendekatan tersebut, Trenggalek tidak hanya mampu menghadapi guncangan eksternal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global yang ditandai dengan peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan bencana alam seperti kekeringan dan banjir memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Trenggalek. Sebagai daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produktivitas, gagal panen, dan menurunnya hasil tangkapan ikan. Untuk menghadapi tantangan ini, Trenggalek perlu meningkatkan kapasitas adaptasi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Penerapan teknologi irigasi tetes, penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dapat meningkatkan ketahanan sektor pertanian di tengah tantangan iklim.

Selain itu, penguatan sektor perikanan melalui pengembangan budidaya ikan dengan sistem terkontrol dan ramah lingkungan menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas hasil perikanan. Kabupaten Trenggalek juga perlu meningkatkan kapasitas petani dan nelayan melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi yang memadai, dan pengembangan sistem asuransi pertanian dan perikanan untuk memitigasi risiko akibat perubahan iklim. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring cuaca dan manajemen sumber daya perikanan juga dapat meningkatkan ketahanan sektor ini. Dengan strategi adaptasi yang efektif, Trenggalek dapat menjaga ketahanan pangan, meningkatkan produksi hasil pertanian dan perikanan, serta mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim global.

3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0

Perkembangan teknologi Industri 5.0 yang menekankan pada integrasi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan otomatisasi membuka peluang besar bagi Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor unggulan. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan dapat meningkatkan kualitas produk, mempercepat proses produksi, dan menekan biaya operasional. Misalnya, penerapan teknologi IoT dalam pemantauan lahan pertanian dan sistem budidaya perikanan berbasis sensor dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Selain itu, pengembangan industri pengolahan seperti

pengolahan hasil kopi, cokelat, dan produk perikanan dengan teknologi modern dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan Trenggalek. Di sektor pariwisata, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dapat memperkuat promosi dan pengelolaan destinasi wisata. Pengembangan platform digital untuk reservasi, pemasaran, dan pelaporan kondisi wisata dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperluas jangkauan promosi hingga pasar internasional. Selain itu, pengembangan sistem pembayaran digital dan layanan berbasis teknologi dalam pengelolaan destinasi wisata dapat meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Industri 5.0, Kabupaten Trenggalek dapat memperkuat daya saing sektor unggulan dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran budaya dalam pola konsumsi, gaya hidup, dan interaksi sosial masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital memberikan peluang bagi Trenggalek untuk memperkuat promosi produk unggulan dan destinasi wisata. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk pertanian organik, olahan hasil perikanan, dan produk herbal sebagai bagian dari tren konsumsi sehat. Penggunaan platform e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk unggulan seperti kopi, ikan asap, dan makanan olahan dapat meningkatkan daya saing produk Trenggalek di pasar nasional dan internasional.

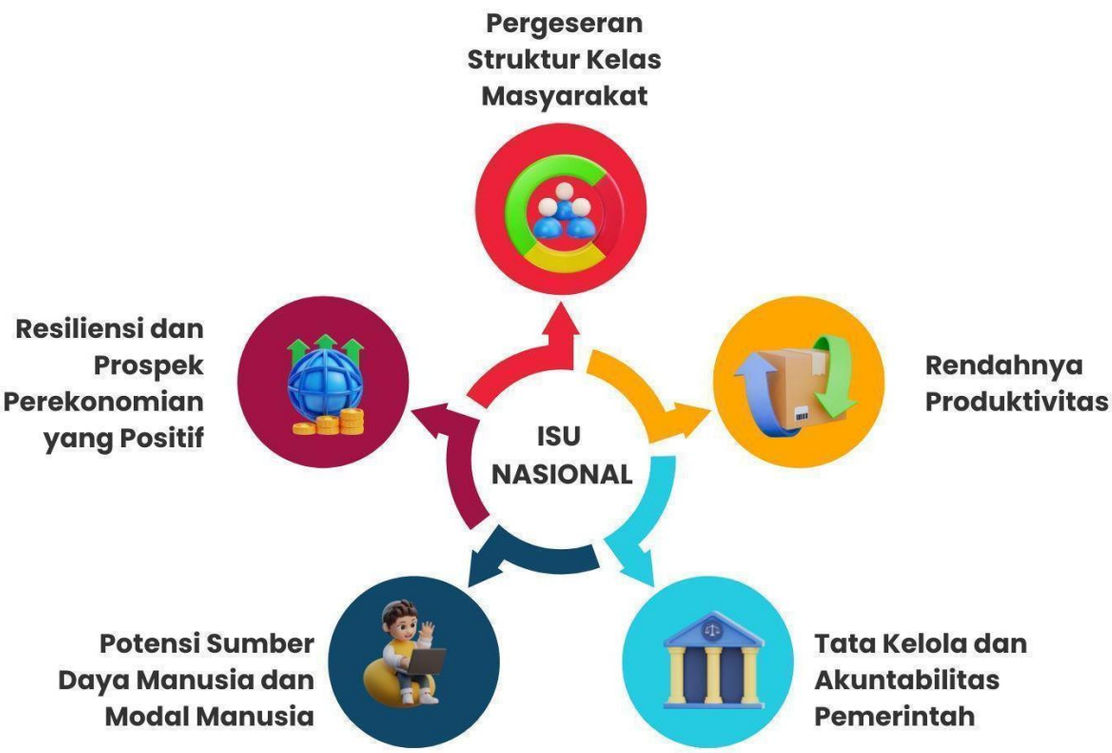
Di sektor pariwisata, pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata Trenggalek. Pengembangan konten digital berupa video promosi, ulasan wisata, dan kampanye media sosial yang melibatkan influencer dapat meningkatkan minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, penguatan ekosistem digital melalui pengembangan aplikasi wisata dan pemanfaatan big data dalam pengelolaan destinasi wisata dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata. Dengan strategi promosi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Kabupaten Trenggalek dapat meningkatkan daya tarik wisata dan memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional menjadi elemen penting dalam menyusun kebijakan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, karena isu nasional dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung dinamika pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengantisipasi dampak isu strategis nasional serta memanfaatkan peluang yang muncul. Kabupaten Trenggalek, dengan potensi besar di sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional, terutama dalam upaya meningkatkan

ketahanan pangan, memperkuat daya saing industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Telaah terhadap isu nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, sehingga kebijakan daerah mampu selaras dengan arah pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek. Berikut penjabaran telaah isu strategis nasional.

Gambar II.21
Isu Strategis Nasional



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Ketahanan ekonomi nasional yang terjaga di tengah ketidakpastian global memberikan peluang bagi Kabupaten Trenggalek untuk memperkuat struktur ekonominya melalui pengembangan sektor unggulan. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui penerapan teknologi modern dan diversifikasi hasil pertanian. Selain itu, pengembangan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perikanan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Penguatan infrastruktur perdagangan dan konektivitas juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk unggulan Trenggalek di pasar nasional dan internasional, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global, Kabupaten Trenggalek perlu memperkuat ketahanan ekonomi dengan meningkatkan daya

saing sektor unggulan dan memperluas akses pasar. Peningkatan kapasitas infrastruktur logistik, termasuk perbaikan jaringan jalan, akses ke pelabuhan, dan pengembangan fasilitas perdagangan, dapat mempercepat proses distribusi dan memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Selain itu, strategi promosi dan kolaborasi dengan investor dan pelaku bisnis nasional maupun internasional akan meningkatkan penetrasi produk unggulan Trenggalek ke pasar yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, Trenggalek dapat menciptakan ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global.

2. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor krusial dalam mendorong daya saing daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Trenggalek. Peningkatan keterampilan di sektor pertanian modern, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi strategi utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Melalui program pelatihan vokasi, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, Trenggalek dapat menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang tinggi. Penguatan pendidikan formal dan informal, termasuk pengembangan sekolah kejuruan dan pusat pelatihan berbasis teknologi, menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan inovatif. Peningkatan kapasitas SDM juga harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan berbasis teknologi akan mempercepat transformasi tenaga kerja ke sektor-sektor produktif, termasuk industri pengolahan dan ekonomi kreatif. Selain itu, pengembangan program inkubasi bisnis dan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM akan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Trenggalek. Dengan pengelolaan modal manusia yang optimal, Kabupaten Trenggalek dapat menciptakan ekosistem tenaga kerja yang kompetitif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Perubahan struktur kelas masyarakat yang terjadi di tingkat nasional menciptakan peluang bagi Kabupaten Trenggalek untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Kenaikan kelas menengah telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam dan menuntut produk dengan kualitas tinggi. Kabupaten Trenggalek memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang ini melalui pengembangan industri pengolahan dan peningkatan kualitas produk pertanian dan perikanan. Pengolahan hasil pertanian seperti kopi, kakao, dan produk olahan ikan dapat diarahkan ke segmen pasar kelas menengah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM menjadi strategi utama dalam mempercepat proses inklusi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kabupaten Trenggalek dapat mendorong pengembangan produk lokal berbasis kearifan lokal dan

meningkatkan akses pasar melalui platform digital dan promosi berbasis media sosial. Dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas produksi, akses permodalan, dan pelatihan kewirausahaan akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Trenggalek. Dengan strategi ini, Kabupaten Trenggalek dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah.

4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek. Penguatan mekanisme pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat sasaran. Keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan anggaran yang efisien menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi manajemen, dan penerapan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas layanan publik di Trenggalek. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas pengelolaan anggaran dan mencegah potensi penyimpangan. Kabupaten Trenggalek juga perlu memperkuat kapasitas birokrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pada data dan kebutuhan masyarakat. Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kinerja pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Kabupaten Trenggalek dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Selain menganalisis isu nasional, telah tertuang Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Trenggalek dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehtaan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

- RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:
  1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
  2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
  3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
  4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
  5. Pemberantasan kemiskinan
  6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
  7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesial peninkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
  8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
  9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
  10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
  11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
  12. Menjamin ketersediaan pukuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
  13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
  14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
  15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
  16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

➢ Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sebagai bagian dari upaya mendukung visi RPJMN 2025-2029, Kabupaten Trenggalek memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita dan 17 program prioritas. Penguatan sektor pertanian dan pengembangan industri pengolahan di Trenggalek sejalan dengan target swasembada pangan dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA), yang menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal mendukung misi penguatan SDM dan sains teknologi dalam RPJMN. Peningkatan infrastruktur perdagangan dan konektivitas di Trenggalek juga selaras dengan program pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM yang diusung dalam RPJMN. Trenggalek berpotensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan agromaritim industri melalui peran aktif koperasi, sejalan dengan target pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Trenggalek dapat memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah, yang mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

RPJMN telah memberikan arah pembangunan kewilayahan yang memuat highlight indikasi intervensi untuk Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

Tabel II.115
***Highlight* Indikasi Intervensi Kabupaten Trenggalek**

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas	1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah 2. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) untuk meningkatkan hasil produksi. 3. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani, termasuk pengembangan kawasan peternakan. 4. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura untuk mendukung diversifikasi hasil pertanian. 5. Pembangunan dan pemeliharaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. 6. Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas 7. Pembangunan Bendungan Bagong 8. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui: • Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; • Optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; • Peningkatan penggunaan pupuk, pestisida, dan pakan organik. 9. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: • Penyediaan dan perluasan akses alat mesin pertanian (alsintan) modern, benih dan bibit berkualitas, serta pupuk dan pestisida berkualitas; • Mitigasi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan kesehatan hewan; • Peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; • Peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen. 10. Peningkatan manajemen usaha tani, termasuk: • Penguatan akses pasar dan pembiayaan usaha tani; • Perluasan akses asuransi usaha tani;

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Pengendalian kepastian pasar melalui peningkatan literasi keuangan petani; • Penguatan kelembagaan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan); • Penguatan koperasi dan korporasi petani; • Penyediaan dana bergulir dan kredit lunak bagi petani; • Peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; • Pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama. 11. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka: Pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal; Peningkatan produktivitas pertanian; Penguatan implementasi hasil riset pertanian. 12. Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur
Kawasan Afirmasi Pegunungan Selatan Jawa Timur difokuskan pada pemerataan pembangunan	1. Penyediaan infrastruktur layanan dasar meliputi air baku, air minum, dan sanitasi; infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi; listrik perdesaan; serta rumah layak huni, termasuk peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan. 2. Peningkatan ketahanan bencana melalui penguatan sistem peringatan dini dan infrastruktur tanggap darurat. 3. Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur dan preservasi JLS di ruas Wonogiri–Pacitan–Trenggalek–Tulungagung, serta jalan ruas Ponorogo–Pacitan dan Ponorogo–Trenggalek untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. 4. Pemberdayaan aktivitas ekonomi unggulan bernilai tinggi di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. 5. Percepatan transformasi digital di kawasan afirmasi melalui: • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Perluasan layanan penyiaran digital 6. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung	1.Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi 2. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Trenggalek 3. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap untuk meningkatkan hasil tangkapan. 4. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya guna meningkatkan produktivitas. 5. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat untuk meningkatkan hasil produksi. 6. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan melalui penerapan teknologi dan inovasi. 7. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal. 8. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan guna memastikan ketahanan dan distribusi hasil perikanan yang lebih efisien.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Kabupaten Trenggalek memiliki peran strategis dalam Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan hortikultura untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini mencakup rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian, intensifikasi lahan pertanian, dan pengembangan kawasan peternakan guna meningkatkan hasil pangan hewani. Selain itu, Trenggalek berperan dalam pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan dengan kebijakan tata ruang yang melindungi lahan pertanian dan optimalisasi lahan pertanian melalui penggunaan pupuk, pestisida, dan pakan organik berkualitas. Penguatan infrastruktur konektivitas, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan kualitas pascapanen menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Trenggalek juga terlibat dalam pengembangan pusat riset pertanian skala lokal, peningkatan akses pasar dan pembiayaan bagi petani, serta penguatan kelembagaan tani dan koperasi untuk memperkuat manajemen usaha tani. Selain mendukung ketahanan pangan, peran Trenggalek juga mencakup penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah dan

mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan pegunungan selatan Jawa Timur.

2.3.3. Telaah Isu Strategis Regional

2.3.3.1. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029

Memahami bahwa dalam penyususunan RPJMD Kabupaten Trenggalek harus memperhatikan kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka beberapa poin yang harus diperhatikan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- **Isu Strategis Daerah Provinsi Jawa Timur**

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan
2. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan
5. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

- **Visi**

Visi RPJMD Provinsi Jawa timur “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

- **Misi**

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2030 juga menetapkan bahwa 9 (sembilan) Misi Nawa Bhakti Satya menjadi 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran, arah kebijakan, rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan di tiap perangkat daerah hingga penyusunan program kerja prioritas. Setiap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan misi pembangunan dalam periode jangka menengah. Nawa Bhakti Satya menjadi Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) Jawa Timur, yaitu:

1) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 1

Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu

2) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 2

Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing

3) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 3

Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan

4) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 4

Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

5) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 5

Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan

6) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 6

Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC)

7) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 7

Jatim Berkah Amanah, Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

8) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 8

Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

9) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 9

Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral

Isu-isu strategis yang diangkat dalam RPJMD Provinsi, seperti pemulihan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah, penanggulangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sangat relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek. Misalnya, percepatan hilirisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan di Trenggalek dapat sejalan dengan upaya pemulihan dan peningkatan produktivitas serta nilai tambah sumber daya lokal yang menjadi fokus RPJMD Provinsi. Penataan infrastruktur yang merata dan handal di Trenggalek akan mendukung pemerataan akses terhadap jaringan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang juga merupakan prioritas dalam RPJMD Provinsi.

Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan basis data perlindungan sosial dapat mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dengan memperluas akses ke kesempatan kerja dan fasilitas pendidikan serta kesehatan yang layak. Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM berdaya saing di Trenggalek akan mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang menjadi bagian dari RPJMD Provinsi. Selain itu, penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola akan memperkuat sistem pemerintahan di Trenggalek, memastikan kebijakan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan. Terakhir, pengelolaan degradasi lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim di Trenggalek harus terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan triple bottom line yang ditekankan dalam RPJMD Provinsi, untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Sinergi antara isu-isu ini akan memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek, sejalan dengan visi pembangunan Jawa Timur.

2.3.3.2. Telaah RPJPD Kabupaten Trenggalek

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 untuk memastikan bahwa setiap isu dalam RPJMD relevan dengan pembangunan jangka panjang. Hal ini agar mampu memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini, terdapat 7 (Tujuh) isu strategis RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025-2045 yang telah memiliki relevansi terhadap isu strategis RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel II.116
Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 dengan Isu RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025-2045

Isu Strategis (RPJPD)	Isu Strategis RPJMD
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berbudaya, Handal Dan Berdayasaing Melalui Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.	Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM berdaya saing
Pemenuhan Jaminan Sosial Melalui Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Secara Tepat dan Terintegrasi.	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan basis data perlindungan sosial
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Produktif Berbasis Daya Saing Potensi Lokal	Percepatan hilirisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan
Tatakelola Pemerintahan Yang Progresif, Kolaboratif Dan Melayani	Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi berbasis transformasi tata kelola
Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib Dan Setara Serta Mempertahankan Kearifan Seni Dan Budaya Daerah	

Isu Strategis (RPJPD)	Isu Strategis RPJMD
Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Pembangunan Kewilayahan Yang Adil dan Merata	Penataan infrastruktur berbasis kewilayahan yang merata dan handal

Sumber: data diolah, 2025

Selain memperhatikan isu strategis RPJPD, RPJMD juga memperhatikan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045. Visi Kabupaten Trenggalek 2025-2045 yakni **"Kabupaten Trenggalek Net-Zero Carbon dengan Pendapatan Tinggi yang Berdaya Saing Kolektif"** dengan didukung oleh lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim
2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan produktif
3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata
4. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani

Pada RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029, terlihat jelas keselarasan dengan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045 yang menetapkan Trenggalek sebagai daerah yang berdaya saing kolektif. RPJMD ini mempertimbangkan isu-isu strategis seperti mewujudkan daya saing SDM, akselerasi pengentasan kemiskinan, percepatan hilirisasi, penguatan implementasi reformasi birokrasi, kondusifitas daerah, degradasi lingkungan hidup, dan penataan pembangunan infrastruktur wilayah. Fokusnya juga mencakup berdaya saing kolektif, pendapatan tinggi, dan net zero carbon. Penataan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan ramah lingkungan pijakan utama dalam merancang kebijakan untuk mencapai visi jangka panjang Kabupaten Trenggalek. Upaya perwujudan pembangunan ini didukung **dengan Tema Pembangunan 2025-2029 "Penguatan fondasi pembangunan: Pemenuhan Daya Dukung lingkungan yang secara simultan dilakukan dengan Pembangunan Fondasi Ekonomi, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, Tata kelola dan Aspek Lainnya"**. menegaskan komitmen untuk membangun struktur yang kokoh demi kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Dimana dari dasar adanya tema kebijakan tersebut akan dilakukan upaya perwujudan sekuestrasi karbon, hilirisasi sumber daya alam, penguatan riset inovasi, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, pembentukan kelembagaan, dan pelayanan public melalui pemberdayaan Masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan dari adanya arahan kebijakan tersebut, dapat menjadi langkah keselarasan dan peningkatan kualitas dari adanya rencana pembangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029.

2.3.3.3. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek periode 2025-2029 berperan penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap isu-isu lingkungan. KLHS ini mengidentifikasi beberapa isu krusial yang perlu diatasi guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Penyusunan KLHS ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Proses ini mencakup identifikasi pengaruh kebijakan, rencana, dan program pembangunan terhadap lingkungan hidup, serta pengintegrasian konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS juga memfasilitasi rangkaian forum dialog bersama kelompok masyarakat untuk menggali isu strategis pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dengan hasil analisis tersebut, KLHS memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa isu-isu strategis pembangunan Trenggalek dapat terakomodir secara efektif dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Trenggalek untuk RPJMD 2025-2029 meliputi:

- Pilar Ekonomi : (1) Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal. (2) Pemerataan Infrastruktur Wilayah, (3) Daya saing sektor unggulan
- Pilar Sosial : (1) Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan, (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, (3) Pemerataan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan)
- Pilar Lingkungan: (1) Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, (2) Mitigasi risiko Bencana dan Perubahan Iklim, dan (3) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Stok Karbon, (4) Konservasi sumber daya alam dan hayati
- Pilar Hukum dan Tata Kelola: (1) Pemantapan Tata Kelola Pemerintah (Good Government) dan pelayanan Publik (2) Kolaborasi pelaku pembangunan

Tabel II.117
Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD
dengan Isu Strategis RPJMD 2025-2029

ISU STRATEGIS KLHS RPJMD	ISU STRATEGIS RPJMD TRENGGALEK
Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal	Percepatan hilirisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan

ISU STRATEGIS KLHS RPJMD	ISU STRATEGIS RPJMD TRENGGALEK
Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Penataan infrastruktur berbasis kewilayahan yang merata dan handal
Pengentasan Kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan	Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data perlindungan sosial
1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2) Pemantapan Tata Kelola Pemerintah (Good Government) dan pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM berdaya saing
(1) Mitigasi dan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
(2) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
(3) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Stok Karbon	
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah (Good Government) dan Pelayanan Publik	Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi berbasis transformasi tata kelola

Sumber: data diolah, 2025

2.3.3.4. Telaah RTRW Kabupaten Trenggalek

1) Tujuan Penataan Ruang

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek untuk periode 2012-2032 menjelaskan arah perencanaan wilayah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan utama terkait penggunaan ruang. Dalam upaya menggerakkan pembangunan daerah, melibatkan RTRW untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Trenggalek, tujuan penataan ruang Kabupaten tersebut dirinci sebagai berikut:

"Mewujudkan Kabupaten sebagai Kawasan Agribisnis, Industri, Minapolitan, dan Pariwisata Yang Produktif Dan Berkelanjutan."

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Trenggalek, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Prinsip implementasi tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Trenggalek, yang perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Trenggalek tidak hanya bergantung pada aspek spasial, melainkan juga memperhatikan aspek sektoral sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Kebijakan mengenai Pola Ruang Kabupaten Trenggalek, dijelaskan sebagai berikut:

a. pemanfaatan fungsi dan pengendalian secara ketat berbasis pembangunan

berkelanjutan dengan strategi:
1. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung;
2. meningkatkan kualitas kawasan resapan air;
3. memantapkan kawasan perlindungan setempat; dan
4. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

b. Pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana dengan strategi:
1. mengendalikan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana;
2. memantapkan kawasan lindung geologi;
3. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
4. menetapkan zonasi kawasan rawan bencana; dan
5. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencan.

c. Pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya saing dan berpotensi dengan strategi :
1. mengembangkan sentra kawasan industri kecil, menengah dan besar;
2. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri;
3. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan industri; dan
4. mengembangkan industri baru pada kawasan potensial.

d. Pengembangan kawasan budidaya berbasis pada pendayagunaan potensi wilayah dengan strategi :
1. mengembangkan kawasan hutan produksi;
2. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat;
3. mengembangkan kawasan pertambangan;
4. menata dan mengendalikan kawasan peruntukkan industri;
5. meningkatkan pengembangan pariwisata;
6. meningkatkan pengembangan kawasan peruntukkan permukiman;
7. menata dan mengendalikan sektor informal; dan
8. mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terdiri atas :

- Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Trenggalek, terdiri atas :

a. PKL perkotaan Trenggalek berada di Kecamatan Trenggalek dengan fungsi meliputi :
1. pusat pemerintahan;
2. perdagangan dan jasa regional;
3. pengembangan permukiman;
4. pelayanan sosial; dan
5. pertumbuhan wilayah kabupaten

b. PKLp perkotaan Watulimo berada di Kecamatan Watulimo dengan fungsi meliputi:
1. pengembangan permukiman;
2. perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pelayanan sosial dan pemerintahan;
4. perikanan;
5. industri; dan
6. pariwisata

c. PKLp perkotaan Durenan berada di Kecamatan Durenan dengan fungsi

meliputi :
1. pengembangan permukiman;
2. perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
4. industri.

d. PPK perkotaan Kampak berada di Kecamatan Kampak dengan fungsi meliputi :
1. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
2. perdagangan dan jasa skala lokal

e. PPK perkotaan Panggul berada di Kecamatan Panggul dengan fungsi meliputi :
1. pengembangan permukiman;
2. pelayanan sosial dan pemerintahan;
3. perdagangan dan jasa skala lokal;
4. pariwisata; dan
5. industri.

- Rencana sistem perdesaaan di Kabupaten Trenggalek, terdiri atas :

Pengembangan pusat pelayanan desa secara hierarki berupa PPL meliputi :

a. Desa Masaran Kecamatan Bendungan;
b. Desa Duren Kecamatan Tugu;
c. Desa Sukowetan Kecamatan Karangan;
d. Desa Pogalan Kecamatan Pogalan;
e. Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari;
f. Desa Ngrandu Kecamatan Suruh;
g. Desa Sidomulyo Kecamatan Pule;
h. Desa Watuagung Kecamatan Dongko; dan
i. Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan.

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek

Rencana pola ruang wilayah kota merujuk pada rencana distribusi penggunaan lahan di wilayah kota, mencakup alokasi lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditargetkan hingga akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Rencana ini memberikan gambaran tentang penggunaan lahan di wilayah kota ke depan. Diketahui bahwa alokasi pola ruang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi aktivitas, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Alokasi rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Trenggalek terdiri atas:

- Kawasan Lindung
  1. Kawasan Hutan Lindung;
  2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  3. Kawasan perlindungan setempat;
  4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
     a. kawasan cagar alam meliputi :
        1) Kawasan pelestarian alam gua terdiri dari :
           - Goa Lowo berada di Kecamatan Watulimo;

- Goa Suruban berada di Kecamatan Watulimo;
- Goa Ngerit berada di Kecamatan Kampak;
- Goa Gajah berada di Kecamatan Bendungan;
- Goa Kalimati berada di Kecamatan Dongko; dan
- Goa Pringapus berada di Kecamatan Dongko.

2) Kawasan pelestarian alam air terjun terdiri dari :
   - Air Terjun Kalianak berada di Kecamatan Tugu;
   - Air terjun Kalianjok berada di Kecamatan Tugu;
   - Air terjun Songgolangit berada di Kecamatan Pule; dan
   - Air Terjun Jero Guih berada di Kecamatan Suruh.
3) Kawasan pelestarian alam gunung terdiri dari :
   - Gunung Sepikul berada di Kecamatan Watulimo; dan
   - Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh
4) Kawasan pelestarian pasir putih berupa Taman Kili-kili berada di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :
1) Kawasan Makam Menak Sopal berada di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek;
2) Kawasan Astono Giri Mulyo berada di Desa Sumber Kecamatan Karangan;
3) Kawasan Makam Setono Gedong berada di Desa Ngantru Kecamatan Trenggalek;
4) Kawasan Belik Joglo berada di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek;
5) Kawasan Situs Purbakala berada di Desa Semarum Kecamatan Durenan;
6) Kawasan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan;
7) Kawasan Candi Brongkah berada di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan; dan
8) Kawasan Makam Gunung Cilik Karang berada di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul.

5. Kawasan rawan bencana alam;
6. kawasan lindung geologi;
7. kawasan lindung lainnya;
8. ruang terbuka hijau perkotaan;

- Kawasan Budidaya

1. kawasan peruntukkan hutan produksi
2. kawasan hutan rakyat;
3. kawasan peruntukkan pertanian;
4. kawasan peruntukkan perkebunan;
5. kawasan peruntukkan perikanan;
6. kawasan peruntukkan pertambangan;
7. kawasan peruntukkan industri;
8. kawasan peruntukkan pariwisata meliputi :

a. Kawasan peruntukkan pariwisata budaya terdiri dari :
1) larung sembonyo berada di Kecamatan Watulimo;

2) larung longkangan berada di Kecamatan Munjungan;
3) kupatan berada di Kecamatan Durenan;
4) kupatan berada di Kecamatan Trenggalek;
5) baritan berada di Kecamatan Dongko;
6) prasasti kamulan berada di Kecamatan Durenan;
7) jaranan turonggo yakso berada di Kecamatan Dongko;
8) bersih dam bagong berada di Kecamatan Trenggalek; dan
9) tiban berada berada di seluruh kecamatan

b. Kawasan peruntukkan pariwisata alam terdiri dari :
1) Bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu;
2) Pantai Prigi berada di Kecamatan Watulimo;
3) Pantai Pasir putih berada di Kecamatan Watulimo;
4) Pantai Damas berada di Kecamatan Watulimo;
5) Goa Lowo berada di Kecamatan Watulimo;
6) Pantai Pelang berada di Kecamatan Panggul;
7) Pantai Joketro berada di Kecamatan Panggul;
8) Pantai Konang berada di Kecamatan Panggul;
9) Taman kili-kili berada di Kecamatan Panggul;
10) Pantai Blado berada di Kecamatan Munjungan;
11) Pantai Ngadipuro berada di Kecamatan Munjungan;
12) Pantai Ngampiran berada di Kecamatan Munjungan;
13) Panjat tebing Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh; dan
14) Panjat tebing Gunung Sepikul berada di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo.

9. kawasan peruntukkan permukiman;
10. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
11. kawasan peruntukkan lainnya.

3) Kawasan Strategis Kabupaten Trenggalek

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Trenggalek, terdiri atas:

- kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
  a. kerjasama regional kawasan perbatasan;
  b. pengembangan kawasan pariwisata;
  c. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK);
  d. pengembangan kawasan agropolitan;
  e. penyusunan rencana rinci pengembangan agropolitan;
  f. pengembangan kawasan minapolitan;
  g. penyusunan rencana rinci pengembangan minapolitan;
  h. pengembangan kawasan segitiga emas durenan;
  i. penyusunan rencana detail kawasan segitiga emas durenan; dan
  j. pembangunan Bendungan Tugu.
- Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
  a. pengoptimalan fungsi hutan lindung;
  b. pengendalian kawasan budidaya di kawasan sempadan sungai;
  c. pengendalian kawasan budidaya di kawasan sempadan pantai;

d. perlindungan kawasan lindung karst; dan
e. penyediaan RTH perkotaan

- Kawasan strategis lainnya berupa kawasan pengendalian ketat meliputi :
  a. pengendalian pembangunan sempadan JLS; dan
  b. penyusunan rencana detail pengembangan kawasan sekitar JLS.

2.3.4. Isu Strategis Kabupaten Trenggalek

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun regional, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Trenggalek yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Penataan infrastruktur berbasis kewilayahan yang merata dan handal

Penataan infrastruktur berbasis kewilayahan yang merata dan handal di Kabupaten Trenggalek memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, air minum, air limbah, drainase, persampahan, rumah layak huni tersebar merata tidak hanya di pusat kota, tetapi juga hingga pelosok desa. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang cermat, alokasi anggaran yang adil, dan pemanfaatan data demografi serta kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang merata akan meningkatkan mobilitas, aksesibilitas, dan pemerataan kesempatan ekonomi, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan, seperti melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL), penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, dan penerapan teknologi hijau seperti energi terbarukan. Integrasi ruang hijau dan taman kota dalam perencanaan tata ruang akan membantu menjaga keseimbangan alam serta meningkatkan kualitas hidup warga, menjadikan pembangunan infrastruktur di Trenggalek tidak hanya modern dan fungsional, tetapi juga berkelanjutan dan harmonis dengan alam.

2) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi berbasis transformasi tata Kelola

Penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola di Kabupaten Trenggalek memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih. Penerapan *e-governance* akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui sistem yang terintegrasi, seperti *e-budgeting* dan *e-procurement*, proses

pengambilan keputusan dapat dipercepat dan lebih transparan, serta mengurangi potensi penyimpangan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) harus dilakukan secara berkala untuk memastikan mereka mampu mengadaptasi perubahan dan memberikan pelayanan yang berkualitas.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga Trenggalek. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pemerintah akan meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah daerah. Mekanisme seperti forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, dan pengaduan online dapat digunakan untuk mengakomodasi masukan dan kritik konstruktif dari warga. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, transformasi tata kelola di Trenggalek dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Selain itu, upaya pemerintah yang perlu *dihiglight* di sini dalam penguatan reformasi birokrasi adalah penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah, pengembangan karir ASN, penguatan tata Kelola pemerintah, sampai dengan penguatan keamanan ketertiban.

3) Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek merupakan isu yang mendesak, mengingat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan. Dampak penurunan kualitas lingkungan hidup ini berdampak signifikan terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan pencemaran air telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya mitigasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi prioritas bagi Kabupaten Trenggalek untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, seperti banjir dan longsor. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan strategi adaptasi yang melibatkan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti sistem drainase yang baik dan perbaikan bantaran sungai. Edukasi kepada masyarakat tentang praktik pertanian ramah lingkungan dan manajemen sumber daya air yang efisien juga penting untuk menghadapi perubahan iklim. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan organisasi lingkungan akan membantu dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi serta praktik terbaik dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh aspek sanitasi lingkungan terutama persampahan. Capaian layanan pengumpulan sampah tergolong masih rendah sebesar 35% rumah tangga yang masih terlayani. Begitu juga dengan sampah yang terolah yang hanya sebesar 12%.

4) Percepatan hilirisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan

Percepatan hilirisasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Trenggalek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan komoditas unggulan lokal. Dengan memfokuskan pada pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditas ini, Trenggalek dapat menciptakan produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar nasional dan internasional. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi dalam teknologi pengolahan, menyediakan pelatihan bagi petani dan nelayan, serta memperkuat jaringan pemasaran. Pengembangan industri pengolahan skala kecil dan menengah akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Memahami bahwa komoditas unggulan di Kabupaten Trenggalek adalah sektor pertanian (dalam arti luas) maka perlu adanya pengolahan (hilirisasi) dari hasil pertanian ini untuk meningkatkan nilai tambah. Sehingga percepatan hilirisasi yang berbasis ekonomi kerakyatan nantinya mampu meningkatkan perekonomian makro dan mikro Kabupaten Trenggalek secara signifikan. Memahami hal tersebut, perlu adanya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga penelitian dalam mempercepat hilirisasi ekonomi kerakyatan. Melalui kemitraan strategis, pemerintah dapat mengakses teknologi canggih, modal, dan pasar yang lebih luas. Misalnya, pengembangan produk turunan seperti kopi kemasan premium atau produk olahan ikan dengan merek lokal dapat meningkatkan nilai jual komoditas Trenggalek. Program inkubasi bisnis dan pemberian insentif bagi usaha kecil dan menengah (UKM) juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, percepatan hilirisasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Trenggalek dapat terwujud, membawa kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Upaya pemerintah sendiri dalam percepatan hilirisasi ekonomi di Kabupaten Trenggalek antara lain seperti, penyediaan industry pariwisata, ekonomi kreatif, akses pasar internasional, peningkatan pertanian terpadu, produktivitas pertanian, pengembangan industrialisasi perikanan modern, pengembangan kebijakan *net zero carbon*, dan pelaksanaan maupun pendampingan dalam meningkatkan kemandirian, dan penyediaan kebutuhan pokok bagi Masyarakat.

5) Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM berdaya saing

Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM berdaya saing di Kabupaten Trenggalek merupakan aspek yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan daerah. SDM yang berkualitas dan berkompeten akan menjadi kunci untuk kemajuan daerah di masa depan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, terutama dengan penekanan pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, akan mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai juga akan mendukung kualitas hidup masyarakat, sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal. Kerja sama dengan sektor industri untuk menyediakan program magang dan pelatihan kerja akan

memperkuat kemampuan praktis tenaga kerja lokal. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan karakter dan kegiatan budaya akan menciptakan SDM yang tidak hanya unggul dalam kemampuan teknis, tetapi juga memiliki etika kerja yang tinggi dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Trenggalek dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya handal dalam bidang profesional, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran budaya yang kuat, siap berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan harmonis.

6) Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data perlindungan sosial

Akselerasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek memerlukan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan data perlindungan sosial yang akurat dan komprehensif. Melalui pengumpulan dan analisis data yang tervalidasi mengenai kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas warga, diharapkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan intervensi segera. Dengan menggunakan basis data ini, program-program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat disesuaikan secara lebih tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkannya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (GIS) dalam pengelolaan basis data perlindungan sosial akan mempercepat proses identifikasi dan penyaluran bantuan. Hal ini juga memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap program-program yang telah berjalan, sehingga pemerintah dapat dengan cepat menyesuaikan strategi jika diperlukan. Melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam penyusunan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan juga akan memperkuat sinergi dan keberlanjutan upaya ini. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kolaboratif, Trenggalek dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini diakomodir pemerintah dengan upaya seperti penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dalam pemenuhan kerja pemerintah berupa perlindungan sosial yang adaptif.

Dalam merumuskan isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Trenggalek, dilakukan proses pemetaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek utama. Pendekatan ini diawali dengan mengidentifikasi potensi daerah, mengumpulkan data permasalahan aktual, dan merumuskan permasalahan utama yang dihadapi. Selanjutnya, perumusan isu juga mempertimbangkan dinamika eksternal, baik isu global seperti perubahan iklim dan geopolitik, maupun isu nasional dan regional yang tercermin dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi. Hasil pemetaan tersebut kemudian dirangkum dan ditransformasikan ke dalam isu-isu strategis RPJMD yang tersaji sebagai berikut.

Tabel II.118
Teknik Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Trenggalek

POTENSI	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU KLHS	ISU STRATEGIS RPJMD
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL/ ISU RPJMD PROVINSI		
Kawasan strategis agropolitan (Watulimo, Pule, Bendungan), minapolitan, dan pariwisata	33% kondisi jalan rusak (284,74 km dari total 859,96 km), mengindikasikan lemahnya pemeliharaan rutin dan tidak meratanya konektivitas antarwilayah	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan yang merata dan handal	Perkembangan Teknologi Industri 5.0			Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Penataan infrastruktur berbasis kewilayahan yang merata dan handal
Daya dukung lahan terbangun 4,31 (kategori baik)	Akses air minum layak baru 89,56% dan sanitasi layak 83,54% pada 2024, RT terlayani pengumpulan sampah masih sebesar 20%, menunjukkan layanan dasar belum merata, khususnya di wilayah terpencil						
Reformasi Birokrasi semakin menguat	Nilai AKIP turun dari 74,07 ke 73,19, mengindikasikan lemahnya sistem pengelolaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah MCP mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 sebesar 91,80 kemudian menurun menjadi 88,42 di tahun 2023 dan kembali naik menjadi 94,18 di tahun 2024, menunjukkan tidak stabilnya efektivitas upaya pencegahan korupsi Indeks Integritas dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Hasil menunjukkan nilai berturut-turut sebesar 79,16 di tahun 2021, sedikit menurun menjadi 77,86 pada 2022, meningkat menjadi 80,04 pada 2023, dan kembali menurun menjadi 74,26 pada 2024.	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah (Good Government) dan Pelayanan Publik	Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi berbasis transformasi tata Kelola
Tutupan vegetasi yang masih cukup luas, indeks kualitas udara meningkat Status daya dukung air dan lahan: surplus dan baik	Indeks kualitas air hanya 55,5 (terendah dibanding udara dan lahan), peningkatan emisi CO2, sering terjadinya bencana hidrometrologis (banjir dan tanah longsor) mengindikasikan masih adanya kerusakan lingkungan	Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup	Dampak Perubahan Iklim Global		4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	• Mitigasi dan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim • Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Pengurangan Emisi Gas	Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

POTENSI	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU KLHS	ISU STRATEGIS RPJMD
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL/ ISU RPJMD PROVINSI		
						Rumah Kaca dan Stok Karbon	
Produk bambu ekspor, nilai ekspor > Rp102 miliar Sentra produksi pertanian dan perikanan unggulan	Kontribusi sektor pariwisata hanya 2,11% dari PDRB, dan lama tinggal wisatawan rata-rata hanya 1 hari, menandakan rendahnya daya tarik dan nilai tambah sektor pariwisata lokal Pertumbuhan Ekonomi turun dari 4,92% (2023) ke 4,71% (2024), mengindikasikan lesunya sektor produktif dan belum kuatnya transformasi ekonomi lokal PDRB per kapita Rp 32,73 juta, lebih rendah dibanding kabupaten tetangga (Tulungagung dan Pacitan), menunjukkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif di Kabupaten Trenggalek belum optimal	Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	"1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan"	Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal	Percepatan hilirisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan
Pusat pelatihan vokasi dan potensi industri kreatif Pariwisata berbasis masyarakat (community-based)	IPM 72,47 (kategori tinggi) tetapi masih di bawah Ponorogo dan Tulungagung, menandakan SDM belum kompetitif secara regional	Belum optimalnya daya saing SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera	Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	2. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM berdaya saing
IPEI 2023: 5,69, basis kebijakan inklusi sosial Struktur PDRB kuat di sektor primer dan sekunder	Tingkat kemiskinan 10,5%, lebih tinggi dibanding Ponorogo dan Tulungagung, menunjukkan perlunya strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif Indeks Gini naik dari 0,336 ke 0,35, mengindikasikan peningkatan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkesinambungan			5. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan	Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data perlindungan sosial

Sumber: data diolah, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara optimal. Visi dan misi ini merupakan mandat dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2029, Bapak Mochamad Nur Arifin, S.E., M.PSDM dan Bapak Syah Muhamad Nata Negara, S.H., yang berpijak pada sektor-sektor unggulan daerah. Kerangka ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan dalam RPJMD merupakan penjabaran dari visi serta misi kepala daerah yang mampu menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai selama masa kepemimpinan. Sementara itu, sasaran merupakan rincian dari tujuan yang bersifat terukur, sehingga kemajuan kinerja dapat dipantau dari tahun ke tahun dan pada akhir periode perencanaan. Sasaran ini menjadi panduan operasional agar proses pembangunan berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Dengan demikian, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh pemangku kepentingan menuju capaian pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

3.1.1 VISI

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus melanjutkan langkah transformatif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dalam kurun waktu 2021–2026, arah pembangunan daerah telah dirumuskan melalui visi “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif, dan Pembangunan Berkelanjutan.” Visi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata, pengembangan kapasitas SDM, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan.

Visi tersebut menjadi fondasi menuju arah jangka panjang yang lebih ambisius: Kabupaten Trenggalek 2030 – Sustainable City and Communities in Indonesia. Sebuah orientasi pembangunan jangka panjang yang meletakkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota dan komunitas berkelanjutan di Indonesia. Untuk mencapai visi 2030 tersebut, RPJMD 2025–2029 hadir sebagai tahapan strategis dengan semangat percepatan bertajuk #Trenggalekmeroket, yang menekankan pada penguatan industri agro dan perikanan berkelanjutan

(sustainable agro and fisheries industries) sebagai basis transformasi ekonomi daerah.

Gambar III.1.
Roadmap Pembangunan Kabupaten Trenggalek



Sumber: Arifin, 2021

Arah pembangunan daerah lima tahun ke depan dirancang dengan mengedepankan keseimbangan antara tiga dimensi utama: prosperity (kemakmuran), people (kesejahteraan rakyat), dan planet (kelestarian lingkungan). Pendekatan ini menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Kabupaten Trenggalek ditargetkan menjadi daerah yang mampu menciptakan kemakmuran berbasis potensi lokal, meningkatkan taraf hidup masyarakat secara inklusif, serta menjaga keberlangsungan sumber daya alamnya.

RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi kelanjutan teknokratis dari visi pembangunan sebelumnya, tetapi juga mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Prasasti Masahar peninggalan Mpu Sendok sebagai pijakan moral dalam membangun pemerintahan. Prasasti tersebut menetapkan wilayah Masahar sebagai tanah sima atau wilayah suci sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan tanah yang dijaga kesuciannya. Namun yang paling kuat adalah pesan peringatan dalam bentuk kutukan terhadap siapa pun yang melanggar perjanjian atau amanah *"tubuh akan dirobek, darah diminum, daging dimakan, disambar petir, dipatok ular, hingga dilempar dari langit"*. Kutukan tersebut

bukan sekadar ancaman fisik, tetapi simbol yang sangat jelas tentang beratnya konsekuensi moral atas pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan keluhuran tugas pemerintahan. Hal ini menjadi pengingat bahwa integritas, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat adalah fondasi mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan merujuk pada nilai-nilai sejarah, arah pembangunan nasional, dan potensi strategis daerah, maka dirumuskanlah visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025–2029:

Gambar III.2.
Visi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029



Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola yang berpihak kepada rakyat, pemerataan hasil pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, guna memastikan kesejahteraan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pokok Visi	Uraian
Adil	Visi "Trenggalek Adil" mengandung makna penting bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan dan kemajuan, tetapi juga menjamin keadilan dalam pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Salah satu manifestasi keadilan tersebut adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar kawasan, aksesibilitas

Pokok Visi	Uraian
	layanan dasar, serta pengurangan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek diarahkan agar tidak terkonsentrasi di pusat kota saja, melainkan menyentuh desa-desa dan daerah tertinggal, sehingga semua warga memiliki kesempatan yang setara dalam menikmati manfaat pembangunan. Selain itu, keadilan juga diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas menjadi syarat mutlak bagi pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas akan menjadi fondasi bagi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian, visi "Trenggalek Adil" menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang menjamin kesetaraan hak, keberpihakan terhadap yang lemah, serta kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
Makmur	Visi "Trenggalek Makmur" mencerminkan cita-cita besar Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Makmur dalam konteks ini tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup yang menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, baik melalui perluasan akses terhadap layanan dasar maupun pengurangan kesenjangan sosial. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting agar masyarakat Kabupaten Trenggalek mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang pembangunan dengan daya saing yang tinggi. Selaras dengan itu, visi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan

Pokok Visi	Uraian
	berkelanjutan dengan mengandalkan potensi unggulan daerah seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat struktur ekonomi lokal. Di tengah dinamika perubahan iklim dan risiko bencana, upaya pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan ketahanan daerah terhadap bencana. Dengan pendekatan yang holistik ini, "Trenggalek Makmur" menjadi simbol kemajuan daerah yang berpihak pada manusia, berakar pada alam, dan berorientasi pada masa depan.

Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada perwujudan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, yang dicapai melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, regeneratif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemakmuran tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari keadilan dalam distribusi hasil pembangunan, keterbukaan akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penguatan SDM yang kreatif dan inovatif menjadi kunci dalam melampaui jebakan ekonomi ekstraktif dan birokrasi yang tidak adaptif, menuju sistem ekonomi berbasis pengetahuan *(knowledge-based economy)* dan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif *(open government).* Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal, terutama sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Namun, pengelolaan dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Gambar III.3.
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Visi RPJMN dan Provinsi Jawa Timur



Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Visi ini selaras dan berkontribusi langsung terhadap visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung visi Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2025–2029, yakni "Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045". Dengan keterpaduan arah pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten, visi "Trenggalek yang Adil dan Makmur" menjadi bagian integral dari upaya kolektif membangun Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.

3.1.2 MISI

Misi merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan, misi berfungsi sebagai jembatan antara visi jangka panjang dengan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Rumusan misi yang baik memberikan penjabaran yang jelas mengenai upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mudah diterjemahkan ke dalam indikator dan target yang terukur. Penyusunan misi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan

strategis, baik internal maupun eksternal, agar selaras dengan tantangan dan peluang pembangunan. Substansi dari visi dan misi ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, perbaikan pelayanan publik, dan penyelesaian persoalan strategis.

Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur", Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan arah misi pembangunan yang dibagi ke dalam tiga pilar strategis. Ketiga pilar ini merupakan kerangka utama yang akan memandu perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama periode 2025–2029. Pilar-pilar tersebut mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Adapun ketiga pilar tersebut adalah: Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif, Pilar *Net Zero Carbon*, dan Pilar SDM Kreatif dan Inovatif.

1. **Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif**

   Pilar ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kabupaten Trenggalek diarahkan menjadi daerah yang inklusif, dimana seluruh masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam berkontribusi dan merasakan manfaat pembangunan ekonomi. Pendekatan regeneratif menekankan pengelolaan sumber daya unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan dan generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan menjadi penguat bagi konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal yang tangguh.

2. **Pilar *Net Zero Carbon***

   Pilar ini menunjukkan komitmen Kabupaten Trenggalek dalam menjawab tantangan perubahan iklim melalui pembangunan yang rendah emisi karbon. Dengan mendorong praktik ramah lingkungan, konservasi alam, dan pengelolaan risiko bencana secara terpadu, Kabupaten Trenggalek ingin menjadi kabupaten yang tangguh iklim, harmonis dengan alam, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Pilar ini mendorong transisi energi bersih, efisiensi sumber daya, dan penguatan peran masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Di samping itu, upaya pengurangan emisi juga mencakup pengelolaan sektor sampah dan air limbah secara berkelanjutan, serta penurunan emisi dari proses industri dan penggunaan produk atau *Industrial Processes and Product Use* (IPPU). Pilar ini menempatkan Kabupaten Trenggalek sebagai contoh daerah yang tidak hanya berkembang, tetapi juga menjaga warisan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

3. Pilar SDM Kreatif dan Inovatif

Pilar ini berfokus pada pembangunan manusia sebagai inti dari kemajuan daerah. Kabupaten Trenggalek menempatkan pengembangan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, dan adaptif sebagai prioritas utama. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta akses terhadap teknologi dan keterampilan digital menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing di era ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga ditingkatkan agar lebih terbuka, partisipatif, dan melayani, sebagai bagian dari ekosistem inovasi yang sehat dan berorientasi pada hasil.

Gambar III.4.

Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029



Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Penuangan pilar tersebut kedalam misi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029, dijelaskan sebagai berikut:

MISI 1 : **Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik Kabupaten Trenggalek sebagai kawasan yang layak huni, produktif, dan terhubung secara baik antar kawasan. Pengembangan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berwawasan lingkungan menjadi landasan penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan dasar, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan diarahkan untuk tidak hanya menyentuh pusat kota, tetapi juga menjangkau desa dan kawasan pinggiran, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan

ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Lebih dari sekadar menciptakan kenyamanan bagi penduduk, misi ini menempatkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota atraktif yang mampu menarik kehadiran wisatawan, pelajar, pekerja, hingga investor untuk datang, tinggal, dan beraktivitas di wilayah ini. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang, Kabupaten Trenggalek diharapkan tumbuh sebagai simpul pertumbuhan yang dinamis dan kompetitif di tingkat regional.

MISI 2 : **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan**

Misi ini menitikberatkan pada penciptaan sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Kabupaten Trenggalek akan mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan pendekatan regeneratif, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara berimbang antara eksploitasi dan pelestarian. Ekonomi inklusif berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, sementara pendekatan regeneratif memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak daya dukung lingkungan, tetapi justru memperkuatnya.

MISI 3 : **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan**

Misi ini mencerminkan komitmen Kabupaten Trenggalek dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan dengan memperkuat daya dukung ekologis wilayah. Kota lestari diwujudkan melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, konservasi lingkungan, serta tata ruang yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. Kabupaten Trenggalek diarahkan menjadi daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harmonis dengan alam dan memiliki ketahanan jangka panjang terhadap krisis iklim.

MISI 4 : **Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat modal manusia sebagai inti dari kemajuan daerah. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui perbaikan layanan kesehatan, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, serta penguatan pelatihan dan inovasi berbasis teknologi. SDM Kabupaten Trenggalek didorong untuk menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental, kreatif dalam berkarya, serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Misi ini juga selaras dengan upaya mendorong inklusi sosial dan mobilitas vertikal masyarakat miskin dan rentan.

MISI 5 : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan**

Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, responsif,

dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan integritas dan efisiensi birokrasi akan didorong melalui digitalisasi pelayanan dan pengawasan kinerja yang objektif. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik dan mempercepat keberhasilan pembangunan daerah.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 yang mengusung cita-cita "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur" disusun selaras dengan amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia yang berkeadilan. Kelima misi pembangunan Kabupaten Trenggalek diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan yang tidak hanya memperkuat infrastruktur dan ekonomi lokal, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Seluruh arah kebijakan ini juga mengintegrasikan prinsip dan tujuan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, dengan semangat "*No One Left Behind*". Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek tidak hanya berkomitmen membangun daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif nasional dan global dalam mencapai masa depan yang adil, lestari, dan inklusif.

Gambar III.5.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Tujuan Negara dan SDG's

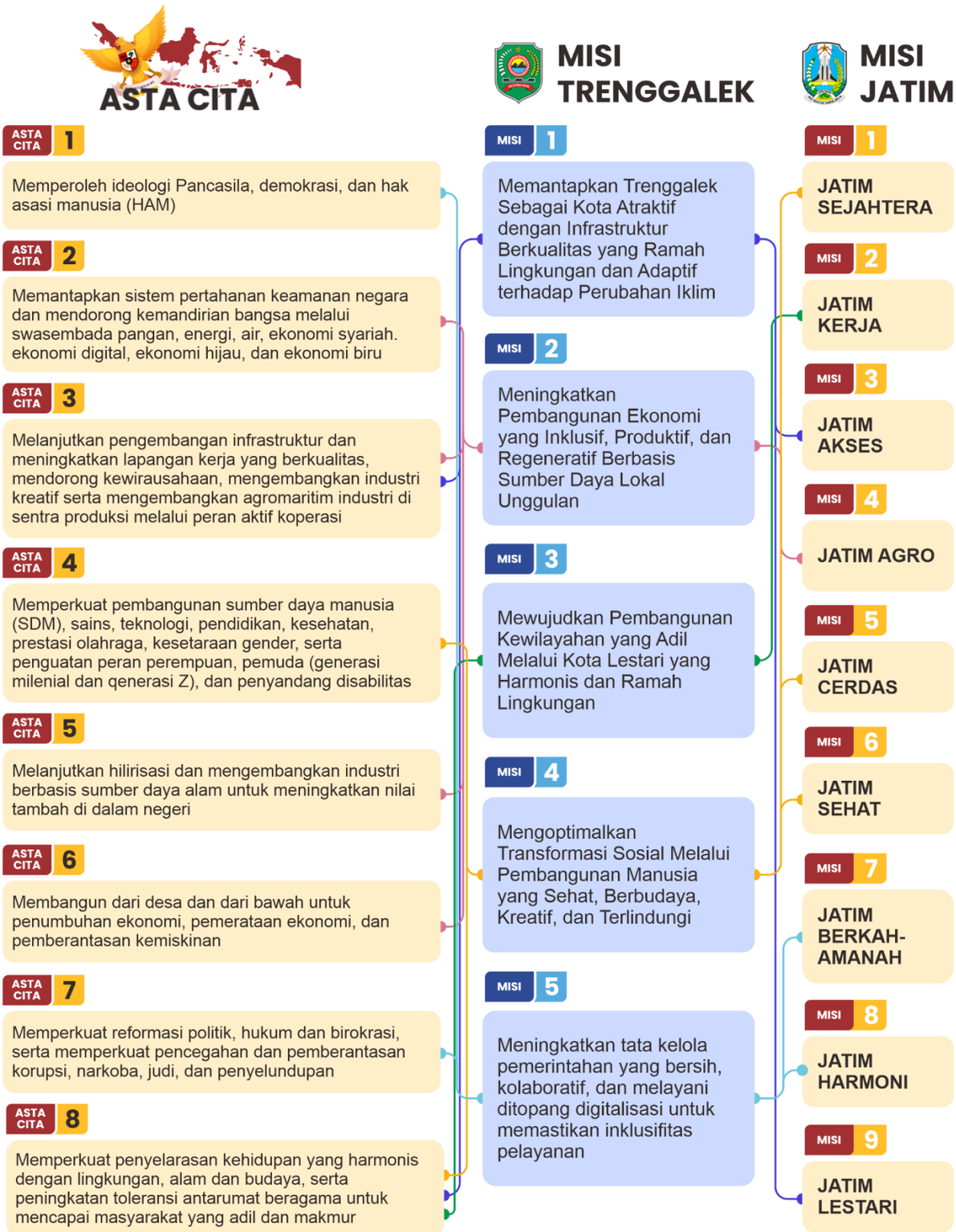


Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 disusun secara sinergis dan terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta visi-misi Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2025–2029. Setiap misi telah mengakomodasi agenda prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita, seperti penguatan infrastruktur, pembangunan ekonomi hijau dan inklusif, pengembangan SDM, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Secara bersamaan, misi Kabupaten Trenggalek juga selaras dengan sembilan misi Jawa Timur, seperti “Jatim Akses”, “Jatim Agro”, “Jatim Cerdas”, “Jatim Sehat”, “Jatim Berkah Amanah”, dan “Jatim Lestari”. Penyelarasan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan searah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar III.6.

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Misi RPJMN dan Provinsi Jawa Timur



Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Tujuan dirancang untuk menjawab isu strategis dan permasalahan daerah, serta menjadi jembatan antara visi, misi, dan strategi pembangunan jangka menengah. Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang menggambarkan hasil pembangunan yang ingin dicapai, dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan tahunan (RKPD). Perumusan tujuan dan sasaran ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dirancang agar memenuhi prinsip SMART-C, memperhatikan isu strategis, serta dapat diukur secara jelas dalam kurun lima tahun perencanaan.

Tabel III.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	2025	2030
Trenggalek Makmur	Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (poin)	51,95	63,39
	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif. Produktif. dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,72	4,77
			PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)	32,74	35,93
			Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	45	53,75
	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan	Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Kabupaten	Indeks Kota Hijau (poin)	61,6	64,1
Trenggalek Adil	Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat. berbudaya. kreatif. dan terlindungi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan ((%))	9,65	7,09
			Indeks Gini (Poin)	0,349	0,333
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,78	75,4
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	93,6	94,46

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	2025	2030
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. kolaboratif. dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	87,4	87,65

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Trenggalek dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu. sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik. fokus. terukur. dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **T1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah**

   Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah.
   - Meningkatnya konektivitas wilayah

2. **T2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**

   Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial
   - Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah
   - Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa

3. **T3. Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Kabupaten**

   Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim
   - Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

4. **T4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**

   Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
   - Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
   - Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

5. T5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan
- Meningkatnya pengarusutamaan gender
- Meningkatnya Daya Saing Pemuda

6. T6. Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas

Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel
- Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Visi :									
Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Adil dan Makmur									
Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (poin)	51,95	52,95	55,56	58,17	60,78	63,39
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah	Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) (Poin)	0,215	0,214	0,213	0,212	0,211	0,21
		Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas (Poin)	0,772	0,777	0,783	0,789	0,794	0,8

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	4,77
			PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita) ()	32,74	33,76	34,23	35,09	35,76	35,93
			Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	45	46,75	48,5	50,25	52	53,75
		Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	6,69	6,7	6,71	6,72	6,73	6,74

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
			Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3
			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
			Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,79	5,82	5,85	5,88	5,91	5,94

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)	4,11	4,1	4,07	4,01	3,95	3,88
			Realisasi Investasi (triliun rupiah)	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	69,08	75,66	82,24	88,82	95,39	100
Mewujudkan pembangunan	Meningkatnya Keberlanjutan		Indeks Kota Hijau (poin)	61,6	62,1	62,6	63,1	63,6	64,1

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan	Lingkungan Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	74,97	75,05	75,13	75,21	75,29	75,37
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)	854.464	904.464	954.464	1.004.464	1.054.464	1.104.464
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	138,59	135,21	131,99	128,92	126	123,19
Mengoptimalkan transformasi sosial melalui	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan ((%))	9,65	9,35	8,94	8,63	8,11	7,09

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi			Indeks Gini (Poin)	0,349	0,348	0,347	0,345	0,339	0,333
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,87	3,85	3,83	3,81	3,79	3,77
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)	32.176.221	32.193.628	32.210.046	32.225.556	32.240.232	32.254.138
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita) ()	11.038	11.203	11.369	11.534	11.700	11.866
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	57,85	58,35	58,85	59,35	59,85	60,35

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,78	73,92	74,27	74,61	74,95	75,4
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	93,6	93,78	93,94	94,12	94,28	94,46
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,49	75,75	76,01	76,27	76,53	76,78
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (poin)	0,62	0,623	0,626	0,629	0,632	0,635

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,417	0,395	0,383	0,372	0,361	0,349
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	51,93	51,93	52,53	53,13	53,73	54,33
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	87,4	87,45	87,5	87,55	87,6	87,65
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel	Nilai SAKIP (poin)	74	75	76	77	78,5	80

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
inklusifitas pelayanan		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Indeks Integritas (Poin)	74,76	75,26	75,76	76,5	77,25	78
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi. misi. tujuan. sasaran. serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program kegiatan dan sub kegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan. pelaksanaan. pemantauan. dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat. Strategi pembangunan daerah ditentukan dengan mempertimbangkan isu strategis daerah yang didalamnya mencakup permasalahan daerah, lingkungan dinamis, dan potensi daerah. Penyusunan strategi pembangunan daerah juga dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan yang merupakan turunan dari misi pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan daerah yang telah disusun akan menghasilkan rangkaian kerja pemerintah yang disebut dengan program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi pembangunan “Trenggalek Adil dan Makmur”.

Strategi dan Arah Kebijakan ini disusun untuk memajukan Trenggalek melalui 4 elemen kota maju yang mensinergikan perdagangan (*trades*), pariwisata (*tourist*), sumber daya manusia (*talent*), dan investor (*investors*). Menguatnya Perdagangan mencerminkan vitalitas ekonomi lokal. Kota maju membangun infrastruktur logistik yang efisien, memperkuat pasar lokal dan regional, serta mendorong digitalisasi UMKM untuk memperluas jangkauan produk unggulan. Perdagangan yang sehat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi. Kemudian daya tarik wisata dan ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sektor jasa. Perdagangan dan pariwisata yang kuat akan semakin kuat ketika didukung dengan Sumber Daya Manusia yang unggul baik dari masyarakat sipil maupun aparatur yang menjadi regulator. Disamping itu, ruang pengembangan kompetensi di Trenggalek semakin ditingkatkan sebagai upaya peningkatan iklim yang kompetitif untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sumber daya manusia unggulan di Trenggalek memperoleh apresiasi dan dapat termotivasi untuk terus berkarya. Kemudian elemen terakhir yang dibutuhkan adalah terciptanya lingkungan yang ramah investasi. Melalui sinergi keempat elemen ini diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Trenggalek dan mencukupi kebutuhan masyarakatnya secara inklusif sehingga terwujud Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur di tahun 2030.

Gambar III.7.
Konsep Pembangunan Kabupaten Trenggalek 2025-2030



Tahun 2025 sebagai baseline pembangunan berfokus pada perbaikan lingkungan hidup sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2026 diarahkan untuk membangun daya tarik daerah melalui penguatan branding kota "atraktif" dan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan di Tahun 2027 menekankan pada pelibatan komunitas serta pengembangan talenta lokal, serta menciptakan SDM kreatif dan berdaya saing. 2028 mendorong perluasan kesempatan kerja melalui penguatan sektor perdagangan dan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan. 2029 ditandai dengan peningkatan ekonomi yang inklusif, memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata. Kemudian di tahun 2030 menjadi buah keberhasilan dengan mencapai visi RPJMD 2030 untuk mewujudkan Trenggalek yang adil dan makmur.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

A. STRATEGI

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka menengah dengan kebijakan dan program konkret yang dapat

diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tema pembangunan per tahun dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah memiliki fokus yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun Kabupaten Trenggalek sebagai berikut.

Gambar III.8.
Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Trenggalek



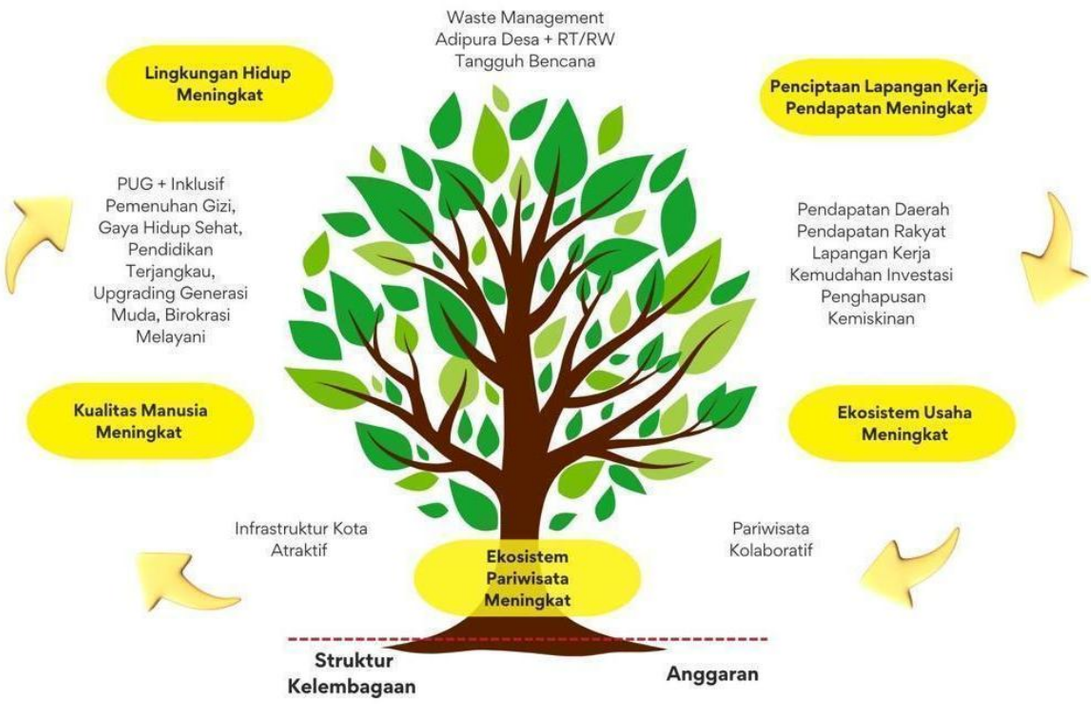
Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2025

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Trenggalek dirancang melalui lima langkah bertahap yang terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dimulai pada tahun 2026, pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi ekologis dengan menghadirkan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan inklusif, serta memperluas akses layanan dasar untuk menghapus kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan layanan dasar (SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15). Tahun 2027 melanjutkan proses dengan memperkuat peran komunitas dan kolaborasi lintas sektor, guna membangun kota yang berketahanan sosial dan ekonomi, mendukung transisi energi bersih, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan ketimpangan dan konsumsi-produksi yang berkelanjutan (SDGs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

Memasuki tahun 2028, fokus pembangunan bergeser pada penguatan pilar sosial budaya melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang inklusif, serta pemberdayaan kelompok rentan dan penguatan nilai-nilai budaya lokal (SDGs 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17). Tahun 2029 diarahkan pada penguatan ekonomi daerah melalui perluasan investasi, pengembangan industri lokal, dan peningkatan produktivitas berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif (SDGs 8, 9, 10, 11, 12). Puncaknya pada tahun 2030, Trenggalek ditargetkan menjadi “Kota Lestari dan Berkelanjutan”, dengan pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, sekaligus mencerminkan keberhasilan daerah dalam mewujudkan agenda global SDGs secara menyeluruh. Rangkaian tema tahunan

tersebut mencerminkan strategi *Rise Phase,* yang berfokus pada pencapaian keseimbangan antara aspek people, planet, prosperity, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan *push* and *pull policy*. Pendekatan ini mengedepankan penguatan kapasitas internal masyarakat (push) sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*pull*), selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*SDGs)* dan amanat nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, tema pembangunan tahunan Kabupaten Trenggalek telah disusun secara visioner dan sistematis, mengintegrasikan arah kebijakan pusat, potensi lokal, dan tantangan global secara utuh.

Gambar III.9.
Komponen Pembangunan Kabupaten Trenggalek



Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2025

Tema pembangunan tahunan Kabupaten Trenggalek juga disusun dengan mengacu pada struktur pohon pembangunan yang merepresentasikan keterpaduan antara fondasi kelembagaan dan anggaran, batang strategi pembangunan, serta cabang dan daun sebagai prioritas program yang menjadi hasil nyata pembangunan. Simbolisasi pohon ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penyusunan tema pembangunan tahunan bahwa seluruh upaya pembangunan memerlukan akar yang kuat (kelembagaan dan pembiayaan), batang yang kokoh (strategi), serta ranting dan daun yang tumbuh secara terarah (program prioritas). Proses pembangunan diawali dengan penyediaan lingkungan hidup yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas manusia yang baik. Dengan adanya lingkungan hidup dan SDM yang baik diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang baik. Ekosistem pariwisata yang baik (kota atraktif) sebagai batang utama proses pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang baik, kemudian pada

tahap terakhir akan menghasilkan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2025-2029, Kabupaten Trenggalek memiliki fokus dalam penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan daya dukung lingkungan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Strategi yang dapat dirumuskan untuk mencapai penguatan fondasi transformasi dan mewujudkan misi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel III.3.

Strategi dan Penahapan Pembangunan Kabupaten Trenggalek

Tema RPJPD Tahap I: "Penguatan Fondasi Pembangunan"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Pembangunan kota atraktif dan penuntasan infrastruktur dalam rangka penghapusan kemiskinan dan adaptasi perubahan iklim	**Penguatan peran komunitas dan lintas sektor dalam rangka mewujudkan Kota Atraktif**	**Perluasan layanan, perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat**	**Perluasan jangkauan kapasitas ekonomi daerah berbasis inklusivitas dan ramah lingkungan**	**Perwujudan Kabupaten Trenggalek sebagai "Sustainable City 2030"**
• Pengembangan kawasan Kabupaten Trenggalek menuju Kota Atraktif	• Pengembangan kawasan Kabupaten Trenggalek menuju Kota Atraktif	• Pengembangan kawasan Kabupaten Trenggalek menuju Kota Atraktif	• Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat dan kelengkapan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) berbasis IT	• Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat dan kelengkapan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) berbasis IT
• Integrasi transportasi publik yang efisien dan terjangkau	• Integrasi transportasi publik yang efisien dan terjangkau	• Integrasi transportasi publik yang efisien dan terjangkau	• Penguatan ekonomi kerakyatan berdaya saing berbasis kemitraan dalam meningkatkan pendapatan daerah	• Akselerasi peningkatan kelestarian lingkungan untuk kenyamanan kehidupan masyarakat
• Pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas, pengembangan mitigasi risiko bencana dan penguatan resiliensi berkelanjutan	• Pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas, pengembangan mitigasi risiko bencana dan penguatan resiliensi berkelanjutan	• Pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas, pengembangan mitigasi risiko bencana dan penguatan resiliensi berkelanjutan	• Akselerasi peningkatan kelestarian lingkungan untuk kenyamanan kehidupan masyarakat	• Penguatan sekuestrasi karbon melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan
• Pengolahan sampah dan limbah terintegrasi dan partisipatif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan	• Pengolahan sampah dan limbah terintegrasi dan partisipatif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan	• Pengolahan sampah dan limbah terintegrasi dan partisipatif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan	• Penguatan sekuestrasi karbon melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	• Pembangunan yang inklusif dan menyejahterakan seluruh masyarakat
• Ekonomi regeneratif dan inklusif serta perluasan kesempatan kerja	• Ekonomi regeneratif dan inklusif berbasis hilirisasi dan industrialisasi agro-	• Penguatan ekonomi kerakyatan berdaya saing berbasis kemitraan dalam	• Pembangunan yang inklusivitas dan menyejahterakan seluruh masyarakat	• Tata kelola pemerintahan bersih dan melayani berbasis digitalisasi pelayanan publik

Tema RPJPD Tahap I: "Penguatan Fondasi Pembangunan"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Pembangunan kota atraktif dan penuntasan infrastruktur dalam rangka penghapusan kemiskinan dan adaptasi perubahan iklim	**Penguatan peran komunitas dan lintas sektor dalam rangka mewujudkan Kota Atraktif**	**Perluasan layanan, perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat**	**Perluasan jangkauan kapasitas ekonomi daerah berbasis inklusivitas dan ramah lingkungan**	**Perwujudan Kabupaten Trenggalek sebagai "Sustainable City 2030"**
	maritim serta perluasan kesempatan kerja	meningkatkan pendapatan daerah		
• Penguatan sekuestrasi karbon melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	• Penguatan sekuestrasi karbon melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	• Penguatan sekuestrasi karbon melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan		• Pengolahan sampah dan limbah terintegrasi dan partisipatif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan
• Tata kelola pemerintahan bersih dan melayani berbasis digitalisasi pelayanan publik	• Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	• Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		
	• Pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa dalam rangka monetisasi sektor perhutanan sosial dan pesisir	• Pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa dalam rangka monetisasi sektor perhutanan sosial dan pesisir		
	• Pembangunan manusia yang berdaya saing dan berbudaya melalui penguatan karakter bangsa	• Pembangunan manusia yang berdaya saing dan berbudaya melalui penguatan karakter bangsa		

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Trenggalek, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel III.4.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2025-2029

MISI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan berbasis penataan ruang kota yang menarik dan resiliensi bencana.
	Optimalisasi perencanaan tata ruang wilayah yang atraktif berfokus pada daya saing daerah
	Transportasi umum terintegrasi berbasis digital untuk akses desa, wisata, dan mobilitas masyarakat
	Perluasan sekuestrasi karbon dan energi bersih untuk ketahanan lingkungan
	Infrastruktur adaptif dan mitigasi bencana berbasis EWS x Dashboard TRACE
	Pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan menuju zero solid waste
	Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan
	Pengkoordinasian Pemerataan Infrastruktur Digital
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	Pembatasan sektor ekonomi ekstraktif diimbangi kemudahan investasi di sektor manufaktur, jasa dan perdagangan serta investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru
	Hilirisasi komoditas unggulan dan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
	Menerapkan pertanian terpadu dengan konsep teknologi tepat guna dan kolaborasi antara pertanian, peternakan, perikanan dan pola tanam tumpangsari
	Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah sesuai kewenangan daerah
	Peningkatan kerjasama dengan mitra dagang produk unggulan daerah

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Optimalisasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	Pemanfaatan peluang perdagangan karbon untuk peningkatan pendapatan daerah dan kemitraan usaha berkelanjutan
Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan	Perencanaan tata ruang dengan mengintegrasikan aspek kebencanaan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta melindungi kenakekaragaman hayati
	Peningkatan konservasi dan audit penggunaan energi, penerapan modifikasi proses dan teknologi, serta manajemen limbah industri
	Penguatan mitigasi dan respon cepat bencana berbasis komunitas dan kearifan lokal
	Peningkatan kesadaran lingkungan melalui penguatan literasi, kampanye, dan pemberian ruang partisipasi dalam rangka mengurangi efek gas rumah kaca
Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
	Peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas
	Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan gizi bagi seluruh rakyat
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	Penguatan karakter dan nilai luhur kebudayaan lokal serta keagamaan sejak usia dini hingga remaja melalui pendidikan, seni, dan olahraga berprestasi
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan
	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif integratif
	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat
	Transformasi Posyandu menjadi layanan publik yang lebih luas dan terintegrasi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	Penyediaan Portal Pelayanan Publik Berbasis Digital
	Penguatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data

C. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Trenggalek 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada hasil. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam merancang program prioritas dan menentukan fokus pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Setiap misi pembangunan daerah dituangkan ke dalam strategi-strategi kunci yang selaras dengan visi "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur", serta disusun berdasarkan pendekatan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Strategi dan arah kebijakan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek.

MISI 1: MEMANTAPKAN TRENGGALEK SEBAGAI KOTA ATRAKTIF DENGAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

a. Pengembangan kawasan kabupaten Trenggalek menuju Kota Atraktif

Pengembangan Kabupaten Trenggalek menuju kota atraktif merupakan upaya strategis untuk menciptakan wilayah yang tidak hanya fungsional secara tata ruang, tetapi juga memiliki daya tarik sosial, ekonomi, dan budaya. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, perbaikan jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar yang terpadu dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kota atraktif diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui penataan ruang yang estetis, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penekanan pada optimalisasi pemanfaatan ruang juga menjadi kunci dalam mendorong daya saing wilayah serta menciptakan kawasan yang inklusif, ramah lingkungan, dan menarik bagi investasi, wisata, dan pemukiman. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan berbasis penataan ruang kota yang menarik**

  Penguatan konektivitas wilayah di Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk memperkuat jaringan logistik yang mendukung distribusi barang dan mobilitas penduduk, terutama dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan dan efisiensi rantai pasok lokal. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas dan integrasi infrastruktur jalan, terminal, serta sistem transportasi antarwilayah yang terhubung secara efektif dengan kawasan pertanian, pasar rakyat, dan pusat distribusi. Struktur jaringan infrastruktur harus memprioritaskan keterhubungan antara konektivitas

regional dan lokal dengan mempertimbangkan aspek pengembangan wilayah terutama pada wilayah yang belum terlayani konektivitas regional. Lebih lanjut, penyediaan layanan dasar seperti air bersih, energi, dan sanitasi juga akan diprioritaskan melalui pendekatan spasial berbasis penataan ruang kota yang menarik dan adaptif terhadap dinamika pertumbuhan kawasan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, efisien, dan mendukung produktivitas masyarakat.

- **Optimalisasi perencanaan tata ruang wilayah yang atraktif berfokus pada daya saing daerah**

  Optimalisasi tata ruang wilayah dilakukan dengan pendekatan proaktif yang menyesuaikan potensi dan karakteristik lokal, serta mampu menciptakan kawasan yang atraktif secara visual, fungsional, dan ekonomis. Hal ini mencakup penataan kawasan strategis seperti koridor pertumbuhan, pengembangan industri hijau, zona agrowisata, dan sentra layanan publik yang ramah lingkungan dan inklusif. Dengan penataan ruang yang tepat, Kabupaten Trenggalek dapat meningkatkan daya tarik investasi, memperluas peluang ekonomi lokal, serta menciptakan kota yang berdaya saing tinggi dalam konteks regional maupun nasional. Penekanan pada integrasi antara fungsi ruang, kualitas lingkungan, dan kemudahan berusaha menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan kompetitif.

  Penataan ruang wilayah juga harus didukung dengan kebijakan geospasial melalui implementasi implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Satu Data Indonesia (SDI) untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai data dan peta geospasial. Tujuan utamanya adalah menghasilkan satu referensi geospasial yang akurat, standar, dan terintegrasi, yang akan memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah secara lebih efektif dan berbasis data.

  Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi millenial, generasi z, dan masyarakat	1. Tanpa Kemiskinan 6. Air bersih dan sanitasi layak 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur 11. Kota dan Komunitas berkelanjutan

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
	berpenghasilan rendah (MBR)	

b. Integrasi transportasi publik yang efisien dan terjangkau

Integrasi transportasi publik yang efisien dan terjangkau bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Strategi ini mendorong pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan, mudah diakses, serta terhubung antarwilayah, termasuk kawasan pedesaan dan destinasi wisata. Dengan pendekatan digital, sistem transportasi publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efisiensi layanan, sekaligus mendukung penurunan emisi dan kemacetan di kawasan perkotaan dan lintas kecamatan. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Transportasi umum terintegrasi berbasis digital untuk akses desa, wisata, dan mobilitas masyarakat**

  Arah kebijakan ini difokuskan pada pengembangan sistem transportasi umum yang terhubung antarwilayah, terutama untuk menjangkau desa-desa dan kawasan wisata, guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi layanan transportasi, pelacakan rute waktu nyata, dan sistem pembayaran nontunai transportasi publik diarahkan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif. Kebijakan ini tidak hanya mendukung mobilitas harian masyarakat, tetapi juga memperkuat daya tarik kawasan wisata dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan.

  Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi millenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	9. Industri, inovasi, dan infrastruktur 11. Kota dan Komunitas berkelanjutan

c. Pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas, pengembangan mitigasi risiko bencana dan penguatan resiliensi berkelanjutan

Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, energi, dan transportasi, tetapi juga diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang adaptif terhadap krisis iklim dan risiko bencana. Untuk memperkuat sistem mitigasi bencana, diterapkan pendekatan digital melalui integrasi Early Warning System (EWS) dan Dashboard TRACE yang memungkinkan deteksi dini, respons cepat, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam rangka mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan, strategi ini juga mencakup perluasan sekuestrasi karbon melalui pelestarian dan rehabilitasi ekosistem, serta pemanfaatan energi bersih sebagai upaya pengurangan emisi. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang tangguh, masyarakat yang siap menghadapi risiko, dan wilayah yang berdaya saing dalam jangka panjang. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Perluasan sekuestrasi karbon dan energi bersih untuk ketahanan lingkungan, perluasan sekuestrasi, perluasan penggunaan energi bersih**

  Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan ketahanan lingkungan melalui perluasan upaya sekuestrasi karbon, seperti rehabilitasi hutan, pelestarian mangrove, dan pengelolaan lahan berkelanjutan, yang berperan penting dalam menyerap emisi karbon. Selain itu, dorongan terhadap pemanfaatan energi bersih seperti tenaga surya, mikrohidro, dan bioenergi dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta menciptakan sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- **Infrastruktur adaptif dan mitigasi bencana berbasis EWS x Dashboard TRACE**

  Arah kebijakan ini bertujuan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan mengintegrasikan sistem peringatan dini (EWS) dan pemantauan risiko bencana berbasis teknologi digital seperti Dashboard TRACE. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan akurat, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan	6. Air bersih dan sanitasi layak

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi millenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	9. Industri, inovasi, dan infrastruktur 11. Kota dan Komunitas berkelanjutan 13. Penanganan perubahan iklim 14. ekosistem laut 15. ekosistem daratan

d. Pengolahan sampah dan limbah terintegrasi dan partisipatif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan

Pengolahan sampah yang terintegrasi dan partisipatif menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Strategi ini diarahkan pada pengelolaan persampahan yang tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah secara kolaboratif. Pendekatan ini diwujudkan melalui sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, termasuk pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah menjadi energi atau bahan baku alternatif, yang ditujukan untuk mencapai target zero solid waste. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan menuju zero solid waste**

  Arah kebijakan pengelolaan persampahan diarahkan pada terwujudnya sistem yang terpadu dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target *zero solid waste*. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pengolahan sampah dari hulu ke hilir secara terintegrasi, mencakup pemilahan, pengangkutan, daur ulang, hingga pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Selain itu, digitalisasi sistem pengelolaan limbah juga didorong melalui pengembangan aplikasi berbasis pengalaman pengguna (*user experience*) seperti *super apps* yang bersifat responsif dan mudah diakses oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan persampahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

  Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
8. Memperkuat penyelarasan	7. Melanjutkan pembangunan	13. Penanganan perubahan iklim

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi millenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	14. ekosistem laut 15. ekosistem daratan

e. Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat dan kelengkapan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) berbasis IT

Strategi ini diarahkan untuk memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Pemenuhan kebutuhan hunian dilaksanakan secara terencana melalui pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, energi, dan ruang terbuka hijau. Selain aspek fisik, strategi ini juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur digital yang merata dan andal sebagai bagian dari transformasi kawasan permukiman modern. Integrasi sistem teknologi informasi dalam layanan permukiman akan mempercepat akses layanan publik, memperkuat transparansi tata kelola perumahan, dan mendukung smart living bagi masyarakat. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan**
  Arah kebijakan ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk melalui penyediaan hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dan lingkungan yang mendukung kualitas hidup. Fokus utamanya adalah penghapusan kawasan kumuh menuju target 0% kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni termasuk pengembangan vertical housing, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Selain itu, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik inklusif menjadi bagian penting dari penataan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

- **Pengkoordinasian Pemerataan Infrastruktur Digital**

  Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses dan kualitas infrastruktur digital secara merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah pedesaan dan kawasan tertinggal. Penyediaan jaringan internet yang cepat, stabil, dan terjangkau menjadi fondasi penting untuk mendukung transformasi digital dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, layanan publik, ekonomi digital, dan tata kelola pemerintahan. Dengan infrastruktur digital yang handal, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan secara lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kebijakan ini juga memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

  Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi millenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur 10. Berkurangnya Kesenjangan 11. Kota dan Komunitas berkelanjutan

MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, PRODUKTIF, DAN REGENERATIF BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNGGULAN

a. Ekonomi regeneratif dan inklusif berbasis hilirisasi agro-maritim serta perluasan kesempatan kerja

Strategi ini merupakan langkah penting untuk menjaga sumber daya ekstraktif secara regeneratif sehingga sumber daya yang dikelola dapat memberikan manfaat ekonomis namun tetap terjaga kelestariannya. Strategi ini didukung dengan beberapa upaya seperti pembatasan sektor ekonomi ekstraktif, hilirisasi komoditas alam dan pariwisata, serta Menerapkan pertanian terpadu dengan konsep teknologi tepat guna dan kolaborasi antara pertanian, peternakan, perikanan. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Pembatasan sektor ekonomi ekstraktif diimbangi kemudahan investasi disektor manufaktur, jasa dan perdagangan serta investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru**

  Arah kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi ekstraktif yang berisiko merusak lingkungan, dengan mendorong peralihan ke sektor-sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memberikan kemudahan investasi di sektor manufaktur, jasa, dan perdagangan melalui penyederhanaan perizinan, insentif usaha, serta penyediaan infrastruktur pendukung. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

- **Hilirisasi komoditas unggulan dan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif**

  Kebijakan ini diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata yang bernilai tambah melalui hilirisasi produk dan layanan berbasis potensi lokal. Penguatan sektor kepariwisataan dilakukan dengan pendekatan kreatif dan inovatif, yang mencakup integrasi antara daya tarik wisata, produk ekonomi kreatif, serta promosi digital yang efektif. Arah kebijakan ini mencakup pula peningkatan kapasitas SDM Parekraf yang berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan daya tarik, destinasi dan usaha pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu menggerakkan ekonomi lokal secara lebih luas.

- **Menerapkan pertanian terpadu dengan konsep teknologi tepat guna dan kolaborasi antara pertanian, peternakan, perikanan dan pola tanam tumpangsari**

  Arah kebijakan ini mendukung transformasi pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan sehingga mampu berswasembada pangan dan menjaga keberlangsungan hidup petani. Transformasi pertanian diarahkan menuju konsep pertanian terpadu yang mengintegrasikan antara pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, diperlukan penerapan pendekatan pertanian yang adaptif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi serta modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian adalah sistem pertanian dengan memanfaatkan teknologi, inovasi dan metode baru untuk meningkatkan produktivitas dengan biaya murah dan presisi serta lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim.

- **Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah sesuai kewenangan daerah.**
  Arah kebijakan ini mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan	2. tanpa kelaparan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur 10. Kota dan Komunitas Berkelanjutan 12. konsumsi dan produksi yangn bertanggung jawab
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		

b. Penguatan ekonomi kerakyatan berdaya saing berbasis kemitraan dalam meningkatkan pendapatan daerah

Penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Trenggalek dapat dicapai melalui optimalisasi sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, serta industri kreatif yang inovatif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup peningkatan investasi daerah untuk mendukung pengembangan proyek ramah lingkungan, akselerasi hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah tinggi, serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Penguatan infrastruktur distribusi dan pemasaran juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Kebijakan yang dapat diterapkan meliputi penyederhanaan regulasi investasi, penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal, serta pelatihan dan pendampingan bagi petani, nelayan, dan pelaku industri kreatif. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan mitra dagang dan revitalisasi peran BUMD juga harus dilakukan untuk menyambut *new economy era*. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Trenggalek dapat membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Peningkatan kerjasama dengan mitra dagang produk unggulan daerah**
  Arah kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kerja sama perdagangan untuk mendorong perluasan pasar produk unggulan daerah melalui kemitraan strategis dengan pelaku usaha, investor, dan mitra dagang, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah daerah berperan aktif dalam memfasilitasi promosi potensi daerah melalui penyelenggaraan lelang investasi sebagai sarana menarik minat investor terhadap sektor-sektor prioritas. Selain itu, diberikan insentif berusaha yang kompetitif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor produktif, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal secara berkelanjutan.

- **Optimalisasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**
  Arah kebijakan ini diarahkan pada optimalisasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Pemerintah daerah mendorong perluasan peran UMKM tidak hanya sebagai pelaku ekonomi mandiri, tetapi juga sebagai agregator dalam rantai nilai ekonomi kreatif melalui pengembangan sentra UKM, penyelenggaraan event dan festival lokal, serta akses terhadap pasar dan pembiayaan. Selain itu, kebijakan ini mencakup monetisasi potensi sektor kehutanan sosial dan pesisir melalui pendekatan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah berbasis sumber daya alam. Upaya ini dilakukan secara inklusif dengan memastikan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal dan kelompok rentan.

- **Revitalisasi peran BUMD menyambut new economy era**
  Arah kebijakan ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyambut era ekonomi baru yang ditandai oleh digitalisasi, transisi energi, dan ekonomi hijau. BUMD didorong untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas usaha, profesionalisasi manajemen, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan penguatan peran koperasi desa dan BUMDes sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Sinergi antara BUMD, BUMDes, dan koperasi diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang tangguh, inovatif, dan inklusif.

- **Pemanfaatan peluang perdagangan karbon untuk peningkatan pendapatan daerah dan kemitraan usaha berkelanjutan**
  Arah kebijakan ini difokuskan pada pemanfaatan peluang perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan daerah baru sekaligus instrumen untuk memperkuat kemitraan usaha yang

berkelanjutan. Pemerintah daerah mendorong pengembangan kawasan industri dan permukiman industri (sentra industri) yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kebijakan penurunan emisi. Transaksi perdagangan karbon diarahkan melalui skema hilirisasi berbasis rantai nilai sektor-sektor unggulan daerah, seperti kehutanan, pertanian, dan energi bersih. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap target penurunan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi hijau yang inklusif dan kompetitif bagi pelaku usaha lokal.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 12. Kota dan Komunitas Berkelanjutan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		

MISI 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG ADIL MELALUI KOTA LESTARI YANG HARMONIS DAN RAMAH LINGKUNGAN

a. Akselerasi peningkatan kelestarian lingkungan untuk kenyamanan kehidupan masyarakat

Akselerasi peningkatan kelestarian lingkungan menjadi strategi utama dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, sehingga Kabupaten Trenggalek dapat tumbuh sebagai daerah yang nyaman, aman, dan tangguh bagi kehidupan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran lingkungan dengan penguatan literasi, kampanye publik, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, perencanaan tata ruang diarahkan agar mengintegrasikan aspek kebencanaan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keberadaan kawasan hutan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Upaya ini juga diperkuat melalui peningkatan konservasi sumber daya, audit penggunaan energi, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah industri secara berkelanjutan. Di bidang kebencanaan, dilakukan penguatan mitigasi, respons cepat saat terjadi bencana, serta penyediaan sarana evakuasi yang aman, termasuk pengembangan ruang-ruang evakuasi bencana yang terintegrasi dengan

sistem perlindungan masyarakat. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Perencanaan tata ruang dengan mengintegrasikan aspek kebencanaan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta melindungi kenakekaragaman hayati**
  Arah kebijakan ini difokuskan pada penguatan perencanaan tata ruang yang mengintegrasikan aspek kebencanaan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, pelestarian kawasan hutan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Penataan ruang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian ekosistem melalui pemetaan wilayah rawan bencana, zonasi perlindungan lingkungan, dan pengendalian pemanfaatan lahan. Dalam mendukung upaya konservasi, kebijakan ini juga mencakup pembentukan hutan raya atau kebun raya, identifikasi potensi geo-site dan pengembangan geopark, serta konservasi sungai sebagai ruang publik ekologis. Pendekatan ini bertujuan menciptakan tata ruang yang aman, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.
- **Peningkatan konservasi dan audit penggunaan energi, penerapan modifikasi proses dan teknologi, serta manajemen limbah industri**
  Arah kebijakan ini diarahkan pada peningkatan upaya konservasi sumber daya alam dan budaya secara terpadu dengan pengelolaan energi dan limbah yang bertanggung jawab. Fokus utamanya mencakup konservasi hutan, perluasan sekuestrasi karbon, serta pelindungan sumber mata air dan kawasan karst yang memiliki fungsi ekologis penting. Selain itu, kebijakan ini mendorong konservasi situs prasejarah dan sejarah sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya daerah, serta identifikasi kekayaan hayati dan indikasi geografis untuk pengembangan biodiversity sebagai aset pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks industri, diterapkan audit energi, modifikasi proses produksi ramah lingkungan, serta manajemen limbah industri guna mengurangi jejak ekologis dan mendukung ekonomi hijau.
- **Penguatan mitigasi dan respon cepat bencana berbasis komunitas dan kearifan lokal**
  Arah kebijakan ini difokuskan pada penguatan mitigasi dan respons cepat terhadap bencana dengan mengedepankan peran aktif komunitas dan pelibatan kearifan lokal. Upaya ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam sistem peringatan dini, pelatihan tanggap darurat, serta penyusunan rencana kontinjensi berbasis wilayah. Nilai-nilai gotong royong, ritual adat, dan praktik tradisional seperti "bersih desa" dikembangkan secara konkret sebagai bagian dari strategi adaptasi dan pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini tidak hanya membangun ketangguhan sosial, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dalam menghadapi ancaman bencana secara berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi millenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan 13. penanganan perubahan iklim 14. ekosistem laut 15. ekosistem daratan

b. Penguatan sekuestrasi karbon melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sekuestrasi karbon sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Fokus utama strategi ini mencakup pelestarian hutan, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta pengembangan ruang terbuka hijau sebagai penyerap karbon alami. Selain pendekatan teknis-ekologis, strategi ini juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan literasi lingkungan melalui edukasi, kampanye publik, dan penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan generasi muda, strategi ini bertujuan membentuk budaya ekologis yang mendukung pembangunan rendah karbon secara inklusif dan berkelanjutan. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Peningkatan kesadaran lingkungan melalui penguatan literasi, kampanye, dan pemberian ruang partisipasi dalam rangka mengurangi efek gas rumah kaca**

  Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan melalui penguatan literasi lingkungan, penyelenggaraan kampanye publik, dan pemberian ruang partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan pelibatan aktif masyarakat, diharapkan terbentuk perilaku ramah lingkungan yang mendukung upaya sekuestrasi karbon dan pembangunan rendah emisi secara partisipatif dan inklusif.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi millenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan 13. penanganan perubahan iklim 14. ekosistem laut 15. ekosistem daratan

MISI 4: MENGOPTIMALKAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN MANUSIA YANG SEHAT, BERBUDAYA, KREATIF, DAN TERLINDUNGI

a. Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Strategi pemenuhan pelayanan dasar diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Upaya ini tidak hanya mencakup peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi juga penekanan pada pemerataan layanan dan intervensi yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pendekatan ini dilaksanakan secara holistik, mulai dari usia dini hingga dewasa, dengan integrasi antar-sektor guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal**

  Arah kebijakan ini bertujuan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak, tanpa terkecuali. Pemerintah daerah mendorong pemerataan fasilitas dan layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah dan nonformal, termasuk di wilayah terpencil dan tertinggal. Dengan menghapus hambatan geografis, sosial, dan ekonomi, diharapkan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang setinggi-tingginya.

- **Peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas**
  Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dinamika pembangunan. Pemerintah daerah mendorong keterjangkauan pendidikan dalam bidang STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), pendidikan keagamaan, serta vokasi berbasis keterampilan melalui pemberian beasiswa, pengembangan kurikulum berbasis industri, dan kerja sama dengan dunia usaha. Upaya ini bertujuan mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di era digital dan ekonomi global.
- **Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan gizi bagi seluruh rakyat**
  Arah kebijakan ini difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak, khususnya pemenuhan gizi sebagai fondasi tumbuh kembang yang optimal. Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan layanan kesehatan dasar yang menyeluruh, termasuk intervensi gizi untuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak, guna mencegah stunting dan masalah kesehatan kronis. Dengan dukungan perlindungan sosial yang menyasar kelompok rentan, kebijakan ini mendukung generasi muda yang sehat secara fisik dan mental.
- **Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan**
  Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah. Pemerintah daerah mendorong rekrutmen, pelatihan, dan distribusi tenaga kesehatan yang adil antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan bermutu. Hal ini sekaligus memperkuat daya saing sistem pelayanan kesehatan daerah.
- **Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat**
  Arah kebijakan ini menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran hidup sehat sebagai bagian dari perilaku sehari-hari masyarakat. Pemerintah daerah memperluas layanan promotif dan preventif melalui edukasi, kampanye publik, dan penyediaan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat, seperti olahraga, sanitasi, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, sehat, dan mampu mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi,	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta	1. tanpa kemiskinan 2. tapa kelaparan 3. kehidupan sehat dan sejahtera

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	4. pendidikan berkualitas 5. Kesetaraan Gender 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	
	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	

b. Pembangunan manusia yang berdaya saing dan berbudaya melalui penguatan karakter bangsa serta pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa

Strategi pembangunan manusia diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan serta pelestarian kearifan lokal. Upaya ini dilakukan sejak usia dini melalui pendidikan karakter, seni, budaya, dan olahraga, yang dikembangkan secara holistik dan kontekstual. Selain itu, pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa menjadi bagian integral dalam memperkuat lingkungan sosial sebagai ruang tumbuhnya nilai moral, solidaritas, inovasi, serta kecintaan terhadap budaya lokal. Dengan pendekatan ini, pembangunan manusia tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan kepribadian, kepemimpinan, dan ketahanan budaya dalam menghadapi tantangan global. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Penguatan karakter dan nilai luhur kebudayaan lokal serta keagamaan sejak usia dini hingga remaja melalui pendidikan, seni, dan olahraga berprestasi**

  Arah kebijakan ini difokuskan pada pembangunan karakter dan daya saing generasi muda melalui pendekatan pendidikan yang holistik, mulai dari usia dini hingga remaja. Pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi fondasi penting untuk menanamkan akhlak mulia dan karakter kebangsaan di masa golden age perkembangan anak. Bagi pemuda dan remaja, kebijakan diarahkan pada penguatan soft skills, kemampuan berpikir kritis, dan problem solving yang relevan dengan tantangan masa depan. Selain itu, pemerintah daerah mendorong literasi budaya, penguatan identitas

melalui sejarah lokal dan nasional, serta kemampuan bertutur dalam bahasa asing sebagai bekal daya saing global. Nilai-nilai Pancasila juga ditanamkan secara aktif melalui kegiatan pendidikan, seni, dan olahraga berprestasi sebagai media pembentukan karakter dan kebanggaan nasional.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	1. tanpa kemiskinan 2. tanpa kelaparan 3. kehidupan sehat dan sejahtera 4. pendidikan berkualitas 5. Kesetaraan Gender 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan

c. Pembangunan yang inklusif dan menyejahterakan seluruh masyarakat

Pembangunan masyarakat secara inklusif meliputi pengarusutamaan gender, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial secara terintegrasi. Penguatan pengarusutamaan gender dimulai dengan penyusunan kebijakan yang memastikan keterlibatan aktif perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan publik, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Selain itu, penyediaan regulasi yang mendukung perlindungan hak-hak kelompok rentan dan pembentukan mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan dan kelompok marginal juga dapat didorong untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Sedangkan strategi pengentasan kemiskinan harus berfokus pada penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan berbasis data. Sistem perlindungan sosial yang responsif perlu dikembangkan agar bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Program seperti jaminan sosial, tunjangan bagi kelompok rentan, serta subsidi kebutuhan pokok harus diperbaiki dengan pemanfaatan data terintegrasi guna memastikan distribusi yang adil dan

transparan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal harus diperkuat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Kebijakan yang dapat diterapkan mencakup digitalisasi data penerima manfaat, optimalisasi program pemberdayaan ekonomi berbasis desa, serta kolaborasi dengan sektor swasta dalam menciptakan peluang usaha dan pekerjaan yang berkelanjutan. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan**

  Arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara adil, setara, dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Pemerintah daerah mendorong penerapan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Kebijakan ini juga memperluas ruang partisipasi masyarakat secara setara, serta mendorong penciptaan lingkungan yang ramah terhadap keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya, guna memperkuat keadilan sosial dalam setiap aspek kebijakan publik. PUG merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender.

- **Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif integratif**

  Arah kebijakan ini difokuskan pada percepatan penurunan kemiskinan melalui pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai basis data terpadu untuk memastikan intervensi program sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah mendorong integrasi berbagai skema perlindungan sosial—baik pusat maupun daerah—ke dalam sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi darurat dan dinamika kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Pendekatan ini tidak hanya menyatukan bantuan dalam satu data, tetapi juga memperkuat efektivitas pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- **Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat**

  Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap lapangan kerja yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata, tanpa memandang latar belakang sosial, gender, usia, atau kondisi disabilitas. Pemerintah daerah mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja melalui penguatan sektor produktif

lokal, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pengembangan kewirausahaan. Kebijakan ini juga memperhatikan kelompok rentan dan marjinal dengan menyediakan ruang partisipasi yang setara dalam aktivitas ekonomi. Dengan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berkut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	1. tanpa kemiskinan 2. tapa kelaparan 3. kehidupan sehat dan sejahtera 4. pendidikan berkualitas 5. kesetaraan gender 10. Berkurangnya Kesenjangan

MISI 5: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, KOLABORATIF, DAN MELAYANI DITOPANG DIGITALISASI UNTUK MEMASTIKAN INKLUSIFITAS PELAYANAN

a. Tata kelola pemerintahan bersih dan melayani berbasis digitalisasi pelayanan publik

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan profesional di Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, transparan (bersih), responsif, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Strategi utamanya mencakup penguatan kelembagaan melalui penataan fungsi dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah agar lebih efisien dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi kunci melalui penerapan sistem merit, pelatihan berbasis kompetensi, dan pengembangan karier secara objektif untuk memastikan pelayanan yang lebih profesional. Digitalisasi pelayanan publik didorong secara masif dengan pengembangan platform layanan terpadu berbasis teknologi informasi, integrasi sistem administrasi pemerintahan, serta pemanfaatan big data dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Inovasi pelayanan digital ini juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar secara adil dan merata, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pemenuhan SPM menjadi indikator penting dalam

memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan memenuhi hak dasar warga negara secara berkeadilan. Reformasi birokrasi yang dilakukan juga mencakup upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagai prasyarat terciptanya ruang pembangunan yang aman dan produktif. Penyederhanaan regulasi dan prosedur pelayanan tetap menjadi prioritas untuk menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lokal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat diperkuat melalui pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, guna membangun tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Secara lebih lanjut arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

- **Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah**
  Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan mampu memberikan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Penataan dilakukan melalui perbaikan struktur organisasi, peningkatan kompetensi ASN, serta penerapan prinsip tata kelola yang efektif dan efisien, sehingga aparatur daerah dapat lebih siap melayani kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, serta mendekatkan pelayanan masyarakat diantaranya dengan kegiatan ngantor di desa.
- **Penyediaan Portal Pelayanan Publik Berbasis Digital**
  Kebijakan ini diarahkan pada percepatan transformasi layanan publik berbasis digital yang adil, inklusif, dan menjangkau hingga tingkat desa. Pengembangan *super-app* pelayanan publik serta penguatan call center terpadu menjadi langkah strategis untuk menghadirkan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah terpencil.
- **Penguatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**
  Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban wilayah melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penekanan diberikan pada pencegahan tindak kriminalitas, penanganan konflik sosial secara dini, darurat kebakaran dan non kebakaran, bencana serta penegakan hukum yang tegas dan adil, guna menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung stabilitas pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan ini berperan dalam mendukung asta cita, quick wins, dan SDG's sebagai berikut:

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat	6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan	9. industri, inovasi, dan infrastruktur 16. perdamaian, keadilan, dan

Asta Cita RPJMN	Quick Wins RPJMN	SDG's
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	penyuluh), TNI/ POLRI, dan pejabat negara)	kelembagaan yang tangguh 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

- **Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data**

  Dalam era transformasi digital, data telah menjadi aset strategis yang sangat berharga. Efektivitas dan akurasi dalam proses pelaporan, pengumpulan, dan pengolahan data merupakan fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat, perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*), dan peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan dari arah kebijakan ini untuk mewujudkan sistem pelaporan, pengumpulan, dan pengolahan data yang terstandarisasi, terinterkoneksi, dan cerdas dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa arah kebijakan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya :

  a. Integrasi Aplikasi dan Interoperabilitas Sistem
     Mengembangkan dan menerapkan platform data terpadu yang menghubungkan berbagai sistem dan database yang berjalan di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta sektor swasta yang relevan. Menetapkan standar data dan protokol interoperabilitas (misalnya : API - *Application Programming Interface*) yang wajib digunakan oleh semua sistem baru dan yang sudah ada. Menghindari pembuatan sistem yang bersifat berdiri sendiri dan mendorong integrasi vertikal (antar level pemerintahan) dan horizontal (antar instansi).
  b. Digitalisasi Pengumpulan Data
     Mengalihkan metode pengumpulan data dari pengumpulan data secara manual (kertas) ke pengumpulan data berbasis digital secara menyeluruh. Mengembangkan dan mempromosikan penggunaan aplikasi mobile, formulir online, dan sistem *web-based* untuk pengumpulan data di lapangan.
  c. Optimalisasi Kecerdasan Artifisial (AI)
     Teknologi AI dapat digunakan untuk membantu dalam mengolah data secara canggih untuk mengubah data mentah menjadi informasi dan insight yang dapat ditindaklanjuti
  d. Mengembangkan *dashboard* dan visualisasi data interaktif yang mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan
  e. Mengembangkan Keamanan Siber dan Privasi Data
     Memastikan bahwa seluruh proses data dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Menerapkan protokol keamanan berlapis (*encryption, firewall, authentication multi-factor*). Melakukan

audit keamanan secara berkala terhadap semua sistem penyimpanan dan pengolahan data dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi

3.2.2 Program Prioritas Daerah

A. PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TRENGGALEK

Program prioritas dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Trenggalek merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Sebagai bentuk inovasi dalam perencanaan, Kabupaten Trenggalek menetapkan 11 icon program prioritas sebagai induk dari proyek-proyek strategis kepala daerah. Icon ini tidak hanya menjadi simbol unggulan pembangunan, tetapi juga sarana konsolidasi lintas sektor untuk mendorong transformasi daerah secara menyeluruh. Kesebelas icon tersebut tersebar dalam tiga pilar utama pembangunan: Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif, Pilar Net Zero Carbon, dan Pilar SDM Kreatif dan Inovatif, yang secara bersama-sama memayungi berbagai intervensi pembangunan guna menjawab tantangan daerah serta mendukung agenda nasional dan global. Lebih dari sekadar program teknokratis, keberadaan 11 icon ini mengandung filosofi mendalam. Angka 11 melambangkan sinergi antara 1 visi besar dan 10 jari yang bekerja serempak, menggambarkan semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Trenggalek yang adil dan makmur.

Gambar III.10.
Icon Program Kabupaten Trenggalek



Penyajian program prioritas ini disusun secara sistematis sebagai bentuk operasionalisasi strategi pembangunan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut melalui 11 icon berikut ini:

1. TGX Ekonomi Karbon

TGX Ekonomi Karbon merupakan ikon program prioritas Kabupaten Trenggalek yang menjadi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. TGX Ekonomi Karbon mencakup pendekatan integratif melalui pembangunan pertanian rendah karbon, pemanfaatan energi alternatif dari limbah ternak (biogas), konservasi sumber daya pesisir dan laut untuk mendukung *blue carbon*, serta pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat dalam skema *Integrated Area Development* (IAD).

Arah kebijakan TGX Ekonomi Karbon juga mencakup sektor transportasi ramah lingkungan melalui pembangunan jalur *pedestrian*, sepeda, dan sistem angkutan umum terpadu, serta pengolahan sampah menjadi energi atau bahan baku ekonomi sirkular. Dalam aspek kelembagaan sosial, TGX Ekonomi Karbon melibatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan adat sebagai subjek dalam tata kelola karbon berbasis wilayah. Keseluruhan pendekatan ini sejalan dengan target-target SDG's seperti "Tanpa Kelaparan", "Energi Bersih dan Terjangkau", "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan", "Ekosistem Daratan dan Laut", hingga "Penanganan Perubahan Iklim". Dengan TGX Ekonomi Karbon, Trenggalek menempatkan setiap aktivitas pembangunan sebagai peluang untuk menurunkan emisi, memperkuat resiliensi daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan inklusi sosial.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Ekonomi Karbon	Percepatan penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon (NEK)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 6 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Masyarakat	

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perhubungan	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 14 Ekosistem Lautan Tujuan 15 Ekosistem Daratan Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	
	Pengembangan energi alternatif biogas dari kotoran ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian	

2. TGX Rantai Nilai

TGX Rantai Nilai merupakan ikon program pembangunan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang menjadi induk berbagai program lintas sektor dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara holistik. Ikon ini mengembangkan sistem rantai nilai secara menyeluruh, dari produksi hingga hilirisasi, untuk komoditas unggulan daerah seperti porang, patin, kayu, tembakau, bambu, kopi, kakao, cengkeh, dan produk peternakan seperti daging, telur, dan susu. Integrasi ini mencakup penyediaan sarana produksi pertanian, perlindungan dari risiko bencana sektor pangan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta penguatan ekosistem industri lokal melalui penyediaan infrastruktur seperti Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU), *Rice Milling Unit* (RMU) , *bed dryer, vertikal dryer, cold storage*, hingga revitalisasi sentra industri dan kawasan industri Watulimo.

Arah kebijakan TGX Rantai Nilai didesain untuk memastikan bahwa kebutuhan dan permintaan masyarakat Kabupaten Trenggalek dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi pasar ke luar daerah. Model ini menjamin kemandirian pangan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis lokal dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Komoditas atau usaha yang bersifat ekstraktif akan dikelola dan diupayakan menuju sistem regeneratif, selaras dengan prinsip *Nature-based Solutions* (NBS). Pemerintah juga akan menciptakan intervensi baru bila permintaan strategis belum dapat dipenuhi dari sumber lokal. Dukungan kelembagaan seperti BUMDes, koperasi desa, serta BUMD menjadi penggerak utama dalam hilirisasi dan distribusi produk unggulan. Dengan demikian, TGX Rantai Nilai menjadi fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan pangan, memperluas kesempatan kerja, dan membangun ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Rantai Nilai	Optimalisasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan untuk swasembada pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 14 Ekosistem Lautan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan	
	Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	koperasi, usaha kecil dan menengah	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab Tujuan 14 Ekosistem Lautan Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	koperasi, usaha kecil dan menengah	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keuangan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	

3. TGX Halal

TGX Halal merupakan ikon program strategis Kabupaten Trenggalek yang diarahkan untuk membangun ekosistem produk dan layanan halal yang higienis, menguntungkan, berbasis lokal, dan memiliki sertifikasi lengkap. Ikon ini bertujuan menciptakan kepercayaan pasar terhadap produk Trenggalek dengan standar mutu dan kehalalan yang terjamin, sekaligus membuka peluang pasar domestik maupun global melalui penguatan sektor pangan, perdagangan, kesehatan, dan investasi. TGX Halal mengintegrasikan berbagai

intervensi lintas sektor untuk memastikan rantai pasok halal, mulai dari hulu hingga hilir, dapat tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

Ikon program ini memberikan pedoman arah kebijakan yang mendorong pemetaan kebutuhan pasar untuk menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, peningkatan kapasitas Juru Sembelih Halal (Juleha) dan optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) serta Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) sebagai simpul utama jaminan kehalalan dan kebersihan. Dalam aspek perdagangan dan industri, dilakukan pemetaan kebutuhan pasar serta fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, NIB, dan BPOM bagi pelaku UMKM. Optimalisasi ternak lokal juga dipadukan dengan penguatan ekosistem penanaman modal dan penyediaan farmasi serta makanan minuman yang aman dan berkualitas. Dengan pendekatan menyeluruh ini, TGX Halal memperkuat posisi Kabupaten Trenggalek sebagai pusat produksi halal yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan SDG's.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Halal	Higienis, Menguntungkan, Produk Lokal, Bersertifikasi Lengkap	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perdagangan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, usaha kecil dan menengah	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	

4. TGX Kerja

TGX Kerja merupakan ikon program strategis Kabupaten Trenggalek yang mengedepankan transformasi sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, sehat, dan berdaya saing. Ikon ini dirancang untuk menjawab tantangan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akses kerja melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi dalam sistem jaminan sosial dan peningkatan kapasitas angkatan

kerja. TGX Kerja memfokuskan pada perluasan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai fondasi perlindungan dasar, terutama bagi pekerja informal dan keluarga miskin.

Di sisi lain, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, siap ditempatkan di sektor formal maupun melalui skema kerja ke luar negeri tanpa biaya (program 0 Rupiah). Pendekatan padat karya dan matching demand-supply tenaga kerja berbasis perencanaan ketenagakerjaan menjadi pengungkit lapangan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui pemberdayaan sosial, TGX Kerja juga menyasar generasi muda dari keluarga miskin (second generation) untuk terlibat dalam kerja nyata berbasis keterampilan dan wirausaha. Dengan skema menyeluruh ini, TGX Kerja menjadi tulang punggung pengentasan kemiskinan dan penguatan pekerjaan layak secara sistemik, sejalan dengan tujuan SDG's untuk "Tanpa Kemiskinan", "Kehidupan Sehat dan Sejahtera", serta "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi".

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Kerja	Peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tenaga Kerja	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
	Perluasan kesempatan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	
	Pengentasan kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial	

5. TGX Pariwisata

TGX Pariwisata merupakan ikon strategis pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Trenggalek yang berorientasi pada pariwisata kolaboratif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal. Ikon ini menempatkan pariwisata tidak hanya sebagai sektor ekonomi semata, tetapi sebagai motor

integratif yang mendorong pelestarian kebudayaan, pemberdayaan ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Melalui program-program prioritas seperti pelestarian dan pengelolaan kebudayaan serta pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, TGX Pariwisata mendorong kebudayaan lokal menjadi daya tarik wisata unggulan yang memperkuat identitas daerah sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Transformasi ini ditopang oleh pengembangan Super Apps pariwisata terintegrasi, kalender event daerah, sistem tiket terpadu *(One Ticket All)*, serta peningkatan amenitas dan aksesibilitas destinasi, termasuk perbaikan jalan menuju kawasan wisata. Selain itu, sektor ini juga dipadukan dengan pengelolaan persampahan di destinasi serta didukung oleh penyebarluasan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik agar menciptakan lingkungan wisata yang bersih dan berkelanjutan. TGX Pariwisata juga menjadi agregator pertumbuhan UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi kreatif lokal, menjadikan pariwisata sebagai wahana tumbuh bersama berbagai sektor. Keberhasilannya diukur melalui peningkatan PAD dari pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan, dan peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan. Ikon ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDG's, khususnya tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur, serta Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Pariwisata	Pariwisata Kolaboratif	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kebudayaan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab Tujuan 15 Ekosistem Daratan Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pariwisata dan ekonomi kreatif	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pariwisata	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	

6. TGX.go.id

TGX.go.id merupakan ikon program transformasi digital Kabupaten Trenggalek yang berfokus pada optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Ikon ini menjadi landasan penguatan ekosistem digital pemerintahan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengelolaan aplikasi informatika dan informasi komunikasi publik.

Melalui program pengelolaan aplikasi informatika, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperkuat sistem aplikasi terintegrasi (*Super Apps*) yang menghubungkan berbagai layanan lintas sektor ke dalam satu platform digital, serta menyediakan layanan Call Center yang responsif dan ramah masyarakat. Selain itu, digitalisasi ini didukung oleh penyebarluasan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. TGX.go.id merupakan tulang punggung modernisasi pelayanan daerah dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), terutama pada aspek *Kemitraan untuk mencapai tujuan*.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX.go.id	Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika	

7. TGX Atraktif

TGX Atraktif merupakan salah satu icon program prioritas yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah untuk menciptakan kawasan yang layak huni, rendah karbon, dan berkelanjutan. Program ini mencakup pembangunan sistem drainase yang baik, penyediaan ruang terbuka hijau, pemenuhan infrastruktur dasar permukiman, hingga tata ruang yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan (low carbon livelihood). Untuk itu, pembangunan Kabupaten Trenggalek sebagai kota atraktif juga akan didukung dengan pembangunan sarana-prasarana angkutan umum, *pedestrian*, jalur sepeda, dan sarpras non-car sebagai upaya mendukung *mobility-hub*. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus

memperkuat daya saing dan pendapatan daerah melalui pengelolaan ruang yang tertata dan estetis. Lebih dari sekadar membangun fisik kota, program ini juga dimulai dari penguatan kelembagaan dan penganggaran yang visioner dan konsisten, serta dilandasi oleh Konsep KRESNA filosofi lokal yang terinspirasi dari tokoh pewayangan Kresna, pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana.

Konsep ini tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga memiliki dasar geografis, karena bentuk wilayah Kabupaten Trenggalek menyerupai mahkota Kresna sebagai sumbu filosofis imajiner. Dengan semangat ngawula marang kawulane gusti mengabdi kepada rakyat sebagai amanah Tuhan, konsep ini menjadi arah moral dan kultural bagi pemerintahan dan pembangunan kota yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga berakar pada nilai kebijaksanaan lokal dan keadilan sosial.

Gambar III.11.
Konsep Kresna dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025

Makna KRESNA dalam pembangunan Kota Atraktif Trenggalek semakin kuat ketika dikaitkan dengan empat pusaran filosofis dan geografis yang membentuk orientasi dan identitas ruang daerah: Masjid, Gunung Wilis, Alun-alun, dan Segara Kidul. Masing-masing titik merepresentasikan dimensi fundamental dalam pembangunan: Masjid sebagai pusat spiritual dan moralitas publik; Gunung Wilis sebagai simbol kekuatan alam dan kearifan ekologis; Alun-alun sebagai ruang demokrasi dan kebersamaan sosial; serta Segara Kidul sebagai lambang keterbukaan terhadap perubahan, budaya maritim, dan relasi global. Dalam kerangka Kota Atraktif, keempat pusaran ini membentuk sumbu pembangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga filosofis, mempertemukan nilai langit (spiritualitas), bumi (ekologi), manusia (sosial), dan air (keterbukaan dan keberlanjutan). Gagasan besar ini kemudian diwujudkan secara konkret melalui icon program Kabupaten Trenggalek Kota Atraktif, yang tidak hanya membangun kota dalam arti fisik, tetapi juga menanamkan nilai dan makna dalam setiap ruang yang diciptakan mewujudkan Trenggalek sebagai kota yang bernafas dari akar budayanya, hidup dari kearifan lokalnya, dan tumbuh untuk masa depan yang lestari. Secara lebih lanjut telah dipetakan

icon Kabupaten Trenggalek Kota Atraktif dengan program prioritas pada tabel di bawah ini:

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Atraktif	Penanganan Banjir/Genangan Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pembangunan dan Preservasi Jalan Antar Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pembangunan Kota Atraktif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Perhubungan	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pengembangan Mobility Hub	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perhubungan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana dan MBR	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Penanganan Kawasan Kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Pengadaan Tanah Jalan Lintas Selatan (JLS)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pertanahan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 5 Kesetaraan Gender Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pemenuhan Persyaratan Kesehatan pada SPAM untuk Air Minum Aman Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
	Pengembangan dan revitalisasi jaringan irigasi pendukung swasembada pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Digitalisasi berbasis user experience (UX)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Early Warning System (EWS) dan dashboard bencana trace-able	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Trantibum	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

8. TGX Lestari

TGX Lestari merupakan ikon pembangunan Kabupaten Trenggalek yang mengusung prinsip keberlanjutan lingkungan, pelestarian ruang hidup, serta penguatan ketahanan ekologi melalui pendekatan multisektor. Ikon ini diarahkan untuk menjawab tantangan penurunan daya dukung lingkungan, keterbatasan ruang hidup layak, serta risiko bencana akibat perubahan iklim dan degradasi ekosistem. TGX Lestari hadir sebagai kerangka pembangunan yang memadukan pengelolaan lingkungan, konservasi ruang dan biodiversitas, serta penguatan kearifan lokal. Ruang lingkup program TGX Lestari mencakup penguatan sistem sanitasi aman melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional, serta sistem pengelolaan sampah berbasis desa yang terintegrasi. Penataan ruang disempurnakan melalui percepatan penyusunan RTRW dan RDTR sebagai arah pembangunan yang adaptif dan resisten terhadap tekanan ekologi. Di sisi lain, konservasi sumber daya alam dilakukan melalui pelestarian hutan, mikro forest, mata air, sempadan sungai, serta pembentukan kebun raya. Pendekatan ini didukung oleh program riset, inovasi, dan identifikasi geosite sebagai landasan pembentukan geo-park serta penguatan identitas ekologis daerah.

Selain itu, TGX Lestari juga mengintegrasikan aspek sosial-budaya melalui pelestarian situs prasejarah, gotong royong dan ritual adat, hingga pengembangan wisata berbasis keanekaragaman hayati seperti Sapi Nggalekan. Dengan sinergi antara sektor lingkungan hidup, pertanian, kebudayaan, riset dan infrastruktur, TGX Lestari menjadi pilar utama dalam mewujudkan Trenggalek sebagai kabupaten yang tangguh iklim, ramah lingkungan, dan

berbasis warisan budaya. Ikon ini turut mendukung pencapaian SDGs terutama dalam penanganan perubahan iklim, keberlanjutan permukiman, ekosistem daratan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Lestari	Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) untuk Sanitasi Aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Trantibum	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
	Penguatan pengelolaan sampah desa	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Pembangunan TPST	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Pengelolaan sampah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 15 Ekosistem Daratan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	
	Penyelesaian Penyusunan RTRW dan RDTR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	MICRO FOREST (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
				Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Program penghargaan LH untuk masyarakat dengan andalan adipura desa / RT / RW	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup	Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Konservasi hutan dan perluasan sekuestrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Konservasi situs prasejarah dan sejarah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kebudayaan	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Konservasi sumber mata air	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	
	Konservasi sungai dan sempadan sungai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang
	Pembentukan hutan raya / kebun raya	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Konservasi kekayaan hayati dan biodiversity sampai terbitnya Indikasi Geografis (IG)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Identifikasi geosite dan proses pembentukan geo-park	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Penelitian dan Pengembangan	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
	Gotong royong dan ritual adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Pelestarian Sapi Galekan dengan konsep wisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

9. TGX Investasi Hijau

TGX Investasi Hijau merupakan ikon pembangunan Kabupaten Trenggalek yang mengedepankan model investasi berorientasi hijau dan inklusif melalui pemanfaatan aset publik, fasilitasi iklim usaha yang kondusif, serta inovasi dalam skema penanaman modal. Ikon ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan dan keadilan sosial.

Strategi utama TGX Investasi Hijau meliputi optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), di mana aset-aset publik dikelola secara produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi dan layanan publik. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didorong menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi lokal melalui bisnis strategis dan tata kelola yang profesional. Upaya ini diperkuat oleh program peningkatan kualitas pasar daerah sebagai pusat distribusi ekonomi masyarakat.

Salah satu inovasi dalam mengakselerasi investasi di Kabupaten Trenggalek adalah lelang investasi. Skema ini merupakan promosi investasi yang menawarkan aset/produk unggulan di daerah. Selain basis aset pemerintah, produk unggulan daerah, dapat pula berbentuk entitas bisnis/usaha yang sudah ada untuk mendapatkan dukungan investor dalam bentuk aksi korporasi (akuisisi, *partnership*, *crowdfunding*, dan sebagainya). Hal ini dapat mendorong konsolidasi sektor-sektor usaha di Kabupaten Trenggalek, pertama lebih kokoh dalam hal struktur kepemilikan usaha dan mencegah *"economic overheat"* karena banyaknya pelaku usaha yang sama di sektor yang sejenis. Kedua, konsolidasi terhadap mata rantai pengelolaan sektor usaha dari hulu hingga hilir.

TGX Investasi Hijau menciptakan sinergi antar-sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tangguh, ramah lingkungan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal – sekaligus menjadi pilar penting dalam pencapaian SDGs terkait pekerjaan layak, inovasi industri, dan pengurangan kesenjangan.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Investasi Hijau	Optimalisasi PAD melalui Kerjasama Pemanfaatan dalam penggunaan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keuangan	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perdagangan	
	Peningkatan investasi melalui inovasi Lelang Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAl		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Fasilitasi perijinan berusaha pertanian, perikanan, dan peternakan di OSS	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perdagangan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Perindustrian	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan	

10. TGX Hidup Berkualitas

TGX Hidup Berkualitas adalah ikon pembangunan Kabupaten Trenggalek yang mencerminkan komitmen daerah untuk menjamin hak dasar masyarakat

terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang setara serta berkualitas. Ikon ini menjadi kerangka strategis untuk memastikan bahwa setiap individu di Trenggalek memiliki akses terhadap layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mandat SDG's.

Di sektor pendidikan, TGX Hidup Berkualitas difokuskan pada fasilitasi Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan melalui pembangunan SLB, perguruan tinggi, serta penguatan pendidikan vokasi seperti SMK Panggul. Fasilitasi Program Makan Bergizi (MBG) juga menjadi upaya untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan sehat. Pada sektor kesehatan, ikon ini mendorong peningkatan pelayanan primer dan rumah sakit daerah (RSUD Watulimo dan RSUD Panggul), termasuk integrasi layanan primer untuk menciptakan sistem kesehatan yang merata dan tanggap.

Selain itu, ikon ini juga mencakup penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi keuangan, dan pengawasan yang akuntabel—menjadi fondasi kelembagaan yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Tak kalah penting, pengembangan inovasi daerah melalui riset, data, dan kolaborasi lintas sektor menjadi elemen kunci untuk mendorong layanan publik yang adaptif dan partisipatif. Dengan semangat kolaborasi, keberpihakan, dan transformasi, TGX Hidup Berkualitas menjadi pilar utama dalam membentuk Trenggalek sebagai daerah yang sehat, cerdas, adil, dan berdaya.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Hidup Berkualitas	Peningkatan aksesibilitas kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	-Pembangunan / peningkatan RSUD Panggul, RSUD Watulimo (rumah sakit wisata), Puskesmas Suruh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	-Integrasi Layanan Primer kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	Peningkatan aksesibilitas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
	Peningkatan kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pendidikan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pendidikan	
	-Fasilitasi Pembangunan / peningkatan SLB Panggul dan perguruan tinggi, SMK Panggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
	Fasilitasi Program MBG	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan	
	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENATAAN DESA	Pemberdayaan Desa	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 5 Kesetaraan Gender Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepegawaian	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Keuangan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Pengembangan Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Penelitian dan Pengembangan	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

11. TGX Inklusif

TGX Inklusif merupakan ikon transformasi sosial Kabupaten Trenggalek yang bertujuan menciptakan pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Ikon ini merepresentasikan visi daerah untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis, menjamin kesetaraan hak, dan mendorong inklusi sosial sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal pengentasan kemiskinan, TGX Inklusif mendorong sinergi program-program rehabilitasi sosial dan penguatan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai pendekatan berbasis komunitas dan empati sosial.

Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antarsektor untuk menjangkau warga yang tersisih dari sistem kesejahteraan.

Ikon ini juga menekankan pada pengarusutamaan gender dan perlindungan hak kelompok rentan melalui berbagai layanan pendampingan kelompok rentan dan pemberdayaan perempuan. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan kapasitas generasi muda melalui olahraga dan seni juga menjadi bagian dari strategi TGX Inklusif, guna menciptakan ruang tumbuh yang adil dan kreatif bagi semua kalangan.

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Inklusif	Pengentasan kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
	Fasilitasi Sekolah Rakyat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	
	Penguatan kesetaraan gender; perlindungan hak perempuan, anak dan disabilitas	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tujuan 5 Kesetaraan Gender Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Optimalisasi Layanan Terapi Tumbuh Kembang Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kesehatan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
	Pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan
	Peningkatan generasi muda berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kepemudaan dan Olahraga	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		

B. KESELARASAN PROGRAM DAERAH DENGAN NASIONAL

Gambar III.12.
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Proyek Strategis Kabupaten Trenggalek



Sinkronisasi antara Program Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Kabupaten Trenggalek menjadi bukti bahwa arah pembangunan daerah telah dirancang selaras dengan agenda pembangunan nasional 2025–2029. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengintegrasikan empat program unggulan nasional ke dalam inisiatif daerah secara konkret, yaitu: Swasembada, Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES Merah Putih), Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), dan Sekolah Rakyat. Keempat program ini tidak hanya mencerminkan respons terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi wujud nyata partisipasi daerah dalam mendukung prioritas Presiden dan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pada aspek ketahanan pangan dan pertanian, program Swasembada dijabarkan melalui proyek-proyek strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas lahan, pemberdayaan petani milenial, serta penguatan supply lauk pauk dari sektor peternakan dan perikanan. Program KOPDES Merah Putih difokuskan pada penguatan koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi lokal dengan pendekatan integrasi, penguatan koperasi induk pengampu, dan penciptaan model koperasi ideal. Kedua program ini diimplementasikan dengan sinergi antar-OPD dan dukungan kelembagaan desa serta didesain untuk mendongkrak kemandirian ekonomi masyarakat Trenggalek secara berkelanjutan. Sementara itu, program Dapur MBG dioperasionalkan melalui pendirian dapur sekolah yang terintegrasi dengan program pemenuhan gizi anak dan pembentukan yayasan pengelola, yang sekaligus memperkuat aspek kesehatan generasi muda. Sekolah Rakyat hadir sebagai inovasi pendidikan alternatif yang menargetkan kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses pendidikan formal, dengan dukungan langkah-langkah seperti pendataan aset

dan aktivasi ruang belajar komunitas. Seluruh program prioritas ini memperlihatkan bahwa Trenggalek tidak hanya adaptif terhadap arah kebijakan nasional, tetapi juga mampu mengartikulasikannya dalam program yang operasional, terukur, dan berorientasi pada hasil yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tabel III.5.
Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
20252029 - Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Adil dan Makmur - Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim - Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan - Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan - Mengoptimalkan transformasi sosial melalui	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah			Indeks Infrastruktur(poin)		
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah		Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) (Poin)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase luas genangan perkotaan yang tertangani (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya penanganan pengurangan kawasan kumuh	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Persentase Perbaikan RTLH (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan					KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya konektivitas wilayah		Indeks Konektivitas (Poin)		
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan mantab (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Persentase jembatan berfungsi baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Integrasi Antar Moda (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Cakupan layanan angkutan darat (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Tingkat Kinerja Ruas Jalan (Rasio)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase peningkatan pengguna angkutan umum (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tingkat kepatuhan operator dan awak angkutan sesuai SOP (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kegiatan promosi dan penjajakan kerja sama pengoperasian pelabuhan (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi SPBE (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Indeks Ekonomi Hijau(Angka)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)()		
		Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial		Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)		
				Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		
				Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase daya tarik destinasi dan usaha pariwisata yang terkelola (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik (meliputi semua non japrod yang di kelola dinas peternakan) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Susu) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase pangsa pasar pariwisata Kabupaten Trenggalek (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Pelaku Usaha)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Unit)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah		Realisasi Investasi (triliun rupiah)		
				Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Investor di Sektor Unggulan Daerah (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase masyarakat dan / atau investor yang memperoleh insentif dan / atau kemudahan investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan lnformasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset (Indeks)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa		Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase warga miskin usia produktif yang menjadi pelaku usaha baru (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
				Persentase Pengesahan Batas Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase Administrasi Desa yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
	Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Kabupaten			Indeks Kota Hijau(poin)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya layanan persampahan Kabupaten	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan dan penanganan pada pra, saat dan pasca bencana	% desa tangguh bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Indeks Gini(Poin)		
				Tingkat Kemiskinan((%))		
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Pelaku Usaha)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial ()	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang dapat disusun (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita) ()		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Pelaku Usaha)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Poin)		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)(Poin)		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Depresi pada usia â‰¥ 15 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Indeks Pendidikan (poin)		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (poin)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Kebinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Meningkatnya pengarusutamaan gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya yang dikembangkan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi(Poin)		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel		Nilai SAKIP (poin)		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Integritas (Poin)		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko (Skor)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Skor)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi SPBE (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang difasilitasi	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase Rekomendasi Pengawasan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

3.2.2.1 Arah Kebijakan Kewilayahan

Arah kebijakan kewilayahan merupakan kebijakan pembangunan dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek sebagai dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu. Dalam dokumen RTRW juga merumuskan program yang sudah dijabarkan pada masing-masing periode. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Trenggalek adalah mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Trenggalek berdasarkan RTRW Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6.
Program Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan
Tabel III.1 RTRW Kabupaten Trenggalek

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
A	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**		
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**		
	2.1 Sistem Jaringan Prasarana Transprotasi		
	2.1.1 Rencana Jaringan Jalan		
	24. Pemeliharaan jalan provinsi	Kecamatan Durenan, Kecamatan Watulimo	Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
	25. Pemeliharaan jalan nasional	Kecamatan Durenan, Pogalan, Trenggalek, Karangan, Suruh, Dongko, Panggul, Tugu	Kementerian PU
	2.1.5 Pelabuhan Umum		
	2. Pembangunan Pelabuhan Umum	Kecamatan Watulimo	Kementerian Perhubungan
	2.2 Sistem Jaringan Prasarana Energi		
	2. Pengembangan Jaringan Listrik Tenaga Surya	Kecamatan Suruh, Pule, Munjungan, Panggul, Dongko dan Kampak	PLN
	2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan		
	2.5.1 Persampahan		
	1. Pengembangan TPST	Kecamatan Suruh dan Kampak	
	3. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPA	Kecamatan Bendungan	Dinas LH
	2.5.2 Sistem Sanitasi		
	3, Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja	Kecamatan Suruh dan Kampak	Dinas PUPR
	2.5.3 Sistem Drainase		
	3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk drainase	Tersebar	Dishub PKP

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	2.5.4 Jaringan Air Minum ke Kelompok Pengguna		
	2. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan	Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari, Pogalan, Durenan, Karangan, Watulimo, Panggul, Bendungan, Suruh, Pule, Munjungan	PDAM dan Dishub PKP
	2.5.5 Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana		
	1. Pemeliharaan Jalur Evakuasi	Tersebar	Dinas PUPR, BPBD
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**		
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**		
	1.2 Kawasan Perlindungan Setempat		
	1.2.4 RTH Perkotaan		
	Perkembangan RTH Perkotaan	Kawasan Perkotaan	
	1.5 Kawasan Lindung Geologi		
	1.5.1 Kawasan Karst Kelas 1		
	1. Perlindungan terhadap kawasan karst	Kecamatan Bendungan, Gandusari, Kampak, Dongko, Karangan, Munjungan, Panggul, Pogalan, Suruh, Trenggalek, Tugu, Watulimo	Dinas Komidag, Bapperida, Dinas PUPR,
	2. Pengendalian kawasan pariwisata di kawasan karst		
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**		
	2.3 Peruntukan Pertanian		
	2.3.1 Tanaman Pangan		
	2. Monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertapan
	4. Pengembangan lahan pertanian berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertapan, Masyarakat
	2.3.2 Hortikultura		
	5. Pengembangan sentra pertanian dan pariwisata agribisnis	Kecamatan Gandusari, Durenan, Karangan, Trenggalek	Dinas Pertapan, Dinas Parbud
	2.8 Peruntukan Pariwisata		
	2. Rencana Prioritas Pengembangan Pariwisata :		
	• Kawasan prioritas pengembangan wisata budaya/sejarah/religi	Desa Tasikmadu (Upacara Larung Semboyo), Desa Kamulan (Prasasti Kamulan), Desa Kerjo-Karangan (Tradisi Tiban), Desa Dongko (Jaranan Turonggo Yakso), Desa Salamwates - Dongko (Tradisi Baritan) dan Kelurahan Ngantru (Upacara Bersih DAM Bagong) Desa Semarum-Durenan (Makam Mbah Mesir), Desa Rejowinangun (Makan Nur	Dinas Paribud, Swasta

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Muzdalifah), Desa Ngulankulon (Makam Kanjeng Jimat)	
	2.10 Peruntukan Lainnya		
	1. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Seluruh Kecamatan	Dinas Komidag, Swasta
	2. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Seluruh kecamatan, Pulau Sekel dan Pulau Panehan	Kementerian Pertahanan dan POLRI
	3. Pengembangan kawasan pesisir	Kecamatan Watulimo, Munjungan dan Panggul, pulau-pulau kecil	Dispenak
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**		
2	**Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**		
	d. Perlindungan kawasan Lindung Karst	Kecamatan Bendungan, Dongko, Gandusari, Kampak, Karangan, Munjungan, Panggul, Pogalan, suruh, Trenggalek, Tugu, Watulimo	KLH
	f. Penyediaan RTH perkotaan	Perkotaan Kecamatan	KLH
3	**Kawasan Strategis Lainnya**		
	2. Pengendalian pembangunan sekitar jalur lintas selatan	Kecamatan Munjungan, Panggul, Watulimo	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Bapperida, Dishub PKP, Komidag, Dispenak

Sumber : Bappedalitbang dan Dinas PUPR, 2025

Adapun arahan program prioritas pada revisi RTRW Kabupaten Trenggalek yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah antara lain:

1. perlindungan Kawasan Karst;
2. peningkatan ketahanan bencana melalui integrasi green dan grey infrastructure;
3. pembangunan kolam retensi dan penerapan infrastruktur hijau-biru (green-blue infrastructure);
4. penyediaan aksesibilitas infrastruktur digital yang terintegrasi;
5. pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid);
6. pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/ micro-grid);
7. pengembangan desa mandiri energi yang berbasis energi alternatif yang terbarukan;
8. pengurangan emisi karbon sektor transportasi melalui transisi bertahap menuju pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan massal;
9. pengembangan sistem transportasi umum yang efisien dan ramah Lingkungan; dan
10. penerapan teknologi hijau dan energi terbarukan.

Selain mempedomani RTRW Kabupaten Trenggalek, pembangunan kewilayahan juga mempertimbangkan arahan pembangunan yang tercantum pada RPJMN. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat highlight intervensi yang ditetapkan untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Arah kebijakan melalui *highlight intervensi* pada RPJMN sebagai berikut.

Tabel III.7.

Sinkronisasi Arahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur terhadap Proyek Strategis Kabupaten Trenggalek

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi *RPJMN*	*Highlight* Indikasi Intervensi *RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR*	Proyek Strategis Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas	1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan daerah.	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Pengembangan dan revitalisasi jaringan irigasi pendukung swasembada pangan Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan Optimalisasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan Perlindungan petani (AUTP), peternak, dan nelayan Peningkatan produksi perkebunan Fasilitasi perijinan berusaha pertanian, perikanan, dan peternakan Percepatan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pengembangan energi alternatif biogas dari kotoran ternak sapi Optimalisasi fungsi RPH dan RPHU Reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian
	2. Pembangunan Bendungan Bagong		
	3. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) untuk meningkatkan hasil produksi.	Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	
	4. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani, termasuk pengembangan kawasan peternakan.	Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	
	5. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura untuk mendukung diversifikasi hasil pertanian.	Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	
	6. Pembangunan dan pemeliharaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air skala kecil, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian, peternakan, dan hortikultura (dengan luasan dan kewenangan lokal)	
	7. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui:	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), optimalisasi lahan, penggunaan pupuk organik, reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian	
	Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian;		
	Optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian;		
	Peningkatan penggunaan pupuk, pestisida, dan pakan organik.		
	Reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian		
	8. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui:	Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi (alsintan, benih, pestisida, pascapanen, mitigasi OPT, dll.)	
	Penyediaan dan perluasan akses alat mesin pertanian (alsintan) modern, benih dan bibit berkualitas, serta pupuk dan pestisida berkualitas;		
	Mitigasi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan kesehatan hewan;		
	Peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;		
	Peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.		
	9. Peningkatan manajemen usaha tani, termasuk:	Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta penguatan kelembagaan petani (poktan, gapoktan, koperasi)	
	Penguatan akses pasar dan pembiayaan usaha tani;		
	Perluasan akses asuransi usaha tani;		

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi *RPJMN*	*Highlight* Indikasi Intervensi *RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR*	Proyek Strategis Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek
	Pengendalian kepastian pasar melalui peningkatan literasi keuangan petani;		
	Penguatan kelembagaan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan);		
	Penguatan koperasi dan korporasi petani;		
	Penyediaan dana bergulir dan kredit lunak bagi petani;		
	Peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang;		
	Pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.		
	10. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka: Pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal; Peningkatan produktivitas pertanian; Penguatan implementasi hasil riset pertanian.	Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal	
Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur difokuskan pada **pemerataan pembangunan**	1. Penyediaan infrastruktur layanan dasar meliputi air baku, air minum, dan sanitasi; infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi; listrik perdesaan; serta rumah layak huni, termasuk peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan.	Penyediaan infrastruktur layanan dasar, mencakup air baku, air minum, sanitasi, jaringan transmigrasi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta penyediaan rumah layak huni, termasuk upaya peningkatan ketahanan infrastruktur dasar.	Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana dan MBR Penanganan Kawasan Kumuh Penanganan Banjir/Genangan Perkotaan Pembangunan dan Preservasi Jalan Antar Kecamatan Pengadaan Tanah Jalan Lintas Selatan (JLS) Peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Fasilitasi Program MBG
	2. Peningkatan ketahanan bencana melalui penguatan sistem peringatan dini dan infrastruktur tanggap darurat.	Penguatan ketahanan terhadap bencana melalui pembangunan sistem penanggulangan yang tangguh dan responsif.	
	3. Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur dan preservasi JLS di ruas Wonogiri–Pacitan–Trenggalek–Tulungagung, serta jalan ruas Ponorogo–Pacitan dan Ponorogo–Trenggalek untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur dan pemenuhan daya dukung ekonomi di sekitarnya, serta preservasi Jalan Lintas Selatan ruas Wonogiri–Pacitan–Trenggalek–Tulungagung dan ruas Ponorogo–Pacitan dan Ponorogo–Trenggalek.	
		Penyiapan pembangunan jalan Sirip Pansela yang menjadi Kewenangan Jalan Kabupaten dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi di sekitarnya	
		Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya	
	4. Pemberdayaan aktivitas ekonomi unggulan bernilai tinggi di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Pemberdayaan aktivitas ekonomi unggulan bernilai tinggi, terutama pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan.	
	5. Percepatan transformasi digital di kawasan afirmasi melalui:	Percepatan transformasi digital di kawasan afirmasi, melalui perluasan jaringan telekomunikasi dan akses	

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi *RPJMN*	*Highlight* Indikasi Intervensi *RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR*	Proyek Strategis Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek
	Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat	internet cepat, pengembangan SDM bidang TIK, digitalisasi masyarakat, serta peningkatan layanan penyiaran digital.	Pengentasan Kemiskinan Penguatan kesetaraan gender; perlindungan hak perempuan, anak dan disabilitas
	Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat		
	Perluasan layanan penyiaran digital		
	6. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif	Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan secara terarah dan berkelanjutan Preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan KediriBlitar	
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung	Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi.	Pelestarian sapi galekan berbasis wisata Pariwisata kolaboratif Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan Peningkatan investasi melalui Lelang Investasi Intensifikasi dan rehabilitasi hutan, lahan dan ekosistem pesisir micro forest (RTH) Pengelolaan sampah & Pembangunan TPST Regional Pembangunan IPLT (sanitasi aman) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Pengembangan Mobility Hub Pasar Pon
	Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung.	Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung.	
	Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.	Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.	
	Pengembangan input produksi serta sarana dan prasarana perikanan budidaya.	Pengembangan input produksi serta sarana dan prasarana perikanan budidaya.	
	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya serta revitalisasi tambak rakyat.	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya serta revitalisasi tambak rakyat.	
	Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan.	Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan.	
	Peningkatan kapasitas usaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan kapasitas usaha dan investasi di kelautan dan perikanan	
	Penguatan logistik dan sistem rantai dingin untuk mendukung produksi perikanan secara efisien dan berkelanjutan.	Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produksi perikanan	

1. **Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan**

Kabupaten Trenggalek merupakan bagian penting dari pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang difokuskan pada penguatan sektor agropolitan dan minapolitan. Arah kebijakan ini menekankan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan rakyat melalui modernisasi sistem produksi dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Pembangunan dan preservasi infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya ruas Trenggalek–Tulungagung–Ponorogo. Selaras dengan RPJMN 2025–2029, Trenggalek juga masuk dalam integrasi Kawasan Perkotaan Kediri Raya, melalui intervensi nasional pada preservasi jalan nasional Kediri–Tulungagung–Trenggalek yang bertujuan menekan biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan kawasan secara merata.

2. **Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru (Pacitan–Trenggalek–Tulungagung)**

Sebagai wilayah pesisir selatan, Trenggalek menjadi titik strategis dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Biru berkelanjutan. Arah kebijakan ini diarahkan pada revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi sebagai pusat aktivitas perikanan, penguatan rantai dingin, serta pengolahan hasil tangkap dan budidaya laut. RPJMN 2025–2029 mendukung strategi ini melalui intervensi penguatan jaringan jalan daerah di koridor Pacitan–Trenggalek–Tulungagung guna mempermudah akses ke pelabuhan, pasar, dan kawasan wisata pesisir. Tujuannya adalah memperkuat daya saing komoditas laut, memperluas pasar, serta mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil kelautan yang ramah lingkungan dan inklusif.

3. **Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas**

Trenggalek juga memiliki peran sentral dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi sebagai bagian dari kawasan strategis DAS Brantas Hulu. Kebijakan ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pelestarian Sub-DAS Lekso, serta penyelesaian Bendungan Bagong sebagai infrastruktur multifungsi untuk irigasi, pengendalian banjir, dan air baku. Dalam RPJMN 2025–2029, arah ini diperkuat melalui intervensi strategis pada pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS), sebagai sarana konektivitas antar sentra pertanian dan energi. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan wilayah, mempercepat distribusi hasil produksi, serta meningkatkan efisiensi logistik sektor pangan dan energi di wilayah selatan Jawa Timur.

4. Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu

Kabupaten Trenggalek termasuk dalam Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu yang menjadi sasaran prioritas pemerataan pembangunan. Fokusnya adalah penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, listrik desa, serta jalan lingkungan yang mendukung aksesibilitas wilayah tertinggal. Arah kebijakan juga mendorong penguatan kapasitas ekonomi perdesaan melalui pengembangan pertanian, kehutanan rakyat, dan perikanan budidaya. Dukungan dari RPJMN 2025–2029 hadir melalui intervensi penyambungan jaringan jalan dan pengembangan kawasan terluar berbasis transformasi digital. Dengan pendekatan ini, Trenggalek diharapkan menjadi contoh wilayah pegunungan yang inklusif, mandiri, dan terhubung secara fungsional dengan pusat pertumbuhan, tanpa kehilangan kearifan lokalnya.

Gambar III.13. Pelaksanaan Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Trenggalek



BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas perencanaan pendanaan pembangunan serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek dalam rangka merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025–2029. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Anggaran belanja daerah dialokasikan secara strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, yang mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Pagu indikatif menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan besaran dana yang tersedia untuk merancang dan mengimplementasikan program tahunan. Dalam proses penetapan target kinerja sektoral, aspek utama yang dipertimbangkan mencakup kapasitas fiskal daerah serta sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Melalui perencanaan yang sistematis, berbasis data, dan realistis terhadap kapasitas fiskal, pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berlangsung lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selanjutnya, arah pembangunan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan dan optimalisasi setiap program.

Sistem pendanaan yang terencana dan tertata dengan baik tidak hanya menjadi panduan teknis bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga menjamin bahwa arah kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, dan pelaksanaannya, Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel IV.1
Program Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					630.701.903.025		618.301.329.217		618.175.265.417		618.048.229.017		620.539.118.117	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					517.651.784.955		505.188.560.500		505.062.496.700		504.935.460.300		507.426.349.400	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	517.651.784.955	100	505.188.560.500	100	505.062.496.700	100	504.935.460.300	100	507.426.349.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	79,57	82,07	83,07		83,57		84,57		85,07		86,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					104.804.393.470		104.369.634.117		104.369.634.117		104.369.634.117		104.369.634.117	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	61,63	64,13	66,63	104.804.393.470	69,13	104.369.634.117	71,63	104.369.634.117	74,13	104.369.634.117	76,63	104.369.634.117	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	58,11	60,51	62,91		65,31		67,71		70,11		72,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	77,78	78,68	79,58		80,48		81,38		82,28		83,18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	70,73	72,23	73,73		75,23		76,73		78,23		79,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	70,4	71,4	72,4		73,4		74,4		75,4		76,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SD (Nilai)	74,16	75,16	76,16		77,16		78,16		79,16		80,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD (APS) (%)	82,25	83,7	85,15		86,6		88,05		89,5		90,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%)	99,18	99,46	99,74		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase anak usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal (APS) (%)	14,71	16,82	18,07		19,32		20,57		21,82		23,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	81,1	83,66	84,67		86,01		87,7		89,72		91,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	64,52	69,52	74,52	325.000.000	79,52	325.000.000	84,52	325.000.000	89,52	325.000.000	94,52	325.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					7.470.724.600		7.968.134.600		7.968.134.600		7.968.134.600		7.968.134.600	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (poin)	0,37	0,6	0,61	7.470.724.600	0,66	7.968.134.600	0,71	7.968.134.600	0,76	7.968.134.600	0,81	7.968.134.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	44,99	55,16	62,66		70,16		77,66		85,16		92,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	85,48	84,28	84,78		85,28		85,78		86,28		86,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin/ Rekomendasi Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui (%)	99,29	99,43	99,48	175.000.000	99,53	175.000.000	99,58	175.000.000	99,63	175.000.000	99,68	175.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	60,14	64,14	68,14	275.000.000	72,14	275.000.000	76,14	275.000.000	80,14	275.000.000	84,14	275.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					488.335.034.669		477.025.089.994		483.642.941.094		490.593.419.694		498.745.495.094	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					405.347.215.750		387.096.889.400		393.714.740.500		400.665.219.100		408.817.294.500	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	128.773.832.555	100	103.582.628.594	100	103.541.600.994	100	103.500.256.894	100	104.310.918.494	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	95,78	95,8	95,82		95,85		95,87		95,9		95,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah RSUD dr. Soedomo	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	69,4	69,8	80	196.462.827.773	85	203.066.213.568	90	206.724.424.287	95	208.724.424.287	100	211.724.424.287	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	100	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah RSUD Panggul	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	17.661.577.022	100	17.999.068.838	100	20.999.736.819	100	25.991.559.519	100	30.332.973.319	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	99,68	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Suruh	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pucanganak	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Rejowinangun	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Bendungan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Dongko	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	3.350.000.000	100	3.350.000.000	100	3.350.000.000	100	3.350.000.000	100	3.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Durenan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Gandusari	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.709.400.000	100	2.709.400.000	100	2.709.400.000	100	2.709.400.000	100	2.709.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Karanganyar	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pandean	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Baruharjo	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Kampak	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Karangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	3.597.578.400	100	3.597.578.400	100	3.597.578.400	100	3.597.578.400	100	3.597.578.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Munjungan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Panggul	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Bodag	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.592.000.000	100	2.592.000.000	100	2.592.000.000	100	2.592.000.000	100	2.592.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pogalan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Ngulankulon	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pule	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Trenggalek	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Tugu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Watulimo	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Slawe	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					76.509.264.876		82.014.109.594		82.014.109.594		82.014.109.594		82.014.109.594	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,66	84,85	85	52.226.762.319	90	58.816.070.879	93	58.816.070.879	94	58.816.070.879	95	58.816.070.879	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	51,9	55	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	31	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	33	40	47		54		61		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	73,93	71,91	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	87,5	88	89		90		90,5		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	12		12		11		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	11	10,9	10,8		10,7		10,6		10,5		10,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	94	94,1	94,2		94,3		94,4		94,5		94,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat lingkup UPT Instalasi Farmasi	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	95	95		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Suruh	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100	100	100	650.114.700	100	650.114.700	100	650.114.700	100	650.114.700	100	650.114.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	24	35	50		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	56	71		80		86		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	42	43	43		43		57		57		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	80,33	74,55	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,2	90	90,3		90,3		90,3		90,3		90,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	6,9	6,89	6,88		6,87		6,86		6,85		6,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	91,51	91,7	91,7		91,75		92		92,5		92,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	95	95		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pucanganak	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	72,16	73	75	437.778.980	78	437.778.980	80	437.778.980	84	437.778.980	86	437.778.980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	30	45	55		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	34	49		58		64		73		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	43	43	43		57		57		57		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	81,41	81,42	81,5		82		85		90		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	91,3	69,8	92,2		92,2		92,2		92,2		92,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	70	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	11,4	11,3	11,2		11,1		11		10,9		10,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	96,08	96,02	96,03		96,04		96,05		96,06		96,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Rejowinangun	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	74,93	74,95	75	568.332.180	80	568.332.180	85	568.332.180	89	568.332.180	90	568.332.180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	22	35	55		70		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	39	54		63		69		78		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	28	42	42		42		42		57		57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	74,47	56,5	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	80,2	70,8	86,7		90,1		90,1		90,1		90,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,3	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	13,3	13,2	13,1		13		12,9		12,8		12,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	98	98	98,1		98,2		98,4		98,5		98,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Bendungan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	75,71	75,75	76	794.183.832	80	801.083.832	85	801.083.832	87	801.083.832	90	801.083.832	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	32	45	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	30	45		54		60		69		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	37	50	50		62		62		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	68,93	68,94	69		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,4	85,9	85,7		90,1		90,1		93,1		93,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	87	88		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	15,8	15,5	15,3		15		14,8		14,5		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	92,52	94	94,4		94,55		94,65		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Dongko	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	82,21	47,03	50	664.982.764	55	672.598.764	60	672.598.764	65	672.598.764	70	672.598.764	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	21	40	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	38	53		62		68		77		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	40	40	60		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	76,54	74,91	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89	73,1	90,8		90,8		90,8		90,8		90,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,3		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	11,7	11	10,8		10,7		10,6		10,5		10,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	94,27	95,88	95,9		95,91		95,94		95,95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Durenan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	83,72	84	85	617.257.340	88	617.257.340	90	617.257.340	93	617.257.340	95	617.257.340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	27	35	60		70		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	50	65		74		80		89		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	43	43	43		57		57		57		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	78,03	54,08	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	91,6	84,7	93,1		94,2		94,2		94,2		94,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	9,5	9,49	9,48		9,47		9,46		9,45		9,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	97	97	97,1		97,2		97,4		97,5		97,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Gandusari	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	79,31	52,27	60	578.426.420	65	578.426.420	70	578.426.420	75	578.426.420	80	578.426.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	25	40	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	26	41		50		56		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	33	33	33		50		66		66		66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70,94	70,94	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	81,8	83	87,7		87,7		90,3		90,8		90,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	7,5	7,49	7,48		7,47		7,46		7,45		7,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	96,65	96,42	96,5		96,6		96,7		96,8		96,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pandean	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	78	79	80	565.396.786	82	578.080.144	86	578.080.144	88	578.080.144	90	578.080.144	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	30	45	60		70		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	38	53		62		68		77		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	40	40	40		40		40		60		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	68,61	62,78	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	88,7	90	94,2		94,2		95,6		95,6		95,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	3,5	3,49	3,48		3,47		3,46		3,45		3,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	96,29	97,6	97,7		98,13		98,15		98,15		98,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Karanganyar	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	74,73	74,9	75	463.867.680	80	463.867.680	85	463.867.680	88	463.867.680	90	463.867.680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	22	35	60		70		80		95		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	22	37		46		52		61		66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	60	60	60		60		60		60		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	58,34	61,3	62		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	91,8	50	91,1		92,1		92,1		92,1		92,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	8,4	8,39	8,38		8,37		8,36		8,35		8,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	97	97,1	97,2		97,3		97,4		97,5		97,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Baruharjo	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	78,87	79	80	483.347.000	83	483.347.000	85	483.347.000	88	483.347.000	90	483.347.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	27	35	55		70		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	24	38		47		53		62		67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	14	14	14		29		29		43		43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	78,99	64,34	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	80,9	84,7	88,5		90,2		90,2		90,2		90,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	21,5	21	20,5		20		19,5		19		18,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	93,64	92,6	92,61		92,62		92,63		92,64		92,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Kampak	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,81	77	78	779.350.564	80	779.350.564	84	779.350.564	88	779.350.564	90	779.350.564	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	8	30	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	27	42		51		57		66		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	28	28	42		42		42		57		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	86,89	76,38	77		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	92,5	92,5	92,6		94,5		94,6		95,4		95,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,6	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	5,5	5,49	5,48		5,47		5,46		5,45		5,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	90,85	91,95	92		92,1		92,15		92,2		92,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Karangan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	83,21	84	86	1.095.046.000	88	1.095.046.000	90	1.095.046.000	92	1.095.046.000	95	1.095.046.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	20	40	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	33	48		57		63		72		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25	25	33		33		42		42		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	58,34	66,26	67		70		70		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	82,7	61,6	89,9		89,9		90,2		90,2		90,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	8,2	8,19	8,18		8,17		8,16		8,15		8,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	92,61	94	94,16		94,17		94,18		94,19		94,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Munjungan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	73,14	74	75	798.672.500	78	798.672.500	80	798.672.500	84	798.672.500	88	798.672.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	13	30	50		70		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	16	31		40		46		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	18	27	36		36		36		36		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	60,23	60,25	60,5		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	91,3	66,2	91,3		91,3		92,3		92,3		92,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	9,7	9,69	9,68		9,67		9,66		9,65		9,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	91,3	89,52	90		90,1		90,2		90,3		90,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Panggul	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	77,49	77,75	80	707.326.000	81	707.326.000	82	707.326.000	83	707.326.000	84	707.326.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	21	35	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	17	32		41		47		56		61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	30	40	40		40		50		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	81,22	61,37	63		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	86,6	36,9	88,8		89,7		90,4		92,2		92,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	3,1	3,09	3,08		3,07		3,06		3,05		3,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	89,75	89,75	89,76		89,77		89,78		89,79		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Bodag	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,21	77	80	592.987.328	83	592.987.328	85	592.987.328	88	592.987.328	90	592.987.328	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	27	35	60		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	28	43		52		58		67		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	28	28	42		42		57		57		57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	71,47	62,42	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	86	61,4	89,9		90,1		91,1		91,1		91,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	33	32,5	32		31,5		31		30,5		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	86,87	88,92	88,93		88,94		88,95		88,96		88,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pogalan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	75,69	77	78	648.541.444	80	648.541.444	85	648.541.444	88	648.541.444	90	648.541.444	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	27	35	55		70		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	30	45		54		60		69		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	50	50	50		50		50		50		66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	79,5	61,24	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	85,2	59,9	87,8		87,8		90,5		90,5		90,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	9,2	9,15	9,1		9,05		9,04		9,03		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	95,6	95,7	95,71		95,72		95,73		95,74		95,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Ngulankulon	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	75	76	78	316.543.236	80	316.543.236	84	316.543.236	88	316.543.236	90	316.543.236	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	29	40	60		70		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	43	58		67		73		82		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25	25	25		25		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	63,88	50,55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	86,7	89	89,7		90,1		90,1		90,1		90,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	8,3	8,29	8,28		8,27		8,26		8,25		8,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	91,22	92	92,24		92,25		92,26		92,27		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pule	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	81,45	83	84	945.910.633	86	945.910.633	88	945.910.633	90	945.910.633	94	945.910.633	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	20	60	70		80		85		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	16	31		40		46		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	20	30		30		30		30		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	78,29	66,13	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	85,3	53,4	91,7		91,7		91,7		91,7		91,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	7,9	7,89	7,88		7,87		7,86		7,85		7,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	89,07	90	90,12		90,13		90,2		90,25		90,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Trenggalek	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100	100	100	713.409.250	100	713.409.250	100	713.409.250	100	713.409.250	100	713.409.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	90	90	90		90		90		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	48	63		72		78		87		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	50	66	66		66		66		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	86,11	60,11	60,5		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89	72,7	90,5		90,5		90,5		90,5		90,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	8,7	8,69	8,68		8,67		8,66		8,65		8,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	98	98	98,1		98,2		98,4		98,5		98,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Tugu	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	88,95	89	90	863.215.320	92	863.215.320	94	863.215.320	95	863.215.320	97	863.215.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	21	35	55		70		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	23	38		47		53		62		67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25	37	37		50		50		50		62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	69,91	69,95	70		72		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	93,2	78	93,2		93,2		93,2		93,2		93,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	8,6	8,59	8,58		8,57		8,56		8,55		8,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	98	98	98,1		98,2		98,4		98,5		98,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Watulimo	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	88,6	48,41	89	684.021.000	90	684.021.000	94	684.021.000	95	684.021.000	96	684.021.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	9	25	40		65		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	10	25		34		40		49		54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	60	60	60		60		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	61,23	51,55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	83,3	92	92,7		93,4		93,4		93,4		93,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	7,1	7,09	7,08		7,07		7,06		7,05		7,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	98	98,1	98,2		98,25		98,3		98,35		98,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Slawe	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	73,66	74	75	720.576.000	78	720.576.000	80	720.576.000	85	720.576.000	88	720.576.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	7	25	45		65		75		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	22	37		46		52		61		66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	28	28	43		43		43		43		57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70,73	70,75	70,8		71		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	90	86,1	90,1		90,1		92,1		92,1		92,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-	12	11,7		11,4		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,51	83	84		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	72,13	73	75		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	68,05	69	70		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	104,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	96,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	99,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	99,4	99,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	0,7	0,69		0,68		0,67		0,66		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	6,1	6,09	6,08		6,07		6,06		6,05		6,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	94,41	87,97	88		88,5		89		89,5		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat RSUD dr. Soedomo	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	2.652.715.600	100	1.658.293.200	100	1.658.293.200	100	1.658.293.200	100	1.658.293.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat RSUD Panggul	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan (%)	95,95	91,5	93	5.590.500.000	98	5.473.259.200	99	5.473.259.200	99	5.473.259.200	99	5.473.259.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.194.368.000		2.508.530.000		2.508.530.000		2.508.530.000		2.508.530.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	94,46	100	100	737.068.000	100	1.724.048.400	100	1.724.048.400	100	1.724.048.400	100	1.724.048.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	90,91	90,91	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	50	50,5	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	2,15	2,158	2,16		2,165		2,168		2,17		2,175		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan RSUD dr. Soedomo	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	-	-	60	182.300.000	60	588.361.200	60	588.361.200	60	588.361.200	60	588.361.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan RSUD Panggul	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	95	90	95	275.000.000	97	196.120.400	97	196.120.400	97	196.120.400	97	196.120.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					721.916.000		721.916.000		721.916.000		721.916.000		721.916.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	98,13	98,5	98,6	721.916.000	98,7	721.916.000	98,8	721.916.000	98,9	721.916.000	99	721.916.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi persyaratan perizinan (%)	86	87	88		89		90		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	87,8	87,89	87,9		88		88,3		88,6		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	87,5	87,89	87,9		88		88,3		88,6		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	90,12	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	71	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.562.270.043		4.683.645.000		4.683.645.000		4.683.645.000		4.683.645.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	64,5	65	66	4.385.968.000	68	4.511.694.315	70	4.511.694.315	72	4.511.694.315	74	4.511.694.315	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	8	11		15		20		26		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Suruh	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	7.666	7.666	78	7.616.000	80	7.616.000	82	7.616.000	84	7.616.000	86	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	17	22		25		28		30		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pucanganak	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	82,29	82,29	84	7.616.000	86	7.616.000	88	7.616.000	90	7.616.000	92	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	10	13		17		22		27		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Rejowinangun	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,29	74,29	76	7.615.240	78	7.615.240	80	7.615.240	82	7.615.240	84	7.615.240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	7	10		14		18		28		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Bendungan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	82,77	82,77	84	6.900.000	86	7.616.000	88	7.616.000	90	7.616.000	92	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	15	22		25		28		31		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Dongko	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	81,64	81,64	82	7.616.000	84	7.616.000	86	7.616.000	88	7.616.000	90	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	8		12		18		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Durenan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	50,59	50,59	52	7.616.000	54	7.616.000	56	7.616.000	58	7.616.000	60	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	9		13		18		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Gandusari	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	19,02	19,02	20	7.616.000	22	7.616.000	24	7.616.000	26	7.616.000	28	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	9		13		18		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Karanganyar	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	65,25	65,25	66	7.616.000	68	7.616.000	70	7.616.000	72	7.616.000	74	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	9		13		20		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pandean	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	70,84	70,84	72	12.683.358	74	7.616.000	76	7.616.000	78	7.616.000	80	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	7	10		13		18		25		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Baruharjo	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	40,73	40,73	42	9.641.000	44	9.641.000	46	9.641.000	48	9.641.000	50	9.641.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	8		13		17		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Kampak	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	88,07	88,07	90	10.766.000	92	10.766.000	94	10.766.000	96	10.766.000	98	10.766.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	9		13		19		25		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Karangan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	52	52	54	3.000.000	56	3.000.000	58	3.000.000	60	3.000.000	62	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	9	14		17		23		29		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Munjungan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	87,07	87,07	88	7.616.000	90	7.616.000	92	7.616.000	94	7.616.000	96	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	8		12		19		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Panggul	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,8	74,8	76	7.616.000	78	7.616.000	80	7.616.000	82	7.616.000	84	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	8	9		16		19		30		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Bodag	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	70,21	70,21	72	7.616.000	74	7.616.000	76	7.616.000	78	7.616.000	80	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	17	19		21		25		32		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pogalan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	54,87	54,87	56	8.366.000	58	8.366.000	60	8.366.000	62	8.366.000	64	8.366.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	9		14		19		26		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Ngulankulon	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	44,76	44,76	46	12.116.000	48	12.116.000	50	12.116.000	52	12.116.000	54	12.116.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	7	10		13		19		26		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pule	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	76,92	76,92	78	8.852.987	80	8.852.987	82	8.852.987	84	8.852.987	86	8.852.987	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	8		13		19		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Trenggalek	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	37,09	37,09	38	7.492.170	40	7.492.170	42	7.492.170	44	7.492.170	46	7.492.170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	9		14		17		23		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Tugu	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	48,85	48,85	50	5.093.288	52	5.093.288	54	5.093.288	56	5.093.288	58	5.093.288	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	7	10		14		19		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Watulimo	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	78,87	78,87	80	7.616.000	82	7.616.000	84	7.616.000	86	7.616.000	88	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	9		13		19		24		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Slawe	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	81,96	81,96	82	7.616.000	84	7.616.000	86	7.616.000	88	7.616.000	90	7.616.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	6	8		12		18		25		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					114.356.181.113		115.457.289.947		115.775.084.023		112.486.115.033		218.032.608.403	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.231.473.938		16.504.554.900		16.500.938.900		16.497.295.000		16.568.743.100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	20.231.473.938	100	16.504.554.900	100	16.500.938.900	100	16.497.295.000	100	16.568.743.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	99,69	99,7	99,71		99,72		99,73		99,74		99,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.081.864.585		3.660.291.200		3.660.291.200		3.660.291.200		3.660.291.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	57,99	58,27	58,55	7.081.864.585	58,83	3.660.291.200	59,11	3.660.291.200	59,39	3.660.291.200	59,67	3.660.291.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir (%)	34,21	34,47	34,73		34,99		35,25		35,51		35,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.054.735.386		1.767.313.500		1.767.313.500		1.767.313.500		1.767.313.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (%)	86,33	86,56	86,8	3.054.735.386	87,04	1.767.313.500	87,27	1.767.313.500	87,51	1.767.313.500	87,75	1.767.313.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.917.298.831		3.249.428.000		3.249.428.000		3.249.428.000		3.249.428.000	
Meningkatnya layanan persampahan Kabupaten	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST (%)	30,18	30,84	31,51	1.917.298.831	32,17	3.249.428.000	32,83	3.249.428.000	33,5	3.249.428.000	34,16	3.249.428.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.793.645.200		6.753.629.200		6.753.629.200		6.753.629.200		6.753.629.200	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0,19	7,99	8,83	6.793.645.200	9,68	6.753.629.200	10,53	6.753.629.200	11,37	6.753.629.200	12,22	6.753.629.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	84,66	84,83	85,03		85,23		85,43		85,63		85,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					12.470.000.000		1.645.540.000		1.645.540.000		1.645.540.000		1.645.540.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase luas genangan perkotaan yang tertangani (%)	6,9	21,9	36,9	12.470.000.000	51,9	1.645.540.000	66,9	1.645.540.000	81,9	1.645.540.000	100	1.645.540.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	5,35	6,01	6,41		6,81		7,21		7,61		8,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.711.864.585		2.755.773.300		2.755.773.300		2.755.773.300		2.755.773.300	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	50	55	60	4.711.864.585	65	2.755.773.300	70	2.755.773.300	75	2.755.773.300	80	2.755.773.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase jumlah SLF yang diterbitkan (%)	20	30	40		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					200.000.000		109.691.500		109.691.500		109.691.500		109.691.500	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	20	30	40	200.000.000	50	109.691.500	60	109.691.500	70	109.691.500	80	109.691.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					56.520.298.588		78.055.410.547		78.376.820.623		75.091.495.533		180.566.540.803	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan mantab (%)	72,04	70	73	56.520.298.588	74	78.055.410.547	75	78.376.820.623	76	75.091.495.533	77	180.566.540.803	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jembatan berfungsi baik (%)	99,57	97,89	98,19		98,49		98,79		99,09		99,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase fasilitasi penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	100	100	20	250.000.000	40	250.000.000	60	250.000.000	80	250.000.000	100	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.125.000.000		705.657.800		705.657.800		705.657.800		705.657.800	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR (%)	95	95,2	95,4	1.125.000.000	95,6	705.657.800	95,8	705.657.800	96	705.657.800	96,2	705.657.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					62.458.489.216		52.713.127.900		52.709.769.100		52.706.384.300		52.772.750.300	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.256.961.527		30.775.033.900		30.771.675.100		30.768.290.300		30.834.656.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	29.256.961.527	100	30.775.033.900	100	30.771.675.100	100	30.768.290.300	100	30.834.656.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,5	98,5	98,5		98,5		98,75		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					670.428.600		670.428.600		670.428.600		670.428.600		670.428.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	100	670.428.600	100	670.428.600	100	670.428.600	100	670.428.600	100	670.428.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					38.476.400		38.476.400		38.476.400		38.476.400		38.476.400	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani (%)	100	100	20	38.476.400	40	38.476.400	60	38.476.400	80	38.476.400	100	38.476.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan pengurangan kawasan kumuh	Persentase Perbaikan RTLH (%)	84,99	86,89	88,34	1.100.000.000	90,47	1.100.000.000	92,61	1.100.000.000	94,6	1.100.000.000	96,76	1.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67,3	68,8	69,95		71,64		73,33		74,91		76,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					31.392.622.689		20.129.189.000		20.129.189.000		20.129.189.000		20.129.189.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	60	63	65	31.392.622.689	67	20.129.189.000	70	20.129.189.000	73	20.129.189.000	75	20.129.189.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					16.524.416.605		15.374.291.000		15.371.166.200		15.368.017.300		15.429.759.300	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.409.623.945		13.402.280.200		13.399.155.400		13.396.006.500		13.457.748.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	9.246.336.939	100	9.161.266.600	100	9.159.113.400	100	9.156.943.600	100	9.199.488.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	86,27	86,5	86,6		86,7		86,8		86,9		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	5.163.287.006	100	4.241.013.600	100	4.240.042.000	100	4.239.062.900	100	4.258.260.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	96	96	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.788.360.888		1.567.649.300		1.567.649.300		1.567.649.300		1.567.649.300	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	37,04	50	60	596.120.296	65	500.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	80	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	1.192.240.592	100	1.067.649.300	100	1.067.649.300	100	1.067.649.300	100	1.067.649.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase penyelenggaraan Trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					226.431.772		260.066.800		260.066.800		260.066.800		260.066.800	
Meningkatnya kualitas layanan dan penanganan pada pra, saat dan pasca bencana	% desa tangguh bencana (%)	34,39	36,94	39,49	226.431.772	42,04	260.066.800	44,59	260.066.800	47,13	260.066.800	49,68	260.066.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	-	-	-		25		50		75		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					100.000.000		144.294.700		144.294.700		144.294.700		144.294.700	
Meningkatnya layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	100.000.000	100	144.294.700	100	144.294.700	100	144.294.700	100	144.294.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	41,4	44,59	47,77		50,96		54,14		57,32		60,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	99,04	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					14.977.292.363		14.648.247.400		14.646.980.200		14.645.703.300		14.670.739.900	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.361.062.363		5.872.739.000		5.871.471.800		5.870.194.900		5.895.231.500	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	6.361.062.363	100	5.872.739.000	100	5.871.471.800	100	5.870.194.900	100	5.895.231.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	96,47	96,22	95,97		95,72		95,47		95,22		94,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					291.350.000		271.871.100		271.871.100		271.871.100		271.871.100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100	291.350.000	100	271.871.100	100	271.871.100	100	271.871.100	100	271.871.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	27,73	28,09	28,44		28,79		36,24		36,6		36,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					1.860.000		1.860.000		1.860.000		1.860.000		1.860.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	100	100	100	1.860.000	100	1.860.000	100	1.860.000	100	1.860.000	100	1.860.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.853.020.000		2.889.790.800		2.889.790.800		2.889.790.800		2.889.790.800	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	2.853.020.000	100	2.889.790.800	100	2.889.790.800	100	2.889.790.800	100	2.889.790.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	91,62	92,16	92,7		93,24		93,78		94,32		94,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.950.000.000		5.050.838.700		5.050.838.700		5.050.838.700		5.050.838.700	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	5,6	5,66	5,73	4.950.000.000	5,79	5.050.838.700	5,86	5.050.838.700	5,92	5.050.838.700	5,98	5.050.838.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	87,5	87,65	87,78		87,89		88		88,1		88,18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	99,53	99,54	99,55		99,55		99,56		99,57		99,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	84,69	84,72	84,75		84,78		84,81		84,84		84,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					495.000.000		509.817.800		509.817.800		509.817.800		509.817.800	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	495.000.000	100	509.817.800	100	509.817.800	100	509.817.800	100	509.817.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					25.000.000		51.330.000		51.330.000		51.330.000		51.330.000	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	25.000.000	100	51.330.000	100	51.330.000	100	51.330.000	100	51.330.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.760.862.190		8.421.932.100		8.421.286.700		8.419.632.500		8.442.262.500	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.419.206.190		5.113.703.300		5.112.557.900		5.111.403.700		5.134.033.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	5.419.206.190	100	5.113.703.300	100	5.112.557.900	100	5.111.403.700	100	5.134.033.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		0		500.000		0		0	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang dapat disusun (%)	0	0	0	0	0	0	100	500.000	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					941.656.000		853.680.700		853.680.700		853.680.700		853.680.700	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n (%)	0,00026	0,05	0,069	941.656.000	0,091	853.680.700	0,112	853.680.700	0,134	853.680.700	0,155	853.680.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					175.000.000		158.378.100		158.378.100		158.378.100		158.378.100	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	44,81	44,9	45	175.000.000	45,1	158.378.100	45,15	158.378.100	45,2	158.378.100	45,25	158.378.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.225.000.000		2.296.170.000		2.296.170.000		2.296.170.000		2.296.170.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial ()	850	1.000	1.000	2.225.000.000	1.000	2.296.170.000	1.000	2.296.170.000	1.000	2.296.170.000	1.000	2.296.170.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					554.510.837		642.138.700		642.138.700		642.138.700		642.138.700	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					60.000.000		75.000.800		75.000.800		75.000.800		75.000.800	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	7,14	7,15	7,16	60.000.000	7,17	75.000.800	7,18	75.000.800	7,19	75.000.800	7,2	75.000.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	70,27	70,77	71,27		71,77		72,27		72,77		73,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					166.942.267		166.942.200		166.942.200		166.942.200		166.942.200	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	166.942.267	100	166.942.200	100	166.942.200	100	166.942.200	100	166.942.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					10.000.000		27.162.300		27.162.300		27.162.300		27.162.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100	100	100	10.000.000	100	27.162.300	100	27.162.300	100	27.162.300	100	27.162.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					40.000.000		56.263.100		56.263.100		56.263.100		56.263.100	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) (poin)	760	800	810	40.000.000	825	56.263.100	850	56.263.100	900	56.263.100	905	56.263.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					277.568.570		316.770.300		316.770.300		316.770.300		316.770.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	277.568.570	100	316.770.300	100	316.770.300	100	316.770.300	100	316.770.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					571.074.738		416.074.700		416.074.700		416.074.700		416.074.700	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					165.045.238		205.045.200		205.045.200		205.045.200		205.045.200	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%)	100	100	100	165.045.238	100	205.045.200	100	205.045.200	100	205.045.200	100	205.045.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					307.300.800		112.300.800		112.300.800		112.300.800		112.300.800	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	307.300.800	100	112.300.800	100	112.300.800	100	112.300.800	100	112.300.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	88,6	88,6	88,75		88,9		89,05		89,2		89,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					53.975.500		53.975.500		53.975.500		53.975.500		53.975.500	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1,27	1,27	1,27	53.975.500	1,27	53.975.500	1,27	53.975.500	0,64	53.975.500	0,64	53.975.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					44.753.200		44.753.200		44.753.200		44.753.200		44.753.200	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	86,67	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					7.086.864.585		17.737.795.800		17.737.795.800		17.737.795.800		17.737.795.800	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					586.864.585		731.082.900		731.082.900		731.082.900		731.082.900	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	21,43	42,86	64,29	586.864.585	70	731.082.900	75	731.082.900	80	731.082.900	85	731.082.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					4.500.000.000		15.813.573.300		15.813.573.300		15.813.573.300		15.813.573.300	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100	100	4.500.000.000	100	15.813.573.300	100	15.813.573.300	100	15.813.573.300	100	15.813.573.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					1.000.000.000		429.250.700		429.250.700		429.250.700		429.250.700	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Luas Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang bersertifikat hak (%)	16,67	33,33	50	1.000.000.000	66,67	429.250.700	75	429.250.700	80	429.250.700	85	429.250.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					1.000.000.000		763.888.900		763.888.900		763.888.900		763.888.900	
Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD (%)	28,02	39,61	55,88	1.000.000.000	55,88	763.888.900	85,54	763.888.900	85,54	763.888.900	100	763.888.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.614.467.732		15.388.565.900		15.386.443.000		15.384.303.800		15.426.249.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.172.467.732		9.205.719.600		9.203.596.700		9.201.457.500		9.243.402.700	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	15.172.467.732	100	9.205.719.600	100	9.203.596.700	100	9.201.457.500	100	9.243.402.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					75.000.000		1.082.028.700		1.082.028.700		1.082.028.700		1.082.028.700	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	75.000.000	100	1.082.028.700	100	1.082.028.700	100	1.082.028.700	100	1.082.028.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					602.479.923		550.507.500		550.507.500		550.507.500		550.507.500	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	15,47	16	32,8	602.479.923	49,6	550.507.500	66,4	550.507.500	83,2	550.507.500	100	550.507.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.125.000.000		3.026.796.700		3.026.796.700		3.026.796.700		3.026.796.700	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	3,16	3,18	3,2	2.125.000.000	3,22	3.026.796.700	3,25	3.026.796.700	3,27	3.026.796.700	3,29	3.026.796.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					7.000.000		6.162.800		6.162.800		6.162.800		6.162.800	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	100	7.000.000	100	6.162.800	100	6.162.800	100	6.162.800	100	6.162.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					65.020.077		54.531.400		54.531.400		54.531.400		54.531.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap persetujuan Lingkungan (%)	47	47	49	65.020.077	50	54.531.400	52	54.531.400	54	54.531.400	56	54.531.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					61.000.000		61.178.900		61.178.900		61.178.900		61.178.900	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada masyarakat (%)	30,54	40,57	49,68	61.000.000	60,63	61.178.900	70,66	61.178.900	80,69	61.178.900	90,72	61.178.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					126.000.000		119.301.300		119.301.300		119.301.300		119.301.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	16,87	20,18	23,48	126.000.000	26,79	119.301.300	30,1	119.301.300	33,41	119.301.300	36,71	119.301.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					7.500.000		7.523.700		7.523.700		7.523.700		7.523.700	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penanganan Pengaduan lingkungan hidup (%)	100	100	100	7.500.000	100	7.523.700	100	7.523.700	100	7.523.700	100	7.523.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.373.000.000		1.274.815.300		1.274.815.300		1.274.815.300		1.274.815.300	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	41,3	41,8	42,3	1.373.000.000	42,8	1.274.815.300	43,3	1.274.815.300	43,8	1.274.815.300	44,3	1.274.815.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.345.462.369		9.139.742.300		9.138.073.000		9.136.390.800		9.169.373.000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.935.013.169		8.749.293.100		8.747.623.800		8.745.941.600		8.778.923.800	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	8.935.013.169	100	8.749.293.100	100	8.747.623.800	100	8.745.941.600	100	8.778.923.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,43	94,03	95		95,5		96		96,5		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					236.555.400		236.555.400		236.555.400		236.555.400		236.555.400	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2,74	4	5	236.555.400	6	236.555.400	7	236.555.400	8	236.555.400	9	236.555.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	71,73	84,66	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					78.260.000		68.260.000		68.260.000		68.260.000		68.260.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	99,44	99,50	99,60	78.260.000	99,70	68.260.000	99,80	68.260.000	99,90	68.260.000	100	68.260.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					75.257.800		65.257.800		65.257.800		65.257.800		65.257.800	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	75.257.800	100	65.257.800	100	65.257.800	100	65.257.800	100	65.257.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					20.376.000		20.376.000		20.376.000		20.376.000		20.376.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	20.376.000	100	20.376.000	100	20.376.000	100	20.376.000	100	20.376.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					9.513.365.386		9.047.550.100		9.046.383.400		9.045.207.700		9.068.259.500	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.451.085.386		5.158.680.200		5.157.513.500		5.156.337.800		5.179.389.600	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	5.451.085.386	100	5.158.680.200	100	5.157.513.500	100	5.156.337.800	100	5.179.389.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	89,5	90	90,25		90,4		90,6		90,8		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					80.000.000		79.320.000		79.320.000		79.320.000		79.320.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	80.000.000	100	79.320.000	100	79.320.000	100	79.320.000	100	79.320.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pengesahan Batas Desa (%)	3,95	7,89	30,92		40,79		47,37		53,95		60,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.432.280.000		3.374.344.500		3.374.344.500		3.374.344.500		3.374.344.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase Administrasi Desa yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu (%)	100	100	100	3.432.280.000	100	3.374.344.500	100	3.374.344.500	100	3.374.344.500	100	3.374.344.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					500.000.000		385.205.400		385.205.400		385.205.400		385.205.400	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	16,89	33,99	50,66	500.000.000	67,76	385.205.400	84,98	385.205.400	86,29	385.205.400	91,78	385.205.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase warga miskin usia produktif yang menjadi pelaku usaha baru (%)	7,26	9,14	9,74		10,06		10,69		11		11,36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.690.933.470		10.609.481.200		10.609.481.200		10.609.481.200		10.609.481.200	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					407.020.879		411.147.800		411.147.800		411.147.800		411.147.800	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) ()	20,9	20,8	20,7	407.020.879	20,5	411.147.800	20,3	411.147.800	20,1	411.147.800	20	411.147.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.303.712.591		6.218.133.400		6.218.133.400		6.218.133.400		6.218.133.400	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (%)	72,41	72,45	72,5	6.303.712.591	72,6	6.218.133.400	72,7	6.218.133.400	72,8	6.218.133.400	72,9	6.218.133.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) (%)	33,78	33,83	33,88		33,93		33,98		34,03		34,08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	8,23	8,21	8,2		8,15		8,1		8,05		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peserta Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) (%)	19,95	19,98	20		20,1		20,15		20,2		20,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.980.200.000		3.980.200.000		3.980.200.000		3.980.200.000		3.980.200.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	65,17	65,2	65,23	3.980.200.000	65,26	3.980.200.000	65,29	3.980.200.000	65,32	3.980.200.000	65,35	3.980.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.716.000.000		5.230.500.871		5.230.500.871		5.230.500.871		5.230.500.871	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.706.000.000		5.205.105.971		5.205.105.971		5.205.105.971		5.205.105.971	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Cakupan layanan angkutan darat (%)	42,43	43,92	44,51	5.675.000.000	45,1	5.079.505.971	45,7	5.079.505.971	46,29	5.079.505.971	46,88	5.079.505.971	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Integrasi Antar Moda (%)	-	-	33,33		33,33		66,67		66,67		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi (%)	37,14	40	42,86		45,71		51,43		57,14		62,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (%)	22,15	24,94	25,41		26,1		27,03		28,08		29,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase peningkatan pengguna angkutan umum (%)	26,58	10,65	22,37		35,15		49		63,92		79,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Tingkat kepatuhan operator dan awak angkutan sesuai SOP (%)	75	77	79		81		83		85		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Tingkat Kinerja Ruas Jalan (Rasio)	0,36	0,358	0,356		0,354		0,352		0,35		0,348		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat lingkup UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir (%)	92	96	97	31.000.000	98	125.600.000	100	125.600.000	100	125.600.000	100	125.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					10.000.000		25.394.900		25.394.900		25.394.900		25.394.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kegiatan promosi dan penjajakan kerja sama pengoperasian pelabuhan (%)	100	100	100	10.000.000	100	25.394.900	100	25.394.900	100	25.394.900	100	25.394.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.025.476.000		11.450.177.100		11.448.728.500		11.447.268.700		11.475.891.200	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.306.876.000		6.352.304.400		6.350.855.800		6.349.396.000		6.378.018.500	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	7.306.876.000	100	6.352.304.400	100	6.350.855.800	100	6.349.396.000	100	6.378.018.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,79	98,79	98,79		98,79		98,79		98,79		98,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.835.000.000		2.059.833.200		2.059.833.200		2.059.833.200		2.059.833.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	-	90	1.835.000.000	90	2.059.833.200	90	2.059.833.200	90	2.059.833.200	90	2.059.833.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.883.600.000		3.038.039.500		3.038.039.500		3.038.039.500		3.038.039.500	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi SPBE (Nilai)	4	4	2,4	2.883.600.000	2,6	3.038.039.500	2,8	3.038.039.500	3	3.038.039.500	3,2	3.038.039.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					11.874.153.838		11.465.404.200		11.462.959.500		11.460.495.900		11.508.799.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.202.395.046		10.737.631.800		10.735.187.100		10.732.723.500		10.781.027.300	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	99,53	100	100	11.202.395.046	100	10.737.631.800	100	10.735.187.100	100	10.732.723.500	100	10.781.027.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,33	98,33	98,33		98,33		98,33		98,33		98,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					1.906.800		1.906.800		1.906.800		1.906.800		1.906.800	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	6,08	0,33	0,35	1.906.800	0,38	1.906.800	0,41	1.906.800	0,43	1.906.800	0,46	1.906.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					28.900.000		31.757.500		31.757.500		31.757.500		31.757.500	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	55,43	32,42	33,14	28.900.000	33,76	31.757.500	34,38	31.757.500	35	31.757.500	35,61	31.757.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					7.816.000		7.816.000		7.816.000		7.816.000		7.816.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	22,75	5,15	3,44	7.816.000	3,97	7.816.000	4,51	7.816.000	5,06	7.816.000	5,61	7.816.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					35.000.000		32.077.700		32.077.700		32.077.700		32.077.700	
Meningkatnya kulaitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	73,93	4,3	10,31	35.000.000	4,32	32.077.700	4,34	32.077.700	4,36	32.077.700	4,39	32.077.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					180.700.000		258.700.000		258.700.000		258.700.000		258.700.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	25,59	16,49	16,84	180.700.000	17,27	258.700.000	17,71	258.700.000	18,15	258.700.000	18,6	258.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					172.435.992		217.042.500		217.042.500		217.042.500		217.042.500	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	17,92	0,21	0,21	172.435.992	0,21	217.042.500	0,21	217.042.500	0,21	217.042.500	0,21	217.042.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pertumbuhan Wirausaha (Pelaku Usaha)	110	40	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					245.000.000		178.471.900		178.471.900		178.471.900		178.471.900	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,63	0,68	0,7	245.000.000	0,72	178.471.900	0,74	178.471.900	0,76	178.471.900	0,78	178.471.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.004.244.631		4.771.287.800		4.770.265.600		4.769.235.500		4.789.432.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.643.244.631		4.397.656.300		4.396.634.100		4.395.604.000		4.415.800.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	4.643.244.631	100	4.397.656.300	100	4.396.634.100	100	4.395.604.000	100	4.415.800.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	96,26	96,26	96,26		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					27.000.000		27.384.800		27.384.800		27.384.800		27.384.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase masyarakat dan / atau investor yang memperoleh insentif dan / atau kemudahan investasi (%)	80	80	82	27.000.000	84	27.384.800	86	27.384.800	88	27.384.800	90	27.384.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					175.000.000		175.451.600		175.451.600		175.451.600		175.451.600	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Investor di Sektor Unggulan Daerah (%)	40	40	40	175.000.000	45	175.451.600	50	175.451.600	55	175.451.600	60	175.451.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					67.000.000		66.831.500		66.831.500		66.831.500		66.831.500	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	67.000.000	100	66.831.500	100	66.831.500	100	66.831.500	100	66.831.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					84.500.000		85.219.100		85.219.100		85.219.100		85.219.100	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	84.500.000	100	85.219.100	100	85.219.100	100	85.219.100	100	85.219.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					7.500.000		18.744.500		18.744.500		18.744.500		18.744.500	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan lnformasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	7.500.000	100	18.744.500	100	18.744.500	100	18.744.500	100	18.744.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					12.717.270.126		7.445.541.300		7.444.652.400		7.443.756.600		7.461.320.000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.523.960.943		3.849.392.800		3.848.503.900		3.847.608.100		3.865.171.500	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	-	-	100	5.523.960.943	100	3.849.392.800	100	3.848.503.900	100	3.847.608.100	100	3.865.171.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	-	-	81,67		84,67		85,17		85,67		86,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.142.500.000		73.409.600		73.409.600		73.409.600		73.409.600	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	1,42	1,82	2,22	1.142.500.000	2,62	73.409.600	3,02	73.409.600	3,42	73.409.600	3,82	73.409.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					5.340.809.183		2.880.291.900		2.880.291.900		2.880.291.900		2.880.291.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas (%)	0,1	0,2	0,3	5.340.809.183	0,4	2.880.291.900	0,5	2.880.291.900	0,6	2.880.291.900	0,7	2.880.291.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					710.000.000		642.447.000		642.447.000		642.447.000		642.447.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	52,14	52,14	53	710.000.000	54,5	642.447.000	55,1	642.447.000	55,6	642.447.000	56	642.447.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					130.000.000		135.363.000		135.363.000		135.363.000		135.363.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					130.000.000		135.363.000		135.363.000		135.363.000		135.363.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Cakupan penyelenggaraan statistik sektoral secara digital (%)	90	90,5	92	130.000.000	92,5	135.363.000	93	135.363.000	93,5	135.363.000	94	135.363.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					85.000.000		52.322.000		52.322.000		52.322.000		52.322.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					85.000.000		52.322.000		52.322.000		52.322.000		52.322.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	77,2	41,61	42,7	85.000.000	43,79	52.322.000	44,88	52.322.000	45,97	52.322.000	47,06	52.322.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					475.000.000		687.856.800		687.856.800		687.856.800		687.856.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					215.000.000		298.457.800		298.457.800		298.457.800		298.457.800	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya yang dikembangkan (%)	7,59	15,18	31,11	215.000.000	27,11	298.457.800	32,54	298.457.800	37,96	298.457.800	43,38	298.457.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					185.000.000		267.236.000		267.236.000		267.236.000		267.236.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	18,12	18,12	25,36	185.000.000	36,23	267.236.000	39,86	267.236.000	43,48	267.236.000	83,33	267.236.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					75.000.000		122.163.000		122.163.000		122.163.000		122.163.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	15,76	15,76	18,48	75.000.000	21,2	122.163.000	23,91	122.163.000	29,35	122.163.000	32,07	122.163.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					847.958.365		836.572.700		836.572.700		836.572.700		836.572.700	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					755.458.365		729.072.700		729.072.700		729.072.700		729.072.700	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	74,88	75	75,2	755.458.365	75,4	729.072.700	75,6	729.072.700	75,8	729.072.700	76	729.072.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					92.500.000		107.500.000		107.500.000		107.500.000		107.500.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	100	100	100	92.500.000	100	107.500.000	100	107.500.000	100	107.500.000	100	107.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					4.026.159.743		3.953.226.700		3.952.337.800		3.951.442.000		3.969.005.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.937.017.377		3.849.392.800		3.848.503.900		3.847.608.100		3.865.171.500	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	3.937.017.377	100	3.849.392.800	100	3.848.503.900	100	3.847.608.100	100	3.865.171.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	89,89	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					72.755.256		85.520.800		85.520.800		85.520.800		85.520.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	61,557	62	63	72.755.256	65	85.520.800	67	85.520.800	69	85.520.800	71	85.520.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					14.387.110		16.155.900		16.155.900		16.155.900		16.155.900	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	85,55	85,75	86	14.387.110	87	16.155.900	88	16.155.900	89	16.155.900	90	16.155.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					2.000.000		2.157.200		2.157.200		2.157.200		2.157.200	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	100	100	100	2.000.000	100	2.157.200	100	2.157.200	100	2.157.200	100	2.157.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.330.421.261		1.374.181.100		1.374.181.100		1.374.181.100		1.374.181.100	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					426.907.813		479.671.700		479.671.700		479.671.700		479.671.700	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.720,69	22.515,91	22.858,8	206.000.000	23.201,68	229.000.000	23.549,7	229.000.000	23.902,95	229.000.000	24.261,49	229.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan tangkap lingkup UPT Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.720,69	22.515,91	22.858,8	220.907.813	23.201,68	250.671.700	23.549,7	250.671.700	23.902,95	250.671.700	24.261,49	250.671.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					577.052.816		536.014.400		536.014.400		536.014.400		536.014.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.087,14	4.991,62	5.091,46	577.052.816	5.191,29	536.014.400	5.295,12	536.014.400	5.401,02	536.014.400	5.509,04	536.014.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					70.757.492		79.502.800		79.502.800		79.502.800		79.502.800	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	76	76	82,5	70.757.492	89	79.502.800	95,5	79.502.800	102	79.502.800	108,5	79.502.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					255.703.140		278.992.200		278.992.200		278.992.200		278.992.200	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	41,3	41,5	42	255.703.140	42,5	278.992.200	43	278.992.200	43,5	278.992.200	44	278.992.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					25.040.531.832		13.816.259.000		13.813.970.800		13.811.664.900		13.856.877.300	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.440.531.832		12.296.020.500		12.293.732.300		12.291.426.400		12.336.638.800	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	13.440.531.832	100	12.296.020.500	100	12.293.732.300	100	12.291.426.400	100	12.336.638.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	93,07	93,07	93,25		93,5		93,75		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					11.170.000.000		999.337.000		999.337.000		999.337.000		999.337.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase daya tarik destinasi dan usaha pariwisata yang terkelola (%)	0	18,2	18,9	11.170.000.000	19,9	999.337.000	20,5	999.337.000	22,5	999.337.000	100	999.337.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					200.000.000		210.733.300		210.733.300		210.733.300		210.733.300	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase pangsa pasar pariwisata Kabupaten Trenggalek (%)	1,41	1,51	1,61	200.000.000	1,62	210.733.300	1,72	210.733.300	1,82	210.733.300	1,92	210.733.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					120.000.000		159.942.400		159.942.400		159.942.400		159.942.400	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	16,7	33,3	50	120.000.000	66,7	159.942.400	83,3	159.942.400	100	159.942.400	100	159.942.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					110.000.000		150.225.800		150.225.800		150.225.800		150.225.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	16,3	32,61	110.000.000	49,22	150.225.800	66,3	150.225.800	84,47	150.225.800	100	150.225.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					54.831.619.456		49.415.714.000		49.406.282.900		49.396.778.900		49.583.125.800	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.667.876.728		39.702.032.700		39.692.601.600		39.683.097.600		39.869.444.500	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	91,62	100	100	23.632.304.288	100	25.631.478.147	100	25.625.331.447	100	25.619.137.247	100	25.740.589.547	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	54	54	54		54		54		54		54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan perikanan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	15.013.678.387	100	14.048.660.500	100	14.045.376.100	100	14.042.066.300	100	14.106.960.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	91,62	100	100	21.894.053	100	21.894.053	100	21.894.053	100	21.894.053	100	21.894.053	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	54	54	54		54		54		54		54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.356.814.385		2.958.618.300		2.958.618.300		2.958.618.300		2.958.618.300	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat) (Ton)	10.809,22	3.418,05	3.424,89	1.681.650.000	3.431,74	1.163.944.330	3.438,6	1.163.944.330	3.445,48	1.163.944.330	3.452,37	1.163.944.330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	475,67	475,67	476,62		477,57		478,53		479,49		480,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai) (Ton)	801,44	801,4	803		804,61		806,22		807,83		809,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ton)	88.175,99	11.869,23	11.892,97		11.916,75		11.940,59		11.964,47		11.988,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe) (Ton)	3.311,62	1.426,27	1.429,12		1.431,98		1.434,84		1.437,71		1.440,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis) (Ton)	24.295,9	2.947,54	2.953,44		2.959,34		2.965,26		2.971,19		2.977,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	1.434,53	308,83	309,45		310,07		310,69		311,31		311,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	1.069,32	1.069,32	1.074,67		1.080,04		1.085,44		1.090,87		1.096,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	8.421,39	8.421,39	8.438,23		8.455,11		8.472,02		8.488,96		8.505,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	364,67	616,83	618,06		619,3		622,4		625,51		628,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	1.237,72	1.237,72	1.262,47		1.287,72		1.313,48		1.339,75		1.366,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	179,01	179,01	180,8		182,61		184,43		186,28		188,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung) (Ton)	116.240,26	116.240,26	117.983,86		119.753,62		121.549,92		123.373,17		125.223,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai) (Ton)	1.697,11	1.697,11	1.714,08		1.731,22		1.748,53		1.766,02		1.783,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (Ton)	138.357,8	138.357,8	141.124,95		143.947,45		146.826,4		149.762,93		152.758,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu) (Ton)	179.774,82	179.774,82	183.370,31		187.037,72		190.778,47		194.594,04		198.485,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging) (Ton)	1.866,51	6.785	1.896,51	1.068.091.000	1.926,51	1.082.591.000	1.956,51	1.082.591.000	1.986,51	1.082.591.000	1.986,51	1.082.591.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Susu) (Ton)	3.776,41	5.108	3.796,41		3.816,41		3.836,41		3.856,41		3.856,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur) (Ton)	18.752,35	12.230	18.802,35		18.852,35		18.902,35		18.952,35		18.952,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan lingkup UPT Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Pemotongan Hewan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging) (Ton)	1.866,51	6.785	1.896,51	300.000.000	1.926,51	290.000.000	1.956,51	290.000.000	1.986,51	290.000.000	1.986,51	290.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Susu) (Ton)	3.776,41	5.108	3.796,41		3.816,41		3.836,41		3.856,41		3.856,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur) (Ton)	18.752,35	12.230	18.802,35		18.852,35		18.902,35		18.952,35		18.952,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	1.434,53	308,83	309,45	307.073.385	310,07	422.082.970	310,69	422.082.970	311,31	422.082.970	311,93	422.082.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	1.069,32	1.069,32	1.074,67		1.080,04		1.085,44		1.090,87		1.096,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	8.421,39	8.421,39	8.438,23		8.455,11		8.472,02		8.488,96		8.505,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	364,67	616,83	618,06		619,3		622,4		625,51		628,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	1.237,72	1.237,72	1.262,47		1.287,72		1.313,48		1.339,75		1.366,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	179,01	179,01	180,8		182,61		184,43		186,28		188,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					11.304.442.862		4.766.201.800		4.766.201.800		4.766.201.800		4.766.201.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	12.785	12.785	12.785	11.021.275.262	12.785	4.662.106.700	12.785	4.662.106.700	12.785	4.662.106.700	12.785	4.662.106.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik (meliputi semua non japrod yang di kelola dinas peternakan) (%)	100	100	100	283.167.600	100	104.095.100	100	104.095.100	100	104.095.100	100	104.095.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					169.928.181		165.096.800		165.096.800		165.096.800		165.096.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Unit)	3	3	3	151.024.300	3	150.096.800	3	150.096.800	3	150.096.800	3	150.096.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner lingkup UPT Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Unit)	3	3	3	18.903.881	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					149.051.300		149.051.300		149.051.300		149.051.300		149.051.300	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	149.051.300	100	149.051.300	100	149.051.300	100	149.051.300	100	149.051.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.183.506.000		1.674.713.100		1.674.713.100		1.674.713.100		1.674.713.100	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	1,27	1,27	1,91	1.183.506.000	2,55	1.674.713.100	3,18	1.674.713.100	3,82	1.674.713.100	4,46	1.674.713.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.362.230.386		1.925.196.700		1.925.196.700		1.925.196.700		1.925.196.700	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					3.420.000		3.420.000		3.420.000		3.420.000		3.420.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	6,09	7,32	7,32	3.420.000	7,32	3.420.000	7,32	3.420.000	7,32	3.420.000	7,32	3.420.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.970.000.000		1.360.093.500		1.360.093.500		1.360.093.500		1.360.093.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	4,35	4,35	4,35	1.970.000.000	4,35	1.360.093.500	4,35	1.360.093.500	4,35	1.360.093.500	4,35	1.360.093.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					210.047.186		417.547.100		417.547.100		417.547.100		417.547.100	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	11,87	11,79	11,74	210.047.186	11,69	417.547.100	11,64	417.547.100	11,59	417.547.100	11,54	417.547.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					57.800.000		23.172.900		23.172.900		23.172.900		23.172.900	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Milyar Rupiah) ()	139,81	140	140,5	57.800.000	141,5	23.172.900	143	23.172.900	145	23.172.900	147,5	23.172.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					120.963.200		120.963.200		120.963.200		120.963.200		120.963.200	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pelaku Usaha Teredukasi Metrologi Legal (%)	86,17	73,94	73,94	120.963.200	74,71	120.963.200	75,48	120.963.200	76,4	120.963.200	77,33	120.963.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					515.000.000		675.581.300		675.581.300		675.581.300		675.581.300	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					390.000.000		576.426.300		576.426.300		576.426.300		576.426.300	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	16,76	16,76	16,76	390.000.000	16,9	576.426.300	16,9	576.426.300	17,1	576.426.300	17,1	576.426.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					75.000.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	5,71	0,6	0,5	75.000.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	12,25	20	40	50.000.000	60	57.655.000	80	57.655.000	100	57.655.000	20	57.655.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					115.000.000		59.517.500		59.017.500		59.517.500		59.517.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					115.000.000		59.517.500		59.017.500		59.517.500		59.517.500	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan (%)	100	100	100	115.000.000	100	59.517.500	100	59.017.500	100	59.517.500	100	59.517.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					29.000.236.145		30.540.474.000		30.535.945.100		30.531.381.300		30.620.866.000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.078.236.145		25.938.072.900		25.933.544.000		25.928.980.200		26.018.464.900	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	25.078.236.145	100	25.938.072.900	100	25.933.544.000	100	25.928.980.200	100	26.018.464.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	59	60	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.709.000.000		3.194.101.100		3.194.101.100		3.194.101.100		3.194.101.100	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	90	90,5	91	284.000.000	91,5	344.000.000	92	344.000.000	92,5	344.000.000	93	344.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Nilai)	-	3,61	3,62		3,63		3,64		3,65		3,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	2.235.000.000	100	2.510.101.100	100	2.510.101.100	100	2.510.101.100	100	2.510.101.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang difasilitasi	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	91	92	93	190.000.000	94	340.000.000	95	340.000.000	96	340.000.000	96	340.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.213.000.000		1.408.300.000		1.408.300.000		1.408.300.000		1.408.300.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	760.000.000	100	824.300.000	100	824.300.000	100	824.300.000	100	824.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	Esensi	Esensi	Pro Aktif	245.000.000	Pro Aktif	265.500.000	Pro Aktif	265.500.000	Pro Aktif	265.500.000	Strategis	265.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100	100	100	208.000.000	100	318.500.000	100	318.500.000	100	318.500.000	100	318.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					50.075.676.273		54.770.400.100		58.769.304.400		60.768.200.200		60.863.611.316	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.725.981.290		30.748.516.800		30.747.421.100		30.746.316.900		30.767.966.400	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	30.725.981.290	100	30.748.516.800	100	30.747.421.100	100	30.746.316.900	100	30.767.966.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,84	98,85	98,84		98,85		98,85		98,85		98,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					19.349.694.983		24.021.883.300		28.021.883.300		30.021.883.300		30.095.644.916	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	10.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	60	65	67,5		70		72,5		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	9.349.694.983	100	9.021.883.300	100	13.021.883.300	100	15.021.883.300	100	15.095.644.916	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.565.895.758		8.923.282.200		8.921.732.000		8.920.169.900		9.450.798.500	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.035.253.562		7.088.204.900		7.086.654.700		7.085.092.600		7.115.721.200	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	7.035.253.562	100	7.088.204.900	100	7.086.654.700	100	7.085.092.600	100	7.115.721.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	91,58	91,58	91,58		91,59		91,6		91,61		91,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					545.642.196		817.459.200		817.459.200		817.459.200		1.317.459.200	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah (%)	100	100	100	545.642.196	100	817.459.200	100	817.459.200	100	817.459.200	100	1.317.459.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD (%)	99,31	99,31	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					985.000.000		1.017.618.100		1.017.618.100		1.017.618.100		1.017.618.100	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	280.000.000	100	339.206.033	100	339.206.033	100	339.206.033	100	339.206.033	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	464.000.000	100	339.206.034	100	339.206.034	100	339.206.034	100	339.206.034	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	241.000.000	100	339.206.033	100	339.206.033	100	339.206.033	100	339.206.033	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					315.437.721.782		313.009.779.300		313.007.314.700		313.004.831.100		313.053.527.700	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.568.325.020		11.404.047.600		11.401.583.000		11.399.099.400		11.447.796.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	15.568.325.020	100	11.404.047.600	100	11.401.583.000	100	11.399.099.400	100	11.447.796.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	89	89	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					296.613.359.949		297.737.532.500		297.737.532.500		297.737.532.500		297.737.532.500	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	34,77	25,35	30	679.823.200	32	751.000.000	33	751.000.000	34	751.000.000	35	751.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	40	43	46		43		40		37		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	118,08	56,57	40	295.723.536.749	65,93	296.750.532.500	3,91	296.750.532.500	3,57	296.750.532.500	3,7	296.750.532.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	96,43	96,44	96,45		96,46		96,47		96,48		96,49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	210.000.000	100	236.000.000	100	236.000.000	100	236.000.000	100	236.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.000.000.000		1.189.644.000		1.189.644.000		1.189.644.000		1.189.644.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset (Indeks)	-	54	59	1.000.000.000	64	1.189.644.000	69	1.189.644.000	74	1.189.644.000	79	1.189.644.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3,2	3,4	3,6		3,8		4		4,2		4,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.256.036.813		2.678.555.200		2.678.555.200		2.678.555.200		2.678.555.200	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	14,23	19,97	21,29	415.555.200	22,73	515.555.200	24,31	515.555.200	26,04	515.555.200	27,94	515.555.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	1.072.481.613	100	1.295.000.000	100	1.295.000.000	100	1.295.000.000	100	1.295.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	768.000.000	100	868.000.000	100	868.000.000	100	868.000.000	100	868.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.022.518.336		7.704.506.800		7.703.019.700		7.701.521.100		7.730.903.900	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.107.711.666		6.345.088.900		6.343.601.800		6.342.103.200		6.371.486.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	6.107.711.666	100	6.345.088.900	100	6.343.601.800	100	6.342.103.200	100	6.371.486.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	92,36	91,84	92		92,5		93		93,5		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					914.806.670		1.359.417.900		1.359.417.900		1.359.417.900		1.359.417.900	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	230.000.000	100	339.854.475	100	339.854.475	100	339.854.475	100	339.854.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	51,89	51,89	80	230.000.000	81	339.854.475	82	339.854.475	83	339.854.475	84	339.854.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	0	0	80	230.000.000	82	339.854.475	85	339.854.475	87	339.854.475	90	339.854.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	2,02	2,03	3	224.806.670	4	339.854.475	5	339.854.475	6	339.854.475	7	339.854.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					532.000.000		707.448.700		707.448.700		707.448.700		707.448.700	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					532.000.000		707.448.700		707.448.700		707.448.700		707.448.700	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	-	40	50	532.000.000	55	707.448.700	60	707.448.700	65	707.448.700	70	707.448.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	44,61	44,8	45		50		55		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	63,86	64	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	-	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					545.000.000		877.562.700		877.562.700		877.562.700		877.562.700	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					545.000.000		877.562.700		877.562.700		877.562.700		877.562.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100	545.000.000	100	877.562.700	100	877.562.700	100	877.562.700	100	877.562.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.759.121.119		11.486.658.000		11.484.907.400		11.483.143.300		11.517.732.100	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.226.404.988		9.297.063.600		9.295.313.000		9.293.548.900		9.328.137.700	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	11.226.404.988	100	9.297.063.600	100	9.295.313.000	100	9.293.548.900	100	9.328.137.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	92,66	93	93,25		93,5		94		94,5		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					762.000.000		1.062.354.400		1.062.354.400		1.062.354.400		1.062.354.400	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Rekomendasi Pengawasan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	92,4	92,5	92,6	762.000.000	92,7	1.062.354.400	92,8	1.062.354.400	92,9	1.062.354.400	93	1.062.354.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	92,67	92,72	92,77		92,82		92,87		92,92		92,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					770.716.131		1.127.240.000		1.127.240.000		1.127.240.000		1.127.240.000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko (Skor)	2,782	2,79	2,8	770.716.131	2,81	1.127.240.000	2,82	1.127.240.000	2,83	1.127.240.000	2,84	1.127.240.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Skor)	3	3,01	3,02		3,03		3,04		3,05		3,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					39.891.446.407		40.410.248.500		40.401.853.100		40.393.393.100		40.559.261.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.958.489.183		36.561.897.600		36.553.502.200		36.545.042.200		36.710.910.300	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Trenggalek	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	6.540.906.949	100	6.832.830.200	100	6.831.194.400	100	6.829.546.000	100	6.861.866.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	97,84	97,84	97,84		97,84		97,84		97,84		97,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kelurahan Surodakan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	97.186.000	100	97.186.000	100	97.186.000	100	97.186.000	100	97.186.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kelurahan Sumbergedong	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	99.098.000	100	99.098.000	100	99.098.000	100	99.098.000	100	99.098.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kelurahan Ngantru	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	69.379.000	100	69.379.000	100	69.379.000	100	69.379.000	100	69.379.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kelurahan Tamanan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	99.327.000	100	99.327.000	100	99.327.000	100	99.327.000	100	99.327.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kelurahan Kelutan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	99.125.200	100	96.126.000	100	96.126.000	100	96.126.000	100	96.126.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Panggul	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.773.996.113	100	2.590.369.400	100	2.589.763.400	100	2.589.152.700	100	2.601.126.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	99,69	98,14	98,14		98,14		98,14		98,14		98,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Pogalan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.010.247.498	100	2.265.742.500	100	2.265.218.600	100	2.264.690.700	100	2.275.041.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	97,03	97,04	97,04		97,04		97,04		97,04		97,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tugu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.322.591.160	100	2.376.445.200	100	2.375.902.500	100	2.375.355.600	100	2.386.077.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,26	98,27	98,27		98,27		98,27		98,27		98,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Watulimo	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.674.265.823	100	2.401.976.400	100	2.401.436.500	100	2.400.892.500	100	2.411.559.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,88	98,88	98,88		98,88		98,88		98,88		98,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Dongko	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.428.566.794	100	2.186.040.900	100	2.185.547.900	100	2.185.051.100	100	2.194.792.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	99,11	99,11	99,11		99,11		99,11		99,11		99,11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Durenan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.186.356.030	100	2.337.978.300	100	2.337.438.400	100	2.336.894.400	100	2.347.560.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	99,21	96,85	96,85		96,85		96,85		96,85		96,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Kampak	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.529.207.074	100	2.230.801.500	100	2.230.270.600	100	2.229.735.600	100	2.240.223.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	99,98	98,17	98,17		98,17		98,17		98,17		98,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Suruh	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.116.657.852	100	2.161.266.600	100	2.160.761.200	100	2.160.251.900	100	2.170.237.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	97,64	96,06	96,06		96,06		96,06		96,06		96,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Munjungan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.244.661.210	100	2.089.277.300	100	2.088.796.700	100	2.088.312.300	100	2.097.808.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	95,83	93,92	93,92		93,92		93,92		93,92		93,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Pule	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	1.845.279.010	100	1.823.381.000	100	1.822.968.200	100	1.822.552.200	100	1.830.707.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	93,21	93,92	94		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Gandusari	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	1.991.184.158	100	2.003.233.100	100	2.002.763.900	100	2.002.291.100	100	2.011.560.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,45	98,45	98,45		98,45		98,45		98,45		98,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Bendungan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.099.826.205	100	2.205.025.000	100	2.204.513.900	100	2.203.998.900	100	2.214.095.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	94,4	98,26	98,26		98,26		98,26		98,26		98,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Karangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.730.628.107	100	2.596.414.200	100	2.595.810.000	100	2.595.201.200	100	2.607.138.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					640.917.481		834.976.300		834.976.300		834.976.300		834.976.300	
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Trenggalek	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	185.226.000	100	104.504.800	100	104.504.800	100	104.504.800	100	104.504.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panggul	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	36.913.000	100	62.770.000	100	62.770.000	100	62.770.000	100	62.770.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Suruh	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	39.667.271	100	62.590.300	100	62.590.300	100	62.590.300	100	62.590.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Durenan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	33.511.912	100	60.472.800	100	60.472.800	100	60.472.800	100	60.472.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pogalan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	18.668.500	100	22.668.500	100	22.668.500	100	22.668.500	100	22.668.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Watulimo	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	44.064.393	100	70.672.300	100	70.672.300	100	70.672.300	100	70.672.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	29.022.016	100	52.525.200	100	52.525.200	100	52.525.200	100	52.525.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Dongko	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	32.000.000	100	53.185.100	100	53.185.100	100	53.185.100	100	53.185.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kampak	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	37.276.545	100	59.750.400	100	59.750.400	100	59.750.400	100	59.750.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Munjungan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	48.271.100	100	78.514.300	100	78.514.300	100	78.514.300	100	78.514.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pule	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	26.048.513	100	46.749.000	100	46.749.000	100	46.749.000	100	46.749.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Gandusari	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	27.000.000	100	57.302.700	100	57.302.700	100	57.302.700	100	57.302.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Bendungan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	51.750.631	100	72.373.300	100	72.373.300	100	72.373.300	100	72.373.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Karangan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	31.497.600	100	30.897.600	100	30.897.600	100	30.897.600	100	30.897.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.771.795.669		2.425.238.400		2.425.238.400		2.425.238.400		2.425.238.400	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Trenggalek	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	15.116.000	100	15.116.000	100	15.116.000	100	15.116.000	100	15.116.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Surodakan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	335.494.547	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sumbergedong	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	335.494.547	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngantru	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	335.494.547	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tamanan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	335.494.547	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kelutan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	335.494.548	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	100	471.148.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pogalan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	1.709.000	100	1.409.000	100	1.409.000	100	1.409.000	100	1.409.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Watulimo	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	16.430.846	100	5.190.000	100	5.190.000	100	5.190.000	100	5.190.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Suruh	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	2.624.985	100	1.193.100	100	1.193.100	100	1.193.100	100	1.193.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	4.981.792	100	5.190.000	100	5.190.000	100	5.190.000	100	5.190.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Dongko	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	5.000.000	100	3.314.300	100	3.314.300	100	3.314.300	100	3.314.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Panggul	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	6.540.000	100	5.190.000	100	5.190.000	100	5.190.000	100	5.190.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Durenan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	10.781.910	100	8.181.100	100	8.181.100	100	8.181.100	100	8.181.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kampak	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	2.039.200	100	2.039.200	100	2.039.200	100	2.039.200	100	2.039.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Munjungan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	4.154.500	100	3.154.500	100	3.154.500	100	3.154.500	100	3.154.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pule	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	7.556.700	100	9.156.700	100	9.156.700	100	9.156.700	100	9.156.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gandusari	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	8.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bendungan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	5.588.000	100	5.588.000	100	5.588.000	100	5.588.000	100	5.588.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Karangan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	3.800.000	100	1.772.700	100	1.772.700	100	1.772.700	100	1.772.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					368.757.121		442.499.300		442.499.300		442.499.300		442.499.300	
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Trenggalek	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	37.504.800	100	37.504.800	100	37.504.800	100	37.504.800	100	37.504.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Panggul	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	9.910.000	100	9.910.000	100	9.910.000	100	9.910.000	100	9.910.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kelurahan Surodakan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Suruh	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.356.350	100	5.356.300	100	5.356.300	100	5.356.300	100	5.356.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kelurahan Sumbergedong	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Durenan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	6.072.182	100	6.072.100	100	6.072.100	100	6.072.100	100	6.072.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kelurahan Ngantru	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pogalan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	11.438.500	100	20.438.500	100	20.438.500	100	20.438.500	100	20.438.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kelurahan Tamanan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Watulimo	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	32.565.795	100	59.677.700	100	59.677.700	100	59.677.700	100	59.677.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kelurahan Kelutan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	100	38.643.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Tugu	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.495.255	100	6.113.200	100	6.113.200	100	6.113.200	100	6.113.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Dongko	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	17.000.000	100	24.291.700	100	24.291.700	100	24.291.700	100	24.291.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Kampak	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	6.431.800	100	6.431.800	100	6.431.800	100	6.431.800	100	6.431.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Munjungan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	9.886.300	100	10.884.500	100	10.884.500	100	10.884.500	100	10.884.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pule	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	9.546.200	100	9.746.200	100	9.746.200	100	9.746.200	100	9.746.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Gandusari	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	7.227.760	100	7.590.300	100	7.590.300	100	7.590.300	100	7.590.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Bendungan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10.207.400	100	12.207.400	100	12.207.400	100	12.207.400	100	12.207.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Karangan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	6.896.479	100	33.056.500	100	33.056.500	100	33.056.500	100	33.056.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					151.486.953		145.636.900		145.636.900		145.636.900		145.636.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Trenggalek	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	45.360.000	100	45.360.000	100	45.360.000	100	45.360.000	100	45.360.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Panggul	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.820.000	100	3.820.000	100	3.820.000	100	3.820.000	100	3.820.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Suruh	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	2.386.350	100	2.338.600	100	2.338.600	100	2.338.600	100	2.338.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Durenan	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	6.474.398	100	6.474.300	100	6.474.300	100	6.474.300	100	6.474.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Pogalan	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	7.000.000	100	5.851.000	100	5.851.000	100	5.851.000	100	5.851.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Watulimo	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	11.595.394	100	13.968.900	100	13.968.900	100	13.968.900	100	13.968.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Tugu	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	10.768.130	100	7.981.700	100	7.981.700	100	7.981.700	100	7.981.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Dongko	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	7.810.781	100	7.509.800	100	7.509.800	100	7.509.800	100	7.509.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Kampak	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	6.692.000	100	6.692.000	100	6.692.000	100	6.692.000	100	6.692.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Munjungan	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	8.251.600	100	8.251.600	100	8.251.600	100	8.251.600	100	8.251.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Pule	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	10.983.500	100	11.683.500	100	11.683.500	100	11.683.500	100	11.683.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Gandusari	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	8.000.000	100	3.860.700	100	3.860.700	100	3.860.700	100	3.860.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Bendungan	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	10.795.600	100	10.795.600	100	10.795.600	100	10.795.600	100	10.795.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Karangan	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	11.549.200	100	11.049.200	100	11.049.200	100	11.049.200	100	11.049.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.542.180.224		7.995.365.900		7.994.475.100		97.993.577.500		8.011.177.100	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.728.626.843		3.851.805.100		3.850.914.300		3.850.016.700		3.867.616.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	3.728.626.843	100	3.851.805.100	100	3.850.914.300	100	3.850.016.700	100	3.867.616.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	96,01	96,02	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					959.688.381		801.463.400		801.463.400		801.463.400		801.463.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	959.688.381	100	801.463.400	100	801.463.400	100	801.463.400	100	801.463.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.892.504.000		1.810.427.300		1.810.427.300		91.810.427.300		1.810.427.300	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	19	20	21	1.892.504.000	22	1.810.427.300	22	1.810.427.300	23	91.810.427.300	24	1.810.427.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					835.000.000		53.607.300		53.607.300		53.607.300		53.607.300	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	39	39	40	835.000.000	41	53.607.300	42	53.607.300	43	53.607.300	44	53.607.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					500.000.000		327.346.400		327.346.400		327.346.400		327.346.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	500.000.000	100	327.346.400	100	327.346.400	100	327.346.400	100	327.346.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.626.361.000		1.150.716.400		1.150.716.400		1.150.716.400		1.150.716.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	1.626.361.000	100	1.150.716.400	100	1.150.716.400	100	1.150.716.400	100	1.150.716.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					2.003.958.719.980		1.954.643.084.529		1.965.398.234.905		2.060.877.857.215		2.088.716.538.101	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.2.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan indeks menengah.

4.2.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Selain Indikator Kinerja Utama, juga disusun Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah.

Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2030.

Tabel IV.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.	Indeks Kota Hijau	poin	62,1	62,6	63,1	63,6	64,1
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,92	74,27	74,61	74,95	75,4
3.	Indeks Infrastruktur	poin	52,95	55,56	58,17	60,78	63,39
4.	Tingkat Kemiskinan	(%)	9,35	8,94	8,63	8,11	7,09
5.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	4,74	4,75	4,76	4,77
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	87,45	87,5	87,55	87,6	87,65
7.	PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)		33,76	34,23	35,09	35,76	35,93
8.	Indeks Gini	Poin	0,348	0,347	0,345	0,339	0,333
9.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,78	93,94	94,12	94,28	94,46
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	3,83	3,81	3,79	3,77
11.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	135,21	131,99	128,92	126	123,19

4.2.1.2. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,94	138,59	135,21	131,99	128,92	126	123,19
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,27	74,97	75,05	75,13	75,21	75,29	75,37
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0,19	7,99	8,83	9,68	10,53	11,37	12,22
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	12,39	12,88	13,37	13,87	14,36	14,85	15,35
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	35,03	35,23	35,43	35,63	35,83	36,03	36,23
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	14,75	10,92	10,49	10,05	9,61	9,18	8,74
7	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	391,47	408,98	426,24	443,49	460,75	478,01	495,26
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	23,38	26,35	30,35	34,34	38,34	42,34	45

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
9	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	%	86,33	86,56	86,8	87,04	87,27	87,51	87,75
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	4,77
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,47	73,78	73,92	74,27	74,61	74,95	75,4
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	10,5	9,65	9,35	8,94	8,63	8,11	7,09
4	Indeks Gini	Poin	0,35	0,349	0,348	0,347	0,345	0,339	0,333
5	PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)		32,73	32,74	33,76	34,23	35,09	35,76	35,93
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,2	93,6	93,78	93,94	94,12	94,28	94,46
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,9	3,87	3,85	3,83	3,81	3,79	3,77
8	Indeks Pendidikan	poin	0,615	0,620	0,623	0,626	0,629	0,632	0,635
9	Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita)		10.872	11.038	11.203	11.369	11.534	11.700	11.866
10	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Poin	84,09	85,31	86,44	87,48	88,44	89,33	89,33

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	23,14	28,79	30,17	32,45	33,83	36,11	37,74
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,32	98,42	98,52	98,62	98,72	98,82	98,92
13	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	51,9	55	60	70	80	90	90
14	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	86	87	88	89	90	91	92
15	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persentase	89,4	89,87	90,3	90,72	91,15	91,57	91,57
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	4,65	6,38	6,45	6,51	6,58	6,65	6,71
17	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	15,92	26,11	33,76	42,68	51,59	60,51	63,69

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
18	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
19	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,06	59,37	59,88	60,39	60,89	61,39	61,39
20	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	12,8	12,41	12,04	11,68	11,35	11,03	11,03
21	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	62,39	63,39	64,39	65,39	66,39	67,39	68,39
22	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	poin	46,75	46,95	47,15	47,35	47,55	47,75	48
23	Persentase Pelindungan Kebudayaan	%	5,6	6	7,8	9,6	11,5	13,5	15,6
24	Persentase PPKS yang mandiri	%	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	8,6
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Indeks Kota Hijau	poin	61,5	61,6	62,1	62,6	63,1	63,6	64,1
2	Indeks Infrastruktur	poin	50,09	51,95	52,95	55,56	58,17	60,78	63,39
3	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	44,78	45	46,75	48,5	50,25	52	53,75
4	Persentase Desa Mandiri	%	58,55	71,7	80	86,4	94,6	100	100
5	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	4,12	4,11	4,1	4,07	4,01	3,95	3,88
6	Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn)	Poin	0,216	0,215	0,214	0,213	0,212	0,211	0,21
7	Indeks Konektivitas	Poin	0,766	0,772	0,777	0,783	0,789	0,794	0,8
8	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	6,68	6,69	6,7	6,71	6,72	6,73	6,74

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
9	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3
10	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	%	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
11	Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	5,76	5,79	5,82	5,85	5,88	5,91	5,94
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,62	1,64	1,69	1,74	1,78	1,83	1,88
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	74,99	75,5	76	76,5	77	77,5	78
14	Indeks Infrastruktur Permukiman pada wilayah kantong kemiskinan.	Poin	80,59	80,69	80,79	80,89	80,99	81,09	81,19
15	Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	%	100	100	20	40	60	80	100
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	80,08	80,24	80,4	80,56	80,72	80,88	81,05

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	18,94	18,95	18,96	18,97	18,98	18,99	19
18	Tingkat Inflasi	(%)	1,31	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
19	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	5,26	35,76	0,57	6,77	5,57	5,76	5,78
20	Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Milyar Rupiah	6.056,86	6.511,7	6.769,77	7.027,83	7.285,89	7.543,96	7.802,02
21	Nilai Ekspor Non Migas	Milyar Rupiah	139,81	140	140,5	141,5	143	145	147,5
22	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	%	11,48	11,79	11,74	11,69	11,64	11,59	11,54
23	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	2,13	2,19	2,23	2,27	2,3	2,34	2,38
24	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,1	96,13	96,15	96,17	96,19	96,21	96,23
25	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,4	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	70,27	70,77	71,27	71,77	72,27	72,77	73,27
27	Indeks Inovasi Daerah	Angka	69,98	70,68	71,39	72,12	72,84	73,58	74,32
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	87,35	87,4	87,45	87,5	87,55	87,6	87,65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
2	MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) KPK	Poin	94,18	94,3	94,45	94,6	94,75	94,9	95
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	58,61	62,37	66,12	69,88	73,63	77,39	81,14
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,62	3,69	3,73	3,76	3,8	3,83	3,85
5	Persentase Penyelesaian Konflik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Berakhlak	Poin	78,9	78,95	79	79,05	79,1	79,15	79,2
7	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	95,61	95,65	95,7	95,8	95,9	96	96,1
8	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75
9	Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan	Nilai	89,09	89,58	89,88	90,07	90,27	90,5	90,72
10	Indeks Reformasi Hukum	poin	96,74	96,74	96,8	97	97,25	97,5	98
11	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	7,94	7,96	7,98	8	8,02	8,04

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,78	12,86	12,95	13,03	13,11	13,2
3	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	89,84	90,09	90,34	90,59	90,84	91,09	91,34
4	Skor Literasi	Nilai	73,4	75,2	77	78,8	80,6	82,4	84,2
5	Skor Numerasi	Nilai	63,86	66,06	68,26	70,46	72,66	74,86	77,06
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,35	75,49	75,75	76,01	76,27	76,53	76,78
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	42,41	42	41,9	41,8	41,7	41,6	41,5
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	57,99	58,27	58,55	58,83	59,11	59,39	59,67
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	84,66	84,83	85,03	85,23	85,43	85,63	85,83

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR	%	95	95,2	95,4	95,6	95,8	96	96,2
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	67,3	68,8	69,95	71,64	73,33	74,91	76,62
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74
3	Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	%	93	93,5	94	94,5	95	96	97
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,85	57,85	58,35	58,85	59,35	59,85	60,35
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Kapita	32.066.846,38	32.176.221	32.193.628	32.210.046	32.225.556	32.240.232	32.254.138
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,463	0,417	0,395	0,383	0,372	0,361	0,349
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,27	66,77	67,27	67,77	68,27	68,77	69,27
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	83,17	83,37	83,57	83,77	83,97	84,17	84,37
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								
1	Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	%	28,02	39,61	55,88	55,88	85,54	85,54	100
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	804.464	854.464	904.464	954.464	1.004.464	1.054.464	1.104.464
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	99,58	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63	99,64
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	Persentase Desa Klasifikasi Cepat berkembang	%	59,21	65,79	71,05	76,32	81,58	86,84	92,11
2	Persentase Bumdes Kategori Maju	%	3,95	6,58	9,21	11,84	14,47	17,11	19,74
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	76,87	76,89	76,9	76,91	76,92	76,93	76,94
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,8	63,5	65,2	66,8	68,4	69,8	69,8
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
1	Indeks Aksesibilitas	Poin	33,91	36,29	37,59	38,97	41,39	43,84	46,25
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,22	4,22	1,83	1,93	2,03	2,13	2,23
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
1	Rasio Kewirausahaan	%	1,59	1,6	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
1	Realisasi Investasi	triliun rupiah	0,581	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	51,33	51,93	51,93	52,53	53,13	53,73	54,33
2	Indeks Partisipasi Olahraga		68,95	69,45	69,95	70,45	70,95	71,45	71,95
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,59	2,59	2,7	2,8	2,9	3	3,1
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
1	Nilai Aspek Keamanan SPBE	Angka	2	2	1,44	1,67	1,78	1,89	2
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
1	Persentase budaya yang dikembangkan	%	7,59	15,18	31,11	27,11	32,54	37,96	43,38
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	80,34	80,4	80,5	80,6	80,7	80,8	81
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,88	75	75,2	75,4	75,6	75,8	76
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		72,15	73	74	75	76	77	80
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		118,83	115	115,5	116	116,5	117	117,5
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)		106,84	105,5	105,7	105,9	106,1	106,3	106,5
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
1	Jumlah wisatawan	Orang	1,164,982	1,223,231	1,284,393	1,348,612	1,416,043	1,486,845	1,486,845
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	103,65	104,15	104,65	105,15	105,65	106,15	106,65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
2	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Indeks	101,95	101,96	102,06	102,16	102,26	102,36	102,46
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
1	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	%	36,93	0,14	0,49	1,21	2,28	3,71	5,5
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,42	19,43	19,45	19,46	19,47	19,49	19,5
BD	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
1	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	%	100	100	100	100	100	100	100
BE	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**								
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,96	4	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25
2	Nilai SAKIP	poin	73,19	74	75	76	77	78,5	80
BF	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**								
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	98,26	90,5	91	91,5	92	92,5	93
BG	**5.01 - PERENCANAAN**								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84	85	87	88	90	92	95
BH	**5.02 - KEUANGAN**								
1	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	%	66,82	65,76	65,53	64,14	63,27	62,44	61,58
BI	**5.03 - KEPEGAWAIAN**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	283	290	300	315	320	325	330
BJ	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		26,21	29	30	32	33	34	35
BK	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
BL	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**								
1	Indeks Integritas	Poin	74,26	74,76	75,26	75,76	76,5	77,25	78
BM	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
1	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7	7,05	7,1	7,15	7,2	7,25	7,3

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Trenggalek lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 ditentukan oleh komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Trenggalek serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bapperida.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Trenggalek maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
2) RKPERANGKAT DAERAH masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Trenggalek;
3. Seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Trenggalek berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
5. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
6. RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan Bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bapperida

Kabupaten Trenggalek dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

7. Bapperida Kabupaten Trenggalek melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program serta melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan
9. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terjadi perubahan asumsi atau faktor eksternal yang menyebabkan target IKU/IKD/Kinerja Program RKPD menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari target RPJMD, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap mempertahankan agregat pada akhir periode RPJMD.

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004

PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK